

Perubahan RKPD



2015



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 29);

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 Nomor 105);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Perubahan terhadap dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPd Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pergeseran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015 Sampai Dengan Triwulan II.
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2015.
- Bab VI : Penutup.
- (3) Uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi nasional dan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 42

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	3
1.3.1 Dasar Pertimbangan Evaluasi RKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II	3
1.3.2 Dasar Pertimbangan Asumsi Ekonomi Makro di DIY	5
1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Kebijakan Pusat	6
1.3.4 Dasar Pertimbangan Kebijakan di Daerah	7
1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
1.4.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	8
1.4.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pada APBD Murni Tahun 2015	8
1.4.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pada Perubahan APBD Tahun 2015	8
1.4.2 Proyeksi Inflasi	12
1.4.2.1 Proyeksi Inflasi Pada APBD Murni Tahun 2015 ..	12
1.4.2.2 Proyeksi Inflasi Pada Perubahan APBD Tahun 2015	13
1.4.3 Proyeksi ICOR	14
1.4.3.1 Proyeksi ICOR Pada APBD Murni Tahun 2015 ..	14
1.4.3.2 Proyeksi ICOR Pada Perubahan APBD Tahun 2015	14
1.4.4 Proyeksi Ketenagakerjaan	18
1.4.4.1 Proyeksi Ketenagakerjaan Pada APBD Murni Tahun 2015	18
1.4.4.2 Proyeksi Ketenagakerjaan Pada Perubahan APBD Tahun 2015	18
1.4.5 Proyeksi Kemiskinan	22
1.4.5.1 Proyeksi Kemiskinan Pada APBD Murni Tahun 2015	22

1.4.5.2	Proyeksi Kemiskinan Pada Perubahan APBD Tahun 2015	23
1.4.6	Proyeksi Ketimpangan Regional.....	26
1.4.6.1	Proyeksi Ketimpangan Regional Pada APBD Murni Tahun 2015	26
1.4.6.2	Proyeksi Ketimpangan Regional Pada Perubahan APBD Tahun 2015	26
1.4.7	Proyeksi Ketimpangan Pendapatan	28
1.4.7.1	Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Pada APBD Murni Tahun 2015	28
1.4.7.2	Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Pada Perubahan APBD Tahun 2015	29
1.5	Dasar Hukum Penyusunan	30
1.6	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	33
BAB 2	EVALUASI RKPD TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	35
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	35
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	35
2.1.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	35
2.1.1.2	Letak dan Kondisi Geografis	37
2.1.1.3	Topografi.....	39
2.1.1.4	Geologi	41
2.1.1.5	Hidrologi	45
2.1.1.6	Klimatologi.....	49
2.1.1.7	Penggunaan Lahan	50
2.1.1.8	Peruntukan Lahan	53
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah.....	54
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana.....	59
2.1.4	Demografi	60
2.1.5	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	67
2.1.5.1	Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	67
2.1.5.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	79
2.1.5.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	95
2.2	Aspek Pelayanan Umum	117
2.2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	117
2.2.1.1	Urusan Pendidikan	117
2.2.1.2	Urusan Kesehatan.....	128
2.2.1.3	Urusan Pekerjaan Umum	132
2.2.1.4	Urusan Perumahan	139
2.2.1.5	Urusan Penataan Ruang	143
2.2.1.6	Urusan Perencanaan Pembangunan	148
2.2.1.7	Urusan Perhubungan.....	150
2.2.1.8	Urusan Lingkungan Hidup.....	153
2.2.1.9	Urusan Pertanahan	161

2.2.1.10	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	163
2.2.1.11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	165
2.2.1.12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	173
2.2.1.13	Urusan Sosial	179
2.2.1.14	Urusan Ketenagakerjaan.....	182
2.2.1.15	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..	197
2.2.1.16	Urusan Penanaman Modal	199
2.2.1.17	Urusan Kebudayaan	201
2.2.1.18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	208
2.2.1.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri.....	210
2.2.1.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.....	211
2.2.1.21	Urusan Ketahanan Pangan	217
2.2.1.22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..	226
2.2.1.23	Urusan Statistik.....	229
2.2.1.24	Urusan Kearsipan	231
2.2.1.25	Urusan Komunikasi dan Informatika	234
2.2.1.26	Urusan Perpustakaan	236
2.2.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	243
2.2.2.1	Urusan Pertanian.....	243
2.2.2.2	Urusan Kehutanan	247
2.2.2.3	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.....	250
2.2.2.4	Urusan Pariwisata	252
2.2.2.5	Urusan Kelautan dan Perikanan	255
2.2.2.6	Urusan Perdagangan.....	257
2.2.2.7	Urusan Industri.....	258
2.2.2.8	Urusan Ketrasmigrasian	259
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	262
2.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	262
2.3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	266
2.3.2.1	Layanan Trans Jogja	266
2.3.2.2	Penyediaan Fiber Optik.....	268
2.3.2.3	Layanan Air Limbah Terpusat	269
2.3.2.4	Layanan Air Minum	272
2.3.3	Fokus Iklim Berinvestasi	273
2.3.3.1	Angka Kriminalitas.....	273
2.3.3.2	Jumlah Demonstrasi.....	275
2.3.3.3	Lama Perizinan	275
2.3.3.4	Pengenaan Pajak Daerah	276

2.3.3.5	Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha.....	277
2.3.4	Fokus Sumberdaya Manusia	277
2.4	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	279
2.5	Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD	349
2.5.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	349
2.5.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	354
2.5.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	354
2.5.2.2	Target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2015	354
2.5.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	359
2.5.3.1	Kebijakan Belanja Daerah	359
2.5.3.2	Kebijakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	359
2.5.4	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	362
2.5.4.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah	362
2.5.4.2	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	363
2.5.4.3	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	363
BAB 3	RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015	364
3.1	Prioritas Pembangunan Tahun 2015	364
3.2	Program Prioritas Pembangunan Pada RKPD Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2015.....	371
3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2015 ..	380
3.3.1	Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Non Keistimewaan.....	380
	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	382
	Dinas Kesehatan	408
	RS Grhasia	436
	Dinas PUP-ESDM	437
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	451
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	461
	Badan Lingkungan Hidup	475
	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.....	484
	Dinas Sosial.....	493
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	507
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM..	516
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	527
	Dinas Kebudayaan	534
	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ..	538
	Satuan Polisi Pamong Praja	545
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	557

Biro Tata Pemerintahan	565
Biro Hukum	575
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan.....	600
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam.....	605
Biro Administrasi Pembangunan	610
Biro Organisasi	617
Biro Umum, Humas, dan Protokol.....	622
Sekretariat DPRD	630
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	639
Badan Pendidikan dan Pelatihan	653
Inspektorat	660
Badan Kepegawaian Daerah	668
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	675
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	686
Dinas Pertanian	694
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	709
Dinas Pariwisata	724
Dinas Kelautan dan Perikanan.....	732
3.3.2 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan.....	748
BAB 4 PENUTUP	775

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perubahan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015.....9
Tabel 1.2	Proyeksi PDRB DIY ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)9
Tabel 1.3	Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), Tahun 2013-2017 (%) 10
Tabel 1.4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah) 11
Tabel 1.5	Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2014-2016 Pada APBD Murni Tahun 2015 12
Tabel 1.6	Proyeksi Inflasi DIY, Tahun 2015-2016 (%)..... 14
Tabel 1.7	Proyeksi Nilai ICOR DIY Tahun 2014-2016 Pada APBD Murni Tahun 2015 14
Tabel 1.8	ICOR Sektoral Metode Standar Lag=0, Lag=1, Lag=2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014 15
Tabel 1.9	Proyeksi ICOR DIY Tahun 2015-2017 17
Tabel 1.10	Proyeksi Ketenagakerjaan DIY, Tahun 2014-2016 Pada Penyusunan APBD Tahun 2015..... 18
Tabel 1.11	Angkatan Kerja DIY Tahun 2013 dan 2014 19
Tabel 1.12	Proyeksi Ketenagakerjaan DIY Tahun 2015-2017 Pada Perubahan APBD Tahun 2015 21
Tabel 1.13	Proyeksi Kemiskinan DIY Tahun 2014-2016 Pada APBD Murni Tahun 2015 22
Tabel 1.14	Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk di DIY Tahun 2015-2017 25
Tabel 1.15	Proyeksi Indeks Williamson DIY Tahun 2014-2019 Pada APBD Murni Tahun 2015 26
Tabel 1.16	Indeks Williamson DIY Tahun 2013 dan 2014 27
Tabel 1.17	Proyeksi Indeks Williamson DIY Tahun 2015-2017 28

Tabel 1.18	Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2014-2016.....	28
Tabel 1.19	Indeks Gini DIY Tahun 2013 dan 2014	29
Tabel 1.20	Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2015-2017.....	30
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012	37
Tabel 2.2	Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis	38
Tabel 2.3	Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY	38
Tabel 2.4	Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m ³)	47
Tabel 2.5	Tabel Rerata Sungai di DIY	48
Tabel 2.6	Luasan Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Realisasinya	51
Tabel 2.7	Luasan Penetapan Kawasan Budidaya Berdasarkan RTRW dan Realisasinya	52
Tabel 2.8	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2013	62
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013	63
Tabel 2.10	Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013.....	63
Tabel 2.11	Kabupaten Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013	65
Tabel 2.12	Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2009-2013.....	66
Tabel 2.13	IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013	66
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2009-2013	68
Tabel 2.15	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-2014.....	69
Tabel 2.16	Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2014	70
Tabel 2.17	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	71

Tabel 2.18	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%)	73
Tabel 2.19	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%)	73
Tabel 2.20	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014 .	76
Tabel 2.21	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014	76
Tabel 2.22	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014	77
Tabel 2.23	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2014.....	78
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013	80
Tabel 2.25	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2013	82
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2009/2010-2012/2013.....	83
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2009/2010-2012/2013	86
Tabel 2.28	Angka Kelulusan Menurut Jenjang di DIY Tahun 2009-2013	88
Tabel 2.29	Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013	90
Tabel 2.30	Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013	91
Tabel 2.31	Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013	95
Tabel 2.32	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2008-2014	96
Tabel 2.33	Perkembangan Aset-Aset Kebudayaan di DIY Tahun 2010-2014	97
Tabel 2.34	Perkembangan Sistem Budaya di DIY Tahun 2009-2014 ...	99
Tabel 2.35	Perkembangan Pelaku Budaya di DIY Tahun 2009-2014.	101

Tabel 2.36	Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014	102
Tabel 2.37	Kawasan Cagar Budaya yang Mendapat SK Terbaru	105
Tabel 2.38	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan Tahun 2009-2014	106
Tabel 2.39	Penanganan Cagar Budaya Tahun 2009-2014	107
Tabel 2.40	Daftar Museum di DIY	109
Tabel 2.41	Perkembangan Pemuda dan Olah Raga di DIY Tahun 2009-2014	112
Tabel 2.42	Rincian Perolehan Medali Kontingen DIY dalam PON Remaja.....	114
Tabel 2.43	Jumlah Lembaga dan Murid PAUD di DIY Tahun Ajaran 2014/2013.....	118
Tabel 2.44	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di DIY Tahun 2010-2014	119
Tabel 2.45	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DIY Tahun 2010-2014	120
Tabel 2.46	Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2014/2015	120
Tabel 2.47	Ketersediaan Sekolah Terjadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2014.....	121
Tabel 2.48	Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun Ajaran 2014/2015.....	122
Tabel 2.49	Rasio Guru Terhadap Murid di DIY Tahun 2010-2014....	123
Tabel 2.50	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata di DIY Tahun 2010-2014	124
Tabel 2.51	Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2010/2011-2014/2015	125
Tabel 2.52	Angka Lulusan Pendidikan Dasar Tahun 2009/2010-2013/2014.....	126
Tabel 2.53	Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014	126
Tabel 2.54	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1-D IV Per Jenjang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014.....	127

Tabel 2.55	Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per Satuan Balita DIY Tahun 2009-2013	128
Tabel 2.56	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012	129
Tabel 2.57	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2011-2013	129
Tabel 2.58	Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013	130
Tabel 2.59	Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2013	131
Tabel 2.60	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu DIY Tahun 2011-2013	131
Tabel 2.61	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009-2013	132
Tabel 2.62	Data Kondisi Eksisting Urusan Pekerjaan Umum DIY Tahun 2010-2014	133
Tabel 2.63	Filitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014.....	141
Tabel 2.64	Sebaran Rusunawa di DIY Tahun 2013.....	142
Tabel 2.65	Data Luasan Wilayah Kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.....	143
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tata Ruang	145
Tabel 2.67	Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.....	150
Tabel 2.68	Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional TransJogja Tahun 2009-2014	152
Tabel 2.69	Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet Tahun 2013	154
Tabel 2.70	Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-ruas Jalan Protokol di DIY Tahun 2013	158
Tabel 2.71	Kesenjangan IPG Terhadap IPM di DIY Tahun 2010-2012	168
Tabel 2.72	Capaian IPG Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2012	168

Tabel 2.73	Capaian IPG DIY, Tahun 2011-2012	169
Tabel 2.74	Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan Tahun 2014	170
Tabel 2.75	Rasio Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011- 2012	171
Tabel 2.76	Rasio Perempuan Pada Jabatan Struktural Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota/DIY, Tahun 2012.....	171
Tabel 2.77	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, Tahun 2009-2012	172
Tabel 2.78	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, Tahun 2010-2012	172
Tabel 2.79	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY Sampai dengan Tahun 2012	173
Tabel 2.80	Rasio Akseptor KB	175
Tabel 2.81	Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010-2013	177
Tabel 2.82	Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010-2013	177
Tabel 2.83	Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010-2014	178
Tabel 2.84	Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-104	179
Tabel 2.85	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012-2014	180
Tabel 2.86	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, Tahun 2010-2014	181
Tabel 2.87	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY Tahun 2010- 2014	184
Tabel 2.88	Penduduk Usia Kerja Menurut Desa/Kota di DIY Tahun 2014	186
Tabel 2.89	Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013	186
Tabel 2.90	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) Menurut Kelompok Umur di DIY, Tahun 2010-2014.....	190
Tabel 2.91	Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2014	193

Tabel 2.92	Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2013-2014.....	195
Tabel 2.93	Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2013-2014	195
Tabel 2.94	Pencari Kerja Yang Ditempatkan di DIY Tahun 2010-2014	196
Tabel 2.95	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2010-2014.....	197
Tabel 2.96	Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2010-2014	198
Tabel 2.97	Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013	199
Tabel 2.98	Perkembangan Investasi di DIY	200
Tabel 2.99	Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2010-2014	202
Tabel 2.100	Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014	202
Tabel 2.101	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, Tahun 2010-2014	203
Tabel 2.102	Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, Tahun 2010-2014	204
Tabel 2.103	Kawasan Cagar Budaya	206
Tabel 2.104	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalan Tahun 2010-2014	206
Tabel 2.105	Penanganan cagar Budaya Tahun 2010-2014	207
Tabel 2.106	Rekap Data Museum Anggota Barahmus di DIY	207
Tabel 2.107	Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2014	232
Tabel 2.108	Data Pengolahan Arsip Statis Hingga Tahun 2014.....	233
Tabel 2.109	Data Alih Media Hingga Tahun 2014.....	233
Tabel 2.110	Data Alih Media Hingga Tahun 2014.....	234
Tabel 2.111	Jumlah Sambungan Telepon di DIY Tahun 2007-2012	235
Tabel 2.112	jumlah Warnet di DIY Tahun 2010-2013	235
Tabel 2.113	Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY Tahun 2008-2012	236
Tabel 2.114	Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya.....	237
Tabel 2.115	Persentase Perpustakaan Desa Tiap-tiap Kabupaten/Kota Hingga Tahun 2014.....	238

Tabel 2.116	Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2010-2014 .	238
Tabel 2.117	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY	238
Tabel 2.118	Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2014	248
Tabel 2.119	Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2009-2013	248
Tabel 2.120	Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY Tahun 2010-2014	249
Tabel 2.121	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY	253
Tabel 2.122	Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2010-2014	257
Tabel 2.123	Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP Yang Terdaftar di DIY Tahun 2010-2014	257
Tabel 2.124	Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional Tahun 2009-2014	258
Tabel 2.125	Perkembangan IKM di DIY Tahun 2010-2014	258
Tabel 2.126	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013	261
Tabel 2.127	Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Tahun 2010-2014	262
Tabel 2.128	Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, Tahun 2009-2013	263
Tabel 2.129	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY Tahun 2010-2014	263
Tabel 2.130	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY Tahun 2010-2014	264
Tabel 2.131	Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor di DIY Tahun 2010-2014	265
Tabel 2.132	Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2009-2014	268
Tabel 2.133	Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di DIY Tahun 2009-2013	274
Tabel 2.134	Jumlah Demo di DIY Tahun 2008-2013	275
Tabel 2.135	Rata-rata Lama Pengurusan Izin Tahun 2013	276
Tabel 2.136	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di DIY Tahun 2013	277

Tabel 2.137	Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2012-2014	278
Tabel 2.138	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Angka Ketergantungan di DIY, Tahun 2013	278
Tabel 2.139	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015	280
Tabel 2.140	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014	284
Tabel 2.141	Rencana Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Pada APBD Murni Tahun 2015 dan Perubahan APBD Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta	350
Tabel 3.1	Jumlah Sasaran RTS Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha, Kabupaten/Kota Tahun 2014	368
Tabel 3.2	Kecamatan Titik Sasaran Kemiskinan di Kabupaten/Kota ..	370

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Perkembangan Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2008-2017	13
Gambar 1.2	Grafik ICOR DIY Tahun 2008-2017	17
Gambar 1.3	Grafik Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk yang Bekerja di DIY tahun 2008-2017	19
Gambar 1.4	Grafik Pengangguran Terbuka di DIY tahun 2008-2017 ...	20
Gambar 1.5	Grafik Jumlah Angkatan Kerja di DIY tahun 2008-2017 ...	21
Gambar 1.6	Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di DIY Tahun 2011-2014	23
Gambar 1.7	Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan di DIY dan Nasional Tahun 2009-2014	24
Gambar 1.8	Grafik Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2008-2017	25
Gambar 1.9	Grafik Hasil Perhitungan Angka Proyeksi Indeks Williamson di DIY Tahun 2008-2017.....	27
Gambar 1.10	Grafik Indeks Gini di DIY Tahun 2008-2017.....	30
Gambar 2.1	Komposisi Luas Wilayah DIY	37
Gambar 2.2	Peta Satuan Fisiografis DIY	41
Gambar 2.3	Peta Geologi DIY.....	44
Gambar 2.4	Peta Geologi DIY.....	45
Gambar 2.5	Peta Aliran Sungai DIY	46
Gambar 2.6	Peta Iklim di DIY	50
Gambar 2.7	Peta Pola Ruang DIY.....	53
Gambar 2.8	Peta Peruntukan Lahan DIY	54
Gambar 2.9	Peta Rawan Bencana DIY.....	60
Gambar 2.10	Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus Tahun 1971-2010.....	62

Gambar 2.11 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012	64
Gambar 2.12 Peta Kepadatan Penduduk di DIY	65
Gambar 2.13 Peta IPM di DIY	67
Gambar 2.14 Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2009-2014	69
Gambar 2.15 Indeks Keparahkan Kemiskinan DIY, 2009-2014.....	71
Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB DIY, Tahun 2009-2014.....	72
Gambar 2.17 Rasio Gini di DIY, Tahun 2009-2013.....	74
Gambar 2.18 Indeks Williamson DIY Tahun 2006-2014	75
Gambar 2.19 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional	78
Gambar 2.20 Representasi Masyarakat Belajar Baca di DIY	79
Gambar 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Tahun 2010-2013	80
Gambar 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2010-2013	81
Gambar 2.23 Anak Sekolah di DIY	82
Gambar 2.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2011-2013	90
Gambar 2.25 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2013	91
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2013	93
Gambar 2.27 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY Tahun 2008-2013	94
Gambar 2.28 Pagelaran Seni dan Budaya	95
Gambar 2.29 Tipikal Upacara Adat Merti Dusun	99
Gambar 2.30 Tipikal Festival Seni dan Budaya.....	104
Gambar 2.31 Tipikal Benda Cagar Budaya di DIY	107
Gambar 2.32 Museum Kayu Wanagama dan Museum Bahari	111
Gambar 2.33 Lokasi Youth Center Sebagai Percontohan Nasional	113
Gambar 2.34 Gelanggang Olah Raga Amongraga	113
Gambar 2.35 Pendidikan Anak Usia Dini di DIY	117
Gambar 2.36 Permukiman Padat di Kawasan Sungai Code	142

Gambar 2.37	Lalu Lintas di Yogyakarta	151
Gambar 2.38	Hutan Wonosadi DIY.....	158
Gambar 2.39	Grafik IPG Tahun 2010-2012	166
Gambar 2.40	Grafik Perbandingan IPM dan IPG Tahun 2010-2012.....	167
Gambar 2.41	Perkembangan TFR DIY	174
Gambar 2.42	Perkembangan Unmet Need DIY, Tahun 2010-2014.....	176
Gambar 2.43	Ketenagakerjaan Pengembangan Industri Tempe di DIY...	182
Gambar 2.44	Grafik Penduduk Usia Kerja di DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Tahun 2014.....	185
Gambar 2.45	Grafik Tingkat Paritispasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2014	188
Gambar 2.46	Perkembangan TPAK di DIY Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2014	189
Gambar 2.47	Grafik TPAK Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013	191
Gambar 2.48	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional Tahun 2010-2014 (%)	192
Gambar 2.49	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012-2014	194
Gambar 2.50	Pengembangan UKM di DIY	198
Gambar 2.51	Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2012 Per Kabupaten/Kota	200
Gambar 2.52	Festival Budaya di DIY	203
Gambar 2.53	Kejuaraan Taekwondo Dunia di DIY	208
Gambar 2.54	Pangan Lokal di DIY.....	217
Gambar 2.55	Grafik Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (Dalam Ton) Tahun 2009-2014	218
Gambar 2.56	Grafik Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba (Dalam Kilogram) Tahun 2009-2013	220
Gambar 2.57	Grafik Produksi Telur Unggas Tahun 2010-2014	220
Gambar 2.58	Grafik Produksi Daging Ayam Tahun 2010-2014	221
Gambar 2.59	Grafik Jumlah Energi di DIY Tahun 2010-2014	222
Gambar 2.60	Grafik Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2010-2014	222

Gambar 2.61	Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2010-2014	223
Gambar 2.62	Grafik Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2010-2014	224
Gambar 2.63	Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk DIY (Gram/Kapita/Hari) Tahun 2010-2014.....	225
Gambar 2.64	Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2010- 2014	226
Gambar 2.65	Tipikal Salinan Arsip Kuno diDIY.....	232
Gambar 2.66	GIS Perpustakaan DIY.....	239
Gambar 2.67	Aplikasi Jogja Library For All	240
Gambar 2.68	Jogja Library Center di Ruas Jalan Malioboro Nomor 175	241
Gambar 2.69	Perpustakaan Jogja Expo Center	242
Gambar 2.70	Grafik Luas Sawah di DIY Tahun 2010-2014	244
Gambar 2.71	Grafik Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu di DIY Tahun 2010-2014	245
Gambar 2.72	Grafik Populasi Sapi Potong, Kambing, Domba di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2010-2014	246
Gambar 2.73	Grafik Populasi Unggas di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2010-2014	247
Gambar 2.74	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY	252
Gambar 2.75	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY	253
Gambar 2.76	Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten/Kota	254
Gambar 2.77	Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2010-2014	255
Gambar 2.78	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2010-2014	256
Gambar 2.79	Grafik Nilai Tukar Petani di DIY, Tahun 2010-214.....	265
Gambar 2.80	Konsep Buy The Service.....	266
Gambar 2.81	Layanan TransJogja di DIY.....	267
Gambar 2.82	Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY	269
Gambar 2.83	Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Terpusat Per Kecamatan	270
Gambar 2.84	IPAL Sewon Bantul	270

Gambar 2.85	Peta Layanan Limbah Lateral Per Kecamatan di KPY	271
Gambar 2.86	Skematik SPAM Regional Sistem Bantar dan Kebonagung DIY	272
Gambar 3.1	Arah Pembangunan Kewilayahan DIY	367
Gambar 3.2	Porsi Rumah Tangga Sasaran Pada Kabupaten/Kota	368
Gambar 3.3	Kecamatan yang Menjadi Fokus Sasaran Pembangunan Lintas Sektor Tahun 2015	370

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Terkait dengan aturan tersebut diatas, maka didalam kondisi RKPD Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka RKPD Tahun 2015 dapat diubah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian didalam pencermatan perubahan RKPD Tahun 2015, yaitu terdapat sisa anggaran tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada saldo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat kebutuhan untuk melakukan pergeseran antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening, Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan), penambahan kegiatan baru (karena kebutuhan mendesak atau ada ketentuan dari pusat), penyesuaian komposisi anggaran kegiatan dengan Standar Belanja Daerah (ASB dan SHBJ), pergeseran hibah dan bantuan sosial (penambahan, pergeseran, dan pengurangan), kebutuhan untuk melaksanakan efisiensi kegiatan maupun efisiensi dari dokumen pelaksanaan anggaran, belanja wajib mengikat, serta kebutuhan lainnya. Hal ini sejalan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 didalam Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Perubahan RKPD Tahun 2015;
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015;
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015.

Lebih lanjut perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2015. Program dan kegiatan yang tertuang di APBD Tahun 2015 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 10) yang dijabarkan didalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 106).

1.2 Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2015;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Juni 2015. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD DIY Tahun Anggaran 2015, diantaranya :

1. Perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
3. Perubahan kebijakan pusat;
4. Proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.3.1 Dasar Pertimbangan Evaluasi RKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2015 (tahun lalu) yang dapat menjadi representasi sementara terhadap implementasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015, bahwa :

1. Kinerja Pemerintah Daerah yang tercermin didalam Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun pada beberapa sasaran strategis masih belum tercapai, yaitu :

- a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
- b. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
- c. Harapan hidup masyarakat meningkat;
- d. Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK);
- e. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
- f. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

Kisaran ketercapaian pada beberapa indikator tersebut diatas adalah pada angka antara 52,54% sampai dengan 99,10%.

- 2. Untuk beberapa program dan kegiatan yang capaiannya belum mencapai 100% hingga triwulan IV hal tersebut dikarenakan terbentur masalah waktu, kendala administrasi dan ada beberapa program yang tidak dilaksanakan karena perubahan regulasi.
- 3. Tingkat kinerja program yang dapat dikategorikan tinggi tersebut mencerminkan bahwa kinerja SKPD secara umum baik. Tercapainya target atau kinerja yang tinggi tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak ada program yang stagnasi. Artinya program-program dapat berjalan seperti yang direncanakan.
- 4. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pendukung pencapaian sasaran dan tujuan maka terdapat beberapa indikator yang didukung oleh lebih dari satu urusan. Dalam pelaksanaannya, urusan tersebut dilakukan oleh beberapa SKPD sehingga seringkali menimbulkan permasalahan dalam koordinasi. Kesulitan untuk melakukan koordinasi yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan capaian kinerja pada indikator urusan tersebut menjadi rendah.

Dapat dikatakan sebagai representasi Tahun 2015, mengingat program/kegiatan tersebut bersifat reguler dan didalam skema penganggaran yang terjadi, kasus tersebut dapat terjadi kembali pada Tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan ke II terdapat beberapa program yang belum terlihat angka capaiannya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator program dan kegiatan yang pengukurannya tidak dapat diterjemahkan dengan mekanisme triwulanan, melainkan hanya dapat diterjemahkan angka capainnya berdasarkan perhitungan angka capaian tahunan.

1.3.2 Dasar Pertimbangan Asumsi Ekonomi Makro di DIY

Asumsi ekonomi makro DIY berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Tahun 2015 menunjukkan perubahan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dari hasil analisis pertumbuhan PDRB, inflasi, serta ICOR. Kondisi demikian tentunya akan mempengaruhi kapasitas fiskal DIY dalam penganggaran dan belanja daerah ke depan. Kait dengan asumsi ekonomi makro tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta secara prinsip berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 adalah sebesar 5,83 persen dan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 dilakukan perhitungan kembali proyeksi angka pertumbuhan ekonomi dengan hasil bahwa tidak terdapat perubahan terhadap angka pertumbuhan ekonomi tersebut.
2. Kondisi inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan, dimana berdasarkan perhitungan angka inflasi pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 angka inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebesar 7,45 persen, sedangkan pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 adalah sebesar 5.16 persen.
3. Angka *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* berdasarkan hasil perhitungan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 adalah sebesar 4,15 persen, sedangkan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 adalah sebesar 5.37 persen.
4. Kondisi ketenagakerjaan Tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 diprediksikan penduduk bekerja akan mencapai 1.881.271 orang, sedangkan pengangguran terbuka adalah sejumlah 80.147 orang, serta jumlah angkatan kerja diproyeksikan sejumlah 1.961.418 orang. Lebih lanjut berdasarkan hasil perhitungan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksikan untuk penduduk bekerja akan mencapai 1.947.286

orang, sedangkan pengangguran terbuka diproyeksikan akan mencapai 48.664 orang, serta jumlah angkatan kerja diproyeksikan sejumlah 1.995.949 orang.

5. Angka Kemiskinan Tahun 2015 berdasarkan hasil perhitungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 mencapai 15,91 persen, sedangkan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 angka kemiskinan pada Tahun 2015 mengalami perubahan yang diprediksikan mencapai 14.52 persen.
6. Ketimpangan Regional Tahun 2015 berdasarkan hasil perhitungan pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 diproyeksikan sebesar 0,534 yang merupakan angka indeks williamson, sedangkan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 mengalami perubahan perhitungan angka indeks williamson menjadi sebesar 0,452.
7. Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015 pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 adalah sebesar 0,353 yang merupakan angka hasil perhitungan indeks gini di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 indeks gini di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan menjadi sebesar 0,485.

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Kebijakan Pusat

Dasar pertimbangan perubahan kebijakan pusat menjadi landasan didalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Perubahan kebijakan pusat dalam hal ini akan terkait dengan :

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

3. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
4. Sisa alokasi dana *earmarking* yang harus dibelanjakan oleh daerah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana yang bersumber dari cukai tembakau, serta dana yang bersumber dari pajak rokok.

1.3.4 Dasar Pertimbangan Kebijakan di Daerah

Dasar pertimbangan kebijakan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan :

1. Penyesuaian Belanja wajib dan mengikat pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Penyesuaian dengan kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Memenuhi kebutuhan penambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Mempersiapkan pemberlakuan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan mulai Tahun 2016.

1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif merupakan salah satu misi RPJMD 2012–2017. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanjut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan misi

tersebut berangkat dari keadaan perekonomian DIY terkini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi. Dalam kerangka perencanaan pembangunan pada konteks perubahan APBD Tahun 2015 tentunya pertimbangan kebijakan ekonomi daerah menjadi bagian penting didalam menentukan kemampuan pendapatan dan belanja pembangunan. Dalam hal ini perubahan asumsi ekonomi makro Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks tahun berjalan perlu untuk diidentifikasi yang akan mempengaruhi skema perubahan terhadap pendapatan, belanja, serta pembiayaan pembangunan didalam perubahan APBD Tahun 2015.

1.4.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

1.4.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pada APBD Murni Tahun 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 lalu laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 diperkirakan mampu tumbuh positif dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 meskipun masih berkisar dibawah 1 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran 5,68 persen, tahun 2015 pada kisaran 5,83 persen, dan untuk tahun 2016 pada kisaran 5,97 persen. Angka tersebut diambil dari hasil perhitungan angka optimis. Pertumbuhan positif ekonomi DIY tahun 2014-2016 didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: *pertama*, terus berjalannya pembangunan di DIY, baik di sektor publik maupun swasta; *kedua*, tren positif kondisi perekonomian DIY akan semakin menarik adanya investasi yang lebih besar lagi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); *ketiga*, semakin bertambahnya tenaga terampil dan pemanfaatan teknologi yang optimal berakibat pada meningkatnya kinerja sektor perindustrian; *keempat*, faktor proses politik lokal dan nasional sebagai dampak peralihan kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif sebagai hasil dari pemilu dan pilpres yang diharapkan membawa perubahan melalui visi dan misi pembangunan ekonomi yang lebih baik.

1.4.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pada Perubahan APBD Tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada Tahun 2015 terjadi beberapa perubahan pertumbuhan ekonomi, dimana pada Tahun 2014 hasil perhitungan terakhir angka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5,14 persen, sedangkan pada Tahun 2015 mencapai 5,83 persen, dan Tahun 2016 mencapai 6,07 persen. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Perubahan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015

No.	Pertumbuhan Ekonomi (Tahun)	Asumsi Tahun 2015 Murni (%)	Asumsi Perubahan Tahun 2015 (%)
1.	2014	5,68	5,14
2.	2015	5,83	5,83
3.	2016	5,97	6,07

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014 dan Tahun 2015, Bappeda DIY

Perubahan angka pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi sebagai dampak dari perubahan perhitungan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dilakukan pada Tahun 2015. Berdasarkan data perhitungan makro ekonomi yang dilakukan pada Tahun 2014 didapat kondisi bahwa pada tahun 2014 PDRB DIY yang disumbangkan oleh sembilan sektor usaha diperkirakan menyentuh nilai 25,897,544 juta rupiah pada tahun 2014, pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 27,407,014 juta rupiah, dan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar 29,042,373 juta rupiah. Proyeksi PDRB DIY atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Proyeksi PDRB DIY ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016
1. Pertanian	4,135,351	4,267,428	4,405,341
2. Pertambangan & Penggalan	172,584	179,795	187,503
3. Industri Pengolahan	3,152,860	3,271,732	3,398,080
4. Listrik, Gas & Air Bersih	244,770	260,333	277,279
5. Bangunan	2,548,777	2,718,470	2,903,088
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,688,117	6,077,411	6,502,461
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,859,591	3,064,999	3,290,444
8. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,613,023	2,808,605	3,023,068
9. Jasa-Jasa	4,482,471	4,758,239	5,055,105
PDRB	25,897,544	27,407,014	29,042,373

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Berdasarkan kondisi Tahun 2015 asumsi pertumbuhan ekonomi yang didapat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) didapat kondisi capaian pada tahun 2014, bahwa peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor keuangan real estate dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalan. Sektor

Perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah dua persen dari total PDRB. Proporsi kontribusi tersebut relatif sama pada tahun 2014 di mana proyeksi kontribusi antar sektor tidak berubah secara signifikan dibandingkan tahun 2013.

Tabel 1.3 Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2014*	2015*	2016*
1. Pertanian	15,97	15,57	15,17
2. Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,66	0,65
3. Industri Pengolahan	12,17	11,94	11,70
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,95	0,95	0,95
5. Konstruksi	9,84	9,92	10,00
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	21,96	22,17	22,39
7. Pengangkutan dan dan Komunikasi	11,04	11,18	11,33
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	10,09	10,25	10,41
9. Jasa-jasa	17,31	17,36	17,41
PDRB	100	100	100

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Sumber: BRS BPS DIY No 11/02/34/Th.XVI & Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2015 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2017, mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat melalui perluasan pasar dan peningkatan daya saing, sehingga diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era *golden age* angkatan kerja Indonesia.

Secara sektoral pertumbuhan PDRB menunjukkan dinamika di hampir semua sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian yang proyeksi pertumbuhannya selalu di bawah tiga persen tiap tahunnya. Trend tersebut menunjukkan perlunya perhatian

husus karena pertumbuhan aktual sector pertanian pada beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tertekan (bahkan pernah mengalami kontraksi pada tahun 2010-2011), berkaitan dengan adanya dampak anomaly iklim. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian diharapkan masih memberikan kontribusi besar dalam perekonomian DIY karena kontribusi tenaga kerja sektor pertanian masih cukup dominan dan luasan lahan pertanian (terutama pertanian lahan kering) yang masih cukup dominan di DIY serta kaitan erat sektor strategis ini dengan problem ketahanan pangan.

Komponen terbesar dalam PDRB riil adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, sementara yang paling kecil adalah perubahan inventori. Pada tahun 2013, nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar Rp11,94 triliun yang meningkat terus menjadi Rp14,47 triliun di tahun 2016. Sementara itu perubahan inventori justru mengalami penurunan dari Rp677 milyar di tahun 2013 menjadi Rp314,02 milyar di tahun 2016. Sementara itu, komponen-komponen penggunaan lain PDRB nilai konstan secara umum selalu mengalami kenaikan. Komponen ekspor mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2013 – 2016, namun mengalami tren menaik setelah tahun 2014. Gambaran komposisi seluruh komponen penggunaan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah)

Jenis Penggunaan	2014	2015	2016
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	13.299.458	14.189.053	14.468.970
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	896.219	986.152	1.034.991
Pengeluaran konsumsi pemerintah	5.440.243	5.757.181	5.838.785
Pembentukan modal tetap domestik bruto	6.955.250	7.302.539	7.358.908
Perubahan Inventori	540.879	462.415	314.016
Diskrepansi Statistik	-300.793	-376.320	-888.226
Ekspor barang-barang dan jasa-jasa	10.631.980	11.023.754	12.963.936
Dikurangi :			
Impor barang-barang dan jasa-jasa	11.565.680	12.215.385	12.341.807
P D R B	25.897.555	27.129.390	28.749.574

Sumber : BPS dan Diolah

Keterangan:

Angka tahun 2013 adalah angka sangat sementara

Angka tahun 2014 – 2016 adalah hasil olahan berdasarkan tren

1.4.2 Proyeksi Inflasi

1.4.2.1 Proyeksi Inflasi Pada APBD Murni Tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi inflasi DIY tahun 2014-2016 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 menunjukkan kondisi yang masih cenderung fluktuatif dan masih tergolong rendah dengan peningkatan setiap tahunnya kurang dari 1%. Salah satu faktor rendahnya inflasi adalah pengendalian moneter dan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang efektif. Inflasi di tahun 2014 diperkirakan sebesar 6,88 persen, tahun 2015 meningkat sebesar 7,45 persen dan pada tahun 2016 meningkat lagi sebesar 8,02 persen. Proyeksi inflasi DIY tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5 Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2014-2016 Pada APBD Murni Tahun 2015

Tahun	Inflasi (%)	
	Moderat	Optimis
2014	6,91	6,88
2015	7,49	7,45
2016	8,06	8,02

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

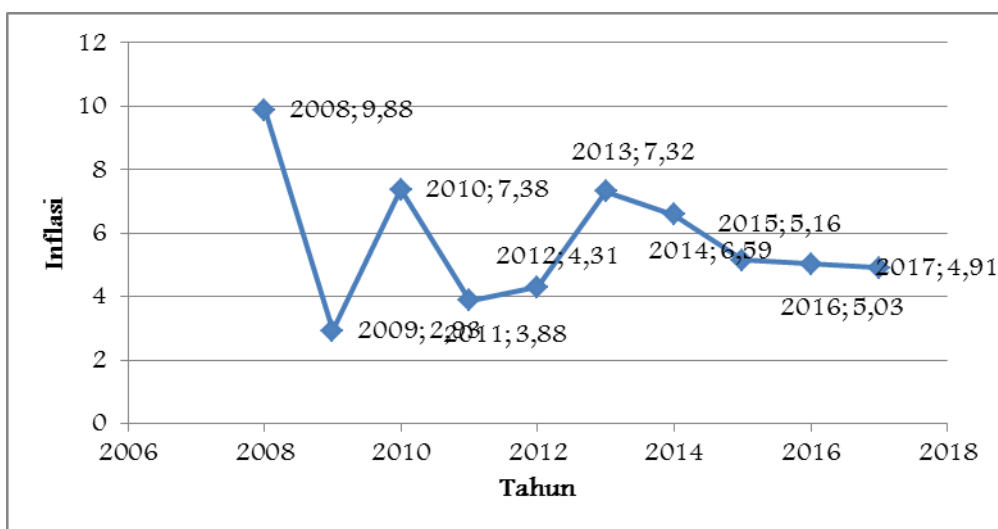
Kecenderungan peningkatan inflasi di DIY sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi DIY dan kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan kegiatan ekonomi semakin besar yang berarti masyarakat cenderung membelanjakan uangnya sehingga berakibat pada meningkatnya tingkat inflasi. Kebijakan suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) berpengaruh pula terhadap kecenderungan masyarakat dalam membelanjakan uang. Apabila suku bunga yang ditetapkan naik maka masyarakat cenderung menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mempengaruhi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan berpengaruh menurunkan inflasi. Sebaliknya apabila suku bunga yang ditetapkan turun maka masyarakat cenderung membelanjakan uangnya daripada menginvestasikannya di tabungan sehingga hal tersebut dapat mendorong terjadinya inflasi.

Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di DIY. Beberapa faktor yang di level nasional dan internasional yang dapat mendorong inflasi antara lain adalah masih terus meningkatnya

harga pangan di pasar internasional terkait dengan iklim, tingginya harga minyak dunia yang nantinya dapat menyebabkan kian tingginya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dan pada akhirnya dapat memaksa pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dan ekspektasi inflasi akibat cukup tingginya capaian inflasi pada tahun sebelumnya.

1.4.2.2 Proyeksi Inflasi Pada Perubahan APBD Tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan angka inflasi yang telah dilakukan pada perubahan Tahun 2015 didapat kondisi, bahwa perkembangan data Inflasi tahun 2008-2014 dan proyeksi inflasi tahun 2015-2017 mengalami perubahan dan perkembangan fluktuatif, dimana untuk nilai proyeksi inflasi DIY cenderung mengalami penurunan. Sedangkan nilai inflasi pada tahun 2008-2014 cenderung fluktuatif dengan inflasi tertinggi pada tahun 2008 sebesar 9,88%.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2008-2017

Inflasi di DIY mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 5,16% kemudian menurun pada tahun 2016 sebesar 5.03% dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar 4.93%. Penurunan tingkat inflasi ini disebabkan oleh efek tekanan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah dicabut. Meskipun harga BBM saat ini mengalami fluktuatif, TPID telah melakukan antisipasi agar inflasi stabil. TPID DIY memastikan pasokan dari Pertamina aman, koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mencegah

penimbunan, peninjauan kembali tarif angkutan darat serta memastikan pasokan beras dan gula aman. Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di DIY. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Proyeksi Inflasi DIY, Tahun 2015-2016 (%)

Tahun indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Inflasi (%)	5.16	5.19	5.03	5.06	4.91	4.93

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2015, Bappeda DIY

1.4.3 Proyeksi ICOR

1.4.3.1 Proyeksi ICOR Pada APBD Murni Tahun 2015

Proyeksi ICOR di tahun 2014-2016 berdasarkan perhitungan pada yang dilakukan pada penyusunan APBD Murni Tahun 2015 mengalami tren yang menurun, hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Pada tahun 2014 ICOR diproyeksikan sebesar 4,62; tahun 2015 ICOR sebesar 4,15; dan pada tahun 2016 ICOR sebesar 3,68. Proyeksi ICOR DIY tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7 Proyeksi Nilai ICOR DIY Tahun 2014-2016 Pada APBD Murni Tahun 2015

Tahun	Inflasi	
	Moderat	Optimis
2014	5,31	4,62
2015	4,77	4,15
2016	4,23	3,68

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

1.4.3.2 Proyeksi ICOR Pada Perubahan APBD Tahun 2015

Hasil penghitungan koefisien ICOR berdasarkan hasil perhitungan pada Perubahan APBD Tahun 2015 dengan asumsi investasi yang ditanam pada tahun tertentu baru akan menghasilkan output yang diinginkan setelah satu tahun dan dua tahun berikutnya. Secara total koefisien ICOR dengan

time lag 1 dan time lag 2 mengalami penurunan, yaitu dari 5,89 pada lag 0 menjadi 5,78 pada lag 1, dan menjadi 5,58 pada lag 2. Hal ini mengindikasikan produktivitas kapital yang semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan ICOR standar dengan lag=0, ada enam sektor yang mengalami penurunan ICOR dengan lag=1 maupun lag=2, yaitu: sektor penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan. Keenam sektor tersebut mengalami peningkatan produktivitas kapital setelah satu atau dua tahun. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan produktivitas kapital dicerminkan dengan kenaikan koefisien ICOR yaitu pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; serta jasa-jasa.

Dalam melakukan penentuan nilai ICOR Total dilakukan dengan melakukan penentuan nilai ICOR melalui metode standar Lag 2. Dalam hal ini dilakukan dengan justifikasi bahwa ditinjau menurut kelompok sektor, rata-rata porsi investasi terbesar terjadi pada kelompok sektor tersier, yaitu 78,69 persen, diikuti kelompok sektor sekunder (20,50 persen), dan sektor primer (0,82 persen). Sektor primer meliputi sektor pertanian dan penggalian; sektor sekunder terdiri dari sektor industri, listrik dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier mencakup sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi; keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Dominasi sektor tersier dan sekunder mengindikasikan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh kebanyakan unit usaha di DIY tidak langsung menghasilkan produk pada tahun yang sama dengan waktu investasi dilakukan atau ada lag waktu antara proses realisasi investasi dengan saat output dihasilkan. Secara lebih jelasnya data dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8 ICOR Sektoral Metode Standar Lag=0, Lag=1, Lag=2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014

Sektor/Subsektor	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	3,06	3,45	3,89
a. Tanaman Bahan Makanan	3,02	3,41	3,86
b. Tanaman Perkebunan	3,01	3,30	3,62
c. Peternakan Dan Hasil-Hasilnya	3,46	3,76	4,09
d. Kehutanan	8,00	8,61	9,27
e. Perikanan	3,93	4,19	4,48
2. Pertambangan & Penggalian	4,36	3,94	3,44
3. Industri Pengolahan	4,91	4,28	3,64
4. Listrik, Gas & Air Bersih	18,02	14,43	11,86
a. Listrik	17,78	15,18	12,51
b. Air Bersih	22,66	19,12	15,65

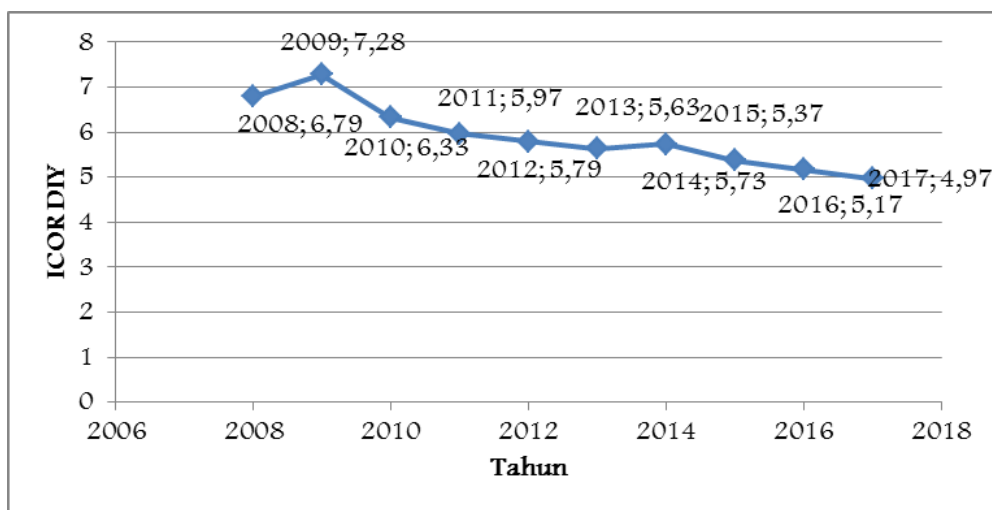
Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Sektor/Subsektor	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
5. Konstruksi	4,28	3,96	3,60
6. Perdag., Hotel & Restoran	3,04	3,21	3,42
a. Perdagangan Besar & Eceran	2,87	2,96	3,04
b. Hotel	4,05	4,38	4,74
c. Restoran	2,91	3,16	3,42
7. Pengangkutan & Komunikasi	11,22	10,25	9,37
a. Pengangkutan	15,91	14,86	13,73
b. Komunikasi	7,34	6,56	5,73
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	5,32	5,18	5,01
a. Bank	4,50	4,32	4,09
b. Lainnya	5,84	5,73	5,55
9. Jasa-Jasa	7,32	7,62	7,90
a. Pemerintahan Umum	9,34	9,71	10,06
b. Swasta	2,60	2,74	2,86
PDRB	5,89	5,78	5,58

Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2015

Proyeksi ICOR DIY untuk tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan, yaitu masing-masing 5.37; 5.17 dan 4.97. Penurunan angka ICOR ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika ICOR rendah maka dengan investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang akan dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.

Nilai ICOR DIY mengalami penurunan, meskipun demikian nilai ICOR di DIY cenderung tinggi. Banyak hal yang menyebabkan nilai ICOR masing cenderung tinggi meskipun setiap tahunnya menurun, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi DIY yang relatif kecil di antara pulau Jawa, penggunaan teknologi yang masih rendah karena DIY lebih dominan industri UMKM. Kemudian dengan semakin gencarnya pertumbuhan investasi di DIY seperti pembangunan hotel-hotel, mall dan apartemen, diharapkan akan menurunkan nilai ICOR DIY.



Gambar 1.2 Grafik ICOR DIY Tahun 2008-2017

Grafik di atas terlihat ICOR tahun 2008-2013 dan proyeksi ICOR tahun 2015-2017. Grafik di atas menunjukkan nilai ICOR yang mengalami penurunan baik nilai realisasi maupun proyeksi.

Tabel 1.9 Proyeksi ICOR DIY Tahun 2015-2017

Tahun Indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
ICOR	5.37	6.18	5.17	5.95	4.97	5.71

Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2015

Terkait dengan hasil perhitungan dan analisis nilai ICOR di DIY tersebut, maka terdapat beberapa strategi pembangunan DIY kedepan kaitannya dengan pengembangan investasi wilayah maupun peningkatan efisiensi sektoral, diantaranya :

1. Peningkatan efisiensi pada beberapa sektor dapat dikurangi dengan melancarkan transportasi dan komunikaskasi agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Peningkatan infrastruktur transportasi dan komunikasi merupakan upaya pembangunan yang tepat dengan disertai ketepatan lokasi alokasinya;
2. Mengingat nilai ICOR yang masih cukup tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada sruktur usaha di DIY maka perlu rekayasa teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam

pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat DIY.

1.4.4 Proyeksi Ketenagakerjaan

1.4.4.1 Proyeksi Ketenagakerjaan Pada APBD Murni Tahun 2015

Proyeksi ketenagakerjaan DIY tahun 2014-2016 dilihat dari faktor angkatan kerja akan mengalami kenaikan. Naiknya angkatan kerja tersebut diimbangi dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dan diiringi dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Angkatan kerja di tahun 2014 diperkirakan berjumlah 1.953.928 dengan komposisi jumlah orang yang bekerja sebanyak 1.869.643 dan jumlah pengangguran terbuka sejumlah 84.285. Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja diprediksi naik menjadi 1.961.418 dengan komposisi jumlah orang bekerja sebanyak 1.881.271 dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 80.147. Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja masih diprediksi naik menjadi 1.968.909 dengan komposisi jumlah orang yang bekerja sebesar 1.892.900 dan jumlah pengangguran terbuka sejumlah 76.009. Proyeksi ketenagakerjaan DIY tahun 2014-2016 berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.10 Proyeksi Ketenagakerjaan DIY, Tahun 2014-2016 Pada Penyusunan APBD Tahun 2015

Tahun Indikator	2014		2015		2016	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Bekerja	1.869.643	1.589.197	1.881.271	1.599.080	1.892.900	1.608.964
Pengangguran Terbuka	84.285	71.642	80.147	68.124	76.009	64.607
Jumlah Angkatan Kerja	1.953.928	1.660.839	1.961.418	1.667.206	1.968.909	1.673.572

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

1.4.4.2 Proyeksi Ketenagakerjaan Pada Perubahan APBD Tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 didapat beberapa perubahan perhitungan asumsi, dimana pada tahun 2013 dan 2014 realisasi angkatan kerja mengalami peningkatan. Meningkatnya angkatan kerja DIY diakibatkan meningkatnya penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Sedangkan untuk tahun 2013 nilai realisasi lebih tinggi dibandingkan nilai proyeksinya. Peningkatan angkatan kerja ini akibat dari banyaknya lulusan perguruan tinggi yang memilih menetap di DIY tidak kembali ke daerah

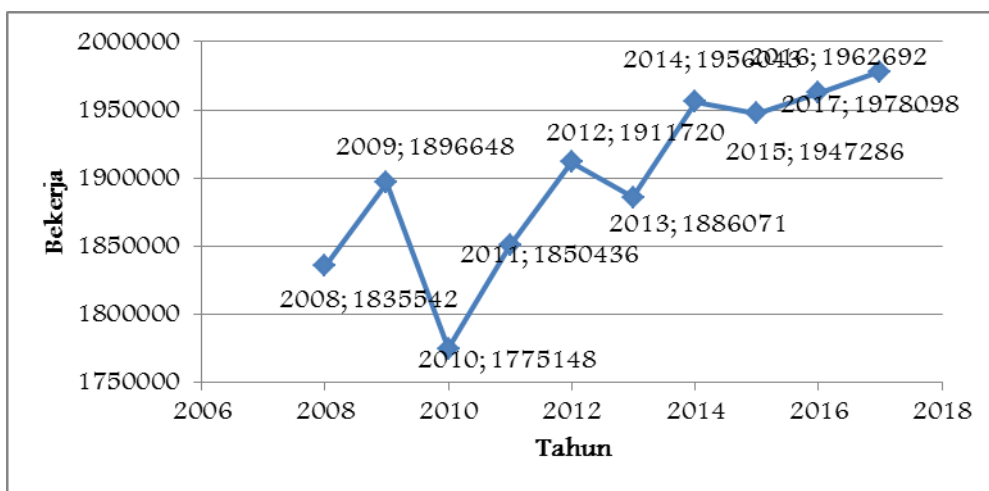
asal sehingga hal ini menambah jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2014 realisasi angkatan kerja naik menjadi 2.023.461 orang. Perlu kesiapan pihak yang berwenang menanggulangi kenaikan angkatan kerja, agar tidak menambah tingkat pengangguran.

Tabel 1.11 Angkatan Kerja DIY Tahun 2013 dan 2014

Nilai \ Tahun	2013	2014
Proyeksi (orang)	1.946.438	n.a
Realisasi (orang)	1.949.243	2.023.461
Perubahan (orang)	2.805	-

Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2014

Lebih lanjut selama periode 2008-2014 realisasi orang yang bekerja di DIY cenderung fluktuatif, orang yang bekerja terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 1.775.148 orang. Sedangkan untuk proyeksi 2015-2017 nilai proyeksi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 proyeksi sebesar 1.947.286 orang dan meningkat pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 1.962.692 orang dan 1.978.098 orang. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

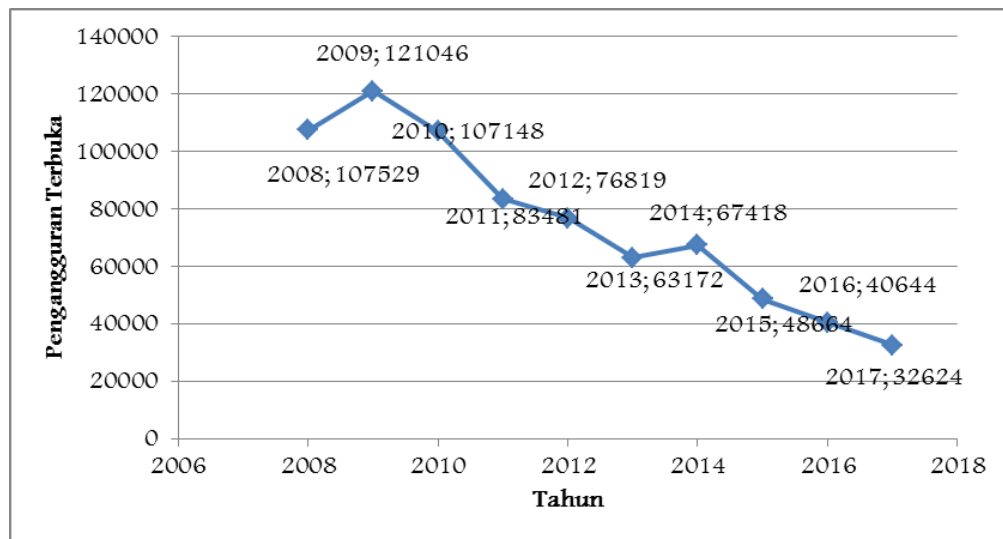


Gambar 1.3 Grafik Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk yang Bekerja di DIY tahun 2008-2017

Terkait dengan masalah ketenagakerjaan di DIY tercatat bahwa masih terdapat pengangguran terbuka di DIY selama 2008-2013 cenderung

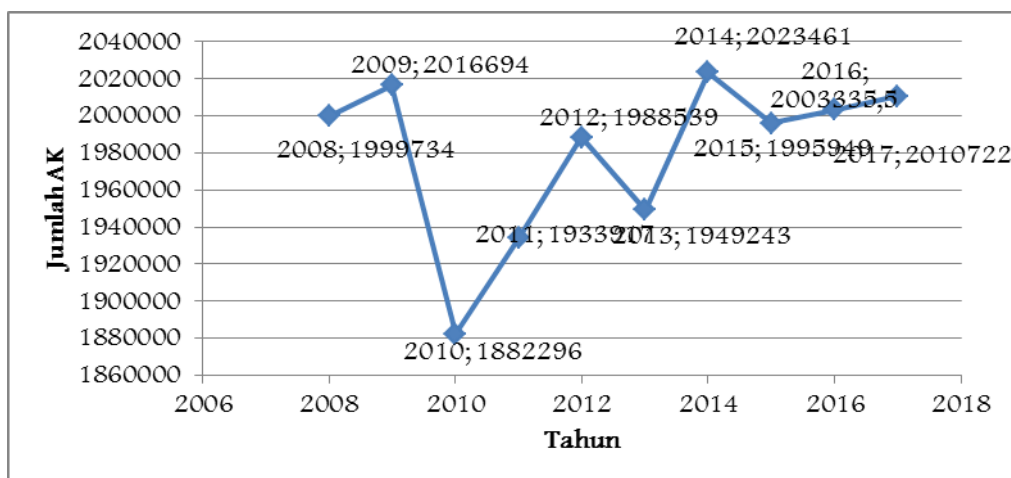
mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan di angka 121.046 orang dari angka 107.529 orang di tahun 2008. Tahun 2012 jumlah pengangguran terbuka di DIY juga mengalami kenaikan yaitu dari 74.317 orang di tahun 2011 menjadi 92.561 orang di tahun 2012. Pengangguran mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 67.418 orang dari 63.172 orang pada tahun 2013.

Tetapi untuk proyeksi pengangguran terbuka tahun 2015 sampai 2017 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi bilamana kualitas pertumbuhan ekonomi di DIY dapat semakin baik dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar, penyediaan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta tingkat upah yang terus membaik.



Gambar 1.4 Grafik Pengangguran Terbuka di DIY tahun 2008-2017

Selaras dengan perkembangan jumlah orang bekerja dan pengangguran terbuka yang terjadi selama periode 2008-2014 yang fluktuatif maka perkembangan angkatan kerja di DIY juga fluktuatif. Jumlah angkatan kerja terbesar terjadi di tahun 2014 sebanyak 2.023.461 orang. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Gambar 1.5 Grafik Jumlah Angkatan Kerja di DIY tahun 2008-2017

Proyeksi untuk tahun 2015 dan 2017 angkatan kerja di DIY terus mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan juga kondisi di DIY akan terus membaik, baik dari sisi tingkat kesehatan, usia harapan hidup yang lebih panjang, kesempatan kerja yang semakin terbuka, dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi maupun kesiapan calon pekerja masuk ke angkatan kerja. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.12 Proyeksi Ketenagakerjaan DIY Tahun 2015-2017 Pada Perubahan APBD Tahun 2015

Tahun indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Bekerja	1.947.286	1.655.193	1.962.692	1.668.288	1.978.098	1.681.383
Pengangguran Terbuka	48.664	41.364	40.644	34.547	32.624	27.731
Jumlah Angkatan Kerja	1.995.949	1.696.557	2.003.336	1.702.835	2.010.722	1.709.114

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Jumlah angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketenagakerjaan di DIY di antaranya adalah tingkat upah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan elastisitas penyerapan tenaga kerja.

Dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat pendidikan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta upah yang cukup maka akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja DIY, sehingga akan dapat membantu menurunkan tekanan permasalahan dari pengangguran di DIY. Proyeksi tahun 2015 hingga 2017 untuk DIY tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dan orang yang bekerja sama-sama mengalami kenaikan, tetapi pengangguran terbuka mengalami penurunan. Ini menggambarkan adanya optimisme yang kuat pada kualitas laju pertumbuhan ekonomi DIY, khususnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, kegiatan pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan di wilayah DIY diharapkan dapat menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain investasi di DIY diharapkan bersifat *Labour intensive*.

1.4.5 Proyeksi Kemiskinan

1.4.5.1 Proyeksi Kemiskinan Pada APBD Murni Tahun 2015

Proyeksi persentase penduduk miskin di DIY pada tahun 2014-2016 diperkirakan menurun setiap tahunnya meskipun masih dibawah 2 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY diproyeksikan sebesar 14,46 persen, pada tahun 2015 tingkat penduduk miskin diproyeksikan turun sebesar 13,84 persen, dan pada tahun 2016 juga diproyeksikan turun menjadi 13,22 persen. Proyeksi kemiskinan DIY tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.13 Proyeksi Kemiskinan DIY Tahun 2014-2016 Pada APBD Murni Tahun 2015

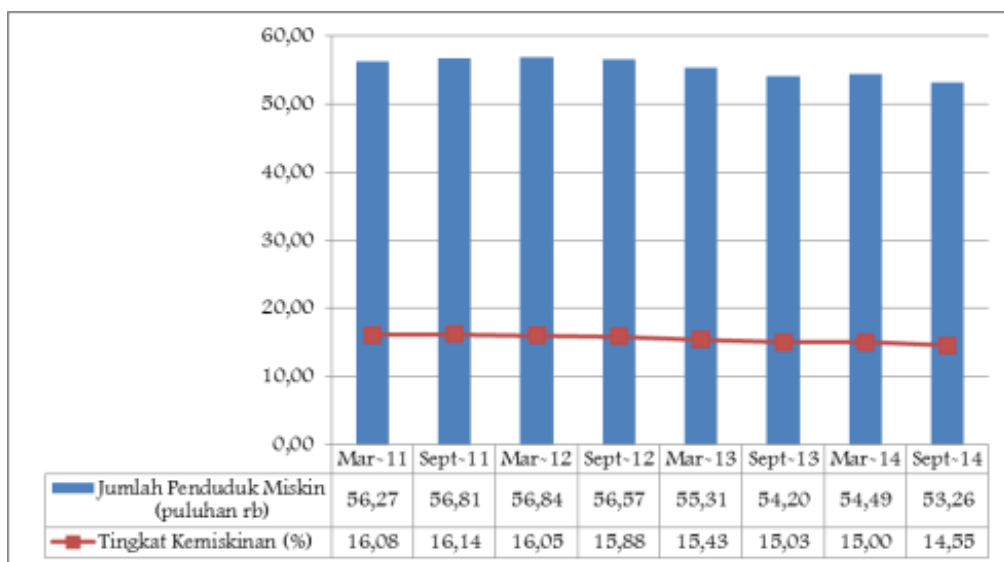
Tahun	Kemiskinan (%)	
	Moderat	Optimis
2014	16,69	14,46
2015	15,91	13,84
2016	15,20	13,22

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di DIY diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan geliat perekonomian DIY semakin cepat dan tingkat pendapatan meningkat. Semakin meningkatnya orang yang bekerja yang disertai peningkatan pendidikan dan keterampilan juga mempengaruhi tingkat pendapatan sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya.

1.4.5.2 Proyeksi Kemiskinan Pada Perubahan APBD Tahun 2015

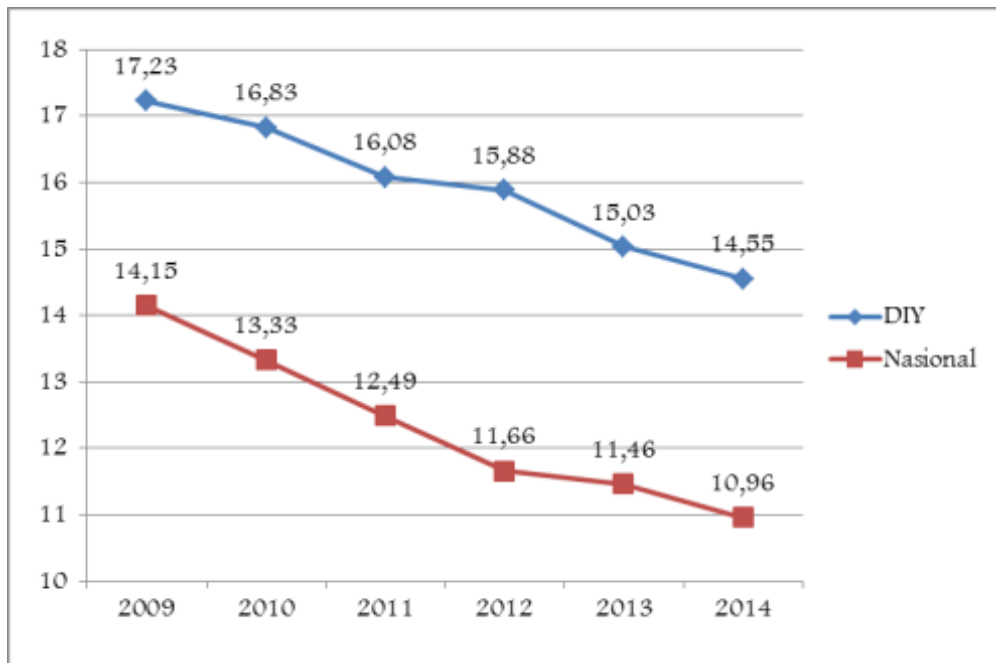
Selama kurun waktu 2010-2014, kemiskinan di DIY baik dari sisi jumlah maupun persentase cenderung mengalami penurunan. Pada periode September 2011 jumlah penduduk miskin DIY tercatat sebanyak 568,05 ribu orang atau 16,14% menurun menjadi sebanyak 532,59 ribu orang atau 14,55 pada periode September 2014. Penurunan selama tiga tahun tersebut (1,59%) masih rendah karena belum mencapai target seperti yang diharapkan.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 1.6 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di DIY Tahun 2011-2014

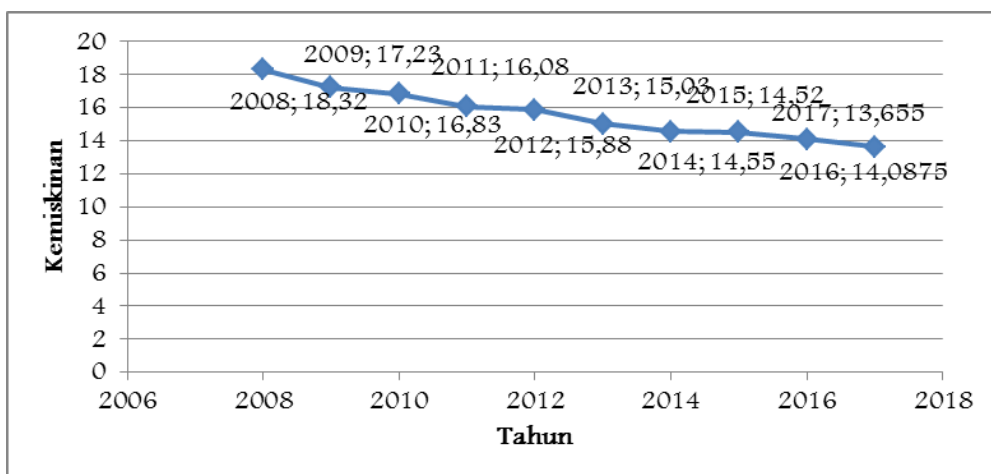
Tingkat kemiskinan DIY masih tergolong tinggi karena masih jauh berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Selama periode 2009-2014, penurunan kemiskinan DIY sebesar 2,68 poin sementara penurunan rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 3,19 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan DIY masih rendah.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 1.7 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan di DIY dan Nasional Tahun 2009-2014

Nilai realisasi maupun proyeksi tingkat kemiskinan DIY mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pemerintah telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan dengan program-program yang ada. Akan tetapi nilai kemiskinan DIY masih terbilang cukup tinggi. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Gambar 1.8 Grafik Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2008-2017

Nilai proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY untuk tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY di proyeksikan sebesar 14,52 persen dan pada tahun 2016 menjadi 14,09 persen kemudian pada tahun 2017 menjadi 13,65 persen. Meskipun kemiskinan di DIY mengalami penurunan setiap tahunnya, tetap saja kemiskinan DIY tertinggi se-Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat pada data BPS tahun 2012. Selain itu tingginya kemiskinan di DIY sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tinggi persentase penduduk miskin di DIY diakibatkan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif yang meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal. Selain itu tingginya kemiskinan DIY diakibatkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu.

Tabel 1.14 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk di DIY Tahun 2015-2017

Tahun indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Kemiskinan (%)	14.52	16.70	14.09	16.20	13.66	15.70

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Program-program pemerintah daerah harus lebih digalakan untuk mngentaskan kemiskinan, misalkan dalam hal investasi. Investasi yang di iijinkan hanya investasi yang bersifat Labour intensive bukan Capital intensivse, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di DIY

1.4.6 Proyeksi Ketimpangan Regional

1.4.6.1 Proyeksi Ketimpangan Regional Pada APBD Murni Tahun 2015

Ketimpangan antar wilayah salah satu metode pengukurannya adalah dengan menggunakan Indeks Williamson. Semakin tinggi Indeks Williamson maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan antar wilayah. Proyeksi Indeks Williamson DIY pada tahun 2014-2015 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 Indeks Williamson diproyeksikan sebesar 0,461 dan mengalami peningkatan 0,464 pada tahun 2015 dan 0,467 pada tahun 2016. Proyeksi Indeks Williamson DIY tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.15 Proyeksi Indeks Williamson DIY Tahun 2014-2019 Pada APBD Murni Tahun 2015

Tahun	Indeks Williamson	
	Moderat	Optimis
2014	0,530	0,461
2015	0,534	0,464
2016	0,538	0,467

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara, hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara.

1.4.6.2 Proyeksi Ketimpangan Regional Pada Perubahan APBD Tahun 2015

Ketimpangan regional DIY dilihat dari Indeks Williamson (IW) menunjukkan bahwa ketimpangan perekonomian kabupaten/kota di DIY cenderung mengalami penurunan. Realisasi IW pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing adalah 0,449 dan 0,448. Pada tahun 2014 realisasi IW lebih rendah 0,001 dibandingkan proyeksi 2013. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota

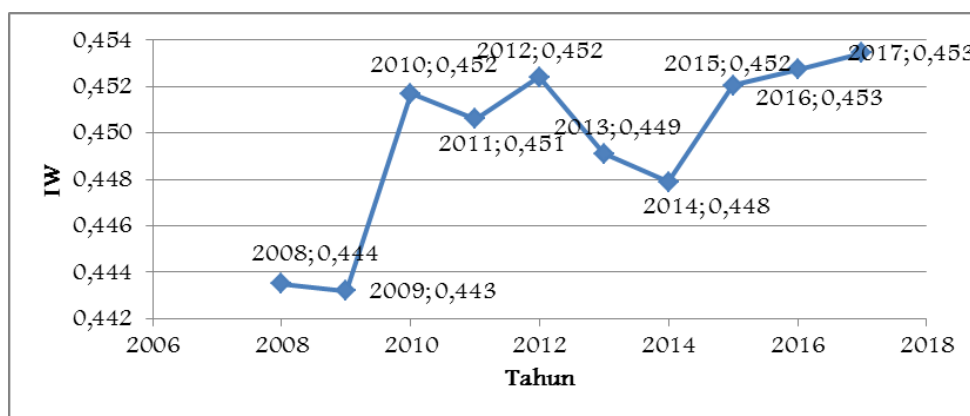
di DIY semakin berkurang karena ketersediaan sarana prasarana dasar pada wilayah tertinggal semakin meningkat, sehingga mendukung akses masyarakat pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian wilayah. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.16 Indeks Williamson DIY Tahun 2013 dan 2014

Nilai \ Tahun	2013	2014
Proyeksi	0,455	n.a
Realisasi	0,449	0,448
Perubahan	-0,006	~

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Terkait dengan proyeksi kesenjangan/ketimpangan wilayah di DIY dari nilai IW DIY untuk tahun 2008-2017 cenderung mengalami peningkatan, meskipun angka IW-nya masih di bawah 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa di DIY kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi, dengan adanya kegiatan ekonomi yang semakin maju, meskipun kesenjangan tersebut masih tergolong rendah. Perhatian semua pihak untuk menselaraskan keberhasilan pembangunan yang didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dengan pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk kabupaten/kota di DIY menjadi sangat penting. Grafik terlihat IW tahun 2008-2014 dan proyeksi IW tahun 2015-2017 yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Gambar 1.9 Grafik Hasil Perhitungan Angka Proyeksi Indeks Williamson di DIY Tahun 2008-2017

Hasil proyeksi Indeks Williamson (IW) DIY menunjukkan bahwa IW di DIY dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan, yaitu dari 0,452 di tahun 2015 menjadi 0,453 di tahun 2016 dan 2017. Kenaikan IW ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi DIY maka akan dapat berdampak pada terjadinya kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi. Namun indeks Williamson di DIY masih lebih kecil dari 0,5 yang berarti ketimpangan antar wilayah masih relatif kecil. Hal yang menyebabkan naiknya IW ini di antaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di DIY yang semakin tinggi dan PDRB perkapita di kabupaten/kota di DIY yang tidak merata. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.17 Proyeksi Indeks Williamson DIY Tahun 2015-2017

Tahun \ Indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
IW	0,452	0,520	0,453	0,521	0,453	0,521

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

1.4.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan

1.4.7.1 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Pada APBD Murni Tahun 2015

Ketimpangan Distribusi Pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Proyeksi Indeks Gini untuk tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan. Nilai proyeksi Indeks Gini pada tahun 2014 sebesar 0,309, Pada tahun 2015 nilai Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,307 dan untuk tahun 2016 diproyeksikan sebesar 0,305. Proyeksi Indeks Gini DIY tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.18 Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2014-2016

Tahun	Indeks Gini	
	Moderat	Optimis
2014	0,355	0,309
2015	0,353	0,307
2016	0,351	0,305

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Dari angka proyeksi tersebut dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan di DIY diproyeksikan masih rendah karena masih dilevel 0,3. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai dari Indeks Gini diantaranya adalah pendapatan penduduk, pengeluaran penduduk, dan komposisi jumlah penduduk.

1.4.7.2 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Pada Perubahan APBD Tahun 2015

Ketimpangan pendapatan penduduk DIY dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2012, realisasi IG sebesar 0,4275 yang masih dalam kelompok ketimpangan sedang ($0,3 < IG < 0,5$). Dan untuk tahun 2013 realisasi IG sebesar 0,4164. Indeks Gini DIY tahun 2013 ini masih terbilang sedang karena masih berada di sekitaran angka $0,3 < 0,4 < 0,5$. Tahun 2014 IG di DIY naik menjadi 0,4350.

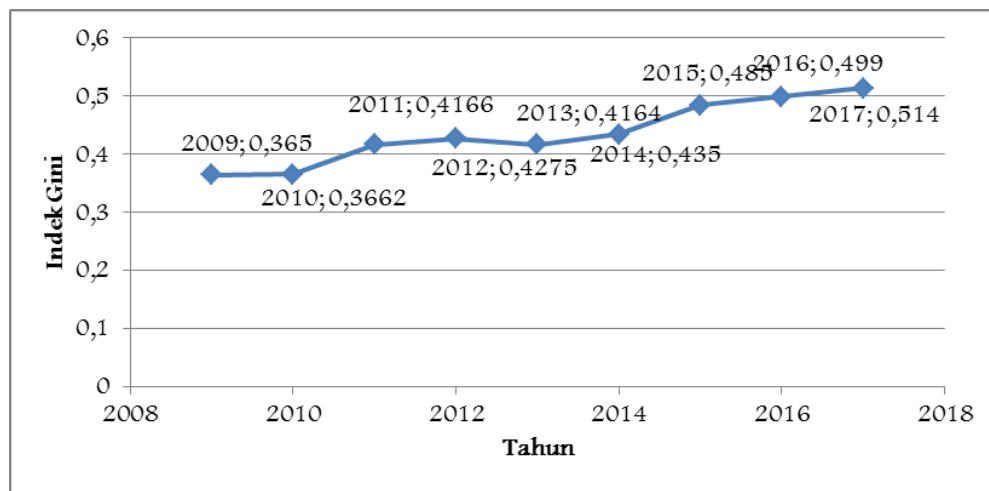
Pertumbuhan ekonomi DIY cukup tinggi, sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor jasa-jasa; dan sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. Akan tetapi pertumbuhan ini hanya terjadi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta saja atau dapat dikatakan bahwa telah terjadi aglomerasi aktivitas ekonomi DIY. Bahkan sejak 2007 pertumbuhan ekonomi Sleman mampu mengungguli pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta. Sedangkan kontribusi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul tergolong rendah. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan daerah atau dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi daerah telah menyebabkan ketimpangan daerah terjadi.

Tabel 1.19 Indeks Gini DIY Tahun 2013 dan 2014

Nilai \ Tahun	2013	2014
Proyeksi	n.a	n.a
Realisasi	0,4164	0,4350
Perubahan	-	-

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Indeks Gini (IG) berfungsi untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) kategori tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yaitu ketika $IG < 0,3$ maka masuk ke dalam kategori ketimpangan rendah; $0,3 < IG < 0,5$ maka masuk kategori ketimpangan sedang dan $IG > 0,5$ maka masuk kategori ketimpangan tinggi. Dari grafik di atas terlihat selama periode 2009-2014 Indeks Gini DIY terlihat fluktuatif, dan indeks Gini memiliki nilai tertinggi sebesar 0,4275 pada tahun 2014. Untuk nilai proyeksi indeks Gini tahun 2015 hingga 2017 mengalami trend peningkatan. Secara keseluruhan indeks Gini DIY masih tergolong sedang.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

Gambar 1.10 Grafik Indeks Gini di DIY Tahun 2008-2017

Melihat proyeksi Indeks Gini di DIY tahun 2015 yang berada di angka 0,485 maka hal ini mengindikasikan ketimpangan di DIY terbilang sedang. Demikian juga melihat proyeksi IG di DIY tahun 2016 yang sebesar 0,499, maka ketimpangan distribusi di DIY tahun 2016 juga masih masuk kategori sedang. Kemudian di tahun 2017 meningkat sebesar 0,514 yang juga berarti ketimpangan di DIY tahun 2017 tergolong tinggi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IG antara lain; pendapatan dan pengeluaran. Secara lebih jelasnya proyeksi indeks gini di DIY Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.20 Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2015-2017

Tahun \ Indikator	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
IG	0,485	0,557	0,499	0,574	0,514	0,591

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015

1.5 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2016 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.

- Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3),
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 104);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 disajikan, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, dasar pertumbuhan perubahan APBD Tahun 2015, arah kebijakan ekonomi daerah, dasar hukum penyusunan pekerjaan, serta sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

2. Bab II Evaluasi RKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015 Sampai dengan Triwulan II

Pada bab ini menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan II, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

3. Bab III Rencana Program dan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2015

Pada bab ini berisi mengenai rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2015.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB 2 EVALUASI RKPD TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

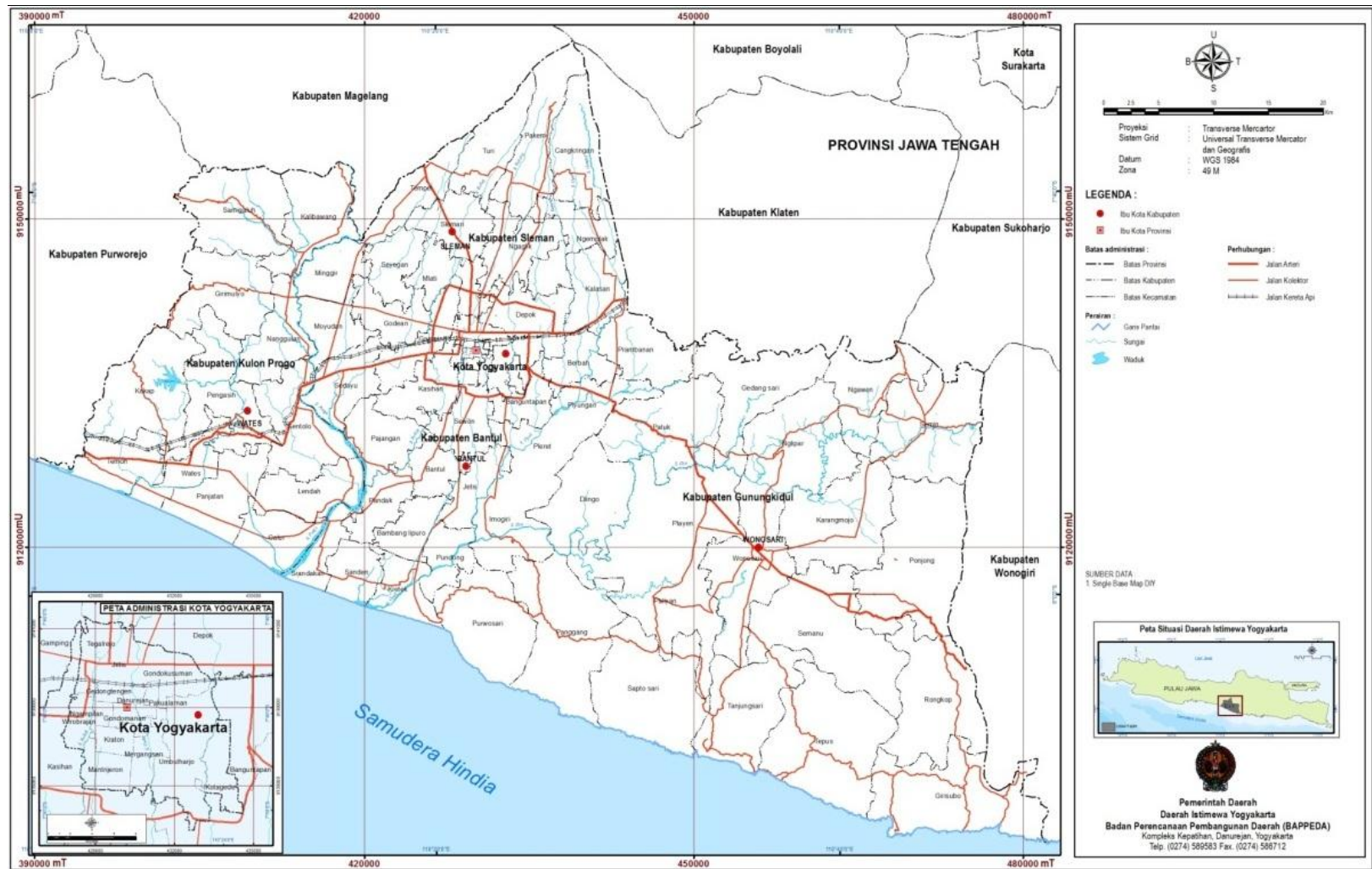
Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

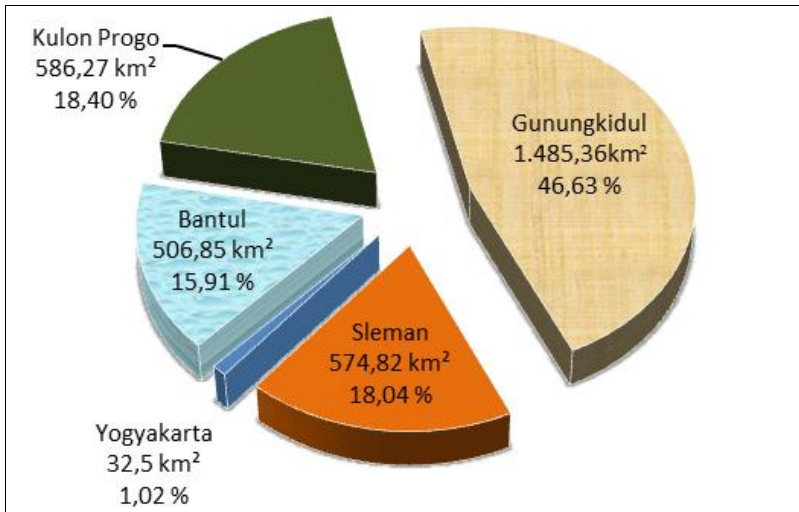
DIY secara astronomis terletak antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa Bagian Selatan. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DIY memiliki batas-batas :

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015



Wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02% dengan rincian pembagian proporsi luas wilayah seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014

Gambar 2.1 Komposisi Luas Wilayah DIY

Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kulonprogo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis

Kabupaten/Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/ Daerah Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran	
Kulon Progo	10	~	22	56	88
Bantul	5	~	11	59	75
Gunungkidul	18	~	56	70	144
Sleman	~	~	11	75	86
Yogyakarta	~	~	~	45	45
DIY	33	0	100	305	438

Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog Jungwok Watutopi

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
			Ngusalan
		Tileng	Kalong Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gunggungandul Godeg Baron Layar Krokoh

2.1.1.3 Topografi

Topografi umumnya menampilkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief adalah bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan atau ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian (amplitude) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (*landform*). Sedang topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (*landform*) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng.

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Kemiringan lahan

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

b. Ketinggian lahan

Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
- Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber :Bappeda DIY, Tahun 2014

Gambar 2.2 Peta Satuan Fisiografis DIY

2.1.1.4 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tm_{pk}), Formasi Wonosari - Punung (Tm_{wl}), Formasi Sentolo (Tm_{ps}), Formasi Oyo (Tm_o), Formasi Wuni (Tm_w), Formasi Sambipitu (Tm_{ss}), Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Nglanggran (Tm_{ng}), Formasi Kebo-Butak (Tm_{kb}), dan Formasi Mandalika (Tm_{md}).

Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Oya (Tm_o), Formasi Wonosari-Punung (Tm_{wl}) dan Formasi Kepek (Tm_{pk}). Patahan berupa sesar turun dengan pola *antithetic fault block*, terdapat antara lain pada terban Bantul.

a. Aluvium (Qa)

Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari

bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal.

Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.

b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm)

Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.

c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo)

Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.

d. Formasi Kepek (Tmpek)

Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.

e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl)

Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan.

Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu.

Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik mudah meloloskan air.

f. Formasi Sentolo (Tmps)

Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya

(Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari dari batugamping dan batupasir napalan.

g. Formasi Oyo (Tmo)

Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.

h. Formasi Sambipitu (Tmss)

Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batulempung.

i. Formasi Semilir (Tms)

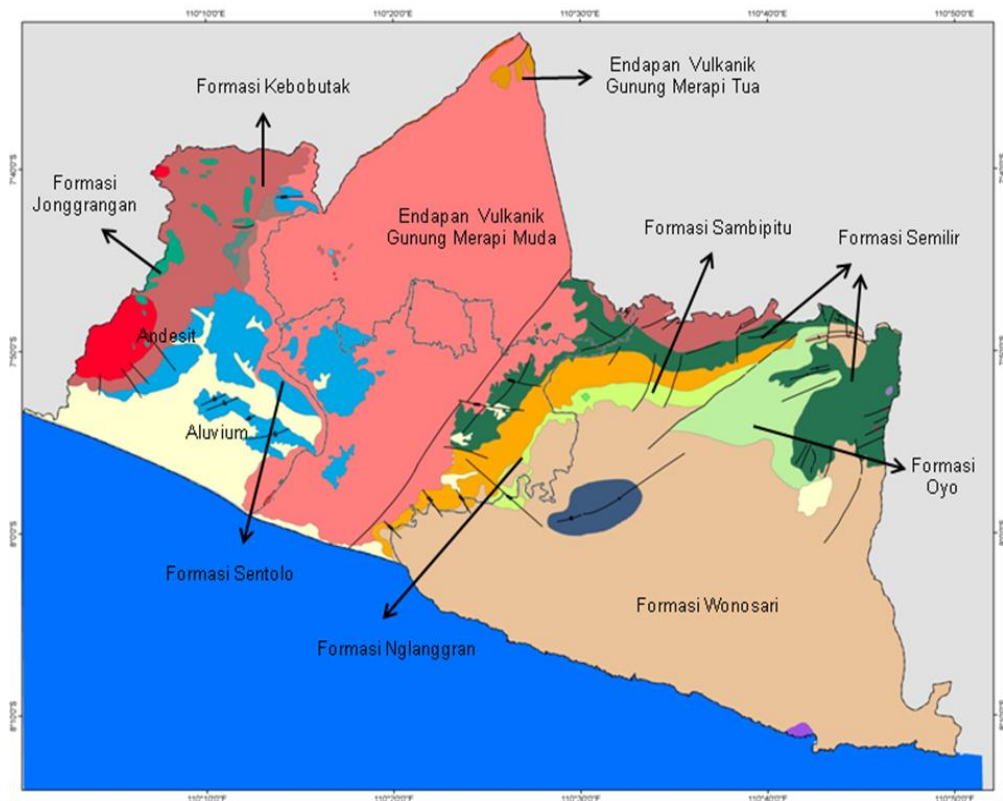
Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batulempung tufaan.

j. Formasi Kebo-Butak (Tomk)

Formasi Kebo-Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya.

Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah.

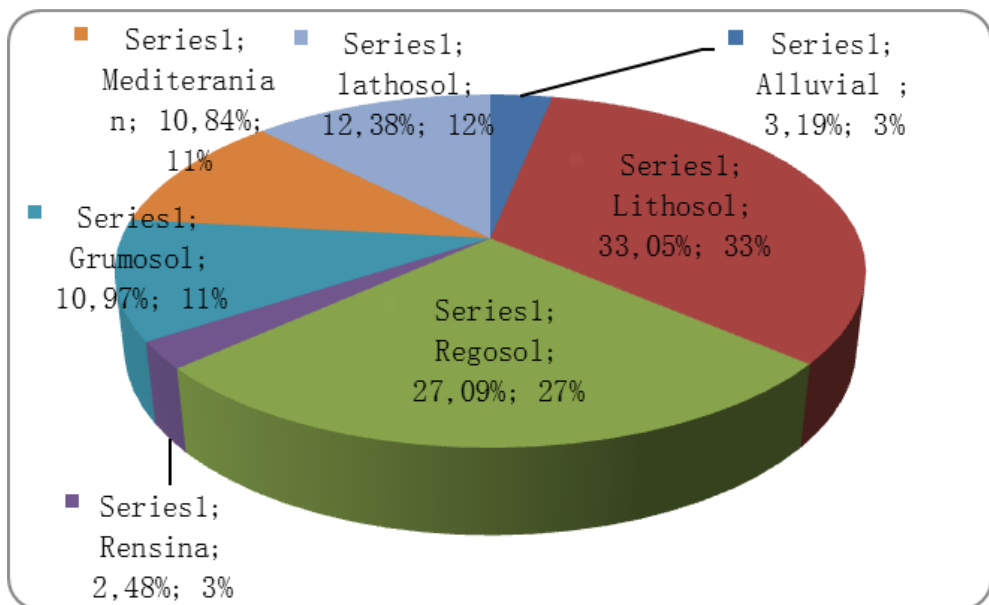
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.



Sumber :Bappeda DIY, Tahun 2014

Gambar 2.3 Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06km² atau sekitar 27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah aluvial seluas 101,74 km², lithosol 1.052,93km², resina 78,83km², grumusol 349,35km², mediteran 345,40km², dan lathosol 394,49km².

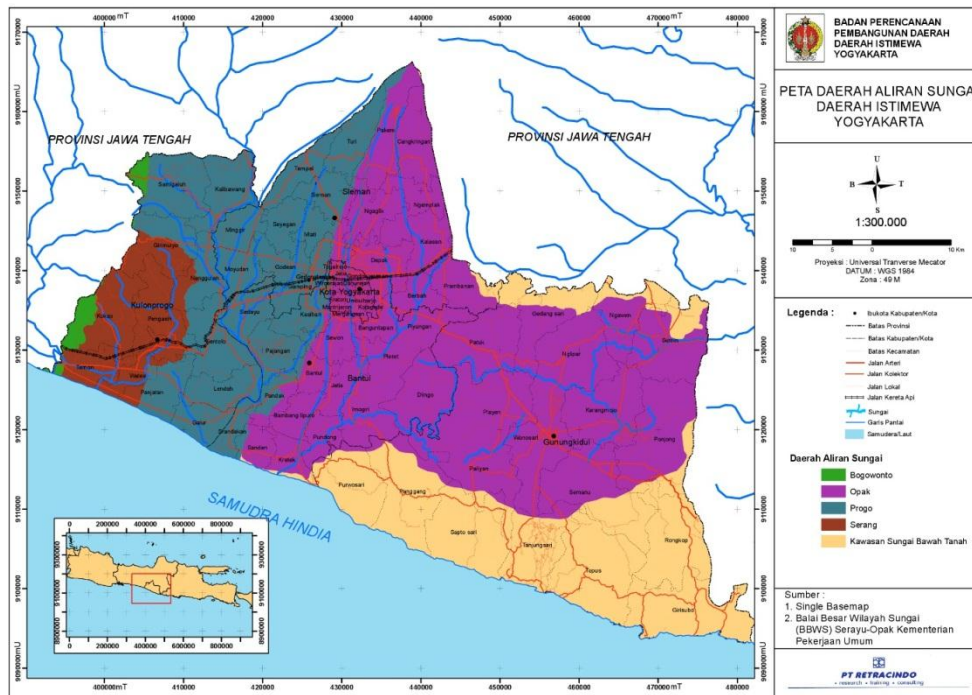


Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014

Gambar 2.4 Peta Geologi DIY

2.1.1.5 Hidrologi

Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang saja yang seluruh wilayahnya berada di DIY sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah. Terminologi DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Aliran Sungai dibawah ini



Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014

Gambar 2.5 Peta Aliran Sungai DIY

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kab. Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah :

- a) DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.
- b) DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- c) DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dari kondisi aquifer yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, aquifer di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) aquifer, yaitu :

- *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah mayor aquifer adalah: Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
- *Minor aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* : Formasi Wates, Gumuk pasir
- *Poor aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesite tua.
- *Non aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah : Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggran, serta Formasi Nanggulan.

Tabel 2.4 Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m³)

DAS	DAS Serang	DAS Progo	DAS Opak	DAS Oyo	DTA Karst
Volume Air Permukaan	311,59	3.964,59	610,48	1.455,37	1.478,18
Volume Air Tanah	51,12	458,12	432,01	2.224,41	1.013,73
Potensi Sumberdaya Air	362,70	4.422,71	1.042,49	3.679,78	2.491,91

Sumber: Bappeda DIY, 2012

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2.5 Tabel Rerata Sungai di DIY

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m ³ /det)					
	2012		2013		2014	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Sungai Progo (Duwet)	0,37	292,49	1,26	148,45	0,03	120,83
Sungai Bedog (Guwosari)	1,82	33,75	2,66	12,71	1,75	10,36
Sungai Code (Kaloran)	0,79	13,32	1,09	3,71	0,99	2,76
Sungai Winongo (Padokan)	0,07	11,96	0,21	5,01	0,26	4,59
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,17	11,71	0,43	2,67	0,26	2,48
Sungai Opak (Pulo)	0,002	3,93	0,02	0,89	0,05	0,74

Sumber: Bidang SDA, Dinas PUP ESDM 2014

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk SBT Bribin sebesar 0,95 m³/det, SBT Ngobaran 0,70 m³/det, SBT Seropan 0,80 m³/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/det.

Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan CAT yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km², yang meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Perhitungan volume resapan air tanah yang dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka airtanah mendapatkan bahwa volume imbuhan air di cekungan ini mencapai 443 juta m³ /tahun. Perhitungan volume air dalam akuifer mendapatkan bahwa 3,5 milyar m³ air terkandung dalam akuifer. Hal ini menunjukkan bahwa, pada musim kemarau yang panjang eksploitasi terhadap airtanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air.

Total ketersediaan air di DIY adalah 11.999.000,58m³/tahun dan pemanfaatannya untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian sebanyak 1.672.000,98 m³/tahun. (*Neraca Sumber Daya Alam Daerah DIY; 2012*)

Untuk keperluan pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan air tanah dalam atau sumur bor atau dikenal dengan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat pada 95 jaringan irigasi air tanah, Kabupaten Gunungkidul 51 buah dan Kabupaten Sleman 44 buah. (*Dinas PUP PSDM, 2012*)

2.1.1.6 Klimatologi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu.

Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu Angin musim barat daya (Muson Barat) dan Angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Menurut Catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, dalam buku DDA 2014 yang diterbitkan oleh BPS, pada Tahun 2013 suhu udara rata-rata di DIY menunjukkan angka 26,08°C, dengan suhu minimum 18,4°C dan suhu maksimum 35,7°C. Sementara curah hujan perbulan sekitar 230 mm dengan hari hujan per bulan 15 kali.

Untuk kelembaban udara tercatat minimum 44% dan maksimum 98%, tekanan udara antara 1009,9mb – 1019,4 mb, arah angin terbanyak adalah Angin Barat dengan kecepatan angin rata-rata 2,0 – 9,0 knot.

Berikut Peta iklim yang menunjukkan kondisi iklim di wilayah DIY yang terbagi menjadi agak basah, sedang dan agak kering



Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2013

Gambar 2.6 Peta Iklim di DIY

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Bagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selain merupakan kawasan lindung juga merupakan kawasan budidaya yang telah disesuaikan dengan penggunaan lahan eksisting Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis GIS menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan lindung (39,64% dari luas wilayah) sedangkan sisanya adalah kawasan kawasan budidaya. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian. Penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam peta Pola Ruang.

Berdasarkan Perhitungan necara sumberdaya lahan yang dilakukan dengan teknik penginderaan jauh menggunakan CITRA SATELIT ASTER dari hasil perekaman tahun 2007 dan 2012, yang memiliki resolusi spasial 15 meter,

hasil analisis menunjukkan penggunaan lahan di wilayah DIY mengalami perubahan penggunaan lahan sebesar 2.754,01 ha. Perubahan terbesar adalah penambahan areal permukiman baru seluas 1.595,94 ha, kemudian menyusutnya areal sawah seluas 1.207,49 ha dan pertanian lahan kering seluas 560,78 ha. (Sumber : Bappeda DIY, 2012)

Dalam Perda 2/2010 tentang RTRW DIY, Kawasan Lindung direncanakan seluas lebih kurang 155.810,75 hektar atau sekitar 48,98% dari total luas wilayah DIY, dan kawasan budidaya direncanakan seluas lebih kurang 162.275 hektar atau sekitar 51,02% dari total luas wilayah DIY. Melalui pelaksanaan pengendalian penataan ruang realisasi yang dapat dicapai pada Tahun 2012 dan 2013 adalah seperti yang tertera dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.6 Luasan Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Realisasinya

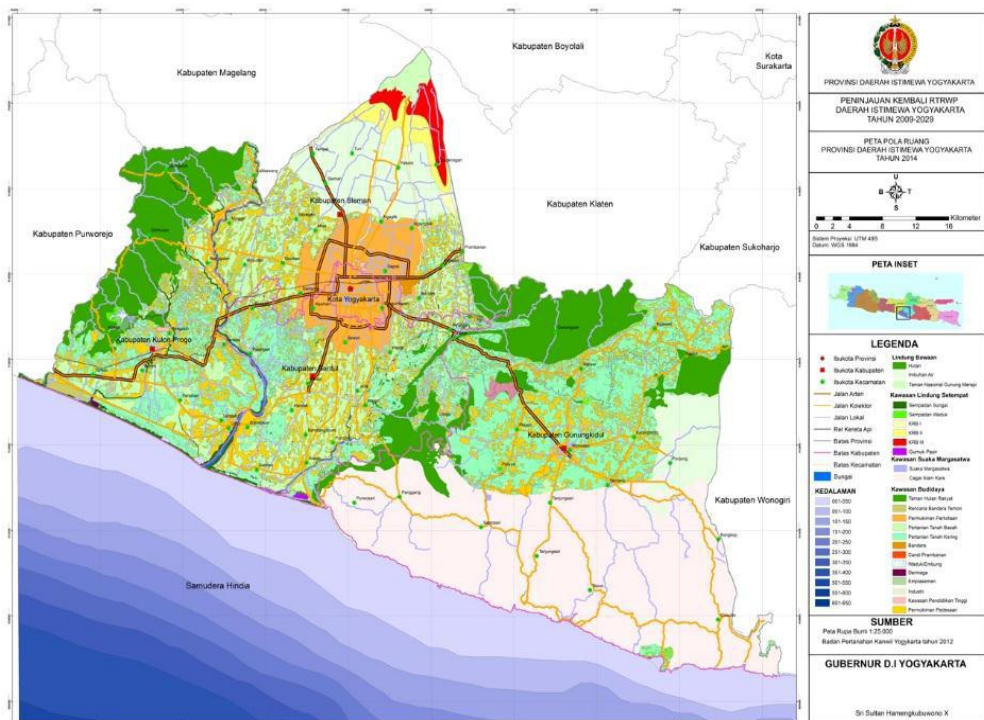
No	RENCANA POLA RUANG	RTRW	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014
	KAWASAN LINDUNG				
	Kawasan Lindung Bawah				25.860,20
1	Hutan lindung	48.146,10	36.109,57	36.109,57	
2	Kawasan resapan air	19.976,99	7.990,79	9.988,49	
	Kawasan Lindung Setempat				6.372,54
3	Kawasan sempadan sekitar waduk, embung, telaga, laguna	855,27	581,58	581,58	
4	Kawasan sempadan pantai	2.932,28	1.905,98	2.052,59	
5	Kawasan sempadan sungai	10.290,53	4.116,21	4.116,21	
	Kawasan Suaka Alam				33.587,74
6	Cagar alam geologi	68.200,32	37.510,17	40.920,19	
7	Hutan penelitian/taman hutan raya	679,86	503,09	543,88	
8	Cagar budaya	4.578,90	3.205,23	3.205,23	
9	Cagar alam	150,51	135,49	135,45	
	Total Luas	155.810,75	92.058,11	97.653,23	65.820,48
	Luas DIY		318.085,74		
	Persentase (%) Luas Kawasan		48,9838834		

Sumber: Hasil analisis GIS RTRW DIY 2010, DPUP ESDM 2014

Tabel 2.7 Luasan Penetapan Kawasan Budidaya Berdasarkan RTRW dan Realisasinya

No	RENCANA POLA RUANG	RTRW	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	
	KAWASAN BUDIDAYA					
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	16.532,92	9.919,75	9.919,75	10.811,39	
2	Kawasan pertanian lahan basah	56.249,55	51.249,91	50.624,59	62.474,61	
3	Kawasan pertanian lahan kering	60.394,87	18.323,89	26.271,77		
4	Kawasan permukiman kota	21.834,97	10.917,48	14.192,73	62.474,61	
5	Kawasan peruntukan pertambangan	3.688,47	3.688,47	737,69	667,58	
6	Kawasan peruntukan industri	1.171,28	292,82	351,38	251,32	
7	Kawasan peruntukan pariwisata	318,25	190,95	190,95	318,26	
8	Kawasan pendidikan tinggi	960,85	384,34	518,859	705,71	
9	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	313,51	94,05	150,48		
10	Kawasan militer dan kepolisian	810,35	591,55	591,55	763,05	
	Total Luas	162.275,00	97.653,23	103.549,77	138.466,53	
	Luas DIY					318.085,74
	Persentase (%) Luas Kawasan					51,016118

Sumber: Hasil analisis GIS RTRW DIY 2010, Hasil audit pemanfaatan ruang DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014



Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014

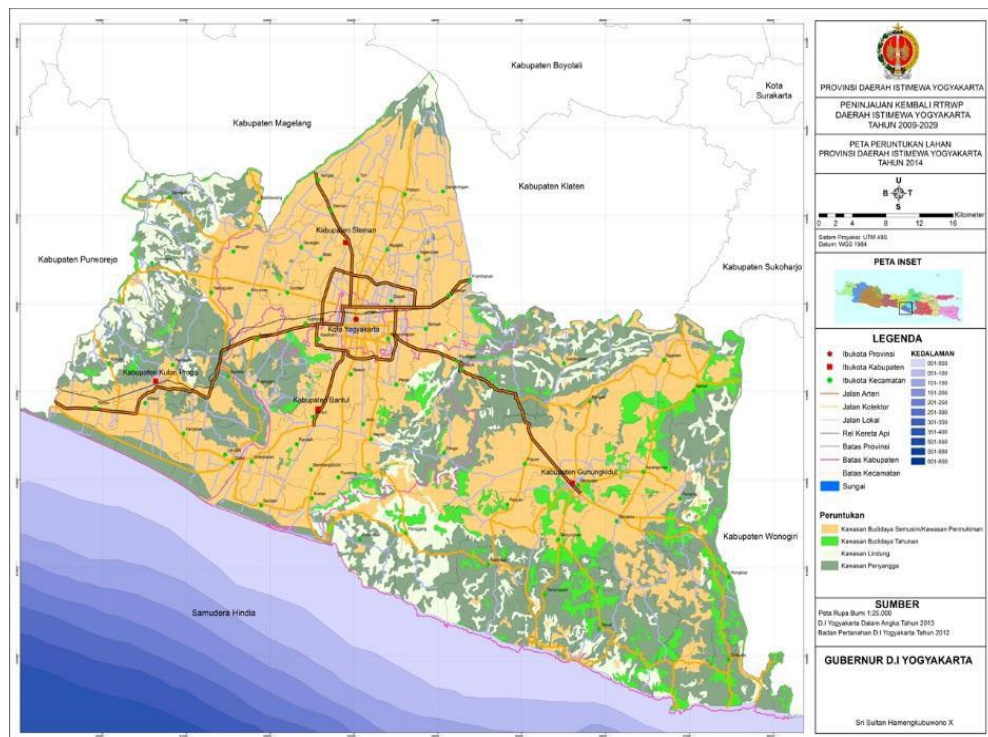
Gambar 2.7 Peta Pola Ruang DIY

2.1.1.8 Peruntukan Lahan

Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan

Peruntukan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 kategori yang ada yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budi daya tanaman semusim/permukiman dan kawasan budi daya tanaman tahunan. Hampir setengah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan budidaya semusim/kawasan permukiman sebesar 49,97%. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki peruntukan lahan sebagai kawasan budi daya tanaman semusim/permukiman meliputi semua Kartamantul, sebagian besar Kabupaten Sleman kecuali di sekitar puncak Gunung Merapi, sebagian kecil Kabupaten Gunungkidul (sekitar Wonosari, Karangmojo, Playen), dan sebagian kecil Kabupaten Kulon Progo (sekitar daerah Temon, Wates). Peruntukan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan penyangga sebesar 30,17% yang tersebar di semua daerah kecuali Kartamantul.

Kawasan penyangga yang dominan terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kawasan lindung sebesar 11,6% dan memiliki sebaran yang hampir sama dengan kawasan penyangga. Kawasan lindung terutama terdapat di kawasan bentang alam karst. Sementara peruntukan kawasan budidaya tahunan memiliki porsi paling kecil sekitar 8,27%. Kawasan budi daya tanaman tahunan terdapat terdapat di semua daerah dengan jumlah relatif sedikit.



Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014

Gambar 2.8 Peta Peruntukan Lahan DIY

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Merujuk pada strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Yogyakarta menyongsong peradaban baru maka strategi pengembangan potensi wilayah harus mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pembangunan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan tata ruang, & pengelolaan aspek pertanahannya

- Tata ruang & infrastruktur (dalam bingkai wilayah maritim, agraris, & niaga) mencakup hubungan sinergis antara fungsi ruang darat, laut, udara, dan sungai dengan bertumpu pada kerjasama niaga antar wilayah yang mengandalkan potensi darat, laut, udara, dan sungai
- Implementasi EKONOMI HIJAU : keberlanjutan ekologis & desentralisasi tata kelola lingkungan
- Efektifitas kontrol lingkungan dalam skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi terhadap alam sekitar kehidupan mereka

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, kawasan budidaya di DIY terdiri dari:

1) Kawasan Hutan Produksi

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diantaranya adalah :

- a. melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
- b. mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- c. mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi;
- d. mempertahankan fungsi kawasan hutan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diarahkan pada:

- a. Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha;
- b. Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha

2) Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah antara lain adalah:

- a. melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, mpenjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

- a. melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- b. mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
- c. mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering;
- d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

Penetapan kawasan pertanian di DIY diarahkan sebagai berikut:

- a. Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
- b. Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

DIY dalam rangka melindungi lahan pertanian abadi dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan telah mempunyai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha (merupakan lahan inti). Lahan diluar lahan inti dalam kawasan

pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di wilayah:

- a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
- b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
- c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan
- d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.

3) Kawasan Pertambangan

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertambangan adalah memanfaatkan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan diarahkan sebagai berikut:

Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di:

- a. kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana alam;
- b. kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong dan Panggang, sementara untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin
- b. Kabupaten Kulon Progo yaitu:
 - Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangaan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, dan Pengasih;
 - Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.
- c. Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir.

4) Kawasan Industri

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi a) mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b) mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran. Arahkan penetapan kawasan peruntukan

industri meliputi kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

5) Kawasan Pariwisata

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata adalah memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam. Arahan penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi :

- a. Kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- b. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
- c. Kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

6) Kawasan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi meliputi a) Memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi. Arah penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagai berikut:

- a. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;
- b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
- c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

7) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan pariwisata, pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut. Arahan penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY, yaitu:

- a. kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul
- b. kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, wilayah rawan bencana di DIY meliputi :

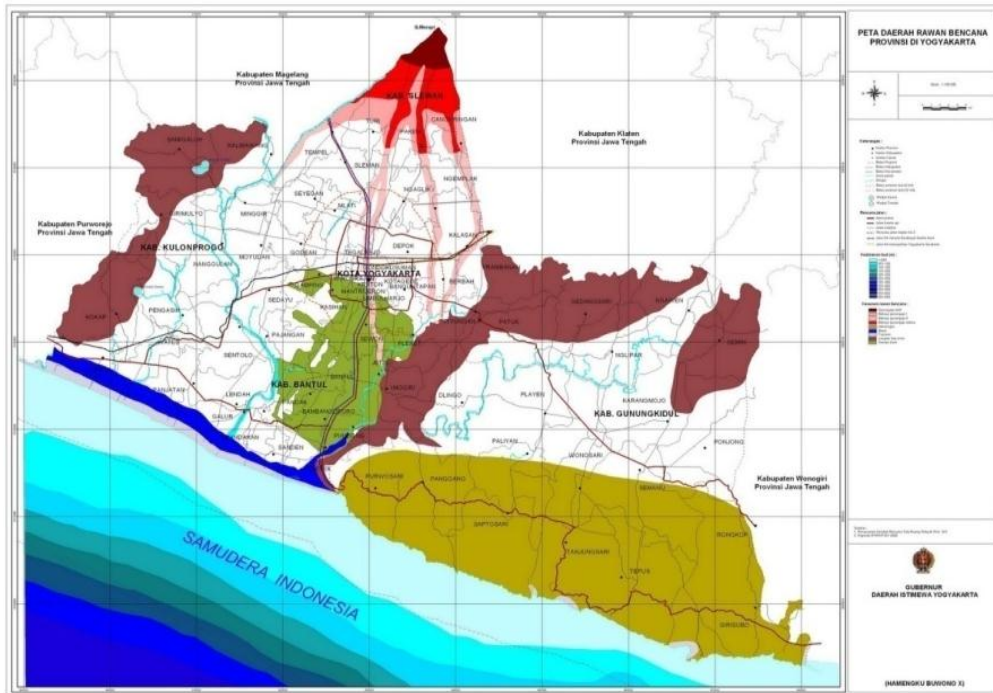
- 1) Kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
- 3) Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
- 4) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst.
- 5) Kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota.

Bencana alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.

- 6) Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten/Kota.

Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi.

- 7) Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).



Sumber : RTRW DIY, Tahun 2009-2029

Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana DIY

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yang mungkin terjadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Sedangkan potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam dan manusia/sosial, baik frekuensi maupun kerawannya selama ini relatif kecil.

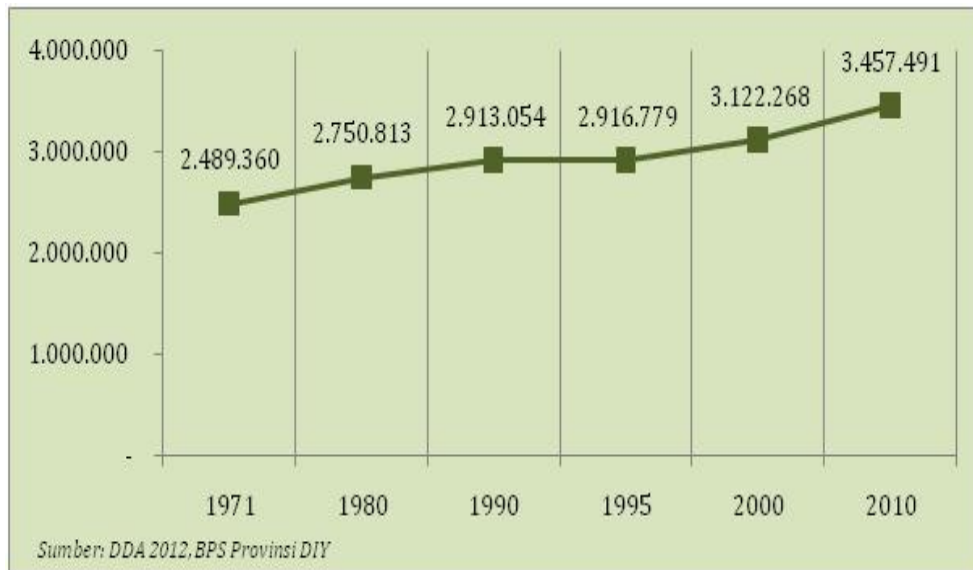
2.1.4 Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk

masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 29.834 orang menjadi 3.487.325 orang pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dari hasil estimasi diperkirakan mencapai 3.514.762 jiwa dan 3.594.854 jiwa pada tahun 2013.



Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus Tahun 1971-2010

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Tabel 2.8 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2013

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010	2011	2012	2013
0 – 14	40,90	35,06	28,28	22,38	21,96	21,88	21,80	21,75
15 – 64	54,82	59,14	64,46	69,10	68,53	68,13	68,45	68,66
65 +	4,38	5,80	7,26	8,53	9,51	10,00	10,55	11,01
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS DIY, Tahun 2013

Kondisi tahun 2013 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3594854 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.141.684 orang. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 402.709 orang.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013

Tahun/ Lokasi	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogya	
2008	385 937	886 061	675 471	1 054 751	390 783	3 393 003
2009	387 493	899 312	675 474	1 074 673	389 685	3 426 637
2010	388 869	911 503	675 382	1 093 110	338 627	3 457 491
2011	390207	921263	677998	1107304	390553	3487325
2012	393221	927958	684740	1114833	394012	3514762
2013	403203	947066	700192	1141684	402709	3594854
Jumlah	1186631	2796287	2062930	3363821	1187274	

Sumber: BPS DIY, Tahun 2013

Sementara itu jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan DIY sebesar 50,57% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang sekitar 49,43%. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya sex ratio DIY sebesar 97,76% yang berarti bahwa terdapat sekitar 97 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Wilayah DIY yang memiliki sex ratio tertinggi adalah Kabupaten Sleman, yaitu 100,53% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 93,69%. Untuk Kabupaten Sleman jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

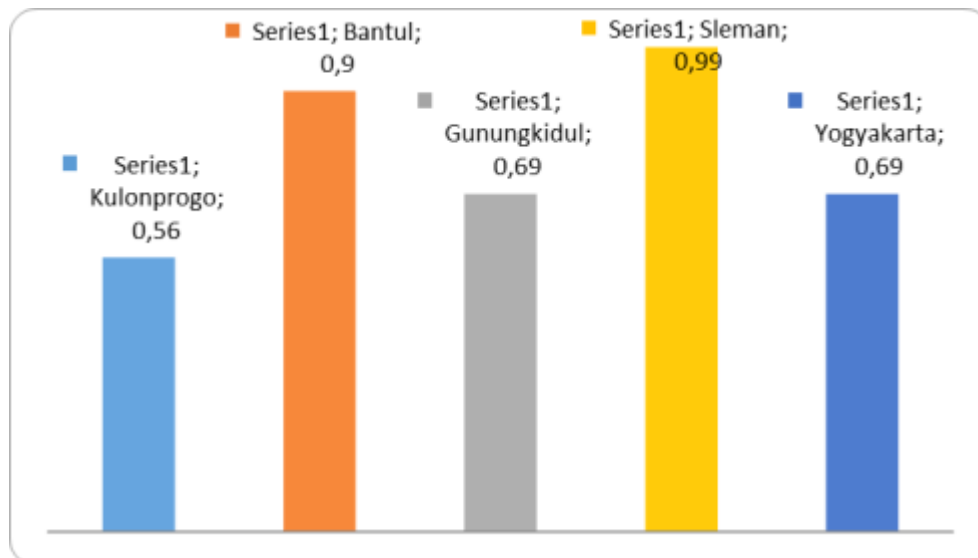
Tabel 2.10 Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
Kulon Progo	197.600	205.603	403.203	96,11
Bantul	469.981	477.085	947.066	98,51
Gunungkidul	337.696	362.496	700.192	93,16
Sleman	574.891	566.793	1.141.684	101,43
Kota Yogyakarta	195.704	207.005	402.709	94,54
DIY	1.775.872	1.818.892	3.594.854	97,63

Sumber: DDA 2014, BPS Provinsi DIY

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY relatif rendah. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk DIY tercatat sebesar 0,82% turun dari tahun 2010 yang sebesar 1,02%. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk tak lepas dari keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Pada tahun 2012 Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,56% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 0,99%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi ke arah kedua kabupaten tersebut sehingga banyak pendaatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan oleh semakin jenuhnya Kota Yogyakarta untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota. Secara grafis laju pertumbuhan penduduk kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada diagram batang dibawah ini :



Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.11 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012

Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2012, Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk 684.740 orang (19,48%) tercatat sebagai kabupaten berkepadatan penduduk terendah, yaitu 461 orang/km² sedangkan Kota Yogyakarta yang memiliki wilayah terkecil dengan jumlah penduduk 394.012 orang (11,12%) tercatat sebagai wilayah DIY yang berkepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.123 orang/km². Tabel dibawah ini

menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten dan Kota diwilayah DIY pada tahun 2008 sd 2013.

Tabel 2.11 Kabupaten Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kulonprogo	586,27	658	661	663	672	680	688
Bantul	506,85	1748	1774	1798	1819	1844	1869
Gunungkidul	1.485,36	455	455	455	461	466	471
Sleman	574,82	1835	1870	1902	1942	1964	1986
Yogyakarta	32,50	12024	11990	11958	12077	12234	12391
DIY	3.185,80	1065	1076	1085	1102	1115	1128

Sumber: DDA 2014, BPS Provinsi DIY

Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk Kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada peta dibawah ini :



Sumber : BAPPEDA DIY, 2013

Gambar 2.12 Peta Kepadatan Penduduk di DIY

Angka IPM DIY merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk DIY. IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik.

Tabel 2.12 Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2009-2013

Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah)	IPM	Peringkat IPM Nasional
2009	73,16	90,18	8,78	644,67	75,23	
2010	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77	
2011	73,27	91,49	9,20	650,16	76,32	
2012	73,27	92,02	9,21	653,78	76,75	4
2013	73,62	92,86	9,33	656,19	77,37	2

IPM DIY menurut Komponen, 2009-2013

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2013

Angka IPM DIY selama kurun waktu 2009 hingga 2013 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, IPM DIY tercatat sebesar 77,37 naik dari angka IPM tahun 2012 yang sebesar 76,75. Nilai IPM DIY tahun 2013 menduduki peringkat 2 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

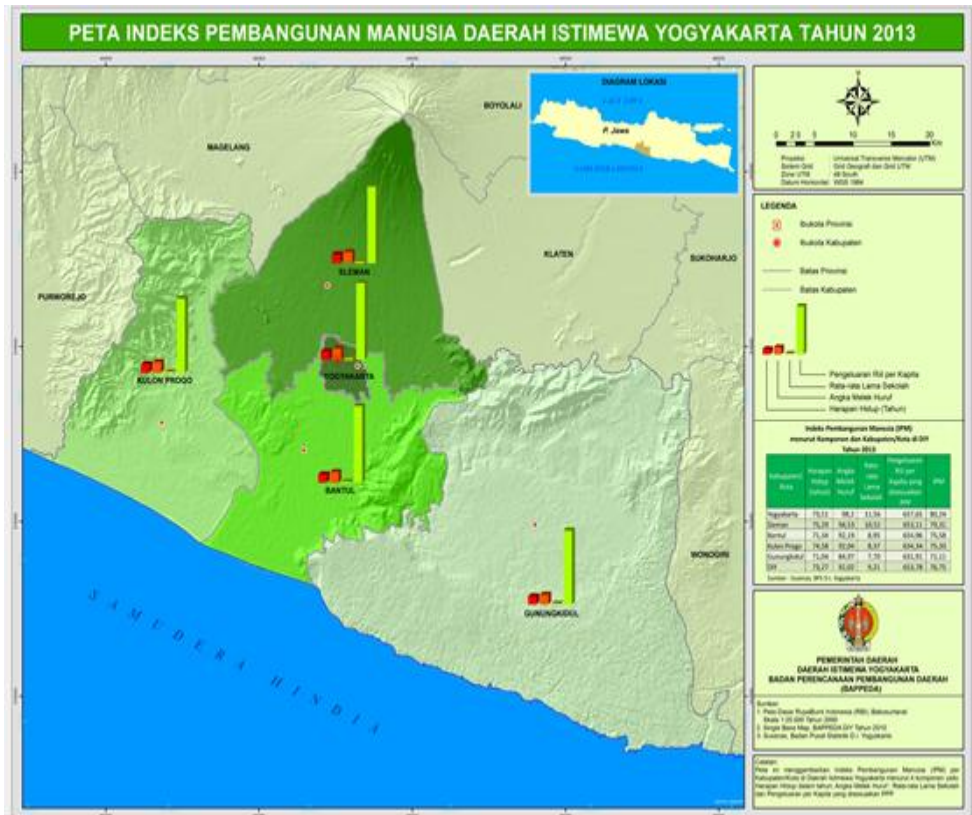
Sementara itu jika dilihat menurut kabupaten/kota, peringkat IPM Kota Yogyakarta selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY dan peringkat kedua capaian IPM adalah Kabupaten Sleman.

Tabel 2.13 IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	IPM					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33	75,95
Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05	75,58	76,01
Gunungkidul	70,00	70,18	70,45	70,84	71,11	71,64
Sleman	77,24	77,70	78,20	78,79	79,31	79,97
Kota Yogyakarta	78,95	79,29	79,52	79,89	80,24	80,51
DIY	74,88	75,23	75,77	76,32	76,75	77,37

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008-2013

Dibawah ini adalah peta IPM masing-masing Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2013.



Gambar 2.13 Peta IPM di DIY

2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendekatan Perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat

perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

a. Penduduk Miskin

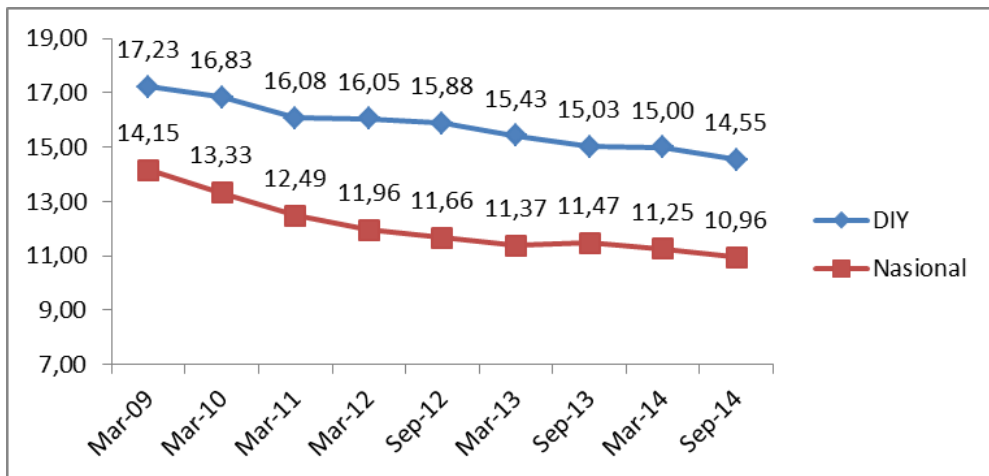
Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan DIY selama periode 2009-2014 mengalami peningkatan. Pada September 2013 garis kemiskinan DIY tercatat sebesar 303.843 rupiah per kapita per bulan. Sementara kondisi bulan September tahun 2014, tercatat garis kemiskinan meningkat menjadi 321.056 rupiah per kapita per bulan. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi. Jumlah penduduk miskin DIY pada periode 2009 hingga 2014 cenderung mengalami penurunan dari 585,78 ribu orang pada Maret 2009 menjadi 532,59 ribu orang pada September 2014,

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2009-2013

Periode Survey	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2009	220.830	585,78	17,23
Maret 2010	234.282	577,30	16,83
Sept 2011	257.909	564,23	16,08
Maret 2012	260.173	565,32	16,05
Sept 2012	270.110	562,11	15,88
Maret 2013	283.454	550,19	15,43
Sept 2013	303.843	535,18	15,03
Maret 2014	313.452	544,87	15,00
Sept 2014	321.056	532,59	14,55

Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2014

Jika dilihat dari presentase penduduk miskin terhadap total penduduk DIY, tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan DIY tercatat sebesar 14,55% pada periode September 2014. Meskipun tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan



Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2014

Gambar 2.14 Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2009-2014

Dilihat dari sebarannya, Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih kecil daripada di pedesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 13,36 persen mengalami penurunan 0,37 poin jika dibandingkan dengan keadaan September 2013 yang besarnya mencapai 13,73 persen. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2014 sebesar 16,88 persen, mengalami penurunan 0,74 poin jika dibandingkan dengan keadaan September 2013 yang mencapai 17,62 persen. Meskipun tingkat penduduk miskin di perkotaan lebih kecil, dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan yang menyebabkan jumlah penduduk di kota meningkat pesat.

Tabel 2.15 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-2014

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)
Mar-09	311,47	14,25	274,31	22,60
Mar-10	308,36	13,98	268,94	21,95
Mar-11	304,34	13,16	256,55	21,82
Mar-12	305,89	13,13	259,44	21,76
Sep-12	306,50	13,1	255,60	21,29
Mar-13	315,47	13,43	234,73	19,29
Sep-13	325,53	13,73	209,66	17,62

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)
Mar-14	333,03	13,81	211,84	17,36
Sep-14	324,43	13,36	208,15	16,88

Sumber: Susenas September 2012, Maret 2013, dan September 2014

Dilihat dari kontribusinya, lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di pedesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Dengan beras masih menjadi kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan, program-program terkait operasi pasar beras maupun beras untuk masyarakat miskin masih perlu dilanjutkan dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerima. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengeluaran untuk rokok kretek filter yang masih menempati urutan atas. Upaya-upaya promosi kesehatan untuk masyarakat perihal bahaya rokok harus terus diupayakan.

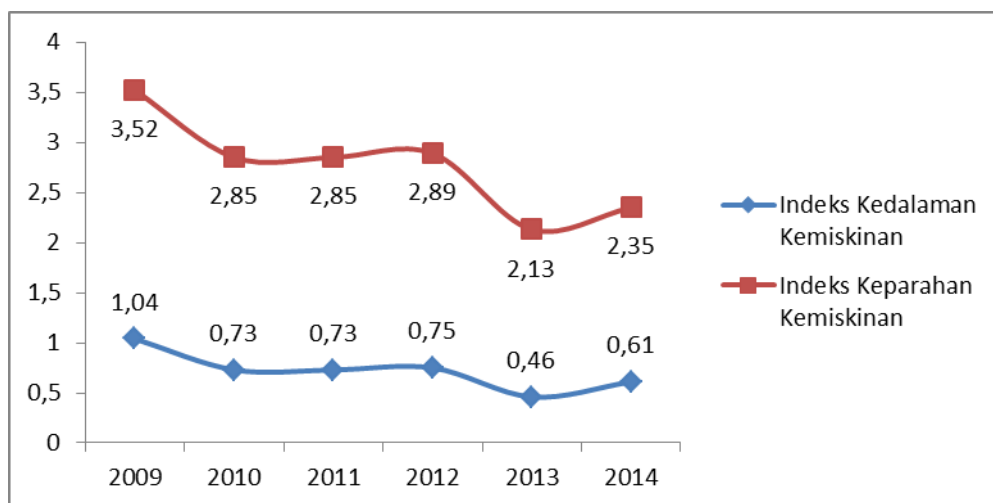
Tabel 2.16 Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2014

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Makanan			
Beras	29,33	Beras	40,2
Rokok kretek filter	8,3	Rokok kretek filter	4,46
Daging ayam ras	7,32	Daging ayam ras	4,25
Telur ayam ras	5,74	Gula pasir	4,07
Tempe	4,61	Mie instan	3,94
Non Makanan			
Perumahan	24,96	Perumahan	18,66
Bensin	13,27	Bensin	11,02
Pendidikan	10,52	Kesehatan	7,69
Listrik	7,01	Pakaian jadi anak-anak	7,18
Pakaian jadi anak-anak	5,11	Listrik	6,44

Sumber: Susenas September 2014

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (poverty gap index) dan tingkat keparahan (poverty severity index) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode September 2014 mengalami peningkatan. Kenaikan nilai

kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauh garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar.



Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2014

Gambar 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2009-2014

b. Pendapatan Perkapita

Kinerja perekonomian DIY selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan peningkatan dengan diindikasikan oleh selalu meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp45,6 triliun dan pada tahun 2014 sudah mencapai Rp 70,86 triliun. Ini berarti pula bahwa secara nominal PDRB meningkat sebesar 55% selama lima tahun.

Tabel 2.17 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

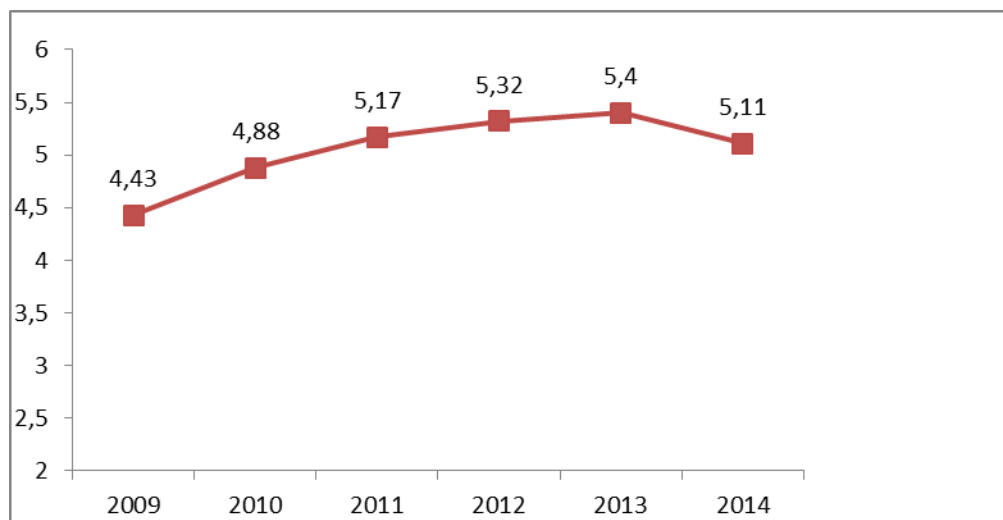
Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1. Pertanian	6.644,70	7.373,85	8.355,33	8.861,28	9.503,83
2. Pertambangan dan Penggalian	304,66	361,79	379,95	416,53	452,4
3. Industri Pengolahan	6.396,64	7.434,02	7.609,34	8.771,19	9.662,21
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	607,07	675,91	727,57	796,7	958,13
5. Konstruksi	4.833,42	5.580,60	6.186,32	6.908,38	7.578,02
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.008,18	10.246,58	11.457,20	13.152,52	14.779,13
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4.119,97	4.572,93	4.903,52	5.400,53	5.981,63
8. Keuangan, Real Estat dan	4.552,67	5.158,23	5.876,20	6.543,15	7.447,28

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Jasa Perusahaan					
9. Jasa-jasa	9.158,28	10.381,24	11.536,32	12.840,03	14.500,80
	45.625,59	51.785,15	57.031,76	63.690,32	70.863,44

Sumber: BPS DIY

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan dari sebesar 4,43% pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 5,40% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,29 poin menjadi sebesar 5,11



Sumber: BPS DIY

Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB DIY, Tahun 2009-2014

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2014. Selama periode tahun 2010-2014 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik sebesar 47 persen. Nilai PDRB per kapita tahun 2010 tercatat sebesar Rp13,1 juta, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp19,4 juta di tahun 2014.

Tabel 2.18 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	45.625.589	51.785.150	57.034.383	63.690.318	70.863.438
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.457.769	3.487.325	3.514.762	3.594.854	3.637.116
PDRB per kapita adh. Berlaku: (rupiah)	13.195.095	14.849.534	16.227.097	17.717.081	19.483.414
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	9,2	12,54	9,28	9,18	9,96

Sumber: BPS DIY, Tahun 2014

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Nilai riil PDRB per kapita terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 6 juta tahun 2010 menjadi Rp 7,1 juta di tahun 2014, atau terjadi kenaikan sebesar 16,66 persen. Yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya laju pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2014. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel 2.19 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%)

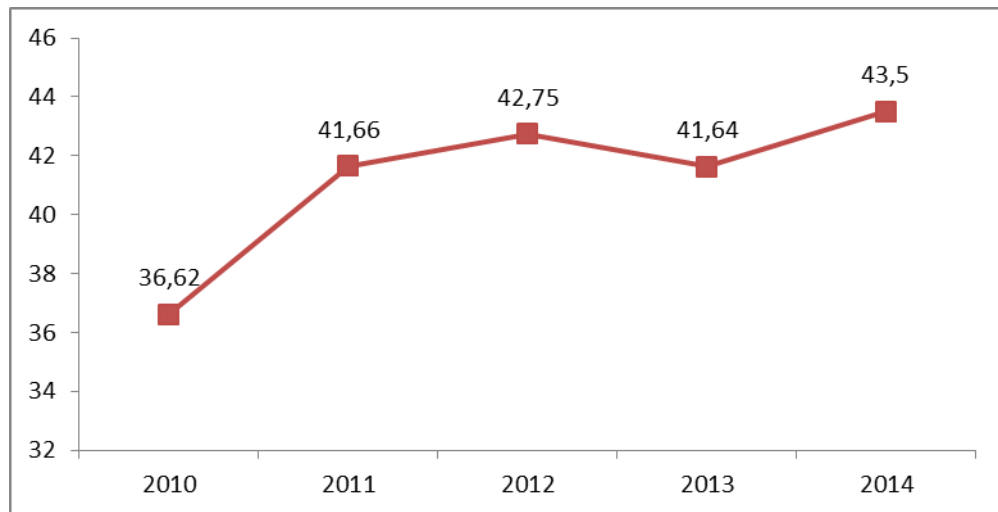
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
PDRB adh. konstan 2000 (juta rupiah)	21.044.042	22.131.774	23.309.218	24.567.476	25.824.098
Penduduk pertengahan tahun (orang) ¹⁾	3.457.769	3.487.325	3.514.762	3.594.854	3.637.116
PDRB per kapita adh. konstan 2000 (rupiah)	6.086.017	6.346.347	6.631.806	6.834.068	7.100.158
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	3,94	4,28	4,50	3,05	3,88

Sumber: BPS DIY, Tahun 2014

c. Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Regional

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan di antaranya digunakan Rasio Gini dan Kriteria Bank Dunia yang paling lazim digunakan. Perkembangan rasio gini DIY tahun 2014 masih tinggi yaitu 43.5 dibandingkan Rasio Gini 2013 yang mencapai 41.64. Perkembangan Rasio Gini periode 2010-2014 masih

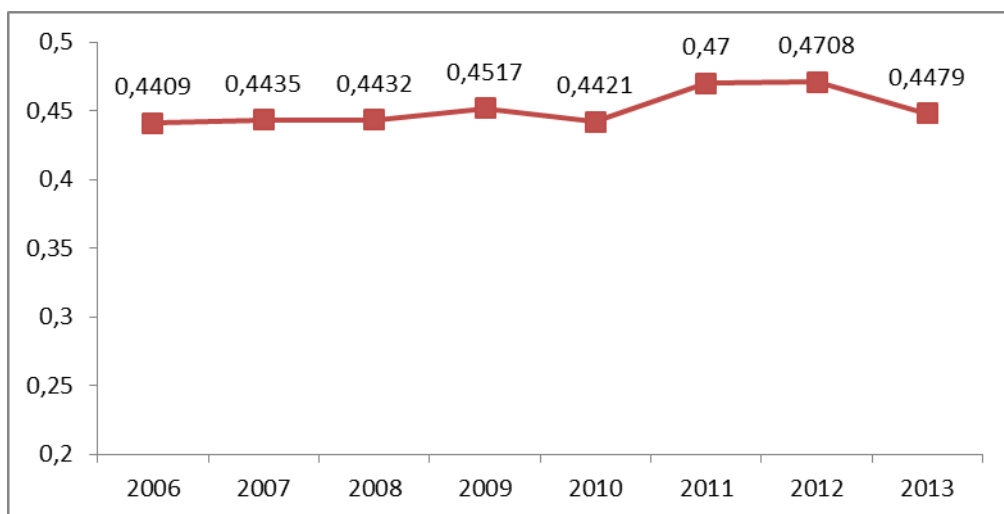
cenderung meningkat, oleh karenanya masih perlu terobosan kebijakan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah untuk mengurangi kesenjangan dengan pendapatan masyarakat golongan atas.



Sumber: BPS DIY

Gambar 2.17 Rasio Gini di DIY, Tahun 2009-2013

Ketimpangan antar region yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2006-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan, yaitu dari 0,4409 pada tahun 2006 menjadi 0,4479 pada tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin memprihatinkan. Dengan demikian pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan lebih diarahkan untuk pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan di arahkan ke daerah-daerah yang tertinggal.



Sumber: BPS DIY

Gambar 2.18 Indeks Williamson DIY Tahun 2006-2014

Tabel nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan antar daerah. Sebagai penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar secara relatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2013 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kondisi sebagian besar lahan pertanian pegunungan berbatu sehingga cara penanaman dan produktivitas komoditas pertaniannya juga tidak seperti di lahan pertanian subur. Sementara itu, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah terkecil tetapi mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar.

Tabel 2.20 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013**)	2014
Kulonprogo	3.547.056	3.867.136	4.196.448	4.641.905	4.980.812
Bantul	9.076.401	10.097.345	11.242.151	12.729.840	14.225.395
Gunungkidul	6.624.572	7.250.682	7.962.605	8.893.405	9.719.492
Sleman	13.611.725	15.097.600	16.696.582	19.105.499	20.461.475
Kota Yogyakarta	11.777.579	12.962.435	14.327.563	15.981.933	17.738.662
D I Y	45.625.589	51.785.150	57.037.833	63.690.318	70.738.438

Sumber: BPS DIY

Gambaran kesenjangan antardaerah antara lain dapat dilihat dengan membandingkan nilai PDRB per kapita antarkabupaten/kota di DIY. Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir menjadi wilayah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi. Selama tahun 2014, secara nominal rata-rata pendapatan penduduk Kota Yogyakarta mencapai Rp 43,51 juta, dibanding dengan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Kulon Progo lebih dari 3,5 kali lipat. Bahkan jika dibanding dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Sleman juga masih di atas 2,4 kali lipat, meskipun Kabupaten Sleman memiliki nilai nominal PDRB tertinggi di DIY

Tabel 2.21 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kulonprogo	9.120.975	9.910.472	10.671.984	11.770.582	12.216.586
Bantul	9.956.746	10.960.3317	12.114.961	13.564.996	14.826.691
Gunungkidul	9.807.962	10.694.252	11.628.655	12.980.950	13.732.092
Sleman	12.451.096	13.634.545	14.976.756	16.920.504	17.723.220
Yogyakarta	30.303.585	33.189.951	36.363.267	40.472.989	43.512.626
D I Y	12.083.874	13.195.095	14.849.534	16.227.097	19.483.414
Kabupaten/Kota/	2010	2011	2012	2013	2014

Sumber: BPS DIY

d. Laju Inflasi

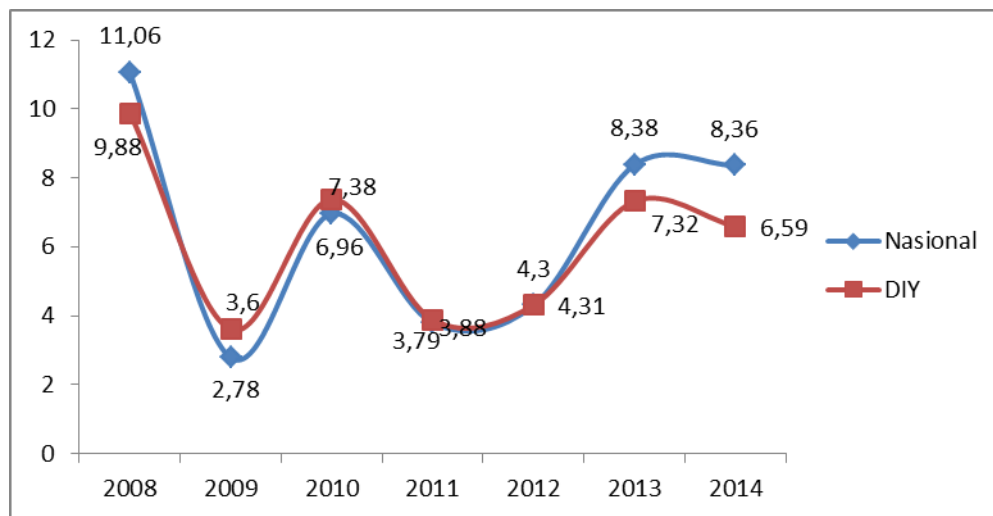
Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 2.22 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Bulan	Inflasi Bulanan			
	2011	2012	2013	2014
Jan	0,84	0,25	0,96	1,05
Feb	0,1	0,1	0,93	0,07
Mar	0,21	0,36	0,79	0,14
Apr	-0,28	0,11	-0,3	0,07
Mei	0,13	0,05	-0,29	0,05
Jun	0,26	0,75	0,84	0,43
Jul	0,9	0,76	2,58	0,85
Agt	0,63	0,42	0,87	0,09
Sep	0,19	0,19	-0,24	0,49
Okt	0,04	0,38	0,61	0,28
Nov	0,33	0,2	0,2	1,13
Des	0,48	0,66	0,17	1,76
Inflasi Tahunan	3,88	4,31	7,32	6,59

Sumber: BPS DIY

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pola inflasi bulanan di Kota Yogyakarta seperti yang ditunjukkan oleh Tabel diatas selama tahun 2011-2014 biasanya mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, liburan tengah tahun dan liburan akhir tahun. Selain itu, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca ekstrem, yang akan menyebabkan gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang kemudian akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi. Diluar trend musiman tersebut, kenaikan harga BBM memberikan dampak pada meningkatnya inflasi tahun 2014. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel xx inflasi bulanan mencapai lebih dari satu digit paska pengumuman kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2014. Dampak kenaikan harga tersebut masih diperkirakan memberikan andil terhadap tingkat inflasi pada awal tahun 2015.



Sumber: BPS DIY, 2015

Gambar 2.19 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional

Jika melihat pola inflasi tahunan selama tahun 2008-2014, inflasi Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pola inflasi kota Yogyakarta dapat dipertahankan lebih rendah dari inflasi nasional sejak tahun 2012.

Sementara itu jika dilihat dari kelompok pengeluaran, bahan makanan masih memberikan andil tertinggi terhadap tingginya inflasi sejak tahun 2008 hingga 2014. Pada tahun 2014 laju inflasi tahunan kelompok bahan makanan mencapai angka 7,70%. Sedangkan kelompok Transportasi dan Komunikasi serta Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar mengalami laju inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2014 dikarenakan adanya kebijakan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik maupun gas LPG.

Tabel 2.23 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2014

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Bahan Makanan	14,87	3,91	18,86	1,82	8,10	12,31	7,70
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	9,40	7,50	5,47	7,07	6,90	8,15	2,95
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	13,60	1,40	5,49	3,01	2,99	5,18	8,92

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4	Sandang	8,36	5,81	5,41	9,40	3,56	0	3,61
5	Kesehatan	8,23	1,86	1,97	5,64	1,93	3,08	5,49
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	5,77	2,26	4,25	1,73	1,43	3,17	2,37
7	Transportasi & komunikasi	2,97	(1,23)	5,57	2,40	1,30	10,45	9,36
	Inflasi Kota Yogyakarta	9,88	2,93	7,38	3,88	4,31	7,32	6,59

Sumber: BPS DIY, 2015

2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial DIY terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.

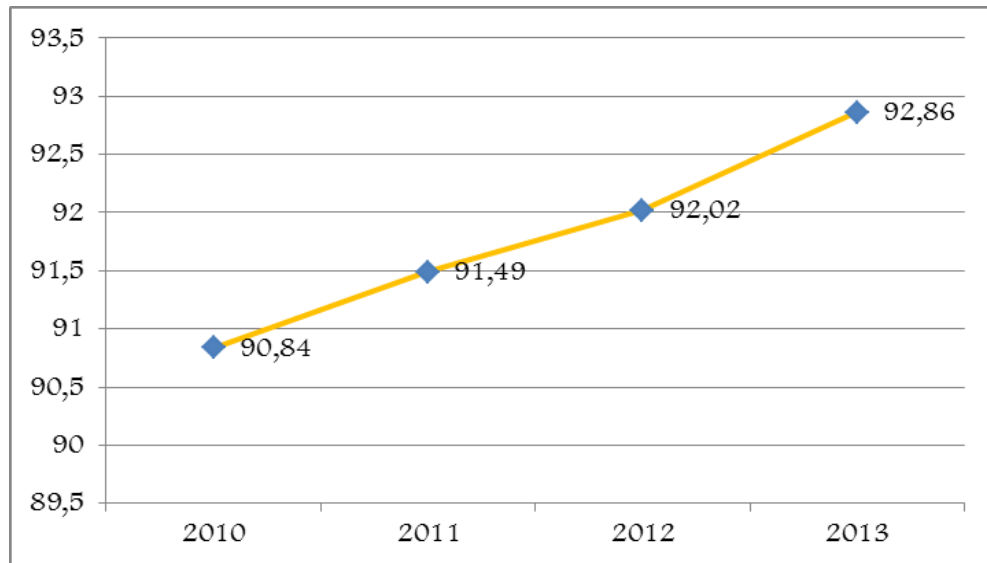
a. Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalan potensi.



Gambar 2.20 Representasi Masyarakat Belajar Baca di DIY

Angka melek huruf DIY selama kurun waktu 2010-2013 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2010 capaian angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,84% kemudian berturut-turut meningkat menjadi 91,49% di tahun 2011, 92,02% di tahun 2012, dan 92,86% di tahun 2013. Berikut adalah perkembangan Angka Melek huruf DIY Tahun 2009-2013:



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Tahun 2010-2013

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian angka melek huruf tahun 2013 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 98,43% sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 85,32%. Capaian Angka Melek Huruf DIY tahun 2010-2012 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.24 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013

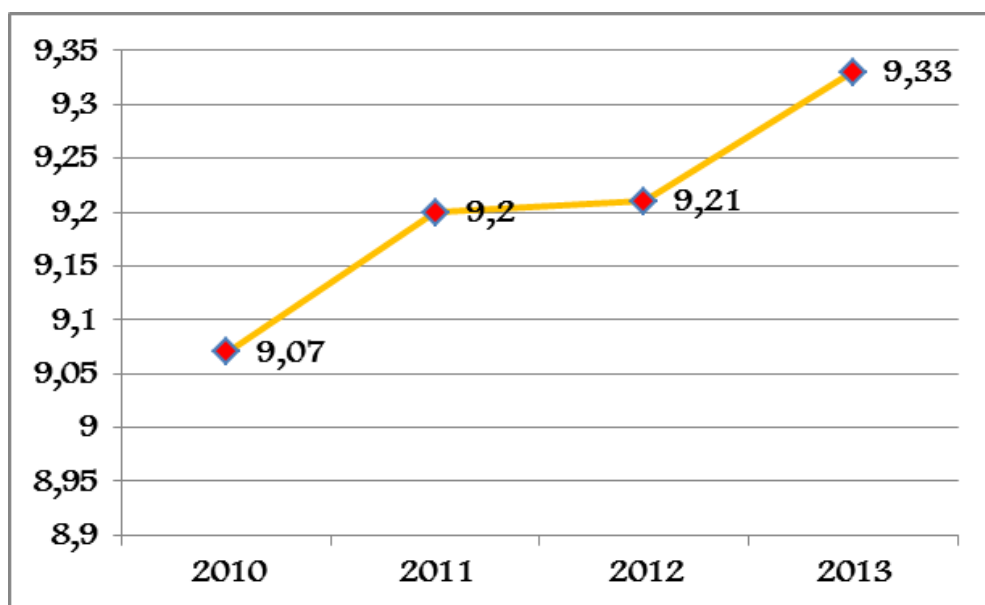
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013
Kota Yogyakarta	98,03	98,07	98,1	98,43
Kabupaten Bantul	91,03	91,23	92,19	92,81
Kabupaten Kulon Progo	90,69	92	92,04	93,13
Kabupaten Gunungkidul	84,66	84,94	84,97	85,22
Kabupaten Sleman	92,61	93,44	94,53	95,11
DIY	90,84	91,49	92,02	92,86

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2014

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, selama 2010-2012 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 9,07 di tahun 2010 menjadi 9,33 di tahun 2013). Peningkatan rata-rata lama sekolah di DIY ini dapat dimaknai bahwa penduduk DIY semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY tahun 2010-2013



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2014, *: Angka sementara

Gambar 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2010-2013

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2013 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,56 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,70 tahun. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2010-2013 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.25 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2013

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013
Kota Yogyakarta	11,48	11,52	11,56	11,56
Kabupaten Bantul	8,82	8,92	8,95	9,02
Kabupaten Kulon Progo	8,2	8,37	8,37	8,37
Kabupaten Gunungkidul	7,65	7,7	7,7	7,79
Kabupaten Sleman	10,3	10,51	10,52	10,55
DIY	9,07	9,2	9,21	9,33

Sumber : BPSProvinsi DIY, 2013



Gambar 2.23 Anak Sekolah di DIY

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2009/2010 – 2012/2013 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2009/2010-2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	p	Rata-rata
APK Tingkat SD												
Kota Yogyakarta	150,12	131,06	140,25	149,32	129,88	139,29	148,87	129,09	138,63	141,59	138,60	140,13
Kabupaten Bantul	112,74	96,62	104,39	113,61	96,52	104,76	114,05	97,14	105,29	108,46	103,21	105,90
Kabupaten Kulon Progo	109,52	103,67	106,64	109,55	104,20	106,92	109,22	103,87	106,58	108,01	103,62	105,87
Kabupaten Gunungkidul	106,38	95,23	100,75	106,10	94,68	100,33	105,77	94,36	100,01	105,67	94,04	99,80
Kabupaten Sleman	142,58	96,98	116,43	117,70	115,22	116,50	118,58	114,37	116,53	119,63	114,93	117,34
DIY	122,74	101,30	111,44	116,78	106,19	111,46	116,97	105,95	111,43	114,89	108,56	111,78
APK Tingkat SMP												
Kota Yogyakarta	142,45	131,65	136,93	136,90	125,35	131,00	147,01	135,77	141,25	148,73	148,82	148,78
Kabupaten Bantul	106,21	106,47	106,34	106,12	105,68	105,90	110,21	109,09	109,66	103,13	109,78	106,38
Kabupaten Kulon Progo	122,78	113,43	118,07	122,66	113,32	117,95	125,20	115,85	120,49	120,36	128,43	124,28
Kabupaten Gunungkidul	118,86	107,11	112,92	116,92	107,10	111,96	111,55	101,85	106,65	105,04	103,65	104,34
Kabupaten Sleman	128,89	102,28	114,43	115,49	113,34	114,43	114,75	112,57	113,68	112,83	114,65	113,72
DIY	121,50	109,69	115,47	117,01	111,67	114,36	118,16	112,80	115,50	113,99	116,90	115,43
APK Tingkat SMA												
Kota Yogyakarta	137,23	125,66	131,23	134,69	125,72	130,04	134,52	124,81	129,49	122,67	125,82	124,23
Kabupaten Bantul	83,96	80,98	82,45	81,23	82,76	81,98	85,63	86,26	85,94	84,74	85,57	85,15
Kabupaten Kulon Progo	85,13	90,98	87,84	86,41	101,07	93,19	85,63	101,07	92,77	97,59	89,59	93,63

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	p	Rata-rata
Kabupaten Gunungkidul	72,59	65,39	68,96	75,05	67,77	71,37	74,44	68,06	71,22	72,06	68,83	70,46
Kabupaten Sleman	85,12	68,64	75,72	75,02	78,19	76,61	74,70	78,39	76,56	75,27	79,47	77,35
DIY	91,43	83,04	87,06	87,92	88,32	88,12	88,57	89,00	88,79	87,83	88,24	88,04

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2014

Dari periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013, capaian APK SD DIY menunjukkan peningkatan dari 111,4 menjadi 111,78. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Begitu pula APK SLTP juga diatas 100 persen. Karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, periode 2012/2013 APK SD seluruh Kabupaten/Kota di DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul mencapai di atas 100 persen.

Sedangkan untuk capaian APK SLTP DIY, terjadi penurunan dari periode 2011/2012 sebesar 115,50 menurun menjadi 115,43 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTP tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 148,78 dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 104,23.

Capaian APK SLTA DIY juga mengalami penurunan dari 87,83 di periode 2011/2012 menurun menjadi 88,04 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTA tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 124,23 dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,46.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2009/2010-2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
APM Tingkat SD												
Kota Yogyakarta	130,30	113,41	121,55	130,49	113,29	121,59	131,45	113,66	122,24	124,29	121,49	122,93
Kabupaten Bantul	97,97	84,47	90,98	99,06	84,86	91,71	99,94	85,48	92,45	94,62	90,35	92,54
Kabupaten Kulon Progo	93,52	89,01	91,30	93,33	89,53	91,46	93,05	89,26	91,18	92,24	89,53	90,92
Kabupaten Gunungkidul	93,77	84,29	88,98	93,63	83,90	88,72	93,35	83,65	88,45	93,35	83,65	88,45
Kabupaten Sleman	121,99	83,35	99,83	101,77	99,92	100,87	103,12	99,96	101,58	103,31	99,77	101,59
DIY	106,26	88,03	96,65	101,31	92,54	97,15	102,19	92,93	97,53	100,02	94,97	97,54
APM Tingkat SLTP												
Kota Yogyakarta	102,01	94,22	98,03	85,91	90,65	95,70	111,93	100,10	105,87	109,08	102,88	105,99
Kabupaten Bantul	81,11	80,74	80,93	71,29	72,16	71,71	74,34	74,99	74,65	75,51	76,06	75,78
Kabupaten Kulon Progo	90,33	85,73	88,01	90,24	85,64	87,92	86,85	82,13	84,47	81,94	83,19	82,55
Kabupaten Gunungkidul	80,87	73,72	77,26	81,49	75,06	78,24	77,05	70,95	73,97	74,55	68,46	71,47
Kabupaten Sleman	97,12	77,83	86,64	82,92	80,58	81,77	80,31	78,96	79,65	82,51	81,15	81,85
DIY	88,88	80,79	84,78	80,85	79,23	81,06	82,78	79,37	81,08	82,21	80,01	81,13

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
APM Tingkat SLTA												
Kota Yogyakarta	102,69	89,63	95,92	90,49	86,04	88,18	89,94	86,42	88,11	86,83	90,50	88,65
Kabupaten Bantul	63,20	56,48	59,80	55,54	52,02	53,81	64,90	59,72	62,36	66,93	59,07	63,04
Kabupaten Kulon Progo	56,89	55,18	56,10	62,05	65,03	63,43	69,60	71,89	70,66	69,60	64,34	66,99
Kabupaten Gunungkidul	54,85	43,61	49,18	52,47	47,56	49,99	54,48	49,55	51,99	53,45	50,49	51,99
Kabupaten Sleman	54,78	46,89	50,28	53,02	55,09	54,06	52,91	55,15	54,04	52,77	57,39	55,06
DIY	65,44	56,65	60,87	60,94	59,66	60,30	64,31	62,58	63,45	64,13	63,17	63,65

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013

Secara umum dalam lima periode terakhir, terjadi peningkatan APM di DIY untuk tingkat SD dan SMA. Rata-rata kenaikan APM SD dari periode 2009/2010 sampai dengan 2012/2013 0,88 poin. Capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 sebesar 97,54 naik dari periode 2011/2012 sebesar 97,53. Menurut kabupaten/kota di DIY capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 122,93 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 88,45.

Sedangkan untuk tingkat SMP, APM mengalami penurunan pada periode 2010/2011 81,06 turun dari tahun periode sebelumnya yang mencapai 84,78 kemudian kembali naik pada periode berikutnya menjadi 81,08 pada periode 2011/2012 dan menjadi 81,13 pada periode 2012/2013. Capaian APM tingkat SLTP periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 105,99 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,47.

Untuk APM tingkat SLTA DIY, dalam lima periode terakhir mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan sebesar 0,73 poin. APM tingkat SLTA DIY periode 2009/2010 sebesar 60,87 menurun pada periode 2010/2011 menjadi sebesar 60,30 dan meningkat pada periode 2011/2012 menjadi 63,45 dan 63,65 pada periode 2012/2013. Capaian tertinggi APM tingkat SLTA periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 88,65 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 63,65.

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di DIY selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Angka Kelulusan Menurut Jenjang di DIY Tahun 2009-2013

Jenjang Pendidikan	Angka Kelulusan				
	2009	2010	2011	2012	2013
SD/MI					
- Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	47.549	45.928	45.754	48.540	50.230
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI tahun sebelumnya	49.429	47.611	46.427	49.184	50.235
- Persentase kelulusan ujian nasional	96,20	96,47	98,55	98,69	99,99
SMP/MTS					
- Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS	43.104	40.354	48.022	46.229	47.302
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS tahun sebelumnya	47.814	44.760	48.409	46.950	47.335
- Persentase kelulusan ujian nasional	90,15	90,16	99,20	98,46	99,93

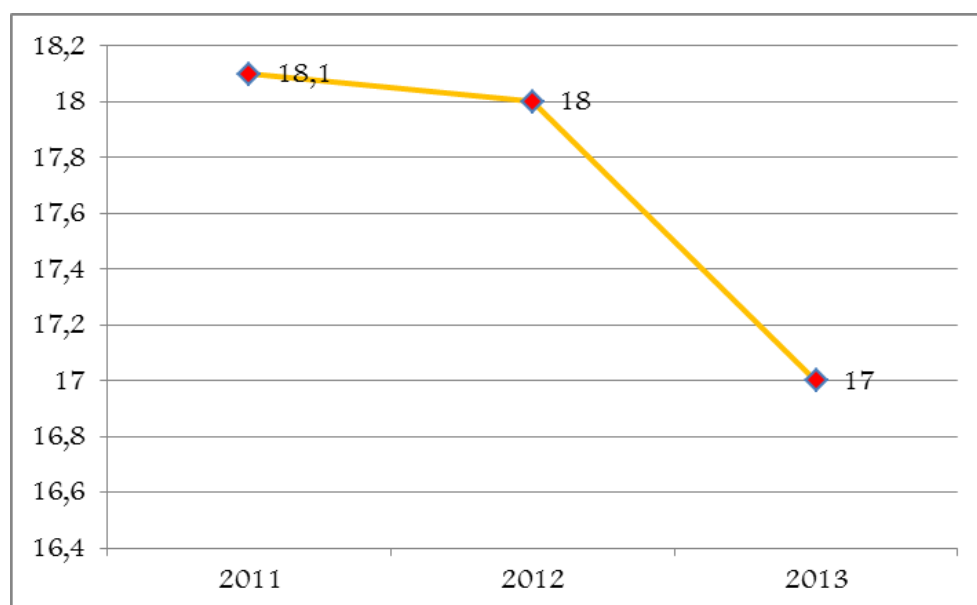
Jenjang Pendidikan	Angka Kelulusan				
	2009	2010	2011	2012	2013
SMA/SMK/MA					
- Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	38.162	37.405	41.540	40.069	44.057
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA tahun sebelumnya	40.045	39.873	41.701	40.579	44.067
- Persentase kelulusan ujian nasional	95,30	93,81	99,61	98,74	99,98

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka kelulusan di jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2010 terjadi penurunan angka kelulusan yang sangat signifikan. Sedangkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI cukup stabil. Capaian angka kelulusan DIY tahun 2013 cukup menggembirakan yaitu hampir 100 di semua jenjang pendidikan.

f. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2011 – 2013), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) DIY memperlihatkan tren penurunan. Angka kematian bayi pada tahun 2011 sebesar 18,1 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi 18,0 per 1000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2013 turun kembali menjadi 17,0 per 1000 kelahiran hidup.



Sumber : SDKI 2012

Gambar 2.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2011-2013

Jumlah Kematian bayi yang dilaporkan di DIY dalam kurun waktu 2010-2013 menunjukkan tren meningkat. Jumlah kematian bayi pada tahun 2010 sebesar 346 dan meningkat menjadi 449 kasus di tahun 2013. Kebijakan kesehatan anak difokuskan pada intervensi layanan kesehatan meliputi : peningkatan pelayanan neonatal dan ibu, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan upaya perubahan perilaku, dan penanganan permasalahan gizi anak.

Tabel 2.29 Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kematian Neonatus (0-28 hari)	241	311	281	340
Jumlah Kematian Bayi (0-11 bulan)	346	419	400	449
Jumlah Kelahiran Hidup	43.048	44.839	45.803	45.436

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2014

Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. Jumlah kematian ibu di DIY dari

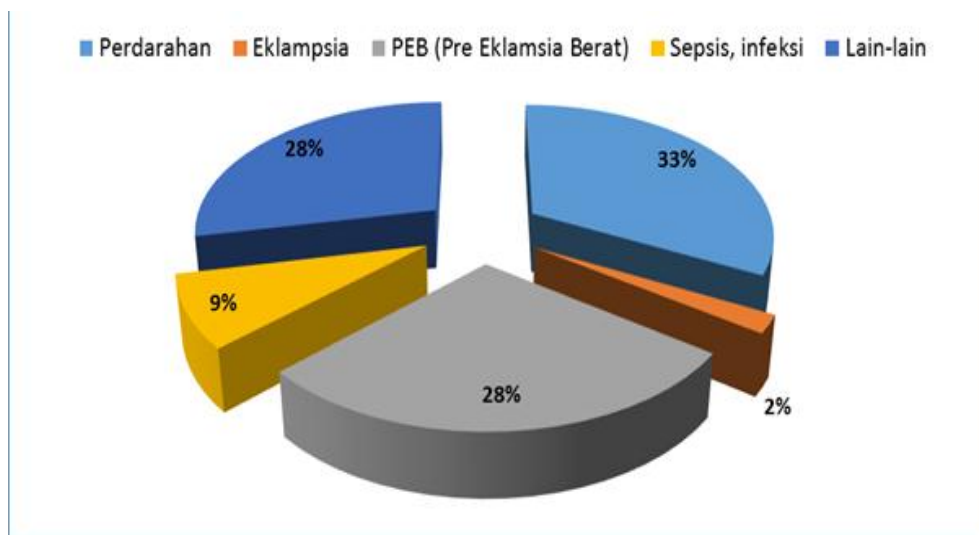
tahun 2010 sampai dengan 2013 mengalami fluktuasi. Gambaran kasusnya adalah sebagai berikut: jumlah kematian ibu di 2010 sebesar 43 kasus naik cukup tajam di tahun 2011 menjadi 56 kasus dan menurun cukup tajam di tahun 2012 menjadi 40 kasus. Akan tetapi di tahun 2013 terjadi kenaikan kasus menjadi 46 kasus. Kenaikan kasus di tahun 2013 ini bertolak belakang dengan pencapaian indikator kesehatan ibu yang lain seperti cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan cakupan pelayanan pada ibu hamil (K1 dan K4) yang mengalami kenaikan.

Tabel 2.30 Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah kasus kematian ibu	43	56	40	46
Jumlah lahir hidup	43048	44839	45803	45436

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul, yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Beberapa faktor penyebab kematian ibu antara lain : pemberdayaan perempuan yang tidak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga berpengaruh.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY

Gambar 2.25 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2013

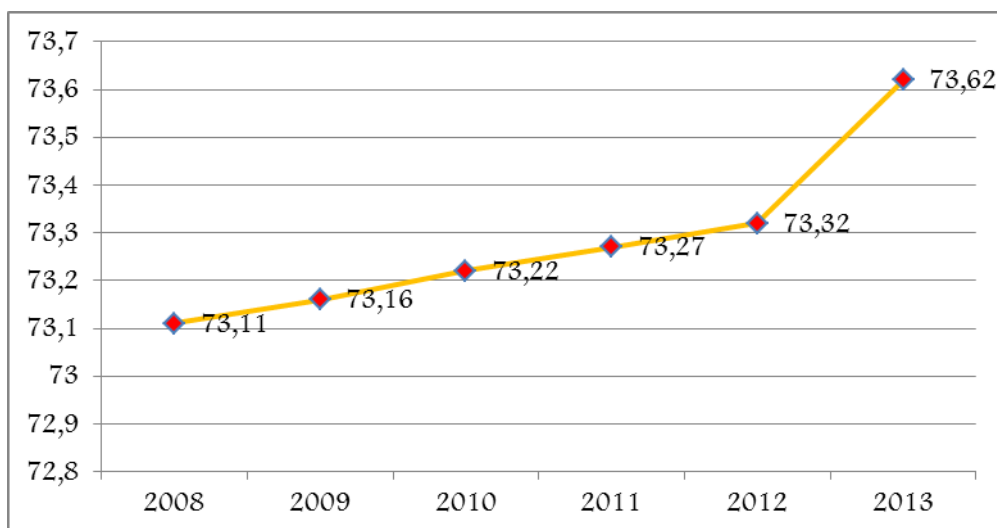
Peran serta keluarga terutama suami menjadi sangat penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Suami dituntut harus berupaya aktif dalam segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih bertanggung jawab. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah secara sosio kultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami.

Untuk itu, selain peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui Puskesmas PONEK dan RS PONEK, partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pendampingan kepada ibu hamil sangatlah diperlukan.

g. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik.

Perkembangan Angka usia Harapan Hidup di DIY dalam kurun waktu 2008-2013 menunjukkan tren peningkatan. Dari 73,11 di tahun 2008 meningkat menjadi 73,62 di tahun 2013.



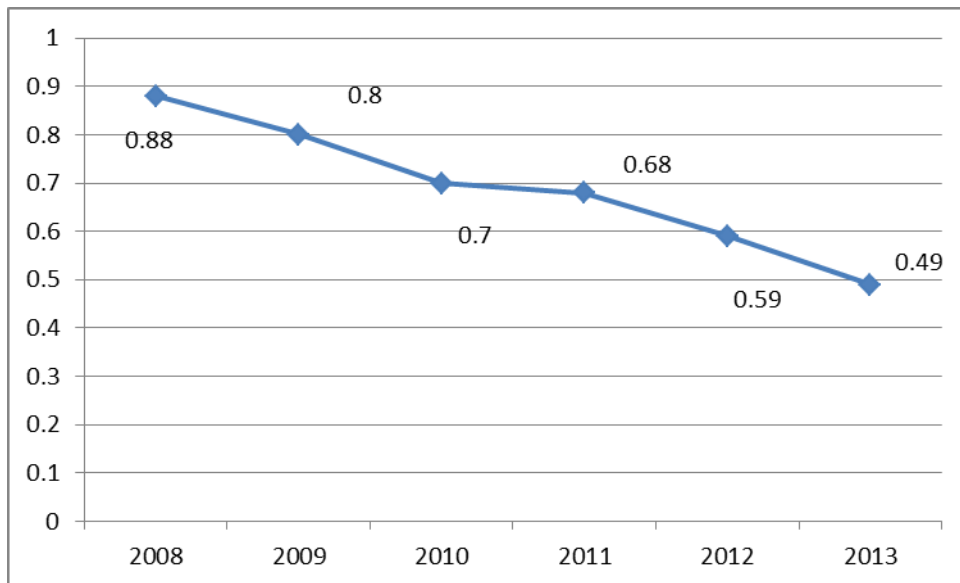
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.26 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2013

h. Status Gizi Balita

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2012-2012 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, prevalensi balita gizi buruk DIY adalah 0,59% dari sebelumnya di tahun 2011 sebesar 0,68.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.27 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY Tahun 2008-2013

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, atau dengan kata lain seluruh balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan.

Kebijakan kesehatan anak difokuskan pada peningkatan cakupan imunisasi, penguatan manajemen MTBS, dan penanganan permasalahan gizi

i. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), jumlah penduduk yang bekerja di DIY tahun 2012 sebanyak 1.867.708 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.944.858 orang dengan rasio 96,03 naik dari tahun 2011 yang sebanyak 1.798.595 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.872.912 orang dengan rasio yang sama sebesar 96,03. Sementara tahun 2013 penduduk yang bekerja dan angkatan kerja masing-masing sebanyak 1.847.070 orang dan 1.910.959 orang dengan rasio penduduk bekerja sebesar 96,6. Rasio tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja ada 96,6 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel 2.31 Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penduduk yang Bekerja	1.892.205	1.895.648	1.775.148	1.798.595	1.867.708	1.847.070
Angkatan Kerja	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.944.858	1.910.959
Rasio Penduduk yang bekerja	94,62	94,00	94,31	96,03	96,03	96,66

Sumber : Dinas Nakertrans DIY, 2013

2.1.5.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Peradaban baru Yogyakarta menantikan bermunculannya kembali simbol-simbol kejayaan seperti yang terjadi pada masa-masa keemasan di kawasan yang membentang dari puncak Gunung Merapi dan Pesisir Selatan Jawa Tengah bagian selatan, yang mana diwarnai peninggalan-peninggalan bendawi maupun tak bendawi yang berpadu membentuk karakter masyarakat Yogyakarta, baik dalam bentuk tulisan, tradisi oral maupun kehidupan sosial. Olah cipta, rasa, karsa dan karya memberikan keseimbangan bagi kondisi kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik secara individual maupun komunitas masyarakat, baik jasmani maupun ragawi.

Seni, budaya dan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kemajuan pesat baik yang tradisional maupun kontemporer, walaupun yang tradisional perlu dipupuk agar tetap lestari sepanjang sejarah peradaban DIY.



Sumber: <http://bola.liputan6.com> dan Dinas Kebudayaan DIY

Gambar 2.28 Pagelaran Seni dan Budaya

Tabel 2.32 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2008-2014

Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	12,10	12,14	12,34	12,34	15,42	15,42	15,42
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,30	0,30
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,0007	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008

Sumber: Disbud DIY & Disdikpora DIY

A. Budaya

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset-aset kebudayaan yang dihasilkan suatu masyarakat dan bagaimana upaya untuk terus menerus melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama (mainstreaming) dalam pembangunan di segala bidang. Mainstreaming kebudayaan dalam pembangunan diharapkan akan menghasilkan renaissance Yogyakarta yang mana semangat inovasi, kreatif, teknologi bermunculan dalam berbagai bentuk karya nyata.

Komitmen bersama untuk mewujudkan Renaissance Yogyakarta dalam berbagai sektor dijiwai filosofi hamêmayu-hayuning bawânâ, dihidupi semangat gotong-royong yang mengacu pada konsep aworing kawulâ-gusti dan golong-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satriyâ: sawiji, grêgêt, sêngguh, ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan ruh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali ‘rasa keTuhanan’ kita”.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2012, kebudayaan semakin mendapatkan kekuatannya untuk eksis dan berkembang dengan ditetapkannya kebudayaan sebagai salah satu kewenangan keistimewaan sehingga peluang untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan

hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY semakin terbuka lebar. Inventarisasi dan dokumentasi data-data dan informasi asset-aset budaya DIY menjadi langkah awal untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya kebudayaan. Bukti dari kekayaan budaya tersebut adalah DIY memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi baik budaya kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*).

Kebudayaan akan menjadi potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Menurut Maynard dan Mehrrens (1993) setelah gelombang ketiga Alvin Toffler, dunia akan dilanda gelombang keempat (*fourth wave economic*) yang mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun industrialisasi. Ekonomi gelombang keempat adalah kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Geliat nasional juga menunjukkan kepada orientasi ke arah tersebut. Kebudayaan juga menjadi media diplomasi yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan internasional, karena memiliki kekuatan citra positif bangsa yang berperadaban.

Gambaran umum kondisi eksisting sumber-sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam DIY yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multicultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, Kontemporer.

Tabel 2.33 Perkembangan Aset-Aset Kebudayaan di DIY Tahun 2010-2014

Aspek	Satuan	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah kunjungan museum	Orang	575.000	623.500	1.375.000	1.636.000	1.636.000
Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju	Organisasi	36	38	40	54	61
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	214	220	225	230	412
Jumlah Gelar Seni Budaya	Kali	790	920	980	1.025	1.200
Jumlah Desa Budaya berkategori	Desa	6	8	12	12	14

Aspek	Satuan	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
Maju						
Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan	Dokumen	91	104	120	120	120
Jumlah sumber sejarah yang dikelola	Sumber sejarah	300	500	700	700	700
Jumlah Gedung Seni Budaya	Gedung	94	94	96	107	107
Peristiwa Sejarah	kali	94	94	94	95	103
Pelaku Sejarah	orang	n/a	16	16	22	22
Ceritera Rakyat	buah	n/a	n/a	n/a	80	80
Naskah Kuno	buah	n/a	n/a	n/a	509	509
Upacara Adat	buah	358	358	447	459	459
Upacara Tradisi	buah	34	34	34	35	35
Organisasi Kepercayaan	buah	90	90	90	94	94
Motif Batik	buah	n/a	n/a	n/a	185	185
Motif Lurik	buah	n/a	n/a	n/a	64	64
Kerajinan Property Budaya	buah	178	178	178	246	241

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

a. Adat Istiadat, Tradisi, dan Sistem Budaya

Sistem budaya DIY yang menyangkut adat istiadat, tradisi, kepercayaan, sikap mental/perilaku yang berhasil diregistrasi dalam database budaya www.jogjabudaya.com terdapat 459 jenis upacara adat yang tersebar di kabupaten kota. Upacara tradisi yang menandai daur hidup manusia di tiap kabupaten dan kota ada 35 jenisnya, kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamat. Terdapat keanekaragaman maksud atau keperluan sebuah upacara adat, misalnya untuk pemujaan, permohonan, pencucian, inisiasi, tasyakur, pengukuhan atau sekedar ekspresi kegembiraan. Dalam upacara adat akan ditampilkan simbol-simbol kesakralan, kekhidmatan, keagungan, keindahan, dan bahkan keceriaan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan tidak teragendakan secara tetap.

Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup manusia dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin berusia tujuh bulan (*mitoni; tingkeban*), lahir (*brokohan*), putus tali pusarnya (*pupak puser; puputan*) pemberian nama (*njenengi*), aqiqah (*kékahan*), turun ke tanah (*tedhun lemah; tedhak sitèn*), khitanan anak laki-laki (*sunatan; supitan*) dan perempuan (*tetesan*), menikah (*omah-omah*), dan meninggal dunia (*tilar donya*) dengan segala rangkaian upacara setelahnya. Di samping upacara daur hidup, terdapat pula upacara ruwatan, yakni suatu upacara yang dimaksudkan untuk “membersihkan” pengaruh buruk (*sukerta*) yang mungkin timbul pada diri seseorang.



Gambar 2.29 Tipikal Upacara Adat Merti Dusun

Perkembangan sistem budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jenis data secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34 Perkembangan Sistem Budaya di DIY Tahun 2009-2014

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Upacara Adat	358	358	358	447	447	459
Upacara Tradisi	34	34	34	35	35	35
Organisasi Penghayat Kepercayaan	90	90	90	90	90	94
Makanan Tradisional	137	137	137	137	137	137
Jenis Permainan Tradisional	241	241	241	241	241	241

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Permainan Tradisional	34	34	34	34	34	34

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Organisasi kepercayaan yang hidup ada 94 organisasi yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 18, Kab. Kulonprogo sebanyak 22, Kab.Gunungkidul sebanyak 14, Kab.Sleman sebanyak 16, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20. Setiap kabupaten dan kota memiliki 138 makanan tradisional, 15 jenis pakaian adat. Adat rias dan busana pengantin yang diwujudkan dalam bentuk sanggar rias ada 349 sanggar yang melestarikan upacara pengantin gaya Yogyakarta lengkap dengan busana dan aksesorisnya. Permainan tradisional yang dapat ditemukan ada sekitar 34 macam yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat.

Di pedesaan sendiri masih tumbuh dan berkembang desa-desa yang menjaga budaya rakyat. Pada tahun 1995 Gubernur menetapkan 32 desa bina budaya melalui SK Gubernur Nomor 325/Kpts/1995. Pada tahun 2006 telah dilakukan penilaian terhadap desa-desa di DIY, dan terdapat 41 desa budaya termasuk yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan tersebut. Desa budaya tersebut diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Hingga akhir 2014 tercatat menjadi 43 desa budaya (10 desa budaya di Sleman, 9 desa di Bantul, 12 desa di Kulon Progo, 12 desa budaya di Kulon Progo), yang berpotensi sebagai benteng pertahanan budaya tradisional yang perlu dipetakan kembali potensi dan tingkat perkembangannya, serta dilindungi dalam suatu regulasi. Desa budaya dapat berperan sebagai wadah konservasi dan pengembangan budaya baik yang *tangible* maupun *intangible*. Desa budaya merupakan kantong budaya dan benteng pertahanan budaya tradisional yang berpotensi untuk menjadi tujuan wisata.

Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Capaian realisasi indikator persentase desa budaya berkategori maju tahun 2014 sebesar 27,91% dari 43 desa budaya yang telah ditetapkan telah mencapai target yang ditetapkan dan lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 20,9%. Tentu keberhasilan ini akan

lebih nyata lagi apabila 11 desa budaya yang lainnya segera di-SK-kan. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY. Balai-balai budaya di desa budaya dikembangkan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di pedesaan yang berperan penting dalam pertahanan ketahanan budaya di DIY.

b. Kesenian

Keragaman kesenian dari banyak cabang, seni pertunjukan, seni rupa, sinematografi berkembang pesat di DIY yang dipengaruhi oleh keragaman latar belakang budaya masyarakat di DIY, institusi-institusi pengembang seni budaya, serta bermunculannya SDM yang sangat inovatif dan kreatif menciptakan karya seni baik yang diadaptasi dari seni tradisi maupun kontemporer sehingga membangkitkan kembali kelompok seni yang sudah lama tidak aktif dan bermunculan kelompok seni yang baru. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, symbol, pendidikan, dan hiburan. Masing-masing fungsi seni seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi beberapa fungsi seni bisa saling melekat dalam suatu karya atau pertunjukan seni.

Tabel 2.35 Perkembangan Pelaku Budaya di DIY Tahun 2009-2014

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Organisasi Sinematografi	14	14	14	14	42	42
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.203	4.219	4.269	4.269	5.226	5.252
Organisasi Seni Rupa	8	25	25	25	16	17
Perusahaan Film	9	10	10	10	20	20
Perusahaan Bioskop	4	4	4	4	2	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	37	37	37	38	38
Tokoh Seniman Budayawan	369	369	369	486	486	487
Penghargaan seniman Budayawan	258	258	258	260	275	290

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DIY, 2014

Perkembangan seni dan budaya menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014

Kab/Kota	Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten Bantul	13,55	0,42
Kabupaten Sleman	9,73	0,25
Kabupaten Gunungkidul	11,58	0,17
Kabupaten Kulon Progo	16,71	0,23
Kota Yogyakarta	12,98	0,23
DIY	12,24	0,26

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2014

Festival, Karnaval, pagelaran, pasar seni, lomba seni budaya, pameran dan event-event budaya lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional semakin banyak diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah, antara lain yaitu : Pekan Budaya Tionghoa, Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Karnaval Jogja, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Desa Budaya, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede, Jogja Air Show, Jogja Dragon Festival, Jogja Festival Fashion, Pencak Malioboro Festival, Festival Peh Cun, Ngayogjazz, Festival Teater Jogja. Data penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan peningkatan kuantitas pada tahun 2009 sebanyak 720 menjadi 1.200 pada tahun 2014. Hal ini mengisyaratkan adanya pemberlanjutan dari pelestarian seni dan budaya.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2014

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	720	720	720	980	1.025	1.200
Prasarana Budaya	92	92	92	107	107	107
Lembaga Budaya	107	107	105	105	82	82
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	31	31	31	43

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Perkembangan kesenian di DIY berjalan dengan pesat seiring dengan kemajuan institusi-institusi yang menyelenggarakan pendidikan seni budaya baik di dalam maupun di luar keraton. Hingga saat ini 5.311

organisasi kesenian yang tersebar di wilayah DIY, yang terdiri dari organisasi perfilman sebanyak 42 buah, organisasi seni rupa 17 buah, organisasi pertunjukan 5.252 buah. Di Kota Yogyakarta terdapat 453 organisasi kesenian dengan 31 jenis kesenian, di Kab. Sleman 1.568 organisasi kesenian dengan 52 jenis kesenian, di Kab. Bantul 991 organisasi kesenian dengan 52 jenis kesenian, di Kab. Kulonprogo 1.339 organisasi kesenian dengan 46 jenis kesenian, di Kab. Gunungkidul 960 organisasi kesenian dengan 51 jenis kesenian. Meskipun belum dikelola secara profesional, sesungguhnya seni-budaya tersebut memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat setempat yang masih bisa dioptimalkan mengingat karakteristik kesenian terlebih kesenian tradisional yang melibatkan banyak orang (www.jogjabudaya.com).

Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju, realisasi 1,15% dari target 1,11 % berasal dari 61 organisasi budaya berkategori maju dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 5.311 organisasi.

Galeri seni rupa yang berkembang di DIY terdapat 29 buah. Usaha kerajinan property budaya yang tumbuh terdapat 241 buah tersebar di berbagai lokasi.

Dinas Kebudayaan sendiri telah memproduksi beberapa film seperti 'Rindu di Hati Tara', 'Loro Blonyo', 'Titik 0 Km', dan sebagainya. Beberapa film Indie memperoleh prestasi di tingkat nasional dan internasional

Grup-grup kesenian diklasifikasikan dalam tiga tahapan perkembangan, yaitu : tumbuh, berkembang, dan maju. SDM industri kreatif nasional diwarnai oleh tokoh seniman dan budayawan kreatif dari DIY, yaitu antara lain : Soimah, Kelik Pelipur Lara, Hanung Bramantyo, Seventeen, Jogja Hip Hop Foundation, Petakumpet, Dagadu, Shaggydog, Sheila On 7, Butet Kertarajasa, Jaduk Feriyanto, Anggito Abimanyu, Cak Nun, Letto, Joko Pekik dan lain-lain.

Perkembangan kesenian Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi profane atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Di sisi lain, terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perubahan akan

selalu terjadi, sebagai akibat adanya kreativitas seniman, tuntutan perubahan fungsi dan selera masyarakat yang terus berubah. Perkembangan kesenian di Yogyakarta juga tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, artshop dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, akademi komunitasdan lain-lain.

Apresiasi generasi muda terhadap kesenian semakin meningkat sejalan dengan gerakan keistimewaan yang dibuktikan dengan adanya meningkatnya antusiasme generasi muda untuk berpartisipasi dalam festival / lomba seni budaya.

Kerjasama kebudayaan yang telah diwujudkan sebagai media diplomasi budaya antara lain adalah: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama “Jali Roso” untuk National Concert Hall Dublin, misi kebudayaan ke Denizli International Festival di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canbera, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo.

Partisipasi misi kesenian DIY dalam event-event kesenian nasional juga semakin meningkat, antara lain adalah Festival Nasional Tari Kreasi Baru, mendapatkan 3 Penghargaan (Penyaji terbaik, Penata Tari Terbaik dan Penata Musik Terbaik; Festival Nasional Teater Tradisional; Festival Nasional Seni Pertunjukan Indonesia, Parade lagu daerah, HUT Gianyar.



Gambar 2.30 Tipikal Festival Seni dan Budaya

c. Sejarah dan Purbakala

Mozaik sejarah peradaban DIY dari era prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, dan Kontemporer dapat disaksikan dalam peninggalan warisan budaya dan cagar budaya baik yang posisinya terpisah satu sama lain maupun mengelompok dalam suatu area. Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas administratif disebut Kawasan cagar Budaya. Sejumlah kawasan memiliki tinggalan fisik yang sangat dominan terutama yang berupa monumen dan tidak banyak terkait dengan kehidupan masa kini sehingga sering dipahami sebagai *dead monument*.

DIY sangat kaya akan cagar budaya baik *tangible* maupun *intangible* yang bernilai besar bagi peradaban manusia yang harus terjamin kelestariannya dan merupakan Daerah Istimewa. Setiap Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY ada 13 Kawasan, dan yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman). Surat Keputusan Dinas Kebudayaan DIY No. 188/ 38.A menguatkan kedudukan Kawasan Cagar Budaya di DIY, yaitu: Kawasan Kraton, Kawasan Malioboro, Kawasan Pakualaman, Kawasan Kotagede, Kawasan Kotabaru, Kawasan Imogiri, Kawasan Parangtritis, Kawasan Pleret, Kawasan Jetis, Kawasan Pengok, Kawasan Baciro, Kawasan Prambanan, Kawasan Ratu Boko, Kawasan Sokoliman.

Tabel 2.37 Kawasan Cagar Budaya yang Mendapat SK Terbaru

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
1	Kawasan Kraton	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
2	Kawasan Malioboro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
3	Kawasan Pakualaman	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
4	Kawasan Kotagede	Yogyakarta dan Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
5	Kawasan Kotabaru	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
6	Kawasan Imogiri	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
7	Kawasan Parangtritis	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
8	Kawasan Pleret	Bantul	SK Kadis. No. 188/ 38.A
9	Kawasan Jetis	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
10	Kawasan Pengok	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
11	Kawasan Baciro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/ 38.A
12	Kawasan Prambanan	Sleman	SK Kadis. No. 188/ 38.A
13	Kawasan Ratu Boko	Sleman	SK Kadis. No. 188/ 38.A
14	Kawasan Sokoliman	Gunungkidul	SK Kadis. No. 188/ 38.A

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional. Sampai pada tahun 2014 benda/bangunan cagar budaya terdapat 1640 buah, yang ditetapkan sudah mencapai 588 buah melalui SK. Kadinas No. 188/135/SK-DINAS/2014, sehingga 36 % dari cagar budaya yang terregistrasi dalam database jogjabudaya. Kota Yogyakarta memiliki 459 cagar budaya, Kabupaten Bantul terdapat 21 buah, Kabupaten Sleman terdapat 29 cagar budaya, di Kulon Progo terdapat 25 cagar budaya, Gunung Kidul 14, sedangkan yang milik Provinsi terdapat 23 buah. Kawasan Percandian Prambanan pernah mendapatkan ketetapan UNESCO melalui World Heritage List No. 642 dan Kep. Mendikbud. 157/M/1998. Jumlah kawasan cagar budaya ada 16 buah, baru 6 buah yang ditetapkan melalui SK Gubernur dan menjadi 14 kawasan menurut SK Kepala Dinas Kebudayaan No 188/38/A. Juru Pelihara BCB dan situs di DIY ada 4 orang. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum.

Tabel 2.38 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan Tahun 2009-2014

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	511	511	515	517	517	588
Kawasan Cagar Budaya	12	13	13	16	16	16
Situs	96	96	96	96	96	96
Monumen Sejarah Perjuangan	44	44	44	44	44	44
Museum	34	34	38	42	42	43

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Penanganan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2009-2014

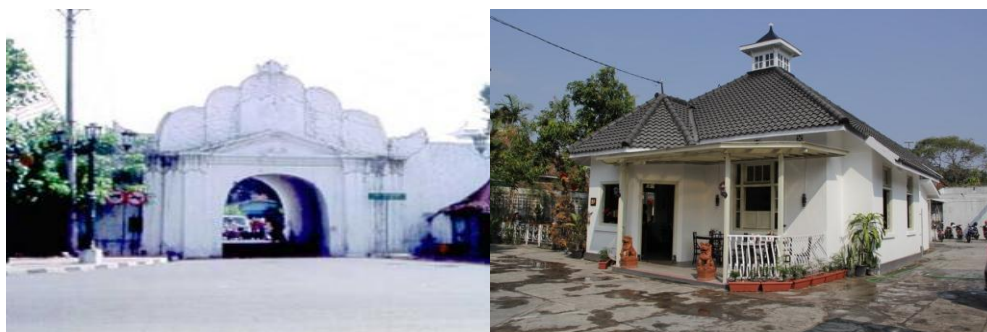
Aspek	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	194	214	220	225	230	412
Total benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.272	1.279	1.279	1.410	1.446	1.824

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Sementara itu, cagar budaya tidak bergerak berkategori kondisi baik adalah Cagar budaya yang direhabilitasi, direkonstruksi, dieskavasi, mendapat penghargaan serta ditetapkan menjadi cagar budaya.

Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi-segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, tetapi akan bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali. Penegakan regulasi sering kali mengalami berbagai hambatan sehingga menimbulkan konflik di lapangan.

Ancaman kelestarian Bangunan/Benda Cagar Budaya dapat timbul karena faktor kimia, biologis, fisika, lingkungan, kasus-kasus kriminalitas. Keunikan, keindahan, kelangkaan BCB acap kali menjadi daya tarik bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pengrusakan dan pencurian, bahkan BCB yang tersimpan dalam museum pun terancam keselamatannya. BCB di DIY pun tidak luput dari ancaman itu. Perusakan BCB baik sengaja maupun tidak sengaja banyak terjadi.



Gambar 2.31 Tipikal Benda Cagar Budaya di DIY

BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional, tetapi prosentasenya masih kecil yaitu 3 % dari seluruh BCB dan situs nasional, yaitu sekitar 65.165 buah. Sampai pada tahun 2014 BCB dan situs yang sudah ditetapkan DIY 588 cagar budaya dari 961 bcb dan situs tingkat nasional. BCB dan situs yang terpelihara dibandingkan dengan Provinsi lain di seluruh Indonesia ada 4 %. Juru Pemelihara BCB dan situs di DIY ada 10 % dari juru pemelihara BCB dan situs di seluruh Indonesia.

DIY juga telah melakukan sejumlah gebrakan dalam melindungi cagar budaya dan warisan budaya yang mendasar pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan penyusunan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang telah diturunkan dalam beberapa Peraturan Gubernur, antara lain adalah Pergub No. 40 tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru bernuansa Budaya Daerah, Pergub No 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Pergub No. 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Inti pasal demi pasal dalam regulasi itu adalah pengembangan budaya Yogyakarta yang terintegrasi dalam konsep keistimewaan; pengelolaan meliputi kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan; dan pengawasan cagar budaya, pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Benda-benda cagar budaya banyak juga yang dikelola di dalam museum. Potensi museum yang ada di DIY terdapat 47 museum, akan tetapi belum semuanya permanent melakukan pelayanan kepada masyarakat, hanya dibuka pada hari-hari tertentu. Museum yang ada di DIY terbanyak nomor 2 setelah Jakarta yaitu 14% dari seluruh museum di Indonesia yang berjumlah 325 museum. Pada dasarnya museum di Yogyakarta ini sudah memenuhi standar, namun memang ada museum yang harus dibenahi dalam penataan koleksi, bangunan dan SDM sehingga menarik pengunjung, karena dalam 1 tahun jumlah pengunjung museum berkisar 1,5% dari total penduduk DIY.

Museum yang sudah terregistrasi dalam database budaya DIY ada 43 museum yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 6, Kab. Gunungkidul sebanyak 1, Kab. Sleman sebanyak 11, dan Kota Yogyakarta sebanyak 17, yang sudah masuk Barahmus ada 34 Museum. Sebagian besar museum di DIY berada di perkotaan. Kulon Progo adalah Kabupaten yang tidak memiliki museum. Gunungkidul hanya memiliki satu museum. Apresiasi kunjungan museum sebagai wujud kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya seperti Karnaval museum, Kemah Museum, Program Museum Sahabat Anak, Wajib Kunjung Museum dengan Bus Museum, Gelar Gebyar Museum.

Tabel 2.40 Daftar Museum di DIY

No	Museum	Alamat
1.	Museum Biologi UGM	Sultan Agung No.22 Bintaran Wirogunan Mergangsan Yogyakarta
2.	Museum Affandi	Jl. Laksda Adi Sucipto 167 yk Papringan Caturtunggal Depok Sleman
3.	Museum Anak Kolong Tangga	Jl. Sriwedari No. 1 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta
4.	Museum Bahari Yogyakarta	Jl. RE. Martadinata 69 Wirobrajan RT 07 RW 02 Wirobrajan Yogyakarta
5.	Museum Batik dan Sulaman Yogyakarta	Jl. Dr. Sutomo No.13A Bausasran RT 49 RW XII Danurejan Yogyakarta
6.	Museum Batik Imogiri	Imogiri Bantul
7.	Museum Batik Joglo Cipto Wening	Ketandan Tengah Wukirsari Imogiri Bantul
8.	Museum Batik Kraton Yogyakarta	Kompleks Kraton Yogyakarta
9.	Museum Benteng Vredeburg	Jendral A. Yani No.6 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta
10.	Museum BI	Ngupasan Gondomanan Yogyakarta
11.	Museum Dewantara Kirti Griya	Tamansiswa No.31 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta
12.	Museum Dr. YAP	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 5 Terban Gondokusuman Yogyakarta
13.	Museum Gembira Loka	Kebun raya No.2 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
14.	Museum Geoteknologi Mineral	Jl. Babarsari 2 Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal, Depok Sleman
15.	Museum Gumuk Pasir	Depok Parangtritis Kretek Bantul
16.	Museum Gunung Merapi	Jl. Boyong Banteng Harjobinangun Pakem Sleman
17.	Museum Kayu Wanagama	Jl. Jogja-Wonosari KM. 30 gading Playen Gunungkidul
18.	Museum Kereta	Rotowijayan, Kadipaten, Kraton Yogyakarta
19.	Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia	Jl. Adisucipto 88 Demangan Caturtunggal Depok Sleman
20.	Museum Kristal Kraton Yogyakarta	Kompleks Kraton Yogyakarta
21.	Museum Memorial H.M Soeharto	Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul
22.	Museum Monumen Yogya Kembali	Jl. Lingkar Utara, jongsang Sariharjo Ngaglik Sleman
23.	Museum Pahlawan Pancasila	Pandega Sakti Kentungan Condongcatur Depok Sleman

No	Museum	Alamat
24.	Museum Paleoantropologi UGM	Jl. Medika Sekip Caturtunggal Depok Sleman
25.	Museum Pendidikan Indonesia	Jl. Colombo No.1 Karangmalang Caturtunggal Depok Sleman
26.	Museum Perjuangan	Kolonel Sugiyono No.24 Brongtokusuman Mergangsan Yogyakarta
27.	Museum Purbakala Pleret	Pleret Bantul
28.	Museum Purbakala Tamanwisata Prambanan	Jl. Raya Yogya – Solo KM. 16 Prambanan Bokoharjo Prambanan Sleman
29.	Museum Puro Pakualaman	Jl. Sultan Agung – Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta
30.	Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama	Jenderal Sudirman 75 Terban Gondokusuman Yogyakarta
31.	Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta	Jl. Solo Kompleks Lanud Adisucipto Maguwo Banguntapan bantul
32.	Museum Sandi Negara	Faridan M Noto Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta
33.	Museum Sasana Wiratama	Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo TR. III No. 430 Tegalrejo Yogyakarta
34.	Museum Sasmita Loka Pangsar Jendral Sudirman	Bintaran Wetan No. 3 Yogyakarta, Gunungketur Pakualaman Yogyakarta
35.	Museum Seni Lukis Kontemporer Indonesia Nyoman Gunarsa	Jl. Wulung No. 43 Papringan Caturtunggal Depok Sleman
36.	Museum Sonobudoyo Unit I	Jl. Trikora No.6 Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta
37.	Museum Sonobudoyo Unit II	Wijilan Yogyakarta Cokrokiranan Panembahan Kraton Yogyakarta
38.	Museum Sultan Hamengku Buwono IX	Bangsals Kencana, Kompleks Kraton Yogyakarta
39.	Museum Tani Jawa Indonesia	Candaran Kebonagung Imogiri Bantul
40.	Museum Tembi	Jl. Parangtritis KM 8,4 Tembi Timbulharjo Sewon Bantul
41.	Museum Ullen Sentalu	Jl. Boyong Kaliurang Barat Hargobinangun Pakem Sleman
42.	Museum Wayang Kekayon Yogyakarta	Jl. Yogya – Wonosari KM. 7 No. 277, Baturetno, Banguntapan, Bantul
43.	Museum Gempa 'Prof Sarwidi'	Sardonoharjo Ngaglik Sleman

Sumber : www.jogjabudaya.com

Keseluruhan koleksi yang ada di 43 museum tersebut sekitar 68.217 buah benda cagar budaya. Dari 43 museum tersebut, museum Ullen

Sentalu dan Museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum bertaraf internasional. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat. Melalui museum masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang.



Sumber : <http://barahmus.museumjogja.org>

Gambar 2.32 Museum Kayu Wanagama dan Museum Bahari

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, terdiri dari koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, filologika, keramologika, senirupa, teknologi. Saat ini benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sebanyak 43.235 buah, sudah diinventarisir sejumlah 11.031 buah (25,51 %), belum diinventarisir sejumlah 32.204 buah (74,48 %). Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo unit I sebanyak 1.184 buah. Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo Unit II sebanyak 810 buah.

B. Pemuda dan Olahraga

Masa depan suatu bangsa dapat diramalkan dengan melihat kondisi pemuda saat ini. Pemuda Indonesia ke depan harus memiliki kepribadian dan karakter yang kuat. Pemikiran dan semangat untuk terus membangun diri dengan berkompetisi secara sehat harus terus digemakan dalam pembangunan pemuda Indonesia, dimana pemuda Indonesia harus dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang kuat untuk mampu berdiri sebagai pemuda yang visioner kedepan (mampu melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas) untuk mengangkat harga diri, kehormatan dan kedaulatan bangsa di tingkatan internasional. Salah satu upaya

menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda adalah dengan meningkatkan prestasi olahraga.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera (amanat penderitaan rakyat). Olahraga akan menjadi lokomotif ekonomi baru.

Tabel 2.41 Perkembangan Pemuda dan Olah Raga di DIY Tahun 2009-2014

Uraian	Tahun						Satuan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Organisasi Kepemudaan	35	35	35	35	37	39	Buah
Jumlah Karang Taruna	442	440	437	440	440	440	Buah
Jumlah Organisasi Olah Raga	50	51	51	50	50	50	Buah
Sarana Olah Raga							
1) Standar Internasional	0	0	0	0	0	0	Unit
2) Standar Nasional	3	3	3	3	3	3	Unit

Sumber : Disdikpora DIY

Banyak atlet nasional maupun internasional yang lahir dari DIY, yaitu antara lain Yayuk Basuki (atlet legendaris bidang tenis), Rita Subowo (atlet legendaris basket), Winarsih, Ivana Ardella Irmanto (Wushu), Felicia Alverina Monindra (Wushu) dan lain-lain.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongraga, Pondok Pemuda, GOR Sorowajan, Wanabhkati Yasa, GOR UNY, Stadion PSS Sleman dan lain-lain.



Gambar 2.33 Lokasi Youth Center Sebagai Percontohan Nasional

Youth Center sebagai percontohan nasional pengelolaan gelanggang pemuda dan olahraga.



Sumber : <http://kanaljogja.com>

Gambar 2.34 Gelanggang Olah Raga Amongraga






GOR Amongraga dapat digunakan oleh masyarakat umum atau instansi yang berminat untuk menyelenggarakan kegiatan, meliputi Olahraga (Bola Voli, Basket, Bulutangkis, Futsal dan lain-lain) minimal tingkat wilayah dan diutamakan tingkat nasional maupun internasional, serta kegiatan kreativitas lainnya.

Event-event olahraga yang diikuti oleh pemuda DIY adalah Kejurnas, OOSN (Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional) untuk SD, SMP, SLB, SMA/SMK, POPWIL (Pekan Olah Raga Wilayah), Lomba Senam Kesegaran Jasmani, Festival dan Lomba Olah Raga Tradisional, dan lainnya.

PON Remaja mempertandingkan 15 cabang olahraga yang meliputi atletik, bola basket, bola voli pantai, bulutangkis, judo, panahan, pencak silat, renang, senam (artistik dan ritmik), sepakbola, tenis lapangan, tenis meja, loncat indah, anggar, dan menembak. Sebagai hasil dari PON Remaja I, DIY meraih peringkat 9 dengan total perolehan medali sebanyak 14 medali yang terdiri dari 3 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu. Rincian perolehan medali untuk kontingen DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42 Rincian Perolehan Medali Kontingen DIY dalam PON Remaja

NO	CABOR	JENIS PERTANDINGAN	MEDALI	PERAIH	NOMOR
1	Atletik	2000 M Steeple Chase Putri	 EMAS	Tria Suryatiningsih	2000 M Steeple Chase
2	Atletik	2000 M Steeple Chase Putra	 EMAS	Ravi Putra Rahman	2000 M Steeple Chase
3	Atletik	Atletik Jalan Cepat Putri	 EMAS	Rika Ayu Wulandari	5000 meter
4	Memaneh	Memaneh Aduan Perorangan Nasional Putri	 PERAK	Itsna Asyara R	
5	Judo	Kelas 66 Kg Putra	 PERAK	Ridho Barokallah	66 Kg Putra
6	Memaneh	Memaneh Kategori Aduan Perorangan Recurve Putri	 PERAK	Fauzia Putri Pertiwi	Aduan Perorangan Rec
7	Memaneh	Memaneh Kategori Aduan Perorangan Recurve Putra	 PERAK	Dian Ramadhan	Aduan Perorangan Rec
8	Memaneh	Aduan Mix Tim Recurve	 PERAK	Dian Ramadhan/Fauzia Putri	
9	Volley Pantai	Beregu Putra	 PERAK	Bensan Ardhta # Ilham Akbar	Beregu Putra

NO	CABOR	JENIS PERTANDINGAN	MEDALI	PERAIH	NOMOR
10	Pencak Silat	Tanding Kelas D 51-54 Kg Putri	 PERUNGGU	Dian Permatasari	D 51-54 Kg Putri
11	Atletik	Atletik	 PERUNGGU	Ravi Putra Rahman	3000 M Putra
12	Atletik	10.000 M Jalan Cepat Putra	 PERUNGGU	Bayu Prasetyo	10.000 M Jalan Cepat
13	Atletik	400 M Putri	 PERUNGGU	Aulia Matin	400 M Putri
14	Volley Pantai	Beregu Putri	 PERUNGGU	Septiani Dwi Utami Vitria Dwi Rahayu	Beregu Putri

Pembinaan-pembinaan terhadap generasi muda tidak hanya melalui kegiatan olahraga, tetapi juga melalui wahana-wahana sebagai berikut: Karang Taruna, Sentra Pemberdayaan Pemuda, Sarjana Penggerak Pedesaan, Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, Kapal Pemuda Nusantara, Kwartir Daerah Pramuka, Taruna Siaga Bencana, dan lainnya.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan. Dalam usaha untuk memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Wadah pengembangan generasi muda yang ada di tiap desa/kelurahan sudah difasilitasi Karang Taruna. Karang Taruna sebagai generasi muda hendaknya mampu menjadi pionir dalam aspek kebangsaan,

kemajemukan, pluralitas yang terjadi di tempat domisili untuk bisa dipertahankan.

Sentra Pemberdayaan Pemuda menjadi salah satu wahana pemuda di luar kegiatan olahraga dengan munculnya kelompok-kelompok pemuda yang maju berkembang dan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, yang antara lain adalah: Forda (Kelompok Wirausaha Pemuda), Ngudi Makmur (Kelompok Tani Ternak Ayam Buras), Arto Konveksi (Pemberdayaan Pemuda Melalui Usaha Jasa Konveksi), Ikatan Dimas Diajeng Sleman, Ilalang Outbound (Pengadaan Alat Penunjang Kelompok Outbound Ilalang Desa Mangunan), Kp3 (Komunitas Pemuda Peduli Pendidikan), Komunitas Slenk (Suka Lelangen Edining Kebudayaan), P3S (Memberdayakan Potensi Desa Melalui Histori Ki Ageng Paker).

Wadah bagi intelektual muda yang akan ditempatkan di pedesaan agar generasi muda menjadi mandiri dan berkarya untuk bangsa melalui Sarjana Penggerak Pedesaan (SP2). Pada Tahun 2012 direkrut 5 pemuda sarjana dari berbagai latar belakang pendidikan yang ditempatkan di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan pada Tahun 2013 memberikan kesempatan kepada 10 pemuda sarjana untuk berkontribusi dalam membangun bangsa yang juga ditempatkan di Kabupaten Kulon Progo, yang pada tahun 2014 juga ditempatkan sebanyak 20 orang ke Kulon Progo.

Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan atau PSP3, yaitu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilaksanakan bersama Dinas yang menangani kepemudaan di tingkat provinsi dalam rangka memberikan kesempatan bagi pemuda untuk membangun wilayah perdesaan dan diharuskan merencanakan kegiatan untuk pengembangan di desa tersebut. Program ini dilaksanakan dengan sistem kontrak selama 1 (satu) tahun.

Generasi muda juga mendapatkan peluang untuk berperan aktif dalam Kapal Pemuda Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi pemuda berlayar di perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan perwakilan sebanyak 2 - 5 orang untuk mengikuti program ini. Adapun kapal yang digunakan adalah kapal milik Angkatan Laut Republik Indonesia.

Sebagai usaha untuk melaksanakan pembinaan agar dapat membentuk mental dan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda melalui gerakan pramuka. Penguatan kepribadian generasi muda tentunya diperlukan sebagai filter terhadap dampak kemajuan zaman.

2.2 Aspek Pelayanan Umum

2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.2.1.1 Urusan Pendidikan

a. Jumlah Lembaga dan Murid PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini atau yang lebih dikenal dengan istilah PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian sekitar 50% kapasitas kecerdasan orang dewasa terjadi pada saat berusia 4 tahun dan terjadi perkembangan pesat pada saat mencapai usia 8 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 18 tahun. Mengingat pentingnya perkembangan anak pada masa emas pertumbuhannya tersebut, pemerintah saat ini menggalakkan program satu desa satu PAUD.



Gambar 2.35 Pendidikan Anak Usia Dini di DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 telah tercapai 100% yang artinya di setiap desa yang ada di DIY telah terbentuk kelompok PAUD. Akan tetapi angka 100% yang melambangkan bahwa di setiap desa telah terbentuk kelompok PAUD masih belum menjadi jaminan akan keterlayanan anak PAUD yang ada di DIY. Masih banyak anak usia PAUD yang masih belum tersentuh program PAUD.

Tabel 2.43 Jumlah Lembaga dan Murid PAUD di DIY Tahun Ajaran 2014/2013

Kab/Kota	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak terlayani	Jumlah Anak yang Belum Terlayani	Prosentase Anak terlayani
	Lembaga	Peserta Didik	Lembaga	Peserta Didik			
Kota Yogyakarta	642	3.680	206	8.375	12.055	30.023	71%
Kab. Bantul	624	13.347	476	18.264	31.611	39.639	57%
Kab. Kulon Progo	357	7.152	344	8.112	15.264	12.865	30%
Kab. Gunungkidul	609	21.043	594	13.026	34.069	14.685	46%
Kab. Sleman	823	19.518	454	16.133	35.651	47.562	71%
DIY	3.055	64.740	2.074	63.910	128.650	144.775	53%

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa belum semua anak usia PAUD dapat dilayani melalui lembaga PAUD yang ada baik yang formal maupun informal. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih perlu memerlukan peningkatan yang cukup signifikan. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo sebenarnya telah mendapatkan pendampingan dari dana APBN untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok PAUD melalui pendampingan peningkatan kualitas SDM guru PAUD serta pendampingan manajemen kelembagaan PAUD itu sendiri.

b. APK PAUD

APK PAUD di DIY jika dibandingkan secara nasional sudah terdapat dalam peringkat 10 besar. Akan tetapi masih terlihat adanya ketimpangan antar kabupaten/kota yang ada di DIY. Factor Sarana Prasarana, SDM serta manajemen masih menjadi masalah utama yang masih harus dibenahi dalam penyelenggaraan PAUD di DIY.

Tabel 2.44 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di DIY Tahun 2010-2014

Kab/Kota	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Kota Yogyakarta	NA	56,27	45,83	58,13	58,13
Kab. Bantul	NA	26,95	21,33	26,47	26,47
Kab. Kulon Progo	NA	30,33	18,82	29,32	29,32
Kab. Gunungkidul	NA	45,15	28,38	44,15	44,15
Kab. Sleman	NA	36,08	30,55	35,09	58,13
DIY	NA	38,06	28,84	37,15	42,06

Sumber: Profi IPendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Berdasar data di atas, Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih memiliki APK PAUD yang relatif kecil dibandingkan dengan tiga kabupaten/kota lainnya. Perlu adanya suatu terobosan yang bisa dilaksanakan agar Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dapat mengejar ketertinggalan capaian dalam hal pelayanan PAUD sehingga semua anak usia PAUD di DIY dapat memperoleh layanan PAUD.

c. Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) atau menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Akan tetapi, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang perlu diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah di DIY ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Untuk jenjang pendidikan SD terlihat bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 telah melebihi 100%. Demikian juga pada jenjang SMP, di tahun ajaran 2014/2015 mencapai 115,65. Untuk jenjang SMA terlihat bahwa dari tahun 2010 terus mengalami kenaikan hingga di 2014 mencapai 69,01. Hanya saja APS jenjang SMA masih perlu ditingkatkan mengingat pada tahun 2017 Pemda DIY mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini berarti masih ada 30,99 persen masyarakat DIY yang belum tertampung di jenjang sekolah menengah.

Tabel 2.45 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DIY Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI (7 – 12 th)					
Usia 7 – 12 th sedang Sekolah	268.466	271.130	268.289	266.337	304.384
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 th	276.343	277.987	275.046	277.023	280.157
APS SD/MI	10,81	107,49	108,89	107,68	107,51
SMP/MTs (13 – 15 th)					
Usia 13 – 15 th sedang Sekolah	113.185	108.851	108.029	114.186	158.937
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 th	139.763	134.311	133.163	136.356	141.269
APS SMP/MTs	113,19	110,35	111,5	113,64	115,65
SMA/SMK/MA(16-18 Tahun)					
Usia 16-18 th sedang Sekolah	136.185	139.447	139.530	141.878	136.232
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 th	158.089	159.267	159.625	160.402	161.455
APS SMA/SMK/MA	68,05	68,13	68,86	160.402	161.455

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten/Kota secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46 Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2014/2015

Kab/Kota		Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	DIY
Keterangan	SD/MI (7 – 12 th)	44.3	76.854	35.768	56.547	92.859	306.428
	Jumlah Penduduk	32.943	71.539	34.382	62.106	79.187	280.157
	APS	138,14	104,01	99,83	89,95	115,05	107,51
SMP/MTs	Sedang Sekolah	25.678	39.819	18.182	31.154	44.104	158.937

Kab/Kota		Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	DIY	
Keterangan	(13 – 15 th)	Jumlah Penduduk	17.988	36.659	16.995	30.523	39.104	141.269
		APS	158,37	109,17	111,14	100,97	115,49	115,65
SMA/S MK/M A (16 – 18 th)		Sedang Sekolah	35.185	29.597	15.881	22.787	32.782	136.232
		Jumlah Penduduk	29.36	68.303	18.032	32.467	45.585	161.455
		APS	94,10	71,47	74,38	57,96	56,63	69,01

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2014

d. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

Ketersediaan sekolah sangat terkait dengan partisipasi sekolah. Dengan tersedianya infrastruktur yang mendukung serta merata diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat meningkat yang nantinya juga akan mendukung pencapaian wajar dikdas 12 tahun.

Tabel 2.47 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI					
Jumlah gedung sekolah	2.009	2.017	2.009	2.010	2.018
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	276.343	277.987	275.046	277.023	280.157
Rasio (Per 10.000)	73	73	73	73	72
SMP/MTs					
Jumlah gedung sekolah	507	507	517	526	534
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	139.763	134.311	133.163	136.356	141.269
Rasio (Per 10.000)	36	38	39	39	38
Pendidikan Menengah (SLTA)					

Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Jumlah sekolah	399	406	411	422	428
jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	158.089	159.267	159.625	160.402	161.455
Rasio	25	25	26	26	27

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2010-2014

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar, setiap 10.000 penduduk usia sekolah tersedia 73 sekolah. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2014 tersedia 38 sekolah untuk setiap 10.00 anak usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang sekolah menengah atas dapat dikatakan masih relatif kecil yaitu 27 sekolah untuk setiap 10.000 anak usia sekolah. Untuk itu perlu dipertimbangkan terkait peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang menunjang agar rasio ketersediaan sekolah dapat ditingkatkan.

Lebih lanjut Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun Ajaran 2014/2015

Keterangan		Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. KulonProgo	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	DIY
SD/MI Usia 7-12 Thn	Jumlah gedung sekolah	170	388	369	560	531	2018
	jumlah penduduk usia 7-12 th	32.943	71.539	34.382	62.106	79.187	280.157
	Rasio	52	54	107	90	67	73
SMP/MTs Usia 13-15 Thn	Jumlah gedung sekolah	66	116	79	140	133	534
	jumlah penduduk usia 13-15 th	17.988	36.659	16.995	30.523	39.104	141.269
	Rasio	37	32	46	46	34	38
SMA/SMK/MA Usia 16-18 Thn	Jumlah gedung sekolah	84	95	57	76	116	428
	jumlah penduduk usia 16-18 th	29.36	68.303	18.032	32.467	45.585	161.455
	Rasio	29	14	32	23	25	27

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2014

Dari data di atas dapat kita lihat kesenjangan rasio ketersediaan sekolah di masing – masing kabupaten/kota. Untuk jenjang sekolah dasar Kota Yogyakarta mempunyai rasio yang terkecil. Untuk jenjang sekolah menengah pertama, kabupaten Bantul mempunyai rasio terkecil dengan 32 sekolah untuk 10.000 penduduk usia. Untuk jenjang sekolah menengah atas Kabupaten Bantul juga memiliki rasio ketersediaan terkecil dengan 14 sekolah untuk 10.000 penduduk usia sekolah.

e. Rasio guru terhadap murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.49 Rasio Guru Terhadap Murid di DIY Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI					
Jumlah Guru	23.820	23.719	23.222	22.548	22.075
Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 thn di Sedang Sekolah)	268.466	271.130	268.289	266.337	306.428
Rasio	9	9	9	8	7
SMP/MTs					
Jumlah Guru	12.971	12.684	12.634	12.834	13.033
Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn di Sedang Sekolah)	113.185	108.851	108.029	114.186	158.937
Rasio	11	12	12	11	8
SMA/SMK/MA usia 16-18 Tahun					
Jumlah Guru	15.112	15.064	14.748	15.231	15.592
Jumlah Murid	136.185	139.447	139.530	141.878	136.232
Rasio	16	15	15	15	15

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2010-2014

Di dalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7 – 12 th, 13 – 15 th , atau 16 – 18 th). Pada tahun 2014 dapat kita lihat bahwa di jenjang sekolah dasar setiap 10.000 siswa didik diampu oleh 7 guru, di jenjang sekolah menengah pertama setiap 10.000 siswa diampu oleh 8 guru dan di jenjang sekolah menengah atas setiap 10.000 siswa diampu oleh 15 siswa. Hal ini tentu

saja masih jauh dari kriteria ideal. Jumlah guru dan murid yang tidak sebanding membuat proses pembelajaran menjadi tidak optimal.

f. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata – rata adalah penghitungan perbandingan jumlah guru dan jumlah siswa per jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA)

Tabel 2.50 Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata di DIY Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI					
Jumlah Guru	23.820	23.719	23.222	22.548	22.075
Jumlah murid	307.542	309.433	307.439	304.384	306.428
Rasio	8	8	8	7	7
SMP/MTs					
Jumlah Guru	12.971	12.684	12.634	12.834	13.033
Jumlah murid	148.484	143.904	146.454	152.784	158.937
Rasio	9	9	9	8	8
SMA/SMK/MA					
Jumlah Guru	15.112	15.064	14.748	15.231	15.592
Jumlah Murid	136.138	139.447	139.530	141.878	136.232
Rasio	11	11	11	11	11

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2010-2014

Pada tahun 2014, dapat kita lihat bahwa pada jenjang sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah terdapat 7 guru yang mengampu dan di jenjang sekolah menengah pertama terdapat 8 guru per 10.000 siswa SMP. Untuk jenjang sekolah menengah terdapat 11 guru per 10.000 siswa SMA.

g. Angka Putus Sekolah SD/MI&SMP/MTs

Kecilnya angka putus sekolah yang tergambar dalam tabel di bawah ini bukan merupakan gambaran capaian yang memuaskan dikarenakan di beberapa daerah masih terdapat angka putus sekolah yang cukup tinggi. Masih adanya budaya lokal di beberapa daerah yang menganggap bahwa anak mempunyai kewajiban untuk membantu orangtua mencari nafkah membuat anak – anak usia sekolah yang ada di pedesaan memilih untuk putus sekolah dan membantu orangtua mereka bekerja.

Tabel 2.51 Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2010/2011-2014/2015

Kabupaten	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI					
Kota Yogyakarta	0,05	0,03	0,03	0,03	0,01
Kab. Bantul	0,04	0,05	0,04	0,07	0,03
Kab. Kulon Progo	0,07	0,04	0,08	0,11	0,09
Kab. Gunungkidul	0,11	0,11	0,11	0,07	0,05
Kab. Sleman	0,13	0,13	0,09	0,04	0,04
DIY	0,07	0,07	0,07	0,06	0,04
SMP/MTs					
Kota Yogyakarta	0,18	0,07	0,11	0,05	0,02
Kab. Bantul	0,08	0,06	0,11	0,16	0,26
Kab. Kulon Progo	0,25	0,19	0,36	0,24	0,90
Kab. Gunungkidul	0,33	0,14	0,21	0,28	0,16
Kab. Sleman	0,07	0,03	0,05	0,06	0,06
DIY	0,17	0,09	0,16	0,15	0,22
SMA/SMK/MA					
Kota Yogyakarta	0,51	0,82	0,43	0,67	0,06
Kab. Bantul	0,64	0,63	0,79	0,78	0,19
Kab. Kulon Progo	0,39	0,43	0,33	0,10	0,28
Kab. Gunungkidul	0,37	0,70	0,84	0,60	0,93
Kab. Sleman	0,25	0,22	0,25	0,16	0,24
DIY	0,44	0,57	0,51	0,49	0,30

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Angka putus sekolah untuk jenjang sekolah dasar tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 0,09%, angka putus sekolah tertinggi untuk jenjang sekolah menengah pertama berada di Kabupaten Kulon Progo dengan angka 0,90% dan untuk jenjang sekolah menengah atas berada di Kabupaten Gunungkidul dengan angka sebesar 0,93%.

h. Angka Kelulusan SD/MI & SMP/MTs

Angka kelulusan yang sudah cukup tinggi dan merata menunjukkan bahwa kinerja pemerataan mutu pendidikan di DIY sudah cukup baik. Hanya saja angka lulusan ini tidak serta merta menggambarkan angka melanjutkan di jenjang yang lebih lanjut.

Tabel 2.52 Angka Lulusan Pendidikan Dasar Tahun 2009/2010-2013/2014

Kabupaten	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI					
Kota Yogyakarta	96,78	100,26	99,35	95,07	97,12
Kab. Bantul	99,48	98,04	98,74	98,10	94,63
Kab. KulonProgo	97,95	97,83	99,91	98,05	94,40
Kab. Gunungkidul	95,52	99,20	99,20	102,81	96,86
Kab. Sleman	93,80	97,82	96,60	97,78	95,79
DIY	94,47	98,53	98,45	98,44	95,76
SMP/MTs					
Kota Yogyakarta	77,28	98,12	93,49	94,28	75,76
Kab. Bantul	93,20	97,96	98,65	94,49	89,10
Kab. KulonProgo	76,37	98,09	89,67	90,04	79,38
Kab. Gunungkidul	74,01	97,51	105,50	91,93	84,90
Kab. Sleman	84,16	99,40	94,27	93,23	89,18
DIY	81,84	98,28	96,83	93,05	96,81
SMA/SMK/MA					
Kota Yogyakarta	86,94	99,54	97,37	98,54	109,20
Kab. Bantul	97,82	99,77	98,33	103,30	108,36
Kab. KulonProgo	81,31	99,64	96,78	95,57	99,75
Kab. Gunungkidul	83,00	99,76	99,76	83,77	94,84
Kab. Sleman	91,96	99,45	96,73	99,55	107,36
DIY	88,98	99,61	97,74	97,04	105,11
Kota Yogyakarta	86,94	99,54	97,37	98,54	109,20
Kab. Bantul	97,82	99,77	98,33	103,30	108,36

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

i. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Daerah Istimewa Yogyakarta seara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53 Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014

Kabupaten	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI ke SMP/MTs					
Kota Yogyakarta	NA	74,85	114,62	127,34	115,57
Kab. Bantul	NA	95,49	106,42	109,7	120,99
Kab. KulonProgo	NA	96,05	108,31	106,76	110,65
Kab. Gunungkidul	NA	92,9	94,73	106,34	107,49
Kab. Sleman	NA	88,18	106,39	104,89	108,96
DIY	NA	89	105,63	109,91	112,78
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA					
Kota Yogyakarta	NA	114,26	171,74	151,28	189,07

Kabupaten	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Kab. Bantul	NA	86,83	95,86	64,99	71,32
Kab. KulonProgo	NA	93,4	101,89	108,08	124,72
Kab. Gunungkidul	NA	68,26	78,19	84,5	90,86
Kab. Sleman	NA	78,5	98,55	79,17	87,59
DIY	NA	86,95	105,4	89,18	99,81

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Berdasar tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka melanjutkan di masing – masing jenjang pendidikan sebagian besar telah berada pada angka di atas 100%. Hal ini dimungkinkan karena banyak siswa baru yang merupakan siswa dari luar daerah. Untuk jenjang pendidikan SMA dan sederajat, rerata angka melanjutkan masih belum mencapai 100%. Kabupaten Bantul menjadi kabupaten dengan angka melanjutkan yang terendah pada tahun 2014.

j. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memmenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV per jenjang pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1-D IV Per Jenjang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI					
Jumlah Guru	20.379	23.820	23.719	23.222	22.548
Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	9.602	11.385	12.813	14.447	17.030
Persentase	47 %	47,8 %	54 %	62 %	75,5%
SMP/MTs					
Jumlah Guru	13.131	12.971	12.684	12.634	12.834
Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	10.028	10.207	10.388	10.376	11.196
Persentase	76,4 %	78,7 %	81,9 %	82,1 %	87,2%
SMA/SMK/MA					
Jumlah Guru	15.112	15.064	14.748	15.231	15.592
Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	13.638	13.670	13.613	14.192	14.661
Persentase	90,2%	90,7%	92,3%	93,18%	94,03%

Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.2.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

a. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013, jumlah posyandu di DIY menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah posyandu di DIY tercatat sebanyak 5.698 posyandu. Dari 5.698 tersebut melayani 214.800 balita dengan rasio posyandu per satuan balita adalah 26,53.

Tabel 2.55 Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per Satuan Balita DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Posyandu	5.643	5.652	5.675	5.691	5.698
Jumlah Balita	213.500	215.200	211.500	213.100	214.800
Rasio Posyandu per satuan balita	26,43	26,26	26,83	26,71	26,53

Sumber : Proyeksi Penduduk SP 2010 BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY 2014, diolah

b. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah DIY dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat. Hasil survey Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY lokasi tempat tinggalnya hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan

puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan. Hal ini menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2013 sebanyak 441 unit dengan rasio sebesar 0,123. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.152 penduduk.

Tabel 2.56 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.457.491	3.487.325	3.514.762	3.594.854
Jumlah Puskesmas	120	121	121	121	121
Jumlah Puskesmas Pembantu	321	321	321	320	320
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	441	442	442	441	441
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,129	0,128	0,127	0,125	0,123

Sumber : BPS Provinsi DIY & Dinas Kesehatan DIY, 2013, diolah

c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk.

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit di DIY dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 66 rumah sakit pada tahun 2011 dan 2012, menjadi 71 rumah sakit pada tahun 2013. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.627.821 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 0,0195. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 50.635 jiwa.

Tabel 2.57 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	3.487.325	3.514.762	3.594.854
Jumlah Rumah Sakit	71	71	71
Rumah Sakit Umum Pusat	1	1	1
Rumah Sakit Umum Daerah	7	7	7
Rumah Sakit Umum Swasta	52	52	52
Rumah Sakit Khusus	11	11	11
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0204	0,0202	0,0198

Sumber : BPS Provinsi DIY & Dinas Kesehatan DIY, 2013, diolah

Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 60,51 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.035 TT (berdasarkan laporan 39 rumah sakit dari total 71 rumah sakit di DIY).

Tabel 2.58 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah RS	RS Lapor BOR	TT RS Lapor BOR	BOR Kab/Kota
Kulon Progo	7	2	261	70.17
Bantul	10	6	500	62.67
Gunung Kidul	4	3	289	67.24
Sleman	27	15	2,131	59.44
Kota Yogyakarta	23	13	1,854	58.74
Total	71	39	5,035	60.51

Sumber : SIM RS, Dirjen BUK, Kementerian Kesehatan RI, 2014

d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2013, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.354 orang atau mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sebanyak 997 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2013 sebesar 37,32. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 2.679 penduduk.

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2013 adalah sebanyak 1.262 orang meningkat dari tahun 2012 yang sebanyak 825 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 34,79. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 2.875 penduduk.

Jumlah dokter gigi DIY tahun 2013 sebanyak 453 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 432 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 12,49.

Tabel 2.59 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Dokter Umum	1.011	997	1.354
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	28,53	27,80	37,32
Dokter Spesialis	820	825	1.262
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	23,14	23,01	34,79
Dokter Gigi	428	432	453
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	12,08	12,05	12,49

Sumber : BPSProvinsi DIY, diolah

e. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah puskesmas di DIY pada tahun 2013 sebanyak 121 puskesmas yang tersebar di 78 kecamatan. Angka kunjungan puskesmas sebesar 4.025.741. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di DIY sebanyak 320 puskesmas pembantu yang tersebar di 438 desa/kelurahan.

Tabel 2.60 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu DIY Tahun 2011-2013

No	Uraian	2011	2012	2013
1	Jumlah Puskesmas	121	121	121
2	Jumlah Kecamatan	78	78	78
3	Jumlah Kunjungan Puskesmas	3.924.814	3.802.382	4.025.741

No	Uraian	2011	2012	2013
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	321	320	320
5	Jumlah Desa/Kelurahan	438	438	438

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, diolah

f. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2013 mencapai 99,74%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.61 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Ibu yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	44.041	43.038	44.847	45.880	45.378
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	47.599	44.057	44.968	45.948	45.496
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan (%)	92,53	97,69	99,73	99,85	99,74

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Penanganan pembangunan di bidang sumber daya air, kebinamargaan, keciptakarya dan jasa konstruksi, merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum. Dalam menjalankan pelayanan urusan tersebut, Pemerintah DIY bertanggungjawab untuk :

1. Melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan , dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
2. Melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan dan jembatan yang ada di wilayah diy.

3. Menyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan keciptakaryaan ini meliputi: (1) permukiman, (2) air minum, (3) air limbah, (4) persampahan, (5) drainase, dan (6) penataan bangunan dan lingkungan.

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pada urusan pekerjaan umum terdapat 18 indikator yang merupakan Fokus Layanan Urusan Wajib sebagai bagian dari aspek pelayanan umum. Berikut adalah data n-5 terkait dengan beberapa indikator urusan pekerjaan umum yang dapat disajikan.

Tabel 2.62 Data Kondisi Eksisting Urusan Pekerjaan Umum DIY Tahun 2010-2014

No	Indikator	Kondisi eksisting					Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	83.46%	83.89%	71.09%	72.72%	73.70%	tahun 2012 terjadi perubahan status jalan provinsi ke nasional
2	Rasio Jaringan Irigasi	2.38	2.38	2.38	2.38	2.42	tahun 2014 terjadi perubahan Jumlah DI dan luas DI kewenangan Provinsi
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	81.85%	83.14%	85.41%	86.28%	87.07%	Target SPM terlampaui (>) dan Target MDGs akan tercapai (=)
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	63.11%	67.62%	68.03%	70.39%	70.76%	Pada tahun 2014 Sesuai dengan SPM Kem PU No. 14/PRT/M/2010, Tersedianya sistem penanganan sampah di Perkotaan sebesar 70% sudah terlampaui.

No	Indikator	Kondisi eksisting					Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014	
5	Rasio rumah layak huni	0.272	0.271	0.270	0.268	0.266	
6	Rasio permukiman layak huni	0.112	0.112	0.109	0.106	0.103	
7	Panjang jalan dilalui Roda 4	690.25	690.25	619.34	619.34	619.34	tahun 2012 terjadi perubahan status jalan provinsi ke nasional
8	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	38.00%	41.33%	45.97%	50.41%	56.70%	Sesuai dengan SPM Kem PU No.14/PRT/M/2010, Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Target 2014 adalah 50%
9	Lingkungan Pemukiman	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & ESDM

Dari 18 indikator pada Permendagri tersebut hanya 9 indikator yang dapat disajikan dikarenakan beberapa indikator merupakan kewenangan kabupaten/kota dan beberapa lainnya lagi bukan merupakan tupoksi dari SKPD yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Dinas PUP-ESDM.

Beberapa faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator tersebut diantaranya adalah adanya dana bantuan dari pusat baik berupa APBN, DAK maupun yang lain, dan beberapa kegiatan yang sifatnya ada keterlibatan dari masyarakat.

Pada tahun 2014 telah dilakukan intervensi melalui 15 program 34 kegiatan dengan total Rp 283.531.822.051 untuk mengatasi berbagai permasalahan urusan pekerjaan umum dan sekaligus memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam memenuhi tanggungjawab terkait pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi, pada tahun 2014 melalui program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Pengairan Lainnya telah dilakukan kegiatan :

1. Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi yang menghasilkan dokumen Inventarisasi Aset dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi sejumlah 7 dokumen.
2. Juga telah dilakukan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada 10 D.I. dari total 41 D.I. yang menjadi kewenangan provinsi.

Kegiatan tersebut turut menyumbang pada pencapaian target indikator RPJMD di tahun 2014 untuk Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi sebesar 78% sehingga telah tercapai 79.74%.

Untuk konservasi sumber daya air melalui dana APBD 2014 juga telah dilakukan Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya telah disusun Dokumen DED Embung di Kec. Imogiri Kab Bantul, dan Kec. Semanu, Saptosari Kab. Gunungkidul serta Dokumen Perubahan DED Embung di Kec. Berbah, Kab. Sleman.
2. telah dilakukan pembangunan 4 buah Embung di Kec. Ngaglik Kab. Sleman, Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo, dan di Kec. Wonosari dan Semanu Kab. Gunungkidul.

Kegiatan-kegiatan tersebut selain menjadi bagian dari konservasi sumber daya air juga sebagai bagian kegiatan untuk penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat, sehingga pada tahun 2014 telah berhasil menambah ketersediaan air baku di DIY hingga menjadi 1018.53 lt/detik, dari target sebesar 900 lt/detik.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku yaitu identifikasi sumber-sumber air di DIY, yang diharapkan menjadi landasan bagi pencapaian target penambahan penyediaan air baku sebanyak 1.600liter/detik pada tahun 2016. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan melalui kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa yaitu Rehabilitasi Jaringan irigasi sistem pompa di 2 kecamatan yaitu Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dan Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul. Pencapaian ini masih jauh dari target yang diharapkan oleh karena itu program ini layak untuk menjadi salah satu prioritas pada penanganan infrastruktur pada tahun 2016.

Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 151/ KEP/2012 Tahun 2012, Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, total panjang jaringan jalan berstatus

Jalan Provinsi adalah 619,34 Km dan panjang jembatan 4.393,09 m. Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 456,43 Km atau 73,70 % di tahun 2014 dari target kinerja RPJMD Persentase jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 72.64%.

Pencapaian tersebut dicapai melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan yang telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan pada 8 ruas dengan total 20.01 Km. Pada program yang sama juga dilakukan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada 5 jembatan dengan total 66 meter. Pemeliharaan Rutin Jalan juga dilakukan pada Ruas Jalan Provinsi di kabupaten/kota di wilayah DIY dengan total 570.13 km. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di kabupaten/kota di wilayah DIY dengan total 3.491,9 meter.

Selain rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan juga dilakukan peningkatan melalui Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan. Pada kegiatan Peningkatan Jalan yang dilakukan peningkatan pada 11 ruas dengan total panjang 22.7 km. Juga telah dilakukan peningkatan jembatan pada 2 ruas sejumlah 200 meter. Untuk perencanaan kedepan pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan Perencanaan Peningkatan Jembatan yang menghasilkan 3 DED.

Untuk mengatasi kesenjangan dan sebagai upaya percepatan pertumbuhan pembangunan di kawasan selatan Pulau Jawa yang didasari oleh adanya potensi di daerah tersebut maka dibangun jalur lintas selatan. Manfaat pembangunan JJLS merupakan salah satu upaya untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di DIY seperti potensi wisata dan industri kelautan dan pertanian, yang diharapkan bisa merupakan satu kesatuan jaringan jalan di Pulau Jawa sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan.

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 117,60 km terbagi menjadi 4 (empat) segmen. Untuk Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela)/ JJLS, pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional Belum Tersambung dengan panjang 125,125 km. Sampai dengan tahun 2012 tahapan pembangunan JJLS yang meliputi studi kelayakan, penyusunan AMDAL, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pembebasan tanah serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan telah menangani 44,575 km sehingga menyisakan 80,550 km yang belum tertangani. Pada tahun 2014 Pemerintah DIY telah melakukan pembebasan lahan seluas 9.365 m² dari 20.000 m². Masih dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan antara timur dan barat wilayah DIY Pemda DIY telah melakukan pembebasan lahan untuk Jalan Selokan Mataram seluas 3.918 m² dari 3.200 m².

Pembelasan lahan untuk kepentingan JJLS dan selokan mataram tersebut merupakan salah satu bagian dari indikator Persentase penyediaan Aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru pada

RPJMD dengan target kinerja pada tahun 2016 sebesar 35.79% Sedangkan Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur telah mencapai target 32.55% pada tahun 2014.

Pembangunan pada sub sektor bidang air minum berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas. Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mendukung pencapaian MDGs khususnya target 7C yakni menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yang layak pada tahun 2015.

Sampai dengan tahun 2013, persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang layak di DIY mencapai 74,25%. Peningkatan persentase penduduk dengan akses air minum yang layak dicapai dengan melakukan ; pengembangan dan optimalisasi SPAM IKK dan SPAM Desa. Sebagai perwujudan peran serta masyarakat di DIY, telah terbentuk PAMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) yang beranggotakan kelompok-kelompok masyarakat pengelola air minum di perdesaan. Sampai dengan bulan Juli tahun 2012 jumlah anggota PAMASKARTA telah mencapai 482 kelompok, dimana masing-masing kelompok mengelola sumber air rata rata 1 s.d. 2 liter/detik.

Dalam penyediaan infrastruktur dasar yang meliputi air minum telah dilakukan kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pada Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum yaitu 4 dokumen Identifikasi desa rawan akses air minum, Pembangunan SPAM IKK rongkop 1 lokasi, dan tersedianya sarana prasarana penyediaan air minum pada 15 kelompok PAMASKARTA. Untuk itu diperlukan upaya dan perhatian khusus dalam penentuan prioritas program/kegiatan kedepan.

Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan

dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah pada skala regional di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dilakukan dengan sistem sanitary landfill pada TPA Piyungan di Bantul. Adapun untuk wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo telah dibangun masing-masing satu TPA dengan sistem controlled landfill.

Terkait dengan penanganan infrastruktur dasar persampahan telah dilakukan kegiatan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Persampahan pada Program Pengelolaan Persampahan yaitu bangunan TPST sebanyak 2 buah. capaian ini turut mendukung pencapaian target RPJMD Persentase penerapan Sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan sebesar 64.75% di tahun 2014 dari target RPJMD sebesar 55%.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon.

Hingga tahun 2014 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar 18.441 SR. Angka ini telah melampaui target di RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 15.800 SR. Namun masih terdapat gap terhadap pencapaian target MSMHP hingga tahun 2014. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan kabupaten/kota untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam penyediaan SR. Pada tahun anggaran 2104 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Lateral Air Limbah Terpusat di Kawasan Depok Kabupaten Sleman dan di Kawasan Kasihan Kabupaten Bantul. Sedangkan melalui pendanaan APBN telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Induk Air Limbah Terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sesuai skenario kesepakatan MSMHP.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir. melalui program tersebut telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai sebanyak 2 titik di Sungai Winongo dan Gadjah Wong sepanjang 200 meter. hal ini turut membantu pencapaian sebesar total 97 titik dari target 60 titik di tahun 2014.

Selain itu, juga telah dilakukan penanganan infrastruktur dasar yang terkait dengan drainase yang dilakukan melalui kegiatan Perencanaan dan pembangunan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. Pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong didapat output Dokumen Perencanaan Drainase di 5 titik. Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong didapat output pembangunan gorong-gorong di

5 titik yaitu di kawasan Tegalrejo, kawasan kotagede, kawasan sewon, kawasan jalan imogiri barat, dan kawasan godean. sehingga pada tahun 2014 telah tercapai 49.02% Pengurangan Jumlah Titik Genangan dari target sebesar 39.9%.

Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dimana kawasan tersebut berada. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan yang merupakan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional.

Pada kawasan perkotaan terdapat 125 lokasi yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Dalam rangka Penataan Bangunan dan Lingkungan telah dilakukan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan yang outputnya adalah Tersusunnya DED Kawasan Sungai Gajah Wong 1 dokumen dan Identifikasi lahan Kawasan Sungai Gajah Wong 1 laporan. Serta kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dengan output terwujudnya penataan kawasan sebanyak 2 lokasi, terbangunnya konstruksi parkir bertingkat di 1 lokasi, dan terbangunnya infrastruktur jalan lingkungan di 4 kecamatan. sampai pada tahun 2014 telah tercapai 40% Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensidari target sebesar 40%.

Secara keseluruhan di DIY terdapat 2.375 lokasi pada kawasan perdesaan yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Sedangkan untuk pengembangan kawasan perdesaan telah dilakukan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui program Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan output Peningkatan aksesibilitas kawasan pedesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin sebanyak 16 kecamatan. Pada program yang lain yaitu Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Dan Desa Potensi telah dilakukan kegiatan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan dengan output tersedianya infrastruktur kawasan Agropolitan, tersedianya infrastruktur kawasan minapolitan, dan tersusunnya DED Kawasan Ngobaran.

2.2.1.4 Urusan Perumahan

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pemerintahan daerah provinsidan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pelayanan dasar meliputi:

1. Rumah layak huni dan terjangkau;
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Indikator pencapaian ketersediaan rumah layak huni adalah sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dengan waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

Kebijakan pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017 melalui Misi IV, yakni memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Adapun arah kebijakan dari Misi IV untuk sektor perumahan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan pihak terkait dalam pemenuhan penyediaan perumahan;
2. Mensinergikan kebijakan dan mengkolaborasikan kelembagaan dalam upaya debottlenecking pemenuhan kebutuhan perumahan (keterjangkauan, kelembagaan dan ketersediaan lahan).

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, begitu juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.594.854 jiwa pada Tahun 2013 diperkirakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan rumah sekitar 898.713 unit rumah, dengan asumsi 1 rumah 4 jiwa.

Pembangunan/pengembangan unit baru yang dilakukan di DIY khususnya diperuntukkan bagi kaum MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang baru dapat dilaksanakan melalui program :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
3. Program Pengurangan Kawasan Kumuh.

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu merupakan salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Perumahan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah rumah tidak layak huni di DIY dari kondisi awal pada tahun 2012 sebesar 8,5% menjadi 6% pada tahun 2017.

Berdasarkan data Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) DIY 2011 masih terdapat 91.200

keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan.

Penanganan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni melalui pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulant sebagai berikut :

Tabel 2.63 Filitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Stimulan RTLH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	GunungKidul	80	180	488	317	400
2.	Bantul	80	140	400	323	291
3.	Kulonprogo	80	120	140	180	104
4.	Sleman	40	140	418	234	232
5.	Yogyakarta	40	40	88	110	72
	Jumlah	320	620	1.610	1.234	1.099
	Jumlah Total	4.883				

Sumber : DPUP & ESDM DIY, 2014

Perwujudan rumah sehat juga dilakukan melalui upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah secara swadaya, maka Pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan.

Jumlah komunitas perumahan total di DIY tercatat 438 komunitas. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi bagi komunitas perumahan sebanyak 283 komunitas. PadaTahun 2014 total Komunitas Perumahan yang difasilitasi Pemerintah Daerah DIY melalui kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan adalah 64 Komunitas dengan rincian meliputi :

- Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, telah dilakukan bagi komunitas perumahan di 15 (limabelas) Komunitas.
- Peningkatan kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan pada 49 (empat puluh sembilan) komunitas.



Gambar 2.36 Permukiman Padat di Kawasan Sungai Code

Pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan telah mencapai 28 Twin Blok sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan pembangunan Rusunawa bersumber dari APBN sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaran Rusunawa yang ada di DIY sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun peruntukan penggunaan dari Rusunawa tersebut adalah untuk; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan pendidikan. Rincian Rusunawa yang ada di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2.64 Sebaran Rusunawa di DIY Tahun 2013

No	Nama Rusun	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Twin Blok	Unit	Dibangun
1.	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	96	Kemen PU
2.	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	96	Kemen PU
3.	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	96	Kemen PU
4.	Pringwulung 1	Sleman	Depok	Condongcatur	2	196	Kemen PU
5.	Pringwulung 2	Sleman	Depok	Condongcatur	1	72	Kemen PU
6.	Panggunharjo	Bantul	Sewon	Panggung harjo	2	192	Kemen PU
7.	Cokrodirejan	Kota Yk	Danurejan	Suryatmajan	1	72	Kemen PU
8.	Tegalpanggung	Kota Yk	Danurejan	Tegalpanggung	1	68	Kemen PU
9.	Jogoyudan	Kota Yk	Jetis	Gowongan	1	96	Kemen PU
10.	Jogoyudan	Kota Yk	Jetis	Gowongan	1	96	Kemen PU
11.	U I I	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani	1	96	Kemen PU
12.	U I I	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani	1	96	Kemen PU
13.	U G M	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96	Kemen PU

No	Nama Rusun	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Twin Blok	Unit	Dibangun
14.	U G M	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96	Kemen PU
15.	U G M	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96	Kemenpera
16.	U M Y	Bantul	Kasih	Tamantirto	3	288	Kemen PU
17.	U S T	Kota Yk	Umbulharjo	Tahunan	1	96	Kemenpera
18.	U A D	Kota Yk	Umbulharjo	Giwanangan	1	96	Kemenpera
19.	U N Y	Kulonprogo	Pengasih	Pengasih	2	192	Kemenpera
20.	Sanatadharma	Sleman	Maguwoharjo	Pilangan	1	96	Kemenpera
21.	Lanud	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	1	96	Kemenpera
22.	Adisucipto	Bantul	Kasih	Ngestiharjo	1	96	Kemenpera
23.	Tambak Stikes	Sleman	Gamping	Ambarketawang	1	96	Kemenpera
					28	2616	

Sumber : Dinas PUP & ESDM, 2014

Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan *dynamic phenomenon of urbanization*. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah. Kompetisi penggunaan lahan di daerah perkotaan mengakibatkan fenomena kawasan kumuh. Luasan kawasan kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.65 Data Luasan Wilayah Kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Yogyakarta	278.70
2.	Sleman	41.41
3.	Bantul	27.29
4.	KulonProgo	32.61
5.	Gunungkidul	32.61
Jumlah		412.62

Sumber : Kabupaten/Kota di DIY dan DPUP & ESDM DIY, Tahun 2014

Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah DIY melakukan kegiatan penataan kawasan kumuh untuk mengurangi jumlah lokasi/luasannya dan telah dilakukan pada 42 titik lokasi, dari total jumlah titik lokasi kawasan kumuh sebanyak 107 titik lokasi.

2.2.1.5 Urusan Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya.

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan Program Perencanaan Tata Ruang; Program Pemanfaatan Ruang; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Target kinerja Program yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2012 – 2017 untuk urusan Tata Ruang sampai dengan akhir RPJMD adalah tercapainya ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis sebanyak 19 kawasan strategis; tercapainya 90% kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi; serta tercapainya 100% pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan kawasan lindung bawahan.

Sampai dengan tahun 2014 realisasi pelaksanaan RPKD DIY dapat dijelaskan seperti terlihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tata Ruang

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2017)
		2012		2013		2014		2015	2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
1	2	3		4		5		6	6	7
	Urusan Wajib									
	Penataan Ruang									
1	Ketersediaan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan strategis Provinsi	10	10	12	12	14		16	18	19
2	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi	45%		50%	63,93%	60%	64,21%	70%	80%	90%
3	Persentase Pengendalian Tata Ruang Pada Kawasan perkotaan dan Kawasan Lindung Bawah	10%		20%	20%	40%		60%	80%	100%

Sumber: LKPJ DIY 2012-2014

Berdasarkan LKPJ DIY 2012-2014 dapat dilihat bahwa target capaian kinerja program untuk urusan Penataan ruang dapat dicapai dengan baik, bahkan untuk program pemanfaatan ruang capaian kinerja program dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah proses yang terkait dengan dinamika perkembangan wilayah dan dinamika politik membawa konsekuensi terhadap dokumen-dokumen perencanaan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY; adanya paradigma baru among tani ke dagang layar; bencana meletusnya Gunung Merapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang, telah disusun Perda Istimewa Tata Ruang, sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang khususnya pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten seperti yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya, perencanaan tataruang yang dilakukan tidak bias hanya mengatur wilayah Kasultanan dan Kadipaten saja, tetapi juga harus mengatur wilayah hinterland dari wilayah Kasultanan dan Kadipaten serta satuan-satuan ruang Keistimewaan di sekitarnya.

Bagian dari satuan-satuan ruang keistimewaan dimaksud adalah antara lain kawasan yang telah ditetapkan sebagai *City Heritage* yakni ; Kawasan Malioboro, Kraton, Kotabaru, Pakualaman dan Kotagede yang terdapat di Kota Yogyakarta, Kawasan Merapi dan Prambanan yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kawasan Kotagede, Pleret, Imogiri dan Parangtritis yang terdapat di Kabupaten Bantul, Kawasan Sokoliman dan Gunung Purba Nglanggeran yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, serta Kawasan Pusat Kota Wates yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo.

Pemanfaatan ruang di DIY harus dilakukan sejalan dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan harapan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan khususnya lahan pertanian produktif untuk mendukung LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tataruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tataruang kawasan strategis provinsi.

Strategi pembangunan yang meletakkan wilayah Pantura sebagai pusat pertumbuhan, asas pemerataannya sudah sulit dipenuhi. Akibatnya, terjadi marginalisasi di luar pusat pertumbuhan, di Jawabagian Selatan. Makin padatnya transportasi dijalur utara membawa implikasi melemahnya kapasitas Pantura sebagai pusat pertumbuhan.

Sejalan dengan Visi Gubernur dalam RPJMD 2012 – 2017 dengan tema Yogyakarta menyongsong peradaban baru dengan membalik paradigma “among tani menjadi dagang layar” yang konsekwensinya laut selatan tidak lagi ditempatkan sebagai halaman belakang melainkan menjadi halaman depan.

Makna dari paradigma tersebut pada dasarnya menghadapkan DIY kearah selatan dilakukan melalui pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir DIY merupakan daerah tertinggal dan miskin. Dengan demikian perencanaan tata ruang harus mengakomodir terkait kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya kegiatan pembangunan baru di kawasan Pantai Selatan, yakni kegiatan yang memanfaatkan potensi adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan antara lain rencana pembangunan Bandara Baru, pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, pembangunan pabrik Pig Iron dan Konsentrat Biji Besi dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pansela.

Selain itu di DIY terdapat kawasan strategis provinsi yang lain yakni Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional. Dalam dua kawasan strategis ini (kawasan strategis Panseladan KPY) terdapat beberapa wilayah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*, yang pengaturan penataan ruangnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, atas dasar hal tersebut dalam Review RTRW DIY, wilayah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi. Sehingga perlu adanya kegiatan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung penataan dan pengembangan kawasan strategis tersebut, sebagai kawasan strategis baru yang akan ditumbuhkan.

Permasalahan-permasalahan di atas sebagai contoh konsekuensi yang muncul akibat dinamika perkembangan wilayah dan politik di DIY maka pada tahun 2014 Pemerintah DIY telah melakukan *review* RTRW DIY dan dilakukan penetapan Perda RTRW tersebut pada Tahun 2015 sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Hasil review RTRW DIY tentunya juga diikuti dengan peninjauan dokumen perencanaan yang lain seperti RPJMD DIY.

Pada tahun 2016 target kinerja yang akan dicapai masih menggunakan target yang tercantum dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017 yaitu untuk tahun 2016 ini yaitu :

1. Ketersediaan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan strategis Provinsi sebanyak 18 Dokumen;
2. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi sebesar 80%;

3. Persentase Pengendalian Tata Ruang Pada Kawasan perkotaan dan Kawasan Lindung Bawah sebesar 80 %.

2.2.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan SKPD.

Tahun 2014 Pemerintah Daerah DIY melakukan perubahan RPJMD 2012-2017 terkait dengan beberapa indikator yang sudah melampaui target. Capaian realisasi indikator tersebut pada tahun 2013 telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Perubahan RPJMD 2012-2017 terkait realisasi indikator merupakan masukan dari DPRD DIY. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014.
2. Angka Harapan Hidup
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2015.
3. Jumlah Wisatawan Mancanegara
Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2015.
4. Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2016.

5. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah

Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2016.

6. Jumlah Wisatawan Nusantara

Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2017.

Perubahan RPJMD 2012-2017 telah diatur di dalam Peraturan Daerah DIY nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2012-2017 serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan target Pencapaian sasaran Tahunan Rencana jangka panjang Menengah Kibijakan Umum dan Program pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah Tahun 2012-2017. Perubahan RPJMD DIY 2012-2017 telah mengkaji indikator kinerja sasaran pemda, indikator kinerja sasaran SKPD, sampai dengan program SKPD dengan melihat kembali alur pikir perencanaan dan perhitungan indikator kinerja tersebut.

Perubahan RPJMD 2012-2017 merupakan bagian dari tindak lanjut redesain program dan kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang sudah diimplementasikan pada APBD tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Daerah DIY nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Peraturan Gubernur DIY nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Perencanaan pembangunan daerah DIY tahun 2015 yang tertuang di dalam RKPD DIY tahun 2015 terdiri dari 222 program dan 2.673 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terbagi di dalam 7 prioritas.

Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program kegiatan yang lain. Tujuan prioritas adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Ketujuh prioritas di dalam RKPD DIY tahun 2015 dengan total penganggaran sekitar 2,7 milyar rupiah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.67 Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

No.	Prioritas	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Persentase
1	Ekonomi	39	285	5,17%
2	Hukum dan Aparatur	59	1.533	20,86%
3	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	17	243	21,76%
4	Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	7	46	0,91%
5	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	35	155	15,49%
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana	25	167	5,76%
7	Sosial Budaya	40	248	30,05%

Sumber: Jogja Plan, RKPD 2015

2.2.1.7 Urusan Perhubungan

Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD-DIY) tahun 2013-2017, sektor perhubungan mempunyai sasaran pembangunan untuk meningkatkan layanan publik terutama dalam hal penataan sistem transportasi dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di pedesaan. Sasaran pembangunan tersebut, memiliki 2 (dua) indikator besar yakni load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta dan Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi.

Kedua indikator sasaran tersebut, mencerminkan dua hal besar yang menjadi fokus utama dalam penataan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta dan integrasi transportasi antar moda di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejalan dengan peningkatan aksesibilitas di pedesaan. Secara garis besar, penataan sistem transportasi perkotaan di Perkotaan Yogyakarta, terbagi dalam penataan sistem angkutan umum dan dukungan manajemen rekayasa lalu lintas pada kawasan perkotaan. Sedangkan untuk integrasi antar moda, menitikberatkan pada penyediaan fasilitas transfer baik untuk semua moda layanan maupun tipe layanan.

Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan

mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien.



Gambar 2.37 Lalu Lintas di Yogyakarta

Keberadaan layanan Trans Jogja dengan *konsep buy the service*-nya, tidak serta merta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktifitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan. Oleh karena itu, didalam mewujudkan penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, terdapat 2 program besar yang harus berjalan, bersinergi dan saling melengkapi, yakni :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Kedua program tersebut didukung penuh oleh Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan yang berperan sebagai fungsi regulator sehingga

dapat menjamin kualitas layanan angkutan umum maupun ketertiban lalu lintas kendaraan bermotor di jalan.

Indikator peningkatan layanan angkutan umum adalah peningkatan load factor penggunaan angkutan umum oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2014, angka load factor rata-rata yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.68 Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional TransJogja Tahun 2009-2014

No.	TAHUN	LOAD FACTOR RATA-RATA	PENDAPATAN
1.	2009	21,98 %	Rp. 15.359.527.500,00
2.	2010	26,37 %	Rp. 17.504.928.000,00
3.	2011	26,96 %	Rp. 18.043.004.000,00
4.	2012	29,26 %	Rp. 17.407.646.993,80
5.	2013	32,25 %	Rp. 18.359.146.684,23
6.	2014	37,82 %	Rp. 20.177.264.827,00

Sumber : UFT Trans Jogja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY, Tahun 2009-2014

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas, indikator yang digunakan adalah prosentase capaian kawasan yang telah disepakati untuk diterapkan manajemen rekayasa lalu lintas.

Di Perkotaan Yogyakarta, terdapat 7 kawasan yang akan diatur dengan menggunakan manajemen rekayasa lalu lintas berbasis angkutan umum. Beberapa aplikasi dalam konsep Transport Demand Management yang dapat diterapkan antara lain : pembatasan ruang parkir, pembatasan ruas/akses melalui pemberlakuan sistem lalu lintas satu arah serta penyebaran lalu lintas kendaraan pada jam puncak. 7 kawasan yang menjadi prioritas untuk ditata pada RPJMD 2013-2017 adalah :

1. Kawasan Jati Kencana – Demak Ijo;
2. Kawasan Kraton;
3. Kawasan Malioboro;
4. Kawasan Kranggan – Terban;
5. Kawasan Terban – Demangan;
6. Kawasan Kotagede;
7. Kawasan Seturan.

Sampai dengan tahun anggaran 2014, terdapat 4 (empat) kawasan yang telah dilakukan penataan secara bertahap, yakni Kawasan Jati Kencana –

Demak Ijo, Kawasan Malioboro, Kawasan Terban – Demangan dan Kawasan Seturan. Khusus untuk Kawasan Malioboro, keberadaan Dana Keistimewaan sangat membantu dalam percepatan penataan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan ini. Hal ini dikarenakan Kawasan Malioboro termasuk dalam sumbu imajiner budaya yang memungkinkan untuk diatur dan ditata dengan menggunakan dana keistimewaan.

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (area traffic control systems) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan Tahun 2013 telah terpasang 25 unit ATCS atau 45% dari 55 simpang yang direncanakan. Secara rinci, ATCS yang sudah terpasang adalah 16 unit yang dialokasikan melalui APBN, 1 unit melalui APBD-DIY dan 8 unit dari APBD Kota Yogyakarta. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan sinyal bus priority, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal bus priority. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY.

2.2.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

A. Kondisi Kualitas Air

1. Kondisi Kualitas Air Sungai

Di DIY terdapat 11 sungai utama, untuk pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun pada beberapa ruas sungai dari hulu sampai hilir. Pada tahun 2013 pemantauan kualitas air sungai mengukur parameter fisik (suhu, TDS, TSS, dan DHL), Parameter kimia (pH, Oksigen terlarut (DO), BOD, COD, Klorin bebas, Sulfida (H_2S), Fluorida, Fosfat (PO_4), Nitrat (NO_3-N), Nitrit, Kadmium (Cd), Krom (Cr^{+6}), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Boron, Sianida (CN), Minyak dan Lemak, Seng (Zn), Fenol, Amoniak, Permanganat dan Deterjen), serta parameter biologi (Bakteri Koli Tinja (Fecal Coli) dan Total Coli). Analisis hasil pemantauan kualitas air untuk menentukan status mutu air sungai digunakan metode Storet. Hasil analisis Storet secara umum sungai di DIY mulai pada bagian hulu sampai bagian hilir sudah masuk kategori cemar berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.69 Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet Tahun 2013

NO	Nama Sungai	Nilai Baku Storet	Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai	Keterangan
1	Winongo	≤ -31	-96 hingga -120	Cemar Berat
2	Code	≤ -31	-86 hingga -112	Cemar Berat
3	Gajahwong	≤ -31	-74 hingga -120	Cemar Berat
4	Bedog	≤ -31	-84 hingga -108	Cemar Berat
5	Belik	≤ -31	-100 hingga -126	Cemar Berat
6	Konteng	≤ -31	-86 hingga -106	Cemar Berat
7	Kuning	≤ -31	-83 hingga -90	Cemar Berat
8	Oyo	≤ -31	-92 hingga -98	Cemar Berat
9	Tambakbayan	≤ -31	-98 hingga -106	Cemar Berat
10	Bulus	≤ -31	-70 hingga -76	Cemar Berat

Sumber : SLHD, 2013

2. Kondisi Pantai dan Air Laut

Secara geografis, laut dan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari pantai selatan Pulau Jawa yang memanjang dari ujung barat Kabupaten Kulon Progo hingga ujung timur Kabupaten Gunungkidul. D.I. Yogyakarta mempunyai panjang garis pantai 113 km dengan pantai yang datar - landai (kemiringan lereng 0 – 2 %) sepanjang kurang lebih 42 km yang berada di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan ketinggian berkisar 0 hingga 50 m dari permukaan laut (dpl). Sedangkan pantai yang berada di Kabupaten Gunungkidul memiliki kemiringan lereng yang bervariasi 2% hingga lebih dari 40% dengan ketinggian berkisar 0 hingga 250 m sepanjang lebih kurang 71 km.

Kedalaman maksimum laut di selatan pantai DIY hingga sejauh 12 mil mencapai 500 m. Semakin ke arah selatan, kedalaman perairan Samudra Hindia secara gradual bertambah lebih curam hingga mencapai kedalaman 4000 m. Daerah ini merupakan palung laut yang memanjang dari arah barat ke timur. Ini merupakan zona tumbukan antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua Asia.

Perairan selatan Yogyakarta memiliki tipe pasang surut *mixed tide predominantly semi diurnal* atau pasang campuran yang condong ke harian ganda. Ini berarti dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut.

Arus yang terjadi di perairan Laut Selatan DIY ditimbulkan oleh gelombang datang, dengan 2 (dua) pola arus yang dibentuk oleh

arus menyusur pantai (*long shore current*) dan arus meratas pantai (*rip current*). Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai (*nerashore current*) yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi dan abrasi pantai.

Umumnya wilayah perairan Laut Selatan Jawa dan khususnya di Pantai Selatan DIY, ombak dan gelombang yang dihasilkan cukup besar dan sering dikatakan sebagai daerah yang sangat ganas karena menimbulkan abrasi sepanjang tahun dan sewaktu-waktu menelan korban jiwa. Dari hasil pengamatan, besarnya gelombang Laut Selatan DIY yang berkisar antara 2,25 – 3,30 m dipengaruhi secara langsung oleh kondisi oseanografi perairan Samudera Hindia yang sangat luas, dengan kondisi angin yang bertiup cukup kuat sepanjang tahun. Kondisi ombak atau gelombang di sepanjang pantai Selatan DIY relatif sama besar, namun cenderung lebih tinggi di pantai Kabupaten Gunungkidul. Tinggi dan besarnya gelombang laut, selain dipengaruhi oleh kondisi oseanografi Samudera Hindia, juga dipengaruhi topografi pantai pesisir setempat. Terdapat kecenderungan di wilayah bertebing karang (Kabupaten Gunungkidul) memiliki gelombang yang lebih tinggi dan besar dibandingkan daerah landai dan bermaterial pasir, seperti di pantai Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

Kecerahan perairan pesisir DIY hampir konstan sepanjang tahun dengan kondisi kecerahan yang rendah dan atau kekeruhan yang tinggi akibat proses abrasi pantai oleh ombak dan gelombang. Ombak dan gelombang yang sangat besar di pantai Selatan DIY, memiliki daya perusak pantai yang juga sangat besar, sekaligus menimbulkan efek pencucian yang tinggi terhadap material (pasir dan tanah) pembentuk garis pantai. Akibatnya terjadi kekeruhan sepanjang waktu, dimana material pasir dan tanah yang menimbulkan kekeruhan tersebut dapat mengganggu pola migrasi ikan.

Luas tutupan karang yang ada di pantai selatan DIY, tersebar dari Pantai Sadeng sampai dengan Congot pada lokasi 2 – 4 mil dari pantai pada kedalaman 15 – 25 m. Beberapa jenis karang yang sering dijumpai antara lain karang jahe (*Coral submassive* atau *Acropora submassive*), karang bundar (*Coral encrusting*), karang putih atau karang yang sudah mati (*bleaching*), karang otak (*brain coral* atau *Coral massive*), karang gondong (karang seperti daun atau *Coral foliose*), karang biru (*Acropora*). Sebaran karang di lepas pantai biasanya terjadi secara spot-spot dan lebih mengarah berbentuk gosong karang. Gosong karang adalah tempat berbagai makhluk hidup bersama-sama, terbentuk dari kerangka batu kapur,

karang laut yang sudah mati yang tercampur akibat aktivitas ganggang penyusun karang.

Luas tutupan karang di pantai selatan Kabupaten Gunungkidul diperkirakan seluas 5.100 Ha. Hal tersebut didasarkan bahwa tutupan karang terjadi mulai dari tepi pantai sampai 400 m dari pantai, dengan rata-rata lebar tutupan 200 m. Dari panjang pantai Kabupaten Gunungkidul 71 km tidak semua tertutupi karang dan diperkirakan hanya sebesar 50 % terjadi penutupan karang. Sedangkan untuk pantai di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo ditemukan spot-spot pertumbuhan karang yang lebih mengarah bentuk gosong karang dan terjadi di sepanjang pantai pada jarak 2 – 5 mil dari pantai pada perairan yang tidak terlalu dalam.

Pemantauan kualitas Air Laut pada tahun 2013 dilaksanakan dua kali yaitu pada bulan Maret dan Agustus 2013. Untuk pengambilan sampel dan Pengujian bekerjasama dengan Laboratorium Kimia Analitik Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan – BATAN, Babarsari. Lokasi pemantauan mencakup tujuh pantai untuk setiap periode, yaitu Pantai Depok dan Kuwaru di Kabupaten Bantul, Pantai Glagah dan Trisik di Kabupaten Kulonprogo serta Pantai Baron, Sundak, Sadeng dan Kukup di Kabupaten Gunungkidul.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara fisik, suhu air laut sejuk sampai panas, yaitu antara 26° C – 31°C. Untuk wisata bahari suhu 31°C termasuk kurang nyaman, apalagi jika kondisi pantai minim penghijauan.

Secara kimia, derajat keasaman (pH) air laut antara 8,16 – 8,43, nilai pH menunjukkan rata-rata masih di bawah ambang atas, namun perlu diwaspadai karena nilainya hampir mendekati maksimal. Nilai pH air laut normal menurut baku mutu berkisar antara 7 – 8,5 ($\pm 0,2$), sementara pH yang mempunyai tingkat keasaman tinggi atau basa tinggi menunjukkan bahwa air laut mengalami polusi. Selain itu, tingginya fosfat dan nitrat yang berasal dari limbah rumah makan yaitu air cucian yang mengandung detergen dan ketidakdisiplinan pelaku usaha dalam pengolahan limbah. Salinitas yang diukur menunjukkan bahwa air laut di DIY berada dalam batas normal, yaitu antara 1,4 – 3,19 promil. Peningkatan salinitas terjadi dari tahun 2011 sampai 2012. Sedangkan kadar salinitas pada tahun 2012 hampir sama dengan tahun 2013.

3. Kondisi Kualitas Air Tanah

Pemeriksaan kualitas air sumur pada tahun 2013 dilakukan di beberapa lokasi permukiman penduduk di Daerah Istimewa

Yogyakarta yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah sampel adalah 68 titik, dimana 34 sampel diambil bulan April dan sisanya diambil bulan Agustus. Parameter yang diuji ada 15 parameter sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/190 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, terdiri dari parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Parameter fisika yang diuji adalah bau dan kekeruhan. Parameter kimia yang diuji meliputi kandungan besi, fluorida, kesadahan, klorida, chrom heksavalent, mangan, nitrat, nitrit, pH, deterjen dan permanganat. Parameter biologi yang diuji adalah bakteri koli tinja dan bakteri total koli.

Parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli yang melebihi baku mutu ditemukan di sebagian besar sampel. Terdeteksinya bakteri total koli mengindikasikan bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia atau hewan. Sedangkan adanya bakteri koli tinja merupakan indikator yang lebih spesifik yaitu mengindikasikan adanya kontaminasi kotoran manusia. Sebagian besar sumur yang diteliti telah tercemar oleh bakteri koli sehingga tidak memenuhi persyaratan biologis untuk air bersih. Sampel yang memenuhi baku mutu untuk parameter bakteri total koli hanya 26,47% dan sampel yang memenuhi baku mutu untuk parameter bakteri koli tinja hanya 7,35%. (Sumber SLHD,2013).

B. Kondisi Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara dilakukan untuk mengetahui kualitas udara ambien di 30 lokasi yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri. Pemantauan kualitas udara dilaksanakan 2 periode di tiap-tiap lokasi, dengan parameter-parameter yang dipantau adalah parameter fisika dan kimia.

Penyumbang polutan udara terbesar di Provinsi DIY sekitar 80 persen berasal dari sumber bergerak (sektor transportasi). Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasif di ruas-ruas jalan protokol yang notabene mempunyai kadar polutan udara lebih tinggi dari pada di wilayah permukiman, kompleks pertokoan dan pedesaan, secara umum untuk parameter kunci pencemaran udara ambient seperti karbonmonoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Timah Hitam(Pb), Oksida Nitrogen (NO_x) dan Sulfur dioksida (SO₂) menunjukkan konsentrasi zat pencemar udara tersebut masih di bawah baku mutu yang ditetapkan (kualitas udara ambien baik). Namun demikian sektor transportasi perlu tetap diwaspadai karena merupakan ancaman potensial pencemaran kualitas udara di DIY. Hasil pemantauan kualitas udara ambien dapat dilihat pada tabel berikut ini.

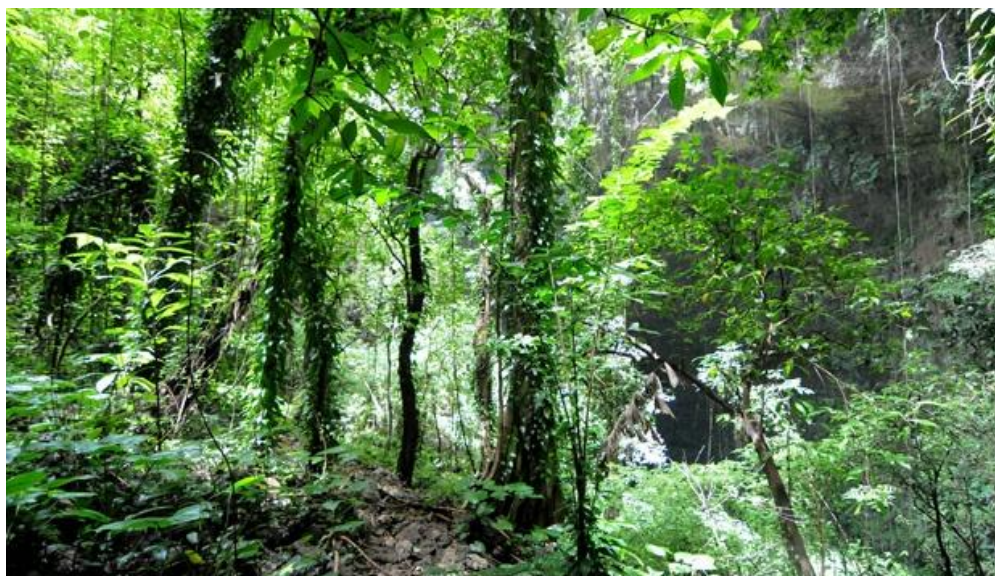
Tabel 2.70 Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-ruas Jalan Protokol di DIY Tahun 2013

No	Parameter Pencemar Udara	Baku Mutu	Satuan	Eksisting Konsentrasi	Keterangan
1	Karbon Monoksida (CO)	30000	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	432,3 – 999,99	Baik
2	Timah Hitam(Pb)	2	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,054 – 0,62	Baik
3	Oksida Nitrogen (NO_x)	400	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	27,97 - 24,89	Baik
4	Sulfur Dioksida (SO_2)	900	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	33,8 - 32,7	Baik
5	Hidro karbon (HC)	160	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	64,2 – 71,7	Baik
6.	Ozon (O_3)	235	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	7,9 – 9,86	Baik

(Sumber : SLHD 2013)

C. Kondisi Hutan dan Lahan

Luas hutan di DIY 22.138 Ha atau 6,95% dari luas DIY. Hutan tersebut tersebar di 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Pengelolaan hutan di DIY dibagi menjadi 5 (lima) Bagian Daerah Hutan (BDH) untuk mempermudah pengelolaannya, yaitu : BDH Karangmojo, BDH Playen, BDH Panggang, BDH Paliyan, dan BDH Kulonprogo-Bantul.



Gambar 2.38 Hutan Wonosadi DIY

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha, luas Hutan Produksi di DIY seluas 13.411,70 Ha, luas Hutan Lindung di DIY seluas 2.312.800 Ha, sedangkan Taman Nasional seluas 1.743.250 Ha dan Taman Hutan Raya seluas 617.000 Ha. Luas Cagar Alam di DIY berdasarkan Keputusan menteri pertanian No. : 526/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982 tentang penunjukan areal batu gamping Eosin seluas 1,117 Ha yang terletak di desa gamping, Sleman sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Cagar alam (seluas 0,015 Ha) dan sebagai Taman Wisata alam (seluas 1,102 Ha). Sedangkan Cagar Alam Imogiri seluas 11,400 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha. Luas Suaka Margasatwa 615,600 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha. Luas Taman Nasional di DIY seluas 1.743,250 Ha berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan No. ; 234/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas \pm 6.410 Ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Sleman DIY menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Perhitungan luas kelompok hutan cikal bakal TNGM yang berada di wilayah DIY adalah CA dan TWA Turgo (seluas 282,25 Ha) dan hutan lindung (seluas 1.461 Ha).

Luas lahan DIY 318.580 Ha, penggunaan lahan di DIY didominasi oleh non pertanian yang mencapai 77,66% dari total luas DIY. Lahan yang digunakan sebagai sawah sebesar 5,32%, perkebunan 3,17%, lahan kering sebesar 1,73% dan penggunaan lainnya sebesar 11,49%.

Setiap tahun lahan sawah mengalami penyempitan rata-rata 0,3% per tahun. Pertambahan penduduk merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan, yang menuntut tersedianya sarana perumahan dan infrastruktur lainnya. Akan lebih memprihatinkan lagi jika penyempitan lahan diikuti dengan penurunan tingkat kesuburan karena penggunaan pupuk kimia yang intensif, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, juga kerugian sosial. Penurunan kesuburan tanah diketahui dari hasil monitoring kerusakan lahan untuk produksi biomasa, yaitu pada sifat berkurangnya permeabilitas tanah, tingginya angka derajat pelulusan air dan tingginya redoks pada beberapa sampel tanah.

D. Kondisi Partisipasi Masyarakat

Peranserta masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dalam

upaya peningkatan kualitas lingkungan di DIY, pada tahun 2013 masyarakat telah menunjukan peransertanya dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Penghijauan

Sasaran penghijauan ini adalah pekarangan untuk mendukung program kampung Hijau. Penanaman dilakukan oleh kelompok masyarakat berupa tanaman buah yang nantinya dapat dipanen oleh masyarakat. Pemeliharaan dan pengelolaan tanaman ini nantinya akan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri

2. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) dan Lubang Resapan Biopori

Sumur peresapan air hujan merupakan sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan kembali ke tanah. Sesuai dengan fungsinya untuk memperluas ruang peresapan air, maka pembangunan SPAH ini diarahkan pada lahan-lahan sempit di perkotan. Untuk pembangunan SPAH ini dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, karena dalam pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan gotong-royong warga. Di samping itu, masyarakat dapat memperbanyak sendiri bangunan SPAH nyakarena bantuan dari Pemerintah hanya bersifat stimulan saja. Selain SPAH, ada pembuatan lubang resapan biopori yang lebih sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak dan ibu-ibu dengan menggunakan alat serupa bor biopori. Teknologi sederhana ini mudah diterapkan, namun manfaatnya sangat besar dalam upaya pelestarian sumberdaya air.

3. Seleksi Kalpataru

Kegiatan Seleksi Kalpataru dilaksanakan setiap tahun dengan peserta dari Kabupaten/Kota se DIY. Adapun kategori penilaian terdiri dari :

1. Perintis Lingkungan
2. Penyelamat Lingkungan
3. Pembina Lingkungan
4. Pengabdian Lingkungan

4. KEHATI Award

Pada tahun 2013 BLH DIY mengadakan Seleksi KEHATI Award yang dilaksanakan pada bulan Juni 2013. “Kehati Award” merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Yayasan KEHATI kepada perseorangan (individu) maupun kelompok/organisasi yang telah melakukan upaya dan karya luar biasa untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Kategori pilihan dalam seleksi KEHATI Award adalah sebagai berikut:

1. Prakarsa Lestari Kehati
2. Pendorong Lestari Kehati
3. Peduli Lestari Kehati
4. Cipta Lestari Kehati
5. Citra Lestari Kehati

E. Kondisi Penuaan/Penegakan Hukum Lingkungan

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan frekuensinya meningkat seiring dengan semakin beragamnya aktivitas masyarakat termasuk di dalamnya kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal, karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Di sisi lain masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengesampingkan masa mendatang kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai fasilitator dan mediator menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan LH. Untuk itu Pemerintah DIY dalam hal ini Gubernur DIY bersama Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

2.2.1.9 Urusan Pertanahan

Pemda DIY, sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundang Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kelurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggadhu (atau anggadhu) melalui serat kekancingan.

Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun masyarakat yang menempati tanahnya.

Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan pertanahan adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Indikator kinerja pada urusan pertanahan adalah bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum.

Pada tahun 2014 untuk indikator bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum dari target sebesar 9.229 bidang tanah, realisasinya sebesar 9.168 bidang tanah atau persentase realisasi sebesar 99,34%. Kendala umum yang dihadapi dalam proses pendataan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ada di DIY karena terhadap kedua jenis tanah tersebut belum diketahui secara pasti luasannya, pemanfaatannya maupun penggunaannya.

Isu strategis yang dipetakan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan pada 2016 meliputi :

1. Lemahnya validitas data tanah baik terhadap obyek tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa, sehingga perlu penyempurnaan dan update berkala database pertanahan.
2. Secara fisik, kondisi tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum tergambar secara menyeluruh dan detail, baik keluasan maupun penggunaan lahannya, sehingga batas fisik tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum dapat teridentifikasi secara jelas di lapangan. Secara spasial, utamanya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten bersinggungan secara ketat dengan tanah-tanah yang bersifat privat, sehingga memerlukan kegiatan inventarisasi secara komprehensif.
3. Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, sehingga perlu adanya kepastian data administrasi dalam rangka mengatur tentang kepastian hukum tanah kas desa di DIY.
4. Masih banyaknya permasalahan dan konflik di bidang pertanahan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah Daerah DIY untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan dan senantiasa memberikan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan dan konflik pertanahan.
5. Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih mendalam dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

2.2.1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 berimplikasi pada kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama dalam hal pendanaan. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang yang baru tersebut, pendanaan untuk administrasi kependudukan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBN dimulai dari APBN-P 2014. Namun demikian sebelum APBN-P tersedia, pendanaannya tetap menggunakan APBD.

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut dalam proses selanjutnya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan kependudukan dan catatan sipil adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil. Indikator kinerja pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan).

Di tahun 2014, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.769.535 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.372.036 orang dan perempuan sebanyak 1.397.499 orang. Sementara itu jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 2.571.891.

Pada tahun 2014 untuk indikator persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan) dari target sebesar 95%, realisasinya sebesar 94,91% atau persentase realisasi terhadap target sebesar 99,91%. Sebagian besar Wajib KTP yang belum perekaman tersebut diduga telah pindah dari DIY, merekam di tempat lain atau meninggal tetapi belum di-update.

Sementara itu untuk dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2014 hingga akhir semester I, jumlah penduduk DIY yang memiliki akta kelahiran sebesar 15,83% dari total penduduk DIY. Penyebab dari masalah ini antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

2.2.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

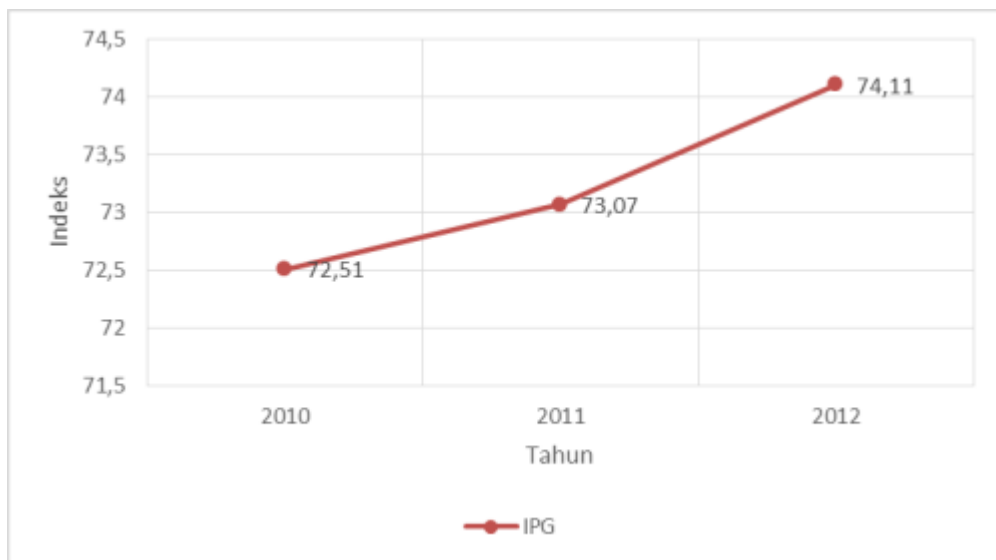
Pemberdayaan perempuan merupakan agenda pembangunan yang penting. Pemberdayaan perempuan bertujuan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya. (UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak).

Beberapa indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain : Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

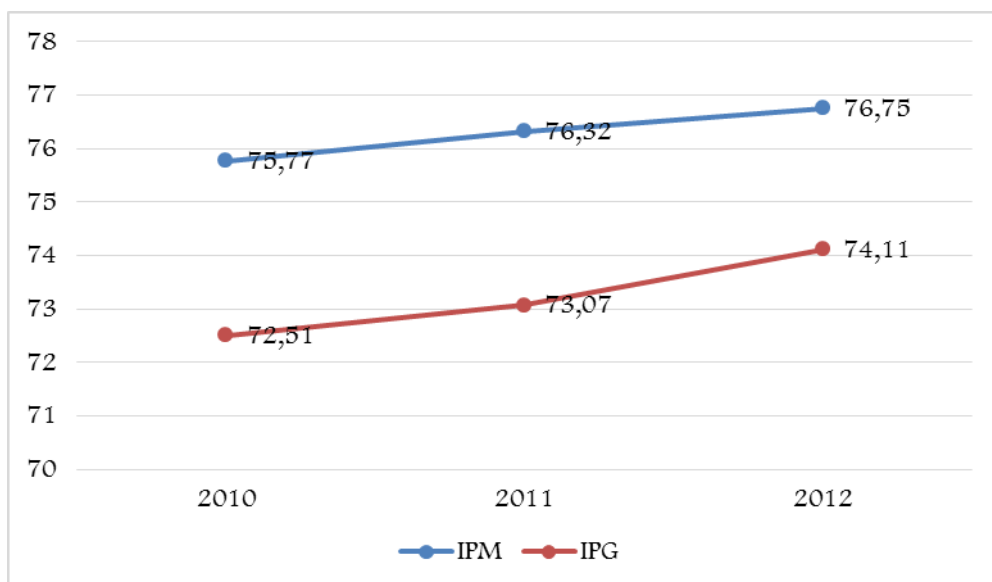
Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.



Sumber : BPS & Kementerian PP dan PA diolah

Gambar 2.39 Grafik IPG Tahun 2010-2012

selama kurun waktu tersebut IPG di DIY mengalami kenaikan. Peningkatan angka IPG, memiliki arti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu 2010-2012 terus mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.



Sumber : BPS, Kementerian PP&PA diolah

Gambar 2.40 Grafik Perbandingan IPM dan IPG Tahun 2010-2012

Lebih jauh apabila membandingkan angka IPM dan IPG di DIY periode 2010-2012. Data IPM yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan menunjukkan capaian 75,77 pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2011, capaian IPM DIY 76,32 dan terakhir di tahun 2012 angka IPM DIY kembali meningkat menjadi 76,75. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia di DIY selama tiga tahun terakhir telah mengalami peningkatan secara konsisten. Penduduk DIY secara umum (baik laki-laki maupun perempuan) mengalami peningkatan kapabilitas dalam memenuhi hak-hak dasarnya yaitu kesehatan, pendidikan, maupun daya beli.

Namun demikian, peningkatan IPG di DIY dalam kurun waktu 2010-2012 belum sepenuhnya memperlihatkan hasil yang menggembirakan apabila dilihat dari kerangka pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut belum mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata.

Tabel 2.71 Kesenjangan IPG Terhadap IPM di DIY Tahun 2010-2012

Kabupaten/Kota	2010			2011			2012		
	IPG	IPM	RASIO	IPG	IPM	RASIO	IPG	IPM	RASIO
DIY	72.51	75.77	95.70	73.07	76.32	95.74	74.11	76.75	96.56
Yogyakarta	77.56	79.52	97.54	77.92	79.89	97.53	78.71	80.24	98.09
Bantul	71.33	74.53	95.71	71.71	75.05	95.55	72.69	75.58	96.18
Kulon Progo	67.04	74.49	90.00	67.85	75.04	90.42	68.41	75.33	90.81
Gunungkidul	65.42	70.45	92.86	66.04	70.84	93.22	66.62	71.11	93.69
Sleman	74.17	78.2	94.85	74.75	78.79	94.87	75.76	79.31	95.52

Sumber: BPS, Kementerian PP & PA diolah

Gap antara IPM dengan IPG selama kurun waktu tersebut masih terlihat meningkat. Selama kurun waktu 2010-2012, IPG selalu menunjukkan posisi lebih rendah dari angka IPM, meskipun nilai IPG selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya mampu diwujudkan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang serius dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk perempuan sehingga memperkecil gap yang terjadi antara kapabilitas dasar laki-laki dan perempuan. Namun demikian, disadari bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga upaya yang dilakukan harus terencana secara terus menerus dan berkelanjutan.

Tabel 2.72 Capaian IPG Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2012

Provinsi/ Kabupaten	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan		IPG		
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Persen)				
	L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011	2012
D I YOGYAKARTA	71,37	75,16	96,28	87,09	9,78	8,67	60,82	39,18	72,51	73,07	74,11
Kulon Progo	72,53	76,24	96,98	86,50	9,15	8,07	68,03	31,97	67,04	67,85	68,41
Bantul	69,42	73,32	96,39	86,25	9,35	8,36	62,06	37,94	71,33	71,71	72,69
Gunung Kidul	69,07	72,99	92,22	78,63	7,84	6,32	61,60	38,40	65,42	66,04	66,62
Sleman	73,21	76,86	97,90	89,76	11,18	9,97	62,21	37,79	74,17	74,75	75,76
Kota Yogyakarta	71,59	75,37	99,78	96,85	11,96	11,30	57,92	42,08	77,56	77,92	78,71

Sumber : BPS, Kementerian PP & PA

2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Hal ini menandakan peran serta perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan lebih baik dibandingkan provinsi lain. Berikut ini capaian IDG DIY 2010 sampai 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.73 Capaian IPG DIY, Tahun 2011-2012

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	2010	2011	2012
D I YOGYAKARTA	77,70	77,84	75,57
Kulon Progo	61,18	61,15	59,23
Bantul	67,85	68,46	68,52
Gunung Kidul	59,36	62,22	64,58
Sleman	70,74	70,52	69,66
Kota Yogyakarta	69,85	70,00	70,70

Sumber : Kementerian PP & PA, diolah

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), seperti halnya dengan IPG, dihitung dengan disparitas, atau perbedaan ketimpangan dengan laki-laki. Untuk DIY, besarnya masing-masing elemen dasar untuk menghitung kesetaraan pemberdayaan gender dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

a. Partisipasi Perempuan di Legislatif

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik diatur dalam Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta Undang-Undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Tabel 2.74 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan Tahun 2014

No	DPRD	2012				2014			
		L	P	L+P	%P	L	P	L+P	%P
1	Kota Yogyakarta	30	6	36	16,67	30	10	40	25
2	Kabupaten Bantul	39	6	45	13,33	42	3	45	6,6
3	Kabupaten Kulon Progo	36	4	40	10,00	34	6	40	15
4	Kabupaten Sleman	30	6	36	16,67	37	13	50	26
5	Kabupaten Gunungkidul	39	6	45	13,33		8	45	17,8
6	DPRD DIY	46	13	59	22,03	49	6	55	10,9
	Jumlah	220	41	261	15,71	192	46	275	16,7

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Upaya mewujudkan Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan kuota minimal 30% baik DPRD DIY maupun DPRD kabupaten/kota masih belum mencapai. Pada Pemilu 2014 keterwakilan perempuan di legislatif tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 25%. Secara rata-rata di lingkup DIY keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada angka 16,7%. Beberapa faktor yang menjadikan masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif selain tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang rendah, masih ada keengganan perempuan untuk tampil dalam bidang politik dikarenakan adanya anggapan bahwa ranah politik adalah ranah laki-laki, dan tingkat kepercayaan diri yang masih rendah perempuan untuk berpolitik.

Hal ini berarti masih diperlukan kebijakan dan strategi dalam penyadaran dan pembelajaran politik bagi perempuan di DIY dengan harapan akan mendorong peningkatan kepesertaan perempuan di DIY dalam politik baik secara kualitas dan kuantitas.

b. Partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah

Representasi perempuan dalam lembaga pengambil keputusan dapat juga dilihat dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Dari 1.669.172 pekerja perempuan di DIY tahun 2012, 30.211 bekerja di lembaga pemerintahan. Rasio pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan pekerja perempuan di DIY masih rendah sebesar 1,8. Hal ini bukan berarti perempuan mendapatkan akses yang lebih kecil dibandingkan laki-laki lembaga pemerintahan. Semua penduduk memiliki akses yang sama untuk bekerja di lembaga pemerintah sesuai formasi dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Formasi yang dibutuhkan memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel 2.75 Rasio Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	24	28
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	234	245
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	1.213	1269
4	Pekerja perempuan di pemerintah	39.735	30.211
5	Jumlah pekerja perempuan	1.593.084	1.669.172
6	Rasio pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2,49	1,81

Sumber : Sakernas dan BPPM, diolah

Berdasarkan struktur jabatan pemerintahan, rasio perempuan yang menempati jabatan struktural masih rendah. Semakin tinggi jabatan struktural yang ada, semakin rendah perempuan yang menempati jabatan tersebut.

Tabel 2.76 Rasio Perempuan Pada Jabatan Struktural Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota/DIY, Tahun 2012

No	Kab/Kota	Eselon I		Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
		L	P	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio
1	Kota Yogyakarta			20	5	25,00	89	45	50,56	369	319	86,45
2	Kab Bantul			30	3	10,00	124	40	32,26	304	221	72,70
3	Kab. Kulon Progo			20	6	30,00	105	30	28,57	281	145	51,60
4	Kab. Gunungkidul			17	2	11,76	144	21	14,58	362	135	37,29
5	Kab. Sleman			22	6	27,27	98	51	52,04	343	229	66,76
6	Provinsi	1	-	30	6	20,00	140	58	41,43	323	220	68,11
	Jumlah	1	-	139	28	20,14	700	245	35,00	1.982	1.269	64,03

Sumber : BPPM DIY, diolah

c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.77 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			
	Agust-09	Agust-10	Agust-11	Agust-12
Angkatan Kerja Perempuan	864.071	848.745	830.449	867.492
Perempuan Usia Kerja	1.435.659	1.383.524	1.393.149	1.404.126
Persentase	60,19	61,35	59,61	61,78

Sumber : Pusdatinaker Kemenakertrans, diolah

3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dalam pandangan umum, adalah makhluk yang rentan mengalami bentuk-bentuk tindak kekerasan, baik tindak kekerasan fisik, ekonomi, seksual, eksploitasi, psikis maupun ragam tindak kekerasan lainnya. Tindak kekerasan itu tentu mempunyai efek negatif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban.

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan menunjukkan upaya pemerintah menangani pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap kasus yang diadukan ke unit-unit pelayanan tindak kekerasan. Tabel berikut menunjukkan persentase jumlah pengaduan yang ditangani di unit-unit pelayanan pengaduan di DIY tahun 2010–2011 :

Tabel 2.78 Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, Tahun 2010-2012

Uraian	2010			2011			2012		
	Perempuan	Anak	Total	Perempuan	Anak	Total	Perempuan	Anak	Total
Jumlah unit pelayanan pengaduan	25	25	25	27	27	27	27	27	27
Jumlah Pengaduan yang tertangani	873	329	1305	596	310	999	795	301	1.096
Jumlah Pengaduan	929	360	1305	647	343	999	795	301	1.096
Persentase (%)	94	91	100	92	90	100	100	100	100

Sumber : FPKK DIY

Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari 647 menjadi 795 atau 18,61%, Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh

adanya UU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari 310 menjadi 301 atau 2,99%. Namun demikian perlu diambil penanganan lebih lanjut karena amanah dari UU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

d. Pernikahan di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun fenomena yang terjadi beberapa tahun ini adalah banyaknya permohonan nikah dari masyarakat dengan usia perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Oleh sebab itu, Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) harus mengeluarkan surat dispensasi nikah.

Bila dilihat lebih jauh pada faktor penyebabnya, diketahui bahwa adanya budaya menikah muda, *married by accident*, atau karena faktor ekonomi. Bila fenomena ini tetap terjadi tanpa ada campur tangan kebijakan pemerintah, dapat dibayangkan akibat yang akan terjadi. Mulai dari ledakan penduduk, penurunan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kriminalitas sampai timbulnya masalah ketahanan pangan.

Tabel 2.79 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY Sampai dengan Tahun 2012

No	Wilayah	2009		2010		2011		2012	
		<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun
		P	L	P	L	P	L	P	L
1	Kota Yogyakarta	15	18	24	27	14	32	56	52
2	Kabupaten Bantul	31	56	93	52	42	105	27	86
3	Kab. Kulon Progo	21	33	19	44	30	26	20	27
4	Kab. Gunungkidul	19	19	42	36	59	68	51	63
5	Kab. Sleman	189	17	22	28	25	46	30	79
	DIY	275	143	200	187	170	277	184	307

Sumber : Data pilah gender dan anak

2.2.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana menjadi kebijakan nasional berjalan sejak tahun 1974 sampai dengan saat ini. Tujuannya untuk dapat dikendalikannya pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga yang berkualitas.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah

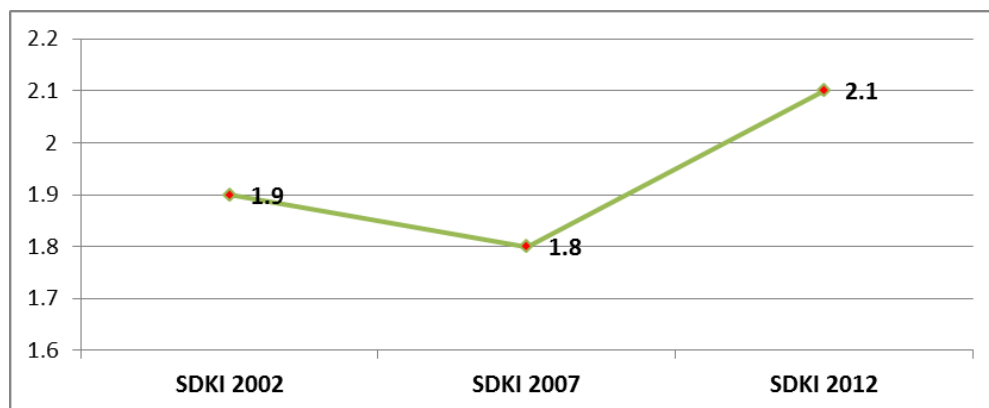
peningkatan jumlah Total Fertility Rate (TFR), masih tingginya *unmet need*, masalah kesehatan reproduksi, dan SDM serta sarana Pelayanan. Di samping itu juga kepesertaan KB Pria dan masih minimnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

a. *Total Fertility Rate (TFR)*

TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun.

Perkembangan TFR DIY berdasarkan SDKI 2012 sebesar 2,1 naik dari SDKI 2007 yang sebesar 1,8. Peningkatan TFR menjadi 2,1 ini perlu mendapatkan perhatian karena peningkatan jumlah anak dalam sebuah keluarga akan menyebabkan permasalahan kependudukan di masa datang terkait kualitas penduduk, permasalahan lahan, permasalahan pangan dan sebagainya. Walaupun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total *fertility rate* (TFR) terendah di Indonesia, tetapi melihat tren yang ada terjadi lonjakan dari 1,8 (SDKI 2007) menjadi 2,1 (SDKI 2012).

Beberapa faktor yang mempengaruhi TFR antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Salah satu sebabnya adalah, masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa mempunyai dua anak terlalu sedikit. Berikut adalah perkembangan TFR DIY :



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2.41 Perkembangan TFR DIY

b. Rasio Akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB DIY pada 2014 sebesar 80,05 meningkat dari tahun 2013 sebesar 79,87.

Tabel 2.80 Rasio Akseptor KB

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Peserta KB	432.024	430.231	432.989	438.788	441.981	441.858
Jumlah Pasangan Usia Subur	549.313	544.057	549.894	552.422	553.395	552.008
Rasio	78,65	79,08	78,74	79,43	79,87	80,05

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY, diolah

c. *Unmet Need*

Indikator *unmet need* persentase wanita usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB. Beberapa alasan yang menyebabkan wanita usia subur tidak ingin mempunyai anak lagi tetapi tidak melakukan KB antara lain : motivasi yang lemah dalam mengatur fertilitas, adanya kekhawatiran perempuan usia subur terhadap kegagalan kontrasepsi, dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

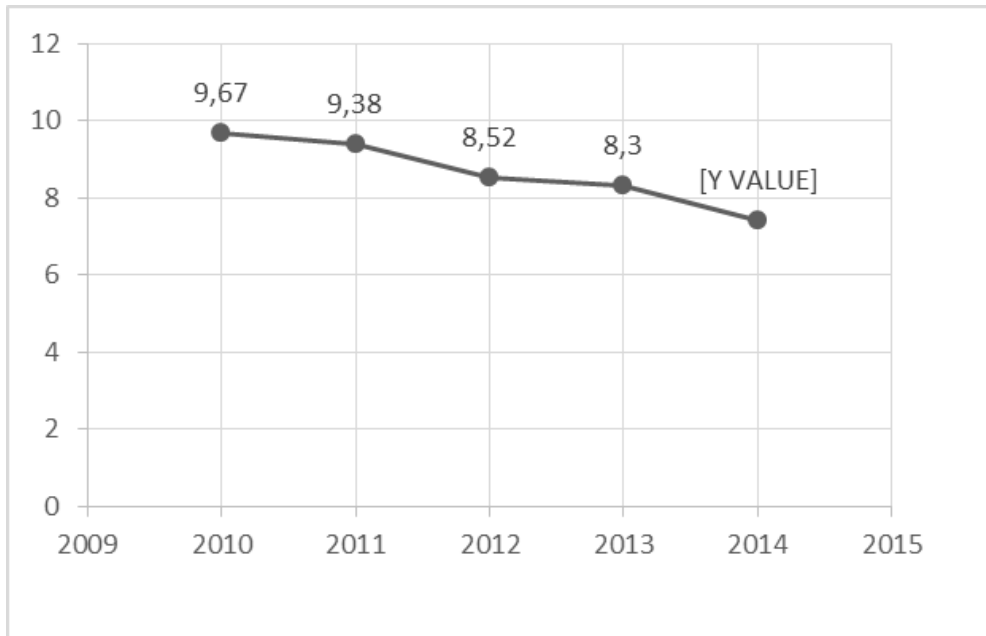
Perkembangan *Unmet Need* DIY dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 9,67% menjadi 7,39% di tahun 2014.

Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan akses terhadap pelayanan kontrasepsi semakin mudah.

Namun penurunan ini belumlah signifikan. Apabila dibandingkan dengan target MDG's Tahun 2015 dimana target capaian *Unmet Need* sebesar 5% maka dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya. Berikut ini Grafik Perkembangan *Unmet Need* DIY tahun 2010-2014.

Masih tinggi *Unmet Need* diantaranya dipengaruhi oleh kesalahan pemahaman bahwa seorang perempuan sudah merasa tidak subur

sehingga tidak menggunakan alat kontrasepsi, selain itu ada kekhawatiran ada efek samping bagi kesehatan dari pemakaian kontrasepsi.



Sumber : BKKBN Perwakilan DIY

Gambar 2.42 Perkembangan Unmet Need DIY, Tahun 2010-2014

d. Sarana Pelayanan Keluarga Berencana

untuk memperluas jangkauan pelayanan KB sekaligus memenuhi kepuasan akseptor dan calon akseptor KB maka perlu didukung peningkatan mutu pelayanan KB dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan KB. Upaya perluasan jangkauan pelayanan KB dan mendekatkan tempat pelayanan KB kepada akseptor KB terutama pelayanan medis yang dilakukan di Rumah Sakit. Sedangkan pelayanan KB yang tidak memerlukan pelayanan medis (non medis) dilaksanakan melalui PPKBD, Sub-PPKBD. Kelompok-kelompok akseptor KB tersebut didayagunakan sebagai wadah penyalur alat-alat KB.

Tabel 2.81 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010-2013

TAHUN	KLINIK KB				
	PKBRS	PEME RINTAH	SWASTA	PPKBD	Sub PPKBD
2010	45	162	88	5.277	27.378
2011	47	162	96	5.258	5.299
2012	54	165	124	438	5.296
2013	47	165	149	438	5.302

Sumber : BPS 2014

Keterangan :

- PKBRS : Program KB Rumah Sakit*
- PPKBD : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa*
- Sub PPKBD : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun)*

Dari data di atas secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya pelayanan PKBRS yang mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013.

e. Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Keberhasilan pelayanan KB juga didukung oleh petugas pelayanan KB. Berikut ini disajikan data petugas KB di DIY.

Tabel 2.82 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010-2013

Tahun	Petugas			Jumlah
	Dokter	Bidan	PKB	
2010	545	1.197	275	2.017
2011	151	651	261	1.063
2012	152	680	257	1.089
2013	142	680	246	1.068

Sumber : BPS 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan bidan mengalami penurunan tajam dari tahun 2010 sebesar 1.197 menjadi 651 pada tahun 2011, meskipun kemudian sedikit meningkat pada 2012 dan stagnan pada tahun 2012.

f. Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Keluarga di kategorisasikan kedalam 5 tahapan keluarga, yaitu keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Tabel 2.83 Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010-2014

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK
1.	Pra S	187.277	225.823	225.823	222.299	267.571
2.	KS I	208.367	200.008	200.008	197.046	176.002
3.	KS II	198.237	146.038	146.038	150.670	158.482
4.	KS III	281.909	302.792	54.575	325.318	324.657
5.	KS III Plus	53.665	54.575	54.575	55.541	53.708
	Jumlah KK	929.455	929.455	929.236	950.875	980.420

Sumber : BKKBN DIY, diolah

Tabel Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010–2014 di atas menunjukkan bahwa jumlah KK Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III.

g. Lembaga Bina Keluarga

Lembaga Bina Keluarga merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Bina Keluarga terdiri dari beberapa kategori yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program Bina Keluarga merupakan suatu wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan, keterampilan dan kesadaran keluarga (Bapak/Ibu dan anggota keluarga lain) untuk membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua perlu ditingkatkan. Keluarga adalah garis utama pertahanan masyarakat terhadap pertumbuhan masalah penduduk lansia. BKB, BKL di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan, namun BKR pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013.

Tabel 2.84 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-104

Kabupaten /Kota	BKB				BKR				BKL			
Tahun	2013		2014		2013		2014		2013		2014	
	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)
Kota Yogyakarta	240	48	244	38	75	46	73	16	98	29	101	60
Bantul	310	65	310	55	81	27	82	23	103	26	103	29
Kulonprogo	391	35	403	73	126	26	128	22	95	25	101	29
Gunung Kidul	470	62	472	86	84	22	85	22	128	57	126	27
Sleman	219	69	230	69	255	61	155	44	210	52	210	62
Jumlah	1.630	279	1.659	321	621	182	523	127	634	159	641	207

Sumber Data : BPPM DIY diolah

*) P= Percontohan.

2.2.1.13 Urusan Sosial

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial tetapi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendorong peran dan partisipasi elemen masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang arena satu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Tabel 2.85 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012-2014

No	Jenis PMKS	Tahun			Kondisi tahun 2014 dibanding tahun 2013
		2012	2013	2014	
1	Anak Balita Terlantar	2.569	2.443	2.273	Menurun
2	Anak Terlantar	26.165	26.149	23.396	Menurun
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	302	119	321	Menurun
4	Anak Jalanan	497	212	220	Menurun
5	Anak dengan Kedisabilitasan	3.910	3.858	4.116	Meningkat
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	919	796	653	Menurun
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	275	73	68	Menurun
8	Lanjut Usia Terlantar	37.199	36.698	38.448	Meningkat
9	Penyandang Disabilitas	29.543	28.158	26.947	Menurun
10	Tuna Susila	166	158	144	Menurun
11	Gelandangan	161	121	112	Menurun
12	Pengemis	199	216	199	Menurun
13	Pemulung	116	126	171	Meningkat
14	Kelompok Minoritas	733	216	1.541	Meningkat (karena ada penambahan data sasaran)
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	3.658	4.168	4.495	Meningkat
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	1.408	1.797	2.045	Meningkat
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.627	1.470	1.323	Menurun
18	Korban Trafficking	9	5	2	Menurun
19	Korban Tindak Kekerasan	4.325	4.070	3.514	Menurun
20	Pekerja Migran Bermasalah	760	292	598	Meningkat
21	Korban Bencana Alam	3.749	1.655	1.658	Meningkat
22	Korban Bencana Sosial	16	158	157	Menurun
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.337	12.057	13.166	Meningkat
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.356	3.395	3.318	Menurun
25	Keluarga Fakir Miskin	361.081 (PPLS 2011)	361.081 (PPLS 2011)	361.081 (PPLS 2011)	Tetap (karena belum ada updating data PPLS)

Sumber : Dinas Sosial DIY 2015

Dari data tersebut terdapat 13 jenis PMKS mengalami penurunan serta 10 jenis PMKS mengalami kenaikan jumlah populasinya.

Fokus pada penanganan lanjut usia terlantar perlu dilakukan mengingat jumlahnya cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan pelayanan lanjut usia baik di dalam panti maupun di luar panti diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut.

Pelayanan bagi anak dengan disabilitas selayaknya juga menjadi agenda penting. Pemberian jaminan hidup, akses pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu menjadikan anak dengan disabilitas tersebut mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana anak lainnya.

Penanganan fakir miskin juga perlu ditingkatkan karena tingkat kemiskinan di DIY yang masih tinggi.

Penanganan ODHA juga merupakan agenda mendesak mengingat terus terjadi peningkatan kasus penderita HIV/AIDS yang terjadi sampai daerah pelosok.

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah segala hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. PSKS berperan dalam penanganan dan pencegahan berbagai permasalahan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu PSKS juga berperan membantu pelaksanaan program-program pemerintah.

Tabel 2.86 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, Tahun 2010-2014

No	Jenis PSKS	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pekerja Sosial Profesional/ Pekerja sosial fungsional	n/a	n/a	41	37	37
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	78	134	121	4.572	4.534
3	Taruna Siaga Bencana	n/a	n/a	873	505	505
4	LKS / Orsos	10	88	83	354	395
5	Karang Taruna	10	102	85	438	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	n/a	11	12	15	15
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	n/a	23	25	87	124
8	Penyuluh Sosial	n/a	n/a	7	7	5

No	Jenis PSKS	2010	2011	2012	2013	2014
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	n/a	n/a	78	78	78
10	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	43	135	100	45	26

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2014

Tabel di atas menunjukkan secara umum kuantitas PSKS mengalami peningkatan. Peningkatan PSKS disebabkan peran kelompok masyarakat semakin besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping itu juga dipengaruhi peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberdayaan PSKS semakin optimal.

2.2.1.14 Urusan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan karena berhubungan langsung dengan aspek kekuatan perekonomian masyarakat. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral.



Gambar 2.43 Ketenagakerjaan Pengembangan Industri Tempe di DIY

Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dengan demikian merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh *stakeholders*, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya, hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh), dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di DIY. Pemahaman mengenai kondisi umum ini menjadi basis untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan pengembangan sektor ketenagakerjaan di DIY yang relevan dengan kondisi sektor ketenagakerjaan di DIY.

a. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di D.I.Yogyakarta selama periode 2010–2014, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK DIY pada tahun 2010 adalah sebesar 2,7 juta orang dan pada akhir tahun pengamatan (Februari 2014) diperkirakan mencapai 2,83 juta orang.

Penduduk usia kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Data Sakernas pada tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 70 persen setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90 persennya merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30 persen dari penduduk usia kerja pada tahun 2010-2014. Hal ini mengindikasikan cukup banyak

penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas).

Tabel 2.87 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY Tahun 2010-2014

JENIS KEGIATAN	2010	2011	2012	2013	Februari 2014
Angkatan Kerja	1.882.296	1.872.912	1.944.858	1.949.189	2.032.916
- Bekerja	1.775.148	1.798.595	1.867.708	1.886.176	1.988.771
- Penganggur	107.148	74.317	77.150	63.013	44.145
Bukan Angkatan Kerja	815.838	850.717	800.214	863.899	796.867
- Sekolah	279.420	282.226	279.521	201.698	349.478
- RumahTangga	437.630	429.555	412.624	479.069	352.308
- Lainnya	98.788	138.936	108.069	183.132	95.081
PENDUDUK USIA KERJA	2.698.134	2.723.629	2.745.072	2.813.088	2.829.783

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010-2013, Februari 2014, diolah

Pengamatan terhadap sejumlah karakteristik data Penduduk Usia Kerja di DIY terkini dapat dilihat berdasarkan pada data hasil Survey Angkatan Kerja (Sakernas) Februari 2014.



Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2013-2014, Februari 2014, diolah

Gambar 2.44 Grafik Penduduk Usia Kerja di DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Tahun 2014

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun keatas di D.I. Yogyakarta pada Februari 2014 diperkirakan mencapai 2,83 juta orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 1,38 juta (48,88 persen) lebih rendah dari PUK perempuan yaitu 1,45 juta atau 51,12 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja. Berdasarkan wilayah domisilinya, sebagian besar PUK tinggal di daerah perkotaan. PUK di daerah perkotaan berjumlah sekitar 1,88 juta orang atau sekitar 66,64 persen, sedangkan sisanya sebesar 33,36 persen (944 ribu orang) tinggal di daerah perdesaan.

Tabel 2.88 Penduduk Usia Kerja Menurut Desa/Kota di DIY Tahun 2014

Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
PERKOTAAN	930.725	954.962	1.885.687
Angkatan Kerja	689.016	613.277	1.302.292
Bekerja	669.377	597.997	1.267.375
Pengangguran	19.638	15.279	34.918
Bukan Angkatan Kerja	241.709	341.685	583.395
Sekolah	155.338	124.718	280.056
Mengurus RT	41.324	196.722	238.046
Lainnya	45.047	20.245	65.292
PERDESAAN	452.608	491.488	944.096
Angkatan Kerja	385.803	344.828	730.631
Bekerja	376.706	344.828	721.534
Pengangguran	9.097	0	9.097
Bukan Angkatan Kerja	66.805	146.660	213.465
Sekolah	32.678	36.911	69.589
Mengurus RT	17.878	96.184	114.062
Lainnya	16.249	13.565	29.814
PUK KOTA+DESA	1.383.333	1.446.450	2.829.783

Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2013-2014, Februari 2014, diolah

Penduduk usia kerja menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89 Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013

Kabupaten / Kota	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Kulon Progo	299.790	304.459	305.534	305.967
Bantul	705.269	712.986	716.575	723.239
Gunungkidul	528.441	529.629	538.183	538.979
Sleman	853.635	862.547	867.730	880.502
Yogyakarta	310.999	314.008	317.050	325.322
DIY	2.698.134	2.723.629	2.745.072	2.774.009

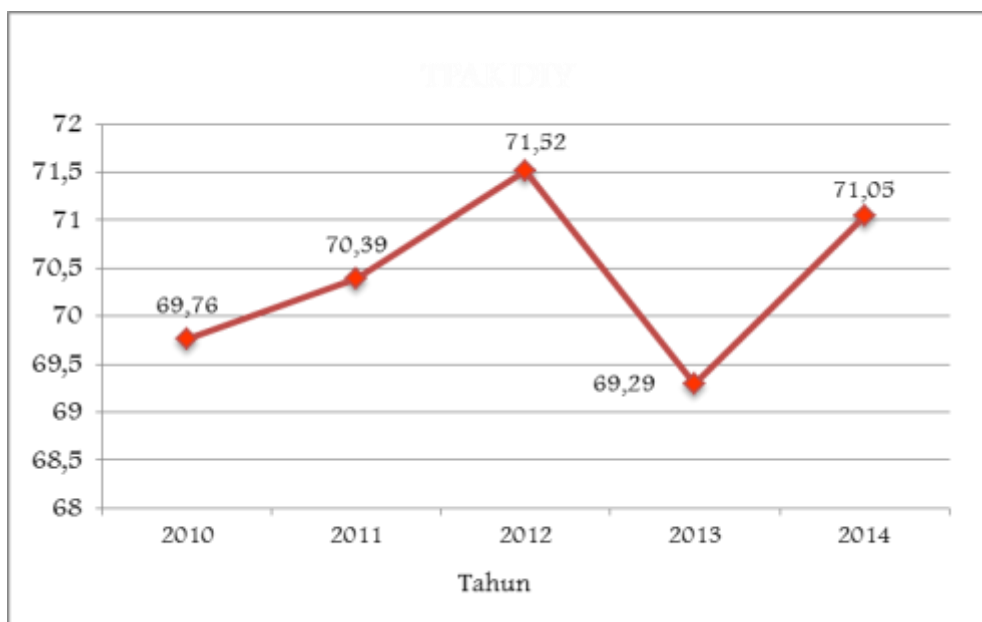
Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010-2013 (Agustus)

Jika dilihat dari aspek wilayah, penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tercatat paling banyak dibanding kabupaen/kota lainnya. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 853.635 orang (31,64%) dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2013 menjadi 880.502 orang (31,74%), atau selama 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 3,15 persen atau sebanyak 26.867 orang. Posisi kedua yaitu penduduk usia kerja di Kabupaten Bantul yang terus meningkat sejak tahun 2010 hingga 2013 dari sebanyak 705.269 orang (26,14%) menjadi 723.239 orang (26,07%). Penduduk usia kerja di Kabupaten Kulon Progo tercatat paling sedikit yaitu hanya sebesar 11,11 persen dari total PUK pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 11,03 persen pada tahun 2013.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

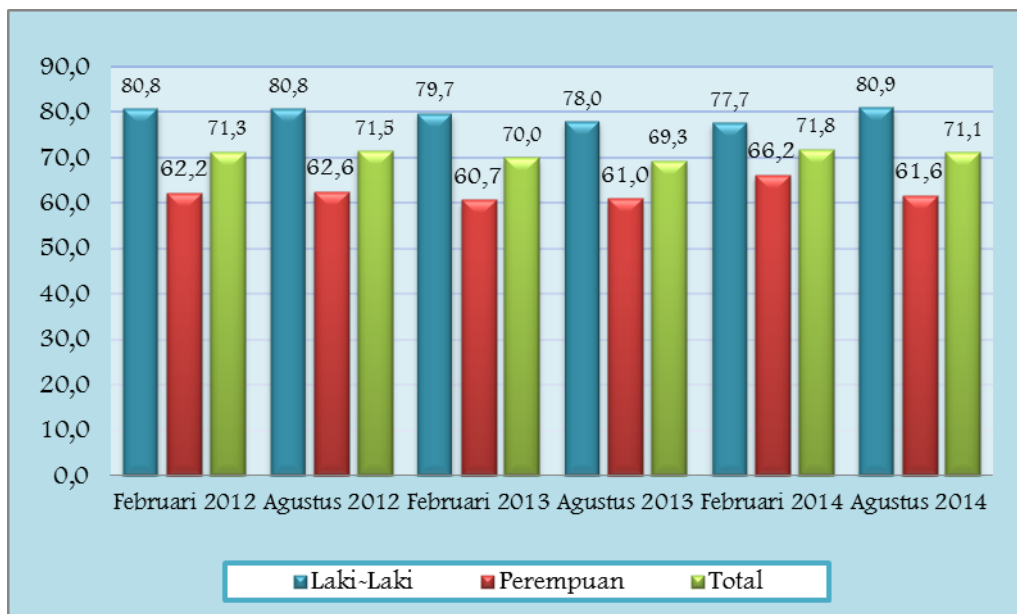
TPAK DIY pada periode 2010 hingga 2014 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada awal tahun pengamatan TPAK DIY adalah sebesar 69,76 persen, kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai angka 71,52 persen kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 69,29 persen dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 71,05 persen. Angka TPAK sebesar 71,05 persen mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja(15 tahun ke atas), 71 orang adalah angkatan kerja.



Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010-2014 (Agustus)

Gambar 2.45 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2014

Perkembangan TPAK juga menunjukkan pola yang menarik dimana pada bulan Agustus, terdapat kecenderungan TPAK lebih rendah bila dibandingkan kondisi bulan Februari. Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki pada Agustus 2014 mencapai sekitar 80,9 persen, sementara TPAK perempuan sebesar 61,6 persen. Pola ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.



Sumber: BRS November 2014, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.46 Perkembangan TPAK di DIY Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2014

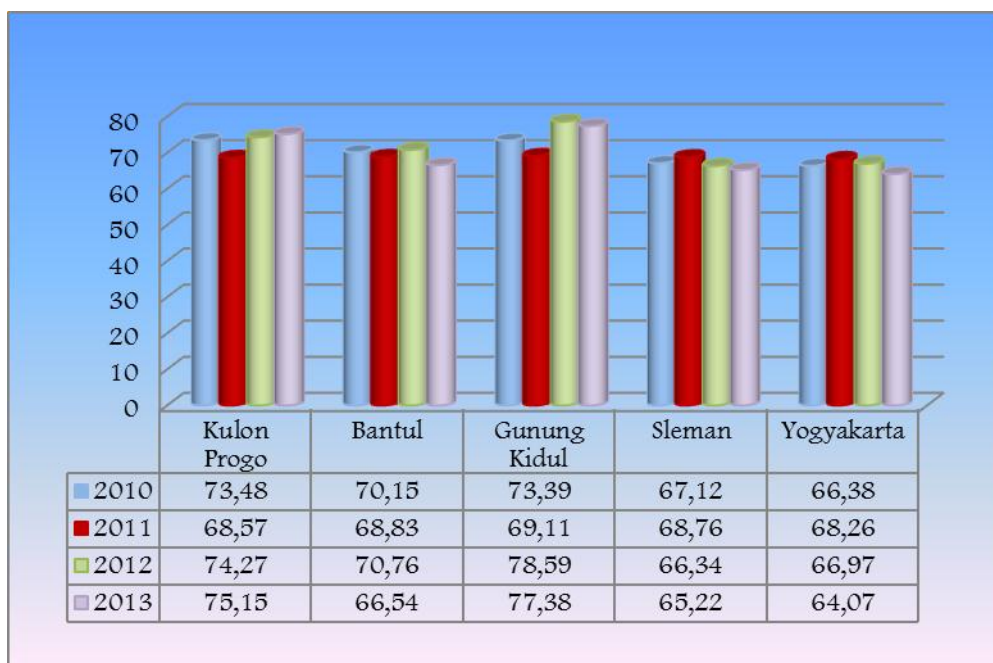
TPAK berdasarkan kelompok umur secara umum juga mengikuti pola umum struktur tenaga kerja, yaitu pada usia 15-19 tahun TPAK pada posisi terendah, kemudian meningkat pada usia lebih tua, dan mencapai puncak pada usia antara 40-49 tahun, dan menurun kembali setelah melewati usia 50 tahun. TPAK yang rendah pada kelompok usia 15-19 tahun mencerminkan tingginya penduduk pada kelompok ini yang melakukan kegiatan utama bersekolah, sehingga mereka tidak tergolong dalam kelompok angkatan kerja. Sedangkan pada usia produktif 30-49 tahun TPKA berada pada posisi tinggi karena kegiatan utama pada usia ini adalah bekerja. TPKA kelompok umur 50-59 tahun masih relatif tinggi karena pada umumnya masih produktif untuk bekerja.

Tabel 2.90 **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) Menurut Kelompok Umur di DIY, Tahun 2010-2014**

Golongan Umur	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	Februari 2014
15-19	25,92	26,69	27,83	22,37	19,22
20-24	59,72	65,70	64,16	58,97	54,12
25-29	75,40	77,71	80,82	75,62	77,24
30-34	78,66	80,38	84,34	80,10	85,66
35-39	83,44	90,00	84,80	82,03	90,72
40-44	87,63	87,60	86,02	85,71	92,94
45-49	86,73	85,70	89,65	89,69	92,26
50-54	85,42	84,29	88,96	87,60	86,18
55-59	80,90	74,55	81,02	81,93	81,86
60+	58,43	46,36	53,19	54,82	58,58

Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010- Februari 2014

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, hampir semua kabupaten cenderung mengalami penurunan TPAK pada Agustus 2013, hanya Kabupaten Kulon Progo yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,88 poin. TPAK tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul 77,38 persen, kemudian Kabupaten Kulon Progo 75,15 persen, Kabupaten Bantul 66,54 persen, Kabupaten Sleman 65,22 dan terendah Kota Yogyakarta 64,07 persen



Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010- 2013

Gambar 2.47 Grafik TPAK Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja.

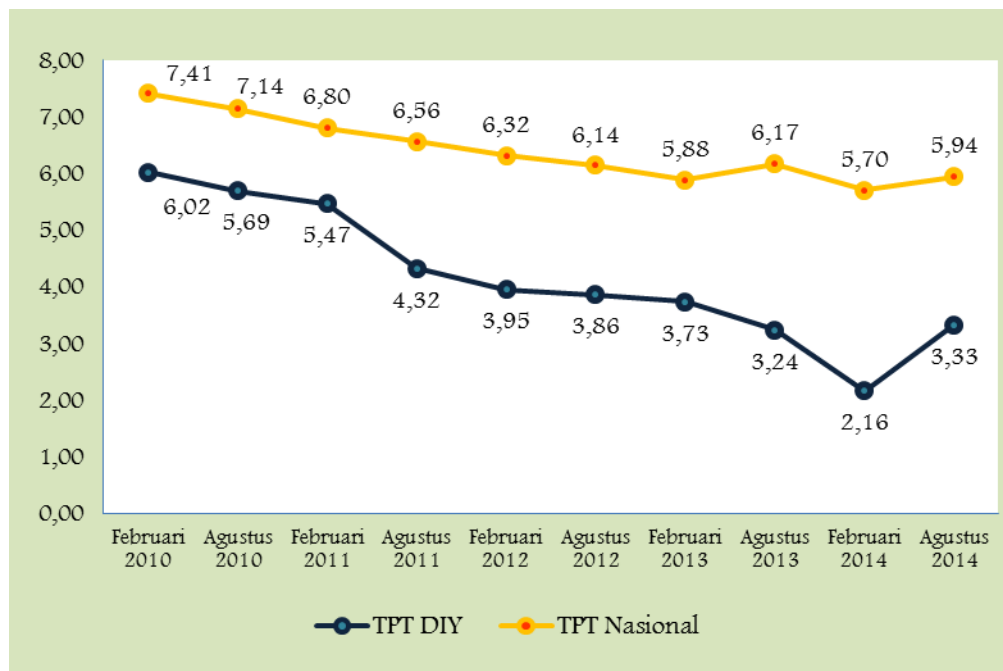
TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2014 menunjukkan trend penurunan dengan angka TPT berada pada kisaran 2,2–6,02 persen, dan masih berada dibawah TPT nasional yang berada pada kisaran 5,2 sampai 7,41 persen.

Pada Agustus 2010 TPT DIY adalah sebesar 6,02 persen dan terus mengalami penurunan hingga Februari tahun 2014 menjadi sebesar 2,16 persen namun pada akhir tahun pengamatan (Agustus 2014)

meningkat sebesar 0,09% menjadi 3,33 persen. Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional 5,94 persen.

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, penganggur laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan penganggur perempuan. Pada Agustus 2014, TPT masing-masing sebesar 3,88 persen untuk laki-laki dan 2,65 persen untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mencapai 3,33 persen.



Sumber :BRS November 2014, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.48 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional Tahun 2010-2014 (%)

Selama periode 2010 – 2014 sebagian besar penganggur di DIY berada di perkotaan. Hasil Sakernas DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2010 TPT perkotaan menunjukkan angka 6,97 persen dan terus

mengalami penurunan menjadi 4,00 persen pada bulan Agustus 2014. Namun demikian, walaupun tingkat pengangguran di perkotaan cenderung menurun tetapi angkanya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di perdesaan. TPT di daerah perdesaan pada tahun 2010 adalah sebesar 4,01%, dan pada tahun 2014 turun menjadi 2,17 persen.

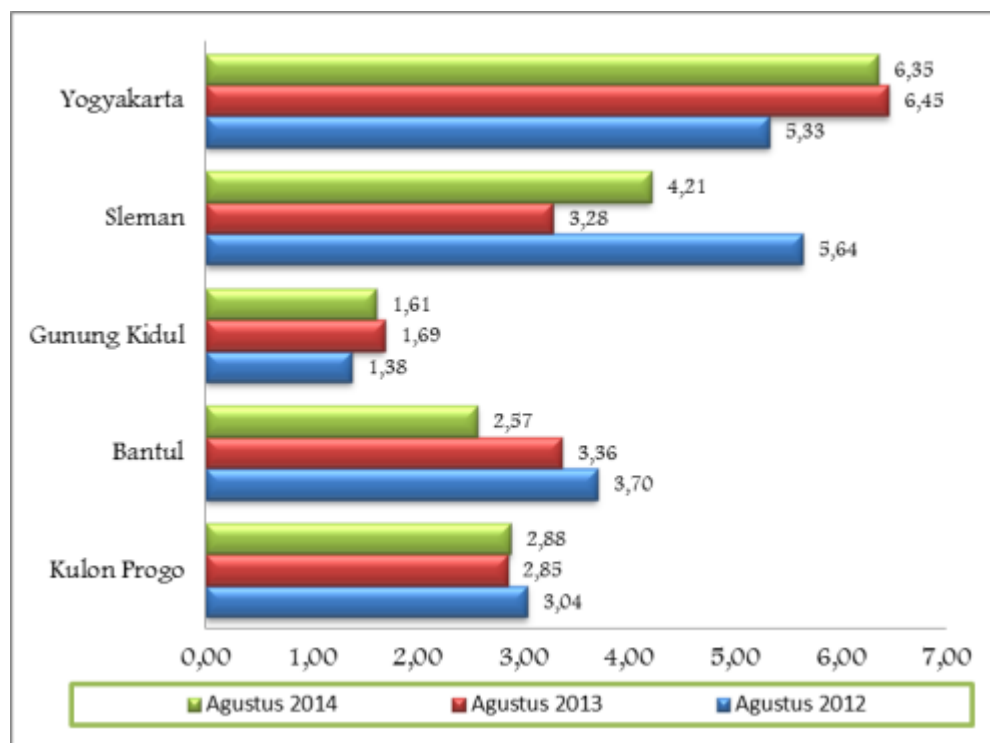
Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di perdesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih lapangan pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga dan pekerja bebas pertanian. Penganggur yang tersisa di daerah perdesaan sebagian di antaranya memang mencari pekerjaan di perdesaan juga, dan sebagian lagi tetap tinggal di desanya sambil mencari pekerjaan dengan cara melaju (commute/pulang-pergi) ke perkotaan.

TPT di kabupaten/kota pada periode Agustus 2010 -Agustus 2014 juga mengalami variasi perkembangan. Variasi TPT terjadi pada semua kabupaten/kota, namun yang konsisten mengalami penurunan selama periode 2010-2014 hanya terjadi di Kabupaten Bantul dengan angka awal sebesar 4,18 persen di tahun 2010 dan terus menurun hingga menjadi 2,57 persen di tahun 2014. Kecenderungan TPT tertinggi di hampir setiap tahun terjadi di Kota Yogyakarta dengan angka TPT berkisar 5,3 persen hingga 7,41 persen. Pada Agustus 2014 TPT tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 6,35 persen, kemudian Kabupaten Sleman 4,21 persen, Kabupaten Kulonprogo 2,88 persen, Kabupaten Bantul 2,57 persen dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,61 persen.

Tabel 2.91 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Kulon Progo	4,18	3,03	3,04	2,85	2,88
Kab. Bantul	5,24	4,39	3,70	3,36	2,57
Kab. Gunung Kidul	4,04	2,23	1,38	1,69	1,61
Kab. Sleman	7,17	5,36	5,64	3,28	4,21
Kota Yogyakarta	7,41	6,70	5,33	6,45	6,35
DIY	5,69	4,32	3,86	3,24	3,33

Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010-2014



Sumber :BRS November 2014, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.49 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012-2014

Berdasarkan kelompok umur, Tingkat Pengangguran Terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 15-24 tahun. TPT usia muda pada Februari 2014 sekitar 10-18 persen, atau lebih dari 5-9 kali lipat TPT semua umur (DIY). Pada Februari 2014, pada kelompok umur 15-19 tahun, tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka laki-laki, sedangkan pada kelompok umur 20-34 tahun dan 35-39 tahun TPT perempuan lebih tinggi dari TPT laki-laki (Sakernas DIY 2013-2014).

Tabel 2.92 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2013-2014

Golongan Umur	Februari 2013			Agustus 2013			Februari 2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-19	16,14	8,42	13,27	22,78	23,19	22,97	18,65	10,04	14,07
20-24	8,86	20,08	13,71	17,60	13,96	15,87	10,96	13,00	11,94
25-29	6,31	7,12	6,66	4,13	2,15	3,29	6,24	0,00	3,30
30-34	3,84	9,07	6,02	2,59	2,61	2,60	2,55	0,00	1,45
35-39	2,84	2,17	2,55	1,75	0,93	1,43	0,00	1,63	0,77
40-44	2,09	1,60	1,86	1,55	1,11	1,34	0,00	0,00	0,00
45-49	1,33	2,16	1,73	1,10	0,00	0,56	2,91	0,00	1,49
50+	0,00	0,00	0,00	1,36	0,30	0,88	0,00	0,00	0,00
TPT DIY	3,22	4,37	3,73	3,59	2,81	3,24	2,67	1,60	2,16

Keterangan:

L = Laki-Laki ; P = Perempuan

Sumber: Sakernas DIY 2013-2014

Jika dilihat dari status pendidikan terakhir yang ditempuh, sebagian besar pengangguran terbuka di DIY merupakan lulusan Universitas. Pada Agustus 2014 angka TPT lulusan universitas adalah sebesar 3,74 persen, diikuti TPT SLTA sebesar 3,29 persen, TPT Diploma sebesar 2,74 persen dan terendah adalah TPT pendidikan dibawah SD sebesar 0,63 persen.

Tabel 2.93 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2013-2014

Tingkat Pendidikan		Februari 2013			Agustus 2013			Februari 2014		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	≤ SD	0,00	0,00	0,00	1,13	0,25	0,62	1,64	0,00	0,63
2	SD	4,80	1,44	3,21	1,09	0,16	0,64	2,09	0,00	1,05
3	SLTP	0,00	1,35	0,53	3,00	2,23	2,68	1,37	0,00	0,85
4	SLTA	2,40	5,20	3,41	5,81	5,86	5,83	4,16	2,15	3,29
5	D1/D2/D3	9,29	9,79	9,54	0,00	1,45	0,83	0,00	3,95	2,47
6	Universitas	10,28	13,08	11,77	4,52	6,42	5,38	2,27	5,40	3,74
DIY		3,22	4,37	3,73	3,59	2,81	3,24	2,67	1,60	2,16

Keterangan:

L = Laki-Laki ; P = Perempuan

Sumber: Sakernas DIY 2013-2014

d. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Jumlah angkatan kerja yang meningkat seringkali tidak diikuti dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini mengindikasikan bahwa karena kesempatan kerja yang terbatas serta kualifikasi angkatan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya kualitas angkatan kerja dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, serta diduga karena kurang lengkapnya informasi yang ada di pasar kerja baik dari sisi penawaran maupun permintaan maka penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal.

Tabel 2.94 Pencari Kerja Yang Ditempatkan di DIY Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Yogyakarta					
- Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i)	4.826	2.259	2.306	2.602	2.029
- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii)	6.729	1.995	3.426	4.964	2.227
- Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	71,72	113,23	67,31	52,42	91,11
Kabupaten Bantul					
- Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i)	1.111	2.163	1.831	1.012	1.995
- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii)	13.780	5.688	7.875	6.803	4.156
- Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	8,06	38,03	23,25	14,88	48,00
Kabupaten Kulon Progo					
- Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i)	6.218	7.660	6.142	4.741	2.029
- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii)	6.587	8.804	7.997	7.258	2.227
- Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	94,40	87,01	76,80	65,32	91,11
Kabupaten Gunung Kidul					
- Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i)	402	430	1.103	1.423	820
- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii)	4.414	2.837	3.840	3.957	2.219
- Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	9,11	15,16	28,72	35,96	36,95
Kabupaten Sleman					
- Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i)	5.383	3.447	4.528	3.030	3.407
- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii)	11.997	4.034	7.231	11.305	3.548
- Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	44,87	85,45	62,62	26,80	96,03
DIY					
- Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i)	17.940	15.959	15.910	12.808	10.280
- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii)	43.507	23.358	30.369	34.287	14.377
- Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	41,23	68,32	52,39	37,36	71,50

Pencari Kerja yang Ditempatkan = (i) dibagi (ii) dikalikan 100%, Sumber: Disnaker DIY

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada awal tahun pengamatan (2010) pencari kerja terdaftar adalah sebesar 43.507 orang, menurun cukup tajam menjadi 23.358 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 34.267 orang dan pada tahun 2014 turun kembali menjadi 14.377.

Penurunan jumlah pencari kerja yang terdaftar ini juga diikuti penurunan jumlah pencari kerja yang ditempatkan yaitu dari 17.940 orang pada tahun 2010 menjadi 10.280 pada tahun 2014. Dalam persentase, rasio jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar menunjukkan angka yang fluktuatif namun mengalami peningkatan cukup tajam selama dua tahun terakhir yaitu dari 37,36 persen pada tahun 2013 menjadi 71,50 persen pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan terjadinya peningkatan penyerapan jumlah pencari kerja di DIY.

e. Produktivitas Kerja

Produktivitas tenaga kerja memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah

2.2.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan UKM mendapatkan perhatian dalam pembangunan DIY mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di DIY. Peningkatan peran Koperasi dalam perekonomian DY ditunjukkan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima tahun) terakhir baik dari aspek jumlah koperasi aktif maupun volume usaha. Sementara itu, perkembangan unit usaha di DIY yang didominasi skala kecil dan menengah menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di DIY dari tahun 2009 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014, jumlah koperasi aktif sebanyak 2.269 koperasi aktif, mengalami kenaikan sebesar 4% dibanding tahun 2013. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 87% dari total koperasi di DIY. Sementara itu, dilihat dari volume usaha, terlihat adanya pertumbuhan volume usaha dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 pertumbuhan volume usaha seluruh koperasi di DIY sebesar 11 % dari Rp. 2.320.617 Juta menjadi Rp. 2.586.506 Juta.

Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Koperasi Aktif	1.926	1.981	2.090	2.176	2.269
Koperasi Tidak aktif	484	485	427	499	341
Koperasi Beku				58	
Modal Sendiri (Rp Juta)	692.622	929.556	1.015.396	1.440.948	594.124
Modal Luar (Rp Juta)	415.550	513.936	572.156	572.159	830.210
Volume Usaha (Rp Juta)	2.296.146	2.304.123	2.304.127	2.320.617	2.586.506

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2015



Gambar 2.50 Pengembangan UKM di DIY

Jumlah UMKM pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 15.493 UKM atau sebesar 8 % dibanding dengan tahun 2013. Dilihat dari jenis usaha, UKM di DIY didominasi oleh usaha Perdagangan dan Industri Pertanian. Komposisi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jenis usaha perdagangan menguasai sebesar 28 % dari total UKM di DIY dan diikuti oleh industri pertanian sebesar 27%..

Tabel 2.96 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2010-2014

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1	Aneka Usaha	34.009	39.036	43.471	43.976	44.452	47.808
2	Perdagangan	48.292	52.420	57.858	58.363	58.601	63.025
3	Industri Pertanian	46.017	49.554	54.991	55.496	55.767	59.977
4	Industri Non Pertanian	36.529	41.222	45.655	46.160	46.390	49.892
	Jumlah	164.847	182.232	201.975	203.995	205.210	220.703

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

Sebagai bentuk penumbuhan sektor UKM, telah dilakukan program pengembangan kewirausahaan. Hingga tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 81.407 wirausaha baru. Berbagai Kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan pelatihan teknis penunjang telah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya.

Tabel 2.97 Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013

No.	Kab / Kota	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Kota Yogyakarta	4.552	4.561	4.590	4.598	4.643	22.946
2	Sleman	2.534	2.541	2.587	2.592	2.608	12.862
3	Bantul	4.433	4.439	4.463	4.468	4.479	22.282
4	Kulon Progo	1.550	1.552	1.565	1.571	1.578	7.816
5	Gunung Kidul	3.090	3.096	3.099	3.105	3.113	15.501
	Jumlah	16.159	16.189	16.304	16.334	16.421	81.407

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

2.2.1.16 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkan modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja lokal dan asing. Tentu saja untuk tingkat daerah semakin banyak PMDN dan serapan Tenaga kerja lokal lebih diutamakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun demikian peran PMA dan tenaga kerja asing tetap diperlukan untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi karena seringkali pemodal asing nilai investasinya bisa lebih besar dan dengan tenaga kerja asing yang masuk ada percepatan pertukaran ilmu dan pemahaman akan teknonogi baru

Investasi DIY diutamakan untuk industri-industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif serta industri yang ramah lingkungan. Sehingga dalam perkembangannya, investasi yang tumbuh di DIY sesuai dengan daya dukung lingkungan.

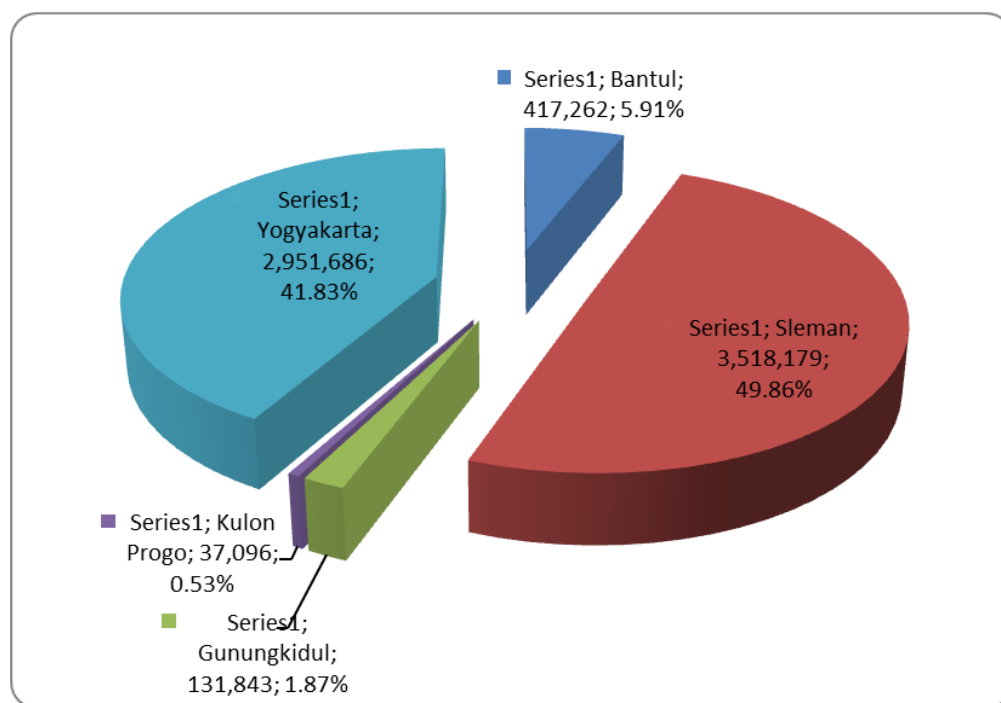
Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif walapun baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2014 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 18,05%. Total investasi di DIY tahun sampai dengan tahun 2014 adalah Rp. 9.524.400.134,- yang terdiri dari PMDN Rp 3.568.546.291 dan PMA sebesar 5.955.853.842,-. Adapun jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 218 perusahaan, yang terdiri dari 119 PMA dan 106 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA.

Tabel 2.98 Perkembangan Investasi di DIY

Tahun	Investasi PMDN (Rp 000)	Investasi PMA (Rp 000)	Total Investasi (Rp 000)	Growth (Rp 000)	Investation Growth (%)
s.d 2010	1.884.923.869	2.696.046.957	4.580.970.827	190.327.126	4,33
s.d 2011	2.313.141.695	4.110.436.324	6.423.578.020	1.842.605.192	40,22
s.d 2012	2.805.944.605	4.250.121.535	7.056.066.141	632.488.121	9,85
s.d 2013	2.864.654.491	5.203.115.642	8.067.770.134	1.011.703.992	14,34
S.d 2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	543.116.777	18,05

Sumber: Pemda DIY, Tahun 2014

Meskipun secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi presentasi di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk lebih meratakan sebaran ivestasi di wilayah DIY agar gap kesejahteraan masyarakat di kab/kota semakin kecil.



Gambar 2.51 Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2012 Per Kabupaten/Kota

2.2.1.17 Urusan Kebudayaan

“ . . . Budaya sebagai Payung dan Arus Utama (mainstreaming) dalam Pembangunan di segala bidang. Renaissance Yogyakarta yang dipayungi filosofi hamemayu-hayuning bawānā, dihidupi semangat gotong-royong yang mengacu pada konsep aworing kawulā-gusti dan golong-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satriyā: sawiji, grègèt, sêngguh, ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan ruh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali ‘rasa keTuhanan’ kita. . . ” (Sri Sultan Hamengku Buwana X, Gubernur DIY, 2012).

Pada Tahun 2012 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melaksanakan kewenangan aspek kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu adanya identifikasi data dan perkembangan budaya di DIY.

Berikut gambaran umum kondisi eksisting kebudayaan/potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY:

A. Seni, Adat dan Tradisi

Kehidupan kesenian di Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang pesat karena bermunculannya SDM yang sangat inovatif dan kreatif menciptakan karya seni baik yang diadaptasi dari seni tradisi maupun kontemporer sehingga membangkitkan kembali kelompok seni yang sudah lama tidak aktif dan bermunculan kelompok seni yang baru. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, symbol, pendidikan, dan hiburan. Masing-masing fungsi seni seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi beberapa fungsi seni bisa saling melekat dalam suatu karya atau pertunjukan seni. Potensi kesenian Yogyakarta sangat beragam, meliputi seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa, seni audio visual, dari yang klasik sampai kontemporer.

Sampai saat ini ada 5426 kelompok seni yang mengembangkan seni rupa, pertunjukan, dan sinematografi. Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju, realisasi 1,1% sesuai target berasal dari 54 organisasi budaya berkategori maju dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 5.426.

Tabel 2.99 Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2010-2014

Jenis Data	2010	2011	2012	2013	2014
Organisasi Sinematografi	14	14	14	42	
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.219	4.269	5.401	5239	
Organisasi Seni Rupa	25	25	25	25	
Perusahaan Film	10	10	10	20	
Perusahaan Bioskop	4	4	4	1	
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	37	37	38	

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Perkembangan seni dan budaya menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014

Kab/Kota	Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten Bantul	13,55	0,42
Kabupaten Sleman	9,73	0,25
Kabupaten Gunungkidul	11,58	0,17
Kabupaten Kulonprogo	16,71	0,23
Kota Yogyakarta	12,98	0,23
DIY	15,42	0,30

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Perkembangan seni dan budaya di kabupaten/kota di DIY ditunjukkan oleh table diatas, terlihat di mana perkembangan grup kesenian di tahun 2014 paling pesat ada di Kabupaten Kulon Progo dan kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul. Adapun gedung kesenian sebagai sarana masyarakat untuk mengekspresikan rasa berkesenian dan mengapresiasi seni dan budaya ditunjukkan melalui rasio gedung kesenian di mana yang paling besar ada di Kabupaten Bantul sebesar 0,42.

Tabel 2.101 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, Tahun 2010-2014

Jenis Data	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	720	720	980	1.025	
Prasarana Budaya	135	137	412	412	
Lembaga Budaya	107	107	107	107	
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	31	31	

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Selain kelompok kesenian dan gedung kesenian, pesatnya perkembangan pembangunan kesenian di DIY ditunjukkan oleh banyaknya penyelenggaraan event maupun festival budaya. pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.025 event yang telah diselenggarakan. Festival Kesenian Yogyakarta yang telah diselenggarakan sejak tahun 1988, di tahun 2014 mencatatna sejarah dengan memulai pola baru, di mana penyelenggaraan tidak hanya terpusat di Kota Yogyakarta saja, melainkan juga di kabupaten. Banyaknya event yang terselenggara masih perlu ditinjau kembali sejauh mana kualitas penyelenggaraannya. Diharapkan banyaknya agenda event seni dan budaya akan mengangkat perekonomian masyarakat DIY dan menunjang kegiatan pariwisata di DIY.



Gambar 2.52 Festival Budaya di DIY

Potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY yang tercermin tabel dibawah ini.

Tabel 2.102 Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, Tahun 2010-2014

Aspek	Satuan	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah kunjungan museum dan situs sejarah purbakala	Orang	575.000	623.500	1.375.000	1.636.000	1.668.410
Jumlah Organisasi Budaya Berkategori Maju	Organisasi	36	38	40	54	
Jumlah Gelar Seni Budaya	Kali	790	920	980	1025	
Jumlah Desa Budaya Berkategori Maju	Desa	6	8	12	12	
Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan	Dok.	91	104	120	120	
Jumlah sumber sejarah yang terkelola	Sumber sejarah	300	500	700	700	
Jumlah Gedung Seni Budaya	Gedung	94	94	96	107	

Sumber: Dinas Kebudayaan

Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup manusia dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin berusia tujuh bulan (*mitoni; tingkeban*), lahir (*brokohan*), putus tali pusarnya (*pupak puser; puputan*) pemberian nama (*njenengi*), aqiqah (*kékahan*), turun ke tanah (*tedhun lemah; tedhak sitèn*), khitanan anak laki-laki (*sunatan; supitan*) dan perempuan (*tetesan*), menikah (*omah-omah*), dan meninggal dunia (*tilar donya*) dengan segala rangkaian upacara setelahnya. Di samping upacara daur hidup, terdapat pula upacara ruwatan, yakni suatu upacara yang dimaksudkan untuk “membersihkan” pengaruh buruk (*sukerta*) yang mungkin timbul pada diri seseorang.

Di pedesaan sendiri masih tumbuh dan berkembang desa-desa yang menjaga budaya rakyat. Pada tahun 1995 Gubernur menetapkan 32 desa bina budaya melalui SK Gubernur Nomor 325/Kpts/1995. Pada tahun 2006 telah dilakukan penilaian terhadap desa-desa di DIY, dan terdapat 41 desa budaya termasuk yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan tersebut. Desa budaya tersebut diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Hingga akhir 2013 tercatat menjadi 43 desa

yang berpotensi sebagai benteng pertahanan budaya tradisional.. Desa budaya dapat berperan sebagai wadah konservasi dan pengembangan budaya baik yang *tangible* maupun *intangible*. Pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya yang mengatur tentang Desa dan Kelurahan Budaya, baik dari pembentukan, penilaian, pengelolaan, serta pembinaan yang harus dilakukan.

Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Organisasi Penghayat Kepercayaan yang masih berkembang ada sekitar 90 kelompok. Mereka juga melakukan ritual budaya sendiri. Balai-balai budaya di desa budaya dikembangkan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di pedesaan yang berperan penting dalam pertahanan ketahanan budaya di DIY.

B. Sejarah dan Purbakala

DI Yogyakarta mewarisi budaya prasejarah, Mataram Kuno, Mataram Islam, Indisch, Cina, dan Arab. Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas administratif disebut Kawasan cagar Budaya. Sejumlah kawasan memiliki tinggalan fisik yang sangat dominan terutama yang berupa monumen dan tidak banyak terkait dengan kehidupan masa kini sehingga sering dipahami sebagai *dead monument*.

Setiap Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY ada 13 Kawasan, dan yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman).

Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Selain itu, Pemda DIY juga mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mengatur pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, antara lain: Pergub Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Pergub Nomor 40 tahun 2014 tentang

Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Pergub Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, dan Pergub Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional. Sampai pada tahun 2012 benda cagar budaya terdapat 715 buah, yang ditetapkan sudah mencapai 521 buah. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum.

Tabel 2.103 Kawasan Cagar Budaya

No	Kawasan Cagar Budaya	Sk Penetapan
1	Kraton	SK Gubernur 2011
2	Puro Pakualaman	SK Gubernur 2011
3	Kotagede	SK Gubernur 2011
4	Imogiri	SK Gubernur 2011
5	Kotabaru	SK Gubernur 2011
6	Malioboro	SK Gubernur 2011
7	Ambarketawang	SK Bupati
8	Ambarbinangun	SK Bupati
9	Pleret	Situs, dalam proses penetapan
10	Sokoliman	Situs, dalam proses penetapan
11	Prambanan	SK Menteri
12	Ratu Boko	SK Menteri
13	Parangtritis	Situs, dalam proses penetapan

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Jumlah peninggalan sejarah kepurbakalaan Tahun 2010-2014 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.104 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalan Tahun 2010-2014

Jenis Data	2010	2011	2012	2013	2014
Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	511	515	517	517	521
Kawasan Cagar Budaya	13	13	16	16	
Situs	96	96	96	96	
Monumen Sejarah Perjuangan	44	44	44	44	
Museum	34	38	42	42	

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Penanganan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.105 Penanganan cagar Budaya Tahun 2010-2014

Aspek	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	214	220	225	230	
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.279	1.279	1.410	1.410	

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Cagar budaya tidak bergerak berkategori kondisi baik adalah Cagar budaya yang direhabilitasi, direkonstruksi, dieskavasi, mendapat penghargaan serta ditetapkan menjadi cagar budaya. Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 46,42 cagar budaya yang ditangani, namun hanya tercapai sebesar 44%. Angka 44,49% diperoleh dari 230 Cagar Budaya dengan kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh cagar budaya yang terdata yaitu sejumlah 521 buah.

Museum menurut ICOM (International Council for Museums) adalah, lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dalam melayani masyarakat, terbuka untuk umum, mengumpulkan, merawat dan memamerkan benda-benda bukti materiil manusia dan lingkungannya, untuk tujuan penelitian, pendidikan dan rekreasi. Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Berdasarkan data dari Badan Musyawarah Musea atau BARAHMUS Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah museum ada 33 buah dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 2.106 Rekap Data Museum Anggota Barahmus di DIY

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Museum
1	Kota Yogyakarta	17
2	Kabupaten Bantul	4
3	Kabupaten Sleman	11
4	Kabupaten Gunungkidul	1

Disamping potensi permuseuman yang cukup besar yang ada di DIY, masih ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi. Secara singkat, permasalahan yang cukup menonjol, yaitu:

- 1) Kurangnya profesionalitas pengelolaan museum ditandai hilang dan rusaknya koleksi museum;
- 2) Belum meratanya kualitas pengelolaan museum;
- 3) Masih terbatasnya komitmen dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan museum;
- 4) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana museum;
- 5) Belum optimalnya penelitian koleksi museum.

2.2.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Penanganan kepemudaan dan olahraga di DIY sebenarnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pembagian kewenangan penanganan dalam bidang olahraga sudah cukup jelas. Guna pengembangan olahraga prestasi, para atlet langsung mendapat binaan dari KONI DIY, sedangkan pembinaan olahraga anak usia sekolah berada di bawah Balai Pemuda dan Olahraga yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Dunia olahraga DIY telah menunjukkan prestasi besar dengan masuk pada peringkat ke 9 dalam PON Remaja yang diselenggarakan selama bulan Desember tahun 2014 dengan perolehan medali 3 emas, 6 perak dan 5 perunggu.



Gambar 2.53 Kejuaraan Taekwondo Dunia di DIY

Prestasi para atlet DIY ditunjang oleh upaya Pemda DIY yang mulai meningkatkan sarana dan prasarana yang ada antara lain pembangunan kawasan olahraga yang dimulai dengan menata kawasan Mandala Krida, membantu Kabupaten/Kota dalam merealisasikan stadion di setiap Kabupaten/Kota yang dimulai dengan Stadion Cangkring yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Urusan kepemudaan juga di bawah binaan BPO bekerjasama dengan organisasi – organisasi pemuda yang ada dengan menggerakkan para pemuda dalam beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan kewirausahaan dan jiwa kepemimpinan.

Paskibraka DIY yang juga merupakan binaan BPO telah membuat prestasi tersendiri dalam tahun 2014 dengan menjadi Paskibraka pada upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta dan menjadi salah satu pengibar bendera.

Fasilitas kepemudaan yang tersedia saat ini dapat dikatakan belum dapat mengakomodir semua kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan. BPO telah dilakukan penataan kawasan Youth Center yang nantinya dapat dipergunakan untuk aktivitas kepemudaan serta penataan kawasan bumi perkemahan Babarsari pada tahun 2014. Hal ini dilakukan agar potensi yang ada di DIY dapat lebih dikembangkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 2.2 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di DIY, 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah klub olahraga	289	327	485	505	505
2	Jumlah gedung olahraga	12	13	13	15	15
3	Jumlah organisasi pemuda	42	42	42	43	43
4	Jumlah kegiatan kepemudaan	22	25	27	16	19
5	Jumlah kegiatan olahraga	14	14	14	14	14
6	Jumlah Gelanggang / balai remaja	7	7	7	12	12

Jumlah klub olahraga dan gedung olahraga seperti tertera dalam tabel diatas tersebar di 5 kabupaten/kota di DIY. Untuk gelanggang/balai remaja terdiri dari gelanggang/balai remaja pemuda dan gelanggang/balai remaja olahraga. Gelanggang/balai remaja terdapat 2 unit dan sisanya merupakan gelanggang/balai remaja olahraga.

2.2.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri

DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa.

Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik yang ada dalam upaya membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya meningkatnya penanaman modal, kunjungan wisata, pendidikan.

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis 2014 menunjukkan capaian demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menggembirakan. Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta melampaui rerata nasional (72,36 dari rerata 63,72). Lebih detail, capaian kebebasan sipil (90,78 dari rerata nasional 79,00), capaian hak-hak politik (50,65 dari rerata nasional 46,25) dan lembaga demokratis (83,69 dari rerata nasional 72,24).

Dari hasil Indeks tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam kategori sedang dimana skor Indeks yang diperoleh antara 60 sampai 80. Namun demikian tidak serta merta perolehan tersebut mempengaruhi aspek lainnya. Dalam hal aspek hak politik yaitu hak memilih dan hak dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Dalam aspek lembaga Demokrasi terdapat kesenjangan indeks antar variabel dimana terdapat 1 variabel masuk ke dalam kategori buruk yaitu peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peran DPRD dimana hak inisiatif dewan dalam penyusunan Raperda dan jumlah rekomendasi dewan kepada eksekutif masih rendah.

Berpijak pada identifikasi hasil Indeks tersebut, perlu penguatan terutama untuk hak-hak politik yang masih rendah serta penguatan lembaga demokrasi yang ada di DIY. Penguatan peran anggota Dewan dalam menggunakan hak inisiatifnya juga perlu didorong dan dikembangkan. Selain itu rekomendasi dewan juga perlu ditingkatkan lagi.

Untuk Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkembang dan telah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mengalami perubahan jumlah yang fluktuatif. Pada Tahun 2009 terdapat 31 organisasi, tahun 2010 terdapat 33 organisasi, tahun 2011 terdapat 29 organisasi, tahun 2012 terdapat 18 organisasi, tahun 2013 34 organisasi, dan hingga pertengahan Juni 2014 terdapat 7 organisasi. Dari data ini bisa diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan

yang sudah resmi terdaftar memiliki keragaman sifat baik dalam kekhususan organisasi ataupun kesamaan latar belakang baik dari kesamaan profesi, agama, lingkup budaya, sosial dan kemasyarakatan lainnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat DIY.

Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir.

Untuk jumlah pelanggaran Perda pada tahun 2013 sebanyak 305 pelanggaran, sementara di tahun 2014 sebanyak 289 pelanggaran. Menurunnya jumlah pelanggaran ini juga tetap harus diikuti dengan proses penanganan dan penyelesaian penegakan Perda. Namun kondisi di lapangan, proses tersebut masih berjalan timpang. Di tahun 2013 jumlah penyelesaian penegakan Perda sebanyak 12 kali, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi 14 kali. Dari perbandingan pelanggaran dan penyelesaian ini menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah agar ke depan semakin sedikit angka pelanggaran yang dilakukan sehingga amanat dalam Perda bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Proses penegakan Perda ini tentunya juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya aparatur dari penegak Perda itu sendiri dimana dalam tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting. Sementara ini jumlah personil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih belum maksimal. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 120 orang, sedangkan pada tahun 2014 tercatat terdapat 118 orang. Ke depan perlu dimaksimalkan lagi kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja baik melalui penguatan kapasitas anggota dan bila memungkinkan adanya penambahan personil yang menggantikan personil yang memasuki masa purna tugas

2.2.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pemda DIY dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi

berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP nomor 38 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Dengan demikian perlu adanya penjelasan dan batasan ketegasan urusan lintas kabupaten/kota yang perlu diharmonisasikan dengan pemerintahan kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 9 dan 10 vide bahwa Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dan urusan pilihan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Namun dalam pelaksanaan NSPK masing-masing Kementerian/ Lembaga Non Departemen masih banyak yang tumpang tindih.

Pasal 12 UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah menyerahkan kewenangan disertai dengan unsur pendukung yang meliputi personil, pembiayaan, sarana prasarana dan dokumen, sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Namun hal pelaksanaannya masih banyak permasalahan berkaitan dengan penyerahan P3D tersebut yang belum diselesaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 disusun 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Gubernur tentang APBD sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2011 disusun 4 Peraturan Daerah dan 7

Peraturan Gubernur sedangkan tahun 2012 akan disusun 12 Peraturan Gubernur.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas. Sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, yakni:

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- 3) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY, pada Pasal 23 diamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), amanat Keistimewaan DIY, dan tuntutan reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program

tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

Sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Melalui data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Hasil survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2014, dengan melakukan survey terhadap 64 unit layanan di DIY, 80% mendapatkan persepsi baik/puas dari masyarakat pengguna layanan. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh Kementrian Teknis secara umum telah mampu dilaksanakan di hampir seluruh SKPD pengampu SPM, dari 9 SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, sampai dengan tahun 2014 ditetapkan dan diintegrasikan setiap pelayanan dasar tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah secara berjenjang.

Pemda DIY memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan surat maupun naskah-naskah dinas di Pemda DIY. Proses pengurusan surat, mulai dari surat masuk, agenda acara pimpinan, pendistribusian sampai dengan penyimpanan dilakukan dengan komputerisasi yang terhubung dengan server online jaringan kearsipan. Dengan demikian, proses pelacakan dan penemuan kembali surat atau naskah dinas akan lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Melalui cara pengelolaan yang demikian diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah serta instansi-instansi di Pemda DIY.

Dalam reformasi birokrasi, fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran

memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam bidang keuangan daerah, kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor keuangan daerah karena suatu pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu keuangan dapat menjadi kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara itu untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Daerah mempunyai hak untuk mencari sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut tetapi juga dalam kerangka yang lebih besar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan secara lebih khusus untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah terbaik se Indonesia.

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Reward diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi.

Penilaian kinerja mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu. Formulasi penilaian kinerja PNS dikembangkan secara proporsional dari tahun ke tahun. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan salah satu hal utama yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Peran pegawai dalam hal ini sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pegawai ASN Berfungsi Sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam bidang penanggulangan bencana, Pemda DIY mendukung upaya pengurangan risiko bencana. DIY memiliki 12 potensi bencana dengan kerentanan beragam untuk setiap jenis potensi bencana. Kerentanan bencana ditinjau dari komponen sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan. Penghitungan kerentanan suatu kawasan bila terpapar oleh suatu ancaman bencana terdiri dari 3 indeks kerentanan. Indeks tersebut adalah Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kerusakan Lingkungan.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh data bahwa indeks kerugian fisik dan ekonomi di DIY pada kategori skala tinggi, dan tingkat ancaman multibencana pada kategori skala sedang.

Berdasarkan hasil kajian kapasitas, maka diperoleh perlu upaya Prioritas Penanggulangan Bencana DIY sebagai berikut:

1. Memberdayakan forum/jaringan untuk pengurangan risiko bencana,
2. Membangun sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama,
3. Menyusun dan mereview dokumen kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko,
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh

pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi),

5. Menyusun instrumen untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur,
6. Menyusun dan mereview rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.

Pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda DIY untuk mengelola berita yang masuk maupun keluar yang bersifat rahasia atau terbatas serta untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi peralatan sandi di masing-masing SKPD di lingkungan Pemda DIY sebagai bagian dari Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (SISDINA).

2.2.1.21 Urusan Ketahanan Pangan

Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pembangunan ketahanan pangan adalah mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

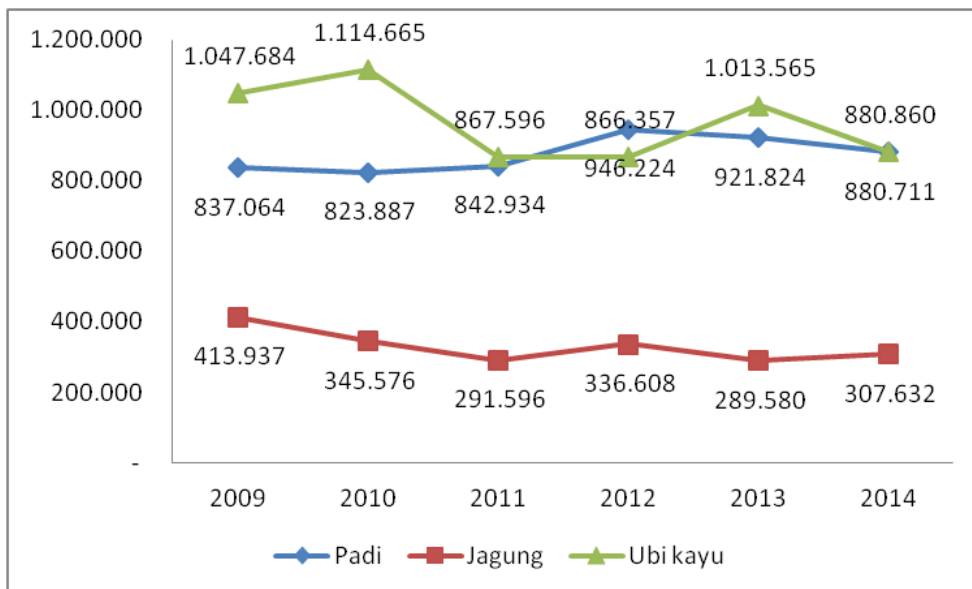


Gambar 2.54 Pangan Lokal di DIY

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, panganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

1) Ketersediaan Pangan

Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, DIY mengalami trend peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas utama yaitu padi dan ubi kayu. Peningkatan produksi padi pada tahun 2012 diantaranya dikarenakan adanya penambahan lahan baru di Sleman. Namun, akibat kemarau basah, produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2013. Sementara produksi ubi kayu terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 dikarenakan peningkatan produktivitasnya. Di sisi lain, produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan produksi pada tahun 2013 dan 2014 menurun dibandingkan tahun 2012. Hal ini juga diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2014

Gambar 2.55 Grafik Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (Dalam Ton) Tahun 2009-2014

Produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2014 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

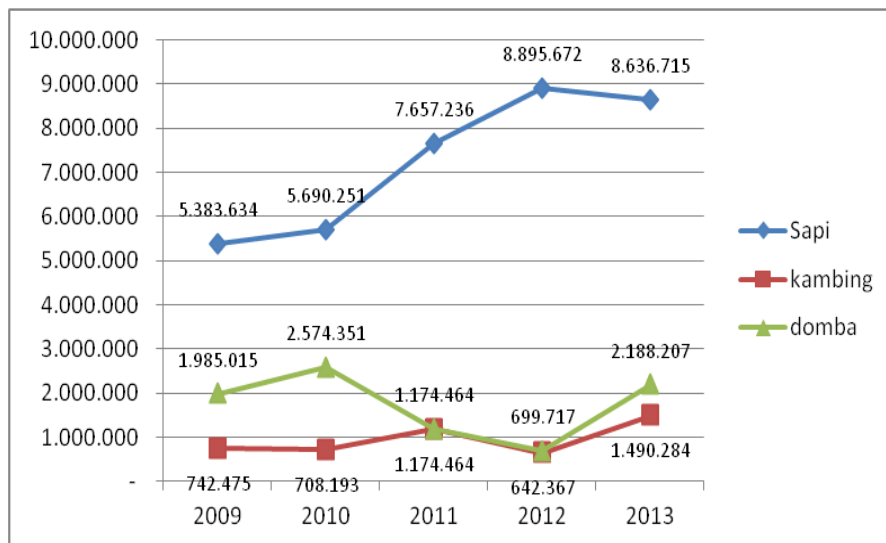
Tabel 2.3 Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2014 (Dalam Ton)

Jumlah Produksi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Padi	837,064	823,887	842,934	946,224	921,824	880,711
Jagung	413,937	345,576	291,596	336,608	289,580	307,632
Ubi Kayu	1,047,684	1,114,665	867,596	866,357	1,013,565	880,860
Kedelai	40,278	38,244	32,795	36,033	31,677	19,939
Kacang Tanah	63,332	58,918	64,084	62,901	70,834	70,012
Kacang Hijau	346	610	371	300	318	265
Ubi Jalar	6,687	6,484	4,584	5,047	4,951	4,897

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2014

Produksi pangan hewani untuk komoditas daging sapi, kambing, dan domba mengalami peningkatan. Peningkatan produksi daging ini sejalan dengan populasi sapi potong, kambing, dan domba yang cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 produksi daging sapi mengalami penurunan, hal ini disebabkan tingginya harga daging sapi di pasaran sehingga mengurangi minat pembeli untuk membeli daging sapi dan mengalihkan ke daging kambing dan domba sebagai asupan protein sehingga produksi daging kambing dan domba mengalami peningkatan di tahun 2013.

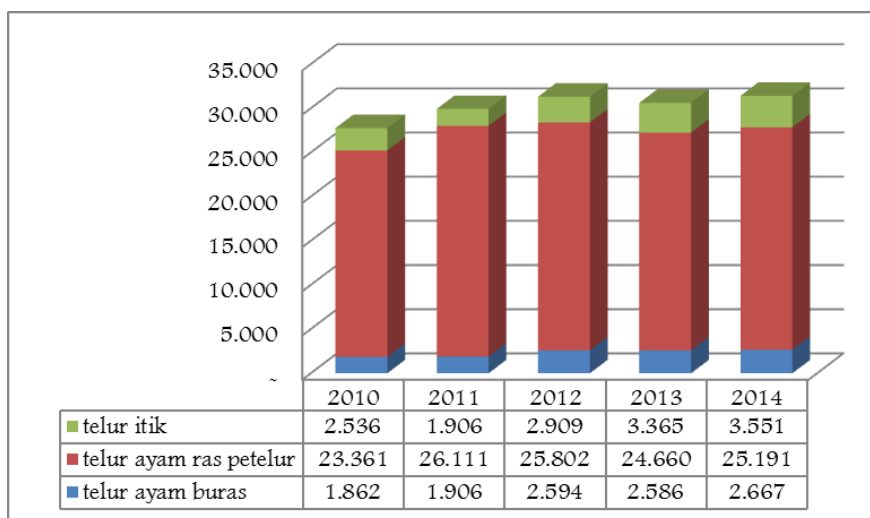
Perubahan RKPD DIY Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

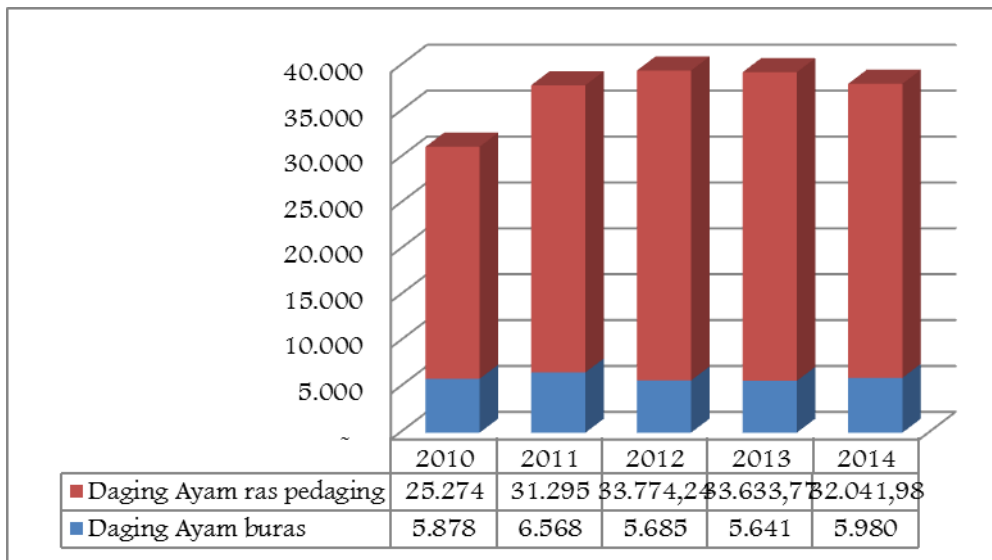
Gambar 2.56 Grafik Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba (Dalam Kilogram) Tahun 2009-2013

Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas, baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Sumber : Dinas Pertanian DIY 2013

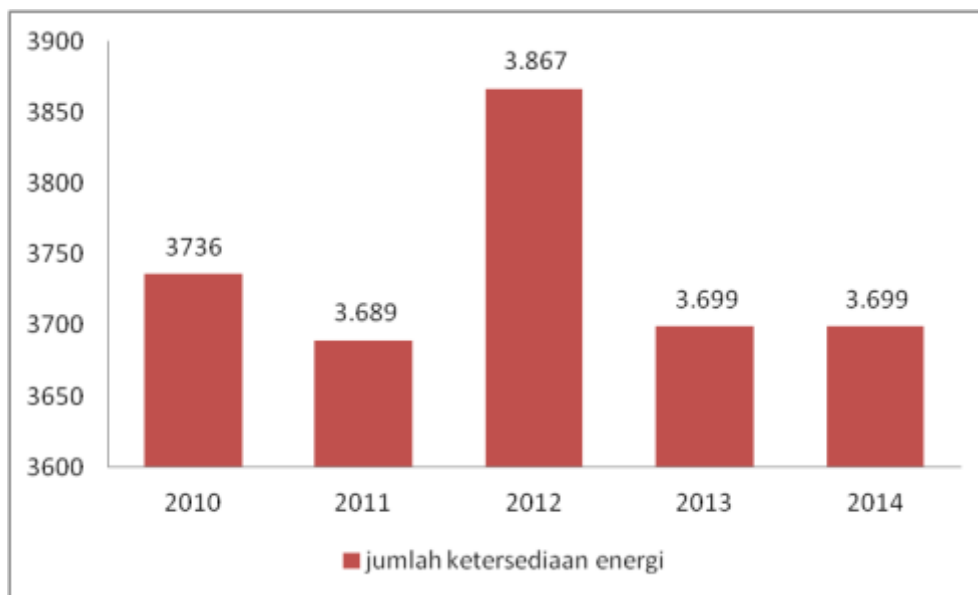
Gambar 2.57 Grafik Produksi Telur Unggas Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Pertanian DIY 2014

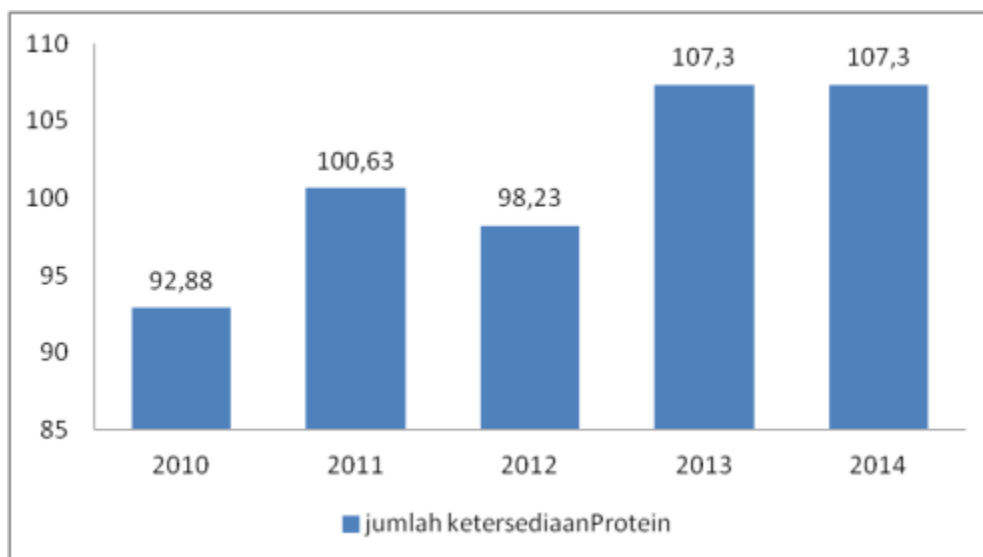
Gambar 2.58 Grafik Produksi Daging Ayam Tahun 2010-2014

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2014 sebesar 3.699 Kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannya sebesar 107,3 gram/kapita/hari.



Sumber : BPS DIY, 2014

Gambar 2.59 Grafik Jumlah Energi di DIY Tahun 2010-2014

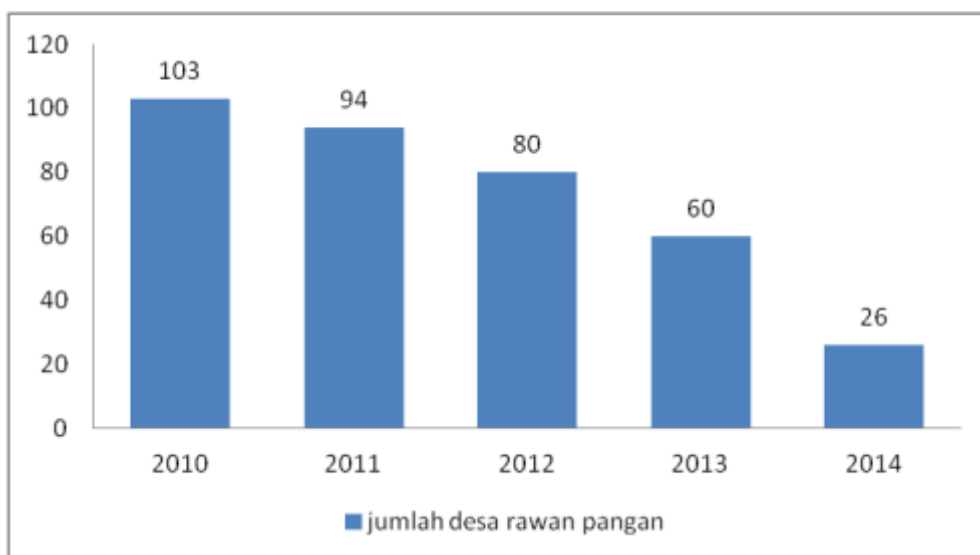


Sumber : BPS DIY 2014

Gambar 2.60 Grafik Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2010-2014

Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 103 desa pada tahun 2010 menjadi 60 desa pada tahun 2013 dan menurun menjadi 26

desa pada tahun 2014. Jumlah desa rawan pangan terbanyak berada di Kulon Progo sejumlah 27 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Hal tersebut dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber : BPS DIY 2014

Gambar 2.61 Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2010-2014

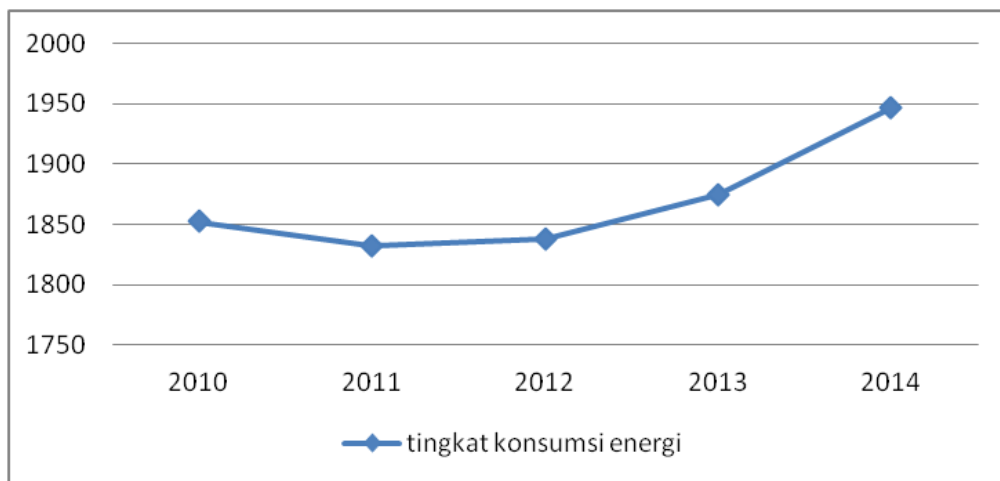
2) Distribusi Pangan

Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan. Dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Sampai

dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

3) Konsumsi dan Pengawasan Pangan

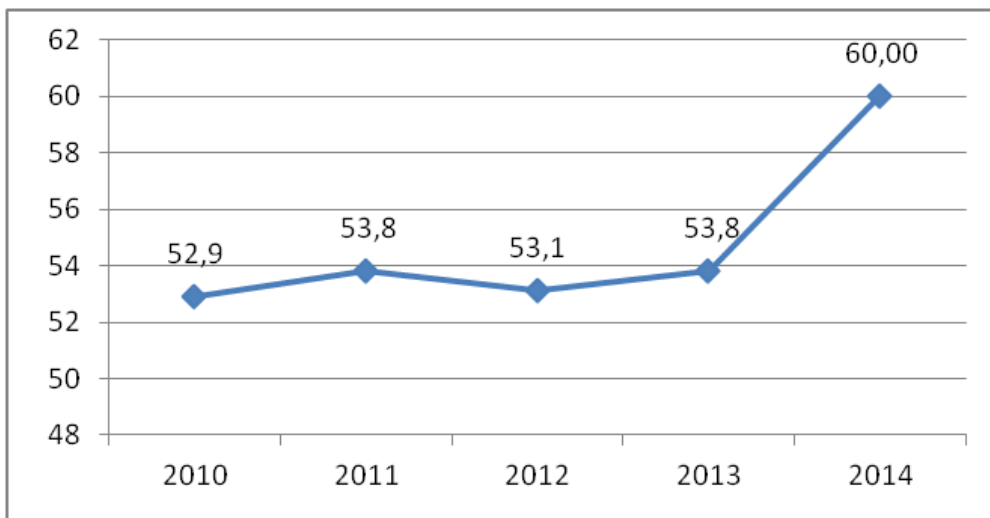
Jumlah konsumsi energi penduduk DIY mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 1.946,40 Kkal/kapita/hari, namun masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.62 Grafik Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2010-2014

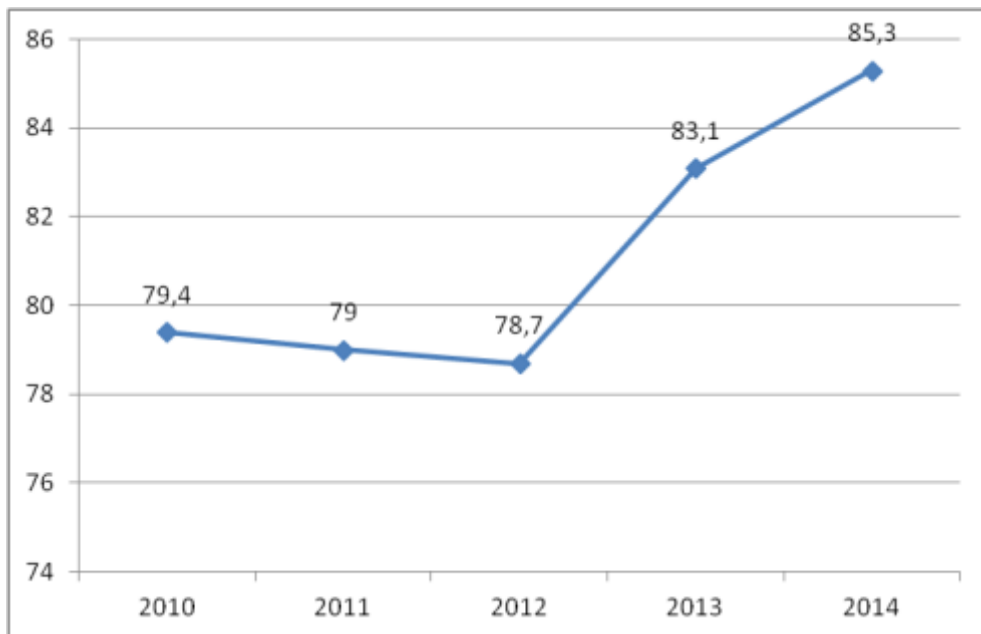
Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2014 mencapai sebesar 60 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut masih berada di bawah angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.63 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk DIY (Gram/Kapita/Hari) Tahun 2010-2014

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2014 adalah 85,3. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.64 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2010-2014

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan di DIY.

2.2.1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

LPMD/K adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tugas dari lembaga ini adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Saat ini telah terbentuk LPMD/K di seluruh desa dan kelurahan di DIY. Di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/K. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah DIY menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2011 :

Tabel 2.4 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014

No	Kab/Kota	Jumlah LPMD/LPMK		Asosiasi LPMD/LPMK	Jumlah
		LPMD	LPMK		
1	Kota Yogyakarta	~	45	1	46
2	Kab. Bantul	75	~	1	76
3	Kab. Kulon Progo	88	~	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	~	1	145
5	Kab. Sleman	86	~	1	87
6	DIY	~	~	1	1
	Total	393	45	6	444

Sumber : BPPM DIY, 2014

Agar mampu berpartisipasi secara optimal sebagai mitra pemerintah di tingkat desa/kelurahan, perlu adanya perhatian pemerintah terkait peningkatan kapasitas anggota.

b. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Desa

Selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat desa, dibentuk pula lembaga pemberdayaan ekonomi desa seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Lumbung Pangan, Pasar Desa, dan Badan Kredit Desa.

Fungsi dari lembaga ekonomi desa selain untuk mengatasi permasalahan permodalan, juga sebagai wadah pengembangan potensi dan sumberdaya pedesaan dalam meningkatkan ekonomi produktif desa. Kondisi jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi desa di DIY tahun 2014 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5 Jumlah LSM Pemberdayaan Ekonomi Desa Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014

Kab/Kota	Jumlah LSM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif				Jumlah
	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SF)	Lumbung Pangan	Pasar Desa	Badan Kredit Desa	
Kota Yogyakarta	45	44	31	0	120
Kab.Bantul	75	48	55	10	160
Kab. Kulon Progo	88	72	41	20	232
Kab. Gunungkidul	144	77	138	15	304
Kab. Sleman	86	69	43	35	238
Jumlah DIY	438	310	308	80	1.136

Sumber : BPPM DIY, 2014

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

c. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan bayi dan balita. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

Tabel 2.6 Persentase Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/kota di DIY Tahun 2011-2013

Kabupaten /Kota	2011			2012			2013		
	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%
Kota Yogyakarta	622	531	77,73	622	449	72,19	625	625	100,00
Kab.Bantul	1.123	669	59,57	1.127	1.127	100,00	1.128	744	65,96
Kab.Kulonprogo	961	747	83,11	962	814	84,62	961	862	89,70
Kab. Gunungkidul	1.462	1.215	74,59	1.464	1.143	78,07	1.465	1.303	88,94
Kab. Sleman	1.511	1.127	72,19	1.516	1.109	73,15	1.519	1.232	81,11
DIY	5.679	4.289	73,44	5.691	4.642	81,61	5.698	4.766	85,14

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2011 – 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah posyandu yang aktif semakin meningkat dari 4.642 posyandu pada tahun 2012 menjadi 4.766 posyandu pada tahun 2013 dengan jumlah persentase lebih dari

50% dari keseluruhan jumlah posyandu di masing-masing kabupaten/kota. Cukup tingginya persentase Posyandu aktif di DIY ini cukup berarti signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan balita.

d. PKK Aktif

PKK merupakan sebuah lembaga yang memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Cakupan PKK aktif di DIY pada tahun 2014 menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%) seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7 Persentase PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
Kota Yogyakarta	60	60	100
Kab.Bantul	93	93	100
Kab. Kulon Progo	101	101	100
Kab. Gunungkidul	163	163	100
Kab. Sleman	104	104	100
DIY	1	1	100
Jumlah DIY	522	522	100

Sumber : BPPM DIY, 2014

2.2.1.23 Urusan Statistik

Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data dan informasi statistik yang berkualitas tidak hanya menjadi rujukan bagi pemerintah saja, namun juga bagi kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha, penelitian, evaluasi pembangunan, dan beragam kebutuhan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008, Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program pengembangan statistik daerah.

Program pengembangan statistik daerah dijabarkan dalam 2 kegiatan, yaitu kegiatan Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah dan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Dalam 2 kegiatan tersebut, diantaranya dihasilkan produk DIY Dalam Angka (DDA), Analisis PDRB DIY, dan Data Perencanaan Pembangunan DIY.

Upaya peningkatan kualitas data DIY menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan eksternal yang cukup menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga dalam memberikan data maupun informasi secara jujur. Hal ini menyebabkan kualitas data yang dihasilkan belum optimal. Permasalahan yang lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro.

Sangat disadari juga bahwa Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh para stakeholder. Koordinasi antar instansi yang masih belum optimal, menyebabkan terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Permasalahan penting lainnya adalah belum optimalnya implementasi 4 prinsip dasar dari 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain:

1. National Statistics Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
2. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
3. Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.

4. Kerja sama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

2.2.1.24 Urusan Kearsipan

Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2009, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum arsip dapat pula merupakan rekaman informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan/rekaman aktifitas seseorang, rekaman peristiwa masa lalu, bukti otentik, sumber informasi, memori kolektif, dan bahan pertanggungjawaban nasional. Pengelolaan kearsipan yang berhasil akan menjadi mozaik peradaban masyarakat DIY dalam kancah pergaulan di daerah, nasional maupun di hadapan bangsa lain.

DIY memiliki khasanah arsip yang dapat diakses melalui layanan pencarian khasanah arsip yang dikelola oleh BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta secara online. Materi yang dapat diketahui pengguna layanan ini berupa nomor definitif, kode buku, deskripsi arsip, jumlah lembar arsip, satuan arsip, keterangan arsip, dan sebagainya. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari arsip tanpa perlu datang ke BPAD dimana setelah menemukan arsip yang dicari pengguna dapat mencatat nomor definitif dan kode buku, kemudian baru datang ke BPAD untuk membaca fisik arsipnya.

Dasar pelaksanaan pengelolaan kearsipan di daerah, antara lain UU No. 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan, Permendagri No. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah daerah, Pergub DIY No. 104 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan, Pergub DIY No. 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Sarana Kearsipan Daerah, Pergub DIY No. 109 Tahun 2014 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik.

Selama ini penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan instansi pemerintah kurang optimal. Keterpaduan tatakearsipan di berbagai instansi pemerintah sangat diperlukan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna. Akan tetapi, Pemda DIY berupaya melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan instansi lain melalui sosialisasi dan pendampingan pengelolaan arsip dengan kunjungan-kunjungan monitoring dan evaluasi ke instansi-instansi.

Tabel 2.107 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2014

No	Pengolahan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pengelolaan arsip secara baku	~	~	~	19	20
2	Jumlah arsiparis	~	15	15	15	15

Sumber : BPAD DIY

Pengelolaan arsip statis meliputi: 1). Pengolahan, 2). Alih media, tulisan, dan bahasa. Arsip yang diolah dikelompokkan menjadi 4(empat) kategori yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman, arsip audiovisual.



Gambar 2.65 Tipikal Salinan Arsip Kuno diDIY

Tabel 2.108 Data Pengolahan Arsip Statis Hingga Tahun 2014

No	Pengolahan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Arsip Tekstual	2842	2641	2540	2800	2800
2	Arsip Foto	326	264	474	674	674
3	Arsip Rekaman	0	0	0	0	0
4	Arsip Audiovisual	12	0	0	0	0

Sumber : BPAD DIY

Selama tahun 2014, Pemda DIY melalui BPAD telah mengupayakan akuisisi terhadap arsip-arsip yang sangat bernilai dalam menggambarkan mozaik peradaban masyarakat DIY sejak awal berdirinya. Kegiatan akuisisi dilakukan dengan dua cara yaitu penarikan arsip statis dan reproduksi dengan cara mengkopi/scanning arsip tersebut. Beberapa akuisisi tersebut, antara lain menyangkut arsip lembaga pengairan jaman Hindia Belanda, arsip seniman, arsip pemilu 2004 dan 2009, arsip museum, serta arsip yang berada di Belanda dan Inggris, contohnya seperti register nilai rapor GRM. Dorodjatoen di HBS Harlem, otentifikasi arsip GRM. Dorodjatoen dari Leiden Universiteit Bliothek dan Noord Holland Archief, Serat Jaya Lengka Wulang, Serat Sela Rasa, dan Serat Damar Wulan. Pemda DIY juga telah memperoleh buku berjudul “Indonesian Manuscript in Great Britain” dari British Library.

Tabel 2.109 Data Alih Media Hingga Tahun 2014

No	Pengolahan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Alih Media	7.193	7.193	9.619	11.619	33.939
2	Alih Tulisan	4.295	5.048	5.799	6.549	7.299
3	Alih Bahasa	2.680	3.183	4.208	5.131	6.260

Sumber : BPAD DIY

Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. Penanganan arsip dapat dikategorikan menjadi 3(tiga) meliputi: penanganan arsip tekstual, penanganan arsip kartografi, serta penanganan arsip inaktif foto. Arsip inaktif tekstual adalah informasi yang direkam /dicatat diatas lembaran kertas, seperti surat hasil korespondensi, laporan mingguan, berkas – berkas, arsip inaktif kartografi adalah informasi yang berupa peta. Dalam hal ini tidak termasuk gambar-gambar yang berkaitan dengan kearsitekturan.

Tabel 2.110 Data Alih Media Hingga Tahun 2014

No	Penanganan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Arsip Inaktif Tekstual	35.106	40.219	45.739	50.800	50.800
2	Arsip Inaktif Kartografi	1.568	1.568	2.153	2.691	2.691
3	Arsip Inaktif Foto	11.658	11.758	15.587	39.308	39.308

Sumber : BPAD DIY

Beberapa faktor yang dapat menghambat optimalisasi tata kelola kearsipan: sumberdaya manusia yang baik jumlah maupun kemampuannya yang belum memadai kebutuhan pengelolaan kearsipan, terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program kearsipan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana, kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi organisasi kearsipan. Semua faktor yang dimaksud disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman, perhatian, dan kepedulian para pengambil kebijakan terhadap kearsipan. Masyarakat pun sebenarnya sangat diperlukan kontribusinya untuk pelestarian arsip-arsip pribadi maupun arsip yang berdampak untuk kepentingan umum.

Ada beberapacara / strategi yang dapatditempuh untuk mengoptimalkan pembangunan kearsipan antara lain dengan 1) Perubahan *mindset* dan *culturset* di bidang kearsipan melalui peningkatan sosialisasi, apresiasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, monitoring, dan pengawasan; 2) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap arsip; 3) penguatan kelembagaan kearsipan; 4) regenerasi sumberdaya manusia kearsipan yang berkompetensi dan berdedikasi; 5) peningkatan sarana prasarana kearsipan yang sangat mendukung pelestarian dan pengelolaan kearsipan.

2.2.1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Selama kurun waktu 2008-2012, jumlah sambungan telepon di DIY mengalami kenaikan untuk tahun 2008 sebanyak 379.648 menjadi sebanyak 452.565 pada tahun 2011. Sementara itu, kondisi tahun 2012 terdapat 134.849 jumlah sambungan telepon di DIY mengalami penurunan sebesar 70,20% dibandingkan dengan tahun 2011. Dari jumlah sambungan telepon di DIY tersebut 100% merupakan *wireline*.

Tabel 2.111 Jumlah Sambungan Telepon di DIY Tahun 2007-2012

Jenis	2008	2009	2010	2011	2012
WIRELINE	122.664	122.563	123.081	134.849	139.777
Kulon Progo	2.340	2.372	2.412	2.631	2.700
Bantul	4.134	4.085	4.261	5.940	6.234
Gunungkidul	3.276	3.286	3.356	3.553	3.577
Sleman	18.081	17.894	17.926	21.611	22.534
Yogyakarta	94.833	94.926	95.126	101.114	104.732
CDMA	316.769	328.621	329.484	--	371.673
Pasca bayar	31.439	32.074	31.864	--	15.644
Pra Bayar	285.330	296.547	297.620	--	356.029
DIY	439.433	451.184	452.565	134.849	511.450

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Rasio warnet atau rasio ketersediaan warnet adalah jumlah warnet per 1000 penduduk. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Semakin besar rasio warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.112 jumlah Warnet di DIY Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Warnet	166	168	322	500

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi DIY

Jumlah warnet di DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena bisnis warnet menjadi bisnis yang menjanjikan ditengah kemajuan jaman yang menuntut setiap orang untuk menggunakan jasa internet dalam mempermudah komunikasi maupun pendukung kegiatan lainnya.

Perkembangan jumlah sarana komunikasi di DIY dari tahun 2008 hingga 2012 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Sarana komunikasi yang ada berupa media cetak, stasiun radio, dan stasiun TV. Pada tahun 2012, di DIY tercatat jumlah media cetak sebanyak 30, stasiun radio sebanyak 57, dan stasiun TV sebanyak 4 sedangkan jumlah wartawan terdaftar sebanyak 250 orang.

Tabel 2.113 Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY Tahun 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Media Cetak	30	30	30	30	30
Stasiun Radio	57	57	57	57	57
Stasiun TV	4	4	4	4	4
Wartawan Terdaftar	250	250	250	250	250

Sumber : DDA 2013, BPS Provinsi DIY Tahun 2012

2.2.1.26 Urusan Perpustakaan

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia belum merupakan budaya di masyarakat karena baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan IEA- *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca.

Padahal Alvin dan Heidi Toffler dalam “*Future Shock*” (1970) dan “*The Third Wave*” (1980), mengungkapkan bahwa perubahan peradaban masyarakat di dunia berlangsung dengan cepatnya pada masa gelombang peradaban ke tiga yang mana mobilitas informasi berlangsung sangat cepat daripada mobilitas barang dan manusia dengan didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradabannya melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan asset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa bibliofil adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi icon peradaban baru dan Rennaisans Yogyakarta . Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya.

Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, Perpustakaan Wilayah Unit Badran berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram 4 yang diutamakan koleksi ilmiah, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perpustakaan utama memberikan layanan sirkulasi, ruang baca, referensi, koleksi UT, koleksi langka, bimbingan pembaca, ekstensi (keliling), warintek dan internet, deposit, paket buku. Jogja Learning Park menjadi salah satu layanan di sana yang mengandalkan ruang-ruang belajar di luar ruang, berupa gazebo-gazebo dengan layanan internet.

Perkembangan perpustakaan di DIY tergolong baik selain jumlahnya cenderung meningkat juga beragam jenisnya. Hingga tahun 2013 DIY telah memiliki 3.322 perpustakaan dari 3.240 buah pada tahun 2012. Penghitungan tersebut belum memperhitungkan perpustakaan perguruan tinggi baik di tingkat pusat, fakultas maupun jurusan atau program studi.

Tabel 2.114 Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya

Jenis Perpustakaan		2012	DIY						Jumlah Total
			KP	Btl	GK	Slmn	Kota Yk	DIY	
1	Desa	322	71	60	110	66	45	N/A	352
2	Umum	6	1	1	1	1	1	1	6
3	Departemen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Sekolah								
	SD	2009	376	372	562	515	184	N/A	2 009
	SLTP	505	78	107	135	121	64	N/A	505
	SLTA	398	55	79	74	109	81	N/A	398
	PT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Keliling	N/A	3	5	3	2	1	5	19
6	Internet	N/A	3	5	10	8	4	3	33
	Jumlah	3.240	587	629	895	822	380	9	3 322

Sumber : BPS DIY, 2014, p.236, disesuaikan dengan data BPAD DIY

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki 380 perpustakaan desa atau 86,76 % dari 438 desa/kelurahan.

Tabel 2.115 Persentase Perpustakaan Desa Tiap-tiap Kabupaten/Kota Hingga Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Perpustakaan Desa					
			2012	% per kab/kota	2013	% per kab/kota	2014	% per kab/kota
1	Kota Yogyakarta	45	43	95,56	45	100	45	83,72
2	Bantul	75	51	68,00	60	80,00	66	86,76
3	Gunungkidul	144	106	73,61	110	76,39	120	83,72
4	Kulon Progo	88	67	76,14	71	80,68	77	86,76
5	Sleman	86	55	63,95	66	76,74	72	83,72
	Jumlah	438	322	73,52	352	80,37	380	86,76

Sumber : BPAD DIY, 2015

Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakin beragam dan memiliki keunikan.

Tabel 2.116 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Kunjungan	Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani	Rata-rata kunjungan setiap orang
2010	194.118	3 000	65
2011	194.116	2 750	70
2012	201.881	2 500	81
2013	662.196	3 000	243
2014	702.270	2.500	245

Sumber :BPAD DIY, 2015

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga mampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2014, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut :

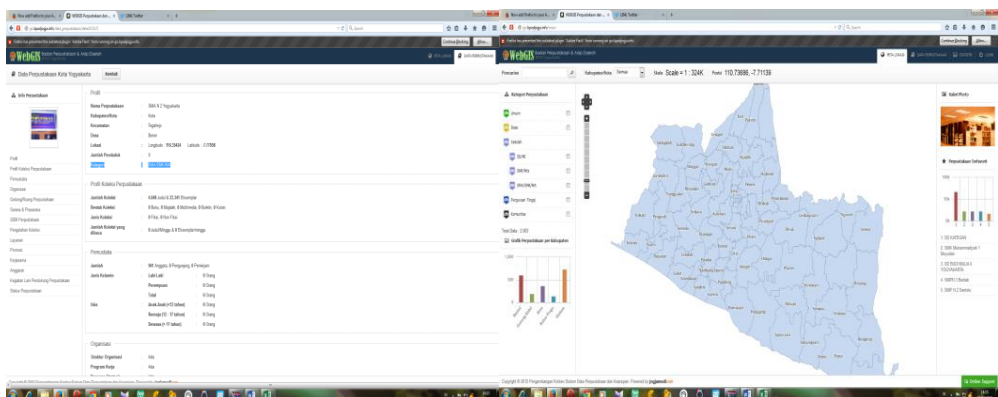
Tabel 2.117 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah
2010	154.355	332.746
2011	179.609	367.095

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah
2012	191.988	388.484
2013	169.683	381.371
2014	169.683	387.541

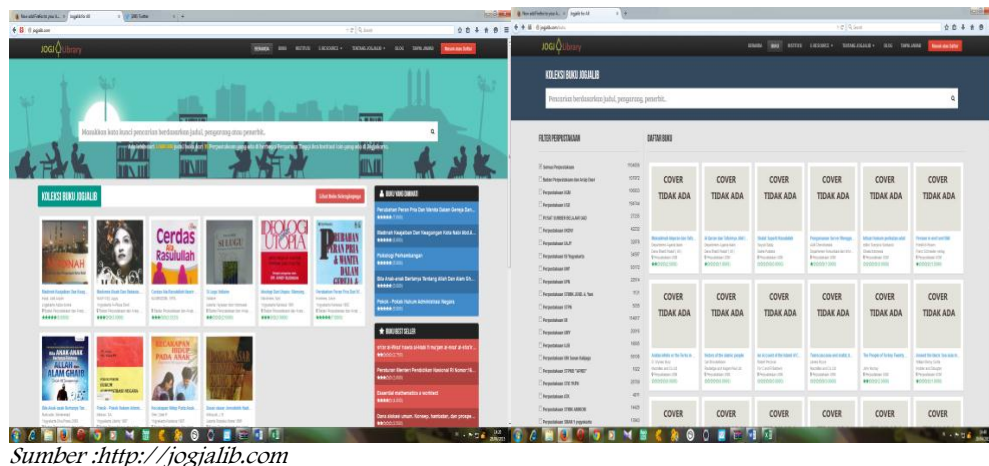
Sumber : BPAD DIY, 2015

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah *Center of Excellence*, *Kyoto Corner*, *Yogyasiana*, *Pustaka Nusantara*, *Jogja Library for Allyang* memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, Radio Frequency Identification (RFID), *Jogja Library for All*, *Webgis*, *Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital* dan lainnya. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara perlahan.



Sumber : <http://gis.bpadjogja.info/main>

Gambar 2.66 GIS Perpustakaan DIY



Gambar 2.67 Aplikasi Jogja Library For All

Jogja Library for All (JLA) sebagai salah satu bentuk layanan digital merupakan sebuah aplikasi dimana data katalog bukunya bersumber pada 35 Perpustakaan di Jogja sehingga muatan informasi sangat banyak. Berbagai macam informasi dari mulai pendidikan, teknologi, sosial budaya semua ada di aplikasi jogjalib sehingga masyarakat pada umumnya bisa menjadikan acuan portal informasi jogja tentang pendidikan maupun ilmu pengetahuan yang lain yang mulai dirintis sejak tahun 2006. Awalnya mencakup 18 perpustakaan perguruan tinggi hingga saat ini menjadi sekitar 35 perpustakaan yaitu seperti UGM, UNY, UII, ISI, USD, UAD, UKDW, UMY, UIN Sunan Kalijaga, STMIK Amikom. Biaya pendaftaran, masuk dan baca bagi anggota silang layanan Jogjalib menjangkau semua lapisan masyarakat, layanan internet lebih cepat dan mudah terakses. Bagi Mahasiswa yang institusi pendidikannya tergabung dalam anggota Jogjalib, maka persetujuan untuk menjadi member sangatlah mudah dan cepat dikarenakan setiap anggota Jogjalib mempunyai hak akses untuk melakukan persetujuan member melalui account admin universitas/sekolah tinggi/sekolah menengah atas di jogjalib. Pemustaka dapat memanfaatkan sumber informasi Jogja Library for All, memanfaatkan sarana, prasarana dan akses informasi Perpustakaan Unit. Kartu Anggota Jogja Library for All tidak dapat digunakan untuk meminjam buku, hanya sebagai kartu pass/kunjungan perpustakaan.

Jogja Library Center yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyakarta yang berupa dokumen-dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, Compact Disc, VCD, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC

merupakan juga peninggalan bersejarah (*heritage*). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan wifi area, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellent*, *Kyoto Corner*, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.



Gambar 2.68 Jogja Library Center di Ruas Jalan Malioboro Nomor 175

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

Bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto adalah Kyoto Corner (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar.

Rumah belajar modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya akan dikembangkan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Bantul antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain diarena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran

pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan, ceramah.

Gedung Perpustakaan yang menyediakan satu kesatuan pelayanan yang terpadu untuk layanan perpustakaan, perkantoran, depo arsip, sehingga menjadi pusat referensi daerah dan rumah belajar modern yang representatif di daerah sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Kualitas layanan perpustakaan terpadu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan (UU 43 Tahun 2007 Pasal 29 ayat1). Optimalisasi fungsi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah sangat mendukung internasionalisasi perpustakaan.



Gambar 2.69 Perpustakaan Jogja Expo Center

Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa the International Publishers Association (IPA), the International Booksellers Federation (IBF), the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) menetapkan ibukota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Kota-kota yang pernah menjadi Ibu kota Buku Dunia berturut-turut adalah: Madrid (Spanyol-Eropa) tahun 2001 (23 April 2001 sampai dengan 22 April 2002), Alexandria (Mesir-Afrika) tahun 2002, New Delhi (India-Asia) tahun 2003, Antwerp (Belgia-Eropa) tahun 2004, Montreal (Kanada-Amerika) tahun 2005, Turin (Italia-Eropa) tahun 2006 (23 April 2006 sampai dengan 22 April 2007), giliran berikutnya yaitu Bogota (Colombia-

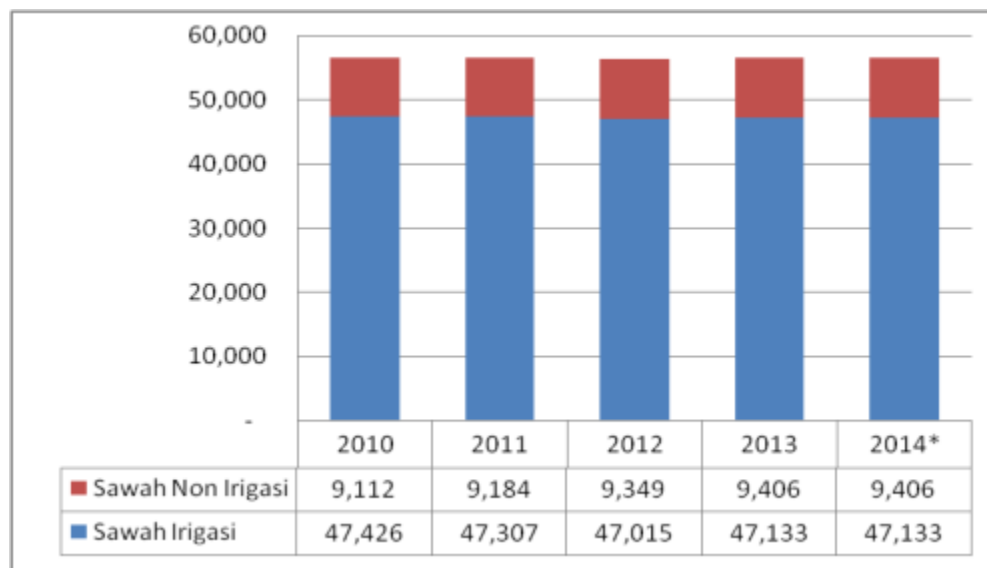
Amerika) tahun 2007, Amsterdam (Belanda-Eropa) tahun 2008, Beirut-Libanon (2009), Ljubljana-Slovenia (2010) Buenos Aires, Argentina (2011), Yerevan-Armenia(2012), Bangkok-Thailand (2013), Port Harcourt-Nigeria (2014), Incheon-Korea (2015). Sebutan Ibukota Buku Dunia ini dipilih dan ditetapkan berdasarkan program dan peran kota-kota yang dinominasikan dalam usaha mereka memandang dan menjadikan peran penting buku dandalam rangka mengupayakan minat membaca di kota-kota tersebut Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.2.2.1 Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan basis sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian DIY. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY yang menempati posisi ketiga setelah sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa.

Kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2008 - 2012. Hal ini diakibatkan adanya kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan laju 0,31% per tahun selama kurun waktu 2010-2014. Alih fungsi lahan itu lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Namun pada tahun 2013 luas lahan pertanian mengalami peningkatan luas wilayah menjadi 47.133 Ha. Hal ini terjadi dikarenakan adanya cetak sawah baru di Kabupaten Sleman. Akan tetapi fakta penurunan luas wilayah pertanian tetap merupakan tantangan cukup berarti dalam pembangunan sektor pertanian ke depan, yang juga dibayang-bayangi dengan problem semakin rendahnya kualitas & kuantitas SDM produktif, harga yang tidak stabil, anomaly iklim, dan skema jejaring pasar yang tidak berpihak pada petani.



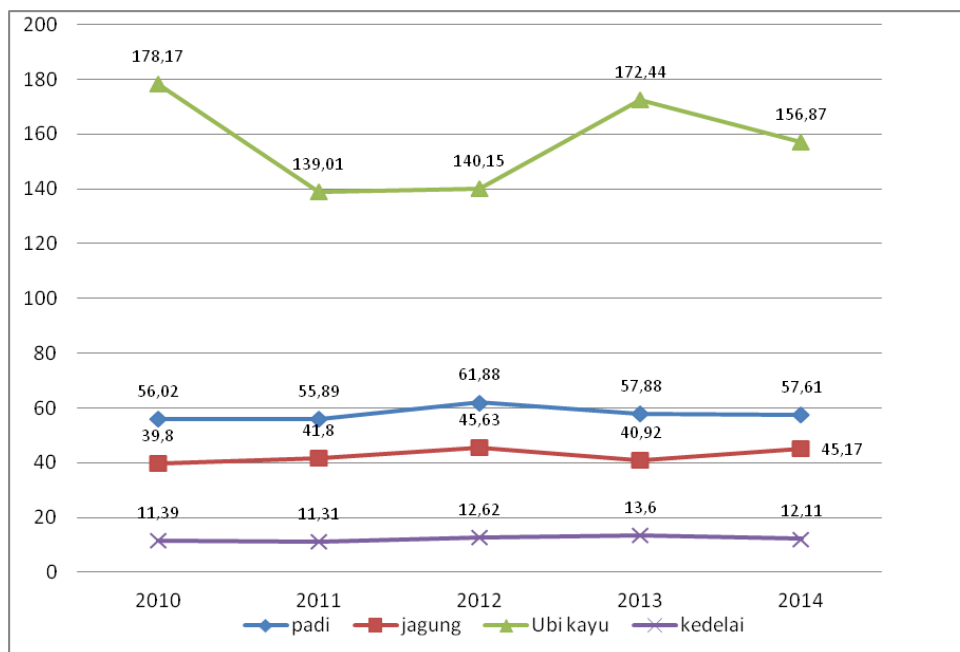
Sumber: analisa data Dinas Pertanian DIY *) angka sementara

Gambar 2.70 Grafik Luas Sawah di DIY Tahun 2010-2014

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaissans pangan yang berintegrasi dengan strategi renaissans ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sektor tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Data menunjukkan produktifitas sub sektor tanaman pangan di DIY mempunyai capaian yang cukup tinggi, terutama komoditas padi. Capaian produktifitas komoditas padi bahkan berada di atas rerata nasional hal ini dikarenakan keberhasilan DIY dalam penerapan teknologi pertanian. Produktifitas tinggi juga ditemui pada komoditas ubi kayu dan jagung. Luasan lahan kering yang cukup dominan di DIY terutama di Kabupaten Gunungkidul menjadikan produksi ubi kayu dan jagung berkembang cukup baik dan memberikan hasil yang sangat tinggi bagi DIY. Namun dalam kurun waktu 2013-2014 produktivitas ubi kayu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan peralihan lahan tanam dari ubi

kayu ke jagung. Produktivitas komoditas tanaman pangan unggulan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



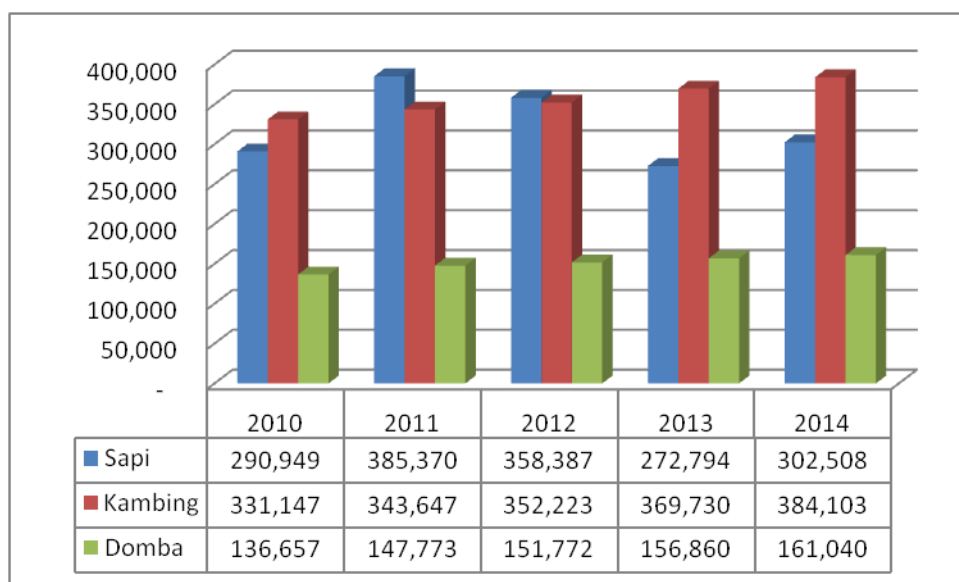
Sumber: Analisa Data BPS Provinsi DIY

Gambar 2.71 Grafik Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu di DIY Tahun 2010-2014

Wilayah DIY juga merupakan sentra tanaman sayuran terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai besar. Kedua komoditas tersebut memiliki luasan panen terluas dari total 16 komoditas sayuran di DIY atau memiliki besaran areal sebesar 57% pada tahun 2012. Untuk bawang merah sebagian besar menjadi komoditas unggulan daerah Bantul (67%) dan Kulon Progo (26%). Sedangkan untuk komoditas cabe besar menjadi sentra pada wilayah Kulonprogo (53.48%) dan Sleman (25.68%). Peningkatan produktifitas yang berpengaruh pada peningkatan produksi menunjukkan bahwa aspek teknis budidaya komoditas tanaman sayuran senantiasa mengalami peningkatan dengan dukungan lahan yang subur, ketinggian yang memadai, pengairan yang cukup, dan iklim/temperatur yang cocok. Salah satu problem dalam pengembangan komoditas sayuran adalah fenomena anomaly iklim, yang mengakibatkan tingkat cekaman yang tinggi dan munculnya hama penyakit serta turunnya harga akibat dari kualitas panen yang buruk.

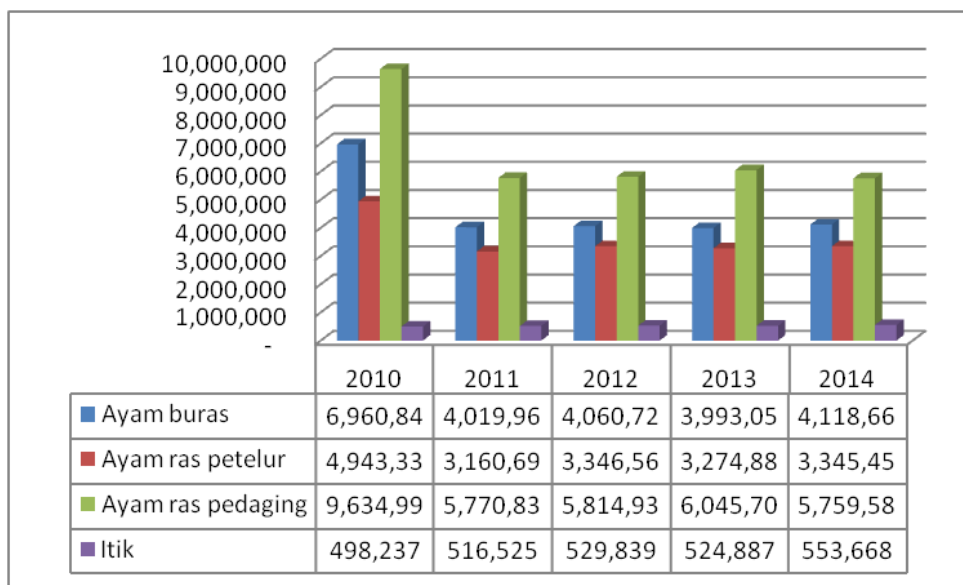
Adapun potensi komoditas buah-buahan dijumpai pada semua kabupaten/kota di DIY. Sekurangnya terdapat 20 komoditas buah-buahan yang dibudidayakan pada wilayah DIY. Sebagaimana komoditas sayuran, sebagian besar komoditas buah-buahan banyak dijumpai pada Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Tiga besar produksi buah-buahan di DIY pada tahun 2012, secara berturut-turut diantaranya adalah : pisang (193.861 ton), mangga (35.858 ton), dan salak (31.955 ton). Komoditas salak merupakan andalan pada Kabupaten Sleman dan buah pisang menjadi tanaman andalan bagi Kabupaten Kulonprogo.

Sementara itu, untuk sub sektor peternakan, wilayah DIY memiliki sebaran ternak besar maupun kecil pada sejumlah kabupaten dan kota. Untuk ternak besar pada wilayah DIY, sebagian besar atau 98% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Konsentrasi sapi potong dan kambing pada wilayah DIY didominasi pada Kabupaten Gunungkidul. Selama kurun waktu 2013 - 2014, populasi ternak sapi potong di DIY mengalami peningkatan setelah sebelumnya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan mulai seimbangnya antara pengeluaran dan pemotongan ternak sapi potong di DIY dengan pemasukan ternak sapi potong ke DIY. Sementara itu, populasi ternak unggas di DIY cenderung meningkat, terutama untuk ayam kampung dan ayam ras yang populasinya banyak ditemui pada Kabupaten Sleman.



Sumber : Dinas Pertanian DIY 2014

Gambar 2.72 Grafik Populasi Sapi Potong, Kambing, Domba di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Pertanian DIY 2014

Gambar 2.73 Grafik Populasi Unggas di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2010-2014

2.2.2.2 Urusan Kehutanan

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2014 seluas 94,871.51Ha (analisa data Dishutbun DIY). Dari luas tersebut, 76.156,45 ha merupakan hutan rakyat (sangat dominan) dan sisanya 18.715,06 Ha merupakan hutan negara. Keberadaan wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY, sangat dominan ditemui pada wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki peran sebagai wilayah hulu dari DAS Opak (sub DAS Oya). Luasan hutan pada Kabupaten Gunungkidul sebesar 56.849,43 Ha, terdiri dari 41.953,93 Ha (hutan rakyat) dan 18.715,06 ha (hutan negara, termasuk hutan AB). Luasan hutan di Kabupaten Gunungkidul sangat strategis karena memiliki proporsi dominan sebesar 62,47 % dari luas hutan total di DIY, dengan segenap persoalannya, seperti : adanya lahan kritis, ancaman pencurian hasil hutan, potensi bencana alam, dan ancaman kebakaran hutan.

Tabel 2.118 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2014

Kabupaten	Hutan Negara (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Total Hutan (Ha)	% Total hutan
Gunungkidul	14.895,50	41.953,93	56.849,43	60,58
Bantul	1.052,60	8.570,00	9.622,60	10,25
Sleman	1.729,46	4.418,69	6.148,15	6,55
Kulonprogo	1.037,50	20.177,69	21.215,19	22,62
HUTAN di DIY	18.715,06	76.156,45	94,871.51	100,00

Sumber : analisa data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2014 angka sementara

Berdasarkan wilayah administrasi kehutanan, kawasan hutan negara tersebar pada 4 wilayah yaitu Kabupaten Gunungkidul seluas 14.895,50 Ha (ditambah 1.773 ha sebagai wilayah hutan AB), Kabupaten Bantul 1.052,60 Ha, Kabupaten Sleman 1.729,46 ha dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,50 Ha. Sedangkan berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas : hutan produksi 13.411,70 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain karena dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Problem pengembangan tanaman kayu putih di DIY adalah produktifitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat setempat dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.119 Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2009-2013

Tahun	Produksi daun (ton)	Produksi MKP (liter)	Nilai Penjualan (Rp.)
2009	4,300.00	41,082.60	4,050,406,200.00
2010	4,800.00	43,352.00	5,028,309,000.00
2011	4,950.00	44,957.00	6,110,306,400.00
2012	4,794.48	46,321.00	7,581,090,000.00
2013	4,743.77	44,669.00	7,330,657,000.00

Sumber : Analisa data Dishutbun DIY, Tahun 2014

Luas lahan kritis di DIY pada tahun 2014 adalah 25.789,75 Ha, melebihi target pada tahun 2014 seluas 27.000 Ha. Hal ini dikarenakan tingkat rehabilitasi hutan di DIY meningkat sebesar 0,09%.

Wilayah DIY yang memiliki luasan lahan kering dengan kontur yang bergelombang (berbukit/bergunung) menunjukkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya : kelapa, kakao, kopi, tembakau, tebu, dan seterusnya. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut, memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

Tabel 2.120 Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY Tahun 2010-2014

Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)	2010	2011	2012	2013	2014*)
Kelapa	42,939.27	42,903.95	43,371.38	43,815.39	39.510,00
Kakao	4,618.81	4,693.39	4,811.00	5,012.15	4.510,85
Kopi	1,371.98	1,407.44	1,778.84	1,725.92	1.568,31
Tembakau	1,731.50	2,154.86	2,209.52	2,310.90	1.372,50
Tebu	3,476.29	3,620.60	3,613.13	3,602.66	3.515,00

Sumber: analisa data Dishutbun DIY & BPS Provinsi DIY. *) Angka Sementara

Untuk itu, desain agribisnis perkebunan yang berdaya saing dengan nilai tambah yang berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, perbaikan o55produktifitas dan penanganan mutu produk yang dihasilkan, focus pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah, dan upaya pemasaran hasil yang memadai melalui branding yang tepat, serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis yang memadai.

Efisiensi usaha tani dalam rangka penguatan desain agribisnis diharapkan dapat tercapai apabila produksi yang optimal dapat diimbangi dengan biaya produksi yang efisien. Pemanfaatan peluang pasar yang baik bisa dicapai melalui penanganan pengolahan hasil melalui integrasi nilai tambah yang sesuai dengan selera pasar, penguatan system informasi, dan branding produk yang berkelanjutan. Harapannya, aspek keterbatasan yang dimiliki DIY, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di DIY, maka

langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk mampu memenuhi permintaan dan selera pasar.

2.2.2.3 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Ratio elektrifikasi DIY pada tahun 2012 tercapai 76,80%, meningkat sebesar 0,59% dari tahun 2011 (DPU-P dan ESDM, 2013). Pada tahun 2012, jumlah Rumah tangga tercatat 1.037.976 RT, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2012, dapat dilaksanakan penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 225 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,023% dari target sebesar 0,015 %. Sedangkan melalui dana APBN jumlah rumah tangga berlistrik meningkat sebanyak 5.851 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,564%. Sasaran bagi intervensi program ini adalah 238 dusun yang sebagian besar rumah tangga nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2013, dapat dilakukan penambahan RT berlistrik sebanyak 955 RT, sedangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Sleman tahun 2013 dapat dilakukan penambahan RT berlistrik sebanyak 189 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,107%. Melalui dana APBN 2013, jumlah RT yang dapat dilistriki sebanyak 39.674 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 3,695%. Sehingga total pencapaian ratio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2013 mencapai 80,6% dari target sebesar 77,4%.

Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2012 sebesar 47 kW, sehingga total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 629,35 kW. Angka ini meningkat 0,47% dari target sebesar 0,30% dari angka di tahun 2011 dengan total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan baru sebesar 582,35 kW dari total potensi 10.000 kW. (10 MW). Capaian pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY pada tahun 2013 yang diperoleh dari tenaga air sebesar 630 kW atau 8.674,84 SBM, tenaga surya 37 unit atau setara dengan 101,89 SBM, biogas sebanyak 82 unit atau mencapai 262,91 SBM, tenaga hybrid surya dan angin 20 kW atau sama dengan 275,39 SBM. Total dari keseluruhan program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2013 telah dicapai penyediaan EBT sebesar 114.035,02 SBM dari target sebesar 107.790 SBM.

Kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi dilakukan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi

Energi. Program ini bertujuan untuk melakukan implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

Sampai dengan tahun 2013, target pelaksanaan konservasi energi melalui audit energi di DIY sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah) dari 150 gedung pemerintah DIY. Dari pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2013, Pemda DIY yang didukung oleh APBN telah melakukan audit energi di Dinas PUP-ESDM DIY Bumijo, Gedung Setda Kota Yogyakarta; Balai IPAL Sewon, Bantul; Rumah Sakit Ghrasia, Pakem, Sleman dan PD Tarumartani.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, pemenuhan air baku di daerah sulit air tercapai sebesar 6% sesuai target kinerja tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 6%, salah satunya dicapai melalui pembangunan sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air. Sampai dengan tahun 2013, sudah terbangun sumur bor di 15 lokasi dari total 46 lokasi daerah sulit air.

Produksi dari 7 (tujuh) mineral non logam dan batuan pada tahun 2012 yang banyak diusahakan di DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 741.783 m³, batu gamping/kapur dengan produksi 146 m³, tanah liat dengan produksi 789 m³, andesit dengan produksi 109.280 m³, zeolit dengan produksi 350 m³, breksi batuapung dengan produksi 600 m³, dan tanah urug dengan produksi 70.463 m³. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012, total peningkatan nilai produksi bahan galiandari 7 mineral non logam dan batuan sebesar 551,39 juta Rupiah atau meningkat 1,84 % dari target yang hanya sebesar 0,37 %. Pada tahun 2013, Pemda DIY melakukan peningkatan nilai tambah komoditas tambang batu andesit 1 (satu) lokasi di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo sehingga kinerja pengelolaan usaha pertambangan di tahun 2013 mencapai sebesar 9%.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar pada tahun 2012, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 504.632 KL atau 99,7% dari kuota, solar 130.527 KL atau 108,8% dari kuota, serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 61.961,06 Ton atau 102,8% dari kuota. Kuota solar untuk tahun 2013 di DIY adalah sebesar 126.166 KL atau menurun sebesar 3% dari kuota di 2012, sedangkan untuk premium kuota naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya atau sebesar 521.374 KL. Kelancaran distribusi Bahan Bakar Bersubsidi didukung melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, Kabupaten/Kota, PT. Pertamina (Persero), dan HISWANA MIGAS DIY.

Pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 93 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi melalui 43 agen anggota

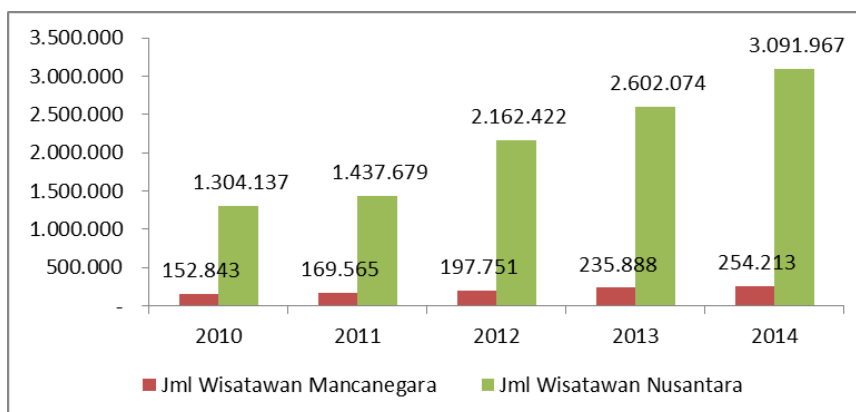
Hiswana Migas DIY beserta 3.130 pangkalannya. Dari keseluruhan penyalur bahan bakar bersubsidi tersebut, terdapat 600 penyalur yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya.

Upaya peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi. Sampai tahun 2012 telah dilakukan pembinaan terhadap 180 penyalur (30%). Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap 90 penyalur yang kinerja kelancaran distribusinya belum optimal, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan peningkatan kelancaran distribusi terhadap 270 penyalur (45%).

2.2.2.4 Urusan Pariwisata

Selaras dengan visi pembangunan jangka panjang DIY, sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama pembangunan DIY. Pariwisata memberikan andil besar dalam memacu pertumbuhan perekonomian DIY. Kegiatan sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Selain itu diharapkan secara langsung sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha, dan pengentasan kemiskinan.

Jumlah wisatawan yang datang ke DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Jumlah Wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 3.346.180 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara 3.091.967 orang dan wisatawan mancanegara 254.213 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah Belanda, Jepang, Malaysia Perancis, dan Singapura.



Gambar 2.74 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY

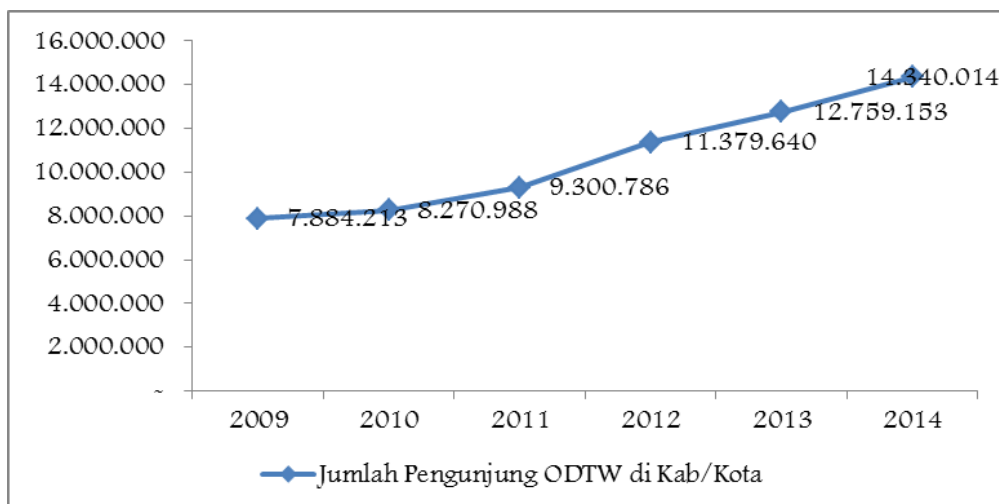
Lama tinggal wisatawan di DIY pada tahun 2014 masih belum meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai masih belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pendeknya lama tinggal wisatawan diantaranya adalah perkembangan destinasi wisata yang stagnan dan kecenderungan wisatawan di DIY adalah wisatawan yang memanfaatkan libur pendek akhir pekan (weekend).

Tabel 2.121 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,94	1,98	1,82	1,90	1.95
lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,70	1,72	1,56	1,59	1.58

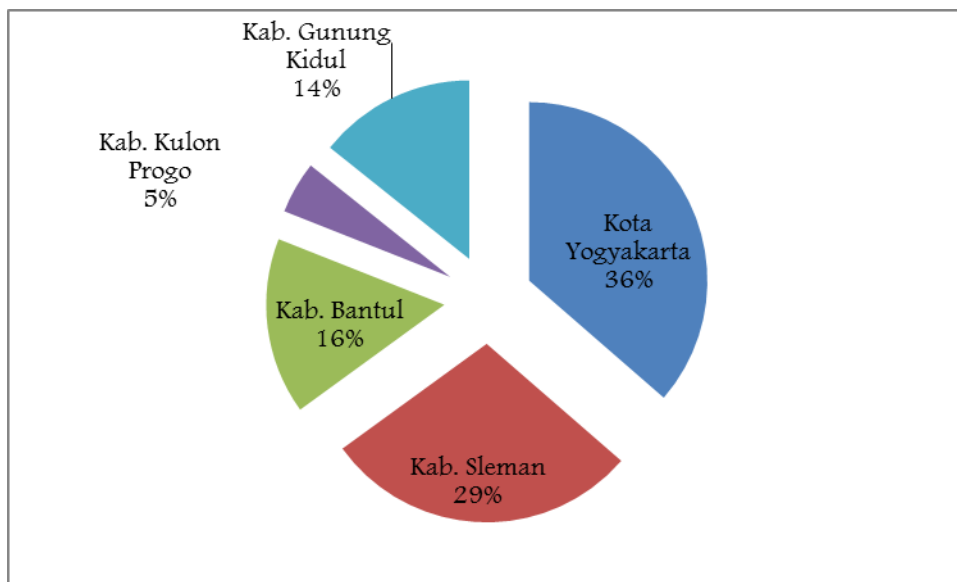
Sumber: Dinas Pariwisata DIY

Pola kunjungan wisatawan di DIY cenderung mengikutipola liburan hari raya dan sekolah. Selain itu kunjungan wisatawan yang masih terpusat di wilayah perkotaan. Pola tersebut mengakibatkan beban yang tinggi atas penggunaan fasilitas umum dan infrastruktur penunjang pada puncak-puncak musim liburan terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu perlu adanya pengembangan daya tarik wisata terutama di wilayah kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul agar kunjungan wisatawan lebih dapat merata.



Gambar 2.75 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Kab/kota, pada tahun 2014 peningkatan sebesar 31% jika dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 12.759.153 orang, sementara untuk tahun 2014 berhasil dicapai 16.774.235 orang pengunjung. Peningkatan tersebut tidak jauh berbeda dengan kinerja peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan wisatawan yang datang ke DTW wilayah DIY mulai mengalami kejenuhan terhadap daya tarik wisata yang ada. Pertumbuhan pariwisata DIY yang sebelumnya didorong dari peningkatan penyelenggaraan Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE) pada tahun 2014 diperkirakan mengalami penurunan jumlah kegiatan MICE terkait pembatasan kegiatan pertemuan di Hotel. Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya peningkatan batas bawah tarif pesawat yang dimungkinkan berdampak pada melambatnya pertumbuhan kunjungan wisatawan di DIY.



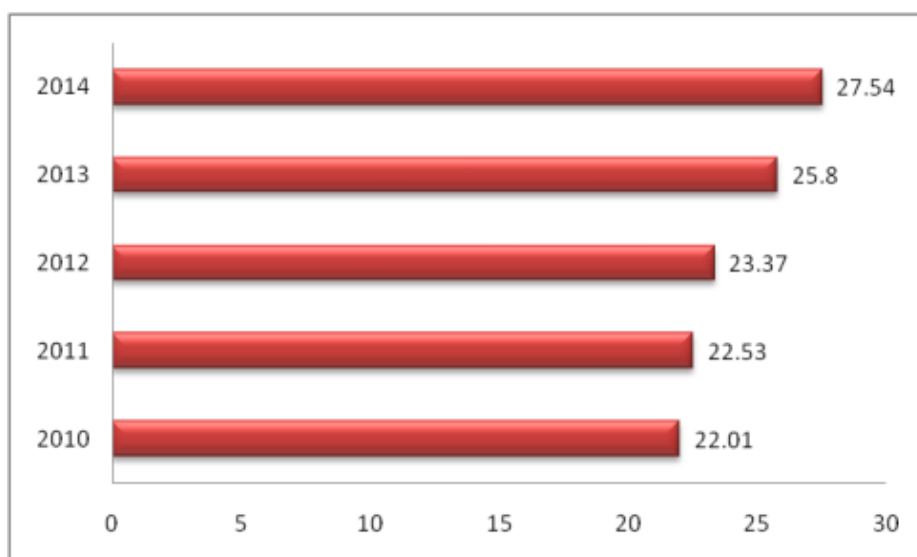
Gambar 2.76 Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten/Kota

Ke depan pembangunan kepariwisataan harus mengoptimalkan pariwisata berbasis pariwisata minat khusus dan komunitas. Selain itu dalam pembangunan kepariwisataan harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dan melibatkan semua pemangku kepentingan baik masyarakat, swasta dan lintas instansi pemerintah itu sendiri. Beberapa tantangan di antaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan dan hotel bintang

yang tersebar di Kab/kota. Sekitar 65% lebih pengunjung daya tarik wisata terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas. Dengan demikian diperlukan akselerasi program/kegiatan di wilayah seperti Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul. Selain pembangunan sarana fisik, perlu diperhatikan juga implementasi Sapta Pesona (keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramah tamahan dan cinderamata) oleh pelaku usaha pariwisata sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima pada wisatawan.

2.2.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani dari ikan, dapat dilihat dengan adanya peningkatan ketersediaan ikan per kapita untuk dikonsumsi dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan per kapita DIY selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus bertumbuh walaupun masih disertai dengan adanya pasokan ikan yang masuk ke wilayah DIY dari luar daerah. Meningkatnya jumlah konsumsi ikan perkapita disebabkan atas kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan protein dari ikan, hal ini dipengaruhi juga dengan suksesnya kampanye gemarikan dari pemda DIY. Konsumsi ikan perkapita di DIY tahun 2014 adalah sebesar 17.16 melebihi target Pemda DIY sebesar 14.91. Sedangkan tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



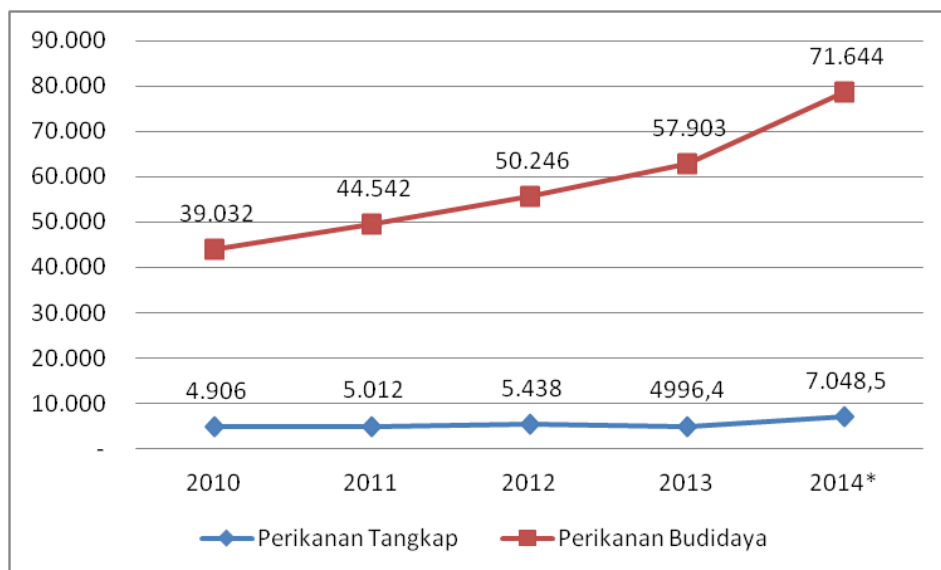
Sumber : Data Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Tahun 2014

Gambar 2.77 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2010-2014

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2010-2014 rata-rata tumbuh sebesar 28,11%.

Produksi perikanan di DIY didominasi oleh perikanan budidaya. Rata-rata kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY selama lima tahun terakhir mencapai 88,14%, bahkan pada tahun 2014 mencapai 91,04%, hal ini dikarenakan keberhasilan budidaya perikanan air tawar khususnya di kabupaten Sleman yang selama ini menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Sementara kontribusi perikanan tangkap cenderung menurun dari 10,68% pada tahun 2010 menjadi 8,96% pada tahun 2014. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan sering terjadinya *over fishing* dan *illegal fishing* serta belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap ditambah dengan etos kerja nelayan tangkap DIY masih rendah bila dibandingkan dengan nelayan dari daerah lain. Namun demikian, faktor cuaca adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY dikarenakan menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan melaut.

Untuk mengetahui pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah) *) Angka Sementara

Gambar 2.78 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2010-2014

2.2.2.6 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memberikan andil yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY selama tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada perkembangan ekspor. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2014 tercatat 233,25 Juta US\$. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit (stk), stk sintetis dan kerajinan kulit. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama pada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia dan Korea Selatan.

Tabel 2.122 Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Volume (Juta kg)	35	27	33,54	34,03	57,51
Nilai (Juta US \$)	140	144	177,07	211,76	233,25
Komoditi	116	102	108	127	166
Negara	93	87	98	111	114
Eksporir	251	208	235	286	310

Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2014

Sementara itu, perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri tercatat pada tahun 2009-2014 secara umum mengalami perkembangan positif, yaitu terlihat dari perkembangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan jumlah pasar di DIY. Realisasi jumlah penerbitan SIUP sepanjang tahun 2014 sebanyak 1.393 buah, sehingga jumlah kumulatif menjadi 46.855 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh perusahaan mikro dan kecil sebesar 91%

Tabel 2.123 Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP Yang Terdaftar di DIY Tahun 2010-2014

No	Golongan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pengusaha Besar	910	988	1.040	1.057	1.607
2	Pengusaha Menengah	1.820	1.999	2.316	2.629	2.717
3	Pengusaha Kecil	35.298	36.607	38.589	40.132	40.710
4	Pengusaha Mikro			872	1.644	1.821
	Jumlah	38,612	39.594	42.817	45.462	46.855

Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2014

Perkembangan sektor perdagangan DIY, didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana perdagangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun 2014 sejumlah 416 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 361 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian. Peningkatan kapasitas pelaku usaha serata sarana penunjang di pasar-pasar tradisional diperlukan agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tidak ditinggalkan pembeli.

Tabel 2.124 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional Tahun 2009-2014

Jenis Toko	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Toko Modern	288	350	405	405	416	416
Pasar Tradisional	338	336	308	308	333	333
Jumlah	626	686	713	713	749	749

Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2014

2.2.2.7 Urusan Industri

Kontribusi sektor industri pengolahan pada struktur PDRB DIY mencapai 14,32% . Dengan kontribusi sebesar itu, sektor Industri urutan ke tiga setelah sektor Jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran. Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah unit usaha hingga tahun 2014 sebesar 86.087 IKM.

Jumlah IKM mengalami pertumbuhan yang positif dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah IKM meningkat sebesar 2.2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.8% dari sebesar 310.173 pada tahun 2013 menjadi 318.858 orang pada tahun 2014.

Tabel 2.125 Perkembangan IKM di DIY Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Unit Usaha	78.122	80.056	81.523	84.234	86.087
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	292.625	295.461	300.539	310.173	318.858
Nilai Investasi (Rp Milyar)	878.063	1.003.678	1.010.585	1.064.180	1.151.443
Nilai Produksi (Rp Milyar)	2.821.218	3.053.031	3.199.224	3.294.485	3.399.909
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Milyar)	1.358.293	1.352.479	1.388.023	1.449.435	1.524.806

Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2014

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (output) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (input). Pada tahun 2014 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp. 1.542.806 Milyar. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp. 3.399.909 Milyar. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp. 1.875.103 Milyar pada tahun 2014. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 5,9% dibandingkan dengan tahun 2013.

Perkembangan indikator kinerja sektor industri yang cukup positif tersebut harus dapat dimanfaatkan terlebih dengan adanya momentum diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Terbukanya pasar perdagangan bebas di ASEAN menjadi tantangan bagi DIY mengingat tidak ada lagi hambatan tarif bagi perdagangan antar negara di ASEAN. Dengan demikian, peluang ekspor DIY mestinya semakin meningkat. Namun demikian, peredaran produk-produk asing juga akan meningkat di pasar domestik DIY. Untuk itu perlu dioptimalkan kembali program-program terutama terkait dengan peningkatan daya saing produk seperti penjaminan mutu, sertifikasi dan standarisasi sehingga pasar memiliki preferensi untuk memilih produk-produk berkualitas dari DIY.

2.2.2.8 Urusan Ketransmigrasian

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah.

Dengan demikian, program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi.

Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

Konsekuensi dari perubahan pendekatan tata pemerintahan dari semula sentralistik menjadi desentralistik memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam kaitannya dengan urusan ketransmigrasian, dominasi peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan transmigrasi telah diambil alih oleh pemerintah daerah. UU No. 29 Tahun 2009 mempertegas perubahan peran tersebut dimana pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyediaan kawasan, pembangunan kawasan hingga pengembangan kawasan transmigrasi.

Peyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh Pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri.

Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana (*rowing*), sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat yang melibatkan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Hingga saat ini, animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi melebihi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meskipun dengan kecenderungan menurun. Selama kurun 2009 – 2013, Pemerintah DIY telah memberangkatkan transmigrasi total sebanyak 1.243 KK, yaitu masing-masing 336 KK pada tahun 2009, 250 KK pada tahun 2010, 259 KK pada tahun 2011, 248 KK pada tahun 2012, dan 150 KK pada tahun 2013. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2009 hingga 2013 mayoritas transmigran berasal dari Bantul kecuali tahun 2010 dimana jumlah transmigran terbanyak dikirim dari Kulon Progo.

Selain itu, DIY juga telah melaksanakan program transmigrasi lokal. Pemerintah DIY juga melakukan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU)

untuk semua transmigran yang akan diberangkatkan ke masing-masing lokasi tujuan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan di lokasi penempatan.

Tabel 2.126 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013

Daerah Asal	Pelaksanaan									
	2009		2010		2011		2012		2013	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Kulon Progo	67	209	68	237	49	154	53	162	47	138
Bantul	123	420	55	181	75	265	80	264	53	168
Gunungkidul	67	209	57	168	40	129	40	126	25	75
Sleman	54	189	45	154	70	233	56	170	10	31
Yogyakarta	25	52	25	84	25	85	19	59	15	46
Jumlah	336	1.079	250	824	259	866	248	781	150	458

Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa tahun terbitan

Untuk mempermudah evaluasi transmigrasi, pemerintah perlu menetapkan kriteria daerah tujuan dan tolak ukur keberhasilan transmigrasi dengan lebih jelas. Komitmen daerah penempatan dalam pengusulan program pembangunan transmigrasi baru harus benar-benar sudah memenuhi kriteria kelayakan program yaitu 2C (Clear & Clean) dan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan), adanya kejelasan status lahan dan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Berkaitan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya harus mengakomodasikan program ini yang antara lain dengan mengedepankan peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijaksanaan penempatan transmigrasi.

Untuk menjamin terpenuhinya harapan transmigran berupa peningkatan kesejahteraan, maka pemerintah menempuh kebijakan sebagai berikut (Disnakertrans DIY):

- Perlu adanya jaminan yang lebih konkrit tentang peningkatan kesejahteraan transmigran dengan penguatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar daerah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- Perlu dilakukan seleksi secara menyeluruh dan diberikan pelatihan sesuai dengan potensi di lokasi penempatan.
- Peningkatan perbekalan calon transmigran oleh daerah pengirim
- Perlu adanya perlindungan/advokasi dan pendampingan secara lebih baik kepada transmigran oleh daerah pengirim.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) merupakan jenis komponen pengeluaran terbesar dalam pembentukan PDRB DIY. Selama kurun waktu 2010-2013 pengeluaran konsumsi RT menurut harga berlaku di DIY cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2010 tercatat sebesar 23,198 trilyun rupiah naik menjadisebesar 38,439 trilyun rupiah pada tahun 2013 dan diproyeksikan naik pada tahun 2014-2015 masing-masing menjadi 35,504 trilyun rupiah dan 38,439 trilyun rupiah.

Demikian halnya, jika dilihat dari pengeluaran konsumsi RT perkapita selama kurun 2010-2013 mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi RT perkapita di DIY tercatat sebesar 31,18 juta rupiah atau sebesar 2,59 juta per bulan. Pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 32,99 juta rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat DIY meningkat.

Tabel 2.127 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014*
1	Total Pengeluaran RT (Juta Rupiah)	23.198.963	26.319.415	29.350.917	33.293.526	35.504.550
2	Jumlah RT	1.046.873	1.041.925	1.066.282	1.067.719	1.075.990
3	Rasio (1/2)	22,16	25,26	27,53	31,18	33,00

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

*) Angka Proyeksi

Berdasarkan golongan pengeluaran perkapita per bulan, jumlah rumah tangga di DIY tahun 2013 yang memiliki pengeluaran lebih dari 500 ribu rupiah per bulan sebanyak 630.864 rumah tangga atau sebesar 59,09%. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita sebulan kurang dari 500 ribu rupiah sebanyak 436.855 rumah tangga atau sebanyak 40,91% dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.128 Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, Tahun 2009-2013

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan	Jumlah Rumah Tangga			
	2010	2011	2012	2013
< 100.000	193	~	10	0
100.000 – 149.999	8.821	7.495	6.873	413
150.000 – 199.999	59.040	46.381	35.259	13.950
200.000 – 299.999	217.222	175.341	172.813	126.127
300.000 – 499.999	328.385	302.419	283.642	296.365
> 500.000	433.212	510.289	567.685	630.864
	1.046.873	1.041.925	1.066.282	1.067.719

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Dilihat dari perkembangannya selama kurun 2010-2013, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas di DIY sebagian besar merupakan pengeluaran non makanan. Pada tahun 2013 dari pengeluaran total sebesar 834.506 rupiah sebesar 441.427 rupiah atau sebesar 52,90% digunakan untuk pengeluaran non makanan, sementara 47,10% atau sebanyak 393.079 rupiah digunakan untuk pengeluaran makanan.

Tabel 2.129 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY Tahun 2010-2014

Tahun	Pengeluaran Makanan		Pengeluaran Non Makanan		Pengeluaran Total
	Rp	%	Rp	%	
2010	244.004	44,05	309.963	55,95	553.967
2011	276.323	44,21	348.721	55,79	625.044
2012	308.587	42,44	418.516	57,56	727.103
2013	359.522	46,95	406.192	53,05	765.714
2014*	366.267	46,49	421.588	53,51	787.855

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

*) Angka Proyeksi

Proporsi terbesar dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan berasal dari kelompok barang dan jasa. Pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi rumah tangga berasal dari kelompok barang dan jasa tercatat sebesar 170.005 rupiah atau 41,85% dan pengeluaran terkecil

berasal dari pajak pemakaian dan premi asuransi sebesar 13.577 rupiah atau 3,34%.

Tabel 2.130 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY Tahun 2010-2014

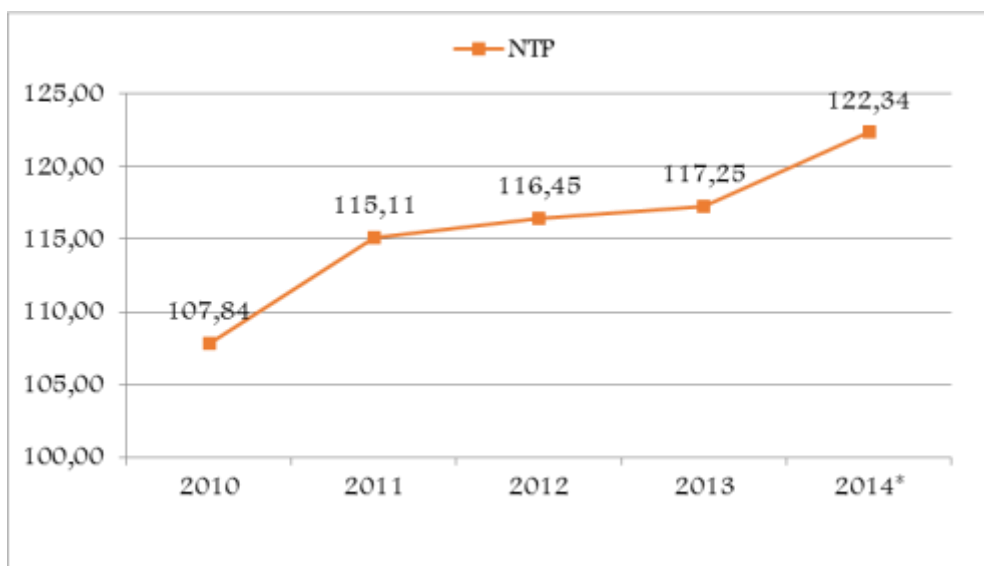
Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2010	2011	2012	2013	2014*
Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	109.997	121.996	135.795	147.181	135.017
Barang-Barang & Jasa	124.291	151.625	170.509	170.005	165.741
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	15.912	14.128	20.967	20.665	18.035
Barang Tahan Lama	40.722	34.823	64.473	37.403	37.018
Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	10.601	12.348	14.191	13.577	12.591
Keperluan pesta dan upacara	8.440	13.802	12.580	17.361	15.988
Jumlah	309.963	625.044	727.103	406.192	384.389

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

*) Angka Proyeksi

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

NTP DIY selama kurun 2010-2014 menunjukkan trend yang meningkat dimana pada tahun 2010 sebesar 107,84 meningkat menjadi 122,34 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian yang menguntungkan bagi masyarakat DIY.



Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

*) Angka Sementara

Gambar 2.79 Grafik Nilai Tukar Petani di DIY, Tahun 2010-214

Data perkembangan NTP menurut sub sektor selama 2010-2014 menunjukkan bahwa NTP perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan mengalami kenaikan pada tahun 2014 sementara NTP pertanian pangan dan hortikultura mengalami penurunan.

Tabel 2.131 Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor di DIY Tahun 2010-2014

NTP Sektor/Sub sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014*
NTP Pertanian Pangan	109,45	113,52	116,39	115,96	114,49
NTP Hortikultura	117,56	127,3	131,35	133,19	126,92
NTP Perkebunan Rakyat	115,9	121,44	122,08	127,25	141,28
NTP Peternakan	106,16	103,66	104,55	106,51	109,09
NTP Perikanan	112,28	112,69	114,53	116,31	119,92

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

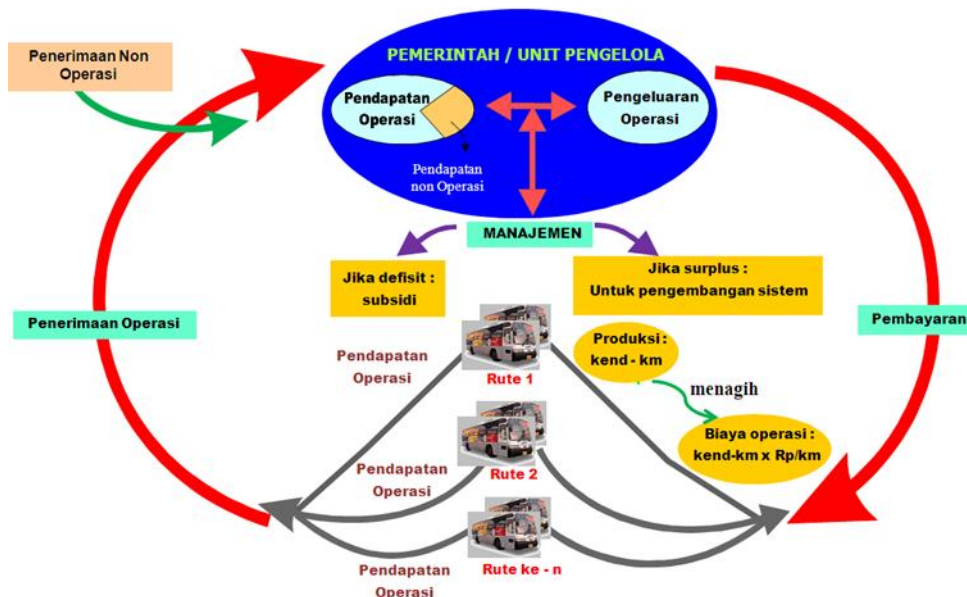
*) Angka Sementara

2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.1 Layanan Trans Jogja

Di bidang infrastruktur, salah satu kebijakan yang menjadi daya saing dari kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pengoperasian layanan angkutan umum Trans Jogja sebagai bentuk penyediaan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Keberadaan Trans Jogja itu sendiri, didasari karena adanya keluhan terhadap kondisi angkutan perkotaan yang ada pada saat itu, sehingga pada bulan Februari tahun 2008, Trans Jogja mulai dioperasikan dengan konsep dasar layanan “*buy the service*”. Konsep layanan “*buy the service*” ini dimaksudkan bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut.



Gambar 2.80 Konsep Buy The Service

Dengan pendekatan *gross contract*, maka pendapatan dari hasil pengoperasian Trans Jogja menjadi pendapatan dari pemerintah dan pemerintah pula yang menentukan harga tiket, sehingga Trans Jogja dapat

dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini akan berbeda jika pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *netf contract* dimana campur tangan pemerintah terkait dengan pembiayaan operasional angkutan umum, akan terjadi saat terdapat selisih antara biaya operasional dan pendapatan yang diterima oleh operator. Selisih tersebut akan ditutupi oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi ataupun PSO (*public service obligation*).



Gambar 2.81 Layanan TransJogja di DIY

Keberadaan Trans Jogja dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kemudahan akses dan kemudahan perpindahan orang antar wilayah di Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja juga diharapkan dapat mengurangi problematika lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalu lintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas.

Nilai unggul yang ditawarkan dalam layanan Trans Jogja adalah :

1. Sistem tiket sudah terintegrasi dengan e-money yang ada di beberapa bank pemerintah maupun swasta, antara lain : Mandiri, BNI, BRI dan BCA.
2. Dengan fasilitas e-money, tiket Trans Jogja juga sudah terintegrasi dengan Trans Batik Solo dan KA Komuter Prameks.

3. Pada beberapa bus, tersedia fasilitas *bike rack on bus* guna memudahkan pengendara sepeda yang akan menggunakan layanan Trans Jogja.
4. Jam layanan yang dimulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam.

Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, jumlah load factor Trans Jogja mengalami peningkatan. Demikian juga halnya dengan jumlah pendapatan yang selalu meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012, karena operasional jalur 4 pada saat itu dihentikan sementara.

Tabel 2.132 Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2009-2014

No.	TAHUN	LOAD FACTOR RATA-RATA	PENDAPATAN
1.	2009	21,98 %	Rp. 15.359.527.500,00
2.	2010	26,37 %	Rp. 17.504.928.000,00
3.	2011	26,96 %	Rp. 18.043.004.000,00
4.	2012	29,26 %	Rp. 17.407.646.993,80
5.	2013	32,25 %	Rp. 18.359.146.684,23
6.	2014	37,82 %	Rp. 20.177.264.827,00

Sumber : UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY

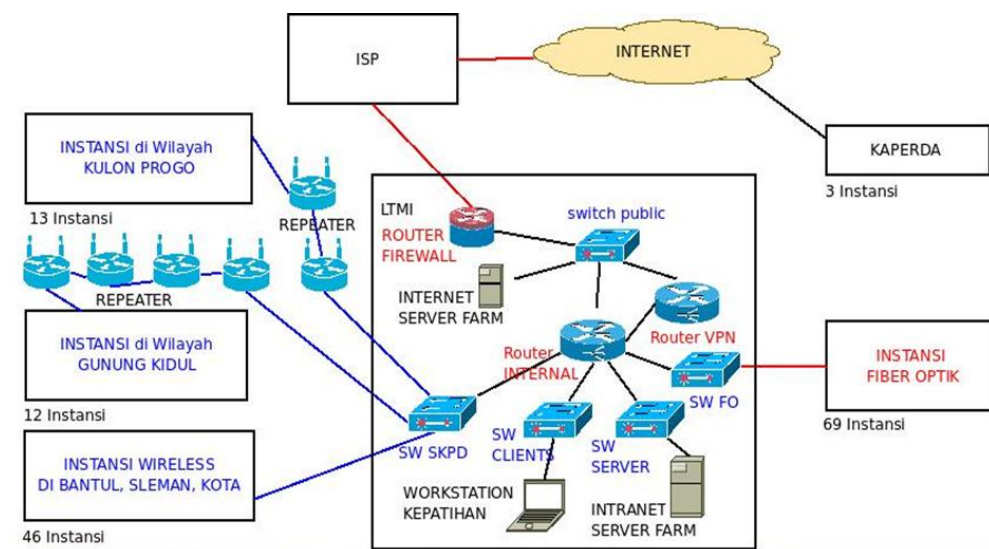
2.3.2.2 Penyediaan Fiber Optik

Di sector informatika, kebijakan pembangunan yang dapat menjadi daya saing adalah pembangunan jaringan fiber optic pada kawasan Perkotaan Yogyakarta yang menghubungkan antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan jaringan fiber optik (FO) ini, nantinya akan bersifat multi fungsi dan dapat digunakan untuk mendukung system informatika di jajaran Pemerintah DIY. Pembangunan jaringan FO ini akan dapat menutupi kelemahan yang ada, jika Pemerintah DIY menyewa jasa layanan ISP (*internet service provider*) terutama pada control manajemen jaringan dan ketergantungan yang sangat besar pada pihak ketiga/penyedia jasa ISP.

Manfaat yang diperoleh dari adanya jaringan fiber optik yang dikelola sendiri oleh Pemerintah DIY, antara lain :

- ~ Menambah bandwidth Internet dan Intranet SKPD.
- ~ Memberikan kontrol yang lebih besar pada penggunaan bandwidth baik internet dan Intranet pada pengelola jaringan PEMPROV DIY
- ~ Memberikan Opsi yang lebih banyak pada penyediaan Bandwidth Provinsi DIY baik VPN maupun Internet

- ~ Penambahan Firewall Router untuk menambah lapisan keamanan pada Server PEMPROV DIY.
- ~ Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga (vendor).



Gambar 2.82 Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY

2.3.2.3 Layanan Air Limbah Terpusat

Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat atau *Off-site* adalah suatu system pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah kesuatu tempat untuk selanjutnya diolah. Diterapkan untuk penduduk yang berada pada wilayah padat dan secara teknis bias dilayani oleh system terpusat kota. Pengolahan limbah terpusat merupakan system pengolahan yang menggunakan jaringan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari masing-masing rumah penduduk dan kemudian dialirkan ke IPAL. Pengolahan air limbah dengan system terpusat terdiri dari sambungan rumah tangga dan non rumah tangga, jaringan pengumpul, system penggelontor, dan jaringan perpipaan yang mengalirkan limbah menuju IPAL Sewon Bantul.

Pelayanan pengelolaan limbah system terpusat di KPY sampai tahun 2014 sudah melayani 15.309 KK, dengan distribusi di Kabupaten Bantul sebesar 2.485 KK, Kabupaten Sleman sebesar 1.520 KK, dan Kota Yogyakarta sebesar 11.304 KK. Cakupan layanan infrastruktur limbah system terpusat per kabupaten/kota, kecamatan dan desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

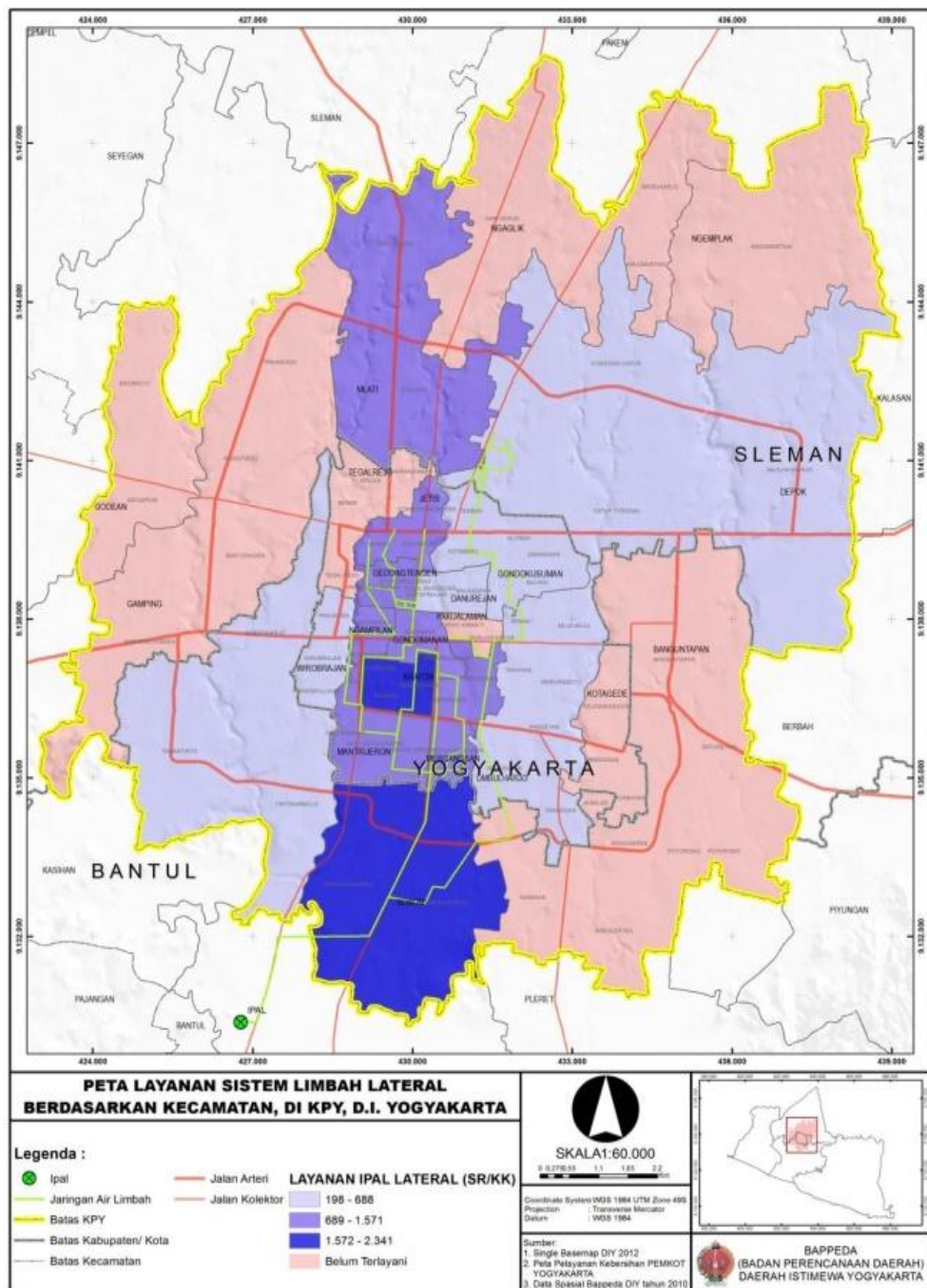


Gambar 2.83 Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Terpusat Per Kecamatan



Gambar 2.84 IPAL Sewon Bantul

Secara lebih jelasnya peta layanan limbah lateral per kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini.

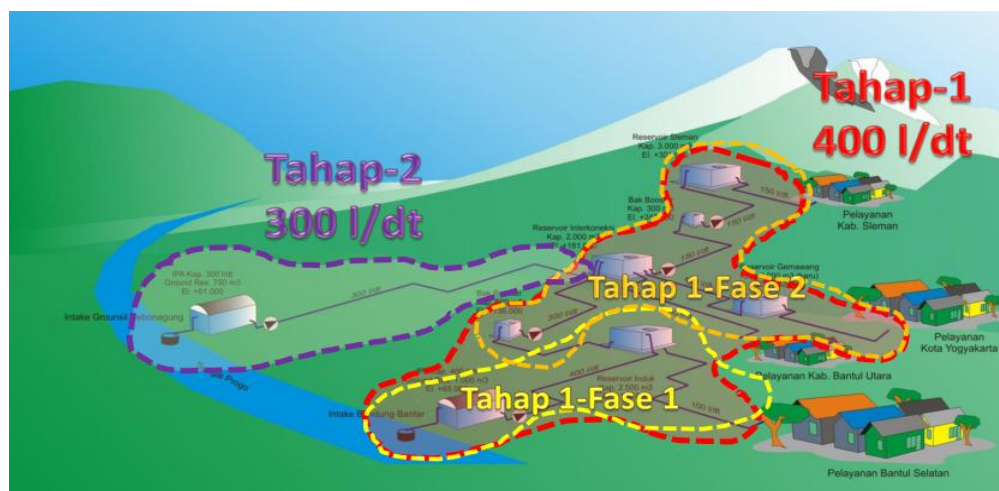


Gambar 2.85 Peta Layanan Limbah Lateral Per Kecamatan di KPY

Dalam RPJMD tahun 2012-2017 telah ditetapkan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat yaitu setiap tahunnya adanya penambahan Sumbungan Rumah (SR) sebesar 1.500 SR. Pada periode 2012-2017 diketahui kondisi kinerja awal periode RPJMD adalah sebesar 13.329 SR dan pada tahun ke 2 atau 2014 target capaian mencapai 15.800 SR. Hasil dari analisis dari data yang bersumber pada penghitungan Tahun 2014 ini maka diketahui bahwa jumlah pelayanan pengelolaan limbah system terpusat di KPY sampai tahun 2014 sudah melayani 15.309 KK, dengan distribusi di Kabupaten Bantul sebesar 2.485 KK, Kabupaten Sleman sebesar 1.520 KK, dan Kota Yogyakarta sebesar 11.304 KK. Artinya capaian saat ini sudah 96,9 % atau hamper melampaui dari target awal capaian yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2012-2017.

2.3.2.4 Layanan Air Minum

Peningkatan kebutuhan air minum akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan aspek lainnya di DIY menyebabkan kebutuhan air baku untuk air minum diproyeksikan sebesar 6.998 L/det hingga tahun 2030. Cakupan pelayanan air minum D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 sudah mencapai 72,78% dengan proporsi 75,98% di perkotaan dan 70,58% di perdesaan. Di sisi lain pertumbuhan penduduk perkotaan akan semakin meningkat pada lima tahun mendatang, yang berdampak pada semakin besarnya tingkat kebutuhan pelayanan air minum dan keterbatasan ketersediaan air baku untuk air minum. Oleh karena itu perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan.



Gambar 2.86 Skematik SPAM Regional Sistem Bantar dan Kebonagung DIY

Beberapa langkah strategis sudah dipersiapkan Pemerintah Provinsi dalam rangka memenuhi kebutuhan cakupan dan peningkatan kualitas air minum. Kewenangan Pemerintah Provinsi tertuang dalam rencana spam regional untuk melayani kawasan perkotaan, kawasan strategis provinsi dan kawasan industri antara lain :

1. SPAM regional kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY); Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (kartamantul), kapasitas 700 L/DT
2. SPAM regional kapet Kulon Progo (bandara; pelabuhan; pasirbesi) – kawasan industri pajangan, Kabupaten Bantul, kapasitas 1.400 l/dt
3. SPAM regional system banyusoco/sungaioyo; pelayanan wilayah tenggara Kabupaten Bantul dan Gunungkidul bagian barat, kapasitas 100 l/dt
4. SPAM regional system sungai bawah tanah Gunungkidul; pelayanan wilayah selatan Gunungkidul, Bantul utara, dan Sleman selatan, kapasitas 300 l/dt

2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.3.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menjadi ukuran yang menggambarkan suatu ketimpangan sosial yang harus ditekan sekecil-kecilnya. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjagaketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.133 Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di DIY Tahun 2009-2013

No	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah kasus narkoba	266	262	257	336
2.	Jumlah kasus pembunuhan	14	10	9	12
3.	Jumlah kejahatan seksual	18	13	20	21
4.	Jumlah kasus penganiayaan (ringan-berat)	579	536	461	442
5.	Jumlah kasus pencurian (curat, curanmor, curas, pencurian ringan-biasa)	3.902	3.042	2.446	2.460
6.	Jumlah kasus penipuan	1.428	1.301	1.364	1.403
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	5	6	4	3
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	3.719	3.072	4.561	4.677
9.	Jumlah penduduk	3.457.491	3.487.325	3.514.762	3.594.854
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,18	0,15	0,13	0,13

Sumber: DDA,beberapa edisi, BPS Provinsi DIY

Jumlah tindak kriminal menurut jenis kasus meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2010 tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011. Namun, jumlah kasus kriminal justru semakin meningkat pada 2012 dan 2013. Peningkatan kriminalitas pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi pada kasus : narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, pencurian, dan penipuan. Apabila dilihat dari kecenderungan tahunan selama lima tahun terakhir, terlihat bahwa peningkatan kasus narkoba terlihat meningkat sangat signifikan. Kasus narkoba pada 2013 merupakan kasus kriminal yang ditemui meningkat cukup pesat selama lima tahun terakhir. Dalam rangka penurunan sejumlah kasus kriminalitas tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama penanganan kasus narkoba yang mengancam keberlangsungan generasi muda sebagai korbannya.

2.3.3.2 Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Jumlah unjuk rasa yang terjadi di DIY dari kurun waktu 2009–2013 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2013 merupakan jumlah yang terkecil dalam periode 5 tahun terakhir.

Unjuk rasa di DIY di dominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi dengan proporsi rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 74,6%. Sementara itu unjuk rasa di bidang politik mempunyai proporsi rata-rata 6,42% selama 5 tahun. Namun pada tahun 2013 terjadi pergeseran dalam proporsi unjuk rasa dimana terjadi penurunan proporsi cukup signifikan dalam unjuk rasa di bidang politik dan ekonomi masing-masing menjadi sebesar 2,23% dan 49,55%. Sementara di sisi lain, proporsi unjuk rasa di bidang lainnya meningkat signifikan menjadi 48,21% pada tahun 2013.

Tabel 2.134 Jumlah Demo di DIY Tahun 2008-2013

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2010	240
2011	267
2012	315
2013	224

Sumber: SIPD DIY, 2013

2.3.3.3 Lama Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Upaya dilakukan Pemerintah Daerah DIY melalui Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikelola oleh Gerai Pelayanan Perizinan

Terpadu Pemerintah Daerah DIY. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

Tabel 2.135 Rata-rata Lama Pengurusan Izin Tahun 2013

Jenis Izin usaha	Rata-rata Lama Pengurusan Izin (hari)
Izin Prinsip	3
Izin Usaha	7
Izin Kawasan Industri	14
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas 2000-6000 m ³ /tahun	30
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya	30
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan	30
Izin Usaha Pertambangan	30
Izin Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan Laut	7
Izin pendirian koperasi primer dan sekunder	90

Sumber: BKPM DIY, 2013

2.3.3.4 Pengenaan Pajak Daerah

- 1) Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui pajak daerah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota. Adapun, Pajak Daerah yang menjadi kontributor PAD DIY adalah: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, obyek retribusi terdiri

atas: (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu.

2.3.3.5 Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Sejalan dengan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan pengaturan melalui regulasi yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Regulasi dalam bentuk Perda tersebut haruslah mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan, serta akuntabel. Perda tersebut juga diharapkan dapat melindungi semua pemangku kepentingan yaitu, Pemda, dunia usaha, masyarakat, serta lingkungan. Jumlah Perda DIY yang mendukung iklim usaha dalam kurun waktu 2008 hingga 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.136 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di DIY Tahun 2013

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Perda terkait perizinan	0	3	2	1

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2013

2.3.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Perkembangan angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.137 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
< SD	668.553	643.959	650.195
SMTP	35.563	339.721	370.007
SMTA	661.685	651.291	683.232
D I / D II / D III / Akademi	6.971	77.796	86.478
Universitas	18.928	198.192	233.549

Sumber : Pusdatinaker, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2014

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa struktur angkatan kerja di DIY didominasi oleh lulusan SMTA dan tidak tamat SD. Sedangkan lulusan DI/DII/DIII dan universitas baru mencapai sekitar 15,82% di tahun 2014. Sehingga program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di DIY mampu bersaing di dunia kerja.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Tabel 2.138 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Angka Ketergantungan di DIY, Tahun 2013

Kabupaten/Kota	usia 0 -14	usia 15-64	usia 65+	Jumlah	Rasio Ketergantungan
Kota Yogyakarta	19,69	74,2	6,11	100	34,77
Kabupaten Bantul	23,02	68,15	8,84	100	46,75
Kabupaten Kulonprogo	22,64	65,66	11,7	100	52,30
Kabupaten Gunungkidul	22,72	64,33	12,96	100	55,46
Kabupaten Sleman	21,21	71,16	7,63	100	40,53
DIY	21,97	68,78	9,26	100	45,41

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013, BPS

Pada tahun 2013, angka Rasio Ketergantungan DIY sebesar 45,41 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan DIY tergolong tinggi hal ini terkait dengan semakin tingginya capaian angka harapan hidup dan peningkatan *Total Fertility Rate* (TFR) di DIY. Peningkatan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif di DIY diikuti oleh pemerintah DIY dengan beberapa kebijakan dan program terkait pemenuhan

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam kaitannya dengan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tentunya juga harus mengacu dan melihat hasil capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.139 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015	
				Target 2014	Capaian 2014	Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	Persen	74,57%	65,73	88,15	67,28	67,28
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	Persen	92,6	93,68%	101,17	93,25	93,85
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	Persen	10	9,46	94,60	10,80	10,80
4	Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	5%	5%	100	10	10
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	Tahun	74,41	73,74	99,10	73,54	73,81
6	Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK)	Pendapatan perkapita pertahun.	Juta	7,4	7,10	95,95	7,80	7,80
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	Persen	0,4515	0,4479	100,80	0,4501	0,4465
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	Persen	0,295	0,435	52,54	0,2898	0,2898
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara.	Orang	2.754.981	3.091.967	112,23	2.877.493	3.581.860
		Jumlah wisatawan	Orang	249.854	254.213	101,74	261.053	261.053

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015	
				Target 2014	Capaian 2014	Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		mancanegara.						
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara.	Hari	2,15	1,58	73,49	2,35	2,35
		Lama tinggal wisatawan mancanegara.	Hari	2,25	1,95	86,67	2,30	2,30
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		B+	A	133,33	A (78)	A (78)
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.		WTP	WTP	100	WTP	WTP
13	Layanan public meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	Persen	36,57%	37,82%	103,42	38,57	38,57
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Persen	6,29%	6,29%	100	9,43	9,43
15	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	Persen	63,42%	64,21%	101,25	64,25	70

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya.

Hasil evaluasi Indikator Sasaran Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dan memerlukan perhatian didalam penyusunan kebijakan perencanaan ke depan khususnya di Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
2. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
3. Pendapatan masyarakat meningkat (ADHK);
4. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
5. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

Tidak tercapainya Sasaran Gubernur tersebut terkait dengan hasil implementasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Pembangunan yang memiliki korelasi terhadap indikator sasaran pada masing-masing Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD).

Lebih lanjut secara lebih spesifik pada program/kegiatan SKPD faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut indikator yang menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Deviasi keuangan pada umumnya disebabkan karena kebijakan/regulasi seperti SE Menpan No. 11 / 2014 tentang pembatasan kegiatan / rapat diluar kantor, sisa lelang, sisa pembelian/pembayaran (selisih pembelian ATK, sisa perjalanan dinas, tagihan listrik, telepon, air, pemeliharaan

peralatan/kendaraan dinas) serta penganggaran melebihi kebutuhan sebenarnya/melebihi ASB dan atau SHBJ.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Kebijakan perlu diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah target dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, dimana kegiatan tersebut hanya dapat melaksanakan termin 1 dan 2 maka waktu perencanaan program/kegiatan dengan dana keistimewaan harus disesuaikan,
- b) Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), pengendalian internal, pengawalan terhadap capaian indikator kinerja dan pelaporan secara sistematis dan tepat waktu;
- c) Penyelesaian sejumlah program strategis (*multiyears*) yang sudah ditetapkan, diharapkan memperhatikan : skala prioritas terhadap pencapaian indikator kinerja, isu strategis wilayah, kepastian tahapan penyelesaiannya, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah;

Terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa agar dilakukan upaya akselerasi dengan pengumuman sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) tepat waktu, kaji ulang dokumen terkait, pelaksanaan pengadaan dan pengendalian kontrak.

Tabel 2.140 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
0	0		UMUM										
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100		100			100	100	Semua SKPD
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100		100			100	100	Semua SKPD
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100		100			100	100	Semua SKPD

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100		100			100	100	Semua SKPD
		5	Program Peningkatan Pengembagnn Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100		100			100	100	Semua SKPD
1			WAJIB										
1	1		Pendidikan										
		1	Program Pendidikan Anak Usia Dini*)	APK PAUD	persen	88	82	84	0	0	84	100	Disdikpora
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	persen	86,56	82,55	84,92	0	0	84,92	100	Disdikpora

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program Pendidikan Menengah*)	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah	persen	80,63	81.35	79,71	0	0	79,71	100	Disdikpora
		4	Program Pendidikan NonFormal dan Informal*)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	persen	10000	7000 orang	8000	0	0	8000	100	Disdikpora
		5	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	persen	72,11	70.78	71,22	0	0	71,22	100	Disdikpora
		6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	persen	74,21		0			0	100	Disdikpora
		7	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	persen	75,17	74.47	74,71	0	0	74,71	100	Disdikpora
		8	Program Pendidikan Tinggi	Persentase Peningkatan	persen	59	274000 orang	58	0	0	58	100	Disdikpora

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2			3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
				Aksesibilitas Pendidikan Tinggi									
		9	Program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	persen	60	40.67	50	0	0	50	100	Disdikpora
		10	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada B L U D	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	persen	1977		1904			1904	100	Disdikpora
		11	Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	persen	40	5	10	0	0	10	100	Disdikpora
		12	Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	persen	40	5	10	0	0	10	100	Disdikpora
		13	Program Sinergitas Pendidikan terhadap	Persentase Lulusan SMK Terserap dalam	persen	45	5	35	0	0	35	100	Disdikpora

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
			Pembangunan	Dunia Kerja									
1	2		Kesehatan										
		1	Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	99	98	99	34,53	35%	99	100	Dinkes
		2	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan	persen	71,9		69	67,18	97%	69	100	Dinkes
		3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	persen	87		79	70,17	89%	79	100	Dinkes
		4	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	persen	72,8	56.16	48,4	72,9	151%	48,4	100	Dinkes

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		5	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase cakupan penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	persen	100	98.00	100	0	0%	100	100	Dinkes
		6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	persen	40,00		38	0	0%	38	100	Dinkes
		7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	persen	6,50	9.30	7,5	0	0%	7,5	100	Dinkes
		8	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	persen	73,44	60.90	64,44	62,83	98%	64,44	100	Dinkes
		9	Program Pembinaan Kesehatan Lansia	Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)	persen	80	75 unit	73,55	70,25	96%	73,55	100	Dinkes
		10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase kecamatan yang menyelenggarakan	persen	89,74	80.00	74,36	79,45	107%	74,36	100	Dinkes

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2			3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
				sehat									
		11	Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	persen	n/a	98.25	98,5	33,31	34%	98,5	100	Dinkes
		12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos	Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos	persen	94,00	36.89	88	63,8	73%	88	100	Dinkes
		13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS Ghrasia)	persen	9,13	66.88	8,62		0%	8,62	100	Dinkes
		14	Program Pembiayaan kesehatan	Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS kesehatan	persen	86,30	40.25	72,6		0%	72,6	100	Dinkes

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		15	Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama	persen	82,00		80	0	0%	80	100	Dinkes
1	3		Pekerjaan Umum										
		1	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap.	persen	n/a	74,35%	73,24			73,24	100	DPUP-ESDM
		2	Program Peningkatan Jalan & Jembatan										
		3	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	persen	100	100	100			100	100	DPUP-ESDM
		4	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	persen	n/a	83,51	32,85			32,85	100	DPUP-ESDM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	persen	82,50	100	79,5			79,5	100	DPUP-ESDM
		6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Penambahan penyediaan air baku	l/det	n/a	100	1200			1200	100	DPUP-ESDM
		7	Program penyediaan dan pengelolaan air baku										
		8	Program pengembangan pengelolaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum	persen	n/a	100	80,85	0	0	80,85	100	DPUP-ESDM
		9	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	21000	100	17300			17300	100	DPUP-ESDM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		10	Program pengelolaan persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	persen	70,00	100	60			60	100	DPUP-ESDM
		11	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	persen	n/a	100	65			65	100	DPUP-ESDM
		12	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	persen	n/a	100	51			51	100	DPUP-ESDM
		13	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	persen	n/a	100	46			46	100	DPUP-ESDM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		14	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,	Pengurangan jumlah titik genangan	persen	57,90	100	45,9			45,9	100	DPUP-ESDM
		15	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	persen	88,00	100	84			84	100	DPUP-ESDM
		16	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	120	100	80	0	0	80	100	DPUP-ESDM
		17	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	persen	100	100	87,5			87,5	100	DPUP-ESDM
		18	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi	persen	87,50	100	82,5	0	0	82,5	100	DPUP-ESDM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		19	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	persen	85,00	100	80			80	100	DPUP-ESDM
1	4		Perumahan										
		1	Program pengurangan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	persen	51,00	19.60	40			40	100	DPUP-ESDM
		2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	persen	64,00	40	54			54	100	DPUP-ESDM
		3	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	persen	6,75	7.50	7,25	0	0	7,25	100	DPUP-ESDM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
1	5		Penataan Ruang										
		1	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan Strategis	19	16 kawasan strategis	16			16	100	DPUP-ESDM
		2	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/ kota dan RTRW Provinsi	persen	n/a	60	70			70	100	DPUP-ESDM
		3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	persen	n/a	40	60	0	0	60	100	DPUP-ESDM
1	6		Perencanaan Pembangunan										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah non keistimewaan dengan realisasi tahunan	persen	6,97	13	13,94	0	0	13,94	100	BAPPEDA
		2	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	persen	n/a	21,46	0,81	0	0	0,81	100	BAPPEDA
		3	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	persen	n/a	24	4,06	0	0	4,06	100	BAPPEDA

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	persen	n/a	24	10,55	0	0	10,55	100	BAPPEDA
		5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	persen	n/a	23.85	1,62	0	0	1,62	100	BAPPEDA
		6	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	persen	n/a	94	84	0	0	84	100	BAPPEDA
1	7		Perhubungan										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		1	Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan	persen	42,00	16.80	25,20	16,8	67%	25,20	100	DISHUBKOMIN FO
		2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan Lalulintas Jalan	persen	87	82	83	82,68	100%	83	100	DISHUBKOMIN FO
		3	Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	persen	60,00	40	40,00	39,47	99%	40,00	100	DISHUBKOMIN FO
		4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	persen	n/a	-	38,57	37,82	98%	38,57	100	DISHUBKOMIN FO
		5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DIY	persen	82,50	40	44,17	40	91%	44,17	100	DISHUBKOMIN FO
		6	Program Pembangunan	Peningkatan pelayanan	persen	50,00	35	40,00	36,44	91%	40,00	100	DISHUBKOMIN FO

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	transportasi antar moda									
		7	Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	persen	100,00	100	100	100	100%	100	100	DISHUBKOMINFO
		8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Berfungsinya sarana dan prasarana Fasilitas LLAJ	persen	n/a	100	100	100	100%	100	100	DISHUBKOMINFO
		9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	persen	100	100	100	100	100%	100	100	DISHUBKOMINFO
1	8		Lingkungan Hidup										
		1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	persen	n/a	100	9,43			9,43	100	BLH

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		2	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan hidup	persen	n/a	100	25,00			25,00	100	BLH
		3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	persen	n/a	100	7,00			7,00	100	BLH
		4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	persen	n/a	100	380			380	100	BLH
		5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	persen	n/a	100	35,00			35,00	100	BLH
		6	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	LuasLahan yang TerkonservasiTerhadapLuasan Total Lahan	Ha	n/a	100	27	0	0	27	100	BLH
1	9		Pertanahan										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	persen	n/a	95,27	9,653			9,653	100	BIRO TAPEM
		2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	persen	35,00	65%	25,00			25,00	100	BIRO TAPEM
		3	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	10,501	95,27	9,653			9,653	100	BIRO TAPEM
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil										
		1	Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	persen	n/a		89,00			89,00	100	89,00
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,45	4.00	0,47	0	0	0,47	100	BPPM
		2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Rasio Korban kekerasan terhadap anak	Rasio	0,35	23.00	0,37	0	0	0,37	100	BPPM
		3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	36,50		36,20	0	0	36,20	100	BPPM
		4	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	persen	96,99	95	96,66	0	0	96,66	100	BPPM
		5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase pembinaan organisasi perempuan	persen	100	45.41	75,14	0	0	75,14	100	BPPM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	Terlaksananya Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	persen								BPPM
		7	Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Presentase Partisipasi Perempuan di organisasi politik	persen	11,50		11,06	0	0	11,06	100	BPPM
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
		1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan peserta KB aktif	persen	80224	71.60	80220	0	0	80220	100	BPPM
		2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	persen	0,500	31.12	0,510	0	0	0,510	100	BPPM
		3	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase tahapan keluarga sejahtera	persen	43,00	44.60	44,10	0	0	44,10	100	BPPM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Pengembangan Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan	persen	24,27	31.20	23,00	0	0	23,00	100	BPPM
		5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terlaksananya Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	persen	0		0			0	100	BPPM
		6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Terlaksananya Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	persen	0		0			0	100	BPPM
1	13		Sosial										
		1	Program Pelayanan dan Perlindungan Anak bermasalah sosial	persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	persen	4,53	100	3,39	0	0	3,39	100	DINSOS

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		2	Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	persen	2,51		2,02	0	0	2,02	100	DINSOS
		3	Program Penanganan dan penanggulangan Bencana	Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	persen	20,18	40,24	19,37	0	0	19,37	100	DINSOOS
		4	Program perlindungan dan pemberdayaan bagi Korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial psikologis, dan korban <i>trafficking</i>	Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial.	persen	3,99	100	3,50			3,50	100	DINSOS
		5	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan	persen	1,30	100	1,11			1,11	100	DINSOS

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2			3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
				sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma									
		6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	persen	6,56	95,69	3,68			3,68	100	DINSOS
		7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	persen	4,24		2,62	0	0	2,62	100	DINSOS
		8	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	persen	30,56	100	30,13			30,13	100	DINSOS

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		9	Program Pembinaan Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3	Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan	persen	70,00	97,99	55,02			55,02	100	DINSOS
		10	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan (RPJMD)	persen	1,33	100	1,3	0	0	1,3	100	DINSOS
		11	Program peningkatan kualitas informasi kesejahteraan sosial	Prosentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan	persen	100	100	100			100	100	DINSOS

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
				Sosial\									
		12	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pembinaan anak terlantar	persen	0		0	0		0	100	DINSOS
		13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	persen	0		0	0		0	100	DINSOS
1	14		Ketenagakerjaan										
		1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	persen	27,00	40%	25,00	18,92	76%	25,00	100	DISNAKERTRANS
		2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah	persen	21,18	46%	20,77	11,22	54%	20,77	100	DISNAKERTRANS

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
			Pencari Kerja									
		3	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	persen	0		0			0	100	DISNAKERTRANS
		4	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	persen	53,00	46%	50,00	69,47	139%	50,00	100	DISNAKERTRANS
		5	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	persen	84,00	46%	65,00	41,6675	64%	65,00	100	DISNAKERTRANS
		6	Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan	persen	30,91	22%	30,30	27,09	89%	30,30	100	DISNAKERTRANS

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
				bidang norma kerja dan K3									
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
		1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UKM (unit usaha)	unit	248191	223621	229467	0	0	229467	100	DISPERINDAGK OP
		2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	unit	2.543,00	2207	2,351	0	0	2,351	100	DISPERINDAGK OP
		3	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	orang	280	130	180	0	0	180	100	DISPERINDAGK OP
1	16		Penanaman Modal										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi (RP 000)	Juta Rupiah	14.002.769.000	7839000000	10.467.183.000	0	0	10.467.183.000	100	BKPM
		2	Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan investasi	Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip	buah	369	347	354	0	0	354	100	BKPM
1	17		Kebudayaan										
		1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase organisasi budaya berkategori maju	persen	n/a	13,89%	1,24	0	0	1,24	100	DISBUD
		2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	persen	n/a	18,55%	25	0	0	25	100	DISBUD
		3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	persen	30,00	12,81%	15,00	0	0	15,00	100	DISBUD

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase implementasi hasil kesepakatan	persen	35,00	7%	15,00	0	0	15,00	100	DISBUD
		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	persen	70,00	25%	40,00	15	38%	40,00	100	DISBUD
1	18		Kepemudaan dan Olah Raga										
		1	Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Dokumen pembangunan kepemudaan	persen	0		0			0	100	Disdikpora
		2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	sentra	15	12	13	12	92%	13	100	Disdikpora
		3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda	kelompok	405	345	365			365	100	DISDIKPORA

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Atau Pembinaan Olahraga	orang	2400	2100	2200	200	9%	2200	100	Disdikpora
		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Fasilitas Layanan Pemuda dan Olahraga	persen	66,67	5	58,69	0	0	58,69	100	Disdikpora
		6	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	Medali	30	5	27	0	0	27	100	Disdikpora
		7	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Pemuda	Organi sasi	n/a	39	41			41	100	Disdikpora
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri										
		1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi dalam Pemilu	persen	N/A	68%	73,00			73,00	100	Bakeslinmas

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		2	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Kab./Kota yang telah terbentuk Community Policing	persen	n/a	18,46%	3,00			3,00	100	Bakeslinmas
		3	Program Pemeliharaan kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan kasus tindak kriminal	persen	n/a	945	948	0	0	948	100	SATPOLPP
		4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penurunan kasus pelanggaran Perda	kasus	n/a	360	250	0	0	250	100	Satpol PP
		5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penurunan kasus pekat		n/a	315	314	0	0	314	100	SATPOLPP
		6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus konflik sosial	kasus	n/a	25	22			22	100	Bakeslinmas

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										
		1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit	n/a		2	0	0	2	100	Biro Organisasi
		2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	persen	n/a	44,64%	30,00			30,00	100	Inspektorat
		3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayan pimpinan	persen	1	90%	95,00			95,00	100	Setda

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayan pimpinan	persen	n/a	100%	95,00			95,00	100	Biro Umum, Humas dan Protokol
		5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	persen	n/a		100			100	100	Biro Umum, Humas dan Protokol
		6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	persen	n/a	80,90%	94,50			94,50	100	SETWAN
		7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	persen	100	100%	100	68,67	69%	100	100	BIRO HUKUM
		8	Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi Rancangan	persen	n/a	100%	100			100	100	BIRO HUKUM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2			3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
				Produk Hukum Kab/Kota									
		9	Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	persen	n/a	31,77%	36,45	0	0	36,45	100	Biro Adm. Kesra, Biro Adm Pembangunan, Biro Adm Perekonomian dan SDA
		10	Program pencegahan dini bencana	Peningkatan jumlah Desa Tangguh	Angka	70 desa	25	40 desa			40 desa	100	BPBD
		11	Program Penanggulangan Korban Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	persen	n/a	tidak ada	72,00			72,00	100	BPBD
		12	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah	persen	46,25	tidak ada	51,31	0	0	51,31	100	DPPKA
		13	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan	persen	100	10,04%	100	0	0	100	100	DPPKA

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
			Keuangan Daerah	keuangan daerah									
		14	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase capaian Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)	persen	n/a	tidak ada	70,00	0	0	70,00	100	DPPKA
		15	Program Pengembangan investasi dan aset daerah	Persentase Aset daerah yang dapat dioptimalkan	persen	n/a	10%	11,71	0	0	11,71	100	DPPKA
		16	Program Pengembangan investasi dan aset daerah	Persentase Aset daerah yang dapat dioptimalkan	persen	n/a		11,71	0	0	11,71	100	DPPKA

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2			3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		17	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	persen	n/a	100%	100	0	0	100	100	DPPKA
		18	Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	persen	19,36	22%	18,34	0	0	18,34	100	DPPKA
		19	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	persen	n/a	79,44%	85,00	0	0	85,00	100	Biro Organisasi
		20	Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan	persentase PNS yang mengikuti diklat	persen	n/a	22,50%	25,00	0	0	25,00	100	Badan Diklat
		21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemda	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	persen	86,92		79,03			79,03	100	BKD

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		22	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	SOPD	n/a	8	20,00	0	0	20,00	100	BPAD
		23	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	persen	n/a	11	100			100	100	Biro Umum, Humas dan Protokol
		24	Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	Persentase pemberian Layanan Hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	persen	n/a	100%	100	0	0	100	100	BIRO HUKUM
		25	Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/ Kota	persen	n/a	100%	100	0	0	100	100	BIRO HUKUM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		26	Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Persentase Tindaklanjutan Pelaksanaan Diklat atas Kesepakatan Pengiriman Peserta Diklat dari Luar DIY	persen	n/a	100 jenis 3 jenis	100			100	100	Badan Diklat
		27	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Kab./Kota	Persentase jumlah SK gubernur Hasil evaluasi atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./Kota dan dokumen hasil penceramatan atas hasil evaluasi Gubernur	persen	100	100%	100			100	100	DPPKA
		28	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pencapaian Penelitian dan Pengembangan	persen	n/a	100%	100	0	0	100	100	Bandiklat, Biro Adm. Pemb.
		29	Program Pengembangan Kehidupan	Persentase Pelaksanaan Kehidupan	persen	n/a	100%	100			100	100	Biro Kesra

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
			Beragama	Beragama								
	30	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	persen	100		100	15,75	16%	100	100	Biro ADFEMB
	31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	persen	86,92	78%	79,03			79,03	100	BKD
	32	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS	persen	n/a	100%	100			100	100	BKD
	33	Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	persen	75,00		65,00	0	0	65,00	100	BKPM
1	21	Ketahanan Pangan										
		Program Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	n/a	48	53	0	0	53	100	BKPP

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
			Program Peningkatan Ketersediaan & Cadangan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras)	Ton Setara beras	450	290	360	0	0	360	100	BKPP
			Program Panganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	90,00	78%	80,00	0	0	80,00	100	BKPP
			Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	persen	100	99%	100	0	0	100	100	BKPP
			Program Pemberdayaan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	persen	n/a	0,61	74,00	0	0	74,00	100	BKPP
1	22		Pemberdayaan Masyarakat										
		1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes	persen	43,36	33%	34,43	0	0	34,43	100	BPPM
		2	Program peningkatan keberdayaan	Persentase Lembaga pemberdayaan	persen	31,57		29,16	0	0	29,16	100	BPPM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
			masyarakat perdesaan*)	masyarakat aktif									
		3	Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang memiliki profil	persen	100		70,00	0	0	70,00	100	BPPM
		4	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	persen	37,00	34%	35,00	0	0	35,00	100	BPPM
		5	Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	persen	0		0			0	100	BPPM
		6	Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	persen	0		0			0	100	BPPM
1	23		Statistik										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	persen	100	96%	97,00	0	0	97,00	100	Bappeda
1	24		Kearsipan										
		1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya	persen	n/a	9%	11,00	0	0	11,00	100	BPAD
		2	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	persen	30,00		20,00	0	0	20,00	100	BPAD
1	25		Komunikasi dan Informatika										
		1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	urusan / bidang	14,00		12,00	11	92%	12,00	100	DISHUBKOMIN FO
		2	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY	persen	100		80,00	85,8	107%	80,00	100	DISHUBKOMIN FO

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program fasilitasi pos telekomunikasi , Pengendalian frekuensi dan Informasi Publik	Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat	persen	n/a		70,00	65	93%	70,00	100	DISHUBKOMIN FO
1	26		Perpustakaan										
		1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Persentase Peningkatan fasilitas perpustakaan	persen	n/a	45%	85,00	0	0	85,00	100	BPAD
		2	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan	persen	100	25%	80,00	0	0	80,00	100	BPAD
		3	Program Pengembangan Budaya Baca	Peningkatan Pemustaka	persen	n/a	18%	20,00			20,00	100	BPAD
2			Urusan Pilihan										
2	1		Pertanian										
		1	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani,	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan,	persen	n/a	1,70%	1,70			1,70	100	DISTAN

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2			3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
				hortikultura, peternakan)									
		2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	komoditas	3,00		3,00	3	1	3,00	100	DISTAN
		3	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	n/a	1200000	2.356.600	0	0	2.356.600	100	DISTAN
		4	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	ton	394,8	216831,8	387	0	0	387	100	DISTAN
		5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi peternakan	AU (Anima I Unit)	n/a	16223400	700,516	607.812	867,663265	700,516	100	DISTAN
2	2		Kehutanan										
		1	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan	Ton	80,152	95961,04	88	25.199	286,352273	88	100	HUTBUN

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		2	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	NTP sektor perkebunan	persen	n/a	125,86 NTP	128,00	108,8	85%	128,00	100	HUTBUN
		3	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis	Ha	24	2700	26		0%	26	100	HUTBUN
		4	Program penataan kawasan hutan	Persentase Luas Hutan	persen	27,85	26.69%	27,63	29,73	108%	27,63	100	HUTBUN
		5	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan produksi Hasil Hutan	persen	7,37	0,047	5,59	1,91	34%	5,59	100	HUTBUN
		6	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persentase Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah dilakukan pembinaan	persen	90,00	75%	80,00	0	0	80,00	100	HUTBUN
		7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase kerusakan hutan (RPJMD)	persen	23,77	tidak ada	29,14	0	0	29,14	100	HUTBUN
2	3		Energi dan Sumberdaya Mineral										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		1	Program Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	persen	88,10	78%	84,5			84,5	100	PUESDM
		2	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan	Pencapaian Penyediaan energi baru terbarukan	SBM	130,10 (000 SBM)	37,61%	117,95 (000 SBM)			117,95 (000 SBM)	100	PUESDM
		3	Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah	Rerata penurunan muka air tanah	persen	< 20	<20%	< 20	0	0	< 20	100	PUESDM
		4	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi	persen	15,00	13%	9,00			9,00	100	PUESDM
		5	Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar	persen	n/a	50%	60,00			60,00	100	PUESDM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		6	Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	persen	13,00	44%	11,00			11,00	100	PUESDM
2	4		Pariwisata										
		1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW (Orang)	orang	22.198.333	96,49	16.785.128	0	0	16.785.128	100	DISPAR
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	unit	93	99,7	89	0	0	89	100	DISPAR
		3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis	kelompok	96	100	86	0	0	86	100	DISPAR
		4	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata	desa	90	100	80	0	0	80	100	DISPAR
2	5		Kelautan dan Perikanan										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan	kg/kapita/th	n/a	100	konsumsi : 15,63 kg/kapita/th dan ketersediaan: 28,55 kg/kapita/th			konsumsi : 15,63 kg/kapita/th dan ketersediaan: 28,55 kg/kapita/th	100	DISLAUTKAN
		2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap	Ton	8,4		6,9	0	0	6,9	100	DISLAUTKAN
		3	Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Ha	16		14	0	0	14	100	DISLAUTKAN
		4	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300	100	300	0	0	300	100	DISLAUTKAN

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		5	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya	Ton	88,5	100	70,5	0	0	70,5	100	DISLAUTKAN
		6	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	NTP sektor perikanan	%	n/a	100	116,89	0	0	116,89	100	DISLAUTKAN
		7	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut		n/a	100	1.530 orang dan 57 desa tersosialisasi			1.530 orang dan 57 desa tersosialisasi	100	DISLAUTKAN
		8	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan total (RPJMD)	rasio	0,17	100	0,11			0,11	100	DISLAUTKAN
2	6		Perdagangan										
		1	Program Peningkatan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	Juta US\$	n/a	100	207,59	0	0	207,59	100	DISFERINDAGK OP

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,	Jumlah SIUP	Buah	n/a	100	45,106	0	0	45,106	100	DISPERINDAGK OP
		3	Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang.	unit	247,5	100	234	0	0	234	100	DISPERINDAGK OP
2	7		Industri										
		1	Program Pengembangan IKM	Jumlah IKM	Unit	82,292	93,45	81,907	0	0	81,907	100	DISPERINDAGK OP
		2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Nilai produksi IKM (Ribu Rp)	Ribu RP	3.431.546.985		3.337.453.545	0	0	3.337.453.545	100	DISPERINDAGK OP
		3	Program Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah IKM Industri Kreatif	Unit	34,157		34,018	0	0	34,018	100	DISPERINDAGK OP
2	8		Ketransmigrasian										
		1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	persen	n/a	86,39	20,00	0	0	20,00	100	DISNAKERTRANS

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		2	Program Transmigrasi Regional	Jumlah Calon Transmigran yang mendapat Pelatihan Dasar Umum	KK	0		0			0	100	DISNAKERTRANS
3			URUSAN WAJIB KEISTIMEWAN										
3	1		Pendidikan										
		1	Program Pendidikan Anak Usia Dini *)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	88		84	0	0	84	100	Disdikpora
		2	Program Pendidikan Menengah*)	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	persen	80,63		79,71			79,71	100	Disdikpora
		3	Program Pendidikan Non Formal dan Informal*)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	orang	10		8	0	0	8	100	Disdikpora
		4	Program akselerasi pengembangan Pendidikan Terkemuka*)	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran	persen	60		50	0	0	50	100	Disdikpora

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
				berbasis TIK									
		5	Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya *)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	persen	40		10			10	100	Disdikpora
3	2		Kesehatan										
		1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat *)	Persentase rumah tangga ber-PHBS	persen	68	62,00	64	0	0	64	100	Dinas Kesehatan
		2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat *)	Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen	8,5		8,7	0	0	8,7	100	Dinas Kesehatan
		3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit *)	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	persen	67,50		63,00	0	0	63,00	100	Dinas Kesehatan
3	3		Pekerjaan Umum										
		1	Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY*)	Persentase pengaturan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	persen	65		55			55	100	DINAS PUPESDM

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
		2	Program Penataan Kawasan Budaya pendukung keistimewaan DIY *)	Persentase Penataan Kawasan Budaya	persen	n/a	34.89	55,10			55,10	100	DINAS PUPESDM
3	4		Perencanaan Pembangunan										
		1	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangk menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	persen	n/a		12,00			12,00	100	Bappeda
3	5		Perhubungan										
		1	Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan*)	Persentase Dukungan Sarpras Transportasi pada kawasan budaya	persen	35	21.02	27	22,56	84%	27	100	Dishubkominfo
3	6		Lingkungan Hidup										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya*)	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Berbasis Budaya dalam Rangka Mendukung Keistimewaan DIY	persen	N/A		6,5			6,5	100	BLH
3	7		Pertanahan										
		1	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan*)	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	N/A	8792 bidang	9,653	0	0	9,653	100	Biro Tata Pemerintahan
		2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan*)	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	persen	N/A		25	0	0	25	100	Biro Tata Pemerintahan
		3	Program Perbaikan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang								Biro Tata Pemerintahan

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
			pemanfaatan Tanah*)										
3	8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
		1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan *)	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	persen	3,65		3,62			3,62	100	BPPM
3	9		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
		1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera *)	Persentase Cakupan peserta KB aktif	persen	71,78		71,72	0	0	71,72	100	BPPM
3	10		Sosial										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial *)	persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	persen	10,79		8,34	0	0	8,34	100	Dinas Sosial
		2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya *)	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	persen	17,15		10,84	0	0	10,84	100	Dinas Sosial
		3	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) *)	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	persen	70,00		67,50	0	0	67,50	100	Dinas Sosial
		4	Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawana, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *)	Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	persen	70,00		55,00	0	0	55,00	100	Dinas Sosial

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
3	11		Ketenagakerjaan										
		1	Program Peningkatan kesempatan kerja *)	Persentase besaran kesempatan terhadap jumlah pencari kerja	persen	72,00		58,00	0	0	58,00	100	Disnakertrans
3	12		Kebudayaan										
		1	Program Pengembangan Nilai Budaya *)	Persentase nilai budaya, adat, dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	persen	35		18	0	0	18	100	Dinas Kebudayaan
		2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya *)	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	persen	45,00	18.55	25,00	0	0	25,00	100	Dinas Kebudayaan
		3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya *)	Persentase Organisasi Budaya berkategori maju	persen	30		15	0	0	15	100	Dinas Kebudayaan
		4	Program Pengembangan Kerjasama	Persentase implementasi hasil kesepakatan	persen	35	7	15	0	0	15	100	Dinas Kebudayaan

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
			Pengelolaan Kekayaan Budaya *)										
		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan *)	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	persen	70	25	40	15	38%	40	100	Dinas Kebudayaan;
3	13		Kepemudaan dan Olahraga										
		1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan*)	Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	sentra	15		13	12	92%	13	100	Disdikpora
		2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	orang	2,4		2,2	200	90,9090 909	2,2	100	Disdikpora
		3	Program pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda*)	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Pemuda	organisasi	45		41			41	100	Disdikpora

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
3	14		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										
		1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*)	Persentase ketercukupan SDM aparatur dari formasi	persen	0		0			0	100	Satpol PP Praja
		2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah*)	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	persen	0		0			0	100	Sekretariat DPRD
		3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah*)	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	persen	0		0	0	0	0	100	Biro Organisasi
			Program Optimalisasi	Persentase Profesionalisme	persen								Biro Tata Pemerintahan

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyelenggaraan Pemerintahan*)	Tata Kelola Pemerintahan									
3	15		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
		1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan *)	Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat	persen	31,57		29,16	0	0	29,16	100	BPPM
3	16		Kearsipan										
		1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip, *)	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	persen	15		11	0	0	11	100	BPAD
3	17		Komunikasi dan Informatika										
		1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa *)	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	Urusan / Bidang	N/A	11 urusan/bid	12	11	92%	12	100	Dishubkominfo
3	18		Ketahanan Pangan										

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan*)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	persen	90		80	0	0	80	100	BKPP
3	19		Perpustakaan										
		1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan*)	Peningkatan Fasilitas Perpustakaan	persen	90,00		85,00	0	0	85,00	100	BPAD
		2	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan*)	Persentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan Desa	persen	100		80			80	100	BPAD
4			URUSAN PILIHAN KEISTIMEWAAN										
4	1		Pertanian										
		1	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan*)	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	2.427.800		2.356.600	811.195	34%	2.356.600	100	Dinas Pertanian
		2	Program Peningkatan	Produksi pertanian	ton	394800		387000	135.028	35%	387000	100	Dinas Pertanian

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)*	11	12
			Produksi Hortikultura *)	hortikultura								
		3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*)	Populasi peternakan	ekor	18.049.300	16.567.900	607.812	4%	16.567.900	100	Dinas Pertanian
4	2		Kelautan dan Perikanan									
		1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap*)	Produksi perikanan tangkap	ton	8400	6900	0	0	6900	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	3		Kehutanan									
		1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan*)	Persentase kerusakan hutan	persen	23,77	29,14	0	0	29,14	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4	4		Pariwisata									
		1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*)	Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW	orang	22.198.333	16.785.128	0	0	16.785.128	100	Dinas Pariwisata
		2	Program Pengembangan Destinasi	Jumlah Daya Tarik Wisata	unit	93	87 dtw	0	0	89	100	Dinas Pariwisata

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2014	Target Kinerja RKPD Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2015		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Realisasi RKPD Tahun 2015 sd. Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7 +9)*	11	12
			Pariwisata*)										
		3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata*)	Jumlah Pokdarwis	kelompok	96	81 klp	86	0	0	86	100	Dinas Pariwisata
		4	Program Pengembangan Desa Wisata*)	Jumlah Desa Wisata	desa	90		80	0	0	80	100	Dinas Pariwisata
4	5		Industri										
		1	Program Pengembangan IKM*)	Jumlah IKM	unit	82292		81907	0	0	81907	100	Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UKM
		2	Program Pengembangan Industri Kreatif*)	Jumlah IKM Industri Kreatif	unit	34,157		34,018	0	0	34,018	100	Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UKM

Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2015

2.5 Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.5.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada anggaran murni dan perubahan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Tabel 2.141 Rencana Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Pada APBD Murni Tahun 2015 dan Perubahan APBD Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Urut	Uraian	2015 (MURNI)	2015 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	3.424.276.009.601,00	3.327.919.436.230,77	(96.356.573.370,23)	-2,81%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.453.213.230.863,00	1.494.771.930.656,77	41.558.699.793,77	2,86%
1.1.1.	Pajak Daerah	1.296.531.743.697,00	1.323.894.743.697,00	27.363.000.000,00	2,11%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	40.376.417.845,00	42.812.102.025,00	2.435.684.180,00	6,03%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.978.161.721,00	52.604.081.931,77	(3.374.079.789,23)	-6,03%
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.326.907.600,00	75.461.003.003,00	15.134.095.403,00	25,09%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.046.869.045.263,00	1.056.608.866.160,00	9.739.820.897,00	0,93%
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	87.240.283.263,00	96.980.104.160,00	9.739.820.897,00	11,16%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	920.544.722.000,00	920.544.722.000,00	0,00	0,00%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	39.084.040.000,00	39.084.040.000,00	0,00	0,00%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	924.193.733.475,00	776.538.639.414,00	(147.655.094.061,00)	-15,98%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	9.015.333.475,00	9.015.333.475,00	0,00	0,00%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	915.178.400.000,00	767.523.305.939,00	(147.655.094.061,00)	-16,13%

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Nomor Urut	Uraian	2015 (MURNI)	2015 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	3.424.276.009.601,00	3.327.919.436.230,77	(96.356.573.370,23)	-2,81%
2.	BELANJA	3.696.264.876.876,12	3.779.606.193.605,25	83.341.316.729,13	2,25%
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.796.753.921.956,90	1.856.270.568.814,90	59.516.646.858,00	3,31%
2.1.1.	Belanja Pegawai	526.621.883.306,00	554.795.265.803,00	28.173.382.497,00	5,35%
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4.	Belanja Hibah	579.125.390.975,00	579.550.353.282,00	424.962.307,00	0,07%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	9.134.490.000,00	9.134.490.000,00	0,00	0,00%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	511.457.704.735,90	579.376.006.789,90	67.918.302.054,00	13,28%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	147.414.452.940,00	122.414.452.940,00	(25.000.000.000,00)	-16,96%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00	11.000.000.000,00	(12.000.000.000,00)	-52,17%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.899.510.954.919,22	1.923.335.624.790,35	23.824.669.871,13	1,25%
2.2.1.	Belanja Pegawai	137.325.260.158,00		0,00	0,00%
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.063.344.945.512,00		0,00	0,00%
2.2.3.	Belanja Modal	698.840.749.249,22		0,00	0,00%
	JUMLAH BELANJA	3.696.264.876.876,12	3.779.606.193.605,25	83.341.316.729,13	2,25%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(271.988.867.275,12)	(451.686.757.374,48)	(179.697.890.099,36)	-11,95%
		7,36%	11,95%		

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Nomor Urut	Uraian	2015 (MURNI)	2015 (PERUBAHAN)	Tambah/ (Kurang)	
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN	271.988.867.275,12	451.686.757.374,48	179.697.890.099,36	66,07%
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	281.988.867.275,12	498.330.738.232,25	216.341.870.957,13	76,72%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	281.988.867.275,12	498.330.738.232,25	216.341.870.957,13	76,72%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	281.988.867.275,12	498.330.738.232,25	216.341.870.957,13	76,72%
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	46.643.980.857,77	36.643.980.857,77	366,44%
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	46.643.980.857,77	36.643.980.857,77	366,44%
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.5.	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.6.	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00%

Perubahan RKPD DIY Tahun 2015

Nomor Urut	Uraian	2015 (MURNI)	2015 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	46.643.980.857,77	36.643.980.857,77	366,44%
	PEMBIAYAAN NETO	271.988.867.275,12	451.686.757.374,48	179.697.890.099,36	66,07%
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	(0,00)	(0,00)	

2.5.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2.5.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut.

2.5.2.2 Target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2015

Pada APBD Murni Tahun anggaran 2015 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp 3,424 Trilyun, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan sebesar Rp 3,327 Trilyun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 96,356 Milyar atau turun sebesar 2,81

%. Pendapatan Daerah DIY tahun 2015 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,453 Trilyun pada APBD Murni Tahun 2015 menjadi 1,494 Trilyun pada Perubahan APBD Tahun 2015;
2. Dana Perimbangan sebesar 1,046 Trilyun pada APBD Murni Tahun 2015 menjadi Rp 1,056 Trilyun pada Perubahan APBD Tahun 2015;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 924,193 Milyar pada APBD Murni Tahun 2015 dan turun pada Perubahan APBD Tahun 2015 menjadi Rp 776,538 Milyar.

2.5.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2015

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada APBD tahun anggaran 2015 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,453 Trilyun yang mengalami peningkatan menjadi 1,494 Trilyun pada Perubahan APBD Tahun 2015 atau naik sebesar 2,86 persen yang bersumber dari peningkatan pajak daerah, peningkatan hasil retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

A. Pajak Daerah

Jenis penerimaan pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 511,007 Milyar, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2015 diproyeksikan naik sebesar Rp 551,007 Milyar.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 448,990 Milyar, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 409,990 Milyar atau turun sebesar Rp 39,000 Milyar atau turun 8,69 persen.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 163,637 Milyar, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp 190,000 Milyar sehingga naik sebesar Rp 26,363 Milyar atau 16,11%. Kenaikan ini terjadi karena diprediksikan karena meningkatnya jumlah pemakaian Bahan Bakar Minyak pada tahun 2015 di DIY seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan (PAP)

PAP pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 180,000 juta yang akan mengalami kondisi yang sama dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok pada APBD Tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 172,716 Milyar dan tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2015.

B. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 40,376 Milyar sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp 42,812 Milyar atau naik sebesar Rp 2,435 Milyar atau 6,03 persen. Retribusi Daerah pada APBD Murni Tahun 2015 terdiri dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp 5,832 Milyar; Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 33,685 Milyar; dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp 858,590 Juta. Retribusi Daerah tersebut mengalami perubahan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2015, dimana Retribusi Jasa Umum menjadi sebesar Rp 6,050 Milyar; Retribusi

Jasa Usaha sebesar Rp 35,802 Milyar; dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp 959,090 Juta.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD yang terdiri dari PD. Taru Martani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional. Lebih lanjut Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta, meliputi PT. Yogyakarta Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida, serta Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 55,978 Milyar, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp 52,604 Milyar atau mengalami penurunan sebesar Rp 3,374 Milyar atau turun 6,03 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan dari pendapatan BUMD, khususnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 60,326 Milyar sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 75,461 Milyar atau naik sebesar Rp 15,134 Milyar atau 25,09 persen. Peningkatan tersebut lebih pada Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan khususnya Penjualan Kendaraan Roda Dua, Penjualan Kendaraan roda Empat, Penjualan Bahan Bekas Bangunan, Penjualan Hasil Kehutanan, serta Penjualan Hasil Peternakan. Lebih lanjut kontribusi lainnya berasal dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Pengelolaan BLUD, serta Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik daerah.

2.5.2.2.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH terdiri atas DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH CHT. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah

tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Target penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1,046 Trilyun yang mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar Rp 1,056 Trilyun atau naik sebesar Rp 9,733 Milyar atau naik 0,93 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan atas Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai.

A. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 87,240 Milyar sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp 96,980 Milyar, turun sebesar Rp 9,739 Milyar atau 11,16%.

B. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum pada APBD Murni Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 920,544 Milyar dan tidak mengalami perubahan pada penyusunan Perubahan APBD Tahun 2015.

C. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada APBD Murni Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 39,084 Milyar dan tidak mengalami perubahan pada penyusunan Perubahan APBD Tahun 2015.

2.5.2.2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah) dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp 924,193 Milyar, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp 776,538 Milyar.

A. Hibah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 Hibah dianggarkan sebesar Rp 9,015 Milyar, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tidak mengalami perubahan.

B. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD Murni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 915,178 Milyar, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan mengalami perubahan senilai

Rp 767,523 Milyar atau turun sebesar 147,655 Milyar karena adanya sisa dana keistimewaan.

2.5.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

2.5.3.1 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2015 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

2.5.3.2 Kebijakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) dengan uraian, sebagai berikut:

2.5.3.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah,

khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.

3. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
4. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
5. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
6. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
7. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2.5.3.2.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

A. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah apada Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

2.5.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.5.4.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada

selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.5.4.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2015 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) adalah sebesar Rp 281,988 Milyar, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2015 diprediksi sebesar Rp 498,330 Milyar.

2.5.4.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada tahun 2015 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 10 Milyar dan diprediksi mengalami peningkatan sebesar 46,643 Milyar pada penyusunan Perubahan APBD Tahun 2015.

BAB 3 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

3.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan DIY pada tahun 2015 adalah: "Menguatkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan". Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. Sosial Budaya.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka:

- a. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya;
- b. Memupuk apresiasi masyarakat terhadap penghargaan dan partisipasi terhadap pengembangan serta pelestarian kebudayaan;
- c. Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan;
- d. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
- e. Kualitas pengelolaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. Pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat
- g. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk meningkat.
- h. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat meningkat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung *pertama*, keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan). *Kedua*, RAD MDGs 2011-2015, yang merupakan tahun terakhir RAD percepatan capaian MDGs. Status capaian terdiri 19 indikator sudah tercapai, 36 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian khusus yakni: penurunan angka

kemiskinan dan *un need meet* dalam pelaksanaan keluarga berencana dimana target 5,5 % sedang realisasi 8% di Tahun 2013.

2. Ekonomi;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang progresif. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD 2012-2017 (Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif).

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan Melek Huruf
- c. Daya Saing Pendidikan meningkat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

4. Hukum dan Aparatur;

Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja pemerintah daerah
- b. Pengelolaan keuangan daerah

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD 2012-2017 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik).

5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin, diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Termasuk dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan energy yang berkesinambungan.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang).

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan layanan publik baik disisi kualitas maupun kuantitasnya, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat dipedesaan, serta dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat.

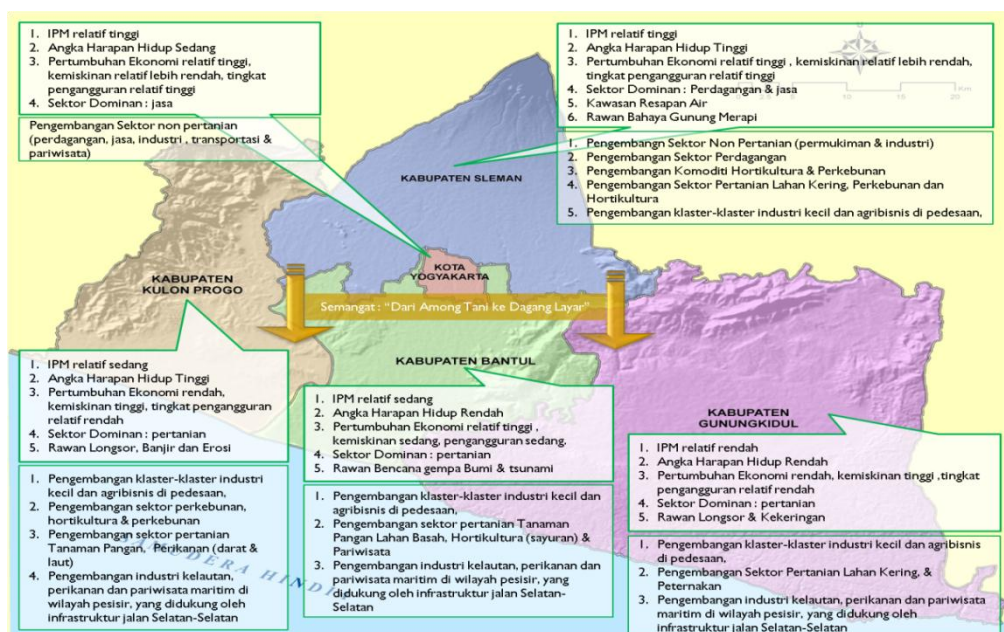
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).

7. Lingkungan Hidup dan mitigasi Bencana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

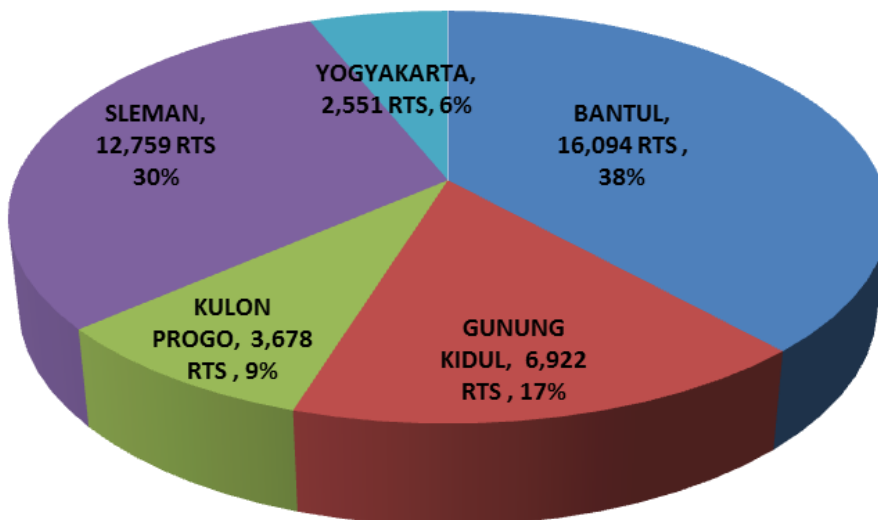
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung *pertama*, keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah). *Kedua*, mendukung pelaksanaan RAD Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2012-2020.

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan tahun 2015 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Prioritas pembangunan kewilayahan dititik beratkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya. Berikut merupakan gambaran kondisi per-wilayah Kabupaten-Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta potensi pengembangannya.



Gambar 3.1 Arah Pembangunan Kewilayahan DIY

Pembangunan kewilayahan akan diarahkan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Berdasarkan data dan penentuan target sasaran rumah tangga miskin dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2014 diperoleh target sasaran rumah tangga miskin sebesar 42.004 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sasaran RTS tersebut terbagi dalam proporsi kabupaten-kota sebagai berikut:



Gambar 3.2 Porsi Rumah Tangga Sasaran Pada Kabupaten/Kota

Titik lokasi sasaran kemiskinan pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari titik sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2013 dan 2014. Penentuan lokasi kecamatan didasarkan atas Data PPLS TNP2K yang mendata 40 % penduduk berpendapatan terendah. Berdasarkan data tersebut kemudian diambil kebijakan penurunan kemiskinan sebesar 2%, dengan sasaran RTS yang posisinya diambang garis kemiskinan

Pendetailan atas rumah tangga sasaran berdasarkan Jenis pekerjaan dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas program pengurangan kemiskinan. Adapun pembagian sasaran berdasarkan sektor lapangan usaha adalah sebagai berikut ini:

Tabel 3.1 Jumlah Sasaran RTS Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha, Kabupaten/Kota Tahun 2014

Jenis Lapangan Usaha	Bantul	Gunung Kidul	Kota Yogya	Kulon Progo	Sleman	Total
1	2	3	4	5	6	7
Lainnya	215	82	141	9	238	685
Tidak bekerja	621	149	136	118	627	1,651
Pertanian tanaman padi/palawija	3,754	4,234	3	1,187	3,388	12,566
Horikultura	62	36	-	221	135	454

Jenis Lapangan Usaha	Bantul	Gunung Kidul	Kota Yogya	Kulon Progo	Sleman	Total
1	2	3	4	5	6	7
Perkebunan	162	35	1	242	101	541
Perikanan	82	19	6	5	61	173
Peternakan	592	335	11	312	368	1,618
Kehutanan dan pertanian lain	85	74	2	39	81	281
Pertambangan/ penggalian	199	56	11	24	231	521
Industri pengolahan	1,947	248	155	337	739	3,426
Listrik, gas, air	32	5	3	1	19	60
Bangunan/konstruksi	4,525	864	237	788	4,098	10,512
Hotel dan rumah makan	118	23	101	4	81	327
Perdagangan	1,777	509	658	211	1,066	4,221
Transportasi dan pergudangan	684	81	284	20	326	1,395
Kuangan dan asuransi	10	3	2	-	18	33
Informasi dan komunikasi	11	4	11	-	16	42
Jasa	1,218	165	789	160	1,166	3,498
TOTAL	16,094	6,922	2,551	3,678	12,759	42,004

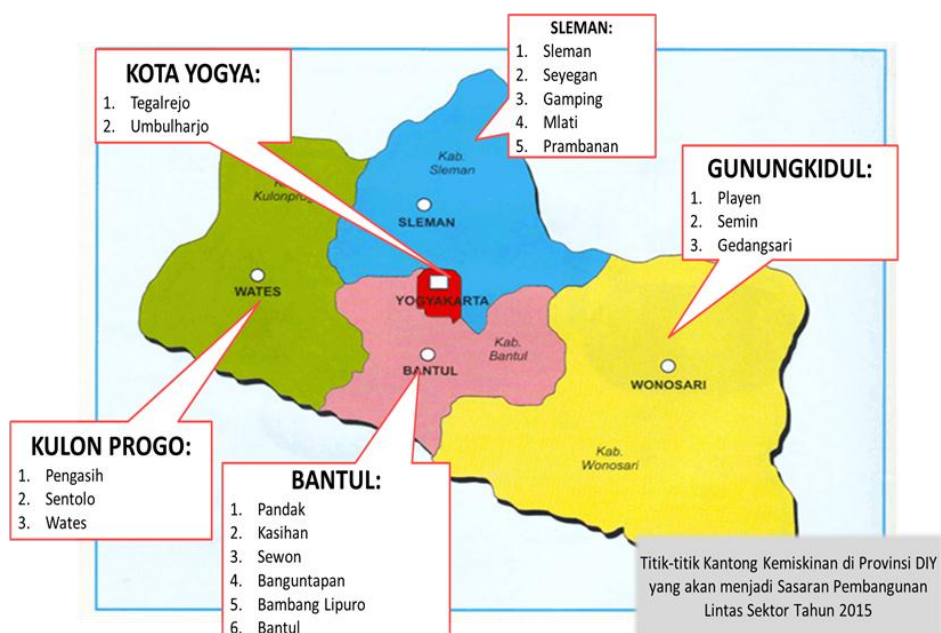
Sumber : BPS DIY, Tahun 2014

Kebijakan rencana pembangunan untuk penurunan kemiskinan tidak hanya melalui program-program regular namun juga melalui akselerasi terhadap rumah tangga sasaran berdasarkan garis kemiskinan. Wujud riil dari kegiatan akselerasi penurunan kemiskinan di DIY adalah dengan pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten-kota yang bersifat khusus.

Beberapa lokasi kecamatan sebagai sasaran kemiskinan melalui skema program pemberdayaan dan bantuan keuangan terdistribusi pada Kabupaten Sleman terdapat 5 (lima) Kecamatan; Gunungkidul 3 (tiga) kecamatan; Kota Yogyakarta 2 (dua) Kecamatan; Kulon Progo 3 (tiga) Kecamatan dan Bantul 6 (enam) Kecamatan. Penentuan kecamatan terpilih didasarkan atas proporsi sebaran RTS baik dilevel antar Kabupaten-Kota dan dilevel Kecamatan dalam satu Kabupaten-kota. Titik-Titik lokasi kecamatan sebagai sasaran kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Kecamatan Titik Sasaran Kemiskinan di Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	
1.	Sleman	1.	Sleman
		2.	Seyegan
		3.	Gamping
		4.	Mlati
		5.	Prambanan
2.	Gunungkidul	1.	Playen
		2.	Semin
		3.	Gedangsari
3.	Kota Yogyakarta	1.	Tegalrejo
		2.	Umbulharjo
4.	Kulon Progo	1.	Pengasih
		2.	Sentolo
		3.	Wates
5.	Bantul	1.	Pandak
		2.	Kasihan
		3.	Sewon
		4.	Banguntapan
		5.	Bambang Lipuro
		6.	Bantul



Gambar 3.3 Kecamatan yang Menjadi Fokus Sasaran Pembangunan Lintas Sektor Tahun 2015

3.2 Program Prioritas Pembangunan Pada RKPD Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2015

Kebijakan Belanja langsung diarahkan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut. Adapun program prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - c. Program Pendidikan Menengah
 - d. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
 - e. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 - f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - g. Program Pendidikan Tinggi
 - h. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
 - i. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
 - j. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
 - k. Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
 - l. Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan
2. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - d. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
 - e. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
 - f. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
3. Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Pengembangan Komunika, Informasi dan Media Massa
 - b. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
 - c. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi
 - d. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi

- e. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 4. Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- 5. Sosial
 - a. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo
 - b. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - c. Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K3)
 - d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
 - e. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma
 - f. Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial
 - g. Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar
 - h. Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana
 - i. Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial
 - j. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - k. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial
- 6. Kesehatan
 - a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
 - e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
 - f. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengawasan Makanan
 - g. Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - h. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD BAPELJAMKESOS

- i. Program Pembinaan Kesehatan Lansia
- j. Program Pembinaan Kesehatan Ibu
- k. Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
- l. Program Pelatihan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Diklat
- m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Ghrasia
- n. Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
- o. Program Pembiayaan Kesehatan
- p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- 7. Keluarga Berencana
 - a. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - b. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - c. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - d. Program Pengembangan Bina Keluarga
- 8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - b. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - e. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - f. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
- 9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa
- 10. Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

- b. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
 - c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - f. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
 - h. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
11. Pertanian
- a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - c. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
 - d. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - e. Program Peningkatan Produksi Holtikultura
12. Ketahanan Pangan
- a. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
 - b. Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - c. Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - d. Program Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan
 - e. Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
13. Pariwisata
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Kemitraan
 - d. Program Pengembangan Desa Wisata
14. Koperasi dan UKM
- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 15. Industri
 - a. Program Pengembangan IKM
 - b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
- 16. Penanaman Modal
 - a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - b. Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi
- 17. Perdagangan
 - a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 18. Ketenagakerjaan
 - a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - b. Program peningkatan kesempatan kerja
 - c. Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan
 - d. Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan
 - e. Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- 19. Ketransmigrasian
 - a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 20. Kehutanan
 - a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
 - e. Program Penataan Kawasan Hutan
 - f. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
 - g. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

21. Perencanaan Pembangunan

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
- d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
- f. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
- g. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

22. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
- c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- g. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
- h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- j. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- k. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- l. Program Analisis Kebijakan Pembangunan
- m. Program Penelitian dan Pengembangan
- n. Program Pendidikan Kedinasan
- o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- p. Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
- q. Program Pengawasan Produk Hukum

- r. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
 - s. Program Pengembangan Kehidupan Beragama
 - t. Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah
 - u. Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD Serta Lembaga Keuangan Mikro
 - v. Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah
 - w. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - x. Program Pencegahan Dini Bencana
 - y. Program Penanggulangan Korban Bencana
 - z. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - aa. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - bb. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - cc. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
 - dd. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - ee. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24. Energi dan Sumberdaya Mineral
- a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
 - b. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
 - c. Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah
 - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi
 - e. Program Pembinaan dan Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan
 - f. Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan
25. Kearsipan
- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
 - c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

26. Statistik

- a. Program Pengembangan Statistik Daerah

27. Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

28. Pertanahan

- a. Program Perbaikan, Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan

29. Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
- e. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- f. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
- g. Program Pengendalian Banjir
- h. Program Pelayanan Jasa Pengujian
- i. Program Pengelolaan Persampahan
- j. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
- k. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
- l. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan
- m. Program peningkatan jalan dan jembatan
- n. Program pengkajian dan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum
- o. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
- p. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
- q. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

- r. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- s. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- 30. Perumahan
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - c. Program Pengurangan Kawasan Kumuh
- 31. Penataan Ruang
 - a. Program Perencanaan Tata Ruang
 - b. Program Pemanfaatan Ruang
 - c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 32. Perhubungan
 - a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
 - c. Program peningkatan pelayanan angkutan
 - d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
 - f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - g. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
 - h. Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
 - i. Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
- 33. Lingkungan Hidup
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

34. Perpustakaan

- a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
- c. Program Pengembangan Budaya Baca

35. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
- d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
- e. Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
- f. Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2015

3.3.1 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Non Keistimewaan

Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 non keistimewaan yang diusulkan berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penambahan/pengurangan TUK (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
3. Penambahan kegiatan baru (misal : karena ada ketentuan dari pusat);
4. Tambahan untuk penyertaan modal;
5. Tambahan untuk kegiatan FGD;
6. Tambahan peralatan dan perlengkapan kantor;
7. Tambahan untuk fasilitasi jaringan internet;
8. Pembelian kendaraan;
9. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja;
10. Pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Dan lain sebagainya.

Secara lebih jelasnya usulan perubahan program/kegiatan non keistimewaan didalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Unsur/ Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
1	1.01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.011.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. surat kabar 2. buku referensi	5 jenis 1 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 17.139.200,00	1. surat kabar 2. buku referensi	5 jenis 1 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 17.139.200,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	makanan dan minuman siang	12181 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 133.992.000,00	makanan dan minuman siang	12181 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 133.892.000,00	(-) Rp. 100.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : evaluasi depdagri Penambahan : -	
1.011.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Facilitasi Pengajaran Dinas Luar daerah	12 bulan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 250.000.000,00	Facilitasi Pengajaran Dinas Luar daerah	12 bulan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan kantor /gedung/tempat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Keamanan Kantor/gedung /tempat kerja	10 unit	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 837.673.000,00	Keamanan Kantor/gedung /tempat kerja	10 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 1.020.553.500,00	Rp. 182.880.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 8.740.574.000,00				Rp. 8.737.189.500,00	(-) Rp. 3.384.500,00			
1.011.01.01.02.005	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Kendaraan dinas/operasional roda 4 2. Kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit 8 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 753.768.000,00	1. Kendaraan dinas/operasional roda 4 2. Kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit 8 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 753.768.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.02.007	Pengadaan Perengkapan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	perengkapan gedung kantor	7 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 818.993.000,00	perengkapan gedung kantor	7 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 815.608.500,00	(-) Rp. 3.384.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : evaluasi depdagri Penambahan : -	
1.011.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor	9 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 420.853.000,00	Peralatan gedung kantor	9 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 420.853.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.02.010	Pengadaan Mebelur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	mebelur	4 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 218.373.000,00	mebelur	4 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 218.373.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : pengadaan bedset untuk youth centre	
1.011.01.01.02.013	Pengadaan tanah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. lahan untuk sekolah 2. sertifikat	8245 m2 1 buah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.657.867.000,00	1. lahan untuk sekolah 2. sertifikat	8245 m2 1 buah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.657.867.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala umah Dinas	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rumah dinas terpelihara	1 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 20.000.000,00	Rumah dinas terpelihara	1 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	gedung kantor terpelihara	4 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 285.000.000,00	gedung kantor terpelihara	4 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 285.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4, roda 6, roda 2)	3 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 409.390.000,00	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4, roda 6, roda 2)	3 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 409.390.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.011.01.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	perengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 198.000.000,00	perengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 198.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Target	Totol Ukur	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.01.1.01.01.02.028	pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	100 %	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Peralatan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 275.000.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 275.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	100 %	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	mebelur terpelihara	6 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 97.320.000,00	mebelur terpelihara	6 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 97.320.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.02.042	Rehabilitasi bangunan gedung kantor	100 %	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	rehabilitasi gedung kantor	2 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.486.010.000,00	rehabilitasi gedung kantor	2 unit	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.486.010.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.02.098	Pemeliharaan Asrip Dinas	100 %	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	1. Pengelolan Asrip Dinas 2. Penilaian dan Penyusutan Asrip	8000 Berkas 4 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 100.000.000,00		8000 Berkas 4 jenis	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.05	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 575.582.000,00				Rp. 575.582.000,00	Rp. 0,00		
1.01.1.01.01.05.042	Pembinaan dan Pelaksanaan Bimtek Bagi Pengelola Keuangan	100 %	Tervuludnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat pengelolaan administrasi keuangan meningkat kemampuannya	105 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 95.000.000,00				Rp. 95.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.05.050	Pengembangan dan administrasi aset barang milik Daerah	100 %	Tervuludnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat administrasi aset barang milik pemerintah meningkat kemampuannya	30 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 82.582.000,00				Rp. 82.582.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.05.051	Workshop Penataan dan Penataan Anggaran TI	100 %	Tervuludnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat penyusunan dan penataan anggaran berbasis TI meningkat kemampuannya	60 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 195.000.000,00				Rp. 195.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.05.057	Bimtek Tata Naskah dan kearsipan	100 %	Tervuludnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat tata naskah dan kearsipan meningkat kemampuannya	30 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 68.000.000,00				Rp. 68.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.05.058	Bimtek Administrasi Sekolah Bagi Pengelola Administrasi Keuangan Sekolah	100 %	Tervuludnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat pengelolaan administrasi keuangan sekolah meningkat kemampuannya	90 Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 135.000.000,00				Rp. 135.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN						Rp. 233.000.000,00				Rp. 232.990.000,00	(-) Rp. 10.000,00		

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015												
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga												
Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											(15)
1.01.1.01.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tervuludnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai Laki SKPD	75 -	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 11.000.000,00	Nilai Laki SKPD	75 -	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 11.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tervuludnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 %	Keselngan anggaran kas dengan realisasi anggaran Dinas Dikpora DIT	0 persen	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 45.000.000,00	Keselngan anggaran kas dengan realisasi anggaran Dinas Dikpora DIT	0 persen	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 45.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.06.018	Penyusunan Program Kegiatan SKPD serta pengumpulan data dan informasi	Tervuludnya penatausahaan pengumpulan data dan informasi pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 %	Renja, RKA, DPA	1 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 146.000.000,00	Renja, RKA, DPA	1 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 145.990.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : efisiensi Penambahan : -
1.01.1.01.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tervuludnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 31.000.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 31.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*						Rp. 2.137.680.000,00				Rp. 2.137.680.000,00	
1.01.1.01.01.15.100	Pengembangan Model PAUD	Angka Partisipasi Kasir (APK) PAUD	84 %	1. EGD seminar dan Ujicoba Model PAUD	3 model	DIY	Rp. 600.000.000,00	1. EGD seminar dan Ujicoba Model dan bahan ajar PAUD	3 model	Banguntapan	Rp. 600.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Pelayaran PAUD di PAUD Percontohan DIY	3 lembaga				3 lembaga			
				3. Pendidikan dan pelatihan pengelola dan pendidik PAUD	270 Orang				270 Orang			
1.01.1.01.01.15.101	Penyediaan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasir (APK) PAUD	84 %	1. Penyusunan kurikulum PAUD Holistik Integratif	30 Orang	DIY	Rp. 1.537.680.000,00	1. Penyusunan kurikulum PAUD Holistik Integratif	30 Orang	DIY	Rp. 1.537.680.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Bimtek Reritsan PAUD indui	160 Orang				160 Orang			
				3. Bimtek Akreditasi Lembaga PAUD	160 lembaga				160 lembaga			

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				4. Bimtek pendidik/ pengelola keterampilan terpaduan PAUD, BKB, SODITK dan Posyandu	120 Orang			4. Bimtek pendidik/ pengelola keterampilan terpaduan PAUD, BKB, SODITK dan Posyandu	120 Orang			(15)
				5. Pembinaan dan Pemberdayaan Bunda PAUD dan gugus PAUD	55 Orang			5. Pembinaan dan Pemberdayaan Bunda PAUD dan gugus PAUD	55 Orang			
				6. Pembinaan Kreativitas pendidik PAUD	40 Orang			6. Pembinaan Kreativitas pendidik PAUD	40 Orang			
1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBELAN TAHUN						Rp. 25.679.965.000,00				Rp. 20.501.015.000,00	
1.01.1.01.01.16.093	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS/ BOSDA) Pendidikan Dasar	Persentase kinerja pemetaan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	BOS dan BOSDA	2 satuan pendidikan	DIY	Rp. 750.000.000,00	BOS dan BOSDA	2 satuan pendidikan	DIY	Rp. 734.510.000,00	Reguler APBD
1.01.1.01.01.16.092	Peningkatan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Galur Kulonprogo	Persentase kinerja pemetaan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir semester, Try Out, Ujian Sekolah, Ujian Praktik 3. Workshop peningkatan kompetensi Guru Cerdas Istimewa 4. Study Banding Guru dan Pengelola kelas CI 5. Pengadaan sarana	1 tahun 5 kegiatan 34 Orang 4 Orang 9 jenis	Galur	Rp. 650.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir semester, Try Out, Ujian Sekolah, Ujian Praktik 3. Workshop peningkatan kompetensi Guru Cerdas Istimewa 4. Study Banding Guru dan Pengelola kelas CI 5. Pengadaan sarana	1 tahun 5 kegiatan 34 Orang 4 Orang 9 jenis	Galur	Rp. 650.000.000,00	Reguler APBD
1.01.1.01.01.16.093	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wates Kulonprogo	Persentase kinerja pemetaan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 8 jenis	Wates	Rp. 700.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 8 jenis	Wates	Rp. 700.000.000,00	Reguler APBD
1.01.1.01.01.16.094	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul	Persentase kinerja pemetaan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Ujian umum semester, les, tryout, ujian praktek, ujian sekolah 3. Studi lapangan 4. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 6 kegiatan 5 mapel 7 jenis	Karangmojo	Rp. 650.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Ujian umum semester, les, tryout, ujian praktek, ujian sekolah 3. Studi lapangan 4. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 6 kegiatan 5 mapel 7 jenis	Karangmojo	Rp. 650.000.000,00	Reguler APBD

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Uraian /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah /Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.01.1.01.01.16.095	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Lomba OSN tingkat sekolah 3. Studi lapangan 4. Workshop pengembangan kurikulum CIBI 5. Penerbitan buletin sekolah 6. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 4 mapel 3 mapel 30 Orang 2 edisi 10 jenis	Wonosari	Rp. 850.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Lomba OSN tingkat sekolah 3. Studi lapangan 4. Workshop pengembangan kurikulum CIBI 5. Penerbitan buletin sekolah 6. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 4 mapel 3 mapel 30 Orang 2 edisi 10 jenis	Wonosari	Rp. 850.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.16.136	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba SD	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	1. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SD 2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SD 3. Seleksi, pembinaan dan pengiriman seni TK/SD 4. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional SD 5. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba akademik tingkat dokter kecil 6. Lomba Klub Olahraga SD 7. Lomba cerdas cermat SD	22 cabor 2 mapel 5 cabang 3 cabang	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.902.410.000,00	1. seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SD 2. seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SD 3. seleksi, pembinaan dan pengiriman seni TK/SD 4. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional SD 5. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba akademik tingkat dokter kecil 6. Lomba Klub Olahraga SD 7. Lomba cerdas cermat SD	22 cabor 2 mapel 5 cabang 3 cabang	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.897.560.000,00	(-) Rp. 4.850.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : efisiensi Penambahan : -
1.01.1.01.01.16.137	Penyelenggaraan, Pembinaan dan pengiriman Lomba SMP	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	1. seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SMP 2. seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SMP 3. seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN SMP 4. Lomba Motivasi Belajar mandiri SMP Terbuka 5. Gladi dan Pembinaan LPJR 6. Lomba Cerdas Cermat SMP	10 cabang 4 mapel 13 cabang 1 cabang	DIY dan Luar DIY	Rp. 2.019.500.000,00	1. seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SMP 2. seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SMP 3. seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN SMP 4. Lomba Motivasi Belajar mandiri SMP Terbuka 5. Gladi dan Pembinaan LPJR 6. Lomba Cerdas Cermat SMP	10 cabang 4 mapel 13 cabang 1 cabang	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.949.430.000,00	(-) Rp. 70.070.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : berkurangnya cabang lomba nasional Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015															
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga															
Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Bertambah /Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi					
1.01.1.01.01.16.138	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SD	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)
		Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	1. Penyusunan soal tryout	3 mapel	DIY	Rp. 783.190.000,00	1. Penyusunan soal tryout	3 mapel	DIY	Rp. 783.190.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. Bimtek kurikulum TK dan SD	100 Orang			2. Bimtek kurikulum TK dan SD	100 Orang						
				3. Bimtek Pembinaan akreditasi jenjang SD	75 Orang			3. Bimtek Pembinaan akreditasi jenjang SD	75 Orang						
				4. Bimtek klinik sains SD	2 Mapel/50 Orang			4. Bimtek klinik sains SD	2 Mapel/50 Orang						
				5. Sosialisasi penelitian karya ilmiah SD	65 Orang			5. Sosialisasi penelitian karya ilmiah SD	65 Orang						
				6. Bimtek penelitian karya ilmiah SD	15 Orang			6. Bimtek penelitian karya ilmiah SD	15 Orang						
				7. Lomba Kreativitas siswaDasar	1 bidang			7. Lomba Kreativitas siswaDasar	1 bidang						
1.01.1.01.01.16.139	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMP		84,92 %	1. Penyusunan soal	4 mapel	DIY	Rp. 2.224.865.000,00	1. Penyusunan soal	4 mapel	DIY	Rp. 2.224.865.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
		Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar		10. Workshop Klinik sains	200 Orang			10. Workshop Klinik sains	200 Orang						
				11. Bimtek klinik sains	300 Orang			11. Bimtek klinik sains	300 Orang						
				12. Sosialisasi penelitian	375 Orang			12. Sosialisasi penelitian	375 Orang						
				13. Bimtek penelitian	80 Orang			13. Bimtek penelitian	80 Orang						
				2. Bimtek Ujian Nasional	80 Orang			2. Bimtek Ujian Nasional	80 Orang						
				3. Workshop MGMP SMP	50 Orang			3. Workshop MGMP SMP	50 Orang						
				4. Pembinaan Akreditasi jenjang SMP	50 Orang			4. Pembinaan Akreditasi jenjang SMP	50 Orang						
				5. Pengembangan dan pembinaan TPK SMP	150 Orang			5. Pengembangan dan pembinaan TPK SMP	150 Orang						
				6. Sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan Narkoba	300 Orang			6. Sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan Narkoba	300 Orang						
				7. Diklat guru MIPA	100 Orang			7. Diklat guru MIPA	100 Orang						
				8. Sosialisasi calon SSN	100 Orang			8. Sosialisasi calon SSN	100 Orang						
				9. Diklat calon SSN	100 Orang			9. Diklat calon SSN	100 Orang						
1.01.1.01.01.16.140	Perluasan Aksesibilitas Pendidikan Dasar		84,92 %	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar		DIY	Rp. 14.800.000.000,00	Penyediaan Beasiswa Prestasi dan Kartu Cerdas	780 siswa	DIY	Rp. 9.800.000.000,00	(-) Rp. 5.000.000.000,00	Regular APBD Pajak Rakot	Efisiensi Kegiatan : - pengeluaran rekening ke beasiswa sekolah menengah Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.01.1.01.01.16.141	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Budaya Mutu SD	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84,92 %	Penyelenggaraan lomba budaya mutu SD tingkat provinsi	6 kategori	DIY	Rp. 350.000.000,00	Penyelenggaraan lomba budaya mutu SD tingkat provinsi	6 kategori	DIY	Rp. 261.460.000,00	(-) Rp. 88.540.000,00	Pajak Rotok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH*						Rp. 35.582.267.000,00				Rp. 40.516.287.000,00	Rp. 4.934.020.000,00		
1.01.1.01.01.17.086	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 2 Wates Kulonprogo	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79,71 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan sarana prasarana sekolah (alat-alat laboratorium) 3. Pengadaan ruang kelas	1 tahun 26 jenis 272 m2	Wates	Rp. 894.900.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan sarana prasarana sekolah (alat-alat laboratorium) 3. Pengadaan ruang kelas	1 tahun 26 jenis 272 m2	Wates	Rp. 894.900.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.17.087	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79,71 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Workshop penyusunan proker 3. Bedah SKL dan pembuatan bank soal 4. Tryout, UTS, UAS, UKK, Usek 5. pekan seni, budaya dan ilmiah 6. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 140 Orang 60 Orang 5 kegiatan 11 bidang 6 jenis	Wonosari	Rp. 950.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Workshop penyusunan proker 3. Bedah SKL dan pembuatan bank soal 4. Tryout, UTS, UAS, UKK, Usek 5. pekan seni, budaya dan ilmiah 6. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 140 Orang 60 Orang 5 kegiatan 11 bidang 6 jenis	Wonosari	Rp. 947.860.000,00	(-) Rp. 2.140.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : evaluasi depdagri Penambahan : -
1.01.1.01.01.17.088	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Pengasih Kulonprogo	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79,71 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktik siswa 3. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 11 Kompetensi 9 jenis	Pengasih	Rp. 1.220.750.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktik siswa 3. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 11 Kompetensi 9 jenis	Pengasih	Rp. 1.220.750.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.17.089	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79,71 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. UAS, Ujian Sekolah, Ujian Praktek/UKK 3. Rehabitasi Laboratorium	1 tahun 3 kegiatan 410 m2	Wonosari	Rp. 1.194.900.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. UAS, Ujian Sekolah, Ujian Praktek/UKK 3. Rehabitasi Laboratorium	1 tahun 3 kegiatan 410 m2	Wonosari	Rp. 1.194.900.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.17.118	Penyediaan BOS/ROSDA SM	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79,71 %	BOS/DA jenjang sekolah menengah	2 satuan pendidikan	DIY	Rp. 0,00	BOS/DA jenjang sekolah menengah	2 satuan pendidikan	DIY	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.011.01.01.17.165	Pembangunan Sekolah Menengah Keluaran Kelautan	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, SMK)	79.71 %	1. Selekksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN (Olimpiade Sains Nasional)	1 unit	Tanjungsari	Rp. 0,00	Terkaisannya pembangunan gedung asrama SMK Tanjungsari	1 unit	Tanjungsari	Rp. 0,00	(13)	(15) Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.011.01.01.17.167	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	79.71 %	1. Selekksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)	9 bidang	DIY dan Luar DIY	Rp. 3.402.612.000,00		9 bidang	DIY dan Luar DIY	Rp. 3.402.112.000,00	(-) Rp. 500.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : evaluasi depdagri Penambahan : -
1.011.01.01.17.168	Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengiriman Lomba SMK	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	79.71 %	2. Selekksi, pembinaan dan pengiriman lomba OOSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)	6 cabor				6 cabor				
				3. Selekksi, pembinaan, pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	6 bidang				6 bidang				
				4. Selekksi, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	2 bidang				2 bidang				
				5. Selekksi, pembinaan dan pengiriman Lomba Cerdas Cermat UUD 1945	1 bidang				1 bidang				
				6. Gladi PIR dan Wisata Budaya	4 bidang				4 bidang				
				7. Selekksi, pembinaan dan pengiriman OPSI	30 Orang				30 Orang				
				8. Cerdas Cermat Tingkat Sekolah Menengah	1 bidang				1 bidang				
				1. Selekksi, pembinaan dan pengiriman lomba kompetensi Siswa tingkat Nasional (UKS)	50 Bidang/Kompetensi	DIY dan Luar DIY	Rp. 4.969.440.000,00		50 Bidang/Kompetensi	DIY dan Luar DIY	Rp. 4.946.100.000,00	(-) Rp. 23.340.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : evaluasi depdagri Penambahan : -
				2. Selekksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)	10 bidang				10 bidang				
				3. Pembinaan, pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	5 bidang				5 bidang				
				4. Penyelenggaraan FLSS Tingkat DIY	5 bidang				5 bidang				
				5. Selekksi, pembinaan dan	8 bidang				8 bidang				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Tolak Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				pengiriman Lomba Bahasa				pengiriman Lomba Bahasa						
				6.Solusi pembinaan dan pengiriman lomba OSTN (Olimpiade Sains Terapan Nasional)	5 bidang			6.Solusi pembinaan dan pengiriman lomba OSTN (Olimpiade Sains Terapan Nasional)	5 bidang					
				7. Pengembangan kreatifitas Siswa (Klinik Sains)	50 karya			7. Pengembangan kreatifitas Siswa (Klinik Sains)	50 karya					
1.011.01.01.17.169	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	79.71 %	1. Sosialisasi kurikulum	200 Orang	DIY	Rp. 2.325.000.000,00	1. Sosialisasi kurikulum	200 Orang	DIY	Rp. 2.285.000.000,00	(-) Rp. 40.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : evaluasi desigadi Penambahan : -
				2. Pengembangan kurikulum	220 Orang			2. Pengembangan kurikulum	220 Orang					
				3. workshop pembinaan akreditasi sekolah	40 Orang			3. workshop pembinaan akreditasi sekolah	40 Orang					
				4. Bimtek MGMP	90 Orang			4. Bimtek MGMP	90 Orang					
				5. Bimtek pengawas sekolah	100 Orang			5. Bimtek pengawas sekolah	100 Orang					
				6.Bimtek klinik sains	90 Orang			6.Bimtek klinik sains	90 Orang					
				7. Pembinaan olimpiade sains	270 Orang			7. Pembinaan olimpiade sains	270 Orang					
				8. Sosialisasi penelitian	100 Orang			8. Sosialisasi penelitian	100 Orang					
				9. Bimtek penelitian	100 Orang			9. Bimtek penelitian	100 Orang					
1.011.01.01.17.170	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	79.71 %	1. Sosialisasi kurikulum	220 Orang	DIY	Rp. 1.002.000.000,00	1. Sosialisasi kurikulum	220 Orang	DIY	Rp. 1.002.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				10. Workshop peningkatan akses pendidikan menengah kejuru	50 Orang			10. Workshop peningkatan akses pendidikan menengah kejuru	50 Orang					
				2. Workshop pengembangan kurikulum	80 Orang			2. Workshop pengembangan kurikulum	80 Orang					
				3. Penyusunan bahan ajar	120 Orang			3. Penyusunan bahan ajar	120 Orang					
				4. Penyusunan soal	115 Orang			4. Penyusunan soal	115 Orang					
				5. Workshop K3SK	217 Orang			5. Workshop K3SK	217 Orang					
				6. Penyusunan soal penjiakan	50 Orang			6. Penyusunan soal penjiakan	50 Orang					
				7. Workshop pemberdayaan MGMP SMK	250 Orang			7. Workshop pemberdayaan MGMP SMK	250 Orang					
				8. Penyusunan RPP SMK	100 Orang			8. Penyusunan RPP SMK	100 Orang					
				9. Workshop pembinaan akreditasi SMK	160 Orang			9. Workshop pembinaan akreditasi SMK	160 Orang					
1.011.01.01.17.171	Penyediaan Basisdaya Pendidikan Menengah	Persentase kinerja pemerataan dan	79.71 %	1. sosialisasi basisdaya	425 Orang	DIY	Rp. 19.622.665.000,00	1. sosialisasi basisdaya	425 Orang	DIY	Rp. 24.622.665.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Regular APBD Pajak Rodok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015												
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga												
Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												(15)
		perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)		2. Penyaluran Kartu cerdas jenjang SH	9104 Orang			2. Penyaluran Kartu cerdas jenjang SH	9104 Orang			Penambahan : -
				3. Penyaluran Beasiswa retrieval dan beasiswa rawan putus sekolah	9757 Orang			3. Penyaluran Beasiswa retrieval dan beasiswa rawan putus sekolah	9757 Orang			
1.01.1.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL *						Rp. 5.021.200.000,00				Rp. 5.021.200.000,00	
1.01.1.01.18.024	Pengembangan Penguasaan Gender Bidang Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. Forum Group Discussion	40 Orang	DIY	Rp. 277.000.000,00	1. Forum Group Discussion	40 Orang	DIY	Rp. 277.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Sosialisasi gender	165 Orang			2. Sosialisasi gender	165 Orang			
				3. Lomba satuan pendidikan berwawasan gender	6 kategori			3. Lomba satuan pendidikan berwawasan gender	6 kategori			
1.01.1.01.18.031	Jambore PTK-PNF	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. Sosialisasi Jambore	50 Orang	DIY	Rp. 660.000.000,00	1. Sosialisasi Jambore	50 Orang	Banguntapan	Rp. 660.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman kontingen ke tingkat nasional	15 cabang			2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman kontingen ke tingkat nasional	15 cabang			
1.01.1.01.18.047	Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. Bimtek akreditasi lembaga PNF	25 Orang	DIY	Rp. 240.000.000,00	1. Bimtek akreditasi lembaga PNF	25 Orang	Banguntapan Banul Berbah Darurejan Depok Gemping Godean Gondokusuman Klaten Kulonprobo Karangmojo Kasihan Kolodire Minggir Miyadi Moyudan Ngaglik Ngargan Pakem Pandanaran Pondok Pengasih Playen Prambanan Rongkop Sanden Sertolo Sleman Sugeng Sleman Tegayepo Temon Umbluharjo Wates Wonosari	Rp. 240.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. pembinaan PKBM berbasis IT	60 PKBM			2. pembinaan PKBM berbasis IT	60 PKBM			
				3. Musyawarah tutor mata pelajaran	50 Tutor			3. Musyawarah tutor mata pelajaran	50 Tutor			
1.01.1.01.18.066	Pengembangan Pendidikan Kesenian dan keaksaraan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. Lomba TBM, Keaksaraan, Kesenian dan Hari Aksara	9 kategori	DIY	Rp. 2.139.800.000,00	1. Lomba TBM, Keaksaraan, Kesenian dan Hari Aksara	9 kategori	DIY	Rp. 2.139.800.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015												
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga												
Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Indonesia	20 lembaga			Indonesia	20 lembaga			(15)
				2. Penyelenggaraan Paket B setara SNP				2. Penyelenggaraan Paket B setara SNP				
				3. Penyelenggaraan Paket C setara SMA	20 lembaga			3. Penyelenggaraan Paket C setara SMA	20 lembaga			
				4. Ujian PNF	17 mapel			4. Ujian PNF	17 mapel			
				5. Workshop penyusunan soal program keaksaraan	69 Orang			5. Workshop penyusunan soal program keaksaraan	69 Orang			
				6. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan	2000 Orang			6. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan	2000 Orang			
				7. Bimtek tutor pendidikan keaksaraan	200 Orang			7. Bimtek tutor pendidikan keaksaraan	200 Orang			
				8. Pengadaan bahan ajar PNF (buku modul Paket B dan Paket C)	1200 set			8. Pengadaan bahan ajar PNF (buku modul Paket B dan Paket C)	1200 set			
				9. Pengembangan data dan informasi keaksaraan	1 dokumen			9. Pengembangan data dan informasi keaksaraan	1 dokumen			
1.011.01.01.18.067	Pengembangan Model PNF	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. FGD, seminar dan uji coba model dan bahan ajar PNF	540 Orang	DIY	Rp. 600.000.000,00	1. FGD, seminar dan uji coba model dan bahan ajar PNF	540 Orang	DIY	Rp. 600.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi IPA : - Penambahan : -
				2. FGD, seminar dan uji coba model dan bahan ajar pendidikan informal	540 Orang			2. FGD, seminar dan uji coba model dan bahan ajar pendidikan informal	540 Orang			
				3. Dilat PNF	5 jenis			3. Dilat PNF	5 jenis			
1.011.01.01.18.068	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba Keagamaan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. Penyelenggaraan MTQ pelajar tingkat DIY	46 kategori	DIY dan Luar DIY	Rp. 550.000.000,00	1. Penyelenggaraan MTQ pelajar tingkat DIY	46 kategori	DIY dan Luar DIY	Rp. 550.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi IPA : - Penambahan : -
				2. Seleksi pembinaan dan pengiriman pentas PAI tingkat Nasional	13 cabang			2. Seleksi pembinaan dan pengiriman pentas PAI tingkat Nasional	13 cabang			
1.011.01.01.18.069	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNF	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. Seleksi pembinaan dan pengiriman kejuaraan lomba PNF berprestasi tingkat nasional	8 kategori	DIY dan Luar DIY	Rp. 329.400.000,00	1. Seleksi pembinaan dan pengiriman kejuaraan lomba PNF berprestasi tingkat nasional	8 kategori	DIY dan Luar DIY	Rp. 329.400.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi IPA : - Penambahan : -
				2. Forum group diskusi jam belajar masyarakat	40 Orang			2. Forum group diskusi jam belajar masyarakat	40 Orang			
				3. Penyelenggaraan lomba jam belajar	1 kategori			3. Penyelenggaraan lomba jam belajar	1 kategori			

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.01.1.01.1.01.15.070	Pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	masyarakat(LCC JBM)	120 Orang	DIY	Rp. 225.000.000,00	1. Bimtek akreditasi lembaga kursus dan pelatihan	120 Orang	DIY	Rp. 225.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. pelatihan uji kompetensi lembaga kursus dan pelatihan	90 Orang				90 Orang				
1.01.1.01.01.19.061	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LATIHAN KHUSUS						Rp. 12.935.134.256,00				Rp. 12.926.820.056,00	(-) Rp. 8.314.200,00	
1.01.1.01.01.19.061	Bantuan Operasional Sekolah	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71,22 %	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah dan Makanan Tambahan bagi SLB	3083 siswa	DIY	Rp. 2.460.630.000,00	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah dan Makanan Tambahan bagi SLB	3083 siswa	Bantul Sleman Gallur Kalibawang Karangmojo Kokap Kudus Kongkore Kulonprogo Mergangsan Nanggulan Ngawen Paillyan Panggang Pantajan Patuk Piyambasan Purwokerto Purworejo Rongkop Semnig Sontolo Tepus Unbulharjo Wates Wirobrajan Wirosari	Rp. 2.452.315.800,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : evaluasi depdagri Penambahan : -
1.01.1.01.01.19.086	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Yogyakarta	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71,22 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. pengadaan bahan praktek siswa 3. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 11 jenis 11 jenis	Mergangsan	Rp. 450.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. pengadaan bahan praktek siswa 3. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 11 jenis 11 jenis	Mergangsan	Rp. 450.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.19.087	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Yogyakarta	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71,22 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Ujian Sekolah 3. pengadaan bahan praktek siswa 4. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 11 jenis 10 jenis	Unbulharjo	Rp. 400.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Ujian Sekolah 3. pengadaan bahan praktek siswa 4. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 11 jenis 10 jenis	Unbulharjo	Rp. 400.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.19.088	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN Pembina	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71,22 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Unbulharjo	Rp. 800.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Unbulharjo	Rp. 800.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				sekolah 2. Pengembangan ABK 3. Penyelenggaraan ujian sekolah 4. Pengadaan bahan praktek siswa 5. Pengadaan sarana prasarana sekolah	80 Orang 1 kegiatan 25 jenis 14 jenis			sekolah 2. Pengembangan ABK 3. Penyelenggaraan ujian sekolah 4. Pengadaan bahan praktek siswa 5. Pengadaan sarana prasarana sekolah	80 Orang 1 kegiatan 25 jenis 14 jenis				
1.011.01.01.19.089	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Bantul	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71,22 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktek siswa 3. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 7 jenis 4 jenis	Kashan	Rp. 1.160.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktek siswa 3. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 7 jenis 4 jenis	Kashan	Rp. 1.160.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.011.01.01.19.090	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Bantul	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71,22 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Sosialisasi kurikulum 3. Sosialisasi kesehatan reproduksi 4. Pengadaan bahan praktek siswa 5. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 40 Orang 45 Orang 4 jenis 9 jenis	Sewon	Rp. 350.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Sosialisasi kurikulum 3. Sosialisasi kesehatan reproduksi 4. Pengadaan bahan praktek siswa 5. Pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 40 Orang 45 Orang 4 jenis 9 jenis	Sewon	Rp. 350.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.011.01.01.19.091	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Sleman	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71,22 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktek siswa 3. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 6 jenis 1 jenis	Pakem	Rp. 300.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktek siswa 3. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 6 jenis 1 jenis	Pakem	Rp. 300.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.011.01.01.19.092	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Gunungkidul	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71,22 %	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktek siswa 3. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 7 jenis 14 jenis	Wonosari	Rp. 325.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktek siswa 3. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 7 jenis 14 jenis	Wonosari	Rp. 325.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah /Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Target	Tolok Ukur	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.011.01.01.19.093	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Kulonprogo	71.22 %	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktik siswa 3. Diklat kurikulum 4. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 12 jenis 30 Orang 8 jenis	Panjatan	Rp. 939.900.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. Pengadaan bahan praktik siswa 3. Diklat kurikulum 4. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 12 jenis 30 Orang 8 jenis	Panjatan	Rp. 939.900.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.011.01.01.19.095	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Gunungkidul	71.22 %	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. pengudaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 12 jenis	Playen	Rp. 150.000.000,00	1. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah 2. pengadaan sarana prasarana sekolah	1 tahun 12 jenis	Playen	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.011.01.01.19.101	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PK-PLK	71.22 %	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	1. Sosialisasi Forum komunikasi PK-PLK 2. Pengembangan kurikulum PK-PLK 3. Diklat Layanan Kesehatan bagi siswa PK-PLK 4. Sosialisasi Akreditasi SLB 5. Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis 6. Studi banding pelayanan autis	1000 Orang 380 Orang 228 Orang 60 Orang 1 kegiatan 2 lokasi	DIY	Rp. 2.068.379.256,00	1. Sosialisasi Forum komunikasi PK-PLK 2. Pengembangan kurikulum PK-PLK 3. Diklat Layanan Kesehatan bagi siswa PK-PLK 4. Sosialisasi Akreditasi SLB 5. Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis 6. Studi banding pelayanan autis	1000 Orang 380 Orang 228 Orang 60 Orang 1 kegiatan 1 lokasi	DIY	Rp. 2.068.379.256,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.011.01.01.19.102	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK-PLK	71.22 %	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	1. Diklat pengelolaan assessment guru 2. Diklat bahasa Inggris 3. Birek Respon dan reproduksi 4. Koordinasi dan pembinaan Kepala SPP 5. Koordinasi dan pembinaan Kepala SLB 6. Koordinasi dan pembinaan Forum Tayasan 7. Penyusunan dan penulisan soal ujian SLB	120 Orang 80 Orang 76 Orang 76 Orang 76 Orang 60 Orang 40 Orang	DIY	Rp. 1.513.900.000,00	1. Diklat pengelolaan assessment guru 2. Diklat bahasa Inggris 3. Birek Respon dan reproduksi 4. Koordinasi dan pembinaan Kepala SPP 5. Koordinasi dan pembinaan Kepala SLB 6. Koordinasi dan pembinaan Forum Tayasan 7. Penyusunan dan penulisan soal ujian SLB	120 Orang 80 Orang 76 Orang 76 Orang 76 Orang 60 Orang 40 Orang	DIY	Rp. 1.513.900.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.011.01.01.19.103	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengembangan Lomba	71.22 %	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	1. Seleksi pembinaan dan pengiriman FLSSN	12 cabang	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.555.325.000,00	1. Seleksi pembinaan dan pengiriman FLSSN	12 cabang	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.555.325.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	PK-PLK			2. Seleksi, pembinaan dan pengimanan OSN	12 cabang			2. Seleksi, pembinaan dan pengimanan OSN	12 cabang					
				3. Seleksi, pembinaan dan pengimanan OSN	11 cabang			3. Seleksi, pembinaan dan pengimanan OSN	11 cabang					
				4. Gelar siswa PK-PLK	30 Orang			4. Gelar siswa PK-PLK	30 Orang					
				5. Jambore Siswa PK-PLK	400 Orang			5. Jambore Siswa PK-PLK	400 Orang					
				6. Lomba SOTNA PK-PLK	7 cabang			6. Lomba SOTNA PK-PLK	7 cabang					
1.01.1.01.01.19.104	Penyediaan Beasiswa PK-PLK	Persentase Kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	1. Sosialisasi beasiswa	100 Orang	DIY	Rp. 462.000.000,00	1. Sosialisasi beasiswa	100 Orang	DIY	Rp. 462.000.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN			2. Penyaluran beasiswa pendidikan wajar 9 tahun	70 Orang			2. Penyaluran beasiswa pendidikan wajar 9 tahun	70 Orang					
				3. penyaluran beasiswa dampak bencana	110 Orang			3. penyaluran beasiswa dampak bencana	110 Orang					
1.01.1.01.01.22.022							Rp. 19.784.432.000,00					Rp. 109.985.000,00 (-)		
1.01.1.01.01.22.022	Penyelenggaraan Saran Pendidikan Berbasis Budaya di Media Elektronik	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	1. Gladih kawruh	16 tayangan	DIY	Rp. 550.000.000,00	1. Gladih Kawruh Kawruh Tembang	16 tayangan	DIY	Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Ngudhar Kawruh Tembang	8 tayangan			2. Ngudhar Kawruh Tembang	8 tayangan					
				3. Talk show pendidikan	10 tayangan			3. Talk show pendidikan	10 tayangan					
1.01.1.01.01.22.023	Pengembangan Minat Jurnalistik Siswa	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	1. Majalah Candra	25000 eksemplar	DIY	Rp. 646.975.000,00	1. Majalah Candra	25000 eksemplar	DIY	Rp. 646.975.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Tabloid Gembara	25000 eksemplar			2. Tabloid Gembara	25000 eksemplar					
				3. tabloid Blas	5750 eksemplar			3. tabloid Blas	5750 eksemplar					
				4. kalender Pendidikan	5550 eksemplar			4. kalender Pendidikan	5550 eksemplar					
				5. Kader Jurnalistik	70 siswa			5. Kader Jurnalistik	70 siswa					
1.01.1.01.01.22.027	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Madrasah	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	1. Sosialisasi kebliban dan program akreditasi	600 Orang	DIY	Rp. 1.500.000.000,00	1. Sosialisasi kebliban dan program akreditasi	600 Orang	DIY	Rp. 1.495.500.000,00	(-) Rp. 4.500.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : evaluasi depdagri Penambahan : -
				2. Workshop pengisian perangkat dan penilaian	250 Orang			2. Workshop pengisian perangkat dan penilaian	250 Orang					
				3. Penyegaran asesor	240 Orang			3. Penyegaran asesor	240 Orang					
				4. Visitasi akreditasi	300 sekolah/madrasah			4. Visitasi akreditasi	300 sekolah/madrasah					
1.01.1.01.01.22.028	Penyelenggaraan Ujian	Persentase Kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	1. Sosialisasi juknis ujian	2200 Orang	DIY	Rp. 2.539.360.000,00	1. Sosialisasi juknis ujian	2200 Orang	DIY	Rp. 2.539.360.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Penyusunan soal ujian	3 Paket			2. Penyusunan soal ujian	3 Paket					
				3. Pelaksanaan ujian pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A/Ula, SMP/MTs	1 kegiatan			3. Pelaksanaan ujian pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A/Ula, SMP/MTs	1 kegiatan					

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				/SMPLB/Paket B/Wustha, dan SMA/MA /SMK/SMALB /Paket C	4. pengagdaan naskah soal ujian			/SMPLB/Paket B/Wustha, dan SMA/MA /SMK/SMALB /Paket C	3 Paket					
1.01.1.01.01.22.034	Penjaminan Mutu Sekolah	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	Penyelenggaraan Forum Pendidikan Untuk Semua	900 Orang	DIY	Rp. 130.000.000,00	Penyelenggaraan Forum Pendidikan Untuk Semua	900 Orang	DIY	Rp. 130.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.22.056	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	1. Peningkatan Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 2. Penyaluran insentif GTT/PTT dan GTY/PTY	539 Orang 539 Orang	DIY	Rp. 4.437.800.000,00	1. Peningkatan Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 2. Penyaluran insentif GTT/PTT dan GTY/PTY	539 Orang 539 Orang	DIY	Rp. 4.437.800.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.22.082	Penyelenggaraan OSN Tingkat Nasional	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	Penyelenggaraan OSN Tingkat Nasional	1 event	DIY	Rp. 3.752.920.000,00	Penyelenggaraan OSN Tingkat Nasional	1 event	venue belum didapatkan	Rp. 3.748.420.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.22.083	Pengelolaan Data dan Informasi bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	1. Dapodikdas, dapodikmen, dapodik SLB 2. Data profil pendidikan DIY 3. Pengelolaan website dinas 4. Baseline data bidang pendidikan, pemuda dan olahraga 5. Ekspose data pendidikan	3 jenis 3 jenis 12 bulan 100 eks 30 Orng	DIY	Rp. 1.399.830.000,00	1. Dapodikdas, dapodikmen, dapodik SLB 2. Data profil pendidikan DIY 3. Pengelolaan website dinas 4. Baseline data bidang pendidikan, pemuda dan olahraga 5. Ekspose data pendidikan	3 jenis 3 jenis 12 bulan 100 eks 30 Orang	DIY	Rp. 1.298.845.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.22.084	Apresiasi prestasi dan kreatifitas peserta didik, pendik, dan tenaga kependidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	1. Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 2. Gelar anak Indonesia 3. Revitalisasi Guru Indonesia 4. Hardiknas 5. Anugerah PAUDNI	1000 Orang 800 Orang 1200 Orang 750 Orang 100 Orang	DIY	Rp. 3.146.700.000,00	1. Pemberian Penghargaan Prestai di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 2. Gelar anak Indonesia 3. Revitalisasi Guru Indonesia 4. Hardiknas 5. Anugerah PAUDNI	1000 Orang 800 Orang 1200 Orang 750 Orang 100 Orang	DIY	Rp. 3.146.700.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.22.085	Penguatan Kelembagaan di bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	7 lembaga	7 lembaga	DIY	Rp. 60.000.000,00	7 lembaga	7 lembaga	DIY	Rp. 60.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.22.086	Pembiayaan Karr Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74,71 %	1. Sosialisasi sertifikasi pendidik 2. Sertifikasi pendidik 3. Bimbingan teknis karya tulis	60 Orng 20 Orng 40 Orng	DIY	Rp. 1.378.271.000,00	1. Sosialisasi sertifikasi pendidik 2. Sertifikasi pendidik 3. Bimbingan teknis karya tulis	60 Orang 20 Orang 40 Orang	DIY	Rp. 1.378.271.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Ilmah bagi pendidik dan tenaga kependidikan				Ilmah bagi pendidik dan tenaga kependidikan				(15)
				4. seleksi, pembinaan dan pengimanan anugerah	15 Orang			4. seleksi, pembinaan dan pengimanan anugerah	15 Orang			
				konstitusi bagi guru sekolah menengah atas				konstitusi bagi guru sekolah menengah atas				
				5. pemilihan dan pengimanan kepala sekolah dan pengawas berprestasi	55 Orang			5. pemilihan dan pengimanan kepala sekolah dan pengawas berprestasi	55 Orang			
				6. Pemilihan guru berprestasi dan guru SLB berdiskasi	40 Orang			6. Pemilihan guru berprestasi dan guru SLB berdiskasi	40 Orang			
				7. Forum Ilmah guru	48 Orang			7. Forum Ilmah guru	48 Orang			
				8. Olimpiade Sains Nasional Guru	48 Orang			8. Olimpiade Sains Nasional Guru	48 Orang			
				9. Pengembangan karir guru SLB non PLS	30 Orang			9. Pengembangan karir guru SLB non PLS	30 Orang			
1.01.1.01.01.22.087	Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Pendidikan Informal	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Gebyar PAUDNI	1 event	Umbulharjo	Rp. 75.000.000,00	Gebyar PAUDNI	1 event	Umbulharjo	Rp. 75.000.000,00	Regular APBD
1.01.1.01.01.22.088	Profesor goes to school	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Kuliah umum oleh para profesor di sekolah	10 Sekolah	DIY	Rp. 167.576.000,00	Kuliah umum oleh para profesor di sekolah	10 Sekolah	DIY	Rp. 167.576.000,00	Regular APBD
1.01.1.01.01.23	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI						Rp. 4.472.800.000,00				Rp. 4.462.800.000,00	(-) Rp. 10.000.000,00
1.01.1.01.01.23.001	Promosi PendidikanTinggi DIY	Persentase peningkatan akseslitas pendidikan tinggi	58 %	1. Publikasi melalui media elektronik skala nasional, lokal dan pamaran	3 jenis	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.900.000.000,00	1. Publikasi melalui media elektronik skala nasional, lokal dan pamaran	3 jenis	DIY dan Luar DIY	Rp. 1.890.000.000,00	Regular APBD
				2. Publikasi ke daerah(Luar Jawa)	4 lokasi			2. Publikasi ke daerah(Luar Jawa)	4 lokasi			
				3. Pengembangan dan sosialisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan Tinggi	260 Orang			3. Pengembangan dan sosialisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan Tinggi	260 Orang			
1.01.1.01.01.23.005	Pembelian Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa/ bea-mahasiswa	Persentase peningkatan akseslitas pendidikan tinggi	58 %	1. Sosialisasi bea mahasiswa	360 Orang	DIY	Rp. 2.122.800.000,00	1. Sosialisasi bea mahasiswa	360 Orang	DIY	Rp. 2.122.800.000,00	Regular APBD
				2. penyaluran bea mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu (lanjutan)	385 Orang			2. penyaluran bea mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu (lanjutan)	385 Orang			
				3. Penyaluran bantuan bea mahasiswa baru kurang mampu	90 Orang			3. Penyaluran bantuan bea mahasiswa baru kurang mampu	90 Orang			

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah /Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.01.1.01.01.23.006	Pemberdayaan Itikan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Provinsi se Indonesia di DIY	Persentase peningkatan keterampilan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	58 %	4. Bantuan biaya mahasiswa Surya University	96 Orang	DIY	Rp. 450.000.000,00	4. Bantuan biaya mahasiswa Surya University	96 Orang	DIY	Rp. 450.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.24	PROGRAM AKSESIBILITAS PENERANGAN TERKEHUKA *						Rp. 4.732.800.000,00				Rp. 4.731.800.000,00		
1.01.1.01.01.24.030	Produksi media pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	1. produksi media pembelajaran audio, animasi, video, gambar media dan aplikasi berbasis smartphone	15 Judul	DIY	Rp. 1.050.000.000,00	1. produksi media pembelajaran audio, animasi, video, gambar media dan aplikasi berbasis smartphone	15 Judul	DIY	Rp. 1.050.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.24.032	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana IDC dan BTS program ICT EQEP	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	1. diklat pengembangan sarana dan prasarana BTS program ICT EQEP	65 Orang	DIY	Rp. 1.200.000.000,00	1. diklat pengembangan sarana dan prasarana BTS program ICT EQEP	65 Orang	Bambanglipuro Girisewu Imogiri Jatis Klaten Kulonprojo Lendah Minggir Mlati Moyudan Najlar Panggang Pondok Purwokerto Purworejo Purwanegara Playen Ponjong Sanden Saptosari Semanu Sertolo Tanjungsari Tegayut Tepus Umulharjo Wates	Rp. 1.200.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.24.039	Pengujian dan pengembangan program ICT EQEP	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	2. pengelabn BTS di sekolah	65 Sekolah			2. pengelabn BTS di sekolah	65 Sekolah				
				3. Realisasi dan pengembang tower BTXP	1 unit			3. Realisasi dan pengembang tower BTXP	1 unit				
1.01.1.01.01.24.039	Pengujian dan pengembangan program ICT EQEP	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	Bimtek penguatan dan pengembangan program ICT EQEP	150 Orang	Umulharjo	Rp. 200.000.000,00	Bimtek penguatan dan pengembangan program ICT EQEP	150 Orang	DIY	Rp. 200.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.24.041	Apresiasi karya Inovasi pengembangan pembelajaran (Pembelajaran Berbasis TIK)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	1. seminar/lokakarya pendidikan	100 Orang	Umulharjo	Rp. 500.000.000,00	1. seminar/lokakarya pendidikan	100 Orang	Umulharjo	Rp. 500.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Lomba inovasi pengembangan	10 bidang			2. Lomba inovasi pengembangan	10 bidang				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.01.1.01.01.24.043	Gebyar Anugerah Khajajar	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	media pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran	100 Orang	Umuhharjo	Rp. 500.000.000,00	1. seminar/lokakarya pendidikan	100 Orang	Umuhharjo	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.24.047	Koordinasi dan Diseminasi Program BTKP DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	media pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran	100 Orang	DIY	Rp. 982.800.000,00	1. Koordinasi dan diseminasi program BTKP	5 Kab, 2 Kali	Umuhharjo	Rp. 981.800.000,00	(-) Rp. 1.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.01.1.01.01.24.053	Pengembangan TI bagi Guru dan TU	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	media pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran	240 Orang	DIY	Rp. 300.000.000,00	1. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan peningkatan satuannya pendidikan dan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis TI	240 Orang	DIY	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.26.001	Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik standart	1.904 Peserta didik	Pelayanan Pendidikan yang terstandar	1.904 Peserta didik	BLPT Dinas Dipora DIY	Rp. 10.000.000.000,00	Pelayanan Pendidikan yang terstandar	1.904 Peserta didik	BLPT Dinas Dipora DIY	Rp. 11.896.281.650,00	Rp. 1.896.281.650,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : slipa BLUD BLPT 2014
1.01.1.01.01.27	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA*	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	media pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran	20 Orang	DIY dan Bali	Rp. 600.000.000,00	1. Audisi peserta Duta Seni Pelajar	20 Orang	DIY dan Bali	Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.27.001	Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar Se-Jawa Bali dan Lampung	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	media pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran	330 Orang	DIY	Rp. 276.640.000,00	1. Diklat anti penyalahgunaan narkoba bagi senat/BEM	330 Orang	DIY	Rp. 276.640.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.27.002	Pembinaan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa dan mahasiswa	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	media pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran	800 Orang	DIY	Rp. 276.640.000,00	2. Sosialisasi anti narkoba bagi	800 Orang	DIY	Rp. 276.640.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga														
Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah /Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
1.01.1.01.01.27.003	Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Budaya Berbasis TIK	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	siswa/mahasiswa dan pendidik	5 judul	DIY	Rp. 250.000.000,00	pengembangan dan produksi media pembelajaran budaya berbasis TIK (buku elektronik)	5 judul	Mlati Umbulharjo	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.27.009	Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (AKSENBUDYO)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	1. Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 2. Pengadaan sarana prasarana akademi komunitas 3. Pembangunan gedung akademi komunitas	3 Jurusan 5 jenis 980 m2	DIY	Rp. 6.643.920.000,00	1. Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 2. Pengadaan sarana prasarana akademi komunitas 3. Pembangunan gedung akademi komunitas	3 Jurusan 5 jenis 980 m2	DIY	Rp. 6.643.920.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : - penambahan : penambahan : semula baru terenggakan 6 bulan	
1.01.1.01.01.27.012	Pengutan dan pembinaan Pendidikan Karakter bagi Siswa	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	Birek, penguatan dan pembinaan pendidikan karakter bagi siswa sekolah menengah	300 Orang	DIY	Rp. 500.000.000,00	Birek, penguatan dan pembinaan pendidikan karakter bagi siswa sekolah menengah	300 Orang	DIY	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN						Rp. 2.697.500.000,00				Rp. 2.697.500.000,00	Rp. 0,00		
1.01.1.01.01.28.001	Penyusunan dan pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	1.Sosialisasi seleksi sekolah model unggulan mutu pendidikan 2. Seleksi sekolah model unggulan mutu pendidikan 3. Forum sekolah unggulan mutu	250 Orang 50 sekolah model 160 Orang	DIY	Rp. 500.000.000,00	1.Sosialisasi seleksi sekolah model unggulan mutu pendidikan 2. Seleksi sekolah model unggulan mutu pendidikan 3. Forum sekolah unggulan mutu	250 Orang 50 sekolah model 160 Orang	DIY	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.28.008	Layanan Mobile "Learning Service"	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Layanan pembelajaran dengan Mobile Learning Service	75 kelompok	DIY	Rp. 350.000.000,00	Layanan pembelajaran dengan Mobile Learning Service	75 kelompok	DIY	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.01.1.01.01.28.009	Perluasan Layanan dan Promosi Pendidikan melalui Media Elektronik dan pameran	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	1. Birek pengembangan konten Jogja Belajar 2. Sosialisasi produk-produk pembelajaran (saran di TV lokal, siaran radio streaming, siaran TV streaming, pameran pendidikan) 3. portal belajar	25 Orang 4 jenis 1 Portal Jogja Belajar	Umbulharjo	Rp. 850.000.000,00	1. Birek pengembangan konten Jogja Belajar 2. Sosialisasi produk-produk pembelajaran (saran di TV lokal, siaran radio streaming, siaran TV streaming, pameran pendidikan) 3. portal belajar	25 Orang 4 jenis 1 Portal Jogja Belajar	Umbulharjo	Rp. 850.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.01.1.01.01.28.010	Rintisan PKBM dan PAUD unggulan	10 % Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan		1. Bimtek Pengembangan Lembaga PAUD unggulan 2. Bimtek Rintisan PKBM Unggulan	35 Orang 20 Orang	DIY	Rp. 217.500.000,00	1. Bimtek Pengembangan Lembaga PAUD unggulan 2. Bimtek Rintisan PKBM Unggulan	35 Orang 20 Orang	DIY	Rp. 217.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.28.011	Pembinaan Kesiswaan	10 % Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan		1. Pelatihan Young bies leadership programmes 2. Pendidikan kesehatan remaja melalui UKS	120 Orang 5 lokasi	DIY	Rp. 500.000.000,00	1. Pelatihan young bies leadership programmes 2. Pendidikan kesehatan remaja melalui UKS	120 Orang 5 lokasi	DIY	Rp. 500.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.28.012	Pengembangan Sekolah Sejahtera	10 % Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan		1. Pelatihan Young bies leadership programmes 2. Pendidikan kesehatan remaja melalui UKS	35 Sekolah 5 lokasi	DIY	Rp. 280.000.000,00	1. Pelatihan Young bies leadership programmes 2. Pendidikan kesehatan remaja melalui UKS	35 Sekolah 5 lokasi	DIY	Rp. 280.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.29	PROGRAM SINGKITAS BERKUALITAS TERHADAP PEMBANGUNAN						Rp. 1.370.400.000,00				Rp. 1.370.400.000,00		
1.01.1.01.01.29.001	Penelitian dan Pembangunan Pendidikan	35 % Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja		1. Seminar penelitian 2. Forum group discussion 3. Ekspose hasil	40 Orang 40 Orang 40 Orang	DIY	Rp. 175.000.000,00	1. Seminar penelitian 2. Forum group discussion 3. Ekspose hasil	40 Orang 40 Orang 40 Orang	DIY	Rp. 175.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.29.002	Peningkatan Kualitas LPM Bidang Kewirausahaan dan SIBERTIMAS	35 % Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja		1. Sosialisasi kewirausahaan 2. Seleksi kewirausahaan 3. Pemberian penghargaan stimulan kewirausahaan	100 Orang 25 kelompok 26 kelompok	DIY	Rp. 170.400.000,00	1. Sosialisasi kewirausahaan 2. Seleksi kewirausahaan 3. Pemberian penghargaan stimulan kewirausahaan	100 Orang 26 kelompok 26 kelompok	DIY	Rp. 170.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.29.003	Pengembangan Kewirausahaan SMK	35 % Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja		1. Sosialisasi lomba kewirausahaan SMK 2. Penyelenggaraan lomba kewirausahaan bagi siswa SMK 3. Pemberian penghargaan stimulan kewirausahaan	220 Orang 6 Bidang lomba 6 Bidang lomba	DIY	Rp. 350.000.000,00	1. Sosialisasi lomba kewirausahaan SMK 2. Penyelenggaraan lomba kewirausahaan bagi siswa SMK 3. Pemberian penghargaan stimulan kewirausahaan	220 Orang 6 Bidang lomba 6 Bidang lomba	DIY	Rp. 350.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.29.005	Penyelenggaraan LTM dan OSAUNTEK	35 % Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja		1. Lomba inovasi teknologi mahasiswa (LTM) 2. Olimpiade Sains dan Teknologi (Osaintek) mahasiswa Tk. DIY 3. Olimpiade Sains dan teknologi (Osaintek) Nasional	6 bidang 4 bidang 4 bidang	DIY	Rp. 675.000.000,00	1. Lomba inovasi teknologi mahasiswa (LTM) 2. Olimpiade Sains dan Teknologi (Osaintek) mahasiswa Tk. DIY 3. Olimpiade Sains dan teknologi (Osaintek) Nasional	6 bidang 4 bidang 4 bidang	DIY	Rp. 675.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18	Keperumudaan dan Olah Raga												
1.18.01	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan												

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolak Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	Olahraga						Rp. 3.150.000.000,00				Rp. 3.142.500.000,00	(-) Rp. 7.500.000,00		
1.18.1.01.01.16	PROGRAM PENGINGKATAN PERUBAHAN PERUMAHAN KEMUDAAN*													
1.18.1.01.01.16.010	Peningkatan Kemandirian dan Kepeloporan pemuda	Jumlah mitra pemberdayaan pemuda	13 mitra	seleksi, pembinaan dan pengiriman pemuda pelopor ke tingkat nasional	5 bidang	DIY	Rp. 300.000.000,00	seleksi, pembinaan dan pengiriman pemuda pelopor ke tingkat nasional	5 bidang	DIY	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.16.011	Pengembangan Mitra Pemberdayaan Pemuda	Jumlah mitra pemberdayaan pemuda	13 mitra	1. Sosialisasi seleksi pengembangan mitra pemberdayaan pemuda 2. Seleksi dan pemberian uang pembinaan 3. Monitoring	120 Orang 10 mitra 3 Kali	Siemam	Rp. 300.000.000,00	1. Sosialisasi seleksi pengembangan mitra pemberdayaan pemuda 2. Seleksi dan pemberian uang pembinaan 3. Monitoring	120 Orang 10 mitra 3 Kali	Siemam	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.16.012	Pemberdayaan Peran serta Pemuda untuk Pembangunan Pesisiran	Jumlah mitra pemberdayaan pemuda	13 mitra	1. Seleksi peserta program angkatan IV 2. Pembekalan peserta angkatan IV 3. Pemberian biaya hidup peserta angkatan II, III, IV 4. Pengadaan bahan percontohan praktik	20 Orang 20 Orang 50 Orang 2 jenis	Pengasih Semin	Rp. 950.000.000,00	1. Seleksi peserta program angkatan IV 2. Pembekalan peserta angkatan IV 3. Pemberian biaya hidup peserta angkatan II, III, IV 4. Pengadaan bahan percontohan praktik	20 Orang 20 Orang 50 Orang 2 jenis	Pengasih Semih	Rp. 950.000.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.16.015	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Perutusan Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)	Jumlah mitra pemberdayaan pemuda	13 mitra	1. seleksi, pembinaan dan pengiriman peserta PPAN 2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman peserta Kapal Nusantara (KPN)	6 Orang 6 Orang	Kraton	Rp. 450.000.000,00	1. seleksi, pembinaan dan pengiriman peserta PPAN 2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman peserta Kapal Nusantara (KPN)	6 Orang 6 Orang	Kraton	Rp. 450.000.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.16.016	Pembinaan peran serta pemuda dalam pembangunan	Jumlah mitra pemberdayaan pemuda	13 mitra	1. Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Pentas seni OKP 3. Aksi bakti sosial kepemudaan 4. Pameran hasil karya pemuda	100 Orang 1 pentas 40 Orang 3 pameran	DIY	Rp. 1.150.000.000,00	1. Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Pentas seni OKP 3. Aksi bakti sosial kepemudaan 4. Pameran hasil karya pemuda	100 Orang 1 pentas 40 Orang 3 pameran	DIY	Rp. 1.142.500.000,00	(-) Rp. 7.500.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.18.1.01.01.17	PROGRAM PENGINGKATAN UPAYA PENUNBUHAN KEMIRTAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA						Rp. 550.000.000,00				Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00		
1.18.1.01.01.17.002	Pelatihan Ketrampilan Bagi	Peningkatan Jumlah kelompok wirasaha	365 kelompok	1. Pelatihan kewirausahaan	90 Orang	Pengasih Semin	Rp. 550.000.000,00	1. Pelatihan kewirausahaan	90 Orang	Pengasih Semih	Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah /Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Pemuda	muda		2. Masing	90 Orang			2. masing	90 Orang				Penambahan : -
1.18.1.01.01.20	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA*						Rp. 566.850.000,00				Rp. 566.850.000,00		
1.18.1.01.01.20.007	Pemasssian Olahraga pelajar/mahasiswa dan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	2200 Orang	Peningkatan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat	2000 Orang	DIY	Rp. 210.000.000,00	Peningkatan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat	2000 Orang	DIY	Rp. 210.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.20.024	Festival dan Lomba Olahraga Tradisional	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	2200 Orang	Seleksi, pembinaan dan pemberian atlet olahraga tradisional ke tingkat nasional	4 cabor	DIY	Rp. 356.850.000,00	Seleksi, pembinaan dan pemberian atlet olahraga tradisional ke tingkat nasional	4 cabor	DIY	Rp. 356.850.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.21	PROGRAM PENGKATAN PASKIBRAKA DAN PRASARANA OLAHRAGA						Rp. 35.737.330.000,00				Rp. 35.737.330.000,00		
1.18.1.01.01.21.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sirana dan Prasarana Olahraga	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komplek Mandala Krida, GOR Komplek Grogro dan Gedung Prasarana Pemuda Sorowajan	3 unit	Bangkitapan Umbulharjo	Rp. 350.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komplek Mandala Krida, GOR Komplek Grogro dan Gedung Prasarana Pemuda Sorowajan	3 unit	Bangkitapan Umbulharjo	Rp. 350.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.21.013	Pembangunan Manda Krida	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pembangunan Stadion Manda Krida	1 unit	Umbulharjo	Rp. 31.958.210.000,00	Pembangunan Stadion Manda Krida	1 unit	Umbulharjo	Rp. 31.958.210.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.21.017	Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari	1 unit	Dopok	Rp. 1.491.110.000,00	Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari	1 unit	Dopok	Rp. 1.491.110.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.21.018	Pembangunan Youth Center	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pembangunan Youth Centre	1 unit	Mlati	Rp. 1.488.010.000,00	Pembangunan Youth Centre	1 unit	Mlati	Rp. 1.488.010.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.21.019	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sirana dan Prasarana Pemuda	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komplek Graha Krida Paksiyasa, Yuna Paksiyasa, Yuna Paksiyasa dan Yuna Paksiyasa Ambarbinangun	3 unit	Kashan Umbulharjo	Rp. 450.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komplek Graha Krida Paksiyasa, Yuna Paksiyasa, Yuna Paksiyasa dan Yuna Paksiyasa Ambarbinangun	3 unit	Kashan Umbulharjo	Rp. 450.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.22	PROGRAM PEMBERDAYAAN PASKIBRAKA DAN PENGEMBANGAN PEMUDA*						Rp. 1.547.200.000,00				Rp. 1.544.750.000,00		
1.18.1.01.01.22.003	Pembentukan Paskibra	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi	1. Pelatihan dan pembinaan paskibra tingkat DIY	98 Orang	Kashan	Rp. 897.200.000,00	1. Pelatihan dan pembinaan paskibra tingkat DIY	98 Orang	Kashan	Rp. 897.200.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				2. Pembekalan dan pengiriman peserta paskibra ke tingkat nasional	2 Orang			2. Pembekalan dan pengiriman peserta paskibra ke tingkat nasional	2 Orang				
				3. Study tour	60 Orang			3. Study tour	60 Orang				
1.18.1.01.01.22.013	Lomba Baris Berbaris	Peningkatan partisipasi pemuda	41 Organisasi	lomba baris-berbaris tingkat	4 kejuaraan	Umbulharjo	Rp. 250.000.000,00	lomba baris-berbaris tingkat	4 kejuaraan	Umbulharjo	Rp. 250.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah /Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dalam organisasi pemuda		SMP dan SMA				SMP dan SMA				(15)
1.18.1.01.01.23.018	Pembinaan Pemuda Kader Anti Narkoba	Peningkatan prestasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi	1. pembinaan kader anti narkoba di kabupaten/kota 2. Pembinaan kader anti narkoba DIY	500 Orang 50 Orang	DIY	Rp. 400.000.000,00	1. pembinaan kader anti narkoba di kabupaten/kota 2. Pembinaan kader anti narkoba DIY	500 Orang 50 Orang	DIY	Rp. 397.550.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.18.1.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA						Rp. 7.776.540.850,00				Rp. 7.776.540.850,00	
1.18.1.01.01.23.001	Pembinaan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	1. Seleksi atlet berbakat usia 10-18 tahun 2. Pembinaan atlet berbakat usia 10-18 tahun 3. try out	15 cabor 15 cabor 1 kali	DIY	Rp. 2.250.000.000,00	1. Seleksi atlet berbakat usia 10-18 tahun 2. Pembinaan atlet berbakat usia 10-18 tahun 3. try out	15 cabor 15 cabor 1 kali	DIY	Rp. 2.250.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.002	Penyelenggaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	seleksi atlet pelajar dalam POPDA	19 cabor	DIY	Rp. 900.000.000,00	seleksi atlet pelajar dalam POPDA	19 cabor	DIY	Rp. 900.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.003	Penyelenggaraan Tri Lomba Juang	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Terlaksananya Lomba Gerak jalan	3 jenis	DIY	Rp. 242.000.000,00	Terlaksananya Lomba Gerak jalan	3 jenis	DIY	Rp. 242.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.004	Penyelenggaraan POPCADA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Lomba olahraga bagi atlet pelajar berkeseluruhan khusus	3 cabor	DIY	Rp. 170.000.000,00	Lomba olahraga bagi atlet pelajar berkeseluruhan khusus	3 cabor	DIY	Rp. 170.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.005	Bimbingan Teknis bagi Peleth dan Wasit	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Pelatihan Tenaga Teknis Keolahragaan di DIY	60 Orang	DIY	Rp. 144.540.850,00	Pelatihan Tenaga Teknis Keolahragaan di DIY	60 Orang	DIY	Rp. 144.540.850,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.006	Penyelenggaraan Laga Pendidikan Indonesia (LPI)	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi)	3 kelompok	DIY	Rp. 180.000.000,00	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi)	3 kelompok	DIY	Rp. 180.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.008	Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Terlaksananya POSPEDA tahun 2015	16 cabor	DIY	Rp. 600.000.000,00	Penyelenggaraan pekan olahraga dan seni santri pondok pesantren	16 cabor	DIY	Rp. 600.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.009	Penyelenggaraan Pekan Olahraga KORPRI Daerah (PORPRIDA)	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	1. Penyelenggaraan pekan olahraga KORPRI DIY 2. Pembinaan atlet Kontingen Pemuda	6 cabor 54 Orang	DIY	Rp. 220.000.000,00	1. Penyelenggaraan pekan olahraga KORPRI DIY 2. Pembinaan atlet Kontingen Pemuda	6 cabor 54 Orang	DIY	Rp. 220.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.010	Lomba Senam Kesegaran Jasmani	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Seleksi, pembinaan dan pengiriman atlet atlet SQJ ke tingkat nasional	30 Orang	DIY	Rp. 220.000.000,00	Seleksi, pembinaan dan pengiriman atlet atlet SQJ ke tingkat nasional	30 Orang	DIY	Rp. 220.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.012	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Kontingen PORCNAS (Pekan Olahraga Pelajar Caci)	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Pembinaan dan pengiriman atlet-atlet pelajar berkeseluruhan khusus sebagai	3 cabor	DIY	Rp. 550.000.000,00	Pembinaan dan pengiriman atlet-atlet pelajar berkeseluruhan khusus sebagai	3 cabor	DIY	Rp. 550.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Nasional			wakil DIY ke tingkat nasional				wakil DIY ke tingkat nasional					
1.18.1.01.01.23.013	Penyelenggaraan Kejurangan Catur	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Penyelenggaraan kejurangan catur tingkat DIY	1 cabang	DIY	Rp. 300.000.000,00	Penyelenggaraan kejurangan catur tingkat DIY	1 cabang	DIY	Rp. 300.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.18.1.01.01.23.014	Penyelenggaraan PONPAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Pembinaan dan pengiriman atlet pada pekan olahraga pelajar nasional	15 cabor	DIY	Rp. 2.000.000.000,00	Pembinaan dan pengiriman atlet pada pekan olahraga pelajar nasional	15 cabor	DIY	Rp. 2.000.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total							Rp. 197.204.488.306,00				Rp. 199.658.313.096,00	Rp. 2.453.824.790,00	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1	Wajib		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.02	Kesehatan													
1.02.01	Dinas Kesehatan													
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 6.102.979.275,00				Rp. 6.371.361.475,00	Rp. 268.382.200,00	
1.02.1.02.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dikes : Terkirimnya surat dan pembelian cek -Surat Keluar -Surat Masuk -Pengiriman Dokumen Respira : Jumlah material pengiriman surat/paket 580 lembar 3000 material 6000, 300 lembar 31 pengiriman surat/paket	Dikes : Terkirimnya surat dan pembelian cek -Surat Keluar -Surat Masuk -Pengiriman Dokumen Respira : Jumlah material pengiriman surat/paket 580 lembar 3000 material 6000, 300 lembar 31 pengiriman surat/paket	Dikes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 11.875.000,00	Dikes : Terkirimnya surat dan pembelian cek -Surat Keluar -Surat Masuk -Pengiriman Dokumen Respira : Jumlah material pengiriman surat/paket 580 lembar 3000 material 6000, 300 lembar 31 pengiriman surat/paket	Dikes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 11.875.000,00	Dikes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 11.875.000,00	Rp. 0,00	Effisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dikes : -Pembayaran tagihan rekening telepon 12 sambungan -Pembayaran tagihan rekening listrik 115800 Kwh (7 rekening), -Pembayaran tagihan rekening air 6 rekening, -Pembayaran tagihan internet 1 rekening, -Pembayaran PBB 1 tagihan, -Fax 1 rekening	Dikes : -Pembayaran tagihan rekening telepon 12 sambungan -Pembayaran tagihan rekening listrik 115800 Kwh (7 rekening), -Pembayaran tagihan rekening air 6 rekening, -Pembayaran tagihan internet 1 rekening, -Pembayaran PBB 1 tagihan, -Fax 1 rekening	Dikes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 1.142.340.000,00	Dikes : -Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan - Pembayaran Tagihan Rekening Listrik 100.900 Kwh - Pembayaran Rekening air 15 m3 - Pembayaran tagihan internet 1024 Kbps	Dikes : -Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan - Pembayaran Tagihan Rekening Listrik 100.900 Kwh - Pembayaran Rekening air 15 m3 - Pembayaran tagihan internet 1024 Kbps	Dikes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 1.148.700.000,00	Rp. 6.360.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : labkes : pengurangan biaya internet & rekening listrik (5.000.000), Respira : Penambahan listrik, tambahan daya listrik, penambahan konsumsi listrik karena tambah akses (11.360.000)
1.02.1.02.01.01.004	Penyediaan Jasa Jaminan Peneliharaan Kesehatan PNS (Labkes)	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	56 Orang	Balai Laboratorium Kesehatan	Rp. 25.000.000,00	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	56 Orang	Balai Lab Kes	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.01.006	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dikes : Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 tepat waktu Labkes : Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang tepat waktu	Dikes : Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas roda 2 dan 3 KIR Pick Up dan 4 tepat waktu Labkes : Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang tepat waktu	Dikes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 17.813.000,00	Dikes : Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 tepat waktu Labkes : Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang tepat waktu	16 roda 4, 42 roda 2 dan 3 Pick Up 2 Unit Kend:roda 4 dan 3 Unit Kend:roda 2	Dikes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 18.684.500,00	Rp. 871.500,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : Induk : Penambahan STNK 2 unit mobil

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan													
Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Berkambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.021.02.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Respira : Bukti pembayaran Pajak/STNKK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	4 unit roda 4, 10 unit roda 2	Dinas Kesehatan	Rp. 110.469.000,00	Dinas : terselenggaranya terbit administrasi keuangan dan barang	100 %	Dinas Kesehatan	Rp. 128.364.000,00	Rp. 17.895.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : Labkes : Perubahan SHBJ (7.530.000), Respira : Perubahan SHBJ (11.025.000)
1.021.02.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Respira : Bukti Pembayaran honor pengelola keuangan, perantara dan pengelola kepegawaian	18 Orang x 12 bulan	Dinas Kesehatan	Rp. 516.941.150,00	Dinas : terselenggaranya terbit administrasi keuangan dan barang	18 Orang x 12 bulan	Dinas Kesehatan	Rp. 567.428.450,00	Rp. 50.487.300,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Labkes : Perubahan UMR, SHBJ dan penyusutan volume (51.018.300)
1.021.02.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dinkes : Kebersihan kantor	8 jenis	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 43.140.000,00	Dinkes : Kebersihan kantor	8 jenis	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 38.500.000,00	(-) Rp. 4.640.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.021.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Labkes : Kebersihan kantor dan halaman	12 bin (kaca 3411 m2), Taman (2250 m2), Halaman (18000 m2), KM/WC (450 m2), Keramik (247,95 m2), Kap	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 110.070.000,00	Labkes : Kebersihan kantor dan halaman	12 bin (kaca 3411 m2), Taman (2250 m2), Halaman (18000 m2), KM/WC (450 m2), Keramik (247,95 m2), Kap	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 110.070.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.021.02.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Respira : Jumlah komputer, laptop dan mesin ketik yang diperbaiki	30 unit komputer, 8 unit Lap Top / Note Book, 32 bh Mesin Ketik, 3 bh LCD Proyektor	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 138.474.925,00	Respira : Jumlah komputer, laptop dan mesin ketik yang diperbaiki	25 unit komputer, 8 unit laptop dan 9 bh mesin ketik, 3 bh LCD Proyektor	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 128.764.225,00	(-) Rp. 9.710.700,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.021.02.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Labkes : Perbaikan peralatan kerja	26 unit	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 34.106.000,00	Labkes : Perbaikan peralatan kerja	26 unit	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 34.106.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

410

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.02.1.02.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanaan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	-Konsultasi & koordinasi luar daerah Dirkes : Budi pembayaraan keamanan kantor/tempat kerja 1. Honorarium PTT 2. Uang makan Labkes : Jasa Keamanaan Kantor/Tempat kerja	12 kwintansi 12 bulan 12 bhn 12 bulan	Dirkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 689.427.000,00		12 kwintansi Honorarium PTT 2. uang makan 3. Honorarium THL	Dirkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 718.349.500,00	Rp. 28.922.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : Labkes : Penambahan karena menyelesaikan UMP (10.960.000); Dirkes : Penambahan volume (2 oo PTT , 6 oo THL (20.425.000))
1.02.1.02.01.01.024	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Labkes : Jasa Tehnis Pelayanan Respira : Jumlah orang TBR, jumlah jasa pelayanan, honor juru masak dan supir	12 bhn 14 orang TBR, 6 bulan jasa pelayanan, 6 juru masak, 1 sopir	Dirkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 2.247.700.000,00	Labkes : Jasa Tehnis Pelayanan Respira : Jumlah orang TBR, jumlah jasa pelayanan, honor juru masak dan supir	12 bhn 14 orang TBR, 6 bulan jasa pelayanan, 6 juru masak, 1 sopir	Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 2.393.652.600,00	Rp. 145.952.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Penambahan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Respira : Tambahan TBR menyelesaikan Perpres dan pengub (71,100.000); Labkes : Penambahan jasa pelayanan karena PAD naik (74.852.600)
1.02.1.02.01.02.001	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 1.323.283.055,00					(-) Rp. 5.198.000,00		
1.02.1.02.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Labkes : Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	1 unit	Balai Lab Kes	Rp. 187.460.000,00	Labkes : Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	1 unit	Balai Labkes	Rp. 187.460.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.02.007	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Dirkes : Perengkapan gedung kantor (penutup meja, sidang PC, note book, printer, monitor LED, multimedia, CCTV, LD Proyektor) Labkes : - AC Split 1 PK - AC Split 2 PK - Komputer PC - Laptop - Kursi Kerja - Kursi Kerja Eselon III - Meja Kerja - Tempat tidur dan kasur - Sprey - Gorodyn - Taplak panjang - Showcase - DTD Player - TV 32" - TV 19"	8 jenis 4 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 2 Unit, 20 buah, 1 buah, 8 Bh, 7 Bh, 1 Unit, 6 Pkt, 100 m, 12 Bh, 3 Unit	Dirkes DIY, Balai Labkes	Rp. 262.888.055,00	Dirkes : Perengkapan gedung kantor (AC, PC, note book, printer, monitor LED, multimedia, CCTV, LD Proyektor, mesin fotocopy) Labkes : - AC Split 1 PK - AC Split 2 PK - komputer PC - Laptop - Kursi Kerja - Kursi Kerja Eselon III - Kursi susun - Meja Kerja - Tempat tidur dan kasur - Sprey - Gorodyn - Taplak panjang - Showcase - DTD Player - TV 32" - TV 19"	8 jenis 4 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 2 Unit, 20 buah, 1 buah, 8 Bh, 7 Bh, 1 Unit, 6 Pkt, 100 m, 12 Bh, 3 Unit	Dirkes DIY, Balai Labkes	Rp. 262.888.055,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Dirkes : Gedung kantor terpelihara (renov parkir, penggantian kanopi, pengecatan pagar, pengecatan pagar, pengecatan pagar, pengecatan eternit, pembuatan taman) Labkes : Pemeliharaan gedung kantor	6 jenis 10 bh. (Perbaikan pintu), 4.000 m2 (Perbaikan tembok), 15 m2 (Perbaikan keramik), 1 Pkt. (Perbaikan)	Dirkes DIY dan Balai Labkes	Rp. 327.950.000,00	Dirkes : Gedung kantor terpelihara (renov parkir, penggantian kanopi, pengecatan pagar, pengecatan pagar, pengecatan eternit, pembuatan taman) Labkes : Pemeliharaan gedung kantor	6 jenis 10 bh. (Perbaikan pintu), 4.000 m2 (Perbaikan tembok), 15 m2 (Perbaikan keramik), 1 Pkt. (Perbaikan)	Dirkes DIY, Balai Labkes	Rp. 327.720.000,00	(-) Rp. 230.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan													
Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
		Tobok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				
1.02.1.02.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinkes : Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2)	11 jenis	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 439.000.000,00	Dinkes : Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2)	11 jenis	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 434.032.000,00	(-) Rp. 4.968.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
				labkes : Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2)	3 Unit			labkes : Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2)	3 Unit				
				Dinkes : Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2)	4 dan 3 Unit			Dinkes : Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2)	4 dan 3 Unit				
				Respira : Kendaraan dinas/operasional terpelihara	4 unit roda 4 dan 6 unit roda 2			Respira : Kendaraan dinas/operasional terpelihara	4 unit roda 4 dan 6 unit roda 2				
1.02.1.02.01.02.026	Pemeliharaan Rutin Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinkes : Perengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 98.000.000,00	Dinkes : Perengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 98.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Labkes : Perengkapan Gdg.kantor terpelihara	13 Unit (Perengkapan Gdg.), 2 Pkt.(Goroyin)			Labkes : Perengkapan Gdg.kantor terpelihara	13 Unit (Perengkapan Gdg.), 2 Pkt.(Goroyin)				
				Respira : perengkapan gedung kantor terpelihara	6 Item pemeliharaan, 15 bh x 12 bh film badge dan ijin pesawat rontgen			Respira : perengkapan gedung kantor terpelihara	6 Item pemeliharaan, 15 bh x 12 bin film badge dan ijin pesawat rontgen				
1.02.1.02.01.02.029	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinkes : Mebeleur terpelihara	7 jenis	Dinkes DIY, Balai Labkes, RSKP Respira	Rp. 7.985.000,00	Dinkes : Mebeleur terpelihara	7 jenis	Dinkes DIY, Balai Labkes	Rp. 7.985.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Labkes : Mebeleur	7 Bh (Kursi kerja), 5 Bh (Meja kerja)			Labkes : Mebeleur	7 Bh (Kursi kerja), 5 Bh (Meja kerja)				
1.02.1.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 1.534.296.450,00				Rp. 1.325.443.800,00	(-) Rp. 208.852.650,00	
1.02.1.02.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Dinkes : Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya	11 Orang	Yogyakarta	Rp. 234.950.000,00	Dinkes : Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya	11 Orang	Yogyakarta	Rp. 217.700.000,00	(-) Rp. 17.250.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
				Labkes : Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya	8 orang,			Labkes : Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya	8 orang,				
				Respira : sumber daya aparatur yg mengikuti diklat meningkat kemampuannya	30 Orang			Respira : sumber daya aparatur yg mengikuti diklat meningkat kemampuannya	30 Orang				
1.02.1.02.01.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas Induk)	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Jumlah pegawai terpapar peraturan perundang-undangan	35 orang 2 hr	Yogyakarta	Rp. 12.600.000,00	Jumlah pegawai terpapar peraturan perundang-undangan	35 orang 2 hr	Kantor Dinas Kesehatan DIY	Rp. 12.600.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.05.007	Pembinaan, Pengembangan Dan Penilaian Anlka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu (Dinas Induk)	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Dokumen angka kredit jafjung peningkatan pemahaman tentang jafjung	1 dokumen, 120 org	Dinas Kesehatan DIY	Rp. 37.449.000,00	Dokumen angka kredit jafjung, peningkatan pemahaman tentang jafjung	1 dokumen, 120 org	Kantor Dinas Kesehatan DIY	Rp. 36.849.000,00	(-) Rp. 600.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.05.019	Penyusunan Digital Government Services (DSS)	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya	100 %	Dinkes : (a) Optimalisasi web site Dinkes (b) Aplikasi Pengembangan Teknologi Informasi Web	200 Judul, 1 paket	Yogyakarta	Rp. 379.907.450,00	Dinkes : (a) Optimalisasi web site Dinkes (b) Aplikasi Pengembangan Teknologi Informasi Web	200 Judul, 1 paket	Yogyakarta	Rp. 325.372.450,00	(-) Rp. 54.535.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan													
Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		apatur		Site Dinas Kesehatan Respira : Pengembangan SIM RS	1 Paket			Site Dinas Kesehatan Respira : Pengembangan SIM RS	1 Paket				
1.02.1.02.01.05.033	Pengembangan ISO	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Dinkes : 1. Implementasi SMM ISO di Dinkes DIY	1 Laporan hasil pendampingan dan evaluasi, 1 Laporan peningkatan capacity building penguatan implemen	Yogyakarta	Rp. 190.040.000,00	Dinkes : 1. Implementasi SMM ISO di Dinkes DIY	1 Laporan hasil pendampingan dan evaluasi, 1 Laporan peningkatan capacity building penguatan implemen	Kantor Dinkes DIY,Kantor RSKP Respira	Rp. 190.037.500,00	(-) Rp. 2.500,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.05.035	Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	(a.) Pengumpulan dan analisis data kesehatan lembaga Dinas Kesehatan Respira : Frekuensi audit surveilans, audit internal dan Rapat trijulan manajemen	1 dokumen, 1 video lembaga Dinas Kesehatan 2 kali; 4 kali; 4 kali	Yogyakarta	Rp. 147.070.000,00	(a.) Pengumpulan dan analisis data kesehatan lembaga Dinas Kesehatan	1 dokumen, 1 video lembaga Dinas Kesehatan	Yogyakarta	Rp. 45.070.000,00	(-) Rp. 102.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.05.059	Pengelabian Penelitian Kesehatan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	a. Terpenuhi kebutuhan data diluar pelaporan rutin b. Terpenuhi hasil-hasil penelitian/kegiatan bagi pihak/instansi yang membutuhkan	100 % 3 Instansi	Yogyakarta	Rp. 136.685.000,00	a. Terpenuhi kebutuhan data diluar pelaporan rutin b. Terpenuhi hasil-hasil penelitian/kegiatan bagi pihak/instansi yang membutuhkan	100 % 3 Instansi	Yogyakarta	Rp. 113.205.000,00	(-) Rp. 25.480.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.05.060	Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Labkes : Mutu manajemen pelayanan kesehatan meningkat Respira : Sosialisasi akreditasi RS dan Implementasi BLUD	2 Dokumen (Surveilan ISO 17025 : 2005 & Surveilan ISO 9001 : 2008 50 Orang	Balai Labkes dan RSKP Respira Yogyakarta	Rp. 196.000.000,00	Labkes : Mutu manajemen pelayanan kesehatan meningkat Respira : Sosialisasi akreditasi RS dan Implementasi BLUD	2 Dokumen (Surveilan ISO 17025 : 2005 & Surveilan ISO 9001 : 2008 50 Orang	Yogyakarta	Rp. 196.799.850,00	(-) Rp. 1.200.150,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.05.077	Penyusunan Pedoman Pelaporan Program Kesehatan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pedoman Pelaporan Program Kesehatan	1 dokumen	Yogyakarta	Rp. 39.795.000,00	Pedoman Pelaporan Program Kesehatan	1 dokumen	Yogyakarta	Rp. 32.010.000,00	(-) Rp. 7.785.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.05.078	Salah Tenga Kesehatan Berprestasi	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Jumlah tenaga kesehatan diolah menjadi tenaga kesehatan teladan	20 Orang	DIY	Rp. 155.800.000,00	Jumlah Tenaga Kesehatan diolah menjadi tenaga kesehatan teladan	20 Orang	DIY	Rp. 155.800.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI, SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 170.545.300,00				Rp. 167.507.650,00	(-) Rp. 3.037.650,00	
1.02.1.02.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penatuaahan Rencana Kinerjanya pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai LAKIP SKPD	75 s.d 85	DIY	Rp. 9.200.000,00	Nilai LAKIP SKPD	75 s.d 85	DIY	Rp. 9.185.000,00	(-) Rp. 15.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.06.010	Penyusunan Pengembangan	Terwujudnya penatuaahan	100 %	Kesepakatan lntas batas/dokumen	3 dokumen	Yogyakarta	Rp. 60.153.000,00	Kesepakatan lntas batas/dokumen kebijakan	3 dokumen	Yogyakarta	Rp. 60.153.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	Perencanaan Program	keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		kebijakan regulasi kesehatan				regulasi kesehatan						Penambahan : -
1.02.1.02.01.06.013	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	80 %	Yogyakarta	Rp. 13.500.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	80 %	DIY	Rp. 13.493.250,00	(-) Rp. 6.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.06.015	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Renja, RKA dan DPA Tahun 2016	1 tahun	Yogyakarta	Rp. 70.900.000,00	Renja, RKA dan DPA Tahun 2016	1 tahun	DIY	Rp. 70.898.000,00	(-) Rp. 2.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun Dinas dan UPT	1 laporan	Yogyakarta	Rp. 16.792.300,00	Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun Dinas dan UPT	1 laporan	DIY	Rp. 13.778.400,00	(-) Rp. 3.013.900,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.02.1.02.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*						Rp. 4.700.947.658,00					(-) Rp. 57.225.000,00		
1.02.1.02.01.19.001	Persentase rumah tangga ber PHBS		48 %	1) Promosi dengan Media Elektronik 2) Promosi melalui Media Cetak 3) Promosi dengan Media Tradisional	1 Paket dengan isi media elektronik meliputi : 5 bh master ILM dengan tema PHBS dan disajikan melalui media cetak / koran 1 Paket dengan isi media cetak meliputi : 10 kl penyaringan artikel kesehatan di media cetak / koran 1 Paket dengan isi media tradisional berupa 4 kali penyaringan kesehatan melalui Budaya Tradisional di	Yogyakarta	Rp. 1.208.294.500,00	1) Promosi dengan Media Elektronik 2) Promosi melalui Media Cetak Media promosi sadar hidup bersih dan sehat	1 Paket dengan isi media elektronik meliputi : 5 bh master ILM dengan tema PHBS dan disajikan melalui media cetak / koran 1 Paket dengan isi media cetak meliputi : 10 kl penyaringan artikel kesehatan di media cetak / koran 1 Paket dengan isi media tradisional berupa 4 kali penyaringan kesehatan melalui Budaya Tradisional di	Yogyakarta	Rp. 1.203.344.500,00	(-) Rp. 4.950.000,00	Reguler APBD Pajak Rokok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebesar Rp. 4.950.000,- digeser ke kegiatan pengembangan balai labkes (pajak rokok) Penambahan : -
1.02.1.02.01.19.002	Penyuluhan Masyarakat Pola hidup Sehat		48 %	2) Dokumen Koordinasi dan Evaluasi PHBS tatanan Rumah Tangga	1 dokumen	DIY	Rp. 280.904.000,00	2) Dokumen Koordinasi dan Evaluasi PHBS tatanan Rumah Tangga	1 dokumen	DIY	Rp. 281.054.000,00	(-) Rp. 19.850.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolek Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				1) Kader kesehatan dan tokoh masyarakat terpapar kampanye PTM akibat perilaku merokok; 3) Dokumen peningkatan cakupan rumah tangga ber-PHBS; 4) Dokumen advokasi dan optimalisasi implementasi Pergub 42 tentang kewasan dilarang merokok; 5) Sekolah/pondok kesehatan masyarakat kampanye Aku Bangsa Aku Tahu (ABAT) HIV/AIDS	100 org kader kesehatan dan tokoh masyarakat RTM adabt perilaku merokok; 1 dokumen 1 dokumen 20 Sekolah			1) Kader kesehatan dan tokoh masyarakat terpapar kampanye PTM akibat perilaku merokok; 3) Dokumen peningkatan cakupan rumah tangga ber-PHBS; 4) Dokumen advokasi dan optimalisasi implementasi Pergub 42 tentang kawasan dilarang merokok; 5) Sekolah/pondok kesehatan masyarakat kampanye Aku Bangsa Aku Tahu (ABAT) HIV/AIDS	100 org kader kesehatan dan tokoh masyarakat RTM adabt perilaku merokok; 1 dokumen 1 dokumen 20 Sekolah				Penambahan : -	
1.021.02.01.19.014	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok)	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	1) Media pendukung pengembaran KTR 16) Tersedia screening kit di Puskesmas 17) Terlaksananya Jambore remaja sehat ; 7) Lomba poster Hidup Sehat Tanpa Rokok 8) Paket billboard Hidup Sehat Tanpa Rokok 1) Dokumen Grand Design Promosi Kesehatan di DIY 10) Informasi kesehatan melalui ILM di Televisi 12) Terlaksananya Gerak Jalan Sehat 13) Kampanye Kesehatan Dalam Rangka HKN 14) Paket pendampingan pengembangan kawasan tanpa rokok oleh pihak ketiga 18) Terlaksananya Kampanye remaja sehat 2) Dokumen Data polling tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan KTR 3) Dokumen Data Pelaksanaan KTR di DIY	1 paket media terdiri dari : 60 ltr sticker, 60 ltr stand, 60 banner, 60 spanduk, 4000 1 Paket 121 Paket screening kit 1 Paket 1 kali lomba poster 3 pt billboard 1 dokumen 2 paket ILM di televisi dengan tema PHBS 1 kali gerak jalan sehat 1 kali kampanye kesehatan 1 paket hibah untuk pendampingan tanpa rokok oleh pihak ketiga 1 Paket 1 dokumen 1 dokumen	Yogyakarta	Rp. 2.476.095.158,00	11) Media pendukung pengembaran KTR 15) Data Rumah Tangga ber-PHBS 16) Tersedia screening kit di Puskesmas 17) Terlaksananya Jambore remaja sehat ; 7) Lomba poster Hidup Sehat Tanpa Rokok 8) Paket billboard Hidup Sehat Tanpa Rokok 1) Dokumen Gand Design Promosi Kesehatan di DIY 10) Informasi kesehatan melalui ILM di Televisi 12) Terlaksananya Gerak Jalan Sehat 13) Kampanye Kesehatan Dalam Rangka HKN 14) Paket pendampingan pengembangan kawasan tanpa rokok oleh pihak ketiga 18) Terlaksananya Kampanye remaja sehat 2) Dokumen Data polling tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan KTR 3) Dokumen Data Pelaksanaan KTR di DIY	1 paket media terdiri dari : 60 ltr sticker, 60 ltr stand, 60 banner, 60 spanduk, 4000 1 Paket 121 Paket screening kit 1 Paket 1 kali lomba poster 3 pt billboard 1 dokumen 2 paket ILM di televisi dengan tema PHBS 1 kali gerak jalan sehat 1 kali kampanye kesehatan 1 paket hibah untuk pendampingan tanpa rokok oleh pihak ketiga 1 Paket 1 dokumen 1 dokumen	DIY	Rp. 2.461.065.158,00 (-) Rp. 15.030.000,00	Reguler APBD Pajak Rokok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DIPA : - Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebesar Rp. 15.030.000,- digeser ke pengembangan balai labkes (pajak rokok) Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan														
Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
1.02.1.02.01.19.015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (Pajak Rokok)	Persetase rumah tangga ber PHBS	48 %	4) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kab/Kota	50 KR kab/kota	DIY	Rp. 307.659.000,00	4) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kab/Kota	50 KR kab/kota	Yogyakarta	Rp. 290.264.000,00	Reguler APBD Pajak Rokok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - anangan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebesar Rp. 17.395.000,- digeser ke kegiatan pengembangan balai lakes (pajak rokok) Penambahan : -	
				5) Terlaksananya Kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok	2 kali kampanye			5) Terlaksananya Kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok	2 kali kampanye					
				6) Terlaksananya Workshop Percepatan Pengesahan Perda KTR	1 kali workshop			6) Terlaksananya Workshop Percepatan Pengesahan Perda KTR	1 kali workshop					
				9) Informasi Kesehatan di Surat Kabar	2 paket ILM di media massa/koran lokal dengan tema PHBS			9) Informasi Kesehatan di Surat Kabar	2 paket ILM di media massa/koran lokal dengan tema PHBS					
				1) Dokumen peningkatan integrasi LSLP dim pemberdayaan masyarakat melalui desa/kelurahan slaga aktif di DIY	1 dokumen			1) Dokumen peningkatan integrasi LSLP dim pemberdayaan masyarakat melalui desa/kelurahan slaga aktif di DIY	1 dokumen					
				10) Dokumen Forkom UKS di Provinsi	1 dokumen			10) Dokumen Forkom UKS di Provinsi	1 dokumen					
				11) Dokumen penggerakan karang taruna/pemuda dalam kesehatan	1 dokumen			11) Dokumen penggerakan karang taruna/pemuda dalam kesehatan	1 dokumen					
				12) Media KIE posyandu	1 paket media untuk KIE di Posyandu terdiri dari stiker, leaflet, poster, buku saku dan booklet deng			12) Media KIE posyandu	1 paket media untuk KIE di Posyandu terdiri dari stiker, leaflet, poster, buku saku dan booklet deng					
				2) Dokumen koordinasi pokjinal desa/kelurahan slaga aktif	1 dokumen			2) Dokumen koordinasi pokjinal desa/kelurahan slaga aktif	1 dokumen					
				3) Dokumen bintek peningkatan manajemen desa/kei slaga bagi pengelola	1 dokumen			3) Dokumen bintek peningkatan manajemen desa/kei slaga bagi pengelola	1 dokumen					
				4) Penyebaran informasi kesehatan di media massa	1 dokumen			4) Penyebaran informasi kesehatan di media massa	1 dokumen					
				1.02.1.02.01.19.018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (Pajak Rokok)			Persetase rumah tangga ber PHBS	48 %					5) Dokumen penguatan pembinaan posyandu
6) Dokumen Profil promkes	1 dokumen	6) Dokumen Profil promkes	1 dokumen											
7) Dokumen peningkatan PHBS di Poskestren	1 dokumen	7) Dokumen peningkatan PHBS di Poskestren	1 dokumen											
8) Dokumen peningkatan program promkes di RS (PKRS)	1 dokumen	8) Dokumen peningkatan program promkes di RS (PKRS)	1 dokumen											
9) Dokumen peningkatan peran PKK dalam kesehatan	1 dokumen	9) Dokumen peningkatan peran PKK dalam kesehatan	1 dokumen											
1) Ikhtil Layanan Masyarakat intervensi PHBS;	1 buah film ILM, 154 kl tayang ILM di TV, 10 paket	1) Ikhtil Layanan Masyarakat intervensi PHBS;	1 buah film ILM, 154 kl tayang ILM di TV, 10 paket											

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
					penayangan ILM di bioskop, 1 paket penayangan ILM				penayangan ILM di bioskop, 1 paket penayangan ILM					
				2) Media Elektronik Informasi Kesehatan di Dinkes;	1 paket media elektronik terdiri dari : 1 buah televisi, DVD player, dan speaker			2) Media Elektronik Informasi Kesehatan di Dinkes;	1 paket media elektronik terdiri dari : 1 buah televisi, DVD player, dan speaker					
				3) Peralatan penunjang pengembangan media promosi kesehatan	1 buah laptop multimedia, 1 buah printer, 1 buah kamera dan lensa, 1 buah handycam			3) Peralatan penunjang pengembangan media promosi kesehatan	1 buah laptop multimedia, 1 buah printer, 1 buah kamera dan lensa, 1 buah handycam					
1.02.1.02.01.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT*						Rp. 1.000.858.000,00				Rp. 992.997.000,00	(-) Rp. 7.861.000,00		
1.02.1.02.01.20.010	Penanggulangan Permasalahan Gizi	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8,7 %	1. Model pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian perbaikan gizi	6 desa lokasi percontohan model pemberdayaan terbenruk	DIY	Rp. 1.000.858.000,00	1. Model pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian perbaikan gizi	6 desa lokasi percontohan model pemberdayaan terbenruk	DIY	Rp. 992.997.000,00	(-) Rp. 7.861.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : Efisiensi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebesar Rp. 7.861.000,- digeser ke kegiatan pengembangan balai labkes (pajak rokok) Penambahan : -	
				2. Anthropometri kit	23 paket anthropometri			2. Anthropometri kit	23 paket anthropometri					
				3. Bawah Dua Tahun (Baduta) mendapatkan mikronutrient	1200 baduta			3. Bawah Dua Tahun (baduta) mendapatkan mikronutrient	1200 baduta					
				4. TFC (therapeutic feeding center)	1 TFC			4. TFC (theurapeutic feeding center)	1 TFC					
				5. Peta situasi giz	1 dokumen			5. Peta situasi gizi	1 dokumen					
1.02.1.02.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEHAT						Rp. 858.729.000,00				Rp. 824.979.000,00	(-) Rp. 33.750.000,00		
1.02.1.02.01.21.027	Pembinaan dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kesehatan lingkungan/kota sehat	100 %	1. Kecamatan melaksanakan kegiatan kab/kota sehat, Kesepakatan Tim Pembina KKS Provinsi dalam upaya pembinaan KKS di DIY, Data verifikasi kab/kota sehat dalam rangka persiapan verifikasi KKS pusat;	3 dokumen	DIY	Rp. 858.729.000,00	1. Kecamatan melaksanakan kegiatan kab/kota sehat, Kesepakatan Tim Pembina KKS Provinsi dalam upaya pembinaan KKS di DIY, Data verifikasi kab/kota sehat dalam rangka persiapan verifikasi KKS pusat;	3 dokumen	DIY	Rp. 824.979.000,00	(-) Rp. 33.750.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Usunan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				lingkungan RS	2 Dokumen, 25 orang;			5. Tenaga terlatih dalam upaya peningkatan supply kebutuhan keasapan rumah tangga peningkatan STBM	2 Dokumen, 25 orang;					
				6. Data kualitas air minum dan tenaga terlatih dalam terlatih dalam teknologi Tepat Guna;	200 sampel, 3 Dokumen			6. Data kualitas air minum dan tenaga terlatih dalam teknologi Tepat Guna;	200 sampel, 3 Dokumen					
				7. Kesiapakan dan kesiapagaan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan di DIY	2 Dokumen, 30 orang			7. Kesiapakan dan kesiapagaan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan di DIY	2 Dokumen, 30 orang					
				8. Hasil evaluasi kegiatan STBM, PPSP dan pasar sehat;	3 dokumen			8. Hasil evaluasi kegiatan STBM, PPSP dan pasar sehat;	3 dokumen					
				9. Kelengkapan data dan pelaporan data indikator penyebaran STBM, Evaluasi hasil pelaporan menggunakan sistem informasi kesehatan lingkungan, emonev HSP dan Monev STBM berbasis Web dan SMS	3 dokumen			9. Kelengkapan data dan pelaporan data indikator penyebaran STBM, Evaluasi hasil pelaporan menggunakan sistem informasi kesehatan lingkungan, emonev HSP dan Monev STBM berbasis Web dan SMS	3 dokumen					
1.02.1.02.01.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA						Rp. 25.946.923.900,00				Rp. 26.987.434.966,00	Rp. 1.040.511.066,00		
1.02.1.02.01.26.018	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Cukai tembakau) (Respira)	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Jumlah peralatan kedokteran dan kesehatan yang diadakan	34 jenis	DIY	Rp. 6.100.000.000,00	Imunology Analyser	1 unit	DIY	Rp. 6.591.339.611,00	Rp. 491.339.611,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.02.1.02.01.26.019	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit (Pajak Rokok)	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Tersedianya obat-obatan rumah sakit	1 Paket	DIY	Rp. 1.563.100.000,00	Jumlah peralatan kedokteran dan kesehatan yang diadakan rumah sakit	34 jenis	Yogyakarta, Kantor RSKP Respira	Rp. 1.563.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.02.1.02.01.26.021	Pengadaan Mebelur Rumah Sakit (Respira)	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Tersedianya Mebelur Rumah sakit	9 Item	DIY	Rp. 140.000.000,00	Tersedianya Mebelur Rumah sakit	9 Item	Kantor RSKP Respira	Rp. 140.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.02.1.02.01.26.022	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Terwujudnya pengadaan, peningkatan	100 %	Jenis Perlengkapan rumah tangga RSK Paru Respira yang disediakan	24 jenis	DIY	Rp. 150.000.000,00	Jenis Perlengkapan rumah tangga RSK Paru Respira yang disediakan	24 jenis	Kantor RSKP Respira	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan													
Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll) (Respira)	sarana dan prasarana di UPT, RS, dan Jaringannya											
1.02.1.02.01.26.023	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit (Respira)	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan Jaringannya	100 %	Jumlah Pembelian makanan dan minuman pasien	11100 oh	DIY	Rp. 266.420.000,00	Jumlah Pembelian makanan dan minuman pasien	11100 oh	Kantor RSKP Respira	Rp. 266.420.000,00	Cukai	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.26.024	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit (Respira)	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan Jaringannya	100 %	Jumlah form rekam medik yang diadakan	1 Paket	DIY	Rp. 120.000.000,00	Jumlah form rekam medik yang diadakan	1 Paket	Kantor RSKP Respira	Rp. 120.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.26.028	Pengadaan Reagen/Bahan Kimia (Dana Cukai Tembaku)	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan Jaringannya	100 %	Jumlah bahan kimia dan bahan penunjang yang disediakan	1 Paket	DIY	Rp. 750.000.000,00	Jumlah bahan kimia dan bahan penunjang yang disediakan	1 Paket	DIY	Rp. 750.000.000,00	Cukai	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.26.032	Pengadaan Reagen/Bahan kimia (Labkes)	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan Jaringannya	100 %	Reagensia/Bahan kimia Labkes	250 Bahan, reagen dan penunjang	DIY	Rp. 1.117.000.000,00	Reagensia/Bahan kimia Labkes	250 Bahan, reagen dan penunjang	Balai Labkes, YK	Rp. 1.113.990.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.26.033	Pengadaan Alatralat Kesehatan Rumah Sakit	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan Jaringannya	100 %	Tersedianya alat kesehatan Rumah Sakit	1 Paket	DIY	Rp. 787.535.000,00	Tersedianya alat kesehatan Rumah Sakit	1 Paket	Yogyakarta	Rp. 787.535.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.26.035	Pengembangan RSKP, RESPRA (Pajak Rokok)	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan Jaringannya	100 %	1. Tambah daya listrik 10. Alat kedokteran umum 11. Alat Laboratorium 12. Kanopi dan Jembatan Penghubung 2. Pembelian Tanah 3. Generator/Genzet 4. Kendaraan Operasional 5. Mobil Jenazah 6. Videotron 7. Penunjuk arah 8. Meja Pertemuan 9. Kursi Pertemuan	1 Paket 10 Item 1 Item 1 Paket 1 Paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 Paket	DIY	Rp. 10.962.889.000,00	1. Tambah daya listrik 10. Alat kedokteran umum 11. Alat Laboratorium 12. Kanopi dan Jembatan Penghubung 2. Pembelian Tanah 3. Generator/Genze 4. Kendaraan Operasona 5. Mobil Jenazah 6. Videotron 7. Penunjuk arah 8. Meja Pertemuan 9. Kursi Pertemuan	1 Paket 10 Item 1 Item 1 Paket 1 Paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 Paket	DIY	Rp. 10.962.889.000,00	Pajak Rokok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.26.036	Pengembangan Balai Laboratorium Kesehatan (Pajak	Terwujudnya pengadaan, peningkatan	100 %	AAS With Graphite Furnice	1 unit	Mantri/jeron	Rp. 3.989.979.900,00	AAS With Graphite Furnice	1 unit	Mantri/jeron	Rp. 4.542.161.355,00	Pajak Rokok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Almar Asam	2 unit	Almar Asam			2 unit				

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

420

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

421

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.02.1.02.01.33.005	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	Persentase keterlaksanaan obat farmasi yang di fasyankes dasar	96 %	6. draft Pergub penangan makanan jajan anak sekolah	1 draft pergub	DIY	Rp. 149.500.000,00	6. draft Pergub penangan makanan jajan anak sekolah	1 draft pergub	Kab/kota di DIY, Omnes DIY	Rp. 148.498.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : Penambahan : -
1.02.1.02.01.48	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN						Rp. 11.800.826.392,00				Rp. 13.818.221.761,00		
1.02.1.02.01.48.016	Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Pajak rokok)	Persentase pelayanan yang bermutu	57 %	1. Survey penelitian Puskesmas;	1 kali	Yogyakarta	Rp. 11.214.941.792,00	1. Survey penelitian Puskesmas;	1 kali	DIY	Rp. 13.240.542.711,00	Pajak Rokok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : Penambahan : -
				10. E expose Hasil Analisis SIM RS	40 org, 2 ki;			10. E expose Hasil Analisis SIM RS	40 org, 2 ki;				
				11. Presentase Hasil Survei Farmasi Penagapan Kegawadaruratan Maternal Neonatal;	33 Org			11. Presentase Hasil Survei Farmasi Penagapan Kegawadaruratan Maternal Neonatal;	33 Org				
				12. Orientasi SI Penanganan Kegawadaruratan Maternal Neonatal	33 Orang			12. Orientasi SI Penanganan Kegawadaruratan Maternal Neonatal	33 Orang				
				13. Pendampingan SI Penanganan Kegawadaruratan Maternal Neonatal;	34 Orang			13. Pendampingan SI Penanganan Kegawadaruratan Maternal Neonatal;	34 Orang				
				14. Implementasi/ujicoba SI kegawdaruratan maternal neonatal di Kab/Kota	35 org, 5 kl			14. Implementasi/ujicoba SI kegawdaruratan maternal neonatal di Kab/Kota	35 org, 5 kl				
				15. Pertemuan Yankes Disabilitas;	40 org, 2 kl			15. Pertemuan Yankes Disabilitas;	40 org, 2 kl				
				16. Pelatihan Sistem Desain SPQDT DIY;	20 org,3 kl;			16. Pelatihan Sistem Desain SPQDT DIY;	20 org,3 kl;				
				17. Pertemuan Koordinasi Desain SPQDT ;	20 org, 4kl			17. Pertemuan Koordinasi Desain SPQDT ;	20 org, 4kl				
				18. Workshop Desain SPQDT DIY ;	30 org, 3kl			18. Workshop Desain SPQDT DIY ;	30 org, 3kl				
				19. Sosialisasi Hasil Kajian Deteksi Dini Pencegahan Kecelakaan pada anak	50 Org			19. Sosialisasi Hasil Kajian Deteksi Dini Pencegahan Kecelakaan pada anak	50 Org				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Target	Tolek Ukur	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi kepala puskesmas se DIY	1 kali			2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi kepala puskesmas se DIY	1 kali					
				20. Pertemuan Kesehatan reproduksi Disabilitas	40 Org			20. Pertemuan kesehatan reproduksi Disabilitas	40 Org					
				21. Peningkatan kinerja aparatur	169 org,2 hr;			21. Peningkatan kinerja aparatur	169 org,2 hr;					
				22. Penyusunan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan	1 pkt			22. Penyusunan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan	1 pkt					
				23. Reagensia CD4;	1 pkt			23. Reagensia CD4;	1 pkt					
				24. Reagensia HIV/AIDS	1 pkt			24. Reagensia HIV/AIDS	1 pkt					
				25. Reagensia campak	1 pkt			25. Reagensia campak	1 pkt					
				26. Reagensia tuberkulin test	1 pkt			26. Reagensia tuberkulin test	1 pkt					
				27. Masker N95;	1 pkt			27. Masker N95;	1 pkt					
				28. Launching Posbindu	1 pkt			28. Launching Posbindu	1 pkt					
				3. Pembinaan kemampuan penerapan perkesmas bagi perawat puskesmas dan koordinator perkesmas diakes	30 org, 2 angkatan;			3. Pembinaan kemampuan penerapan perkesmas bagi perawat puskesmas dan koordinator perkesmas diakes	30 org, 2 angkatan;					
				30. Buku rapor kesehatanaku	1000 pkt			30. Buku rapor kesehatanaku	1000 pkt					
				31. Kohort ANC terpadu	1752 bh			31. Kohort ANC terpadu	1752 bh					
				32. KMS lansia;	5000 lbr			32. KMS lansia;	5000 lbr					
				33. Perbaikan ruang pertemuan kantor;	1 pkt			33. Perbaikan ruang pertemuan kantor;	1 pkt					
				34. ACLS	6 RSUD			34. ACLS	6 RSUD					
				35. Pemeliharaan jaringan LAN;	1 pkt			35. Pemeliharaan jaringan LAN;	1 pkt					
				36. THORCH	1 pkt			36. THORCH	1 pkt					
				37. Call center;	1 pk			37. Call center;	1 pk					
				38. DED Gedung diakes;	1 pkt			38. DED Gedung diakes;	1 pkt					
				39. Genset	1 unit			39. Genset	1 unit					
				4. Pendidikan Pedoman Pengobatan Dasar di puskesmas	42 org,3 angkatan			4. Pendidikan Pedoman Pengobatan Dasar di puskesmas	42 org,3 angkatan					
				40. Kendaraan Dinas Roda 4 (untuk operasional dan farmasi) serta roda 2	7 unit roda empat dan 15 unit roda dua			40. Kendaraan Dinas Roda 4 (untuk operasional dan farmasi) serta roda 2	7 unit roda empat dan 15 unit roda dua					
				41. Bankom bencana	1 pkt			41. Bankom bencana	1 pkt					
				42. Pengadaan komputer Dinas	14 unit			42. Pengadaan komputer Dinas	14 unit					
				44. SMS gateway	1 pkt			44. SMS gateway	1 pkt					
				45. Alat penga resusitasi neonates	1 unit			45. Alat penga resusitasi neonates	1 unit					
				46. Klinik laktas	1 pkt			46. Klinik laktas	1 pkt					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian /Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				47. Pemilihan Puskesmas Berpretasi	10 puskesmas terpilih			47. Pemilihan Puskesmas Berpretasi	10 puskesmas terpilih					
				48. Pengiriman kursus-kursus	1 pkt			48. Pengiriman kursus-kursus	1 pkt					
				49. Peralatan PIONED Puskesmas	10 puskesmas			49. Peralatan PIONED Puskesmas	10 puskesmas					
				5. Pendidikan Pedoman Pengobatan Jiwa di Puskesmas	42 org. 3 angkatan			5. Pendidikan Pedoman Pengobatan Jiwa di Puskesmas	42 org. 3 angkatan					
				6. Pengalangan komitmen Kepala Puskesmas;	121 org. 1 angkatan			6. Pengalangan komitmen Kepala Puskesmas;	121 org. 1 angkatan					
				7. Peningkatan kemampuan akreditasi Puskesmas bagi tm akreditasi Puskesmas;	30 org. 3 angkatan;			7. Peningkatan kemampuan akreditasi Puskesmas bagi tm akreditasi Puskesmas;	30 org. 3 angkatan;					
				8. Manajemen TB Anak; H7;	31 org. 7 kl, 3 H7;			8. Manajemen TB Anak; H7;	31 org. 7 kl, 3 H7;					
				9. FGD Identifikasi Masalah SIM RS	40 org. 2 kl			9. FGD Identifikasi Masalah SIM RS	40 org. 2 kl					
1.02.1.02.01.48.017	Upaya Kesehatan Dasar	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	Jumlah puskesmas di evaluasi dari aspek manajemen mutu pelayanan dasar	52 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Rp. 36.385.000,00	Jumlah puskesmas di evaluasi dari aspek manajemen mutu pelayanan dasar	52 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Rp. 35.785.000,00	(-) Rp. 600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.02.1.02.01.48.018	Upaya Kesehatan Rujukan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Komitmen RS dalam penyusunan HDP	30 orang x 2 kl;	DIY	Rp. 195.609.000,00	1. Komitmen RS dalam penyusunan HDP	30 orang x 2 kl;	DIY	Rp. 194.008.950,00	(-) Rp. 1.600.050,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit;	3 orang x 3 kl			2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit;	3 orang x 3 kl					
				3. Meningkatkan keterampilan petugas dalam melayani tranfusi darah;	30 orang x 2 kl;			3. Meningkatkan keterampilan petugas dalam melayani tranfusi darah;	30 orang x 2 kl;					
				4. Kesepakatan Pelaksanaan RSSIB;	35 orang x 2 kl			4. Kesepakatan Pelaksanaan RSSIB;	35 35					
				5. Monitoring Pelaksanaan RSSIB	30 orang x 1kl			5. Monitoring Pelaksanaan RSSIB	30 orang x 1kl					
				6. Data Valid RS;	72 orang x 2 kl			6. Data Valid RS;	72 orang x 2 kl					
				7. Komitmen Pemeliharaan Sistem Rujukan	72 orang x 2 k			7. Komitmen Pemeliharaan Sistem Rujukan	72 orang x 2 k					
1.02.1.02.01.48.019	Upaya Kesehatan Khusus	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1) persentase pelayanan kesehatan jiwa, calon jamaah haji	100 %	DIY	Rp. 208.433.000,00	1) persentase pelayanan kesehatan jiwa, calon jamaah haji	100 %	DIY	Rp. 202.825.500,00	(-) Rp. 5.607.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2) persentase perusahaan yang menerapkan kesehatan kerja	25 %			2) persentase perusahaan yang menerapkan kesehatan kerja	25 %					
1.02.1.02.01.48.020	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	a. Dokumen registrasi, lisensi dan sertifikat bagi tenaga kesehatan di Dinkes DIY	2 Dokumen lisensi dan sertifikat registrasi, lisensi dan sertifikat bagi tenaga kesehatan di Dinkes DIY	DIY	Rp. 145.459.600,00	a. Dokumen registrasi, lisensi dan sertifikat bagi tenaga kesehatan di Dinkes DIY	2 Dokumen pelaksanaan registrasi, lisensi dan sertifikat bagi tenaga kesehatan sesuai kewenangan Pe	DIY	Rp. 145.059.600,00	(-) Rp. 400.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				b. Dokumen kesepakatan dengan stakeholder Mutu	6 Dokumen kesepakatan dengan stakeholder Mutu			b. Dokumen kesepakatan dengan stakeholder Mutu	6 Dokumen pelaksanaan dengan					

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Indikator Program	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Tenaga Kesehatan di DIY	stakeholder Mutu Tenaga Kesehatan di DIY				stakeholder Mutu Tenaga Kesehatan di DIY				
				c. Dokumen pengelolaan Program Intensip Dokter Indonesia di DIY	4 Dokumen Pelaksanaan Program Intensip Dokter Indonesia di DIY (per angketan);			c. Dokumen pengelolaan Program Intensip Dokter Indonesia di DIY;	4 Dokumen Pelaksanaan Program Intensip Dokter Indonesia di DIY (per angketan);				
				d. Dokumen Pengelolaan Akreditasi pelatihan	2 Dokumen Pengelolaan Akreditasi pelatihan (Pelaksanaan akreditasi dan Evaluasi Pelatihan)			d. Dokumen Pengelolaan Akreditasi pelatihan	2 Dokumen Pengelolaan Akreditasi pelatihan (Pelaksanaan akreditasi dan Evaluasi Pelatihan);				
				e. Dokumen Kesepakatan Pelaksanaan Perizinan ;Sarana Kesehatan;	6 Dokumen Kesepakatan Pelaksanaan Perizinan Sarana Kesehatan			Data SDMK DIY	1 dokumen				
				f. Dokumen pelaksanaan Perizinan Sarana Kesehatan seksual Kewenangan Dinkes DIY	2 Dokumen pelaksanaan Perizinan Sarana Kesehatan seksual Kewenangan Dinkes DIY (per 6 bulan)			e. Dokumen Kesepakatan Pelaksanaan Perizinan Sarana Kesehatan	5 Dokumen Kesepakatan Pelaksanaan Perizinan Sarana Kesehatan				
								f. Dokumen pelaksanaan Perizinan Sarana Kesehatan seksual Kewenangan Dinkes DIY	2 Dokumen pelaksanaan Perizinan Sarana Kesehatan seksual Kewenangan Dinkes DIY (per 6 bulan)				
								g. data SDMK	1 dokumen				
1.02.1.02.01.49	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD						Rp. 69.926.444.300,00				Rp. 71.219.243.754,00	Rp. 1.292.799.454,00	
1.02.1.02.01.49.001	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan somesta yang dikelola oleh Bapel	69,6 %	Pelatihan SDM	5 Org	DIY	Rp. 69.926.444.300,00	Pelatihan SDM	5 Org	DIY	Rp. 71.219.243.754,00	Rp. 1.292.799.454,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Terlaksananya pertemuan validasi data pelayanan kesehatan kepartan dari masing-masing Kab/Kota	15 orang 4 kali			Terlaksananya pertemuan validasi data pelayanan kesehatan kepartan dari masing-masing Kab/Kota	15 orang 4 kali				
				Terseleenggaranya pertemuan pembuatan paket Jankesta Klas II dan Klas I	25 klas II dan Klas I			Terseleenggaranya pertemuan pembuatan paket Jankesta Klas II dan Klas I	25 klas II dan Klas I				
				Terseleenggaranya Koordinasi perhitungan perubahan iuran/premi peserta Jankesta DIY	34 orang 2 kali			Terseleenggaranya Koordinasi perhitungan perubahan iuran/premi peserta Jankesta DIY	34 orang 2 kali				
				Terseleenggaranya Koordinasi Program Jankesta DIY	25 orang 2 kali			Terseleenggaranya Koordinasi Program Jankesta DIY	25 orang 2 kali				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Usulan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				Terselenggaranya Koordinasian sinkronisasi kepesertaan Jamkesda DIY	25 orang 2 kali			Terselenggaranya Koordinasian sinkronisasi kepesertaan Jamkesda DIY	25 orang 2 kali					
				Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesos	30 orang 2 kali			Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesos	30 orang 2 kali					
				Terselenggaranya Pelayanan Pengabdian Keilmuan	1 tahun			Terselenggaranya Pelayanan Pengabdian Keilmuan	1 tahun					
				Terselenggaranya Pemeriksaan Pegawai Bapel Jamkesos	62 Paket			Terselenggaranya Pemeriksaan Pegawai Bapel Jamkesos	62 Paket					
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi kantor	1 tahun			Terselenggaranya pengelolaan administrasi kantor	1 tahun					
				Terselenggaranya Pengembangan ISO Bapel Jamkesos	5 kali 1 dokumen			Terselenggaranya Pengembangan ISO Bapel Jamkesos	5 kali 1 dokumen					
				Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	1 Paket			Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	1 Paket					
				Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	10773 jiwa			Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	10773 jiwa					
				Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	12367 jiwa			Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	12367 jiwa					
				Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	222109 jiwa			Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	222109 jiwa					
				Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	414819 jiwa			Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda DIY	414819 jiwa					
				Terselenggaranya Penyusunan Laporan BLUD	15 org 2 kali			Terselenggaranya Penyusunan Laporan BLUD	15 org 2 kali					
				Terselenggaranya Penyusunan Profil Jamkesos	1 dokumen			Terselenggaranya Penyusunan Profil Jamkesos	1 dokumen					
				Terselenggaranya Pertemuan kearsipan Bapel Jamkesos	33 orang 1 kali			Terselenggaranya Pertemuan kearsipan Bapel Jamkesos	33 orang 1 kali					
				Terselenggaranya Validasi Data kepesertaan Jamkesos DIY	25 orang 4 kali			Terselenggaranya Validasi Data kepesertaan Jamkesos DIY	25 orang 4 kali					
				Terselenggaranya kegiatan Promosi Paket manfaat Jamkesda	30 orang 20 kali			Terselenggaranya kegiatan Promosi Paket manfaat Jamkesda	30 orang 20 kali					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				Terselenggaranya Kerjasama Kepesertaan dan pelayanan	61 RS, 16 dokel (35 orang 6 kali)			Terselenggaranya Kerjasama Kepesertaan dan pelayanan	61 RS, 16 dokel (35 orang 6 kali)					
				Terselenggaranya pelatihan dokter keluarga yang bekerja sama dengan Bapd Jamkesos	16 dokel			Terselenggaranya pelatihan dokter keluarga yang bekerja sama dengan Bapd Jamkesos	16 dokel					
				Terselenggaranya Pelatihan teknis Verifaktor	7 Orang			Terselenggaranya Pelatihan teknis Verifaktor	7 Orang					
				Terselenggaranya pertemuan Evaluasi RS dalam Kendali mutu dan kendali biaya	50 orang 4 kali			Terselenggaranya pertemuan Evaluasi RS dalam Kendali mutu dan kendali biaya	50 orang 4 kali					
				Terselenggaranya verifikasi klaim PPK	210 PPK (8 orang 6 bulan)			Terselenggaranya verifikasi klaim PPK	210 PPK (8 orang 6 bulan)					
				Terselenggaranya pertemuan Forum Komunitas Jamkesta	25 orang 9 kali			Terselenggaranya pertemuan Forum Komunitas Jamkesta	25 orang 9 kali					
1.02.1.02.01.50	PROGRAM PEMBIYARAN KESEHATAN LANSIA						Rp. 278.778.000,00				Rp. 271.858.000,00	(-) Rp. 6.920.000,00		
1.02.1.02.01.50.005	Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Lansia	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usia (PSU)	80 %	Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 1. Perencanaan Program Kesehatan Lansia	1 dokumen perencanaan kegiatan lansia 2015	DIY	Rp. 278.778.000,00	Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 1. Perencanaan Program Kesehatan Lansia	1 dokumen perencanaan kegiatan lansia 2015	DIY	Rp. 271.858.000,00	(-) Rp. 6.920.000,00	Efisiensi Kegiatan : : Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : Penambahan : :	
				Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 2. Optimalisasi Implementasi KMS lansia	1 dokumen optimalisasi pembinaan klp/posyandu lansia			Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 2. Optimalisasi Implementasi KMS lansia	1 dokumen optimalisasi pembinaan klp/posyandu lansia					
				Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 3. Peningkatan kapasitas nakes program pelayanan kesehatan lansia	1 paket KMS lansia (33.018 lembar)			Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 3. Peningkatan kapasitas nakes program pelayanan kesehatan lansia	1 paket KMS lansia (33.018 lembar)					
				Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 4. Orientasi penanganan gangguan kesehatan lansia	27 orang tenaga kesehatan			Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 4. Orientasi penanganan gangguan kesehatan lansia	27 orang tenaga kesehatan					
				Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 5. Bimbingan teknis program pelayanan kesehatan Lansia	1 dokumen Bimtek program lansia untuk nakes di 121 Puskesmas			Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lansia dengan aktivitas : 5. Bimbingan teknis program pelayanan kesehatan Lansia	1 dokumen Bimtek program lansia untuk nakes di 121 Puskesmas					
1.02.1.02.01.51	PROGRAM PEMBIYARAN KESEHATAN IBU						Rp. 175.000.000,00				Rp. 173.506.900,00	(-) Rp. 1.493.100,00		
1.02.1.02.01.51.010	Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Ibu	Persentase cakupan persalinan oleh	99 %	5. Penguatan task force KIA;	1 dokumen pertemuan task force KIA;	DIY	Rp. 175.000.000,00	5. Penguatan task force KIA;	1 dokumen pertemuan task force KIA;	DIY	Rp. 173.506.900,00	(-) Rp. 1.493.100,00	Efisiensi Kegiatan : : Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : Penambahan : :	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan		Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Sumber Dana	Keterangan			
Kode	Urusan/Program / kegiatan	Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/ Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
			tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 1. Sosialisasi pengenalan tanda bahaya bumil bulin dan bufas; 2. Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 2. Pertemuan evaluasi dan koordinasi yankes ibu	150 orang meningkat pengetahuannya tentang tanda bahaya bumil bulin dan bufas; 1 dokumen perencanaan program kesehatan ibu			Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 1. Sosialisasi pengenalan tanda bahaya bumil bulin dan bufas; 1 dokumen perencanaan program kesehatan ibu	150 orang meningkat pengetahuannya tentang tanda bahaya bumil bulin dan bufas; 1 dokumen perencanaan program kesehatan ibu				Penambahan : -	
				Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 3. Sosialisasi pelaksanaan sistem mata rantai rujukan;	100 orang meningkatkan pengetahuan tentang sistem rujukan;			Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 3. Sosialisasi pelaksanaan sistem mata rantai rujukan;	100 orang meningkatkan pengetahuan tentang sistem rujukan;					
				Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 4. Penguatan pelayanan KB;	150 orang meningkatkan pengetahuannya dalam pelayanan KB			Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 4. Penguatan pelayanan KB;	150 orang meningkatkan pengetahuannya dalam pelayanan KB					
				Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 6. Pertemuan evaluasi program;	1 dokumen pertemuan evaluasi program			Peningkatan dan penguatan kesehatan ibu melalui aktivitas: 6. Pertemuan evaluasi program;	1 dokumen pertemuan evaluasi program					
1.02.1.02.01.52	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA						Rp. 188.600.000,00				Rp. 181.475.000,00	(-) Rp. 7.125.000,00		
1.02.1.02.01.52.004	Pengembangan Penguatan Kesehatan Anak dan Remaja	Presentase cakupan penjangkauan kesehatan siswa sekolah	98 %	Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 1. Rapat koordinasi Tim Pembina UKS;	1 dokumen rakor TP UKS untuk penguatan implementasi UKS 2016.;	DIY	Rp. 188.600.000,00	Jumlah siswa sekolah yang discreening kesehatan/mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 1. Rapat-koordinasi Tim Pembina UKS;	1 dokumen rakor TP UKS untuk penguatan implementasi UKS 2016.;	DIY	Rp. 181.475.000,00	(-) Rp. 7.125.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
				Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 2. Workshop pembentukan brand sitem informasi kesehatan remaja	1 dokumen kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 2. Informasi kesehatan remaja.;			Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 2. Workshop pembentukan brand sitem informasi kesehatan remaja	1 dokumen brand Sistem informasi kesehatan remaja.;					
				Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 3. Sosialisasi website remaja ;	80 orang tersosialisasikan website kesehatan remaja			Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 3. Sosialisasi website remaja ;	80 orang tersosialisasikan website kesehatan remaja					
				Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 4. Jambore remaja dalam mendukung KIE remaja;	100 orang kader remaja siap melaksanakan kampanye sehat remaja;			Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 4. Jambore remaja dalam mendukung KIE remaja;	100 orang kader remaja siap melaksanakan kampanye sehat remaja;					
				Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 5. Pertemuan koordinasi FKPKBR ;	1 dokumen pertemuan koordinasi FKPKBR ;			Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 5. Pertemuan koordinasi FKPKBR ;	1 dokumen pertemuan koordinasi FKPKBR ;					
				Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas:	1 dokumen koordinasi keterpaduan			Mengembangkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas:	1 dokumen koordinasi keterpaduan					

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nana SKPD : Dinas Kesehatan		Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Berkambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
Kode	Usuran/Program /Kegiatan	Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				6. Koordinasi keterpaduan Kespro Remaja di kab/kota; Meningkatkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 1. Koordinasi Puskesmas PKPR di kab/kota; Meningkatkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 8. Evaluasi program UKS	Kespro remaja di kab/kota 76 Puskesmas PKPR; 1 dokumen evaluasi program UKS			6. Koordinasi keterpaduan Kespro Remaja di kab/kota; Meningkatkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 1. Koordinasi Puskesmas PKPR di kab/kota; Meningkatkan kesehatan anak dan remaja melalui aktivitas: 8. Evaluasi program UKS	Kespro remaja di kab/kota 76 Puskesmas PKPR; 1 dokumen evaluasi program UKS					
1.02.1.02.01.55	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA						Rp. 125.446.900,00				Rp. 123.762.700,00	(-) Rp. 1.684.200,00		
1.02.1.02.01.55.006	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Bayi dan Balita	Persentase cakupan pelayanan neonatus pertama (NN1)	98,5 %	Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 1. Pembinaan teknis pasca manajemen asfiksia/BBUR; Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 2. Pengembangan surveilans KIA;	50 orang nakes mempunyai kemampuan manajemen asfiksia/BBUR; 1 dokumen data KIA;	DIY	Rp. 125.446.900,00	Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 2. Pengembangan surveilans KIA;	50 orang nakes mempunyai kemampuan manajemen asfiksia/BBUR; 1 dokumen data KIA;	DIY	Rp. 123.762.700,00	(-) Rp. 1.684.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -
				Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 3. Pengembangan surveilans KIA;	1 dokumen perencanaan 2016;			Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 3. Pengembangan surveilans KIA;	1 dokumen perencanaan 2016;					
				Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 4. Orientasi SODITK bagi kader di lokasi keterpaduan ;	25 kader di calon lokasi keterpaduan mampu melakukan SODITK;			Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 4. Orientasi SODITK bagi kader di lokasi keterpaduan ;	25 kader di calon lokasi keterpaduan mampu melakukan SODITK;					
				Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 5. Koordinasi keterpaduan SODITK, Btk, PAUD di Posyandu;	5 lokasi keterpaduan baru;			Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 5. Koordinasi keterpaduan SODITK, Btk, PAUD di Posyandu;	5 lokasi keterpaduan baru;					
				Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 6. Pelaksanaan MTBS di Puskesmas	121 Puskesmas mampu melakukan MTBS			Peningkatan dan pengembangan kesehatan remaja melalui aktivitas: 6. Pelaksanaan MTBS di Puskesmas	121 Puskesmas mampu melakukan MTBS					
1.02.1.02.01.56	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN						Rp. 739.530.000,00				Rp. 734.330.000,00	(-) Rp. 5.200.000,00		
1.02.1.02.01.56.007	Pengembangan sistem dan jaminan kesehatan	Persentase kepatuhan jaminan kesehatan bersubdi dan mandiri	41,5 %	1. Dokumen Rancangan Integrasi Jankes; 10. Profil Jankes; 2. Kesepakatan dengan Jaring Jankes mandiri	1 dokumen; 1 buku profil 1 dokumen	DIY	Rp. 739.530.000,00	1. Dokumen Rancangan Integrasi Jankes; 10. Profil Jankes; 2. Kesepakatan dengan Jaring Jankes mandiri	1 dokumen; 1 buku profil 1 dokumen	DIY	Rp. 734.330.000,00	(-) Rp. 5.200.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				teknis pelaksanaan Jamkes				teknis pelaksanaan Jamkes						
				3. Dokumen hasil penyusunan Provincial Health Account (PHA);	1 dokumen			3. Dokumen hasil penyusunan Provincial Health Account (PHA);	1 dokumen					
				4. Sosialisasi Jamkes - Jumlah peserta/ masyarakat umum	1375 orang - 4 kali - 14 kali - 50 kali - 4 paket;			4. Sosialisasi Jamkes - Jumlah peserta/ masyarakat umum	1375 orang - 4 kali - 14 kali - 50 kali - 4 paket;					
				Penyiaran dialog interaktif TV tentang Jamkes - Penyiaran dialog interaktif radio tentang Jamkes - Penyiaran iklan layanan masyarakat tentang Jamkes				Jamkes - Penyiaran dialog interaktif radio tentang Jamkes - Penyiaran iklan layanan masyarakat tentang Jamkes						
				5. Dokumen Pengelolaan data laporan Jamkes - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen;				5. Dokumen Pengelolaan data laporan Jamkes - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen;						
				6. Dokumen Money Jamkes - Laporan evaluasi Jamkes - Laporan Jamkes - Laporan evaluasi Jamkes - Laporan Money;	1 Laporan - 1 Laporan - 1 laporan;			6. Dokumen Money Jamkes - Laporan evaluasi Jamkes - Laporan Jamkes - Laporan evaluasi Jamkes - Laporan Money;	1 Laporan - 1 Laporan - 1 laporan;					
				7. Dokumen Evaluasi RS dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya;	1 dokumen			7. Dokumen Evaluasi RS dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya;	1 dokumen					
				8. Bahan Kerjasama Kepesertaan dan pelayanan;	1 dokumen			8. Bahan Kerjasama Kepesertaan dan pelayanan;	1 dokumen					
				9. Rumusan kesepakatan kegiatan Jamkes/Jamkesda;	1 dokumen			9. Rumusan kesepakatan kegiatan Jamkes/Jamkesda;	1 dokumen					
1.02.1.02.01.57	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT*						Rp. 2.928.216.500,00					(-) Rp. 8.627.900,00		
1.02.1.02.01.57.001	Peningkatan Imunisasi	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64,44 %	1. Kesepakatan dengan Fasilitas Pelayanan Swasta (FPS);	2 dokumen	DIY	Rp. 272.304.500,00	1. Kesepakatan dengan Fasilitas Pelayanan Swasta (FPS);	2 dokumen	Provinsi DIY	Rp. 272.304.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				10. RTL Hasil Assessment Pelaksanaan Imunisasi;	1 dokumen;			10. RTL Hasil Assessment Pelaksanaan Imunisasi;	1 dokumen;					
				11. Safety Box;	1 paket;			11. Safety Box;	1 paket;					
				12. Peralatan Coolroom;	1 paket;			12. Peralatan Coolroom;	1 paket;					
				Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KPI);	1 dokumen			Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KPI);	1 dokumen					
				3. Kesepakatan Pengawasan Data Sistem Imunisasi Terpadu (SIMUNDU) ;	5 dokumen			3. Kesepakatan Pengawasan Data Sistem Imunisasi Terpadu (SIMUNDU) ;	5 dokumen					

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
1.02.1.02.01.57.002	Peningkatan Pelaksanaan BIAS	Persentase pencergahan dan pengendalian penyakit	64,44 %	4. RTL Pemersalahan Cakupan Data Imunisasi Tingkat DIY dalam 11 kali pertemuan;	11 dokumen;	DIY	Rp. 17.350.000,00	4. RTL Pemersalahan Cakupan Data Imunisasi Tingkat DIY dalam 11 kali pertemuan;	11 dokumen;	Provinsi DIY, kab/kota, 5 kab/kota	Rp. 17.349.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -	
				5. RTL Pemersalahan Cakupan Data Imunisasi Tingkat Kab/Kota; (dokumen RTL di 5 Kab/Kota);	5 dokumen;			5. RTL Pemersalahan Cakupan Data Imunisasi Tingkat Kab/Kota; (dokumen RTL di 5 Kab/Kota);	5 dokumen;					
				6. Kesepakatan Upaya Mempertahankan Desa UCI (Universal Child Immunization) dalam 2 kali pertemuan;	2 dokumen;			6. Kesepakatan Upaya Mempertahankan Desa UCI (Universal Child Immunization) dalam 2 kali pertemuan;	2 dokumen;					
				7. RTL Penguatan Kapasitas Petugas Puskesmas dalam 3 kali pertemuan;	3 dokumen;			7. RTL Penguatan Kapasitas Petugas Puskesmas dalam 3 kali pertemuan;	3 dokumen;					
				8. RTL Kerjasama Linfas Sektor untuk Pelaksanaan Imunisasi dalam 5 kali pertemuan	5 dokumen;			8. RTL Kerjasama Linfas Sektor untuk Pelaksanaan Imunisasi dalam 5 kali pertemuan	5 dokumen;					
1.02.1.02.01.57.003	SKD & Penanggulangan KLB	Persentase pencergahan dan pengendalian penyakit	64,44 %	9. RTL Peilaian DQS (Data Quality Self Assessment) dalam 5 kali pertemuan;	5 dokumen;	DIY	Rp. 163.125.000,00	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan imunisasi	147827 siswa	Provinsi DIY, kab/kota	Rp. 163.124.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -	
				1. Jumlah petugas terpapar informasi terbaru Sistem Kewaspadaan Dini dan Penganggulan Kejadian Luar Biasa (SKD dan P. KLB)	90 orang (3 kali pertemuan)			1. Jumlah petugas terpapar informasi terbaru Sistem Kewaspadaan Dini dan Penganggulan Kejadian Luar Biasa (SKD dan P. KLB)	90 orang (3 kali pertemuan)					
				10. Dokumen hasil kesepakatan Survellans Hepatitis	2 dokumen			10. Dokumen hasil kesepakatan Survellans Hepatitis	2 dokumen					
				11. Dokumen hasil kesepakatan EWARS (Early Warning Alert and Respon System)	3 dokumen			11. Dokumen hasil kesepakatan EWARS (Early Warning Alert and Respon System)	3 dokumen					
				2. Jumlah petugas terpapar info terbaru Survellans Terpadu Penyakit (STP)	90 orang (3 kali pertemuan)			2. Jumlah petugas terpapar info terbaru Survellans Terpadu Penyakit (STP)	90 orang (3 kali pertemuan)					
				3. Jumlah petugas terpapar info terbaru Survellans Influenza	90 orang (3 kali pertemuan)	3. Jumlah petugas terpapar info terbaru Survellans Influenza	90 orang (3 kali pertemuan)	4. Jumlah petugas terpapar info terbaru Survellans Hepatitis	50 orang (2 kali pertemuan)	4. Jumlah petugas terpapar info terbaru Survellans Hepatitis	50 orang (2 kali pertemuan)			
				5. Pengadaan Reagen Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa Reagen Campak	1 Paket	5. Pengadaan Reagen Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa Reagen Campak	1 Paket	6. Pengadaan ADS (Anti Difteri Serum)	1 Paket	6. Pengadaan ADS (Anti Difteri Serum)	1 Paket			

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Usulan/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.02.1.02.01.01.07.008	Pengolahan dan pengeringan Pengayak kegiatan pengendalian penyakit TB	Persentase pengolahan dan pengendalian penyakit	64,44 %	Kulon Progo dengan peserta KTS pada masing-masing lokasi 25 peserta		Kota Yogyakarta	Rp. 393.921.000,00	Kulon Progo dengan peserta KTS pada masing-masing lokasi 25 peserta		DIY	Rp. 389.431.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
				3. Jumlah reagensia yang tersedia untuk pemeriksaan program HIV yaitu rapid 1 HIV (kurang lebih 3500 tes) rapid 2 HIV (kurang lebih 1300 tes), rapid HIV 3 (kurang lebih 1300 tes), reagen siphilis rapid (kurang lebih 40 box), reagen rpr siphilis (kurang le	1 Paket			3. Jumlah reagensia yang tersedia untuk pemeriksaan program HIV yaitu rapid 1 HIV (kurang lebih 3500 tes) rapid 2 HIV (kurang lebih 1300 tes), reagen siphilis rapid (kurang lebih 40 box), reagen rpr siphilis (kurang le	1 Paket				
				4. Jumlah orang yang mengakses paket pemeriksaan viral load bagi ODHA melalui rumah sakit ARV	12 Orang			4. Jumlah orang yang mengakses paket pemeriksaan viral load bagi ODHA melalui rumah sakit ARV	12 Orang				
				5. Kesepakatan hasil jejaring pelayanan HIV pada pertemuan jejaring layanan HIV sebanyak 2 kali pertemuan dengan peserta 45 orang	2 dokumen			5. Kesepakatan hasil jejaring pelayanan HIV pada pertemuan jejaring layanan HIV sebanyak 2 kali pertemuan dengan peserta 45 orang	2 dokumen				
				6. Jumlah formulir tersedia untuk program HIV berupa register ARV, register pra ARV, kartu stok, kartu pasien, formulir PITC, formulir surveilans HIV dengan jumlah kurang lebih 30 pcs	1 Paket			6. Jumlah formulir tersedia untuk program HIV berupa register ARV, register pra ARV, kartu stok, kartu pasien, formulir PITC, formulir surveilans HIV dengan jumlah kurang lebih 30 pcs	1 Paket				
				1. Kesepakatan tatalaksana pengobatan TB dengan kab/kota dan Fasyankes	2 dokumen			1. Kesepakatan tatalaksana pengobatan TB dengan kab/kota dan Fasyankes	2 dokumen				
1.02.1.02.01.01.07.008	Pengolahan dan pengeringan Pengayak kegiatan pengendalian penyakit TB	Persentase pengolahan dan pengendalian penyakit	64,44 %	2. Jumlah peserta terinformasi tentang penanggulangan TB di Kab/Kota dan Fasyankes	50 Orang	Kota Yogyakarta	Rp. 393.921.000,00	2. Jumlah peserta terinformasi tentang penanggulangan TB di Kab/Kota dan Fasyankes	50 Orang	DIY	Rp. 389.431.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
				3. Jumlah slide yang dilakukan cross chek	2000 slide			3. Jumlah slide yang dilakukan cross chek	2000 slide				
				4. Reagensia TB setiap paket terdiri dari 1 botol carbol fuchin, 3 botol alkohol dan 1 botol Methelny Blue	550 PT			4. Reagensia TB setiap paket terdiri dari 1 botol carbol fuchin, 3 botol alkohol dan 1 botol Methelny Blue	550 PT				
				5. Perlengkapan laboratorium terdiri dari sputum pot dan obyek glass	1 PT			5. Perlengkapan laboratorium terdiri dari sputum pot dan obyek glass	1 PT				
				6. Jumlah masker N95	1000 buah			6. Jumlah masker N95	1000 buah				
				7. Susu Protein tinggi	2225 dos			7. Susu Protein tinggi	2225 dos				
1.02.1.02.01.01.07.008	Pengolahan dan pengeringan Pengayak kegiatan pengendalian penyakit TB	Persentase pengolahan dan pengendalian penyakit	64,44 %	8. Program pengendalian Tb terdiri dari cetak format, pencatatan dan pelaporan dan bintek ke kabupaten/kota	2 Paket	Kota Yogyakarta	Rp. 393.921.000,00	8. Program pengendalian Tb terdiri dari cetak format, pencatatan dan pelaporan dan bintek ke kabupaten/kota	2 Paket	DIY	Rp. 389.431.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

434

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				dini FR PJPD				dini FR PJPD						
				6. Konsultasi ke pusat	2 oh			6. Konsultasi ke pusat	2 oh					
				7. Bimbingan teknis untuk survey aktif PJPD	5 kab/kota			7. Bimbingan teknis untuk survey aktif PJPD	5 kab/kota					
1.02.1.02.01.57.012	Peninggalan Penyakit Metabolik	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	1. Desiminasi tradaksina DM;	25 Orang	Kota Yogyakarta	Rp. 250.125.000,00	1. Deseminasi tratalaksana DM;	25 Orang	Daerah istimewa Yogyakarta, kab/kota di DIY	Rp. 249.421.900,00	(-) Rp. 703.100,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Workshop pengembangan program pengendalian DM;	25 Orang			2. Workshop pengembangan program pengendalian DM;	25 Orang					
				3. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam monitoring DM;	25 Orang			3. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam monitoring DM;	25 Orang					
				4. tersedianya peralatan pengendalian DM;	1 Paket			4. tersedianya peralatan pengendalian DM;	1 Paket					
				5. tersedianya bahan kimia pengendalian dan deteksi dini DM;	1 Paket			5. tersedianya bahan kimia pengendalian dan deteksi dini DM;	1 Paket					
				6. konsultasi ke pusat;	2 OH;			6. konsultasi ke pusat;	2 OH;					
				7. bimbingan teknis survey aktif DM;	5 kab/kota;			7. bimbingan teknis survey aktif DM;	5 kab/kota;					
1.02.1.02.01.58	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAPELKES						Rp. 8.631.593.345,00				Rp. 8.631.593.345,00	Rp. 0,00		
1.02.1.02.01.58.001	Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	79 %	1) Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (tersedianya jasa surat menyurat, terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, tersedianya administrasi keua	5 kegiatan	DIY	Rp. 8.631.593.345,00	1) Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (tersedianya jasa surat menyurat, terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, tersedianya jasa administrasi keua	5 kegiatan	DIY	Rp. 8.631.593.345,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total							Rp. 137.558.909.075,00				Rp. 141.828.018.664,00	Rp. 4.269.109.589,00		

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : RS Ghasia													
Kode	Unsur/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Wajib												(15)
1.02	Kesehatan												
1.02.02	RS Ghasia												
1.02.1.02.02.54	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GHASIA						Rp. 19.407.446.000,00				Rp. 29.365.384.112,13	Rp. 9.957.938.112,13	
1.02.1.02.02.54.001	Pelayanan Kesehatan	Persentase penderita Jiwa yang dirawat di RSJ Ghasia	54,87 %	Terlaksananya pelayanan BLUD RSJ Ghasia DIY	1 tahun	Rumah Sakit Ghasia	Rp. 17.453.849.000,00	Terlaksananya pelayanan BLUD RSJ Ghasia DIY	1 tahun	Pakem	Rp. 27.411.787.112,13	Rp. 9.957.938.112,13	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Penambahan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Akreditasi, pembayaran Jasa Pelayanan Tahun 2014, Penambahan Anggaran Obat, Penambahan Honorarium Tenaga CS dan Penambahan Jaringin PABX (Adanya penambahan gedung baru)
1.02.1.02.02.54.002	Pelayanan Kesehatan (DAK)	Persentase penderita Jiwa yang dirawat di RSJ Ghasia	54,87 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa di RS Jiwa Ghasia DIY	1 tahun		Rp. 1.953.597.000,00	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa di RS Jiwa Ghasia DIY	1 tahun	Rumah Sakit Ghasia	Rp. 1.953.597.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total							Rp. 19.407.446.000,00				Rp. 29.365.384.112,13	Rp. 9.957.938.112,13	

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

437

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Indikator Program				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Tokol Urur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.1.03.01.01.012	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Penantrean	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 50.000.000,00		18 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 49.991.200,00	(-) Rp. 8.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.01.015	Pemediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Penantrean	100 %	surat kabar	3 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 19.000.000,00		3 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 19.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Penantrean	100 %	Makanan dan minuman sidang	6771 os	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 74.481.000,00		6771 os	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 74.481.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Penantrean	100 %	Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja	4 kwilansi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 225.000.000,00		4 kwilansi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 7.755.079.910,00				Rp. 7.750.289.490,00	(-) Rp. 4.790.420,00	
1.03.1.03.01.02.003	Rehabilitasi Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan sarana prasarna aparatur	100 %	Unit gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 537.095.060,00		2 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 537.095.060,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan sarana prasarna aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor yang diadakan	8 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 504.250.000,00		8 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 504.249.580,00	(-) Rp. 420,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.008	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan sarana prasarna aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor yang diadakan	11 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 800.000.000,00		11 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 800.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Prosentase pemeliharaan sarana prasarna aparatur	100 %	Mebeleur yang diadakan	17 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 423.820.000,00		17 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 423.820.000,00	(-) Rp. 1.380.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase pemeliharaan sarana prasarna aparatur	100 %	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 586.390.000,00		1 LS	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 586.390.000,00	(-) Rp. 3.610.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan sarana prasarna aparatur	100 %	Gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 549.950.000,00		3 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 549.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		sarana prasana aparatur				Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Energi Sumberdaya Mineral				- Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sarana prasana aparatur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Kendaraan dinas roda 2,4 dan 6 yang dipelihara dan dipersonalisasi serta OP kendaraan/alat berat TPA Pyungan	126 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 4.200.000.000,00		126 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 4.200.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Meubelair yang dipelihara	8 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 30.000.000,00		8 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.038	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Tanaman yang dipelihara	5 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 44.560.000,00		5 jenis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 44.560.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - - Penambahan : -
1.03.1.03.01.02.046	Pengelolaan Naskah Dinas	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Naskah dinas yang dikelola	10000 naskah dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 74.224.850,00		10000 naskah dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 74.224.850,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - - Penambahan : - Penambahan : - Penghasilan Arsip Nasional : - - Penghasilan pendukung pengelolaan naskah dinas sekretariat
1.03.1.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 499.999.875,00					(-) Rp. 19.425,00		
1.03.1.03.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terdapatnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai lebih SKPD	1 nilai B	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 15.000.000,00	Nilai Lebih SKPD	1 nilai B	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 14.990.000,00	(-) Rp. 10.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - - Penambahan : -
1.03.1.03.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terdapatnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Keserjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran	20 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 89.999.875,00	Keserjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran	20 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 89.998.450,00	(-) Rp. 1.425,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - - Penambahan : -
1.03.1.03.01.06.018	Penyusunan Rencana Program/Kegiatan SKPD Serta Pengimbangan Data Dan Informasi	Terdapatnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Renja, ROPK, RKA, DPA, Sistem informasi	1 tahun	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 330.000.000,00	Renja, ROPK, RKA, DPA, Sistem informasi	1 tahun	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 330.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Titik Uur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.1.03.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Terwujudnya penyalutasaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja dan Energi dan Sumberdaya Minera	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Minera	Rp. 65.000.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Minera	Rp. 64.992.000,00	(-) Rp. 8.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG						Rp. 5.347.000.000,00				Rp. 5.333.947.000,00	(-) Rp. 13.053.000,00	
1.03.1.03.01.16.003	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pengurangan jumlah titik gangguan	46,9 %	2.Kawasan wiroabean 450 m 3. Kawasan sambeligi 300 m 4.Kawasan lempuyangan 150 m 5. kawasan mlati 550m	200 KK 259 KK 150 KK 200 KK	Danurejan Kobagele Mlati Umbulharjo	Rp. 5.000.000.000,00	2.kawasan wiroabean 450 m 3. Kawasan sambeligi 300 m 4.kawasan lempuyangan 150 m 5. kawasan mlati 550 m	200 KK 259 KK 150 KK 220 KK	Danurejan Kobagele Mlati Umbulharjo	Rp. 4.986.994.000,00	(-) Rp. 13.046.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.16.008	Pemencanaan Perencanaan gangguan	Pengurangan jumlah titik gangguan	46,9 %	Dokumen DED Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di : 1. Saluran drainase/gorong-gorong di : 1. Kawasan Kobagele 300 m 2. Saluran drainase/gorong-gorong di : 1. Kawasan Kobagele 300 m	1 dokumen 1 dokumen	Dekop Matirjeron Kebagelan Sewon	Rp. 347.000.000,00	Dokumen DED Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di : 1. Saluran drainase/gorong-gorong di : 1. Kawasan Kobagele 300 m 2. Saluran drainase/gorong-gorong di : 1. Kawasan Kobagele 300 m	1 dokumen 1 dokumen	Dekop Matirjeron Kebagelan Sewon	Rp. 346.993.000,00	(-) Rp. 7.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.18	PROGRAM PERENCANAAN/INSPEKSI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN						Rp. 57.509.482.000,00				Rp. 59.224.128.885,00	Rp. 1.714.646.885,00	
1.03.1.03.01.18.010	Rehabilitasi Jalan (Optimalisasi DAK)	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,24 %	-	0 -	-	Rp. 0,00	Rehabilitasi Jalan	1 km	Rus Jalan Provinsi	Rp. 1.714.646.885,00	Rp. 1.714.646.885,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.18.012	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,24 %	Rehabilitasi 12 ruas jalan Provinsi Rehabilitasi Jembatan Provinsi : 1. Jembatan Benangan 2. Jembatan Pakoh	29,61 km 49,5 m ²	Jalan dan jembatan kewenangan provinsi DIY (jemb. bentangan dan Pakoh)	Rp. 46.781.712.975,00	Rehabilitasi 12 ruas jalan Provinsi Rehabilitasi Jembatan Provinsi : 1. Jembatan Benangan 2. Jembatan Pakoh	29,61 km 49,5 m	Jalan dan jembatan kewenangan provinsi DIY	Rp. 46.781.712.975,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.18.013	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,24 %	Pemeliharaan rutin jembatan provinsi Pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi	3708,4 m 573,14 km	Jalan dan jembatan kewenangan provinsi DIY	Rp. 10.727.769.025,00	Pemeliharaan rutin jembatan provinsi Pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi	3708,4 m 573,14 km	Jalan dan jembatan kewenangan provinsi DIY	Rp. 10.727.769.025,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.20	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN						Rp. 578.224.800,00				Rp. 578.224.800,00	Rp. 0,00	
1.03.1.03.01.20.004	Cakupan Jalan dan Jembatan yang diinspeksi		100 %	Terkasuknya inspeksi kondisi jalan pada ruas jalan provinsi	2 Dokumen Laporan Kondisi Jalan dan jembatan	Jalan dan jembatan kewenangan provinsi DIY	Rp. 578.224.800,00	Terkasuknya inspeksi kondisi jalan pada ruas jalan provinsi	2 Dokumen Laporan Kondisi Jalan dan jembatan	Jalan dan jembatan kewenangan provinsi DIY	Rp. 578.224.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.24	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DAN JALAN PENGANTAR LAINNYA						Rp. 29.106.332.640,00				Rp. 31.911.245.413,00	Rp. 2.804.912.773,00	
1.03.1.03.01.24.012	Pengembangan Jaringan Irigasi (Optimalisasi DAK)	Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang layak an irigasi	79,5 %	-	0 -	-	Rp. 0,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	2 Daerah Irigasi	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Rp. 2.808.792.773,00	Rp. 2.808.792.773,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.24.023	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan	Persentase luasan	79,5 %	2. DI. Piyenan 2.887 M	11,5 Ha	Kab. Sleman,	Rp. 10.909.882.640,00	2. DI. Piyenan 2.887 M	11,5 Ha	Kab. Sleman,	Rp. 10.909.882.640,00	Rp. 0,00	Efisiensi

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tokoh Urur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.1.03.01.25.01.0	Penyediaan Air Baku	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	2. Embung Blubuk 3. Embung Kalibuko 4. Embung Selampimoro 5. Embung Jampang	1.03 L/det 1.41 L/det 1.03 L/det 1.16 L/det 1.61 L/det	Berbah ngin Kokap Pegasih	Rp. 24.233.620.000,00	2. Embung Blubuk 3. Embung Kalibuko 4. Embung Selampimoro 5. Embung Jampang	1.03 L/det 1 L/det 1.03 L/det 1.16 L/det 1.61 L/det	Berbah ngin Kokap Pegasih	Rp. 24.233.620.000,00	Reguler APBD	Embung Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.25.01.1	Pengelolaan Air Baku	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Kampanye Pengelolaan SDA Penyusunan N/A dan Bapergab Pengadaan SDA DIY Rapat Kerja Komisi Irigasi DIY Sidang Dewan SDA DIY Terlaksananya pemeliharaan 10 embung/telega, OP 65 pos embung/telega, OP 65 pos hidrologi, pengadaan alat- alat bengkel, pengadaan alat-alat ukur, pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	1 laporan 1 Naskah akademis 1 laporan 1 laporan 9 L/det	Kokap	Rp. 4.800.000.000,00	Kampanye Pengelolaan SDA Pengadaan SDA DIY Rapat Kerja Komisi Irigasi DIY Sidang Dewan SDA DIY Terlaksananya pemeliharaan 10 embung/telega, OP 65 pos embung/telega, OP 65 pos hidrologi, pengadaan alat- alat bengkel, pengadaan alat-alat ukur, pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	1 laporan 1 Naskah akademis 1 laporan 1 laporan 9 L/det	Kokap	(-) Rp. 640.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DATA AIR LAINNYA						Rp. 1.200.000.000,00				Rp. 1.200.000.000,00		
1.03.1.03.01.26.018	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Tanggul Sungai	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Terlaksananya pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai dan pembersihan sungai	42 Titik pemeliharaan sungai	DIY	Rp. 1.200.000.000,00	Terlaksananya pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai dan pembersihan sungai	42 Titik pemeliharaan sungai	DIY	Rp. 1.200.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN BAZIR						Rp. 3.182.220.000,00				Rp. 3.182.220.000,00		
1.03.1.03.01.28.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Tanggul Sungai	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	80 titik	Perluasan Tebing Sungai : 1. S. winongo 100 m 2. S. Gajeng Wong 100 m	2 titik rawan banjir	Tegalrejo Umbulharjo	Rp. 3.182.220.000,00	Perluasan Tebing Sungai : 1. S. winongo 100 m 2. S. Gajeng Wong 100 m	2 titik rawan banjir	Tegalrejo Umbulharjo	Rp. 3.182.220.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.32	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUDIAN						Rp. 3.590.270.000,00				Rp. 3.587.600.000,00 (-)		
1.03.1.03.01.32.001	Pelayanan dan pengembangan kualitas konstruksi	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam laboratorium pengujian	87,5 %	Diperatahkan jumlah parameter terakreditasi Dokumen business plan Terlaksananya Bimbingan Teknis intern dan sistem bidang laboratorium Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas mutu bahan bangunan Tersedianya alat-alat laboratorium penunjang pengujian	34 parameter 1 dokumen 80 Orang 350 LHU 2 Paket	DIY	Rp. 3.590.270.000,00	Diperatahkan jumlah parameter terakreditasi Dokumen business plan Terlaksananya Bimbingan Teknis intern dan sistem bidang laboratorium Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas mutu bahan bangunan Tersedianya alat-alat laboratorium penunjang pengujian	34 parameter 1 dokumen 80 Orang 350 LHU 2 Paket	DIY	Rp. 3.587.600.000,00 (-)	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.36	PROGRAM PENGELOLAAN PESISIRAN						Rp. 10.253.892.400,00				Rp. 13.692.829.400,00	Rp. 3.438.937.000,00	
1.03.1.03.01.36.004	Pengembangan Sorana Prasarana Pesisir	Penertisean penerapan sistem pengelolaan	60 %	2. bronjong 2. Winkerten, Bantul	340 m2 250 m2	Banguntapan Pyungan	Rp. 3.994.450.000,00	2. Winkerten, Bantu bronjong	250 m2 340 m2	Banguntapan Pyungan	Rp. 3.994.450.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Indikator Program				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Tokol Urur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		sampah rumah lingkungan			200 m			saluran	200 m				Penambahan : - Penyusunan Review - Masterplan - Rencana Anggaran - Rencana Optimalisasi - TPA Pyungan sudah dapat dilakukan mulai TA 2016
1.03.1.03.01.36.005	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah rumah lingkungan	60 %	Terbangunnya TPST di: 1. Pyungan, bantul	200 m2			Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana di TPA Pyungan : 1. jalan dan putaran	200 m2				
1.03.1.03.01.36.010	Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional (Sharing Risk/Tab)	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah rumah lingkungan	60 %	Operasi dan Pemeliharaan sanitary landfill, kolam air lindi, jalan dan jembatan timbang, alat kelengkapan, alat-aluberman	1 tahun	Pyungan	Rp. 6.259.442.400,00	Operasi dan Pemeliharaan sanitary landfill, kolam air lindi, jalan dan jembatan timbang, alat kelengkapan, alat-aluberman	1 tahun	Pyungan	Rp. 6.259.442.400,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN												
1.03.1.03.01.37.005	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang layak huni, layak jalan, layak air, layak kesehatan miskin	65 %	BOP Program PNPM/P2KP	12 bulan	Pyungan	Rp. 3.297.000.000,00	Operasionalisasi Tim Teknis Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan TPA Pengabdian Bahan/Material untuk O dan P TPA	1 LS	Pyungan	Rp. 3.438.937.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : O dan P TPA Pyungan dan kawasan kabi/kota
1.03.1.03.01.37.006	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang layak huni, layak jalan, layak air, layak kesehatan miskin	65 %	Tersedianya dokumen identifikasi dan predesain untuk 5 titik lokasi di kawasan Sungai Code	28,14 ha kawasan code	Kawasan Sungai Code	Rp. 447.000.000,00	Tersedianya dokumen identifikasi dan predesain kawasan Sungai Code	1 dokumen	Kawasan Sungai Code	Rp. 446.998.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAN												
1.03.1.03.01.38.003	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang layak huni, layak jalan, layak air, layak kesehatan miskin	51 %	2. Jalan cor blok 30.000 m2	5000 KK	DIY	Rp. 5.050.000.000,00	Terbangunnya infrastruktur kawasan pedesaan: 1. Jalan aspal 15.000 m2	5000 KK	Bantul Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Sleman	Rp. 5.005.550.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.39	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN												
1.03.1.03.01.39.003	Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah	Persentase kesediaan inventarisasi gedung dengan peraturan yang berlaku	84 %	Studi Perencanaan Bangunan Untuk Apertingnan Strategi Daerah Provinsi	15 gedung pemerintah	Inventarisasi dilakukan pada bangunan gedung negara	Rp. 147.600.000,00	Studi Perencanaan Bangunan Untuk Apertingnan Strategi Daerah Provinsi	1 dokumen	Inventarisasi dilakukan pada bangunan gedung negara	Rp. 147.597.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.40	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN												
1.03.1.03.01.40.007	Peningkatan Jalan (DA K)	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi layak	72,24 %	Terleakannya peningkatan jalan provinsi Ruas Jalan Karangmajo - Semu sepanjang 4,01 km	4 km	Kab. Gunungkidul	Rp. 16.093.679.000,00	Terleakannya peningkatan jalan provinsi Ruas Jalan Karangmajo - Semu	4 km	Kab. Gunungkidul	Rp. 16.093.679.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tokik Uur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.1.03.01.40.010	Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Perentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,24 %	Tersesunya Perencanaan Teknis (DEK) Peningkatan Jalan	5 dokumen	Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi	Rp. 640.550.000,00	Tersesunya Perencanaan Teknis (DEK) Peningkatan Jalan	5 dokumen	Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi	Rp. 640.550.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.40.011	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Perentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,24 %	Peningkatan jalan ruas jalan : Siluk-Kretak, Semin-Bulu, Dudukan- Ngantakreja, Standen-Sendangsono	15,6 km	Jalan kewenangan provinsi DIY	Rp. 64.620.880.000,00	Peningkatan jalan ruas jalan : Siluk-Kretak, Semin-Bulu, Dudukan- Ngantakreja, Standen-Sendangsono	15,6 km	Jalan kewenangan provinsi DIY	Rp. 64.620.880.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.42	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM						Rp. 894.395.000,00				Rp. 894.395.000,00		
1.03.1.03.01.42.006	Informasi dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Perentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyediaan pelayanan (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	80 %	Pembuatan Animasi Multimedia Bidang Ke-pu-an dan Pembuatan peraga multimedia bidang sanitasi	2 media sosialisasi		Rp. 297.120.000,00	Pembuatan Animasi Multimedia Bidang Ke-pu-an dan Pembuatan peraga multimedia bidang sanitasi	2 media/jenis	DIY	Rp. 297.120.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.42.007	Facilitas Klinik Konstruksi	Perentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	80 %	Pengajian kualitas bahan baku bangunan, harga satuan bahan bangunan, peningkatan kapasitas dan muatan materi situs, pembuatan sistem informasi situs, peningkatan layanan perputakaan, sosialisasi dan pameran masyarakat melalui klinik k	5125 Orang		Rp. 597.275.000,00	peningkatan kapasitas dan muatan materi situs	1 dokumen	DIY	Rp. 597.275.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
								peningkatan layanan perputakaan	1 laporan				
								pembinaan sistem informasi situs	1 dokumen				
								Pengajian kualitas bahan baku bangunan pada quarry	1 laporan				
								penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-Pu-an	1 laporan				
								penyusunan modul pelatihan sektor permukiman	1 dokumen				
								Sosialisasi/pemberdayaan masyarakat melalui klinik konstruksi	2 angketan				
								survey/ harga satuan bahan bangunan	1 laporan				
1.03.1.03.01.43	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR						Rp. 8.600.000.000,00				Rp. 8.600.000.000,00		
1.03.1.03.01.43.001	Pengadaan Tanah Untuk Jalan Dan Jembatan	Perentase penyediaan bagi kawasan strategis dan kawaan strategis baru	32,85 %	2. ruas jalan Yogyakarta-Imogiri	2500 m2		Rp. 5.000.000.000,00	2. ruas jalan Yogyakarta-Imogiri	2500 m2	Kabupaten Bantul dan Sleman	Rp. 5.000.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan: 1. Jalan Sekeloa Mataram	100 m2			Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan: 1. Jalan Sekeloa Mataram	100 m2				
1.03.1.03.01.43.002	Pengadaan Tanah Untuk Sarpras Keptataan	Perentase penyediaan aksesilitas bagi kawasan strategis dan kawaan strategis baru	32,85 %	Tersedianya lahan untuk SPAM Kartamantul 10.000 m2	1 Paliet		Rp. 3.600.000.000,00	Tersedianya lahan untuk SPAM regional Kartamantul	10000 m2	Plyungan	Rp. 3.600.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.44	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM						Rp. 21.447.080.000,00				Rp. 21.447.055.000,00 (-) Rp. 25.000,00		
1.03.1.03.01.44.001	Perencanaan Pengelolaan SPAM	Perentase penduduk beakases air minum	80,85 %	Tersedianya dokumen Rencana Induk SPAM DIY 1 dokumen	2 SPAM Regional DIY		Rp. 394.990.000,00	Tersedianya dokumen Rencana Induk SPAM DIY	1 dokumen	DIY	(-) Rp. 10.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Uraian /Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.03.1.03.01.45	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
1.03.1.03.01.45.002	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum	80,85 %	1. Tersusunnya Dokumen Andal dan Rencana Kerja (DOKURK) 2. Tersusunnya DED SPAM Kabupaten Pang 3. Tersusunnya rencana kerja dan teknisnya pengadain Pipa Jaringan Distribusi Karantantu	16000 jiwa		Rp. 21.050.080.000,00	1. DEDSPAM Regional Karantantu Sistem Kebangguang	1. dokumen	saluran air minum yang terdapat pada sistem	Rp. 21.050.085.000,00	(-) Rp. 15.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.45	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH						Rp. 10.510.015.000,00					(-) Rp. 1.679.400,00		
1.03.1.03.01.45.001	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Layanan Jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	1. Jaringan Air Limbah Pipa lateral air limbah 1,8 km 2. Jaringan Pipa servis air limbah 2,2 km 3. Penataan lanscape IPAL Sewon 200 m2	1600 SR		Rp. 6.171.280.000,00	1. Jaringan Air Limbah Pipa lateral air limbah	1.8 km	Depok	Rp. 6.171.280.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.45.006	Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah di KPY	Layanan Jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	1. Pemam & Datas Air Limbah Jaringan 2. Pemam & Datas Air Masuk/Keluar IPAL 3. Pemam&Dadas Udara 4. Pemam&Dadas Air Tanah di BataColifirm 5. Pemam&Dadas BataColifirm 6. Pemam&Dadas Unsur Sludge 7. Pemam& Datas Lump.Truck Tangki Tinja	7466 Kali		Rp. 992.400.000,00	1. Pemam & Datas Air Limbah Jaringan 2. Pemam& Datas Air Masuk/Keluar IPAL 3. Pemam&Dadas Udara 4. Pemam&Dadas Air Tanah di BataColifirm 5. Pemam&Dadas BataColifirm 6. Pemam&Dadas Unsur Sludge 7. Pemam& Datas Lump.Truck Tangki Tinja	7466 kali	lingkungan Balai IPAL dan jaringan perpipaan	Rp. 992.400.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.45.008	Pengolahan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	Layanan Jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	AMDAL Bagi IPAL Naskah Akademis Bertribus Lumpur Tinja dan Sempah	3 laporan		Rp. 3.346.335.000,00	Rehabilitasi/penelbarasan Sarana dan Prasarana Air Limbah	234 km	DIT	Rp. 3.344.655.400,00	(-) Rp. 1.679.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				OP IPAL : 1. O&P Lift Pump 2. O&P Instalasi Pengolahan Air Limbah 3. O&P Instalasi Pengolahan Air Limbah 4. O&P Instalasi Pengolahan Air Limbah 5. O&P Instalasi Pengolahan Air Limbah 6. O&P Instalasi Pengolahan Air Limbah 7. Pemel Pinda Air / Sucee Gate dan Gate Valve 8. O&P S&P 3. OA	68 unit			Terkelaksananya pendampingan Program USRT	1 laporan					
				Pemeliharaan Sistem Jaringan : 1. Pemel / Pemtesahan Siphon Air Limbah 2. Pemel / Pemtesahan Siphon Air Limbah 3. Pemel / Pemtesahan Siphon Air Limbah 4. Pemel / Pemtesahan Jar. Saluran Pipa Induk, Lateral dan Glontor 4. Walk Through Jar. Air Limbah	234 km			Terkelaksananya perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah	68 unit					
				Terkelaksananya pendampingan Program USRT	1 kegiatan			Tersusunnya AMDAL Balai IPAL Naskah Akademis Bertribus Lumpur Tinja dan Sempah , penataan dan pengukuran jaringan air limbah	3 laporan					
1.03.1.03.01.46	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN, MIMPOLITAN DAN DESA POTENSI						Rp. 4.000.000.000,00					(-) Rp. 13.340.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.46.001	Pengembangan Desa Puiat Pertumbuhan	Dukungn infrastruktur kawasan agropolitan, mimpolitan, dan desa potensi	46 %	tersedianya infrastruktur jalan kawasan agropolitan naggulan dan kalibawang kab.kulonprogo 6000 m2	1000 KK		Rp. 4.000.000.000,00	tersedianya infrastruktur jalan kawasan agropolitan naggulan dan kalibawang kab.kulonprogo	6000 m2	Kalibawang Nanggulan	Rp. 3.986.660.000,00	(-) Rp. 13.340.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.03.1.03.01.47	PROGRAM PEMBIINAAN JASA KONSTRUKSI						Rp. 948.310.000,00					Rp. 0,00		

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Indikator Program				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.03.1.03.01.47.007	Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	80,5 %	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Jasa Konstruksi	1 laporan		Rp. 448.360.000,00	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Jasa Konstruksi	1 laporan	dly	Rp. 148.360.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1 laporan			Terlaksananya pengawasan penatrafan jasa konstruksi	1 laporan				
1.03.1.03.01.47.013	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	80,5 %	Terlaksananya fasilitasi lomba tenaga kerja konstruksi tingkat provinsi dan nasional	2 event		Rp. 799.950.000,00	Terlaksananya fasilitasi lomba tenaga kerja konstruksi tingkat provinsi dan nasional	2 event	DIT	Rp. 799.950.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Tercapainya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yg terkait	180 Orang			Tercapainya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yg terkait	180 Orang				
				Terselenggaranya pelatihan konstruksi di daerah kantong tenaga kerja	1 angkatan			Terselenggaranya pelatihan konstruksi di daerah kantong tenaga kerja	1 angkatan				
				Terselenggaranya pembinaan teknis bagi pengguna jasa konstruksi	2 kali			Terselenggaranya pembinaan teknis bagi pengguna jasa konstruksi	2 kali				
				Terselenggaranya Grand Desain Pembinaan konstruksi secara terpadu dan terintegrasi Kabupaten Kolombangan LPJK	2 dok			Terselenggaranya Grand Desain Pembinaan konstruksi secara terpadu dan terintegrasi Kabupaten Kolombangan LPJK	2 dok				
				Terselenggaranya rekomendasi pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi di daerah	1 laporan			Terselenggaranya rekomendasi pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi di daerah	1 laporan				
1.04	Perumahan												
1.04.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM												
1.04.1.03.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						Rp. 4.763.780.000,00				Rp. 4.056.052.000,00 (-)	Rp. 107.728.000,00	
1.04.1.03.01.15.001	Penyusunan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	Terselenggaranya Pemetaan Kawasan Pemukiman dan Perumahan	1 dokumen		Rp. 592.980.000,00	Terselenggaranya Pemetaan Kawasan Pemukiman dan Perumahan	1 dokumen	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 592.980.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Terselenggaranya analisis land banking perumahan formal/ruas	1 dokumen			Terselenggaranya analisis land banking perumahan formal/ruas	1 dokumen				
1.04.1.03.01.15.003	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	Terselenggaranya draft Raporda RP3KP MBR	1 dokumen		Rp. 170.800.000,00	Koordinasi FIPP dan perumahan MBR	1 laporan	dly	Rp. 159.880.000,00	(-) Rp. 10.920.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Koordinasi penangan kawasan kumuh	1 laporan			Koordinasi penangan kawasan kumuh	1 laporan				
				Koordinasi penangan RTLH	1 laporan			Koordinasi penangan RTLH	1 laporan				
				Koordinasi penyelenggaraan PSU permukiman	1 laporan			Koordinasi penyelenggaraan PSU permukiman	1 laporan				
1.04.1.03.01.15.014	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	1. Terlaksananya bantuan stimulan bahan bangunan untuk perbaikan rumah tidak layak huni 2. Pendampingan bantuan stimulan bahan bangunan	350 rumah		Rp. 4.000.000.000,00	1. Terlaksananya bantuan stimulan bahan bangunan untuk perbaikan rumah tidak layak huni 2. Pendampingan bantuan stimulan bahan bangunan	350 rumah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 3.903.192.000,00	(-) Rp. 96.808.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.04.1.03.01.17	PROGRAM PEMERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN						Rp. 2.538.905.000,00				Rp. 2.522.815.000,00 (-)	Rp. 16.090.000,00	
1.04.1.03.01.17.003	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	Persentase program pembangunan berbasis komunitas	54 %	Terfasilitasinya 16 komunitas d 25 lokasi	30 Desa		Rp. 2.500.000.000,00	Terfasilitasinya 16 komunitas i	25 lokasi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.04.1.03.01.17.008	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan tentang Pembangunan Perumahan	Persentase program pembangunan berbasis komunitas	54 %	Terlaksananya koordinasi capaian kinerja PKP	1 laporan		Rp. 38.905.000,00	Terlaksananya koordinasi capaian kinerja PKP	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 22.815.000,00	(-) Rp. 16.090.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Titik Uur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												(15)
												Penambahan : -
1.04.1.03.01.22	PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH						Rp. 4.453.250.000,00				Rp. 4.453.249.000,00	(-) Rp. 1.000,00
1.04.1.03.01.22.001	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan difokuskan wilayah kecamatan miskin	40 %	Terlaksananya peningkatan sarana dan utilitas umu (PSU) kawasan kumuh pada 15 lokasi di DIY	35 Ha		Rp. 4.453.250.000,00	Terlaksananya peningkatan sarana, sarana dan utilitas umu (PSU) kawasan kumuh	15 lokasi	Kawasan Kumuh di DIY	Rp. 4.453.249.000,00	(-) Rp. 1.000,00
												Penambahan : -
1.05	Penataan Ruang											
1.05.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											
1.05.1.03.01.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG						Rp. 398.643.000,00				Rp. 390.643.000,00	(-) Rp. 8.000.000,00
1.05.1.03.01.15.001	Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan kawasan penataan ruang pada kawasan strategis provinsi	16	1. Tersedianya MA, Matak dan Draft Raperda RTR Kawasan Koridor Tempel - Parangtritis 2. Tersedianya MA, Matak dan Draft Raperda RTR Kawasan Ekopowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul roadmap	3 dokumen 3 dokumen		Rp. 398.643.000,00	2. Tersedianya MA, Matak dan Draft Raperda RTR Kawasan Ekopowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul roadmap 1. Tersedianya MA, Matak dan Draft Raperda RTR Kawasan Koridor Tempel - Parangtritis	3 dokumen 3 dokumen	Kawasan Koridor Tempel - Parangtritis dan Kawasan Ekopowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul	Rp. 390.643.000,00	(-) Rp. 8.000.000,00
												Penambahan : -
1.05.1.03.01.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG						Rp. 400.000.000,00				Rp. 398.500.000,00	(-) Rp. 1.500.000,00
1.05.1.03.01.16.012	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pemanfaatan terhadap RTRW kab/kot dan RTRW Provinsi	70 %	1. Rapergub Sempadan Pantai 2. draft Rapergub NSPK Permodalan Daya Dukung dan Daya Tampung Keuangan Kawasan Strategis Ekonomi 3. Draft Rapergub tentang kawasan perbatasan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		Rp. 200.000.000,00	1. Rapergub Sempadan Pantai 2. draft Rapergub NSPK Permodalan Daya Dukung dan Daya Tampung Keuangan Kawasan Strategis Ekonomi 3. Draft Rapergub tentang kawasan perbatasan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	DIY	Rp. 199.200.000,00	(-) Rp. 800.000,00
												Penambahan : -
1.05.1.03.01.16.013	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/kot dan RTRW Provinsi	70 %	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota Kajian instrumen pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah propinsi	1 laporan 1 dokumen 1 dokumen		Rp. 200.000.000,00	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota Kajian instrumen pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah propinsi	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	DIY	Rp. 199.200.000,00	(-) Rp. 700.000,00
												Penambahan : -
1.05.1.03.01.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG						Rp. 300.913.000,00				Rp. 300.913.000,00	Rp. 0,00
1.05.1.03.01.17.001	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan lindung kawasan lindung bawahan	60 %	Draft Rapergub Road Map Pengendalian Pemanfaatan ruang di DIY FGD Tersusunya data kajian pemanfaatan ruang kawasan lindung kabupaten/kota dan resapan air di kec.Pongring Kab.Gunungkidul	1 dokumen 5 Angkasan 1 dokumen		Rp. 219.639.000,00	Draft Rapergub Road Map Pengendalian Pemanfaatan ruang di DIY FGD Tersusunya data kajian pemanfaatan ruang kawasan lindung kabupaten/kota dan resapan air di kec.Pongring Kab.Gunungkidul	1 dokumen 5 anglatan 1 dokumen	DIY	Rp. 219.639.000,00	Rp. 0,00
												Penambahan : -
1.05.1.03.01.17.011	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan lindung kawasan lindung bawahan	60 %	Uji publik Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Terlaksananya workshop koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota	2 Angkasan 1 anglatan 2 Angkasan		Rp. 81.274.000,00	Uji publik Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Terlaksananya workshop koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota	2 anglatan 1 anglatan 2 anglatan	DIY	Rp. 81.274.000,00	Rp. 0,00
												Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Titik Ujur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				(PLTMH, PLTS, Biogas) 14 unit 3. Pembangunan Supras DME 50 unit biogas									Penambahan : -
2.03.1.03.01.25.008	Pembinaan dan Pengawasan Diversifikasi Energi	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117,95 (000 SBM)	Terlaksananya kajian pengembangan Waste to Energy Terlaksananya updating SI pengembangan dan pemanfaatan EBT Terlaksananya pembentukan Tim Teknis Energi Daerah	5 kab / kota		Rp. 546.760.000,00	Terlaksananya kajian pengembangan Waste to Energy Terlaksananya updating SI pengembangan dan pemanfaatan EBT Terlaksananya pembentukan Tim Teknis Energi Daerah	5 kab / kota	DIY	Rp. 546.760.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.03.1.03.01.25.009	Pemenuhan Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117,95 (000 SBM)	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja EBT Terlaksananya Penyusunan Materi Teknis dan Nasakh Akademis RaPerda/RaPerqub EBT	16 lembaga			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja EBT Terlaksananya Penyusunan Materi Teknis dan Nasakh Akademis RaPerda/RaPerqub EBT	16 lembaga				
2.03.1.03.01.26.003	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGALAMAN, PENGANTARAN, PENGANTARAN AIR TANAH	Rendita penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	1. Terlaksananya pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam 2 unit 2. Terlaksananya pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam 3 unit	5 buah sumur/50 Ha		Rp. 596.940.000,00	1. Terlaksananya pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam 2 unit 2. Terlaksananya pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam 3 unit	5 buah sumur/50 Ha	Jatis Kalasan Naglik Karangmoyo Ngajuran Pegangharjo Sempor Sleman	Rp. 596.940.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.03.1.03.01.26.002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah	Rendita penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	Pembangunan sumur bor air tanah dalam 8 kali Terlaksananya optimalisasi pemeliharaan sumur bor air tanah di daerah salit air 5 unit	6,64 L/det		Rp. 3.389.830.000,00	Pembangunan sumur bor air tanah dalam 8 kali Terlaksananya optimalisasi pemeliharaan sumur bor air tanah di daerah salit air 5 unit	6,64 L/det	Godan Karangmoyo Ngajuran Pegangharjo Sempor Wonorejo	Rp. 3.389.830.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.03.1.03.01.26.003	Pengendalian daya rusak Air Tanah	Rendita penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	Terlaksananya penyusunan desain dan pengendalian lahan air tanah dalam 1 laporan Terlaksananya perencanaan pembuatan sumur resapan 1 dokumen, pengawasan pembuatan sumur resapan 1 dokumen, pembuatan sumur resapan 300 unit	20 % dari total luas lahan air tanah		Rp. 995.500.000,00	Terlaksananya penyusunan desain dan pengendalian lahan air tanah dalam 1 laporan Terlaksananya perencanaan pembuatan sumur resapan 1 dokumen, pengawasan pembuatan sumur resapan 300 unit	20 % dari total luas lahan air tanah	Kec.Kligihar, Kec.Klaten, Kec.Pemut, Kec.Piyungan, Kec.Pilangri, Kec.Karangmoyo, Kec.Klaten, Kec.Turi, Kec.Sleman, Kec.Ngemplak, CAT Yk-Slg	Rp. 995.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.03.1.03.01.26.004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Rendita penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	Pengadaan alat flow meter 1 unit; pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah 1 laporan Terlaksananya workshop pengendalian pengambilan air tanah 3 kali; kajian review penyusunan jaringn sumur pantau 1 dokumen	5 kab/kota		Rp. 298.560.000,00	Pengadaan alat flow meter 1 unit; pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah 1 laporan Terlaksananya workshop pengendalian pengambilan air tanah 3 kali; kajian review penyusunan jaringn sumur pantau 1 dokumen	5 kab/kota	CAT Yogyakarta-Sleman	Rp. 298.560.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.03.1.03.01.26.006	Perencanaan Pengkajian Air Tanah	Rendita penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	Tersusunnya hasil kajian NPA dari penggunaan air tanah di CAT, Yogyakarta-Sleman 1 dokumen, kajian NPA dari penggunaan air tanah di CAT wates 1 dokumen, kajian NPA dari penggunaan air tanah di CAT Wonorejo 1 dokumen	3 CAT		Rp. 694.240.000,00	Tersusunnya hasil kajian NPA dari penggunaan air tanah di CAT, Yogyakarta-Sleman 1 dokumen, kajian NPA dari penggunaan air tanah di CAT wates 1 dokumen, kajian NPA dari penggunaan air tanah di CAT Wonorejo 1 dokumen	3 CAT	Bantul, Gunungkidul, Sleman	Rp. 694.240.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Tersusunnya SID pembangunan sumur bor air tanah dalam 1 dokumen	8 lokasi			Tersusunnya SID pembangunan sumur bor air tanah dalam 1 dokumen	8 lokasi				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Indikator Program				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.03.1.03.01.27	PROGRAM PEMBIYANAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI						Rp. 1.164.510.000,00				Rp. 1.164.510.000,00	Rp. 0,00	
2.03.1.03.01.27.001	Pencapaian Pelaksanaan Konservasi Energi	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	9 %	1. Tersusunnya Materi teknis strategi penurunan elastisitas energi DIY 1 dokumen 2. Terlaksananya workshop konservasi energi 8 kali 3. Terlaksananya penitudaan sarana publik hemat energi 1 paket	10 % potensi konservasi energi		Rp. 676.760.000,00	1. Tersusunnya Materi teknis strategi penurunan elastisitas energi DIY 1 dokumen 2. Terlaksananya workshop konservasi energi 8 kali 3. Terlaksananya penitudaan sarana publik hemat energi 1 paket	10 % potensi konservasi energi	DIY	Rp. 676.760.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.03.1.03.01.27.002	Pelaksanaan Audit Energi	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	9 %	1. Terlaksananya Audit Energi di 10 gedung 2. Terlaksananya workshop penurunan elastisitas energi DIY 1 dokumen 3. Terlaksananya Lomba Hemat Energi 1 event	6 % peningkatan pelaksanaan konservasi energi		Rp. 487.750.000,00	1. Terlaksananya Audit Energi di 10 gedung 2. Terlaksananya workshop penurunan elastisitas energi DIY 1 dokumen 3. Terlaksananya Lomba Hemat Energi 1 event	6 % peningkatan pelaksanaan konservasi energi	DIY	Rp. 487.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.03.1.03.01.28	PROGRAM PEMBIYANAN, PENGAWASAN USAHA PERTAMBAHAN						Rp. 148.560.000,00				Rp. 148.560.000,00	Rp. 0,00	
2.03.1.03.01.28.003	Berbiyasan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Pertambahan	Pencapaian kinerja pengelabian usaha pertambahan	11 %	Tersusunnya Grand Desain pelaksanaan pengelabian pertambahan 1 dokumen	1 pedoman teknis		Rp. 148.560.000,00	Tersusunnya Grand Desain pelaksanaan pengelabian pertambahan 1 dokumen	1 pedoman teknis	DIY	Rp. 148.560.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total							Rp. 321.491.918.725,00				Rp. 329.386.060.538,00	Rp. 7.794.141.813,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
Kode	Unsur / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											(15)
1.06	Perencanaan Pembangunan											
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 1.682.796.200,00				Rp. 1.525.145.200,00 (-)	Rp. 157.651.000,00
1.06.1.06.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.Surat keluar 2. Surat masuk 3. Pengiriman dokumen	2500 surat 4500 surat 200 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 10.500.000,00	1. Surat keluar 2. Surat masuk 3. Pengiriman dokumen	2400 surat 4500 surat 200 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 10.500.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Servis, Pengisian Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembayaran tagihan rekening Air dan Listrik sambungan 2. Pembayaran tagihan rekening Listrik 118-400 kWh	12 bulan 12 bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 386.000.000,00	1. Pembayaran tagihan rekening Air dan Listrik sambungan 2. Pembayaran tagihan rekening Listrik 118-400 kWh	12 bulan 12 bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 386.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	30 unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 12.400.000,00	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	30 unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 12.400.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.007	Penyediaan Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.Bukti Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan 2. Bukti Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan	12 bulan 12 bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 34.321.900,00	1.Bukti Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan 2. Bukti Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan	12 bulan 12 bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 34.321.900,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY	69468 m2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 65.689.200,00	Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY	69468 m2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 65.689.200,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	101 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 46.878.100,00	Alat Tulis Kantor	101 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 46.878.100,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang Cetak 2. Penggandaan Surat-surat-Dokumen Lainnya	15 unit 102.704 lembar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 35.000.000,00	1. Barang Cetak 2. Penggandaan Surat-surat-Dokumen Lainnya	15 unit 102.704 lembar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 35.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 9.700.000,00	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 9.700.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.014	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	19 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 10.000.000,00	Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	19 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 10.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.06.1.06.01.01.015	Penyediaan Bahan Makanan dan Perlengkapan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Kabar 2. Buku Peraturan Perundang-Undangan	6 jenis 1 Paket	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 11.200.000,00	Pembersih 1. Surat Kabar 2. Buku Peraturan Perundang-Undangan	6 jenis 1 Paket	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 11.200.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makan dan minum sdang	6600 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 89.947.000,00	Makan dan minum sdang	6600 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 72.600.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	DIY dan Luar DIY	Rp. 911.160.000,00	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	DIY dan Luar DIY	Rp. 770.856.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.01.029	Pengalangan Arsip Dinamis	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Penataan arsip 2. Peilaian untuk penyusatan arsip	20 meter 3356 Berkas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 60.000.000,00	1. Penataan arsip 2. Peilaian untuk penyusatan arsip	20 meter 3356 Berkas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 60.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 1.432.415.000,00				Rp. 1.340.415.000,00		
1.06.1.06.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Roda 4 (empat)	3 unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 592.105.000,00		3 unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 592.105.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor: Alir Conditioner Split (11 unit) Sound System (1 paket)	2 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 200.000.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor: Alir Conditioner Split (11 unit) Sound System (1 paket)	2 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 190.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor: Televisi (7 unit) Komputer PC (4 unit) Komputer Note Book (2 unit) Printer (Handy Talky) (7 unit)	5 Jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 150.000.000,00	Peralatan Gedung Kantor: Televisi (7 unit) Komputer PC (4 unit) Komputer Note Book (2 unit) Printer (Handy Talky) (7 unit)	5 Jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 150.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung kantor terpelihara (inding, atap, lantai dan sanitasi)	4 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 70.870.000,00	Gedung kantor terpelihara (inding, atap, lantai dan sanitasi)	4 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 70.870.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara : Roda 2 (12 unit) Roda 2 (12 unit)	2 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 332.000.000,00	Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara : Roda 2 (12 unit) Roda 2 (12 unit)	2 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 250.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi kegiatan Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	Prosentase penyediaan dan	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara : AC Split	7 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan	Rp. 39.040.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara : AC Split	7 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan	Rp. 39.040.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Gedung Kantor	pemeliharaan sarana prasarana aparatur		(54 unit) AC Floor Standing (4 unit) Almari besi (20 buah) Filing Cabinet (20 buah) Tabung Pemadam Kebakaran (7 buah) Speaker (7 buah) Sistem (2 unit) Generator set (1 unit)	8 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 48.400.000,00	Perakitan Gedung Kantor yang Terdiri dari : Jaringan Komputer & Internet (1 paket) Komputer PC (60 unit) Komputer Note Book (16 unit) Printer (30 unit) Mesin TIK Manual (15 unit) Proyektor (2 unit) Kamera (2 unit) Kamera (1 unit)	8 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 48.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.02.028	Pemeliharaan Gedung Perakitan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %										
1.06.1.06.01.05	PROGRAM PENGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Pendidikan dan Pelatihan Formal					Rp. 370.000.000,00				Rp. 318.180.000,00 (-)		
1.06.1.06.01.05.001	Peningkatan Kapasitas Aparat	Terdwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %		49 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 100.000.000,00	1. Kursus Web Design, 2. Kursus Penjenjangan Pejabat Fungsional Tertentu, 3. Kursus Akademi Pengkaderan, 4. Kursus Keangpan, 5. Kursus Manev Program/Kegiatan, 6. Kursus PBJ & Sertifikasi, 7. Kursus Aplikasi Jaringan Komp. 8. Kursus Komputer	49 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 70.600.000,00 (-) Rp. 29.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparat	Terdwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %		118 Pegawai BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 95.000.000,00	Pelatihan motivasi kerja untuk pegawai Bappeda DIY	118 Pegawai BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 72.580.000,00 (-) Rp. 22.420.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.05.072	Peningkatan Fungsional Jabatan Tertentu	Terdwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %		2 kali	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 175.000.000,00	2. Workshop Pejabat Fungsional Perencana	2 kali	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 175.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					1 kali			3. Ekspose Hasil Penelitian Pejabat Fungsional Perencana	1 kali				
					1 kali			4. Rapat Kerja Aeosiasi Pejabat Fungsional Perencana se DIY	1 kali				
					1 kali			5. Penerbitan Jurnal	1 kali				
					17 Orang			1. Penilaian Pejabat Fungsional Perencana	17 Orang				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
Kode	Usuran/Program / kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan		
			Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja				Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.06.1.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 522.010.950,00				Rp. 492.085.950,00	(-) Rp. 29.925.000,00	
1.06.1.06.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penatubiasaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai LAQIP SKPD	1 Nilai dari B (Tahun 2013) menjadi A (Tahun 2014)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 8.426.400,00	Nilai LAQIP SKPD	1 Nilai dari B (Tahun 2013) menjadi A (Tahun 2014)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 8.426.400,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatubiasaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran Bappeda	1 Penurunan revisi kegiatan dari 41% (Tahun 2014) menjadi 25% (Tahun 2015)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 22.287.850,00	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran Bappeda	1 Penurunan revisi kegiatan dari 41% (Tahun 2014) menjadi 25% (Tahun 2015)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 22.287.850,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya penatubiasaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan : 1. Rencana Kerja (2 dok) 2. RKPD (2 dok) 3. RKJ (2 dok) 4. DPA Bappeda (2 dok) Pengelolaan Sistem Informasi dan Jaringan Internet : 1. update website bappeda (1 website) 2. Sistem Pengelolaan Jaringan Internet Bappeda (1 sistem)	1 tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 466.500.000,00	Dokumen perencanaan : 1. Rencana Kerja (2 dok) 2. RKPD (2 dok) 3. RKJ (2 dok) 4. DPA Bappeda (2 dok) Pengelolaan Sistem Informasi dan Jaringan Internet : 1. update website bappeda (1 website) 2. Sistem Pengelolaan Jaringan Internet Bappeda (1 sistem)	1 tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 436.575.000,00	(-) Rp. 29.925.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatubiasaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan APBD Tahun 2015	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 24.796.700,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan APBD Tahun 2015	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 24.796.700,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						Rp. 2.016.358.000,00				Rp. 2.192.018.000,00	Rp. 175.660.000,00	
1.06.1.06.01.21.008	Penyusunan Rancangan RMPD	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan	17,04 %	1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (1 dokumen) 2. Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016	17 target sasaran	DIY	Rp. 1.170.460.000,00	1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (1 dokumen) 2. Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016	17 target sasaran	DIY	Rp. 1.199.410.000,00	Rp. 28.950.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : Tambahkan update Aplikasi Jejaringan Berbasis Spasial

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.06.1.06.01.21.030	Penyusunan KUA dan PPAS	realisasi tahunan		(1 dokumen) 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2015 (1 dokumen)	17 target sasaran	DIY	Rp. 369.295.000,00	1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon (PPAS) (1 dokumen)	17 target sasaran	DIY	Rp. 369.295.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.21.033	Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17,04 %	1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon (PPAS) (1 dokumen) 2. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) (1 dokumen)	17 target sasaran	DIY	Rp. 476.603.000,00	1. Musrenbang Regional 2. Musrenbang Nasional	1. Dokumen Deklarasi Gubernur se Jawa Bali 1. Dokumen Berita Acara Kesiapan Program/Kegiatan Trilateral Desk	DIY	Rp. 461.723.000,00	(-) Rp. 14.880.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.21.068	Review RPJMD DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17,04 %	-	0 -	DIY	Rp. 0,00	Dokumen Perubahan RPJMD DIY	1 dokumen	DIY	Rp. 161.590.000,00	Rp. 161.590.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : Usulan kegiatan baru untuk mengakomodir Perubahan RPJMD DIY 2012-2017
1.06.1.06.01.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN						Rp. 1.836.443.400,00				Rp. 1.811.621.400,00	(-) Rp. 24.822.000,00		
1.06.1.06.01.22.059	Perencanaan Pembangunan Subid Pertanian & Kelautan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4,06 %	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian & Kelautan (1 dokumen)	13 target sasaran	DIY	Rp. 687.070.600,00	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian & Kelautan (1 dokumen)	13 target sasaran	DIY	Rp. 676.010.600,00	(-) Rp. 11.060.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.22.060	Perencanaan Pembangunan Subbidang Dunia Usaha	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4,06 %	Perencanaan Dunia Usaha (1 Dokumen)	10 target sasaran	DIY	Rp. 814.489.800,00	Perencanaan Dunia Usaha (1 Dokumen)	10 target sasaran	DIY	Rp. 807.608.800,00	(-) Rp. 6.881.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN

TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.06.1.06.01.22.061	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Peternakan dan Kelautan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perikanan	4,05 %	Sinkronisasi Program unggulan / isu strategis (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/isu strategis	DIY	Rp. 206.068.000,00	Sinkronisasi Program unggulan / isu strategis (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/isu strategis	DIY	Rp. 199.187.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.22.062	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Dunia Usaha	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perikanan	4,05 %	Sinkronisasi Program unggulan / isu strategis (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/isu strategis	DIY	Rp. 128.815.000,00	Sinkronisasi Program unggulan / isu strategis (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/isu strategis	DIY	Rp. 128.815.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.23	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA						Rp. 1.296.119.700,00				Rp. 1.304.055.700,00		
1.06.1.06.01.23.041	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10,55 %	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM (1 dokumen)	20 target sasaran	DIY	Rp. 380.162.000,00	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM (1 dokumen)	20 target sasaran	DIY	Rp. 356.350.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.23.042	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10,55 %	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra (1 dokumen)	22 target sasaran	DIY	Rp. 301.496.000,00	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra (1 dokumen)	22 target sasaran	DIY	Rp. 301.496.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.23.043	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10,55 %	Sinkronisasi Program unggulan / isu strategis (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/isu strategis	DIY	Rp. 150.505.000,00	Sinkronisasi Program unggulan / isu strategis (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/isu strategis	DIY	Rp. 150.505.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.23.044	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran	10,55 %	1. Sinkronisasi Program/Kegiatan Sub Bidang Kesra (1 Laporan)	1.1 Laporan Program unggulan/isu strategis	DIY	Rp. 463.956.700,00	1. Sinkronisasi Program/Kegiatan Sub Bidang Kesra (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/isu strategis	DIY	Rp. 495.704.700,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : Tambah Aplikasi Program Perangulangan Kemiskinan

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Uraian/Program / Kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
			Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Kesra	rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya		2. Sinkronisasi Program/Kegiatan Peninggugihan Kemiskinan (1 Laporan)	1 Laporan Pencapaian penurunan target kemiskinan			2. Sinkronisasi Program/Kegiatan Penangguhan Kemiskinan (1 Laporan)	1 Laporan Pencapaian penurunan target kemiskinan					
				3. Sinkronisasi Program/Kegiatan Percepatan Pencapaian Target MDGs (1 Laporan)	1 Laporan Pencapaian target yang sesuai dengan RAD MDGs DIY			3. Sinkronisasi Program/Kegiatan Percepatan Pencapaian Target MDGs (1 Laporan)	1 Laporan Pencapaian target yang sesuai dengan RAD MDGs DIY					
1.06.1.06.01.26	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA						Rp. 1.761.538.600,00					Rp. 1.724.598.200,00	(-) Rp. 36.940.400,00	
1.06.1.06.01.26.001	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman dan ESDM	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1,62 %	Perencanaan pembangunan Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman dan ESDM (1 dokumen)	41 indikator	DIY	Rp. 582.557.500,00	Perencanaan pembangunan Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman dan ESDM (1 dokumen)	41 indikator	DIY	Rp. 556.517.500,00	(-) Rp. 26.040.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.26.002	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1,62 %	Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (1 Dokumen)	9 indikator	DIY	Rp. 368.240.000,00	Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (1 Dokumen)	9 indikator	DIY	Rp. 368.240.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.26.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman dan ESDM	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1,62 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (1 laporan)	1 Laporan Program Unggulan/Isu strategis	DIY	Rp. 487.217.200,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (1 laporan)	1 Laporan Program Unggulan/Isu strategis	DIY	Rp. 487.217.200,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.26.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1,62 %	Sinkronisasi Program unggulan / Isu strategis Sektor Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/Isu strategis	DIY	Rp. 104.160.000,00	Sinkronisasi Program unggulan / Isu strategis Sektor Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup (1 Laporan)	1 Laporan Program unggulan/Isu strategis	DIY	Rp. 98.040.000,00	(-) Rp. 6.120.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.26.008	Peningkatan dan Sinkronisasi Sektor Sumberdaya Air	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1,62 %	1. Penguatan TPM/KTPM (2 orang)	2 klasi	DIY	Rp. 101.028.400,00	1. Penguatan TPM/KTPM (2 orang)	2 klasi	DIY	Rp. 96.248.000,00	(-) Rp. 4.780.400,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
Kode	Usuran/Program / kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
			Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif			Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Wilayah Sungai dan rencana jangka Pratisipatif Pengelolaan Irigasi (WISHP) - Loan	sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana		2. Pelatihan TPM/KTPM (40 orang)	8 materi			2. Pelatihan TPM/KTPM (40 orang)	8 materi				
1.06.1.06.01.26.009	Peningkatan Pengabdian Irigasi Pratisipatif dan Pengelolaan Irigasi Pratisipatif (WISHP)-APBD	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1.62 %	1. Operasionalisasi PPMU DIY (12 bulan)	1 Koordinasi dan Pelaksanaan WISHP 2 di DIY di 3 PPMU dan 4 KPMU	DIY	Rp. 118.335.500,00	1. Operasionalisasi PPMU DIY (12 bulan)	1 Koordinasi dan Pelaksanaan WISHP 2 di DIY di 3 PPMU dan 4 KPMU	DIY	Rp. 118.335.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.27	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN			2. Identifikasi Kelengkapan Pengelola Irigasi Partisipatif (1 dokumen)	1 Data Kelengkapan Pengelola Irigasi Partisipatif di 11 DI Kespelatan		Rp. 1.722.183.600,00	2. Identifikasi Kelengkapan Pengelola Irigasi Partisipatif (1 dokumen)	1 Data Kelengkapan Pengelola Irigasi Partisipatif di 11 DI Kespelatan		Rp. 1.668.143.600,00	(-) Rp. 54.040.000,00	
1.06.1.06.01.27.001	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur, Hukum, Politik dan Kebencanaan (1 dokumen)	20 target sasaran	DIY	Rp. 400.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur, Hukum, Politik dan Kebencanaan (1 dokumen)	20 target sasaran	DIY	Rp. 394.050.000,00	(-) Rp. 15.950.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.27.002	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	1. Perencanaan Pembangunan Sektor Administrasi Publik dan Keuangan (1 dokumen)	8 indikator	DIY	Rp. 607.276.000,00	1. Perencanaan Pembangunan Sektor Administrasi Publik dan Keuangan (1 dokumen)	8 indikator	DIY	Rp. 593.776.000,00	(-) Rp. 13.500.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.27.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Subbidang Aparatur, Hukum dan Politik	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (4 Laporan)	4 sektor	DIY	Rp. 540.870.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (4 Laporan)	4 sektor	DIY	Rp. 516.280.000,00	(-) Rp. 24.590.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.27.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (1 laporan)	1 Laporan	DIY	Rp. 174.037.600,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (1 laporan)	1 Laporan	DIY	Rp. 174.037.600,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
		realisasi tahunan di bidang pemerintahan												
1.06.1.06.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH						Rp. 1.979.273.050,00				Rp. 2.010.844.550,00	Rp. 31.571.500,00		
1.06.1.06.01.28.013	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	1. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah (6 dokumen, 310 buku) 2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (1 dokumen, 25 eks)	1. Capaian kinerja program/kegiatan 34 SKPD dan 5 kab/kota 1. Kontribusi capaian kinerja sasaran terhadap sasaran IKU Gubernur	DIY	Rp. 662.719.900,00	1. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah (6 dokumen, 310 buku) 2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (1 dokumen, 25 eks)	1. Capaian kinerja program/kegiatan 34 SKPD dan 5 kab/kota 1. Kontribusi capaian kinerja sasaran terhadap sasaran IKU Gubernur	DIY	Rp. 656.639.900,00	(-) Rp. 6.080.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.06.1.06.01.28.015	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 1 dokumen (130 buku) 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP), 1 dokumen (150 buku) 3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014, 1 dokumen (80 buku)	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada Laporan Kinerja 11,91 (Tahun 2013) menjadi 12,68 (Tahun 2014)	DIY	Rp. 524.995.000,00	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 1 dokumen (130 buku) 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP), 1 dokumen (150 buku) 3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014, 1 dokumen (80 buku)	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada Laporan Kinerja 11,91 (Tahun 2013) menjadi 12,68 (Tahun 2014)	DIY	Rp. 524.995.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.06.1.06.01.28.016	Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	1. Lap Pengend Pemb Daerah (3 dok) 2. Rapor SKPD (4 dok) 3. Lap Tahunan Pengend (50 bk) 4. Monitoring PK (4 dok), 5. Pengend Bantuan Keuangan (4 dok), 6. Pengend prog strategis/unggulan (4 dok), 7. Panduan APBD 2016 (80 bk), 8. Aplikasi Monev (1 sat)	1. Pengendalian pelaksanaan 347 program dan 1.706 Kegiatan yang didanai APBD Tahun 2015	DIY	Rp. 791.558.150,00	1. Lap Pengend Pemb Daerah (3 dok) 2. Rapor SKPD (4 dok) 3. Lap Tahunan Pengend (50 bk) 4. Monitoring PK (4 dok), 5. Pengend Bantuan Keuangan (4 dok), 6. Pengend prog strategis/unggulan (4 dok), 7. Panduan APBD 2016 (80 bk), 8. Aplikasi Monev (1 sat)	1. Pengendalian pelaksanaan 347 program dan 1.706 Kegiatan yang didanai APBD Tahun 2015	DIY	Rp. 829.209.650,00	Rp. 37.651.500,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.23	Statistik													
1.23.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
1.23.1.06.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH						Rp. 1.448.762.500,00				Rp. 1.193.335.000,00	(-) Rp. 255.427.500,00		
1.23.1.06.01.16.004	Pengelolaan Data dan Statistik Daerah	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	97 %	Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan : - Analisa PDRB - Analisa ICOR - Analisa Makro Ekonomi - Analisa IPM (Indeks	5 jenis data untuk mendukung perencanaan, semula (2013) 96% menjadi (2016) 98%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.448.762.500,00	Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan : - Analisa PDRB - Analisa ICOR - Analisa Makro Ekonomi - Analisa IPM (Indeks	5 jenis data untuk mendukung perencanaan, semula (2013) 96% menjadi (2016) 98%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.193.335.000,00	(-) Rp. 255.427.500,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				Pembangunan Manusia) - Sistem Informasi Datalaku - Laporan SPDP DIY Tahun 2015				Pembangunan Manusia) - Sistem Informasi Datalaku - Laporan SPDP DIY Tahun 2015						
Total							Rp. 16.067.901.000,00				Rp. 15.580.442.600,00	(-) Rp. 487.458.400,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											
Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.07	Wajib										
	Perhubungan										
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika										
1.07.1.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN KEMASYARAKATAN PERKANTORAN										
1.07.1.07.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 10.553.500,00	Dinas: 1. Surat Keluar (5.524 surat) 2. Surat Masuk (4.988 surat) 3. Pengiriman dokumen (19 surat)	12 bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 10.553.500,00
					12 bulan			Trans Jogja: 1. Surat Keluar (2.880 surat) 2. Surat Masuk (4.320 surat) 3. Pengiriman dokumen (5 dokumen)	12 bulan		
1.07.1.07.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 669.220.000,00	Dinas 1) Pembayaran tagihan rekening telepon 14 sambungan 2) Pembayaran tagihan rekening listrik 2.150.000 Kwh 3) Pembayaran tagihan rekening air 435 m3	12 bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 4.200.000,00
					12 bulan			Trans Jogja: 1. Pembayaran tagihan rekening telepon 14 sambungan 2) Pembayaran tagihan rekening listrik 2.150.000 Kwh 3) Pembayaran tagihan rekening air 435 m3	12 bulan		
1.07.1.07.01.01.003	Penyediaan Jasa Perawatan Dan Perlingkungan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		7 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 10.875.000,00	1. Spanduk (10 buah) 2. Publikasi Media Cetak (1 jenis) 3. Publikasi Media Elektronik (1 jenis) 4. Sewa Meja (50 buah) 5. Sewa Kursi (200 buah) 6. Sewa Tenda (6 buah) 7. Sewa Soundsystem (2 kali)	7 jenis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 10.875.000,00
					3 jenis kendaraan			Dinas: Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	3 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 22.088.500,00
1.07.1.07.01.01.006	Penyediaan Jasa Perawatan Dan Perlingkungan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		3 jenis kendaraan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 22.088.500,00	Dinas: Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	3 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 22.088.500,00
					3 jenis kendaraan			Dinas: Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	3 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 22.088.500,00

Kode	Unsurat/Program /Kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN						
			Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.071.07.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	yang tepat waktu 1) Kendaraan Roda 2 : 34 unit 2) Kendaraan Roda 4 : 24 unit 3) Kendaraan Roda 6 : 1 unit	1 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 108.254.700,00	Dinas: Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional dan/atau tepat waktu (4 unit)	1 jenis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 139.789.700,00	Rp. 31.535.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : 1. Honorarium Bendahara Dana 2. Kekurangan Honor Administrasi Keuangan Trans Jogja
				Trans Jogja: Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional dan/atau tepat waktu (4 unit)	Dinas: Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional dan/atau tepat waktu (4 unit)									
1.071.07.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti Pembayaran Jasa Cleaning Service Gedung Kantor Dinas, Jembatan Timbang dan UPTD Plaza Informasi	12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 233.656.300,00	Bukti Pembayaran Jasa Cleaning Service Gedung Kantor Dinas, Jembatan Timbang dan UPTD Plaza Informasi	12 bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 231.256.200,00	(-) Rp. 2.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Honorarium Tim Pengabdian Barang Dan Jasa Penambahan : -
				Trans Jogja: Bukti Pembayaran Jasa Cleaning Service Gedung Kantor Dinas, Jembatan Timbang dan UPTD Plaza Informasi	Dinas: Bukti Pembayaran Jasa Cleaning Service Gedung Kantor Dinas, Jembatan Timbang dan UPTD Plaza Informasi									
1.071.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis kantor Dinas	66 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 95.945.100,00	Alat Tulis kantor Dinas	66 jenis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 95.945.100,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.071.07.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dinas: 1. Barang Cetak (26 unit/buku) 2. Penggandaan dan Penjilidan (16 jenis)	12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 74.999.925,00	Dinas: 1. Barang Cetak (26 unit/buku) 2. Penggandaan dan Penjilidan (16 jenis)	12 bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 74.999.925,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Trans Jogja: 1. Barang Cetak (26 unit/buku) 2. Penggandaan dan Penjilidan (11 jenis)	Dinas: 1. Barang Cetak (26 unit/buku) 2. Penggandaan dan Penjilidan (11 jenis)									
1.071.07.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 9.247.500,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 9.247.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.071.07.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	7) Parfum Mobil cair (48 buah), 8) Emulsi Mask (18 buah) 9) Kaset	7 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 12.999.050,00	7) Parfum Mobil cair (48 buah), 8) Emulsi Mask (18 buah) 9) Kaset	7 jenis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 12.999.050,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				karpet (31 buah) 10) Lap Kendaraan bermotor canebo (18 buah) 11) Sapu (17 buah) 12) Obat Njamuk spray (15 buah) 13) Bendera (16 buah)	6 jenis			karpet (31 buah) 10) Lap Kendaraan bermotor canebo (18 buah) 11) Sapu (17 buah) 12) Obat Njamuk spray (15 buah) 13) Bendera (16 buah)	6 jenis					
				8. Lap Kendaraan Canebo (8 buah) 9. Lap Pel (1 buah) 10. Sapu Cemara (2 buah) 11. Kapur Barus (3 bungkus) 2. Hand Soap (11 bungkus) 13. Obat Njamuk Spray (2 buah)	6 jenis			8. Lap Kendaraan Canebo (8 buah) 9. Lap Pel (1 buah) 10. Sapu Cemara (2 buah) 11. Kapur Barus (3 bungkus) 2. Hand Soap (11 bungkus) 13. Obat Njamuk Spray (2 buah)	6 jenis					
				Dinas: 1) Pengharum ruangan (52 buah) 2) Tisu Kotak (116 buah) 3) Keranjang sampah (15 buah) 4) sulak bulu (20 buah) 5) gayung air (13 buah) 6) Kit black (15 buah)	6 jenis			Dinas: 1) Pengharum ruangan (52 buah) 2) Tisu Kotak (116 buah) 3) Keranjang sampah (15 buah) 4) sulak bulu (20 buah) 5) gayung air (13 buah) 6) Kit black (15 buah)	6 jenis					
				Trans Jogja: 1. Pengharum Ruangan (15 buah) 2. Tisu Kotak (15 buah) 3. Tisu Gulung (15 buah) 4. Keranjang Sampah (3 buah) 5. Sulak bulu (3 buah) 6. Kit Black Magic (5 buah) 7. Parfum Mobil Cair (8 buah)	7 jenis			Trans Jogja: 1. Pengharum Ruangan (15 buah) 2. Tisu Kotak (15 buah) 3. Tisu Gulung (15 buah) 4. Keranjang Sampah (3 buah) 5. Sulak bulu (3 buah) 6. Kit Black Magic (5 buah) 7. Parfum Mobil Cair (8 buah)	7 jenis					
1.07.1.07.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dinas 1. Surat kabar (7 jenis) 2. Majalah (1 Jenis)	12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 95.466.000,00	Dinas 1. Surat kabar (7 jenis) 2. Majalah (1 Jenis)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 95.466.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
1.07.1.07.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dinas: Makan minum sidang Trans Jogja: Makan minum sidang	5400 Orang 2250 Orang	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 84.744.000,00	Dinas: Makan minum sidang Trans Jogja: Makan minum sidang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 84.744.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
1.07.1.07.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dinas: 1. Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah 2. Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 823.415.000,00	Dinas: 1. Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah 2. Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 823.415.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.1		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				Trans Jogja: 1. Konsultasi dan koordinasi dalam Daerah 2. Konsultasi dan koordinasi ke Dinas Daerah	12 bulan									
1.07.1.07.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja	12 kwintansi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 1.404.951.450,00	Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja	12 kwintansi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 1.404.951.450,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.07.1.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 4.661.915.975,00				Rp. 4.641.015.975,00			
1.07.1.07.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	-	0 -	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 0,00	1. Kendaraan Roda 4 KIP dan KPID (Pindahan dari 02.09)	2 unit	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 471.300.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
								2. Kendaraan Roda 2 (KIP, KPID, Program Sekretariat dan Trans Jogja (Pindahan dari 02.09)	4 unit					
1.07.1.07.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	18) CD audio (2 unit) 19) Meja Kerja (22 buah) 20) Kursi Kerja (12 buah) 21) Kursi Tamu (1 unit) 22) Kursi Komputer (5 buah) 23) Jam Dinding (5 buah)	6 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 990.356.475,00	9) Gordyn (15 unit) 10) PC (14 unit) 11) Notebook (13 unit) 12) Printer (5 unit) 13) LCD (2 unit) 14) UPS (2 buah) 15) Bakul laptop (4 unit) 16) CD audio (2 unit) 17) Jam Dinding (5 buah)	9 jenis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 440.854.275,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 1. Belanja Modal Pengadaan Alinari 2. Belanja Modal Pengadaan Komputer P C Penambahan : -	
				9) Air Conditioner (8 unit) 10) Tirai Jendela (15 m2) 11) Gordyn (15 unit) 12) PC (14 unit) 13) Notebook (13 unit) 14) Printer (5 unit) 15) LCD (2 unit) 16) UPS (2 buah) 17) Bakul laptop dan Charger (4 unit)	9 jenis			Dinas: 1) Mesin penghancur kertas (1 unit) 2) Alinari Asip Kaca (4 unit) 3) Alinari Radixion (17 unit) 4) Alinari Buku (4 unit) 5) Filling Kabinet (8 buah) 6) White board (2 unit) 7) Air Conditioner (8 unit) 8) Tirai Jendela (15 m2)	8 jenis					
				Dinas: 1) Kendaraan roda 4 (2 unit) 2) Kendaraan roda 2 (3 unit) 3) Mesin penghancur kertas (1 unit) 4) Alinari Asip Kaca (4 unit) 5) Alinari Radixion (17 unit)	8 jenis			Trans Jogja: 1) Kendaraan Roda 2 2) Mesin Ketik Elektronik 3) Kipas Angin 4) Printer	4 jenis					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Usanan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.071.07.01.02.010	Pengadaan Melebur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	6) Almari Buku (4 unit) 7) Filling Kabinet (8 buah) 8) White board (2 unit) Trans Jogja: 1) Kendaraan Roda 2.2) Mesin Ketik Elektronik 3) Kipas Angin 4) Printer	4 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 0,00	1) Meja Kerja (22 buah) 2) Kursi Kerja (12 buah) 3) Kursi Tamu (1 unit) 4) Kursi Komputer (5 buah)	4 Item	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 72.602.200,00	Rp. 72.602.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
1.071.07.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung Kantor Induk, Jembatan Timbang, dan UPTD Plaza Informasi	12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 2.066.297.600,00	Dinas: 1) Kendaraan Roda 4 (23 unit) 2) Kendaraan Roda 2 (34 unit) 3) Kendaraan Roda 6 (1 unit)	12 bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 2.053.897.600,00	(-) Rp. 12.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Penambahan : -		
1.071.07.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinas: 1) Kendaraan Roda 4 (23 unit) 2) Kendaraan Roda 2 (34 unit) 3) Kendaraan Roda 6 (1 unit)	12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 1.323.669.000,00	Dinas: 1) Kendaraan Roda 4 (23 unit) 2) Kendaraan Roda 2 (34 unit) 3) Sound System, kipas angin dan wireless (5 unit) 4) Peralatan listrik, telepon dan air (1 tahun) 5) LCD (3 unit) 6) Camera (10 unit)	12 bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 1.321.669.000,00	(-) Rp. 2.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Penggantian Kendaraan Bermotor Penambahan : -		
1.071.07.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinas: 1) Meja dan kursi (50 unit) 2) Mesin ketik manual (20 unit) 3) Sound System, kipas angin dan wireless (5 unit) 4) Peralatan listrik, telepon dan air (1 tahun) 5) LCD (3 unit) 6) Camera (10 unit)	6 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 19.700.000,00	Dinas: 1) Meja dan kursi (50 unit) 2) Mesin ketik manual (20 unit) 3) Sound System, kipas angin dan wireless (5 unit) 4) Peralatan listrik, telepon dan air (1 tahun) 5) LCD (3 unit) 6) Camera (10 unit)	6 jenis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 18.800.000,00	(-) Rp. 900.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor Penambahan : -		
1.071.07.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Dinas 1) Alat Pemadam Kebakaran Portable (33 unit) 2) Hydrant Pemadam (1 unit) 3) AC (50 unit) 4) Komputer (115 unit) 5) Notebook (24 unit) 6) PABX Telp & Faximile (30 buah) 7) VHF Repeater (1 unit)	8 jenis	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 110.250.000,00	Dinas 1) Alat Pemadam Kebakaran Portable (33 unit) 2) Hydrant Pemadam (1 unit) 3) AC (50 unit) 4) Komputer (115 unit) 5) Notebook (24 unit) 6) PABX Telp & Faximile (30 buah) 7) VHF Repeater (1 unit)	8 jenis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 110.250.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				8) Radio Komunikasi VHF (1 unit)				8) Radio Komunikasi VHF (1 unit)					
				Trans Jolra: Peralatan gedung kantor terpelihara	3 jenis			Trans Jolra: Peralatan gedung kantor terpelihara	3 jenis				
				1. Komputer 2. AC 3. Laptop				1. Komputer 2. AC 3. Laptop					
1.071.07.01.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Perangkat Sistem Informasi 2. Pemeliharaan LAN/Website 3. Pemeliharaan IP Camera	3 paket pekerjaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 151.642.900,00	1. Perangkat Sistem Informasi 2. Pemeliharaan LAN/Website 3. Pemeliharaan IP Camera	3 paket pekerjaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 151.642.900,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.071.07.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 174.523.325,00				Rp. 168.443.325,00 (-)		
1.071.07.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penabusahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai Lapik Dishubkominfo DIY A = >75 s/d 85	1 kegiatan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 6.389.425,00	Nilai Lapik Dishubkominfo DIY A = >75 s/d 85	1 kegiatan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 6.389.425,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.071.07.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penabusahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas: Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 35.072.000,00	Dinas: Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 35.067.000,00 (-)	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Cetak Penambahan : -
1.071.07.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya penabusahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas: Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	10 %	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 114.334.400,00	Dinas: Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	10 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 106.259.400,00 (-)	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 1. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -
1.071.07.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penabusahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dinas: Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	100 %	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 18.727.500,00	Kesesuaian antara target dengan program kegiatan	100 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 18.727.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.07.1.07.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN													
1.07.1.07.01.15.010	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara	Peningkatan pelayanan transportasi antar moda	40 %	1) Koordinasi ruslagh lanjutan aset di Bandara Adi Suljpto (Peralihan 1 Aset dari PT. Pos Indonesia ke Penda DTY)	1 kegiatan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 1.96.149.000,00	1) Koordinasi ruslagh lanjutan aset di Bandara Adi Suljpto (Peralihan 1 Aset dari PT. Pos Indonesia ke Penda DTY)	1 kegiatan	Depok	Rp. 116.103.800,00	(-) Rp. 80.045.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 1. Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -
1.07.1.07.01.15.018	Pembangunan Prasarana bus Trans Jogja	Peningkatan pelayanan transportasi antar moda	40 %	2) Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Baru (3 kali rapat koordinasi persiapan, 9 kali rapat koordinasi pelaksanaan)	1 kegiatan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 2.289.049.875,00	2) Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Baru (3 kali rapat koordinasi persiapan, 9 kali rapat koordinasi pelaksanaan)	1 kegiatan	Perkotaan DIY	Rp. 2.289.049.875,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN													
1.07.1.07.01.16.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1) Pemeliharaan Komputer (8 unit) 2) Servis dan Kalibrasi Jembatan Timbang (3 Timbang, Kalitiro, Taman Maren, Kulwaru) 3) Servis Diesel dan Peralatan Pendukung Lainnya (3 JT) 4) Fasilitas	12 bulan	Berbah Kalasan Wates	Rp. 808.404.500,00	1) Pemeliharaan Komputer (8 unit) 2) Servis dan Kalibrasi Jembatan Timbang (3 Timbang, Kalitiro, Taman Maren, Kulwaru) 3) Servis Diesel dan Peralatan Pendukung Lainnya (3 JT) 4) Fasilitas	12 bulan	Berbah Kalasan Wates	Rp. 797.301.200,00	(-) Rp. 11.103.300,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 1. Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 2. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika														
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tokol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
1.07.1.07.01.16.005	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Darat ASDP	Bertinginya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1. SRNP (14) 2. Speedboat (3 unit) 3. Garasi Apung (3 unit) 4. Rempis Gudang (1 unit) 5. Ponton Apung (1 unit) 6. SSB (8 unit)	12 bulan	Depok Grisubo Kokap Panggang Pangkajene Sandakan Tanjungsari Temen	Rp. 254.303.650,00	Perukung Lainnya (3 JT)	12 bulan	Depok Grisubo Kokap Panggang Pangkajene Sandakan Tanjungsari Temen	Rp. 254.193.650,00	(-) Rp. 110.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi Penambahan : -
1.07.1.07.01.16.006	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas	Bertinginya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1) Rambu Laki-laki (200 unit) 2) Rambu Perempuan (48 lokasi) 3) Warning Light (20 lokasi) 4) Rehab Berat APILL (3 lokasi) 5) Penggantian Tiang APILL (48 lokasi) 6) Perawatan LPU (34 unit) 7) Penggantian Sempul Relayanan Gangguan APILL (12 bulan)	12 bulan	Jalan Provinsi	Rp. 976.925.000,00		12 bulan	DIY	Rp. 975.965.000,00	(-) Rp. 960.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Penambahan : -
1.07.1.07.01.16.007	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Angkutan Umum Buy the Service	Bertinginya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	Operasionalisasi Fasilitas Trans Jogja 9 jalur: 1. Pemeliharaan SMTS Halte dan SMTS on Bus 2. Pemeliharaan Halte 3. Kebersihan Halte	12 bulan		Rp. 1.235.051.001,00		12 bulan	Kota Yogyakarta Banguntapan Depok SMTS Halte dan SMTS on Bus 2. Pemeliharaan Halte 3. Kebersihan Halte	Rp. 1.235.051.001,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.16.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keselamatan KA	Bertinginya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	Operasionalisasi Fasilitas Trans Jogja 9 jalur: 1. Pemeliharaan SMTS Halte dan SMTS on Bus 2. Pemeliharaan Halte 3. Kebersihan Halte	12 bulan		Rp. 23.981.000,00		12 bulan	Berbah Depok	Rp. 17.378.150,00	(-) Rp. 6.602.850,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penambahan : -
1.07.1.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN						Rp. 72.231.568.870,00				Rp. 72.230.756.370,00	(-) Rp. 812.500,00		
1.07.1.07.01.17.011	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38,57 %	1) Pengukuran Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi 2) Pengukuran Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan 3) Pengukuran Kinerja Angkutan Ekspres	3 Buku Laporan	Daerah Istirewa Yogyakarta	Rp. 377.978.700,00			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 377.978.700,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.17.012	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38,57 %	Rencana Induk Perencanaan DIY	1 dokumen	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 375.135.000,00			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 375.135.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.17.013	Fasilitas Perizinan di Bidang Perhubungan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38,57 %	1. Kendaraan Umum Terbit Ijin (3241)	4 paket pekerjaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 157.044.400,00			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 156.231.900,00	(-) Rp. 812.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
		umum perkotaan yogyakarta		Kendaraan) 2. Publikasi Media Massa Tentang Tertib Ijin (10 kali) 3. Sosialisasi di Televisi (1 paket) 4. Pemeliharaan Mesin Anjungan Perijinan Mandiri (1 paket)		Informatika			Informatika				Penambahan : -	
1.07.1.07.01.17.020	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy the Service	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38,57 %	Pelayanan Angkutan Umum Trans Jogja kepada 6.798.000 penumpang 1. Operasional Trans Jogja 12 bulan 2. Promosi Trans Jogja 9 Jalur	12 bulan	Kota Yogyakarta Banguntapan Berbah Depok Kalisan Mlati Prambanan	Rp. 71.321.410.770,00	Pelayanan Angkutan Umum Trans Jogja kepada 6.798.000 penumpang 1. Operasional Trans Jogja 12 bulan 2. Promosi Trans Jogja 9 Jalur	12 bulan	Kota Yogyakarta Banguntapan Berbah Depok Kalisan Mlati Prambanan	Rp. 71.321.410.770,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERUBAHAN						Rp. 944.840.000,00					(-) Rp. 4.461.750,00		
1.07.1.07.01.18.007	Pengembangan dan Pemasangan Fasilitas Transfer Point dan Park and Ride	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi Di DIY	44,17 %	1) Penambahan Fasilitas Transfer Point (1 Lokasi (Dongkalan) 2) DED Transfer Point dan Park and Ride (1 dokumen)	2 paket pekerjaan	Kab. Bantul	Rp. 944.840.000,00	1) Penambahan Fasilitas Transfer Point (1 Lokasi (Dongkalan) 2) DED Transfer Point dan Park and Ride (1 dokumen)	2 paket pekerjaan	Mantrijeron Sewon	Rp. 940.378.250,00	(-) Rp. 4.461.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi Penambahan : -
1.07.1.07.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN JALAN LINTAS						Rp. 2.173.553.250,00					Rp. 44.096.272,00		
1.07.1.07.01.19.003	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	Pagar Pengaman Jalan sepanjang 316 m di ruas jalan Surabaya (22,4% dari 53.377 meter)	316 meter	Puncak Surabaya Kab. Kulon Progo	Rp. 396.163.750,00	Pagar Pengaman Jalan sepanjang 316 m di ruas jalan Surabaya (22,4% dari 53.377 meter)	316 meter	Samigaluh	Rp. 396.163.750,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.19.006	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	1) Angkutan lebaran,natal dan tahun baru (16 hari angkutan lebaran, 8 hari angk natal & tahun baru, 15 hari angkutan lebaran dan tahun baru) 2) Dialog Interaktif di Televisi (3 paket)	2 Paket	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 449.990.500,00	1) Angkutan lebaran,natal dan tahun baru (16 hari angkutan lebaran, 8 hari angk natal & tahun baru, 15 hari angkutan lebaran dan tahun baru) 2) Dialog Interaktif di Televisi (3 paket)	2 Paket	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 448.365.500,00	(-) Rp. 1.625.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -
1.07.1.07.01.19.022	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan (DAK)	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	1) APILL ATCS Tenaga Surya (1 unit) 2) Rambu Lalu Lintas (82 unit) 3) Warning Light Tenaga Surya (4 buah) 4) Marka Jalan (6.000 m) 5) Cermin Tungkan (20 buah) 6)	6 Paket	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 1.327.399.000,00	1) APILL ATCS Tenaga Surya (1 unit) 2) Rambu Lalu Lintas (82 unit) 3) Warning Light Tenaga Surya (4 buah) 4) Marka Jalan (6.000 m) 5) Cermin Tungkan (20 buah) 6)	6 Paket	Jalan Provinsi di wilayah DIY	Rp. 1.327.399.000,00	Rp. 0,00	DAK	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Uraian/ Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.07.1.07.01.19.025	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan (Optimalisasi DAK)	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	-	0 -	-	Rp. 0,00	RPPJ (12 buah)	1 unit	Ruas Jalan provinsi	Rp. 45.721.272,00	Rp. 45.721.272,00
1.07.1.07.01.20	PROGRAM PENGINGKATAN KELAUKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR						Rp. 79.527.000,00				Rp. 67.988.400,00	(-) Rp. 11.728.600,00
1.07.1.07.01.20.004	Peledakan Rambu- Rambu Tipe B Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100 %	1) Sertifikasi Rambu- Rancang Ber motor (600 kendaraan) 2) Sertifikasi Penghapusan Kendaraan Bermotor Dinas (600 kendaraan)	12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 28.139.000,00	1) Sertifikasi Rambu- Rancang Ber motor (600 kendaraan) 2) Sertifikasi Penghapusan Kendaraan Bermotor Dinas (600 kendaraan)	12 bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 25.789.000,00	(-) Rp. 2.350.000,00
1.07.1.07.01.20.005	Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100 %	Terlaksananya Pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebesar 100%	12 bulan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 51.388.000,00	Terlaksananya Pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebesar 100%	12 bulan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 42.009.400,00	(-) Rp. 9.378.600,00
1.07.1.07.01.21	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS						Rp. 2.275.837.250,00				Rp. 2.253.079.000,00	(-) Rp. 22.758.250,00
1.07.1.07.01.21.001	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan	Penerangan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan	25,2 %	Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 40 ruas jalan dan 30 simpang	1 Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 40 ruas jalan dan 30 simpang	Jalan Perkotaan di wilayah DIY	Rp. 316.541.375,00	Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 40 ruas jalan dan 30 simpang	1 Laporan Ruas Jalan dan Smpang	Jalan Nasional dan Provinsi di Wilayah DIY	Rp. 293.798.100,00	(-) Rp. 22.743.275,00
1.07.1.07.01.21.004	Pengadaan dan Pemasangan Manajemen Lalu lintas	Penerangan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan	25,2 %	5) Rambu (80 buah) 6) Repeater (1 unit) 7) Traffic Cone (178 buah)	2 kawasan (Terban dan Jati Kencana - Demak Ijo)	Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman	Rp. 1.959.295.875,00	5) Rambu (80 buah) 6) Repeater (1 unit) 7) Traffic Cone (178 buah)	2 kawasan (Terban dan Jati Kencana - Demak Ijo)	Camping Godean Gondokusuman	Rp. 1.959.280.900,00	(-) Rp. 14.975,00
1.07.1.07.01.22	PROGRAM PENGINGKATAN KELAUKAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL						Rp. 3.240.850.000,00				Rp. 3.240.850.000,00	Rp. 0,00

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.07.1.07.01.22.001	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan Yogyakarta	(3)	(4) 40 %	(5) - Controller ATCS - Detektor ATCS di Kota Yogyakarta (4 unit) - ATCS di Kota Yogyakarta (3 unit)	(6) 3 Paket	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 3.240.850.000,00	(9) - Controller ATCS (4 unit) - Detektor ATCS di Kota Yogyakarta (4 unit) - ATCS di Kota Yogyakarta (3 unit)	(10) 3 Paket	Kota Yogyakarta	(12) Rp. 3.240.850.000,00	(13) Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : - (15)
1.07.1.07.01.23	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENYAMPAIAN KESELAMATAN TRANSPORTASI						Rp. 1.404.481.800,00				Rp. 1.370.739.300,00	(-) Rp. 33.742.500,00	
1.07.1.07.01.23.004	Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum												
1.07.1.07.01.23.005	Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Penerbangan	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	1) Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan (15 orang, 3 hari penempatan) 2) Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum (35 orang, 3 hari penyelenggaraan 3 angkatan)	2 kegiatan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 1.145.187.200,00	1) Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan (15 orang, 3 hari penempatan) 2) Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum (35 orang, 3 hari penyelenggaraan 3 angkatan)	2 kegiatan	Perkotaan DIY	Rp. 133.187.200,00	(-) Rp. 12.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.23.006	Pengendalian Desiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	1) Pengkajian terhadap sertifikasi fasilitas penerbangan, kegiatan GSE, personil GSE (2 paket, 30 orang)	1 kegiatan	Bandara Adisutjipto (Kab.Sleman)	Rp. 11.225.000,00	Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas penerbangan, kegiatan GSE, personil GSE (2 paket, 30 orang)	1 kegiatan	Berbah	Rp. 11.225.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.23.007	Pengendalian Kelelahan Muatan Angkutan Barang	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	1) Pengkajian terhadap hukum terhadap penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang (3 lokasi) 2) Pengkajian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan secara mobile (120 kali)	2 kegiatan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 233.288.000,00	1) Pengkajian hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang (3 lokasi) 2) Pengkajian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan secara mobile (120 kali)	2 Paket	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 231.663.000,00	(-) Rp. 1.625.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -
1.25	Komunikasi dan Informatika												
1.25.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika												
1.25.1.07.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA						Rp. 1.369.847.750,00				Rp. 1.337.019.025,00	(-) Rp. 32.828.725,00	
1.25.1.07.01.15.003	Pembinaan Dan Pengembangan	Peningkatan layanan	12 urusan/bidang	1) Sosialisasi Plaza melalui	5 Paket	Daerah Istimewa	Rp. 175.252.750,00	1) Sosialisasi Plaza melalui	5 Paket	Dinas Perhubungan,	Rp. 174.802.750,00	(-) Rp. 450.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Perjalanan Dinas

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika															
Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
(1)	Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	unggulan DGS per urusan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
					website (12 bulan) 2) Leaflet (2000 lembar) 3) Booklet (2000 lembar) 4) Buku (1000 eksemplar) 5) Tersedianya konten layanan dan materi kiosk informasi (12 bulan)		Yogyakarta				Komunikasi dan Informatika				Luar Daerah Penambahan : -
1.25.1.07.01.15.006	Pengajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	1. Dokumen Tata Kelola TIK Pemda DIY (1 Dokumen) 2. Pemeliharaan Data Center (12 bulan) 3. Audit TIK dan Pengembangan E-Gov Pemda DIY (1 Dokumen) 4. Pengelolaan Data Warehouse (12 bulan)	4 paket pekerjaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 1.100.066.000,00	Rp. 1.096.441.000,00	1. Dokumen Tata Kelola TIK Pemda DIY (1 Dokumen) 2. Pemeliharaan Data Center (12 bulan) 3. Audit TIK dan Pengembangan E-Gov Pemda DIY (1 Dokumen) 4. Pengelolaan Data Warehouse (12 bulan)	4 paket pekerjaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 1.096.441.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 1. Honorarium Tim Pengabdian Barang Dan Jasa 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -
1.25.1.07.01.15.016	Bimbingan Teknis Pengabdian Barang dan Jasa secara Elektronik	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	Bimbingan Teknis Pengabdian Barang dan Jasa Secara Elektronik 155 peserta (Pengetahuan tentang operasional pengadaan secara elektronik kepada 2 jenis pengabdian (penyedia dan non penyedia)	1 kegiatan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 43.033.000,00	Rp. 38.850.475,00	1. Bimbingan Teknis Pengabdian Barang dan Jasa Secara Elektronik 155 peserta (Pengetahuan tentang operasional pengadaan secara elektronik kepada 2 jenis pengabdian (penyedia dan non penyedia)	1 kegiatan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 38.850.475,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Honorarium Harian Non PNS Penambahan : -
1.25.1.07.01.15.017	Kerjasama Pengembangan e-Government	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	1. Forum Koordinasi E-Government se DIY (1 kali 5 kab/kota) 2. Forum Koordinasi LPSE se DIY (1 kali 5 kab/kota)	2 paket pekerjaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 51.496.000,00	Rp. 26.924.800,00	1. Forum Koordinasi E-Government se DIY (1 kali 5 kab/kota) 2. Forum Koordinasi LPSE se DIY (1 kali 5 kab/kota)	2 paket pekerjaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 26.924.800,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 1. Belanja Alat-Alat/Perengkapan 2. Belanja Transportasi Dan Akomodasi Penambahan : -
1.25.1.07.01.15.018	Fasilitasi Kebutuhan KIP & KIPD	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	-	0 -	a	Rp. 0,00	Rp. 0,00	-	0 -	a	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.25.1.07.01.19	PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI						Rp. 735.401.000,00	Rp. 725.839.800,00						(-)	Rp. 9.561.200,00
1.25.1.07.01.19.001	Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Jasa Titipan	Penyerbikan/luas informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	1. Rekomendasi Ijin Penyelenggara Jasa Titipan (1 rekomendasi) 2. Data dan Laporan Penyelenggaraan Jasa Titipan (1 dokumen) 3. Sosialisasi DI	3 kegiatan	Kabupaten/Kota di Wilayah DIY	Rp. 12.672.500,00	Rp. 12.672.500,00	1. Rekomendasi Ijin Penyelenggara Jasa Titipan (1 rekomendasi) 2. Data dan Laporan Penyelenggaraan Jasa Titipan (1 dokumen) 3. Sosialisasi DI	3 kegiatan	Kabupaten/Kota di Wilayah DIY	Rp. 12.672.500,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.251.07.01.19.002	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi	Penyediaan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	Bidang POS (1 kali, 1 hari, 50 orang)	3 dokumen	Kabupaten/Kota se DIY	Rp. 8.725.000,00	1. Data dan Laporan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (1 dokumen) 2. Data dan Laporan Radio Siaran dan Televisi Swasta Lokal (1 dokumen) 3. Data dan Laporan IAR dan IKRAP (1 dokumen)	3 dokumen	Kabupaten/Kota se DIY	Rp. 8.725.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.251.07.01.19.004	Penyediaan Informasi Daerah	Penyediaan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	Lomba Penjurangan Rakyat (Perturra) tingkat DIY 2015 untuk mewakili DIY pada Pekan Informasi Nasional 2016	3 kegiatan	Kab/Kota di Wilayah DIY	Rp. 300.000.000,00	1) Sosialisasi melalui : 1. Tatap Muka (3 kali) 2. Radio (24 kali) 3. Televisi (6 kali) 4. Media Perturra (3 kali) 5. MCAP (10 kali) 6. Siaran langsung (1 kali) 2) Booklet (1000 lembar) 3) Anggota Komisi Informasi terpilih 2015-2019 (1 paket)	3 kegiatan	Kab/Kota di Wilayah DIY	Rp. 300.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.251.07.01.19.005	Kekusertaan Dalam Pekan Informasi Nasional	Penyediaan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	Lomba Penjurangan Rakyat (Perturra) tingkat DIY 2015 untuk mewakili DIY pada Pekan Informasi Nasional 2016	1 x festival	Samarinda	Rp. 200.000.000,00	Mengikuti festival Perturra tingkat nasional pada Pekan Informasi Nasional 2015	1 x festival	Luar Jawa	Rp. 193.803.800,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -
1.251.07.01.19.006	Penyediaan Informasi Pemerintahan Daerah	Penyediaan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	Pertunjukan rakyat melalui media DVD untuk sedeksi Pekan Informasi Nasional 2015	1 x pentas	DKI Jakarta	Rp. 74.590.000,00	Pertunjukan rakyat melalui media DVD untuk seleksi Pekan Informasi Nasional 2015	1 x pentas	DKI Jakarta	Rp. 74.177.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -
1.251.07.01.19.007	Layanan Informasi Publik	Penyediaan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	Pertunjukan rakyat melalui media DVD untuk sedeksi Pekan Informasi Nasional 2015	1 x pentas	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 1.39.013.500,00	Pertunjukan rakyat melalui media DVD untuk seleksi Pekan Informasi Nasional 2015	1 x pentas	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 136.461.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 1. Honorarium Tim Pengabdian Baring Dan Jasa 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Center Plaza Informasi (1 paket) 4. Koran dan majalah untuk masyarakat (10 koran, 2 majalah)									
1.25.1.07.01.20.001	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI						Rp. 7.306.688.600,00				Rp. 7.284.623.600,00	(-) Rp. 22.065.000,00	
1.25.1.07.01.20.001	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah DIY	Penguatan Jaringan IT di Penda DIY	80 %	1. Langanan Bandwidth Internet (12 bulan) 2. Pemeliharaan Jaringan Komputer Penda DIY - Pemeliharaan Jaringan Wireless PendaDIY (1 tahun) - Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Penda DIY (1 tahun)	2 paket pekerjaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 6.896.275.200,00	1. Langanan Bandwidth Internet (12 bulan) 2. Pemeliharaan Jaringan Komputer Penda DIY - Pemeliharaan Jaringan Wireless PendaDIY (1 tahun) - Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Penda DIY (1 tahun)	2 paket pekerjaan	Pemerintah Daerah DIY	Rp. 6.883.060.200,00	(-) Rp. 13.215.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer Penambahan : -
1.25.1.07.01.20.002	Pemeliharaan Jaringan Pengadaan Secara Elektronik	Penguatan Jaringan IT di Penda DIY	80 %	3. Peralatan Jaringan komputer (1 paket) 4. Peralatan dan pemasangan Jaringan Fiber Optic (4,5 km)	2 paket pekerjaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 410.413.400,00	3. Peralatan Jaringan komputer (1 paket) 4. Peralatan dan pemasangan Jaringan Fiber Optic (4,5 km)	2 paket pekerjaan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 401.563.400,00	(-) Rp. 8.850.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Belanja Perjalanan Dinas Penambahan : -
Total							Rp. 106.039.314.771,00				Rp. 105.852.986.168,00	(-) Rp. 186.328.603,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup														
Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan		
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi	Anggaran
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.08	Wajib Lingkungan Hidup													
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup													
1.08.1.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 1.042.326.000,00				Rp. 1.031.734.800,00 (-) Rp. 10.591.200,00		
1.08.1.08.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembelian material Rp. 6.000,- 2. Pembelian material Rp. 3.000,- 3. Pengiriman paket	1000 Material 700 Material 10 buah	1000 Material 700 Material 10 buah	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 10.000.000,00	1. Pembelian material Rp. 6.000,- 2. Pembelian material Rp. 3.000,- 3. Pengiriman paket	1000 Material 700 buah 10 buah	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 10.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan 2. Pembayaran tagihan internet 3 Mbps 3. Pembayaran tagihan hosting website 4 jenis 4. Pembayaran tagihan rekening air 500 m3 5. Pembayaran tagihan rekening listrik 11.000 watt dan 22.000 watt	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 220.000.000,00	1. Pembayaran tagihan rekening telepon 2 Sambungan 2. Pembayaran tagihan internet 3 Mbps 3. Pembayaran tagihan hosting website 4 jenis 4. Pembayaran rekening tagihan air 500 m3 5. Pembayaran tagihan rekening listrik 11.000 watt dan 22.000 watt	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 220.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	11 unit	11 unit	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 18.000.000,00	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	11 unit	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 7.200.000,00 (-) Rp. 10.800.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran kepada pengelola keuangan dan kepegawaian (13 orang)	12 bulan	12 bulan	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 41.230.000,00	Bukti Pembayaran kepada pengelola keuangan dan kepegawaian (13 orang)	12 bulan	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 41.440.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : - Efisiensi DPA : - kepegawaian 3 ob @ Rp. 120.000= Rp. 360.000 , penyesuaian honor penyiap fasilitas pengembangan kinerja kepegawaian 2 ob @ Rp. 125.000 = Rp. 250.000
1.08.1.08.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembayaran honor pengelolaan sampah 2. Pembayaran biaya jasa Kebersihan 3. Pembayaran biaya jasa Kebersihan cleaning service	12 bulan 12 bulan 2 Kali	12 bulan 12 bulan 2 Kali	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 165.200.000,00	1. Pembayaran honor pengelolaan sampah 2. Pembayaran biaya jasa Kebersihan/cleaning service 3. Pembayaran biaya pengurusan IPAL Kantor BLH DIT	12 bulan 12 bulan 2 Kali	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 165.198.800,00 (-) Rp. 1.200,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan	100 %	Alat Tulis Kantor	38 jenis	38 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 28.300.000,00	Alat Tulis Kantor	38 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 28.300.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		Administrasi Perkantoran				Hidup				Hidup			Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang cetakan 2. Penggandaan	10 jenis 117000 lembar	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 35.000.000,00	1. Barang cetakan 2. Penggandaan	10 jenis 117000 lembar	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.012	Penyediaan Komponen Listrik / Peralatan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 15.000.000,00			Badan Lingkungan Hidup	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	21 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 13.000.000,00			Badan Lingkungan Hidup	Rp. 13.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Kabar 2. Majalah 3. Buku Peraturan Perundangan 4. Buku Lingkungan Hidup	3 jenis 3 jenis 20 buku 20 buku	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 16.600.000,00	1. Majalah 1. Surat Kabar 3. Buku Peraturan Perundangan 4. Buku Lingkungan Hidup	3 jenis 3 jenis 20 buku 20 buku	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 16.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan Minum Sdag	3636 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 39.996.000,00			Badan Lingkungan Hidup	Rp. 39.996.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi dan koordinasi Luar daerah	1 kegiatan 1 kegiatan	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 440.000.000,00	1. Koordinasi dan koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 kegiatan 1 kegiatan	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 440.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APAKATUR						Rp. 1.671.000.000,00				Rp. 1.667.245.900,00	(-) Rp. 3.754.100,00	
1.08.1.08.01.02.005	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Kendaraan dinas/operasional roda 4 2. Kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit 1 unit	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 620.000.000,00	1. Tersedianya kendaraan dinas/ operasional roda 4 2. Kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit 1 unit	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 619.999.900,00	(-) Rp. 100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor	18 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 200.000.000,00			Badan Lingkungan Hidup	Rp. 199.900.000,00	(-) Rp. 100.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.02.010	Pengadaan Meubelair	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Meubelair Kantor BLH DIY	3 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 60.000.000,00			Badan Lingkungan Hidup	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan	100 %	Gedung Kantor Terpelihara	18 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 110.000.000,00			Badan Lingkungan Hidup	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		pemeliharaan sarana prasarana aparatur												
1.08.1.08.01.02.024	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	100 %		Kendaraan dinas/operasional dan genset terpelihara (kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, genset)	3 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 375.000.000,00		3 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 375.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perengkapan dan Gedung Kantor	100 %		Perengkapan gedung kantor terpelihara	27 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 90.000.000,00		27 jenis	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 89.906.000,00	(-) Rp. 94.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	100 %		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 unit	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 216.000.000,00		1 unit	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 212.440.000,00	(-) Rp. 3.560.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 180.000.000,00				Rp. 180.000.000,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %		Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat meningkat	13 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 105.000.000,00		13 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 105.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %		Sumber daya aparatur yang memahami peraturan-perundang-undangan yang disosialisasikan	5 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 10.000.000,00		5 Orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.05.033	Pengembangan ISO	100 %		1. Penyempurnaan Dokumen Mutu ISO 9001:2008 BLH DIY 2. Workshop Manajemen ISO 9001:2008 BLH DIY 3. Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 dokumen 4 Kal @ 50 orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 65.000.000,00		1 dokumen 4 Kal @ 50 orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 199.134.000,00				Rp. 196.515.975,00	(-) Rp. 2.618.025,00		
1.08.1.08.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja	100 %		Nilai Lakip SKPD skor A	1 dokumen	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 15.000.000,00		1 dokumen	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 14.979.975,00	(-) Rp. 20.025,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Usuran/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	SKPD	keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				Hidup				Hidup				Penambahan : -
1.08.1.08.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatuaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Keseluruhan anggaran las dengan realisasi anggaran SKPD	10 %	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 32.000.000,00	Keseluruhan anggaran las dengan realisasi anggaran SKPD	10 %	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 31.952.000,00	(-) Rp. 48.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya penatuaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Renja, Rencana Program/ Kegiatan, RKA, DPA	1 tahun	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 45.000.000,00	Renja, Rencana Program/ Kegiatan, RKA, DPA	1 tahun	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatuaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 107.134.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 104.594.000,00	(-) Rp. 2.550.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENCELOAN PERSAMPAHAN						Rp. 543.200.000,00				Rp. 531.192.000,00	(-) Rp. 12.008.000,00		
1.08.1.08.01.15.011	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	380 unit usaha	1. Workshop Pengembangan JPSM 2. Pengadaan Peralatan Komposter 3. Inventarisasi Timbulan Sampah DIY 4. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri (instansi dan pelaku usaha)	5 Kali @ 50 orang 380 unit 1 dokumen 20 kali @ 30 orang	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 543.200.000,00	1. Workshop Pengembangan JPSM 2. Pengadaan Peralatan Komposter 3. Inventarisasi Timbulan Sampah DIY 4. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri (instansi dan pelaku usaha)	5 Kali @ 50 orang 380 unit 1 dokumen 20 kali @ 30 orang	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 531.192.000,00	(-) Rp. 12.008.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN						Rp. 4.230.763.150,00				Rp. 4.197.295.025,00	(-) Rp. 33.468.125,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Usunan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	LINGKUNGAN HIDUP	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(15)	
1.08.1.08.01.15.004	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	943 %	1. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber bahan beracun dan berbahaya . 2. Ekspos hasil pengawasan	80 Usaha/kegiatan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 89.475.000,00	1. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber bahan beracun dan berbahaya . 2. Ekspos hasil pengawasan	80 Usaha/kegiatan	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Regular APBD	(-) Rp. 2.100,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.15.007	Penggalangan Dampak Lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan	943 %	1. Penilaian dokumen AMDAL dan/atau DPL dan Penetapan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan /Rekomendasi Dokumen AMDAL,UJL-UP,dan DPL	5 dokumen	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 141.025.000,00	1. Penilaian dokumen AMDAL dan/atau DPL dan Penetapan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan /Rekomendasi Dokumen AMDAL,UJL-UP,dan DPL	5 dokumen	Badan Lingkungan Hidup	Regular APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.15.023	Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL, UJL, UPL, dan DPL	Peningkatan kualitas lingkungan	943 %	1. Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Dokumen AMDAL,UJL-UP,dan DPL 2. Teraksennanya Bimtek penyusunan laporan/dokumen lingkungan	45 usaha 120 orang/usaha	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 52.025.000,00	1. Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Dokumen AMDAL,UJL-UP,dan DPL 2. Teraksennanya Bimtek penyusunan laporan/dokumen lingkungan	45 usaha 120 orang/usaha	Badan Lingkungan Hidup	Regular APBD	(-) Rp. 1.175.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.15.026	Pengelolaan Hukum Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	943 %	1. Pengawasan dan/atau pemeriksaan melalui pengadlian dan di luar pengadilan 2. Bimbingan Teknis Pengawasan Hukum	7 kasus 1 kali/@35 orang	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 84.800.000,00	1. Pengawasan dan/atau pemeriksaan melalui pengadlian dan di luar pengadilan 2. Bimbingan Teknis Pengawasan Hukum	7 kasus 1 kali/@35 orang	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Regular APBD	(-) Rp. 18.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.15.056	Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	943 %	1. Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup	1 dokumen	Kabupaten/ Kota di DIY Yogyakarta	Rp. 46.025.000,00	1. Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup	1 dokumen	Kabupaten/ Kota di DIY Yogyakarta	Regular APBD	(-) Rp. 600.025,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.15.062	Penggiatan dan/atau pemeriksaan lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	943 %	1. Peningkatan Hari Lingkungan Hidup 2. Paneran dan Expo Produk Ramah Lingkungan	4 kali 4 lokasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 753.816.900,00	1. Peningkatan Hari Lingkungan Hidup 2. Paneran dan Expo Produk Ramah Lingkungan	4 kali 4 lokasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Regular APBD	(-) Rp. 1.275.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.08.1.08.01.15.063	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	943 %	1. Pedoman Kerja Pendampingan PPLH 2. Juklak dan Juknis PPLH di Desa 3. Demplot IPAL Limbah Batik bagi Sekolah	400 buku 400 buku 2 unit	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 613.300.000,00	1. Pedoman Kerja Pendampingan PPLH 2. Juklak dan Juknis PPLH di Desa 3. Demplot IPAL Limbah Batik bagi Sekolah	400 buku 400 buku 2 unit	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Regular APBD	(-) Rp. 11.408.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				4. Evaluasi/Penilaian Kelembagaan	4 kegiatan	Yogyakarta		4. Evaluasi/Penilaian Kelembagaan	4 kegiatan	Yogyakarta				
				5. Pelatihan Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Guru	2 kali/@ 30 orang			5. Pelatihan Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Guru	2 kali/@30 orang					
				6. Pembinaan Kembangan Pengelolaan LH kawasan sungai (2 sungai)	10 kali/ @ 30 orang			6. Pembinaan Kembangan Pengelolaan LH kawasan sungai (2 sungai)	10 kali/@ 30 orang					
1.081.08.01.15.064	Pengendalian Pencemaran Udara	Peningkatan kualitas lingkungan	9,43 %	1. Rapat Kerja(RAKER) Prohibir	4 kali/@30 orang	Badan lingkungan Hidup	Rp. 365.560.000,00	6. FGD Revisi SK Gubernur No. 176 tahun 2003	4 kali / @ 40 orang	Badan lingkungan Hidup	Rp. 349.785.000,00	(-) Rp. 15.775.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	2 kali/@ 30 orang			1. Rapat Kerja(RAKER) Prohibir	4 kali / @ 30 orang					
				3. Data dan Informasi Kualitas Udara di DIY (metode aktif dan pasif)	300 Sampel			2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	2 kali / @ 30 orang					
				4. Data dan Informasi Kualitas Udara dalam ruangan	10 Sampel			3. Data dan Informasi Kualitas Udara di DIY (1 laporan)	300 Sampel					
				5. Penyusunan Kajian Kebuan	1 dokumen			4. Data dan Informasi Kualitas Udara dalam ruangan (1 laporan)	10 Sampel					
				6. FGD Revisi SK Gubernur No. 176 tahun 2003	4 kali / @ 40 orang			5. Penyusunan Kajian Kebuan	1 dokumen					
1.081.08.01.15.065	Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9,43 %	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium BLH DIY	2 Paket	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 478.998.000,00	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium BLH DIY	2 Paket	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 478.133.000,00	(-) Rp. 865.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Pengembangan Kapasitas Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan	5 kegiatan			2. Pengembangan Kapasitas Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan	5 kegiatan					
1.081.08.01.15.066	Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3	Peningkatan kualitas lingkungan	9,43 %	1. Terlaksananya Rapat Kerja Prokash/Superkash	12 kali/@30 org	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 1.605.738.250,00	1. Terlaksananya Rapat Kerja Prokash/Superkash	12 kali/@30 org	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 1.603.388.250,00	(-) Rp. 2.350.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Air Sungai	1 unit			2. Tersusunnya dokumen Analisis Data Kualitas Air	3 jenis					
				3. Terlaksananya Pembinaan PPA da B3	14 kali/ @ 30 org			3. Terlaksananya Pembinaan PPA da B3	14 kali/ @ 30 org					
				4. Terlaksananya Kajian Daya Tanggung Sungai	1 laporan			4. Terlaksananya Kajian Daya Tanggung Sungai	1 laporan					
				5. Terlaksananya Bantuan IPAL	2 unit			5. Terlaksananya Bantuan IPAL	2 unit					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
				Komunal	1 Raperda			Komunal	1 Raperda			
				6.Terkelompok Raperda limbah cair	1 Raperda			6.Terkelompok Raperda limbah cair	1 Raperda			
				7. Terlaksananya Monev PPSP	1 laporan			7. Terlaksananya Monev PPSP	1 laporan			
				8.Terkelompok Pemantauan Kualitas Air	3 jenis			8. Terkelompok Pemantauan Kualitas Air	3 jenis			
1.08.1.08.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM						Rp. 3.983.897.000,00				Rp. 3.981.689.500,00	
1.08.1.08.01.17.026	Konservasi Sumber Daya Air dan Keanekaragaman Hayati	luas lahan yang terkonservasi terhadap luas total lahan	27 Ha	1. Terbangunnya telaga desa	2 lokasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 1.841.500.000,00	1. Terbangunnya telaga desa	2 lokasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 1.839.292.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Desain bangunan percontohan panen hujan	1 dokumen			2. Desain bangunan percontohan panen hujan	1 dokumen			
				3. Monev Konservasi SDA, Kerst dan kehati	1 laporan			3. Monev Konservasi SDA, Kerst dan kehati	1 laporan			
				4. Monitoring fluktuasi muka air tanah	90 titik			4. Monitoring fluktuasi muka air tanah	90 titik			
				5. Evaluasi pengibangan Lingkungan Hidup	3 kegiatan			5. Evaluasi pengibangan Lingkungan Hidup	3 kegiatan			
				6. Pembinaan Konservasi SDA dan Kehati	6 Kali			6. Pembinaan Konservasi SDA dan Kehati	6 Kali			
				7. Identifikasi koleksi taman kehati	2 lokasi			7. Identifikasi koleksi taman kehati	2 lokasi			
				8. Pengembangan dan pemertanian taman kehati	3 jenis			8. Pengembangan dan pemertanian taman kehati	3 jenis			
1.08.1.08.01.17.027	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	luas lahan yang terkonservasi terhadap luas total lahan	27 Ha	1. Analis Sampel tanah dan monitoring Produksi Biomassa	45 lokasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 2.142.397.000,00	1. Analis Sampel tanah dan monitoring Produksi Biomassa	45 lokasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 2.142.397.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan	6 lokasi			2. Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan	6 lokasi			
				3. Rakor pengendalian kerusakan dan raker wanadesa	13 Kali			3. Rakor pengendalian kerusakan dan raker wanadesa	13 Kali			
				4. Penanaman Vegetasi	3 lokasi			4. Penanaman Vegetasi	3 lokasi			
				5. Pengembangan/ pembangunan wanadesa	2 Paket			5. Pengembangan/ pembangunan wanadesa	2 Paket			
				6. Sosialisasi, edukasi dan Pembinaan masyarakat	31 Kali			6. Sosialisasi, edukasi dan Pembinaan masyarakat	31 Kali			

LAPORAN PERUBAHAN

TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				7. Penyusunan Raperda Wanadesa	1 dokumen			7. Penyusunan Raperda Wanadesa	1 dokumen			(15)
				8. Penyusunan Desain Wanadesa Wisata	2 dokumen			8. Penyusunan Desain Wanadesa Wisata	2 dokumen			
				9. Penyusunan Rencana Kerja Wanadesa 2016 - 2020	1 dokumen			9. Penyusunan Rencana Kerja Wanadesa 2016 - 2020	1 dokumen			
1.08.1.08.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUBSISTEM DATA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP						Rp. 860.875.500,00				Rp. 851.426.875,00	
1.08.1.08.01.19.001	Peningkatan Efikasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Persentase peningkatan akses sumberdaya lingkungan hidup	25 %	1. Pembuatan audiovisual profil lingkungan hidup	2 judul	Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 334.362.000,00	1. Pembuatan audiovisual profil lingkungan hidup	2 judul	Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 332.702.375,00	Reguler APBD
				2. Publikasi Melalui Televisi Bertema Lingkungan Hidup	6 kali			2. Publikasi Melalui Televisi Bertema Lingkungan Hidup	6 kali			
				3. Publikasi Melalui Radio Bertema Lingkungan Hidup	5 stasun			3. Publikasi Melalui Radio Bertema Lingkungan Hidup	5 stasun			
				4. Pembuatan tayangan Layanan Lingkungan Hidup	4 judul			4. Pembuatan tayangan Layanan Lingkungan Hidup	4 judul			
				5. Publikasi Lingkungan Hidup Melalui Videotron	5 lokasi			5. Publikasi Lingkungan Hidup Melalui Videotron	5 lokasi			
				6. Publikasi melalui Media Cetak Bertema Lingkungan Hidup	1 media			6. Publikasi melalui Media Cetak Bertema Lingkungan Hidup	1 media			
				7. Ekspose Hasil Pengelolaan LH Berbasis Masyarakat	1 kali			7. Ekspose Hasil Pengelolaan LH Berbasis Masyarakat	1 kali			
1.08.1.08.01.19.002	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Persentase peningkatan akses sumberdaya informasi lingkungan hidup	25 %	1. Workshop Validasi Data Lingkungan Hidup	2 kali / @ 40 orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 526.513.500,00	1. Workshop Validasi Data Lingkungan Hidup	2 kali / @ 40 orang	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 516.724.500,00	Reguler APBD
				2. Pengelolan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Online	8 jenis			2. Pengelolan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Online	8 jenis			
				3. Pembuatan sistem aplikasi data lingkungan hidup	1 buah			3. Pembuatan sistem aplikasi data lingkungan hidup	1 buah			
				4. Penyusunan buletin kalpatanu	2 edisi/ @ 550 eks			4. Penyusunan buletin kalpatanu	2 edisi/ @ 550 eks			
				5. Penyusunan Laporan SLRD Tahun 2014	1 laporan			5. Penyusunan Laporan SLRD Tahun 2014	1 laporan			
				6. Pengembangan Sistem Informasi LH	2 unit			6. Pengembangan Sistem Informasi LH	2 unit			

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan				
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/Berkurang			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)				
1.08.1.08.01.20	PROGRAM PENGINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI						Rp. 618.750.000,00				Rp. 608.548.950,00	(-) Rp. 10.201.050,00					
1.08.1.08.01.20.003	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	7 %	1. Pengujian Mutu Limbah Padat	20 Sampel	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota	Rp. 85.100.000,00	1. Pengujian Mutu Limbah Pasat	20 Sampel	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 77.179.950,00	(-) Rp. 7.920.050,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -			
				2. Pengujian Mutu Limbah Cair	60 Sampel				60 Sampel								
				3. Rapat Koordinasi Mutu Limbah	2 Kali				2 Kali								
1.08.1.08.01.20.007	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	7 %	1. Data Hasil Uji Emisi Kendaraan Bermotor	2000 kendaraan	Kabupaten/ Kota	Rp. 533.650.000,00	1. Data Hasil Uji Emisi Kendaraan Bermotor	2000 kendaraan	Kabupaten/ Kota	Rp. 531.369.000,00	(-) Rp. 2.281.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -			
				2. Pembelian alat uji emisi kendaraan (bahan bakar solar dan bensin)	2 unit				2 unit								
				3. Data hasil uji Emisi alat aktivitas produksi	46 Sampel				46 Sampel								
				4. Pembuatan label UCL UPL kendaraan dengan cerobong	1 dokumen				1 dokumen								
1.08.1.08.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						Rp. 892.180.000,00				Rp. 887.240.000,00	(-) Rp. 4.940.000,00					
1.08.1.08.01.24.005	Penataan RTH	Persentase penyediaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan	35 %	1. Pengadaan tanaman perindang (sekolah)	12 Sekolah	Kabupaten/ Kota	Rp. 892.180.000,00	1. Pengadaan tanaman perindang (sekolah)	12 Sekolah	Kabupaten/ Kota	Rp. 887.240.000,00	(-) Rp. 4.940.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -			
				2. Pengembangan RTH Perkotaan (Jalan)	105 titik				105 titik								
				3. Pengadaan Bibit Tanaman Kampung Hijau	1000 batang				1000 batang								
				4. Penanaman RTH	5 lokasi				5 lokasi								
total														(-) Rp. 89.236.625,00	Rp. 14.132.889.025,00		

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
1.	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.												
1.11.1.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 1.280.470.000,00				Rp. 1.251.408.000,00	(-) Rp. 29.062.000,00	
1.11.1.11.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Material	9000 Material	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 3.600.000,00	1. Material	9000 Material	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 3.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.11.1.11.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	3. Jaringan Internet	12 bulan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 230.000.000,00	3. Jaringan Internet	12 bulan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 203.960.000,00	(-) Rp. 26.040.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Belanja Telpn dan Listrik Penyesuaian dengan kebutuhan Penambahan : -
1.11.1.11.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2. perizinan kendaraan roda 4	7 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 6.045.000,00	2. perizinan kendaraan roda 4	7 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 3.958.000,00	(-) Rp. 2.087.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Belanja STNK disesuaikan dengan kebutuhan Penambahan : -
1.11.1.11.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	3. Pengaba Kepegawaian	2 Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 42.359.800,00	3. Pengaba Kepegawaian	1 Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 42.359.800,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.11.1.11.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tersedianya jasa Cleaning Service untuk SKPD	2 gedung	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 148.785.000,00	1. Tersedianya jasa Cleaning Service untuk SKPD	2 gedung	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 148.485.000,00	(-) Rp. 280.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Honor TIM Pengadaan Barang dan Jasa Penyesuaian SH60 Penambahan : -
1.11.1.11.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pemeliharaan Jaringan Komputer	12 bulan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 20.000.000,00	1. Pemeliharaan Jaringan Komputer	12 bulan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 19.625.000,00	(-) Rp. 375.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penyesuaian SHB Penambahan : -
1.11.1.11.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2. Pemeliharaan Komputer	35 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 32.700.200,00	2. Pemeliharaan Komputer	35 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 32.700.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.11.1.11.01.01.011	Penyediaan Barang Bekas dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	3. Pemeliharaan LCD	5 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 25.000.000,00	3. Pemeliharaan LCD	5 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.111.11.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Instalasi listrik/kabel 2. Bolam Lampu 3. stop kontak 4. Saklar, KCB, Travo	12 bulan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 15.000.000,00	1. Instalasi Lampu 3. stop kontak 4. Saklar, KCB, Travo	12 bulan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 15.000.000,00	(13)	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.111.11.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Langganan Koran 2. Buku Bacaan	3 jenis 20 buku	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 25.000.000,00	1. Langganan Koran	3 jenis	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 25.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.111.11.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman untuk rapat	3000 Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 33.000.000,00			Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 33.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.111.11.01.01.018	Bakat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Fasilitas perjalanan Dinas Dalam daerah 2. Fasilitas perjalanan Dinas luar Daerah	12 bulan 12 bulan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 449.000.000,00	1. Fasilitas perjalanan Dinas Dalam daerah 2. Fasilitas perjalanan Dinas luar Daerah	12 bulan 12 bulan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 449.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.111.11.01.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tenaga Keamanan kantor	9 Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 250.000.000,00	1. Tenaga Keamanan kantor	9 Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 249.720.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Honorarium TIM Barang dan Jasa Penyesuaian SHB Penambahan : -
1.11.11.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 1.432.255.000,00				Rp. 1.426.396.100,00	(-)	
1.111.11.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pembelian kendaraan roda 2 2. Pembelian kendaraan roda 4	3 unit 3 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 662.000.000,00	1. Pembelian kendaraan roda 2 2. Pembelian kendaraan roda 4	3 unit 3 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 662.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.111.11.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. KOMPUTER PC 10. Partisi 11. Foto Document 12. Camera 2. KOMPUTER NOTE BOOK 3. MESIN TIK MANUAL 4. AC 1 PK 5. TV Plasma 6. LCD Proyektor 7. PRINTER 8. FILLING CABINET 9. RAK Buku/Almari	6 unit 1 Paket 1 Paket 1 unit 2 unit 2 buah 1 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 9 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 363.000.000,00	1. KOMPUTER PC 10. Partisi 11. Foto Document 12. Camera 2. KOMPUTER NOTE BOOK 3. MESIN TIK MANUAL 4. AC 1 PK 5. TV Plasma 6. LCD Proyektor 7. PRINTER 8. FILLING CABINET 9. RAK Buku/Almari	15 unit 0 set 1 Paket 1 unit 5 unit 2 buah 1 unit 5 unit 6 unit 9 unit 3 unit 9 unit	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 363.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : pengeseran rekening belanja Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.111.11.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan	100 %	pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Rp. 175.900.000,00	pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Rp. 175.900.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang terdapat dalam anggaran kelancaran tugas dan fungsi SKPD				Perempuan dan Masyarakat				Perempuan dan Masyarakat			Penambahan : -
1.11.1.11.01.06.018	Penyusunan Rencana Kegiatan SKPD dan Pengumpulan Data dan Informasi	Terwujudnya kelancaran manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan	5 dokumen	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 154.627.250,00	Dokumen perencanaan	5 dokumen	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 154.627.250,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : pengeseran antar kegiatan ke SKPD Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.11.1.11.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan money kegiatan SKPD	12 laporan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 16.698.800,00	Laporan money kegiatan SKPD	12 laporan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 16.698.800,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.11.1.11.01.17	PROGRAM PENGHIMPUNAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN						Rp. 2.044.661.775,00				Rp. 2.059.306.775,00		
1.11.1.11.01.17.030	peningkatan perlindungan korban perempuan dan anak kekerasan	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. TOT SDM Pelayanan dan Perlindungan Korban KDRT	1480 Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 1.728.731.775,00	1. TOT SDM Pelayanan dan Perlindungan Korban KDRT	1480 Orang	Bambang Ijuro Kecamatan Bantul Gamping Gedung sari Kasihan Mlati Pengasih Payen Sempu Semon Sewon Sleman Tegalejo Unbuharjo Wates	Rp. 1.749.081.775,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA : (*) Sewa Ruang Kantor dan Ruang Penyusutan Standstrem disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan Penambahan : penyusunan kajian/ pemetaan buku perlindungan anak dan keluarga
1.11.1.11.01.17.031	Pengembangan Data gender dan anak perempuan dan anak	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. Update Data Terpihah Gender dan Anak Tahun 2015	1 Paket	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 315.950.000,00	1. Update Data Terpihah Gender dan Anak Tahun 2015	1 Paket	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 310.225.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.1.11.01.18	PROGRAM Peningkatan PERAN SERTA DAN KESETARAAN BERKUALITAS PEMANGUNAN*						Rp. 1.024.900.000,00				Rp. 985.865.175,00	(-) Rp. 39.034.825,00
1.11.1.11.01.18.024	Pembiayaan Penguatan Gender	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan dan lembaga pemertintah	3,62 %	1. Fasilitas PUG 2. Pengembangan Materi KIE PUG	1 Paket 10 paket (Kurikulum, Perencanaan, Organisasi, Perempuan, PUG, Politik, Integrasi Gender dan Perencanaan de	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Rp. 1.024.900.000,00	1. Fasilitas PUG 2. Pengembangan Materi KIE PUG	1 Paket 10 paket (Kurikulum, Perencanaan, Organisasi, Perempuan, PUG, Politik, Integrasi Gender dan Perencanaan de	Bambanglipuro Banguntapan Bantul Gamping Klaten Kojoharjo Mlati Pondok Pangasih Playen Prambanan Semn Sewono Siemang Sewegan Tegalrejo Umbluhharjo Wates	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.11.1.11.01.20	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER						Rp. 1.363.425.000,00				Rp. 1.363.425.000,00	Rp. 0,00
1.11.1.11.01.20.009	Peningkatan dan pengembangan kelembagaan perempuan dan anak	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75,14 %	1. Fasilitas Kelembagaan perempuan 2. Pembinaan P2WKSS 3. Akreditasi Kecamatan Siyang Ibu	75 Organisasi 5 kab / Kota 5 Kab / Kota	5 kabupaten / Kota se-DIY	Rp. 1.363.425.000,00	1. Fasilitas Kelembagaan perempuan 2. Pembinaan P2WKSS 3. Akreditasi Kecamatan Siyang Ibu	75 Organisasi 5 Kab / Kota 5 Kab / Kota	DIY	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.11.1.11.01.21	PROGRAM Peningkatan KUALITAS HIDUP KELUARGA PERLINDUNGAN ANAK						Rp. 2.294.633.100,00				Rp. 2.282.575.600,00	(-) Rp. 12.057.500,00
1.11.1.11.01.21.001	Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	329 kasus	1. Advokasi Kecamatan Layak Anak 2. Fasilitas Forum Anak Daerah 3. Kajian data Perlindungan Anak	10 kecamatan 1 Paket (Lanbore, HAN, Pengiriman Duta Anak 1 dokumen kajian	Banguntapan Gedang sari Girimulyo Klaten Pangasih Pondok Siemang Tanjungsari Umbluhharjo	Rp. 2.294.633.100,00	1. Advokasi Kecamatan Layak Anak 2. Fasilitas Forum Anak Daerah 3. Kajian data Perlindungan Anak	10 kecamatan 1 Paket (Lanbore, HAN, Pengiriman Duta Anak 1 dokumen kajian	Bambanglipuro Banguntapan Bantul Gamping Klaten Kojoharjo Mlati Pondok Pangasih Playen Prambanan Semn Sewono Siemang Sewegan Tegalrejo Umbluhharjo Wates	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Penyesuaian SHB (Pengandaian & Mkt. naian Umum) Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang		
1.11.1.11.01.22	PROGRAM Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Rp. 1.527.275.000,00	(9)	(10)	(11)	Rp. 1.518.650.000,00	(-) Rp. 8.625.000,00	(13)	(15)
1.11.1.11.01.22.004	Pemberdayaan Peranan Perempuan di bidang Ekonomi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	96,66 %	1. Penguatan dan Pengembangan desa prima	50 desa prima	5 kabupaten / kota	Rp. 1.527.275.000,00	1. Penguatan dan Pengembangan desa prima	50 desa prima	Banguntapan Cangeringan Gedang Sari Imogiri Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Lendah Mangarjan Minggir Mlati Ngasutan Nanggulan Ngawen Ngemplak Pakem Parjatan Pengasih Playen Porjong Pundikan Puriandari Samigaluh Sanden Semanu Semin Sentolo Sewon Senggan Sungsari Tegalrejo Umbulharjo Wates	Rp. 1.518.650.000,00	(-) Rp. 8.625.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Penyesuaian SHB) (MM Harian Umum) Penambahan : -
1.11.1.11.01.23	PROGRAM Peningkatan Kelembagaan Perempuan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Rp. 958.345.000,00	(9)	(10)	(11)	Rp. 949.945.000,00	(-) Rp. 8.400.000,00	(13)	(15)
1.11.1.11.01.23.002	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	11,06 %	1. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam pengambilan keputusan	30 kecamatan	30 kecamatan, 60 organisasi	Rp. 958.345.000,00	1. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam pengambilan keputusan	30 kecamatan	Banguntapan Bartul Cangeringan Galur Gemplang Karangmojo Godean Imogiri Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Klaten Krokak Lendah Mangarjan Moyudan Nanggulan Ngemplak	Rp. 949.945.000,00	(-) Rp. 8.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Sewa Ruang/Tempat hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)
1.12.1.11.01.26.003	Pembinaan KB dan Pelayan KB	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %	1. Penjangkauan calon akseptor KB 2. Penjangkauan Kapasitas Babinsa dalam mendukung Program KB 3. Fasilitas Bakti Sosial Pelayanan KB	75 kecamatan 500 Orang 15 kl	75 kecamatan	Rp. 579.425.000,00	1. Penjangkauan calon akseptor KB 2. Penjangkauan Kapasitas Babinsa dalam mendukung Program KB 3. Fasilitas Bakti Sosial Pelayanan KB	75 kecamatan 500 Orang 15 kl	DIY	Rp. 578.675.000,00	(-) Rp. 750.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Honorarium Non PNS Penyesuaian SHBJ Penambahan : -	
1.12.1.11.01.26.006	Pemberdayaan Keluarga dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, Narkoba dan PMS	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %	1. Fasilitas LSM Peduli HIV/AIDS dan Napza 2. Pembentukan kelompok Sadar HIV/AIDS	6 lembaga 10 kecamatan	Banguntapan Bantul Gamping Pengasih Playen Tegayun Tegalrejo Umbulharjo Wates	Rp. 185.443.000,00	1. Fasilitas LSM Peduli HIV/AIDS dan Napza 2. Pembentukan kelompok Sadar HIV/AIDS	6 lembaga 10 kecamatan	Banguntapan Bantul Gamping Pengasih Playen Tegayun Tegalrejo Umbulharjo Wates	Rp. 185.443.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.12.1.11.01.27	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA						Rp. 2.575.107.000,00				Rp. 2.568.557.000,00	(-) Rp. 6.550.000,00			
1.12.1.11.01.27.003	Pembinaan Kethanan Keluarga	Persentase tahapan keluarga sejahtera a	44,1 %	1. Penjangkauan Kapasitas Tenaga Lini Lapangan 2. Fasilitas bagi Lini Lapangan 3. Fasilitas Kelompok UPPKS	0 5 kab/kota 5308 Orang 40 kelompok	5 kabupaten / kota	Rp. 2.575.107.000,00	1. Penjangkauan Kapasitas Tenaga Lini Lapangan 2. Fasilitas bagi Lini Lapangan 3. Fasilitas Kelompok UPPKS	0 5 kab/kota 5308 Orang 40 kelompok	DIY	Rp. 2.568.557.000,00	(-) Rp. 6.550.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.12.1.11.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN BINA KELUARGA						Rp. 1.306.964.700,00				Rp. 1.300.214.700,00	(-) Rp. 6.750.000,00			
1.12.1.11.01.28.001	Pengembangan Kethanan dan Keberdayaan Keluarga	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	23 %	1. Fasilitas Kelompok BKB 2. Fasilitas Kelompok BKR 3. Fasilitas Kelompok BKL	0 1 Paket 1 Paket 1 Paket	5 kabupaten / kota	Rp. 1.306.964.700,00	1. Fasilitas Kelompok BKB 2. Fasilitas Kelompok BKR 3. Fasilitas Kelompok BKL	0 1 Paket 1 Paket 1 Paket	DIY	Rp. 1.300.214.700,00	(-) Rp. 6.750.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
1.22.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.														
1.22.1.11.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAN*						Rp. 2.446.105.300,00				Rp. 2.438.425.300,00	(-) Rp. 7.680.000,00			

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat,

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
1.22.1.11.01.15.001	Pembudayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					1. Pembinaan LPMD/K	1 Paket	5 Kabupaten/Kota se DIY	Rp. 1.716.105.300,00	1. Pembinaan LPMD/K	1 Paket	DIY	Rp. 1.716.105.300,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Pembahasan : -
					2. BinteK RPJMDes	142 Desa			2. BinteK RPJMDes PNT_AS-Pesayandu	142 Desa					
					3. Pembinaan PNT_AS-Pesayandu	2 Paket				2 Paket					
1.22.1.11.01.15.018	Pengutan Kelengkapan Tim Penggerak PKK	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	29.16 %	Fasilitas sekretariat dan Pokja	1 paket (1 Sekartat dan 4 Pokja)	PKK Kab/Kota se DIY	Rp. 730.000.000,00	Fasilitas sekretariat dan Pokja	1 paket (1 Sekartat dan 4 Pokja)	DIY	Rp. 722.320.000,00	(-) Rp. 7.680.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Pembahasan : -
1.22.1.11.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAN							Rp. 395.275.000,00				Rp. 394.525.000,00	(-) Rp. 750.000,00		
1.22.1.11.01.16.022	Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %	37.7 %	1. Fasilitas BUMDES	262 BUMDES	BUMDES se DIY	Rp. 395.275.000,00	1. Fasilitas BUMDES	262 BUMDES	Bambang Ijuro Banguntapan Berbah Imogiri Kalisari Kalibawang Kretek Paliyaran Pangajene Pengasih Playen Ponjong Samigaluh Sanden Supto sari Sertolo Temon Wates Worasan	Rp. 394.525.000,00	(-) Rp. 750.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Honorarium Non PNS Penyesuaian SHB Pembahasan : -
1.22.1.11.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA							Rp. 1.235.634.500,00				Rp. 1.186.029.500,00	(-) Rp. 49.605.000,00		
1.22.1.11.01.17.008	Peminaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	35 %	35 %	1. Fasilitas Pembangunan Masyarakat Pedesaan melalui TMMD	10 Desa/Kelurahan	DIY	Rp. 1.235.634.500,00	1. Fasilitas Pembangunan Masyarakat Pedesaan melalui TMMD	10 Desa/Kelurahan	DIY	Rp. 1.186.029.500,00	(-) Rp. 49.605.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : pengeseran rekening belajar Efisiensi DPA : Honorarium Non PNS Penyesuaian SHB, Transportasi & Akomodasi double anggaran, Sewa proyektor (*) penyelesaian kebutuhan pembangunan Pembahasan : -
					2. Fasilitas PNPM_MP	56 kecamatan			2. Fasilitas PNPM_MP	56 kecamatan					
					3. Fasilitas Gelar TTG	1 Paket			3. Fasilitas Gelar TTG	1 Paket					
					4. Fasilitas BBGRM	2 Paket			4. Fasilitas BBGRM	2 Paket					
					5. Fasilitas KPM	78 kecamatan			5. Fasilitas KPM	78 kecamatan			(-) Rp. 16.000.000,00		
1.22.1.11.01.22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERDA/AN PEMERINTAH DESA							Rp. 1.872.200.000,00				Rp. 1.856.200.000,00	(-) Rp. 16.000.000,00		
1.22.1.11.01.22.004	Peningkatan Kapasitas Desa	Persentase profil desa sesuai standar	70 %	70 %	1. Lomba Desa	1 Paket	Lokasi terpilih adalah hasil Kabupaten/kota	Rp. 1.872.200.000,00	1. Lomba Desa	1 Paket	DIY	Rp. 1.856.200.000,00	(-) Rp. 16.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Sewa Tenda hasil dari Kementerian Dalam Negeri Pembahasan : -
					2. Profil Desa	1 Paket			2. Profil Desa	1 Paket			(-) Rp. 193.464.725,00		
Total								Rp. 23.859.423.225,00				Rp. 23.665.958.500,00	(-) Rp. 193.464.725,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial												
Kode	Usuran/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
1.	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.13	Sosial											
1.13.01	Dinas Sosial											
1.13.1.13.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 12.459.803.147,00				Rp. 12.912.590.105,00	
1.13.1.13.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya belanja perkangko dan materi	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 7.363.500,00	Tersedianya belanja perkangko dan materi	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 7.363.500,00	Reguler APBD
1.13.1.13.01.01.002	Penyediaan Jasa Perbaikan Pipa Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya perbaikan telepon, air dan listrik	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 1.058.730.000,00	Tersedianya perbaikan telepon, air dan listrik	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 39.490.000,00	Reguler APBD
1.13.1.13.01.01.006	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya KIR dan Perpanjangan STNK serta Balik Nama	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 63.421.500,00	Tersedianya KIR dan Perpanjangan STNK serta Balik Nama	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 64.137.500,00	Reguler APBD
1.13.1.13.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya terdapat administrasi keuangan, barang dan kepegawalan	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 170.061.400,00	Tersedianya terdapat administrasi keuangan, barang dan kepegawalan	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 170.061.400,00	Reguler APBD
1.13.1.13.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Kebersihan, Cleaning Servis	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 1.272.200.269,00	Jasa Kebersihan, Cleaning Servis	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 1.390.266.169,00	Reguler APBD
1.13.1.13.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 137.583.350,00	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 137.583.350,00	Reguler APBD
1.13.1.13.01.01.012	Penyediaan Instalasi Listrik/ Peralatan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat-alat listrik, elektronik dan elektronika	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 122.137.950,00	Tersedianya alat-alat listrik, elektronik dan elektronika	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 101.677.550,00	Reguler APBD
1.13.1.13.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan berupa Tabloid, Majalah dan Surat Kabar	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 27.936.000,00	Tersedianya bahan bacaan berupa Tabloid, Majalah dan Surat Kabar	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 27.936.000,00	Reguler APBD
1.13.1.13.01.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi	100 %	Tersedianya logistik kantor dan logistik	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 7.441.260.278,00	Tersedianya logistik kantor dan logistik	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 7.494.418.128,00	Reguler APBD

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		Perkantoran		untuk klien UPTD				untuk klien UPTD						gas karena kenaikan harga (12.000.000,-) PSBK; penambahan untuk pengisian tabung gas (23.210.000,-) PSTW; penambahan pengisian tabung gas (14.592.000,-) PSP; penambahan pengisian tabung gas (3.796.000,-)
1.13.1.13.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan		Rp. 138.234.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 138.234.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya kegiatan raker, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan		Rp. 234.760.000,00	Terlaksananya kegiatan raker, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 234.760.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 1.022.794.850,00	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 1.284.602.558,00	Rp. 261.817.708,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA (67.470.000,-) PSBW; penjaga keamanan baru 9 bulan (21.743.528,-) PSBK; penjaga keamanan baru 10 bin (20.957.520,-) PSBR; penjaga keamanan baru 8 bulan (66.510.500,-) PSAA; penjaga keamanan baru 9 bulan (30.239.500,-) PSTW; penjaga keamanan baru 9 bulan (10.694.000,-) PSPP; penjaga keamanan baru 9 bulan (52.860.160,-)
1.13.1.13.01.01.023	Penyediaan Jasa Paramedis	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Paramedis/ Pramuruki	12 bin		Rp. 644.400.000,00	Jasa Paramedis/ Pramuruki	12 bin	Dinas Sosial	Rp. 644.400.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya retribusi sampah	12 bulan		Rp. 2.022.000,00	Tersedianya retribusi sampah	12 bulan	Dinas Sosial	Rp. 2.022.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.01.062	Penanganan Arsip Tekstual	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tertanganinya arsip tekstual	1300 Berkas		Rp. 26.436.400,00	Tertanganinya arsip tekstual	1300 Berkas	Dinas Sosial	Rp. 26.436.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.02	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 4.747.404.800,00				Rp. 4.740.259.800,00	(-) Rp. 7.145.000,00		
1.13.1.13.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1 Paket		Rp. 61.400.000,00	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 61.400.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 1.341.184.000,00	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 1.341.184.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.009	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 462.797.000,00	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 462.487.000,00	(-) Rp. 300.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA di Induk Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.010	Pengadaan Meubeler	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana	100 %	Terlaksananya pengadaan meubeler	1 Paket		Rp. 779.462.500,00	Terlaksananya pengadaan meubeler	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 779.462.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		prasana aparatur												
1.13.1.13.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket		Rp. 826.930.000,00	Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 826.930.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun		Rp. 955.437.300,00	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Dinas Sosial	Rp. 948.592.300,00	(-) Rp. 6.845.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA di Induk Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Dinas Sosial	Rp. 74.465.000,00	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Dinas Sosial	Rp. 74.465.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun		Rp. 144.660.000,00	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	Dinas Sosial	Rp. 144.660.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1 Paket		Rp. 21.300.000,00	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 21.300.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.038	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala tanaman	1 Paket		Rp. 9.779.000,00	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala tanaman	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 9.779.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.02.042	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Rehabilitasi gedung Panti dinas Sosial	1 Paket		Rp. 70.000.000,00	Rehabilitasi gedung Panti dinas Sosial	1 Paket	Dinas Sosial	Rp. 70.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.05	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 127.976.925,00				Rp. 123.956.425,00	(-) Rp. 4.020.500,00		
1.13.1.13.01.05.007	Pembinaan, pengembangan Kualitas Profesi dan peningkatan sumberdaya aparatur Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu	40 Orang		Rp. 11.254.000,00	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu	40 Orang	Dinas Sosial	Rp. 11.254.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	100 Orang		Rp. 25.554.000,00	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	100 Orang	Dinas Sosial	Rp. 25.554.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Sumber Dana	Keterangan		
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			Anggaran	Bertambah/Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.1.13.01.05.018	Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur	50 Orang		Rp. 13.413.000,00	Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur	50 Orang	Dinas Sosial	Rp. 11.793.000,00	(-) Rp. 1.620.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.13.1.13.01.05.061	Pemantapan Pengaplikasian Pengelolaan Keuangan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pemantapan Pengaplikasian Pengelolaan Keuangan	30 Orang		Rp. 10.845.925,00	Pemantapan Pengaplikasian Pengelolaan Keuangan	30 Orang	Dinas Sosial	Rp. 9.797.425,00	(-) Rp. 1.048.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.13.1.13.01.05.063	Diklat Manajemen Pelayanan Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Diklat manajemen pelayanan sosial bagi pejabat fungsional tertentu	30 Orang		Rp. 66.910.000,00	Diklat manajemen pelayanan sosial bagi pejabat fungsional tertentu	30 Orang	Dinas Sosial	Rp. 65.558.000,00	(-) Rp. 1.352.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.13.1.13.01.06	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 91.830.550,00				Rp. 91.830.550,00			
1.13.1.13.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 keg		Rp. 5.499.900,00	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 keg	Dinas Sosial	Rp. 5.499.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	1 keg		Rp. 14.213.500,00	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	1 keg	Dinas Sosial	Rp. 14.213.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	1 keg		Rp. 57.117.300,00	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	1 keg	Dinas Sosial	Rp. 57.117.300,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	5 Kab Kota		Rp. 14.999.850,00	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	5 Kab Kota	Dinas Sosial	Rp. 14.999.850,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Sumber Dana	Keterangan		
		Tolak Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif			Lokasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		fungsi SWPD											(15)
1.13.1.13.01.19	PROGRAM Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial ASUHAN/ PANTI JOMPO						Rp. 8.358.444.300,00				Rp. 8.358.444.300,00 (-) Rp. 27.962.100,00		
1.131.13.01.19.004	Pendidikan dan Pelatihan bagi Perhuni Panti Asuhan/Jompo Asuhan/Jompo pelayanan	Persentase pelayanan panti asuhan/jompo sesuai standar pelayanan	2,28 %	Terlaksananya pelayanan dalam panti	1 tahun	Dinas Sosial	Rp. 8.386.406.400,00	Terlaksananya pelayanan dalam panti	1 tahun	Dinas Sosial	Rp. 27.962.100,00 (-)	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.13.1.13.01.20	PROGRAM PEMBIMBINGAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, SYARAF TERAKSI DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)						Rp. 7.983.060.300,00				Rp. 8.192.825.256,00		
1.131.13.01.20.015	Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persentase keberlangsungan sosial bagi Tuna Sosial	4,57 %	Bimbingan mental sosial untuk gelandangan, pengemis, dan pendulang	150 Orang	Kalasan Playen Prambanan Sentolo Prambanan Umbulharjo	Rp. 7.983.060.300,00	Bimbingan mental sosial untuk gelandangan, pengemis, dan pendulang	150 Orang	Kalasan Playen Prambanan Sentolo Prambanan Umbulharjo	Rp. 209.764.956,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : Pagar Pembatas di Camp Assessment sebesar 167.770.456; dan perencanaan pengadaan tanah camp assement 75.000.000

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				pengemis				TRC kemensos					
				Terdikannya fasilitas bagi ODHA	40 Orang			Perencanaan Pengadaan tanah camp Assessment	1 Palet				
				Terdikannya pelatihan pendamping tuna sosial dan korban penyalahgunaan narkoba	60 Org			Terdiksina fasilitas bagi ODHA	40 Orang				
				Tersedianya tempat tinggal sementara bagi ODHA yang mengalami diskriminasi dan stigma	5 Orang			Terdiksanya fasilitas bagi gelandangan, pengemis	40 KK				
								terdikannya pelatihan pendamping tuna sosial dan korban penyalahgunaan narkoba	60 Orang				
								tersedianya tempat tinggal sementara bagi ODHA yang mengalami diskriminasi dan stigma	5 Orang				
1.13.1.13.01.22	PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)*						Rp. 730.797.300,00				Rp. 730.797.300,00		
1.13.1.13.01.22.001	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepertintasan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase PSKS terbiasa dalam hal pelayanan nilai-nilai keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Facilitasi kesejahteraan keluarga pahlawan	9 Orang	Kab/kota di DIY	Rp. 451.644.750,00	Facilitasi kesejahteraan keluarga pahlawan	9 Orang	DIY	Rp. 451.644.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Facilitasi peringatan hari besar nasional (Hardiknas, Harkitnas, HUT RI, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Pahlawan)	1500 Orang			Facilitasi peringatan hari besar nasional (Hardiknas, Harkitnas, HUT RI, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Pahlawan)	1500 Orang				
				Facilitasi peringatan HSN	5000 Orang			Facilitasi peringatan HSN	5000 Orang				
				Facilitasi upacara ziarah rombongan di TMP	1 keg			Facilitasi upacara ziarah rombongan di TMP	1 keg				
				facilitasi usulan pemberian gelar pahlawan,	100 Orang			facilitasi usulan pemberian gelar pahlawan,	100 Orang				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				perintis kemerdekaan, dan penghargaan saya lencana kebaktian sosial	100 Orang			Gerakan nilai-nilai kebangsaan dan kesetia kawan sosial bagi pelajar	100 Orang				
				Gerakan nilai-nilai kebangsaan dan kesetia kawan sosial bagi pelajar	100 Orang			Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial	100 Orang				
				Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial	100 Orang			Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial	100 Orang				
				Ziarah wisata pengenalan nilai-nilai kepahlawanan	300 Orang			Ziarah wisata pengenalan nilai-nilai kepahlawanan	300 Orang				
1.13.1.13.01.22.002	Pembinaan TPMN/TPM, MPP, MPN	Persentase PKS berbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial	55 %	Pembinaan TPMN/TPM, MPP, MPN	105 Obyek	Jetis Umbulharjo Wates Wonosari	Rp. 279.152.550,00	Jumlah tempat-tempat sejarah perjuangan bangsa yang terpelihara	30 Obyek	Jetis Umbulharjo Wates Wonosari	Rp. 279.152.550,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.24	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG DISABILITAS MELAKUKAKAN KEGIATAN KEMAJU BAKTERIAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA *						Rp. 2.259.364.223,00				Rp. 2.220.164.223,00	(-) Rp. 39.200.000,00	
1.13.1.13.01.24.001	Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas Berbasis Sosial Ekonomi (PSE)	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10,84 %	Bantuan sosial pengembangan KUBE (2,8 Mj)	140 KUBE	DIY	Rp. 2.019.879.110,00	Bantuan sosial pengembangan KUBE (2,8 Mj)	140 KUBE	DIY	Rp. 1.980.679.110,00	(-) Rp. 39.200.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bantuan sosial pengembangan KUBE (2,8 Mj)	20 kelompok			Bantuan Sosial Pengembangan USEP (540Juta)	20 kelompok				
				Bantuan Sosial Pengembangan USEP (600Juta)	20 kelompok			Bantuan Sosial Pengembangan USEP (600Juta)	20 kelompok				
				Pelatihan ketrampilan dan bantuan pemberdayaan WISE	400 KK			Pelatihan ketrampilan dan bantuan pemberdayaan WISE	400 KK				
				Pemantapan dan pengembangan KUBE	140 kelompok			Pemantapan dan pengembangan KUBE	140 kelompok				
				Pemantapan dan pengembangan USEP	20 kelompok			Pemantapan dan pengembangan USEP	20 kelompok				
				Penumbuhan USEP keluarga Miskin	20 kelompok			Penumbuhan USEP keluarga Miskin	20 kelompok				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.13.1.13.01.24.002	Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pemberdayaan Bagi RTSM PKH	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	%	Bantuan Sosial (300Juta)	100 Orang	kab/kota se DIY	Rp. 103.700.313,00	Bantuan Sosial Model UEP (300Juta)	100 Orang	kab/kota se DIY	Rp. 103.700.313,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bimbingan Motivasi berusaha RTSM PKH	100 Orang			Bimbingan Motivasi berusaha RTSM PKH	100 Orang				
				Family Development session RTSM PKH	100 Orang			Family Development session RTSM PKH	100 Orang				
				Inventarisasi/ Bimbingan Lanjut	40 Orang			Inventarisasi/ Bimbingan Lanjut	40 Orang				
				Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan	1 keg			Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan	1 keg				
				Pendampingan RTSM PKH	10 Orang			Pendampingan RTSM PKH	10 Orang				
				Pengembangan Kapasitas Diri Pendamping Kegiatan	160 Orang			Pengembangan Kapasitas Diri Pendamping Kegiatan	160 Orang				
1.13.1.13.01.24.003	Perlindungan dan Jaminan Penganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial Termasuk TSKS	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10,84 %	Bantuan/ Jaminan penganti pendapatan (188,8Juta)	8 lembaga	Kab/Kota se-DIY	Rp. 135.784.800,00	Bantuan/ Jaminan penganti pendapatan (188,8Juta)	8 lembaga	Kab/Kota se-DIY	Rp. 135.784.800,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bimbingan motivasi	200 Orang			Bimbingan motivasi	200 Orang				
				Community Development Session	200 Orang			Community Development Session	200 Orang				
				Pemantauan dan Kesepakatan bersama pendamping dan pengelola	26 Orang			Pemantauan dan Kesepakatan bersama pendamping dan pengelola	26 Orang				
				Pendampingan	8 Orang			Pendampingan	8 Orang				
				Pengelolaan Data Base	2 Orang			Pengelolaan Data Base	2 Orang				
1.13.1.13.01.25	PROGRAM PENJAJARAN PARA PEKERJA SAKIT/ DISABILITAS DAN TRAUMA						Rp. 489.126.600,00				Rp. 489.126.600,00		
1.13.1.13.01.25.001	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	5,51 %	Astistensi keluarga penyandang disabilitas	58 Orang	kab/kota se-DIY	Rp. 489.126.600,00	Astistensi keluarga penyandang disabilitas	58 Orang	DIY	Rp. 489.126.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bantuan operasional untuk RBM (10Juta)	1 lembaga			Bantuan operasional untuk RBM (10Juta)	1 lembaga				
				Bimbingan pengembangan usaha mandiri penyandang disabilitas	30 Orang			Bimbingan pengembangan usaha mandiri penyandang disabilitas	30 Orang				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Family gathering untuk penyandang disabilitas	900 Orang			Family gathering untuk penyandang disabilitas	900 Orang				
				Komite penyandang disabilitas	12 Orang			Komite penyandang disabilitas	12 Orang				
				Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	15 Orang			Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	15 Orang				
1.13.1.13.01.26	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK BERMASALAH SOSIAL *						Rp. 1.415.234.150,00				Rp. 1.415.234.150,00	Rp. 0,00	
1.13.1.13.01.26.001	Perindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8,34 %	Bantuan kesjahteraan sosial anak (1,34)	1500 anak	kab/kota se-DIY	Rp. 1.415.234.150,00	Bantuan kesjahteraan sosial anak (1,34)	1500 anak	DIY	Rp. 1.415.234.150,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bantuan Lembaga Sosial Anak dan Bantuan bagi Pendamping Anak (300Juta)	12 lembaga			Bantuan Lembaga Sosial Anak dan Bantuan bagi Pendamping Anak (300Juta)	12 lembaga				
				Bantuan operasional FKADK se DIY (88Juta)	5 lembaga			Bantuan operasional FKADK se DIY (88Juta)	5 lembaga				
				Bantuan operasional Komite ABH (35Juta)	1 lembaga			Bantuan operasional Komite ABH (35Juta)	1 lembaga				
				Bantuan operasional USCA Tim Perindungan anak (85Juta)	5 lembaga			Bantuan operasional USCA Tim Perindungan anak (85Juta)	5 lembaga				
				Bantuan operasional LPA (30 juta)	1 lembaga			Bantuan operasional LPA (30 juta)	1 lembaga				
				Bantuan operasional rumah singgah (75Juta)	3 lembaga			Bantuan operasional rumah singgah (75Juta)	3 lembaga				
				Bantuan operasional yayasan Sayap Ibu (25Juta)	1 lembaga			Bantuan operasional yayasan Sayap Ibu (25Juta)	1 lembaga				
				Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ABH (37,5Juta)	15 anak			Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ABH (37,5Juta)	15 anak				
				Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak dengan HIV/AIDS (46Juta)	1 lembaga			Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak dengan HIV/AIDS (46Juta)	1 lembaga				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak disabilitas (500Juta)	200 anak			Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak disabilitas (500Juta)	200 anak				
				Bimbingan sosial anak jalanan hasil penjangkauan	25 anak			Bimbingan sosial anak jalanan hasil penjangkauan	25 anak				
				Fasilitasi dan KIE adopsi bagi anak balita terlantar	30 anak			Fasilitasi dan KIE adopsi bagi anak balita terlantar	30 anak				
				Jaminan hidup bagi ADHA	20 anak			Jaminan hidup bagi ADHA	20 anak				
				Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar luar panti	1500 anak			Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar luar panti	1500 anak				
				Pengasramaan murid SLB	50 anak			Pengasramaan murid SLB	50 anak				
				Perlindungan ABH berbasis keluarga	15 anak			Perlindungan ABH berbasis keluarga	15 anak				
				Perlindungan bagi anak cacat berbasis keluarga	200 anak			Perlindungan bagi anak cacat berbasis keluarga	200 anak				
				Rumah perlindungan sosial bagi anak yang hidup dijalanan dan PMKS	20 anak			Rumah perlindungan sosial bagi anak yang hidup dijalanan dan PMKS	20 anak				
1.13.1.13.01.27	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR						Rp. 1.558.554.150,00				Rp. 1.558.554.150,00	Rp. 0,00	
1.13.1.13.01.27.001	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	8,51 %	Bantuan operasional (50Juta)	1 lembaga	kab/kota se-DIY	Rp. 1.558.554.150,00	Bantuan operasional (50Juta)	1 lembaga	DIY	Rp. 1.558.554.150,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bantuan operasional FK Orsos LU DIY (75Juta)	1 lembaga			Bantuan operasional FK Orsos LU DIY (75Juta)	1 lembaga				
				Bantuan pemakanan bagi lanjut usia terlantar	400 Orang			Bantuan pemakanan bagi lanjut usia terlantar	400 Orang				
				Bantuan uang tunai JSLU (1,8M)	2000 Orang			Bantuan uang tunai JSLU (1,8M)	2000 Orang				
				Bantuan UEP lanjut usia terlantar	200 Orang			Bantuan UEP lanjut usia terlantar	200 Orang				
				Jaminan sosial lanjut usia terlantar	2000 Orang			Jaminan sosial lanjut usia terlantar	2000 Orang				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah /Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				Pelayanan lanjut usia melalui Homecare	600 Orang			Pelayanan lanjut usia melalui Homecare	600 Orang					
1.13.1.13.01.28	PROGRAM PEMANGUNGAN DAN PEMANGGULANGAN BENCANA						Rp. 1.304.117.350,00				Rp. 1.304.117.350,00	Rp. 0,00		
1.13.1.13.01.28.001	Penggiatan Pemanggunan dan Pemanggulan Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9,34 %	Pelayanan bantuan sosial disalurkan air bersih bagi korban bencana kekeringan	553 tanki	Kab/kota se- DIY	Rp. 1.208.274.850,00	Jumlah Kampung Siaga bencana	4 lokasi	Kab/Kota se DIY	Rp. 1.208.274.850,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pembentukan dan pelatihan kelompok korban Siaga Bencana	4 lokasi			Pelayanan bantuan sosial disalurkan air bersih bagi korban bencana kekeringan	553 tanki					
				Pembentukan dan pelatihan kelompok korban Siaga Bencana	20 lokasi			Pembentukan dan Pelatihan Sosial Siaga Bencana	20 lokasi					
				Sarasehan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana sosial	5 lokasi			Sarasehan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana sosial	5 lokasi					
1.13.1.13.01.28.002	Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlarang	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9,34 %	Memfasilitasi orang terlarang yang kehilangan bekal untuk melanjutkan perjalanan	1 tahun	DIY dan Luar DIY	Rp. 95.842.500,00	Memfasilitasi orang terlarang yang kehilangan bekal untuk melanjutkan perjalanan	1 tahun	DIY dan Luar DIY	Rp. 95.842.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.13.1.13.01.29	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL						Rp. 130.848.050,00				Rp. 130.848.050,00	Rp. 0,00		
1.13.1.13.01.29.001	Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Tidak Kekerasan (TKN) serta Korban Trafficking	Persentase keberfungsian sosial bagi korban kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan	6,34 %	Bantuan Modal UEP KTK (420Juta)	140 Orang	Kab/kota se-DIY	Rp. 130.848.050,00	Bantuan Modal UEP KTK (420Juta)	140 Orang	DIY	Rp. 130.848.050,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bantuan Modal UEP KTK (30Juta)	10 Orang			Bantuan Modal UEP KTK (30Juta)	10 Orang					
				Bimbingan motivasi berusaha klien KTK	140 Orang			Bimbingan motivasi berusaha klien KTK	140 Orang					
				Bimbingan motivasi berusaha klien PMB	10 Orang			Bimbingan motivasi berusaha klien PMB	10 Orang					
				Bimbingan tenis petugus	10 Orang			Bimbingan tenis petugus	10 Orang					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				inventarisasi perkembangan usaha klien				Case conference & need assessment	20 Orang				
				Case conference & need assessment	20 Orang			Pendampingan	80 Orang				
				Rakor dengan instansi terkait peduli masalah KTK dan PHB	10 Orang			Rakor dengan instansi terkait peduli masalah KTK dan PHB	10 Orang				
1.13.1.13.01.30	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)*						Rp. 3.110.051.300,00				Rp. 3.106.581.300,00	(-) Rp. 3.470.000,00	
1.13.1.13.01.30.001	Pengkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	Penerbitase PSKS dalam rangka pengurangan kesenjangan sosial	67,5 %	Bantuan kinerja kelembagaan organisasi keagamaan jawa sosial dunia usaha (CSR) dalam penyelenggaraan kesos (25juta)	1 lembaga	Kab/kota se-DIY	Rp. 3.110.051.300,00	Bantuan kinerja kelembagaan organisasi keagamaan jawa sosial dunia usaha (CSR) dalam penyelenggaraan kesos (25juta)	1 lembaga	DIY	Rp. 3.106.581.300,00	(-) Rp. 3.470.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Pemahaman : -
				Bantuan kinerja kelembagaan organisasi keagamaan jawa sosial dunia usaha (CSR) dalam penyelenggaraan kesos (25juta)	5 lembaga			Bantuan kinerja kelembagaan organisasi keagamaan jawa sosial dunia usaha (CSR) dalam penyelenggaraan kesos (25juta)	5 lembaga				
				Bantuan kinerja kelembagaan organisasi keagamaan jawa sosial dunia usaha (CSR) dalam penyelenggaraan kesos (25juta)	1 lembaga			Bantuan kinerja kelembagaan organisasi keagamaan jawa sosial dunia usaha (CSR) dalam penyelenggaraan kesos (25juta)	1 lembaga				
				Bantuan operasional bagi forkom WKSBM (72.690.000)	1 lembaga			Bantuan operasional bagi forkom WKSBM (72.690.000)	1 lembaga				
				Bantuan operasional bagi forkom WKSBM (5juta)	1 lembaga			Bantuan operasional bagi forkom WKSBM (5juta)	1 lembaga				
				Bantuan operasional bagi IPSM Kabupaten/Kota dalam rangka pendampingan (25juta)	5 lembaga			Bantuan operasional bagi IPSM Kabupaten/Kota dalam rangka pendampingan (25juta)	5 lembaga				
				Bantuan operasional bagi Karang Tanua DIY (95juta)	1 lembaga			Bantuan operasional bagi Karang Tanua DIY (95juta)	1 lembaga				
				Bantuan operasional bagi WKSBM (25juta)	25 lembaga			Bantuan operasional bagi WKSBM (25juta)	25 lembaga				
				Bantuan operasional FKPSM Provinsi DIY dalam rangka pendampingan (25juta)	1 lembaga			Bantuan operasional FKPSM Provinsi DIY dalam rangka pendampingan (25juta)	1 lembaga				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah /Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Bantuan operasional IPSM kecamatan dalam rangka pendampingan (156Juta)	78 lembaga			Bantuan operasional IPSM kecamatan dalam rangka pendampingan (156Juta)	78 lembaga				
				bantuan operasional LK3 (30Juta)	1 lembaga			bantuan operasional LK3 (30Juta)	1 lembaga				
				Bantuan operasional TSKK dalam rangka pendampingan (581.600.000)	936 OB			Bantuan operasional TSKK dalam rangka pendampingan (581.600.000)	936				
				Bantuan UEP WKSBM (125Juta)	25 lembaga			Bantuan UEP WKSBM (125Juta)	25 lembaga				
				Bimbingan Konsultasi timbal balik, Penumbuhan dan pembinaan UEP untuk lanjut bagi orsos/ LKS serta pertemuan NGO asing dan mitra lokal, bmtk dasar pekos pent sosial/ LKS dan mitra orsos berprestasi	104 Orsos			Bimbingan Konsultasi timbal balik, Penumbuhan dan pembinaan UEP untuk lanjut bagi orsos/ LKS serta pertemuan NGO asing dan mitra lokal, bmtk dasar pekos pent sosial/ LKS dan mitra orsos berprestasi	104 Orsos				
				Bimbingan manajemen dan UEP bagi Karang Taruna	120 KT			Bimbingan manajemen dan UEP bagi Karang Taruna	120 KT				
				bimbingan teknis tenaga penyuluh sosial masyarakat	60 Orang			bimbingan teknis tenaga penyuluh sosial masyarakat	60 Orang				
				Fasilitasi kelembagaan WKSBM	111 wkdbm			Fasilitasi kelembagaan WKSBM	111 wkdbm				
				Pelatihan dan Ketrampilan berusaha bagi PSN	262 Orang			Pelatihan dan Ketrampilan berusaha bagi PSN	262 Orang				
				Pelatihan dan ketrampilan berusaha bagi TSKK	78 Orang			Pelatihan dan ketrampilan berusaha bagi TSKK	78 Orang				
				Pembinaan LK3	11 LK3			Pembinaan LK3	11 LK3				
				Pengembangan kapasitas diri pendamping dan rekonsiliasi	60 Orang			Pengembangan kapasitas diri pendamping dan rekonsiliasi	60 Orang				
				Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	1 keg			Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	1 keg				
				Penyngaran dan peningkatan	850 Orang			Penyngaran dan peningkatan	850 Orang				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Uraian/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				kapasitas TAGANA dalam rangka keselapsagaan				kapasitas TAGANA dalam rangka keselapsagaan					
				Temu kanya daerah karang taruna	1 keg			Temu kanya daerah karang taruna	1 keg				
				Workshop CSR	1 keg			Workshop CSR	1 keg				
1.13.1.13.01.31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						Rp. 1.600.696.100,00				Rp. 1.600.696.100,00	Rp. 0,00	
1.13.1.13.01.31.001	Pendidian, Penyuluhan, Edukasi, dan Promosi Kesejahteraan Sosial	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	39,72 %	Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas	450 Org	DIY	Rp. 1.600.696.100,00	Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas	450 Orang	desa se Kab/kota di DIY	Rp. 1.600.696.100,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengumpulan Data LIS se DIY	1 keg			Pengumpulan Data LIS se DIY	1 kegiatan				
				Penyuluhan Melalui Media Kesenian Tradisional	29 Desa			Penyuluhan Melalui Media Kesenian Tradisional	29 Desa				
				Penyuluhan Sosial Melalui Baleho	20 unit			Penyuluhan Sosial Melalui Baleho	20 unit				
				Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	25 Desa			Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	25 Desa				
				Sosialisasi Program Penanganan PMKS	70 Desa			Sosialisasi Program Penanganan PMKS	70 Desa				
				Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20 lokasi			Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20 lokasi				
				Updating data PMKS dan PSKS	438 Desa			Updating data PMKS dan PSKS	438 Desa				
				Workshop Penyuluhan Sosial Melalui Media Seni Budaya	1 keg			Workshop Penyuluhan Sosial Melalui Media Seni Budaya	1 keg				
Total											Rp. 46.976.025.659,00	Rp. 580.754.314,00	

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015													
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.													
Kode	Usuran/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.14	Ketenagakerjaan												
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.												
1.14.1.14.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN						Rp. 2.724.974.000,00				Rp. 2.756.856.824,00		
1.14.1.14.01.01.001	Penyediaan Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Perangko, meterai, paket pengiriman	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 16.960.000,00	Perangko, meterai, paket pengiriman	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 16.960.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : UPTD BLUKP : Racionalisasi dengan pengurangan biaya pengiriman menjadi pembelian perangko yang sangat dibutuhkan.
1.14.1.14.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Telepon, Air, Listrik, Internet	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 745.095.000,00	Telepon, Air, Listrik, Internet	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 772.177.824,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : INDIUK : Adanya Pengeseran Biaya Listrik ke Telepon, BLUKP : Efisiensi Rp. 2.596.000,-, Tambahan HIPERKES : Rp. 29.678.824
1.14.1.14.01.01.006	Penyediaan Jasa Pengiriman dan Perjalanan Pengiriman dan Dinas Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Jasa KIR, STNK Roda 4, STNK Roda 2	58 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 24.135.000,00	Jasa KIR, STNK Roda 4, STNK Roda 2	58 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 24.435.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Tambahan HIPERKES : Pajak Kendaraan Rp. 300.000,-, BLUKP : efisiensi Rp. 300.000,-
1.14.1.14.01.01.007	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37 Orang	Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi	Rp. 85.405.900,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 89.905.900,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Tambahan INDIUK : Penambahan honor pengesahan surat 3.600.000,- dan Honor Pengadaa Kepegawaian Rp. Rp.900.000,-
1.14.1.14.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 462.300.000,00	Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 462.300.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 76.754.100,00	Alat Tulis Kantor	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 76.754.100,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Cetakan , Foto copy , Peijilidan	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 58.248.000,00	Cetakan , Foto copy , Peijilidan	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 58.248.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pengangan Bagian Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Alat listrik dan elektronika	42 jenis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 29.313.000,00	Alat listrik dan elektronika	45 jenis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 29.313.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 43.828.000,00	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 43.828.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.01.015	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Surat kabar	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 16.750.000,00	Surat kabar	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 16.750.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Penyediaan logistik kantor	13 jenis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 24.434.000,00	Penyediaan logistik kantor	13 jenis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 24.434.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %	Penyediaan jaman makanan dan minuman	12 bulan	Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi	Rp. 28.934.000,00	Penyediaan jaman makanan dan minuman	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 28.934.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
1.14.1.14.01.01.018	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)
	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	Rapat rapat koordinasi	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 304.805.000,00	Rapat rapat koordinasi	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 304.805.000,00	Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja		100 %	Petugas keamanan PTT , Petugas keamanan (pihak ketiga)	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 808.012.000,00	Petugas keamanan PTT , Petugas keamanan (pihak ketiga)	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 808.012.000,00	Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 8.848.582.000,00				Rp. 8.923.332.000,00	Rp. 74.750.000,00			
1.14.1.14.01.02.005	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional		100 %	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	7 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 401.000.000,00	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	7 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 401.000.000,00	Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		100 %	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 586.570.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 586.060.000,00	(-) Rp. 510.000,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100 %	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	197 jenis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 2.089.782.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	197 jenis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 2.089.162.000,00	(-) Rp. 620.000,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi dari Evaluasi kemandagri Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.010	Pengadaan Mebelkur		100 %	Pengadaan Mebelkur	217 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 330.540.000,00	Pengadaan Mebelkur	217 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 330.420.000,00	(-) Rp. 120.000,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi dari hasil evaluasi kemandagri Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21 Paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 1.403.644.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	22 Paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 1.479.644.000,00	Rp. 76.000.000,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Pembuatan Selat untuk Ruang Rapat.
1.14.1.14.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 549.173.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58 unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 549.173.000,00	Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 81.900.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 81.900.000,00	Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.14.1.14.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 97.400.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 97.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 48.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 48.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.036	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 7.694.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 7.694.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	8 Paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 3.177.379.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	8 Paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 3.177.379.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kaskah Dinas	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kaskah Dinas	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 75.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kaskah Dinas	12 bulan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 75.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.05	PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 216.532.000,00				Rp. 216.532.000,00		
1.14.1.14.01.05.007	Pembiinan, Pengembangan Kapasitas Profesi dan Keahlian Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu	Terdwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Penilaian angka kredit jabatan fungsional dan BLKPP	43 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 11.478.000,00	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	73 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 11.478.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.05.029	Pengembangan ISO	Terdwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Surveilance lab terakreditasi ISO dan Manajemen mutu (Kirkpatrik dan BLKPP)	3 Paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 137.722.000,00	Surveilance ISO 9001, Surveilance ISO 17025 tahun 2005	3 Paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 137.722.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.05.032	Pengembangan Kualitas SDM	Terdwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Peningkatan kualitas pegawai	145 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 67.332.000,00	Peningkatan kualitas pegawai	140 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 67.332.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.06	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 639.806.000,00				Rp. 639.806.000,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.14.1.14.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 11.800.000,00	Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 11.800.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.06.017	penyusunan laporan keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Laporan Keuangan semester an prognosis realisasi anggaran 2. Laporan Keuangan akhir tahun	2 dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 22.401.000,00	1. Laporan Keuangan semester an prognosis realisasi anggaran 2. Laporan Keuangan akhir tahun	2 dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 22.401.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen program kegiatan dan data informasi	5 dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 361.605.000,00	Dokumen program kegiatan dan data informasi	5 dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 361.605.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Monev program kegiatan dan pelaporan	13 laporan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 244.000.000,00	Monev program kegiatan dan pelaporan	13 laporan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 244.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.15	PROGRAM PENGINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						Rp. 11.630.821.000,00					(-) Rp. 113.227.500,00		
1.14.1.14.01.15.001	Paatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasiskan masyarakat	25 %	Lulusan pelatihan yang trampil dan kompeten	1140 Orang	DIY	Rp. 3.063.563.900,00	Lulusan pelatihan yang trampil dan kompeten	1140 Orang	DIY	Rp. 3.041.311.400,00	(-) Rp. 22.252.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA dari Hasil Evaluasi Kendagri Penambahan : -
1.14.1.14.01.15.002	Sertifikasi Uji Kompetensi	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	25 %	Peserta yang mengikuti sertifikasi Uji Kompetensi dan pembinaan pelatihan berbasis kompetensi	190 Orang	DIY	Rp. 279.863.000,00	Peserta yang mengikuti sertifikasi Uji Kompetensi dan pembinaan pelatihan berbasis kompetensi	190 Orang	DIY	Rp. 279.863.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		dan berbasis masyarakat											
1.14.1.14.01.15.003	Pemagangan Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Sosialisasi, Prosedksi, Seleksi, Magang Jepang, Magang Perusahaan, Pembinaan pasca magang	680 Orang	DIY	Rp. 2.590.148.000,00	Peserta magang di tempat pemagangan	680 Orang	DIY	Rp. 2.590.148.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.15.004	Pelatihan Hibekes Pembentukan wrausaha Baru	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Peserta Mendapatkan Pelatihan wirausaha	520 Orang	DIY	Rp. 382.198.100,00	Peserta Mendapatkan Pelatihan wirausaha	520 Orang	DIY	Rp. 382.198.100,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.15.005	Pelatihan Hibekes Keselamatan Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Peserta Mendapatkan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja	540 Orang	DIY	Rp. 486.315.000,00	Peserta mendapatkan pelatihan Keselamatan dan kesehatan Kerja	540 Orang	DIY	Rp. 486.315.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.15.006	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit (MTU)	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Lulusan pelatihan yang terampil dan inovatif	600 Orang	DIY	Rp. 4.528.733.000,00	Lulusan pelatihan yang terampil dan inovatif	600 Orang	DIY	Rp. 4.528.733.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA dari Hasil evaluasi Kendagri Penambahan : -
1.14.1.14.01.16	PROGRAM PENGHATKAN KEMAMPUAN KERJA						Rp. 13.713.987.100,00				Rp. 13.713.987.100,00		
1.14.1.14.01.16.001	Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah	Persentase besaran tenaga kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Dokumen perencanaan pengurangan pengangguran dan kerjasama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam bidang ketransmigrasian	3 rumusan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 197.800.000,00	Dokumen perencanaan pengurangan pengangguran dan kerjasama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam bidang ketransmigrasian	3 rumusan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 197.800.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.16.002	Promosi dan Informasi Ketransmigrasian	Persentase besaran tenaga kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Layanan informasi Ketransmigrasian dan Ketransmigrasian	10 Tayangan TV	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 330.175.000,00	Layanan Informasi Ketransmigrasian dan Ketransmigrasian	10 kali tayang TV	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 335.175.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.16.003	Pengurangan pengangguran melalui peningkatan infrastruktur	Persentase besaran tenaga kerja terhadap	9,5 %	Sosialisasi dan Pembuatan sarana infrastruktur	3600 Orang	DIY	Rp. 6.164.455.600,00	terlekasanya kegiatan pemodasan/perbaikan sarana infrastruktur	3600 Orang	DIY	Rp. 6.164.455.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		Jumlah pencari kerja						masyarakat melalui sistem padat karya 30 lokasi						
1.14.1.14.01.16.004	Penyusunan PTDO (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja daerah	1 dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 102.387.000,00	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja daerah	1 dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 102.387.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.16.005	Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca)	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Bimtek Pendamping TKA	25 Orang	DIY	Rp. 109.128.500,00	Bimtek pendamping TKA	125 25 Orang	DIY	Rp. 109.128.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
		Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja		Pemantauan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penyandang Cacat	175 perusahaan			Pemantauan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penyandang Cacat	175 perusahaan					
1.14.1.14.01.16.006	Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Tertaksananya Penyusunan IPK	110 buku	DIY	Rp. 344.030.000,00	Informasi Pasar Kerja dan Bursa yang terdapat di Bursa Kerja	7000 pengujung	DIY	Rp. 344.030.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
		Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja		Terselenggaranya Bursa Kerja Terbuka	7000 pengujung				110 buku					
1.14.1.14.01.16.007	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAD	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Pembekalan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD	1000 Orang	DIY	Rp. 431.350.000,00	Pembekalan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD	600 Orang	DIY	Rp. 431.350.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.16.008	Penetapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI)	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan TTTG dan TKMSI	600 Orang	DIY	Rp. 1.748.881.700,00	Peserta mendapatkan ketrampilan kewirausahaan	600 Orang	DIY	Rp. 1.748.881.700,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.16.009	Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus (Aksus) yang mendapatkan ketrampilan kewirausahaan	175 Orang	DIY	Rp. 774.384.000,00	Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus (Aksus) yang mendapatkan ketrampilan kewirausahaan	175 Orang	DIY	Rp. 774.384.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.16.010	Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Pembekalan Usaha dan Pembentukan Kelompok Usaha	540 Orang	DIY	Rp. 2.329.095.500,00	Pembekalan Usaha dan Pembentukan Kelompok Usaha	540 Orang	DIY	Rp. 2.329.095.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.16.011	Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan	300 Orang	DIY	Rp. 1.006.299.800,00	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan	300 Orang	DIY	Rp. 1.006.299.800,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.16.012	Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9,5 %	Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja di Perusahaan	120 Orang	DIY	Rp. 1.76.000.000,00	Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja di Perusahaan	120 Orang	DIY	Rp. 1.76.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015													
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.													
Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		kerja					Rp. 196.735.000,00				Rp. 196.735.000,00		
1.14.1.14.01.18	PROGRAM PENGINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN												
1.14.1.14.01.18.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Persentase lembaga yang melaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang Pelatihan Kerja (LPK)	90 Orang	DIY	Rp. 86.595.000,00	Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang Pelatihan Kerja (LPK)	90 Orang	DIY	Rp. 86.595.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.18.002	Pembinaan CTIK/ TKI Lembaga Pemertajaaan	Persentase lembaga yang melaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang Pemertajaaan	40 lembaga	DIY	Rp. 110.140.000,00	Pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang Pemertajaaan	40 lembaga	DIY	Rp. 110.140.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.19	PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN						Rp. 1.173.517.000,00				Rp. 1.159.117.000,00 (-) Rp. 14.400.000,00		
1.14.1.14.01.19.001	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Pembinaan dan pendataan tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	470 Orang	DIY	Rp. 304.915.000,00	Pembinaan dan pendataan tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	470 Orang	Yogyakarta	Rp. 304.915.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.19.002	Penghapusan Bentuk pekerjaan Terburuk Bagi Anak	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Fasilitasi dan Penyuluhan tentang PBTA	40 Orang	DIY	Rp. 82.500.000,00	Fasilitasi dan Penyuluhan tentang PBTA	40 Orang	DIY	Rp. 82.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.19.003	Perfindungan Tenaga Kerja	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Sosialisasi Pendidikan TK, K3 dan TKLHK	240 Orang	DIY	Rp. 117.915.000,00	Sosialisasi Pendidikan TK, K3 dan TKLHK	240 Orang	DIY	Rp. 117.915.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 0 Penambahan : -
1.14.1.14.01.19.004	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis serta Penyalahgunaan Narkoba di Tempat Kerja	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan	15.6 %	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis serta Penyalahgunaan Narkoba di Tempat Kerja	100 Orang	DIY	Rp. 79.222.000,00	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis serta Penyalahgunaan Narkoba di Tempat Kerja	100 Orang	DIY	Rp. 79.222.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Usanan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		di bidang norma kerja dan K3		Kerja									
1.14.1.14.01.19.005	Pemeriksaan alih-alat Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15,6 %	Tenaga kerja di Perusahaan besar menengah dan UMKM yang mendapatkan pemeriksaan Keselamatan Kerja	610 Orang dan 40 umkm	DIY	Rp. 89.400.000,00	Tenaga kerja di Perusahaan besar menengah dan UMKM yang mendapatkan pemeriksaan Keselamatan Kerja	610 Orang dan 40 umkm	DIY	Rp. 89.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.19.006	Pemeriksaan alih-alat keselamatan dan keselamatan kerja (K3)	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15,6 %	Bintek Keselamatan Alat K3	400 perusahaan	DIY	Rp. 213.355.000,00	Bintek Keselamatan Alat K3	400 perusahaan	DIY	Rp. 198.955.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi karena penyusutan SBU Perlengkapan dalam daerah Penambahan : -
1.14.1.14.01.19.007	Pengujian Lingkungan Kerja	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15,6 %	Pemeriksaan alat-alat keselamatan dan keselamatan kerja (K3)	400 alat	DIY	Rp. 286.210.000,00	Pemeriksaan alat-alat keselamatan dan keselamatan kerja (K3)	400 alat	DIY	Rp. 286.210.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.20	PROGRAM PELAYANAN PERUMAHAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						Rp. 966.003.000,00				Rp. 966.003.000,00		
1.14.1.14.01.20.001	Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase besaran penyelesaian kasus penyelesaian hubungan industrial	65 %	Pembinaan dan pemahaman tentang Hubungan Industrial	405 Orang	DIY	Rp. 268.332.000,00	Pembinaan dan pemahaman tentang Hubungan Industrial	405 Orang	DIY	Rp. 268.332.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.20.002	Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/ perusahaan	Persentase besaran penyelesaian kasus penyelesaian hubungan industrial	65 %	Koordinasi Dewan Pengupahan, Pelaksanaan Bintek K3, dan Struktur Organisasi Upah K3, dan Sosialisasi Upah K3, dan Sosialisasi Upah Minimum dan Penerapan Upah Minimum	1 naaskah	DIY	Rp. 510.444.000,00	Koordinasi Dewan Pengupahan, Pelaksanaan Bintek K3, dan Struktur Organisasi Upah K3, dan Sosialisasi Upah Minimum dan Penerapan Upah Minimum	1 naaskah	DIY	Rp. 510.444.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.14.1.14.01.20.003	Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR)	Persentase besaran penyelesaian kasus penyelesaian hubungan industrial	65 %	Sosialisasi dan Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) serta penerapan upah minimum	60 perusahaan	DIY	Rp. 54.565.000,00	Sosialisasi dan Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) serta penerapan upah minimum	60 perusahaan	DIY	Rp. 54.565.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.14.1.14.01.20.004	Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code	Persentase besaran transmigran yang ditempatkan	65 %	Pembinaan penghuni rusunawa	180 Orang	Rusunawa Ledok code	Rp. 152.662.000,00	Pembinaan penghuni rusunawa	180 Orang	Rusunawa Ledok Code	Rp. 152.662.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2	Pilihan												
2.08	Ketransmigrasian												
2.08.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.												
2.08.1.14.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI						Rp. 3.488.176.750,00				Rp. 3.488.176.750,00	Rp. 0,00	
2.08.1.14.01.15.001	Penyelenggaraan Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Kerjasama antar daerah dan KIE bidang Ketransmigrasian	5 Daerah	DIY	Rp. 3.395.512.750,00	Kerjasama antar daerah dan KIE bidang Ketransmigrasian	5 Daerah	DIY	Rp. 3.395.512.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penempatan transmigran	100 KK			Penempatan Transmigran	100 KK				
2.08.1.14.01.15.002	Pembertayaan Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Pembinaan Usaha Ekonomi Lokal Ring I	1 lokasi	DIY	Rp. 92.664.000,00	Pembinaan Usaha Ekonomi Lokal Ring I	1 lokasi	Yogyakarta	Rp. 92.664.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total							Rp. 43.619.133.850,00				Rp. 43.603.139.174,00	(-) Rp. 15.994.676,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usuran/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah												
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM												
1.15.1.15.01.01	PROGRAM PELAYANAN KOPERASI DAN UKM PERKANTORAN						Rp. 2.022.920.050,00				Rp. 2.202.492.250,00		
1.15.1.15.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman dokumen (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	9 surat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 6.999.000,00	Pengiriman Balai Metrologi, BPTTG)	9 surat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 6.999.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.01.002	Penyediaan Jasa Kebersihan Air, Telepon, Listrik, dan Internet	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran tagihan internet (Induk dan BPTTG)	12 bulan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 579.379.800,00	Pembayaran tagihan internet (Induk dan BPTTG)	12 bulan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 689.379.800,00	Rp. 110.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : Induk : 100 Juta BPTTG : 10 Juta
				Pembayaran tagihan rekening air (Induk), 100 m3 (B. Metrologi), 881 m3 (BPTTG)	12 bulan			Pembayaran tagihan rekening air (Induk), 100 m3 (B. Metrologi), 881 m3 (BPTTG)	12 bulan				
				Pembayaran tagihan rekening listrik 5 line 6.600.700 kwh (BPTTG)	12 bulan			Pembayaran tagihan rekening listrik 5 line 6.600.700 kwh (BPTTG)	12 bulan				
				Pembayaran tagihan rekening listrik 140.350 VA (Induk)	10 bulan			Pembayaran tagihan rekening listrik 140.350 VA (Induk)	12 bulan				
				Pembayaran tagihan rekening listrik 4150 Kwh (Balai Metrologi)	12 bulan			Pembayaran tagihan rekening listrik 4150 Kwh (Balai Metrologi)	12 bulan				
				Pembayaran tagihan rekening telepon 11 sambungan (Induk), 3 Sambungan (B. Metrologi), dan 2 sambungan (BPTTG)	12 bulan			Pembayaran tagihan rekening telepon 11 sambungan (Induk), 3 Sambungan (B. Metrologi), dan 2 sambungan (BPTTG)	12 bulan				
1.15.1.15.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2, 4 dan 6 yang tepat waktu	42 unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 9.600.000,00	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2, dan 4 yang tepat waktu	42 unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 9.600.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.151.15.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Honorarium Pengelola (B. Metrologi) 2. Honorarium Pengelola Pegawai 3. Honorarium Pengelola Barang	11 orang/bulan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 90.155.500,00	1. Honorarium Pengelola (B. Metrologi) 2. Honorarium Pengelola Pegawai 3. Honorarium Pengelola Barang	11 orang/bulan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 113.515.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Induk	
				Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Koperasi (Induk)	4 bukti pembayaran			Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Koperasi (Induk)	4 bukti pembayaran					
				Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan (Induk)	4 bukti pembayaran			Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan (Induk)	4 bukti pembayaran					
				Honorarium pengelola keuangan (BPTTG)	10 orang/bulan			Honorarium pengelola keuangan (BPTTG)	10 orang/bulan					
				Honorarium pengelola keuangan (BPTTG)				Honorarium pengelola keuangan (BPTTG)						
				Honorarium pengelola barang				Honorarium pengelola barang						
1.151.15.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Kebersihan (BPTTG)	6 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 209.996.700,00	Alat Kebersihan (BPTTG)	6 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 209.996.700,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Kebersihan Gedung Kantor (B Metrologi)	7115 m2			Kebersihan Gedung Kantor (B Metrologi)	7115 m2					
				Kebersihan Gedung Kantor (Induk)	19052 m2			Kebersihan Gedung Kantor (Induk)	19052 m2					
1.151.15.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor (Balai Metrologi)	17 jenis	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 93.691.500,00	Alat Tulis Kantor (Balai Metrologi)	17 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 93.691.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Alat Tulis Kantor (BPTTG)	42 jenis			Alat Tulis Kantor (BPTTG)	42 jenis					
				Alat Tulis Kantor (Induk)	66 jenis			Alat Tulis Kantor (Induk)	66 jenis					
1.151.15.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Cetak (Balai Metrologi)	53 unit/buku	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 84.999.750,00	Barang Cetak (Balai Metrologi)	53 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 84.999.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Barang Cetak (BPTTG)	8 jenis			Barang Cetak (BPTTG)	8 jenis					
				Barang Cetak (Induk)	17 jenis			Barang Cetak (Induk)	17 jenis					
				Penggandaan (Balai Metrologi)	20400 lembar			Penggandaan (Balai Metrologi)	20400 lembar					
				Penggandaan (BPTTG)	18550 lembar			Penggandaan (BPTTG)	18550 lembar					
				Penggandaan (Induk)	157500 lembar			Penggandaan (Induk)	157500 lembar					

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usanan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/ Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.15.1.15.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi listrik (Balai TTG)	13 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 30.000.000,00	Komponen Instalasi listrik (Balai TTG)	13 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Komponen Instalasi listrik (Induk)	24 jenis			Komponen Instalasi listrik (Induk)	24 jenis					
				Terpenuhiya kebutuhan instalasi listrik (Balai metrologi)	6 jenis			Terpenuhiya kebutuhan instalasi listrik (Balai metrologi)	6 jenis					
1.15.1.15.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengisian Tabung Pemadam (Induk, Balai Metrologi), dan BPTTG)	21 tabung	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 6.770.000,00	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (Balai metrologi)	21 tabung	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 6.770.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan peralatan rumah tangga (Balai Metrologi)	10 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 19.250.000,00	Penyediaan peralatan rumah tangga (Balai Metrologi)	10 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 19.250.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penyediaan peralatan rumah tangga (Balai TTG)	14 jenis			Penyediaan peralatan rumah tangga (Balai TTG)	14 jenis					
				Penyediaan peralatan rumah tangga (Induk)	21 jenis			Penyediaan peralatan rumah tangga (Induk)	21 jenis					
1.15.1.15.01.01.015	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundingan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku Kespustakaan Surat kabar (Induk, Balai Metrologi), dan BPTTG)	1 Paket 3 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 15.960.000,00	Buku Kespustakaan Surat kabar (Induk, Balai Metrologi), dan BPTTG)	1 Paket 3 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 15.920.000,00	(-) Rp. 40.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makan dan minum sdang (Balai Metrologi)	480 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 98.208.000,00	Makan dan minum sdang (Balai Metrologi)	528 Orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 98.208.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Makan dan minum sdang (BPTTG)	528 Orang			Makan dan minum sdang (BPTTG)	480 Orang					
				Makan dan minum sdang (Induk)	7290 oang			Makan dan minum sdang (Induk)	7290 Orang					
1.15.1.15.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Komnisi ke luar daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Konsultasi dan koordinasi luar daerah (Induk, Balai metrologi, BPTTG)	12 bulan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 526.516.000,00	Konsultasi dan koordinasi luar daerah (Induk, Balai metrologi, BPTTG)	12 bulan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 526.516.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah (Induk, Balai metrologi, BPTTG)	12 bulan			Konsultasi dan koordinasi luar daerah (Induk, Balai metrologi, BPTTG)	12 bulan					
1.15.1.15.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti Pembayaran Honor Jasa Keamanan Kantor/Gedung Kerja (Induk, Balai Metrologi)	10 bukti pembayaran	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 243.713.800,00	Bukti Pembayaran Honor Jasa Keamanan Kantor/Gedung Kerja (Induk, Balai Metrologi)	12 bukti pembayaran	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 289.966.000,00	Rp. 46.252.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Induk : 26.564.000 BPTTG : 18.675.600 Metrologi : 2. 812.600

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM															
Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)	
1.15.1.15.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti BPTTG)	12 kultansi	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 7.680.000,00	Bukti retribusi sampah (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	12 kulensi	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 7.680.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.15.1.15.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 7.168.836.000,00				Rp. 7.168.832.000,00	(-) Rp. 4.000,00			
1.15.1.15.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembangunan Gedung kantor	1 unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 5.580.392.000,00	Pembangunan Gedung kantor	1 unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 5.580.392.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.15.1.15.01.02.004	Pengadaan kendaraan dinas	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 4	1 unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 224.999.850,00	Kendaraan dinas/operasional roda 4	1 unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 224.999.850,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.15.1.15.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan gedung kantor (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	6 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 245.000.000,00	Perlengkapan gedung kantor (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	6 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 244.996.000,00	(-) 4.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Savings Belanja Modal Pengadaan A/C Conditioner (A.C) Penambahan : -	
1.15.1.15.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	4 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 249.100.000,00	Peralatan gedung kantor (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	4 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 249.100.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.15.1.15.01.02.010	Pengadaan Mebeliur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mebeler (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	6 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 177.350.000,00	Mebeler (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	6 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 177.350.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.15.1.15.01.02.022	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	4 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 149.999.150,00	Peralatan gedung kantor terpelihara (Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	4 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 149.999.150,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.15.1.15.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4 dan kendaraan roda 2)(Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	3 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 350.000.000,00	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4 dan kendaraan roda 2)(Induk, Balai Metrologi, BPTTG)	3 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usaan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
1.15.1.15.01.02.026	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)		(15)
		Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara (truk, balai katering, BPTG)	4 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 50.000.000,00		4 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara (truk, balai katering, BPTG)	12 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 125.000.000,00		12 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.02.029	Pengelolaan Anrip Dinamis		100 %	Pengelolaan anrip dinamis	2 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 16.995.000,00		2 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 16.995.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.05	PROGRAM PENGKATAN PAKARIS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 28.600.000,00					Rp. 0,00			
1.15.1.15.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal		100 %	Kursus Singkat Pelatihan	52 OD	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 28.600.000,00		52 OD	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 28.600.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.06	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPRABAWAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 207.725.000,00					Rp. 0,00			
1.15.1.15.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		100 %	Nilai Lampi SKPD	0 a	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 7.000.000,00		0 a	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 7.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		100 %	Kesempitan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 15.250.000,00		0 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 15.250.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi		100 %	ROPK, Renja, Updating data SILDASI, Updating Website Dinas	1 tahun	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil	Rp. 154.975.000,00		1 tahun	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil	Rp. 154.975.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usanan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				Menengah				Menengah			
1.15.1.15.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tervujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen organisasi	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 30.500.000,00		100 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 30.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.15	PROGRAM PENGCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF						Rp. 90.474.500,00				Rp. 90.474.500,00		
1.15.1.15.01.15.048	Pengaturan kapasitas Kemitraan UMKM	Jumlah UMK	229467 unit usaha	Facilitasi Kemitraan bagi UMK	7 Angk	DIY	Rp. 90.474.500,00		7 Angk	DIY	Rp. 90.474.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.15.1.15.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEKONGRUAN KEMITRAAN USAHA KECIL MENENGAH						Rp. 992.600.000,00				Rp. 988.100.000,00	(-) Rp. 4.500.000,00	
1.15.1.15.01.16.019	Penumbuhan Kewirausahaan Baru	Jumlah Wirausaha UMK Baru	180 UMK Baru	Facilitasi Program Wirausaha Istimewa	1 tahun	DIY	Rp. 992.600.000,00	Facilitasi Program Wirausaha Istimewa	1 tahun	DIY	Rp. 988.100.000,00	(-) Rp. 4.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi pada Belanja Makanan Dan Minuman Hari-hari Umum. Penambahan : Perubahan pada penambahan TUK serta revisi Belanja Jasa Konsultasi ke rekening Belanja Pegawai dan Akseling Belanja Barang Jasa
				Pelatihan kewirausahaan bagi UMK	75 Orang			Pelatihan Kewirausahaan bagi UMK	75 Orang				
				Pelatihan Kewirausahaan IKM Pakan Jadi	40 IKM			Pelatihan Kewirausahaan IKM Pakan Jadi	40 IKM				
				Penumbuhan WUB Ind, Kimia dan Bahan bangunan	25 Orang			Penumbuhan WUB Ind, Kimia dan Bahan bangunan	65 Orang				
				Penumbuhan WUB Industri Makanan dan Minuman	20 Orang			Penumbuhan WUB Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	40 Orang				
								Penumbuhan WUB Industri Kerajinan	20 Orang				
								Penumbuhan WUB Industri Logam dan Elektronika	40 Orang				
								Penumbuhan WUB Industri Makanan dan Minuman	140 Orang				
1.15.1.15.01.18	PROGRAM PENGUKUTAN KUALITAS						Rp. 466.155.350,00				Rp. 466.155.350,00	Rp. 0,00	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.15.1.15.01.18.020	KELEMBAGAAN KOPERASI Penguatan kapasitas perkoperasian	Jumlah Koperasi aktif	2351 koperasi	1. Pengembangan Kopsis dan Kopma 2. Penilaian Peningkatan dan pembinaan Koperasi 3. Pengawasan dan Peminaan Koperasi 4. Dilat Pengembangan Perkoperasian 5. Koordinasi Pembentukan Koperasi Sekunder 6. Fasilitas DEKOPIN 7. Monev bagi Koperasi	60 Org 60 Org 60 Org 150 Org 40 Org 1 tahun 150 koperasi	DIY	Rp. 466.155.350,00	1. Pengembangan Kopsis dan Kopma 2. Penilaian Peningkatan dan pembinaan Koperasi 3. Pengawasan dan Peminaan Koperasi 4. Dilat Pengembangan Perkoperasian 5. Koordinasi Pembentukan Koperasi Sekunder 6. Fasilitas DEKOPIN 7. Monev bagi Koperasi	60 Org 60 Org 60 Org 150 Org 40 Org 1 tahun 150 koperasi	DIY	Rp. 466.155.350,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2	Pilihan													
2.06	Perdagangan													
2.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM													
2.06.1.15.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN						Rp. 672.636.350,00					Rp. 0,00		
2.06.1.15.01.15.021	Pengawasan dan Penyelenggaraan Kemetrolgian	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Pengawasan dan Penyelenggaraan Kemetrolgian Pengelolan Standar Tera dan Tera Ulang	4000 konsumen penimbang dan 10000 UTTP terawasi 40 Standar 234486 UTTP	DIY	Rp. 349.731.000,00	Pengawasan dan Penyelenggaraan Kemetrolgian Pengelolan Standar Tera dan Tera Ulang	4000 konsumen penimbang dan 10000 UTTP terawasi 40 Standar 234486 UTTP	DIY	Rp. 349.731.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.06.1.15.01.15.024	Perlindungan Pasar Domestik	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Operasi pasar mumil beras Pemantauan Pengadaan Penyaluran Stok Dan Harga Kebutuhan Pokok di Tingkat Pedagang dan distributor Peminaan dan Pengawasan Barang dan Jasa bahan berbahaya yang Beredar	12 bulan 12 bulan 10 bulan	DIY	Rp. 322.905.350,00	Operasi pasar mumil beras Pemantauan Pengadaan Penyaluran Stok Dan Harga Kebutuhan Pokok di Tingkat Pedagang dan distributor Peminaan dan Pengawasan Barang dan Jasa bahan berbahaya yang Beredar	12 bulan 12 bulan 10 bulan	DIY	Rp. 322.905.350,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.06.1.15.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR						Rp. 4.083.297.700,00				Rp. 4.083.297.700,00	Rp. 0,00	
2.06.1.15.01.17.048	Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	Nilai ekspor	207.59 juta US\$	Facilitasi Kadin	1 kegiatan (1 Tahun)	DIY	Rp. 4.083.297.700,00	Facilitasi Kadin	1 kegiatan (1 Tahun)	DIY	Rp. 4.083.297.700,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pameran perdagangan ekspor	5 pameran (85 UKM)			Pameran perdagangan ekspor : Pameran Tradcraft, Pameran IFAX, Pameran TEL, Pameran PPED, Pameran Shanghai	5 pameran (85 UKM)				
					1 kegiatan (4 UKM)			Pendampingan standarisasi mutu produk	1 kegiatan (4 UKM)				
				Penghargaan Primaniyarta	1 kegiatan (3 Eksporir)			Penghargaan Primaniyarta (3 Eksporir)	1 kegiatan (3 Eksporir)				
				Temu Bisnis dalam dan luar negeri (Jakarta, shanghai)	1 kegiatan (Dalam Negeri : 2 Akt @ 50 orang, Luar Negeri: 5 Org)			Temu Bisnis dalam dan luar negeri (Jakarta, shanghai)	1 kegiatan (Dalam Negeri : 2 Akt @ 50 orang, Luar Negeri: 5 Org)				
2.06.1.15.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI						Rp. 2.576.835.500,00				Rp. 2.576.835.500,00	Rp. 0,00	
2.06.1.15.01.18.049	Pengelolaan dan Pelayanan HAKI	Jumlah STUP*	45.106 STUP	Publikasi Edukasi, Promosi, Penyusunan Pedoman, Advokasi, Pendataraan HKI, Optimalisasi Pemantauan Informasi HAKI	12 bulan	DIY	Rp. 366.305.000,00	Publikasi Edukasi, Promosi, Penyusunan Pedoman, Advokasi, Pendataraan HKI, Optimalisasi Pemantauan Informasi HAKI	12 bulan	DIY	Rp. 366.305.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.06.1.15.01.18.050	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah STUP*	45.106 STUP	Pameran Dalam Negeri	9 pameran (88 UKM)	DIY	Rp. 1.039.880.500,00	Pameran Dalam Negeri	9 pameran (88 UKM)	DIY	Rp. 1.039.880.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pameran tetap di Balemangu	1 pameran (70 UKM)			Pameran tetap di Balemangu	1 pameran (70 UKM)				
2.06.1.15.01.18.051	Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah STUP*	45.106 STUP	Bantuan Hibah Peralatan Usaha bagi PK	18 kelompok	DIY	Rp. 1.028.200.000,00	Bantuan Hibah Peralatan Usaha bagi PKL	18 kelompok	DIY	Rp. 1.028.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Facilitasi Dekranasda	12 bulan			Facilitasi Dekranasda	12 bulan				
				fasilitasi rehabilitasi pasar tradisional	5 pasar			fasilitasi rehabilitasi pasar tradisional	5 pasar				
				pelatihan manajemen usaha bagi PKL	5 Akt @ 30 Org			pelatihan manajemen usaha bagi PKL	5 Akt @ 30 Org				
				Pembinaan Pedagang Pasar	10 Akt @ 30 Org			Pembinaan Pedagang Pasar	10 Akt @ 30 Org				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usanan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Penyusunan Kajian Grand Design Jajaja Trading House	1 dok								
2.06.1.15.01.18.053	Pelayanan Pengembangan Bisnis	Jumlah STUP*	45.06 STUP	Pendampingan bisnis UMKM	150 UMKM	DIY	Rp. 142.450.000,00	Pendampingan bisnis UMKM	150 UMKM	DIY	Rp. 142.450.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengembangan Jajapriasa dan JASC	30 UMKM								
2.07	Industri												
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM												
2.07.1.15.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH*						Rp. 1.126.299.500,00						
2.07.1.15.01.16.147	Penelitian Produk IKM Logam Sandang dan Aneka	Jumlah IKM	81907 IKM	paneran kerajinan kayu dan bambu	10 IKM	DIY	Rp. 446.699.500,00	paneran kerajinan kayu dan bambu	10 IKM	DIY	Rp. 446.699.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pelatihan bagi IKM Logam Kuningan	20 IKM			Pelatihan bagi IKM Logam Kuningan	20 IKM				
				Pelatihan IKM Ragam Metal	20 IKM			Pelatihan IKM Ragam Metal	20 IKM				
				Pelatihan Uji Produk IKM Otomotif	20 IKM			Pelatihan Uji Produk IKM Otomotif	20 IKM				
				Pengembangan Desain Kulit	40 IKM			Pengembangan Desain Kulit	40 IKM				
				Terlaksananya Fasilitas	20 IKM			Terlaksananya Fasilitas	20 IKM				
				Pengembangan Desain Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak				Pengembangan Desain Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak					
2.07.1.15.01.16.148	Penelitian Produk IKM Agro dan Kimia	Jumlah IKM	81.907 IKM	Binbingan Teknis Pengembangan Teknologi Produksi IKM Mebel	20 IKM	DIY	Rp. 325.000.000,00	Binbingan Teknis Pengembangan Teknologi Produksi IKM Mebel	20 IKM	DIY	Rp. 325.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Binbingan Teknis Pengembangan Keterampilan IKM kayu	20 IKM			Binbingan Teknis Pengembangan Keterampilan IKM kayu	20 IKM				
				Pelatihan IKM Budamaka (herai.spa) dan tenu kentrain	20 IKM			Pelatihan IKM Budamaka (herai.spa) dan tenu kentrain	20 IKM				
				Pelatihan IKM Pasir Semen dan Tanah Liat	20 IKM			Pelatihan IKM Pasir Semen dan Tanah Liat	20 IKM				
				Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembaku	20 IKM			Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembaku	20 IKM				

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
2.07.1.15.01.16.149	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)	
				(cukai)											
				Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Umbi-umbian	20 IKM										
				Pengembangan Teknologi IKM Bambu	20 IKM										
				Promosi IKM Pangan	30 IKM										
2.07.1.15.01.16.150	Peningkatan Kualitas Produk IKM Logam Sandang dan Aneka	Jumlah IKM	81907 IKM	Pendampingan Sertifikasi Produk Logam Sandang dan Aneka (Kapasitas produksi, bauran modal, biaya, kegiatan sosialisasi)	500 IKM	DIY	Rp. 194.600.000,00	Pendampingan Sertifikasi Produk Logam Sandang dan Aneka (Kapasitas produksi, bauran modal, biaya, kegiatan sosialisasi)	500 IKM	DIY	Rp. 194.600.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.07.1.15.01.16.150	Peningkatan Kualitas Produk IKM Agro dan Kina	Jumlah IKM	81907 IKM	Pendampingan fasilitas sertifikasi produk Agro dan Kina	55 IKM	DIY	Rp. 160.000.000,00	Pendampingan fasilitas sertifikasi produk Agro dan Kina	55 IKM	DIY	Rp. 159.400.000,00	(-) Rp. 600.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - / Instruktur / Narasumber Penambahan : -	
2.07.1.15.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI						Rp. 719.937.500,00					Rp. 719.937.500,00	Rp. 0,00		
2.07.1.15.01.17.101	Pengkayaan dan Pelayaran Teknologi Tepat Guna	Nilai produksi IKM	3337453545 Ribu Rupiah	Lomba ATG	6 ATG Juara	DIY	Rp. 719.937.500,00	Lomba ATG	6 ATG Juara	DIY	Rp. 719.937.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Pengelolaan bengkel Produksi	6 Jasa			Pengelolaan bengkel Produksi	6 Jasa						
				Pengembangan , rekayasa dan Pelayanan ATG	7 ATG			Pengembangan , rekayasa dan Pelayanan ATG	7 ATG						
				Pengembangan dan pelayanan teknologi kemasan	6 Jasa			Pengembangan dan pelayanan teknologi kemasan	6 Jasa						
				Promosi ATG	10 ATG			Promosi ATG	10 ATG						
2.07.1.15.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF						Rp. 750.000.000,00					Rp. 750.000.000,00	Rp. 0,00		
2.07.1.15.01.20.021	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah IKM Industri Kreatif	34018 IKM kreatif	Jogja Fashion Week	4 kegiatan (Fashion Expo 120 UKM; Fashion Competition 100 UKM; Fashion Show 80 Desainer; Seminar 50	DIY	Rp. 750.000.000,00	Jogja Fashion Week	4 kegiatan (Fashion Expo 120 UKM; Fashion Competition 100 UKM; Fashion Show 80 Desainer; Seminar 50	DIY	Rp. 750.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				pameran dan lomba Industri Kreatif DIY	30 IKM			pameran dan lomba Industri Kreatif DIY	30 IKM						
				Pengembangan Industri Kreatif Animasi dan Game	20 IKM			Pengembangan Industri Kreatif Animasi dan Game	20 IKM						

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM													
Kode	Usanan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Total							Rp. 20.906.317.450,00				Rp. 21.080.785.650,00	Rp. 174.468.200,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan		
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/ Berkurang	
1	1.16	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
			Wajib												
			Penanaman modal												
			Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.												
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. surat keluar 2. surat masuk 3. paket pengiriman	6150 surat 4000 surat 489 Paket	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 14.550.000,00	1. surat keluar 2. surat masuk 4. Paket pengiriman	6150 surat 4000 surat 489 Paket	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 14.550.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembayaran tagihan rekening telepon 9 saluran 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 3. Pembayaran tagihan rekening internet 4. Pembayaran tagihan rekening air	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 443.463.000,00	1. Pembayaran tagihan rekening telepon 9 saluran 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 3. Pembayaran tagihan rekening internet 4. Pembayaran tagihan rekening air	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 475.011.000,00	Rp. 31.548.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Penambahan anggaran belanja listrik di Geral P2T sebesar Rp. 29.100.000,- dan Langganan Speedy di Geral P2T sebesar Rp. 2.448.000,-
			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Roda 2 2. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Roda 4	6 unit 12 unit	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 11.295.000,00	1. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Roda 2 2. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional Roda 4	6 unit 12 unit	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 11.295.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti Pembayaran	24 orang/bulan	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 69.187.200,00	Bukti Pembayaran	24 orang/bulan	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 72.500.000,00	Rp. 3.312.800,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Penambahan anggaran honor pengelola keuangan dan pengelola kepegawaian, menyesuaikan SMD PEGGUB No 76 Tahun 2014
			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan Gedung Kantor	4 kantor	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 366.716.000,00	Kebersihan Gedung Kantor	4 kantor	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 366.716.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
			Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	127 jenis	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 79.180.050,00	Alat Tulis Kantor	127 jenis	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 79.180.050,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
			Prosentase Pelayanan Administrasi Penggandaan	100 %	1. barang cetakan 2. penggandaan dokumen	28 jenis 344512 lembar	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 106.619.900,00	1. barang cetakan 2. penggandaan dokumen	28 jenis 344512 lembar	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Rp. 106.619.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)	
		Perkantoran		3. penjilidan dokumen	160 buah dokumen	Jakarta		3. penjilidan dokumen	160 buah dokumen	Jakarta						
1.16.1.16.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor	49 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 20.750.250,00	Komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor	49 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 20.750.250,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.16.1.16.01.01.014	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Peralatan Rumah Tangga	79 jenis	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 85.601.450,00	1. Peralatan Rumah Tangga	79 jenis	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 85.601.450,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. Pengisian tabung pemadam kebakaran	12 tabung			2. Pengisian tabung pemadam kebakaran	12 tabung							
				3. Pengisian tabung gas	48 Kali			3. Pengisian tabung gas	48 Kali							
				4. Handuk	112 buah			4. handuk	112 buah							
				5. Sarung kursi	200 buah			5. sarung kursi	200 buah							
1.16.1.16.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat kabar	6 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 17.607.000,00	1. Surat kabar	6 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 17.607.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. Buku pengetahuan umum	22 buku			2. Buku pengetahuan umum	22 buku							
				3. Buku peraturan perundang-undangan	22 buku			3. Buku peraturan perundang-undangan	22 buku							
				4. Tabloid	3 jenis			4. Tabloid	3 jenis							
1.16.1.16.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. makan dan minum rapat	6300 Orang	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 106.740.000,00	1. makan dan minum rapat	6300 Orang	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 106.740.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. makan dan minum harian umum	240 Orang			2. makan dan minum harian umum	240 Orang							
				3. jamuan tamu penginapan	2280 Orang			3. jamuan tamu penginapan	2280 Orang							
				4. Jamuan Tamu khusus	48 Orang			4. Jamuan Tamu khusus	48 Orang							
1.16.1.16.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. konsultasi & koordinasi dalam daerah	12 bulan	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 799.927.000,00	1. konsultasi & koordinasi dalam daerah	12 bulan	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 799.927.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. konsultasi & koordinasi luar daerah	12 bulan			2. konsultasi & koordinasi luar daerah	12 bulan							
1.16.1.16.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Setting /Tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Jasa keamanan kantor /tempat kerja	1 tahun	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 722.690.000,00	1. Jasa keamanan kantor /tempat kerja	1 tahun	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 722.690.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. Honor PTT	1 tahun			2. Honor PTT	1 tahun							
				3. Honor pengemudi	1 tahun			3. Honor pengemudi	1 tahun							
1.16.1.16.01.01.029	Pengabdian Asip Dinas SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perengkapan/Alat Penanganan Asip	18 macam/jenis	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 10.648.000,00	Perengkapan/Alat Penanganan Asip	18 macam/jenis	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 10.648.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.16.1.16.01.02	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 1.821.590.500,00					(-) Rp. 19.228.000,00				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Usuan/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.16.1.16.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 4	2 unit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 445.000.000,00	Kendaraan roda 4	2 unit	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 445.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor	8 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 241.416.000,00	perengkapan gedung kantor	8 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 222.188.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Saving belanja modal pengadaan air conditioner (ac) Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	peralatan gedung kantor	9 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 119.500.000,00	peralatan gedung kantor	9 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 119.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.010	Pengadaan Meubeler	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Meubeler	10 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 156.400.000,00	mbeleur	10 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 156.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	perengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 98.924.500,00	perengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 98.924.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	2 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 463.215.000,00	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	2 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 463.215.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	perengkapan gedung kantor terpelihara	8 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 50.285.000,00	perengkapan gedung kantor terpelihara	8 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 50.285.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	peralatan gedung kantor terpelihara	11 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 18.350.000,00	peralatan gedung kantor terpelihara	11 jenis	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Rp. 18.350.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/berkala meubeler	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	meubeler terpelihara	7 jenis	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 8.500.000,00	meubeler terpelihara	7 jenis	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 8.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat	Prosentase penyediaan	100 %	Rehabilitas Gedung kantor	1 unit	Badan Kerjasama	Rp. 220.000.000,00	Rehabilitas Gedung kantor	1 unit	Badan Kerjasama	Rp. 220.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015													
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.													
Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
	gedung lantai dan pemeliharaan sarana prasana aparatur					dan Penanaman Modal				dan Penanaman Modal			Penambahan : -
1.16.1.16.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASTITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 109.774.250,00				Rp. 109.774.250,00	Rp. 0,00	
1.16.1.16.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %		sumber daya aparatur yang mengikut dilak meningkat kemampuannya	24 Orang	DIY, Jakarta, Jawa barat, Bali dan Jawa Tengah	Rp. 75.000.000,00		24 Orang	DIY, Jakarta, Jawa barat, Bali dan Jawa Tengah	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.05.029	Peningkatan Kualitas S D M Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	100 %		Jumlah personil yang meningkat kemampuannya	80 Orang	D.I. Yogyakarta	Rp. 34.774.250,00		80 Orang	D.I. Yogyakarta	Rp. 34.774.250,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.06	PROGRAM PENEMBANGAN PENSEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 119.861.300,00				Rp. 119.861.300,00	Rp. 0,00	
1.16.1.16.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD	100 %		Nilai LAKIP SKPD	75 s.d 85 Nilai A	D.I Yogyakarta	Rp. 4.840.000,00		75 s.d 85 Nilai A	D.I Yogyakarta	Rp. 4.840.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.06.017	Penyusunan laporan keuangan SKPD	100 %		Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0.05 %	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 29.592.400,00		0.05 %	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 29.592.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.06.018	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan Data informasi	100 %		Renja BKPM DIY 2016, RKA BKPM DIY 2016, PK BKPM DIY 2015, ROPK BKPM DIY 2015 dan DPA BKPM DIY 2015	1 tahun	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 71.686.000,00		1 tahun	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 71.686.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.06.019	Monitoring dan evaluasi program kegiatan	100 %		Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program	100 %	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 13.742.900,00		Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 13.742.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	SKPD	perencanaan kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		kegiatan	Modal				Modal				
1.16.1.16.01.16	PROGRAM PENGINGKATAN IKLINIK DAN INVESTASI DAN REALISASI						Rp. 1.034.901.350,00				Rp. 1.034.901.350,00	Rp. 0,00	
1.16.1.16.01.16.016	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuTSP	Nilai Investasi 10467183000 Rupiah		1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Penanganan pengaduan 3. Pengelolaan Informasi aplikasi sistem perizinan online dan pelayanan On Line	600 izin dan non izin 12 pengaduan 1 dok	DIY	Rp. 414.279.000,00	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Penanganan pengaduan 3. Pengelolaan Informasi aplikasi sistem perizinan online dan pelayanan On Line	600 izin dan non izin 12 pengaduan 1 dokumen	DIY	Rp. 414.279.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.16.034	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Nilai Investasi 10467183000 Rupiah		1. Pengawasan dan penanganan Pemmasalahan Penanaman Modal 2. Pemantauan dan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LUPM)	70 perusahaan 50 perusahaan	Kab/kota se-DIY	Rp. 157.956.350,00	1. Pengawasan dan penanganan Pemmasalahan Penanaman Modal 2. Pemantauan dan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LUPM)	70 perusahaan 50 perusahaan	Kab/kota se-DIY	Rp. 157.956.350,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.16.035	Penyajian Potensi Investasi	Nilai Investasi 10467183000 Rupiah		1. Masterplan Pengembangan Resort Kabupaten gunung Kidul pengembangan dan Pengelolaan Website "Jogja Invest" 2. Study Kelayakan (Feasibility Study) Kawasan Industri Sedayu Kabupaten Bantul (Triateral)	1 dokumen 1 Dokumen & Laporan 1 dokumen	DIY	Rp. 462.666.000,00	1. Masterplan Pengembangan Resort Kabupaten gunung Kidul pengembangan dan Pengelolaan Website "Jogja Invest" 2. Study Kelayakan (Feasibility Study) Kawasan Industri Sedayu Kabupaten Bantul (Triateral)	1 dokumen 1 Paket 1 dokumen	DIY	Rp. 462.666.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.16.1.16.01.18	PROGRAM PENGINGKATAN PERUMAHAN, KEBUMAHKANDAN, KEBUDAYAAN, DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN INVESTASI						Rp. 3.817.543.200,00				Rp. 3.478.370.200,00 (-)		
1.16.1.16.01.18.007	Perluasan Jaringan Penjualan Potensi Investasi	Jumlah surat perjanjian prinsip 354 Jln		1. Pameran Investasi di DIY 2. Pameran Investasi di Luar negeri 3. Pameran Investasi di Luar	1 Kali 1 Kali 2 Kali	Jawa, Luar Negeri, Luar Negeri	Rp. 3.635.251.000,00	1. Pameran Investasi di DIY 2. Pameran Investasi di Luar negeri 3. Pameran Investasi di Luar	1 Kali 1 Kali 2 Kali	Jawa, Luar Negeri, Luar Negeri	Rp. 3.296.078.000,00 (-)	Rp. 339.173.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Anggaran Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software pada BPPW dan Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempak / Box Deposit pada Koperda Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN

TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Usunan/Program /kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Pulau Jawa				Pemeran Investasi di Pulau Jawa	1 Kali				
				Pemeran Investasi di Pulau Jawa	1 Kali			Pemeran Pekan Raya Jakarta (PRJ)	1 Kali				
				Pemeran	1 Kali			Pemeran Pembangunan	1 Kali				
				Pemeran Potensi Unggulan Daerah (Sekaten)	1 Kali			Pemeran Potensi Unggulan Daerah (Sekaten)	1 Kali				
				Temu Bisnis	3 Kali			Temu Bisnis	3 Kali				
				Peluang Investasi Dengan Investor Potensial				Peluang Investasi Dengan Investor Potensial					
1.16.1.16.01.15.018	Koordinasi Percepatan Dan Pemertan Realisasi Investasi	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	354 Ijin	1. Rapat Kerja Road Map Quick Win RUP	6 Kali rapat kerja	DIY	Rp. 182.292.200,00	1. Rapat Kerja Road Map Quick Win RUP	6 Kali rapat kerja	DIY	Rp. 182.292.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17	Kebudayaan			2. Koordinasi Percepatan dan Pemertan Realisasi Investasi di 3 Kab yaitu Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan DIY	8 Kali rapat kerja								
1.17.02	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.												
1.17.1.16.02.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA*						Rp. 649.170.000,00				Rp. 649.170.000,00		
1.17.1.16.02.15.005	Aktualisasi Potensi Seni, Adat dan Tradisi Daerah	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	1. Temu Wicara dengan Masyarakat DIY di Jakarta	1 Kali	DKI Jakarta, TMII	Rp. 649.170.000,00	1. Temu Wicara dengan Masyarakat DIY di Jakarta	1 Kali	DKI Jakarta, TMII	Rp. 649.170.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Gelar Citra Budaya Tradisi Nusantara	1 Kali			2. Gelar Citra Budaya Tradisi Nusantara	1 Kali				
				3. Diklat Kerajinan	1 Kali			3. Diklat Kerajinan	1 Kali				
				4. Diklat Tari	1 Kali			4. Diklat Tari	1 Kali				
				5. Diklat Ketoprak	1 Kali			5. Diklat Ketoprak	1 Kali				
				6. Gelar Seni Budaya (GSE)	1 Kali			6. Gelar Seni Budaya (GSE)	1 Kali				
				7. Pesona Budaya Nusantara	1 Kali			7. Pesona Budaya Nusantara	1 Kali				
1.20	Otonomi Daerah, Penerimaan Umum, Adm Keuangan Daerah, Peranglat Daerah, Kewalaln, dan Persandia												

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.13	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.													
1.20.1.16.13.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH						Rp. 1.291.584.750,00				Rp. 1.291.584.750,00	Rp. 0,00		
1.20.1.16.13.25.037	Penanganan, monitoring dan Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri	Persentase kespepatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Monitoring dan Evaluasi kerjasama Dalam Negeri	5 kerjasama	DIY, Daerah lain mitra kerja sama	Rp. 214.695.000,00	Monitoring dan Evaluasi kerjasama Dalam Negeri	5 kerjasama	DIY, Daerah lain mitra kerja sama	Rp. 214.695.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Rapat Kerja Tim Kerjasama Dalam Negeri	4 Kali			Rapat Kerja Tim Kerjasama Dalam Negeri	4 Kali					
				terlaksananya koordinasi kerjasama penerintah swasta	1 kali			terlaksananya koordinasi kerjasama penerintah swasta	1 Kali					
1.20.1.16.13.25.038	Penanganan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	Persentase kespepatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Hospitality Mitra KSLN	5 Mitra KSLN	DIY, Korea Selatan, Jepang, austraile, Shanghai	Rp. 1.076.889.750,00	Hospitality Mitra KSLN	5 Mitra KSLN	DIY, Korea Selatan, Jepang, Jerman, austraile, Shanghai	Rp. 1.076.889.750,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan target kinerja pada indikator kinerja Pengjakaan dan Tindak lanjut kerjasama ke Luar Negeri dari 4 Negara menjadi 5 Negara yaitu Jepang, Australia, Korea, China, Jerman
				Interdap pembahasan kerjasama	1 rekomendasi			Interdap pembahasan kerjasama	1 rekomendasi					
				Joint Working Group Mitra Kerjasama Luar Negeri	2 Mitra Kerjasama			Joint Working Group Mitra Kerjasama Luar Negeri	2 Mitra Kerjasama					
				Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	4 kab: 1 kota			Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	4 kab: 1 kota					
				Pengjakaan dan Tindak lanjut kerjasama ke Luar Negeri	4 Negara			Pengjakaan dan Tindak lanjut kerjasama ke Luar Negeri	5 Negara					
				Reafirmasi Kerjasama Sister Province	2 kerjasama			Reafirmasi Kerjasama Sister Province	2 kerjasama					
Total							Rp. 11.699.400.200,00				Rp. 11.375.860.000,00	(-) Rp. 323.540.200,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan														
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.17	Wajib													
1.17.01	Kebudayaan													
1.17.17.01.01	Dinas Kebudayaan													
1.17.17.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 3.137.300.000,00				Rp. 3.518.200.100,00	Rp. 380.900.100,00	
1.17.17.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman dokumen	3239 surat	Dinas Kebudayaan	Rp. 4.775.000,00	Pengiriman dokumen	3239 surat	Dinas Kebudayaan	Rp. 4.775.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					Surat Keluar	520 surat		Surat masuk	4500 surat					
					Surat masuk	4500 surat								
1.17.17.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran tagihan rekening air 15 m3	12 bulan	Dinas Kebudayaan	Rp. 1.000.000.000,00	Pembayaran tagihan rekening listrik 3 domain	12 bulan	Dinas Kebudayaan	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					Pembayaran tagihan internet 1,5 Mbps	12 bulan		Pembayaran tagihan internet 1,5 Mbps	12 bulan					
					Pembayaran tagihan rekening air 15 m3	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening air 15 m3	12 bulan					
					Pembayaran tagihan rekening listrik 120 Kwh	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening listrik 120 Kwh	12 bulan					
					Pembayaran tagihan rekening telepon 4 Sambungan	12 bulan		Pembayaran tagihan rekening telepon 4 Sambungan	12 bulan					
1.17.17.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pengiriman barang dan Dokumen Dinas/operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	14 unit		Rp. 13.200.000,00	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	14 unit	Dinas Kebudayaan	Rp. 13.200.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.17.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium Pengelola Keuangan dan barang daerah	20 Orang		Rp. 159.159.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan dan barang daerah	25 KPA	Dinas Kebudayaan	Rp. 407.469.000,00	Rp. 248.310.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.17.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan gedung kantor	9090 m2		Rp. 445.000.000,00	Kebersihan gedung kantor	9090 m2	Dinas Kebudayaan	Rp. 445.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.17.01.01.01.010	penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor	50 jenis		Rp. 56.801.000,00	Alat tulis kantor	50 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 56.801.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.17.01.01.01.011	Penyediaan barang persediaan pengadaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang Cetaklan 2.Penggunaan	12 unit 101250 lembar	Dinas Kebudayaan	Rp. 190.000.000,00	1. Barang Cetaklan 2.Penggunaan	12 unit 101250 lembar	Dinas Kebudayaan	Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.17.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	39 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 96.500.000,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	39 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 96.192.500,00	(-) Rp. 307.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.17.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan	Prosentase Pelayanan	100 %	1.Surat Kabar 2. Majalah	2 jenis 0 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 15.000.000,00	1.Surat Kabar 2. Majalah	2 jenis 0 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan														
Kode	Usuran/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	peraturan perundang-undangan	Administrasi Perkantoran		3. Buku Keputakaan	3 jenis			3. Buku Keputakaan	3 jenis				Penambahan : perubahan dari belanja barang jasa ke belanja modal	
1.17.1.17.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.umbul umbul	20 bh	Dinas Kebudayaan	Rp. 57.365.000,00	-1.umbul umbul	20 buah	Dinas Kebudayaan	Rp. 57.365.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				3. isi tabung gas	14 bh			3. isi tabung gas	14 buah					
				bendara merah putih	50 bh			bendara merah putih	50 buah					
1.17.1.17.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	makanan dan minuman sidang dan extrafooding	6000 kali	Dinas Kebudayaan	Rp. 74.500.000,00	makanan dan minuman sidang dan extrafooding	6000 kali	Dinas Kebudayaan	Rp. 74.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.17.1.17.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Konsultasi & koordinasi dalam daerah	12 bulan	Dinas Kebudayaan	Rp. 265.000.000,00	1. Konsultasi & koordinasi dalam daerah	12 bulan	Dinas Kebudayaan	Rp. 265.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. Konsultasi & koordinasi dalam daerah	12 bulan			2. Konsultasi & koordinasi dalam daerah	12 bulan					
1.17.1.17.01.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung /tempat kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya penjaga keamanan kantor	1 tahun	Dinas Kebudayaan	Rp. 760.000.000,00	Terbayarnya penjaga keamanan kantor	1 tahun	Dinas Kebudayaan	Rp. 892.897.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : - Penambahan tenaga keamanan untuk diars 3 bin x 4 orang dan kekurangan gaji untuk MSB selama 2 bulan serta kekurangan personil MSB 3 bin x 8 orang	
1.17.1.17.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 1.802.000.000,00				Rp. 1.801.300.000,00	(-) Rp. 700.000,00		
1.17.1.17.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan kantor	18 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 900.000.000,00	Tersedianya peralatan kantor	18 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 899.800.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.17.1.17.01.02.022	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	11 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 92.000.000,00	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	11 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 92.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.17.1.17.01.02.024	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	14 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 428.000.000,00	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	14 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 428.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.17.1.17.01.02.026	Pemeliharaan rutin/bekala perlengkapan gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor terpelihara	9 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 67.000.000,00	Perengkapan gedung kantor terpelihara	9 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 67.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.17.1.17.01.02.028	Pemeliharaan rutin/bekala peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	peralatan gedung kantor terpelihara	20 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan	Rp. 315.000.000,00	peralatan gedung kantor terpelihara	20 jenis	Dinas Kebudayaan	Rp. 314.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.17.1.17.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS						Rp. 200.000.000,00				Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00		

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan														
Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Sumber Bina	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/ Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	SUMBERDAYA APARATUR													
1.17.1.17.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	sumber daya aparatur yang mengikut dilat meningkat kemampuanya	80 Orang	Dinas Kebudayaan	Rp. 1.100.000.000,00	sumber daya aparatur yang mengikut dilat meningkat kemampuanya	80 Orang	Dinas Kebudayaan	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.1.17.01.05.042	Binligian Teknis Perencanaan Keuangan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	SDM yang mengikut dilat meningkat kemampuanya	150 Orang	Dinas Kebudayaan	Rp. 1.100.000.000,00	SDM yang mengikut dilat meningkat kemampuanya	150 Orang	Dinas Kebudayaan	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.1.17.01.06	PROGRAM PENGUKUTAN PENCEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PELAPARAN KAPALAN DAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 536.781.600,00				Rp. 536.781.600,00	Rp. 0,00		
1.17.1.17.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Terwujudnya penatubasthaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelncaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nial Laki SKPD	76 Skor	Dinas Kebudayaan	Rp. 20.000.000,00	Nial Laki SKPD	76 Skor	Dinas Kebudayaan	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.1.17.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatubasthaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelncaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesengangan Anggaran Kas dengan realisasi anggaran SKPD	5 %	Dinas Kebudayaan	Rp. 70.000.000,00	Kesengangan Anggaran Kas dengan realisasi anggaran SKPD	5 %	Dinas Kebudayaan	Rp. 70.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.1.17.01.06.018	penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	Terwujudnya penatubasthaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelncaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA, DPA, Sistem Informasi	1 tahun	Dinas Kebudayaan	Rp. 235.081.600,00	ROPK, Renja, RKA, DPA, Sistem Informasi	1 tahun	Dinas Kebudayaan	Rp. 235.081.600,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.17.1.17.01.06.019	monitoring dan evaluasi palaksanaan program kegiatan SKPD	Terwujudnya penatubasthaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelncaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 persen	Dinas Kebudayaan	Rp. 211.700.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 persen	Dinas Kebudayaan	Rp. 211.700.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.17.1.17.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*						Rp. 25.000.000,00				Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	
1.17.1.17.01.16.090	Pembinaan Lembaga Pelestari Warisan Budaya	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50,29 %	Pembinaan Lembaga Pelestari Warisan Budaya	2 Lembaga Pelestari Warisan Budaya	DIY	Rp. 25.000.000,00	Pembinaan Lembaga Pelestari Warisan Budaya	2 Lembaga Pelestari Warisan Budaya	DIY	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total							Rp. 5.701.081.600,00				Rp. 6.081.281.700,00	Rp. 380.200.100,00	

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

[illegible]

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

Indikator Program				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Data	Keterangan
Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Tokol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.19.1.19.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat Kabar Majalah	4 jenis	(7)	Rp. 5.600.000,00	Surat Kabar, Majalah	4 jenis	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 5.600.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Penyediaan Makanan dan minuman lembur - Penyediaan Makanan dan minuman rapat	50 Orang 2000 Orang		Rp. 23.000.000,00	- Penyediaan Makanan dan minuman lembur - Penyediaan Makanan dan minuman rapat	50 Orang 2000 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 23.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.01.018	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Perjalanan Dalam Daerah - Perjalanan Luar Daerah	2 Bidang 1 Sekretaris 2 Bidang 1 Sekretaris		Rp. 227.000.000,00	- Perjalanan Dalam daerah - Perjalanan Luar Daerah	2 Bidang 1 Sekretlat 2 Bidang 1 Sekretlat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 227.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	1 tahun		Rp. 35.000.000,00	Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	1 tahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 1.223.000.000,00				Rp. 1.223.000.000,00	Rp. 0,00		
1.19.1.19.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Mobil Operasional Kantor	1 unit		Rp. 198.000.000,00	Kendaraan Mobil Operasional Kantor	1 unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 198.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Belanja AC 2. Belanja Gorden 3. Belanja Jam Dinding	7 buah 500 meter 4 buah		Rp. 100.000.000,00	1. Belanja AC 2. Belanja Gorden 3. Belanja Jam Dinding	7 buah 500 meter 4 buah	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02.008	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Komputer 2. Lap Top Core i5 3. Printer Epson L210 series 4. LCD Monitor 5. Microphon 6. Mic Cable 7. Stan Mic Table	3 buah 2 buah 6 buah 2 buah 1 unit 1 unit 2 buah		Rp. 85.000.000,00	1. komputer 2. Lap Top Core i5 3. Printer Epson L210 series 4. LCD Monitor 5. Mikrophon 6. Mic Cable 7. Stan Mic Table	3 buah 2 buah 6 buah 2 buah 1 unit 1 unit 2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 85.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02.010	Pengadaan Mebelur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Meja rapat 2. Meja Rapat Oval Rr. Kepala (R.Tamu) 3. Kursi Rapat 4. Almari meja computer 5. Podium Narasumber berdiri	50 unit 1 unit 100 unit 4 unit 1 unit		Rp. 140.000.000,00	1. Meja rapat 2. Meja Rapat Oval Rr. Kepala (R.Tamu) 3. Kursi Rapat 4. Almari meja computer 5. Podium Narasumber berdiri	50 unit 1 unit 100 unit 4 unit 1 unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 140.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung Kantor dalam kondisi baik nyaman untuk bekerja	1 Paket		Rp. 110.000.000,00	Gedung Kantor dalam kondisi baik nyaman untuk bekerja	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Data	Keterangan
		Tokol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.19.1.19.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	9 mobil dan 19 sepeda motor dinas berfungsi baik	9 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 340.000.000,00	9 mobil dan 19 sepeda motor dinas berfungsi baik	9 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 340.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkingan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor terpelihara	1 Paket		Rp. 25.000.000,00	Perengkapan gedung kantor terpelihara	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor yang baik mendukung kelancaran dan kenyamanan kerja	8 jenis		Rp. 20.000.000,00	Peralatan Gedung Kantor yang baik mendukung kelancaran dan kenyamanan kerja	8 jenis	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan/Pengembangan Jaringan Internet	1 Paket		Rp. 5.000.000,00	Pemeliharaan/Pengembangan Jaringan Internet	1 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Aula Seminar/Biniek Gedung Kantor dalam kondisi baik	1 Unit Gedung Kantor		Rp. 200.000.000,00	Aula Seminar/Biniek Gedung Kantor dalam kondisi baik	1 unit Gedung kntnr	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDATA APARATUR						Rp. 362.680.000,00				Rp. 362.680.000,00	Rp. 0,00		
1.19.1.19.01.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Aparat memahami peraturan per-UU-an	3 akt x 30 Orang; 1 akt x 6 orang		Rp. 45.000.000,00	Aparat memahami peraturan per-UU-an	3 akt x 30 Orang; 1 akt x 6 orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.05.011	Pembinaan Korps Musik Pemuda DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Meningkatnya kemampuan Anggota Korsik	38 Orang		Rp. 55.000.000,00	Meningkatnya kemampuan Anggota Korsik	38 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.05.012	Publikasi Media Cetak dan Elektronik	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	1.Liputan Televisi & Dialog Interaktif di TV 2. Buku Saku 3. Spanduk peringatan Hari Besar	30 kali, 1 kali Dialog Interaktif di TV 2500 lembar 10 buah		Rp. 50.000.000,00	1.Liputan Televisi & Dialog Interaktif di TV 2. Buku Saku 3. Spanduk peringatan Hari Besar	30 kali, 1 kali Dialog Interaktif di TV 2500 lembar 10 buah	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.05.024	Pengembangan Teknologi Informasi	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	1. Update/penyempurnaan tampilan website 2. Pengelbnaan Website Badan Kesbanglinmas	1 Paket 1 tahun		Rp. 100.000.000,00	1. Update/penyempurnaan tampilan website 2. Pengelbnaan Website Badan Kesbanglinmas	1 Paket 1 tahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.05.062	Updating Data Bidang Kesbanglinmas	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Data Bidang Kesbanglinmas	1 dokumen		Rp. 32.280.000,00	Data Bidang Kesbanglinmas	1 dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat	Rp. 32.280.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas														
Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.19.1.19.01.05.063	Penyusunan Data Hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Buku Data Hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres	1 dokumen		Rp. 50.000.000,00	Buku Data Hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres	1 dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.05.065	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Pegawai Eselon III/IV , Staf memahami PRRG di aplikasikan dalam kegiatan	30 orang 3 hari		Rp. 30.400.000,00	Pegawai Eselon III/IV , Staf memahami PRRG di aplikasikan dalam kegiatan	30 orang 3 hari	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat	Rp. 30.400.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 157.909.000,00				Rp. 157.909.000,00	Rp. 0,00		
1.19.1.19.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD	3 jenis		Rp. 9.374.000,00	LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD	3 jenis	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat	Rp. 9.374.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan Keuangan Badan Kesbanglinmas DIY	100 %		Rp. 12.500.000,00	Tersusunnya Laporan Keuangan Badan Kesbanglinmas DIY	1 dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat	Rp. 12.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Penganggaran Data dan Informasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen Perencanaan Tahun 2016 dan ABT 2015	1 dokumen		Rp. 96.410.000,00	Dokumen Perencanaan Tahun 2016 dan ABT 2015	1 dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat	Rp. 96.410.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.06.019	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan	9 Program		Rp. 39.625.000,00	Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan	9 Program	Kabupaten/Kota se DIY	Rp. 39.625.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN						Rp. 5.209.418.900,00				Rp. 5.209.418.900,00	Rp. 0,00		
1.19.1.19.01.15.043	Peningkatan Kapasitas SAR Linmas	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Anggota SAR Linmas DIY yang berada di wilayah dan banops terlatih dalam manajemen darurat	60 orang (30 org x 4 hr x 2 angk)		Rp. 3.600.000.000,00	Anggota SAR Linmas DIY yang berada di wilayah dan banops terlatih dalam manajemen darurat	60 orang (30 org x 4 hr x 2 angk)	DIY	Rp. 3.600.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas									
Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				menangani korban kecelakaan yang berada di dalam bus				menangani korban kecelakaan yang berada di dalam bus	
				Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan SAR Linmas DIY	12 laporan (bulanan)			Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan SAR Linmas DIY	12 laporan (bulanan)
				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Raker Fasilitas dan Koordinasi SATLINMAS DIY	5 laporan			Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Raker Fasilitas dan Koordinasi SATLINMAS DIY	5 laporan
				Laporan penerimaan intensifikasi paket haji dan umrah bagi anggota SAR Linmas DIY	315 Orang, 12 bulan			Laporan penerimaan intensifikasi paket haji dan umrah bagi anggota SAR Linmas DIY	315 Orang, 12 bulan
				Rapat kerja Fasilitas dan koordinasi SATLINMAS DIY di kabupaten/kota	5 angkatan			Rapat kerja Fasilitas dan koordinasi SATLINMAS DIY di kabupaten/kota	5 angkatan
1.19.1.19.01.15.044	Peningkatan Surpras SAR Linmas	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Almari	1 buah		Rp. 400.000.000,00	Almari	1 buah
				Bangkit	1 Paket			Bangkit	1 Paket
				Filling cabinet	1 buah			Filling cabinet	1 buah
				Kapal motor SAR Linmas siap pakai untuk mendukung kegiatan operasional	1 unit			Kapal motor SAR Linmas siap pakai untuk mendukung kegiatan operasional	1 unit
				Pompa Air	1 unit			Pompa air	1 unit
				Posko SAR	1 unit			Posko SAR	1 unit
				Scop stretcher	12 buah			Scop stretcher	12 buah
				SRT	2 set			SRT	2 set
				Tali carmantel	200 meter			Tali carmantel	200 meter
				Tali lempar	22 buah			Tali lempar	22 buah
				Terbayarnya BBM mobil operasional	3 wilayah			Terbayarnya BBM mobil operasional	3 wilayah
				Terbayarnya biaya jasa service/penawatan mobil operasional	3 wilayah			Terbayarnya biaya jasa service/penawatan mobil operasional	3 wilayah
				Terbayarnya biaya listrik	6 wilayah			Terbayarnya biaya listrik	6 wilayah
				Terbayarnya biaya PDAM	4 wilayah			Terbayarnya biaya PDAM	4 wilayah
				Terpeliharanya compresor selam	1 unit			Terpeliharanya compresor selam	1 unit
				Terpeliharanya motor tempel	3 unit			Terpeliharanya motor tempel	3 unit
				Terpeliharanya pelampung	20 buah			Terpeliharanya pelampung	20 buah
				Terpeliharanya tabung selam	8 buah			Terpeliharanya tabung selam	8 buah
				Water torn	1 buah			Water Torn	1 buah
1.19.1.19.01.15.045	Koordinasi Penanganan Potensi Kerawanan Kamanan	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Koordinator/anggota kasus terdapat dalam manajemen penanganan wilayah	8 angkatan (@40 orang)		Rp. 181.190.000,00	Koordinator/anggota kasus terdapat dalam manajemen penanganan wilayah	8 angkatan (@40 orang)
				Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan SATLINMAS DIY	12 laporan			Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan SATLINMAS DIY	12 laporan
1.19.1.19.01.15.046	Pengembangan Jaga Warga	Penurunan kasus	250 kasus	1. FGD	5 kab/kota		Rp. 800.000.000,00	1. FGD	5 Kab / Kota
				2. Pelatihan Uji coba Modul	5 kab/kota			2. Pelatihan Uji coba Modul	5 kab/kota

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Data	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		pelanggaran perda		3.Sosialisasi Pembentukan Jaga warga	3 Kabupaten di DIY			3.Sosialisasi Pembentukan Jaga warga	3 kabupaten					Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				4.Fasilitasi Pembentukan Jaga warga	3 kabupaten			4. Fasilitas Pembentukan Jaga a warga	3 kabupaten					
				5. Workshop Evaluasi Jaga warga	2/2 laporan			5. Workshop Evaluasi Jaga warga	2/2 laporan					
1.19.1.19.01.15.047	Koordinasi OKP, Ormas dan Orsaspol	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. pemberdayaan Partai Politik	1 Paket		Rp. 228.228.900,00	1. Pemberdayaan partai Politik	1 Paket	DIY	Rp. 228.228.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				2. Forum Diskusi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	50/2 laporan			2. Forum Diskusi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	50/10 laporan					
				3. Rapat kerja antara Ormas/LSM dan Orpol	50/1 laporan			3. rapat kerja Antara Ormas/LSM dan Orpol	50/2 laporan					
				4. Forkom Antara Partai Politik	50/1 laporan			4. Forkom Antara Partai Politik	50/1 aporan					
				5. Pengkajian Bela Negara Bagi Ormas/LSM dan Orpol	50/6 laporan			5. Pengkajian Bela Negara bagi Ormas/LSM dan Orpol	50/6 laporan					
				6. Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas/LSM di DIY	50/2 laporan			6. Optimalisas Fungsi dan Peran Ormas/LSM di DIY	50/2 laporan					
1.19.1.19.01.17	PROGRAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN WAWASAN KEBANGSAAN						Rp. 457.956.100,00				Rp. 457.956.100,00	Rp. 0,00		
1.19.1.19.01.17.014	Fasilitasi Kerjasama dengan Satuan Kerja, Ormas, lembaga Warga Lainnya	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Ormas PWRI	1 ormas		Rp. 7.956.100,00	Ormas PWRI	1 ormas	PWRI di DIY	Rp. 7.956.100,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.19.1.19.01.17.020	Koordinasi Forum kemitraan	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Laporan Kerja dan Rekomendasi Forum Kerkunan Umot Beragama (FKUB)	6 laporan/rekomendasi		Rp. 200.000.000,00	Laporan Kerja dan Rekomendasi Forum Kerkunan Umot Beragama (FKUB)	6 laporan/rekomendasi	DIY	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				Laporan kerja dan Rekomendasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (RKDM)	6 laporan/rekomendasi			Laporan kerja dan Rekomendasi Forum Kewspadaan Dini Masyarakat (RKDM)	6 laporan/rekomendasi					
				Laporan Kerja dan Rekomendasi Pembauran Kebangsaan (FPK)	6 laporan/rekomendasi			Laporan kerja dan rekomendasi Forum Pembauran Kebangsaan	6 laporan/rekomendasi					
1.19.1.19.01.17.021	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Kemah bakti Lomba paduan suara lagu-lagu wajib bagi kebangsaan Indonesia bagi PKK	100/1 laporan		Rp. 250.000.000,00	Kemah bakti Lomba paduan suara lagu-lagu wajib bagi kebangsaan Indonesia bagi PKK	100/1 laporan	DIY	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				Pentas Ragam budaya	10/1 laporan			Pentas Ragam budaya	10/1 laporan					
				Sarasehan Pendidikan wawasan kebangsaan bagi Siswa SMP/ sederajat di DIY	100/3 laporan			Sarasehan Pendidikan wawasan kebangsaan bagi Siswa SMP/ sederajat di DIY	100/3 laporan					
				Sarasehan pendidikan wawasan kebangsaan bagi Siswa SMK/ sederajat di DIY	100/3 laporan			Sarasehan pendidikan wawasan kebangsaan bagi Siswa SMK/ sederajat di DIY	100/3 laporan					
1.19.1.19.01.23	PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT						Rp. 294.499.000,00				Rp. 484.499.000,00	Rp. 190.000.000,00		
1.19.1.19.01.23.024	penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Ormas	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk untuk community Policing	3 kab/kota	Rekomendasi Perijinan	3000 rekomendasi perijinan		Rp. 20.000.000,00	Rekomendasi Perijinan	3000 rekomendasi perijinan	DIY	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

Kode		Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
				Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.19.1.19.01.23.025	Koordinasi Pemantuan Orang Asing	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk untuk community Policing	3 kab/kota	Laporan Pengawasan Orang Asing di DIY	12 laporan (bulanan)		Rp. 25.504.000,00	Laporan Pengawasan Orang Asing di DIY	12 laporan (bulanan)	DIY	Rp. 25.504.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Pemanfaatan : -
1.19.1.19.01.23.026	Koordinasi Cipta Kondusif Daerah	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk untuk community Policing	3 kab/kota	Laporan Pemantauan pelaksanaan PKGN di DIY	4 laporan		Rp. 248.595.000,00	Laporan Pemantauan pelaksanaan PKGN di DIY	4 laporan	DIY	Rp. 248.595.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Pemanfaatan : -
1.19.1.19.01.23.028	Desk Penyelenggaraan Pilkada	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk untuk community Policing	3 kab/kota	-	0 -	-	Rp. 0,00	Kondisi kondusif dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kab. Sleman, Bantul, dan Gunungkidul	3 kabupaten	3 kabupaten di DIY (Sleman, Bantul, dan Gunungkidul)	Rp. 190.000.000,00	Rp. 190.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Pemanfaatan : - Penyelenggaraan Pilkada
Total											Rp. 8.417.274.000,00	Rp. 212.059.984,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Usuran /Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1	Wajib		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja													
1.19.1.19.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 687.480.000,00					Rp. 716.750.000,00	Rp. 29.270.000,00	
1.19.1.19.02.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Keluar 2. Surat Masuk 3. Pengiriman Dokumen	720 surat 720 surat 250 surat	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 4.950.000,00	1. Surat Keluar 2. Surat Masuk 3. Pengiriman Dokumen	720 surat 720 surat 250 surat	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 4.950.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 13.600 Kwh, 7.700 Kwh, 900 Kwh 3. Pembayaran tagihan internet (unlimited) 4. Pembayaran sewa tanah repeater	12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 56.000.000,00	1. Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 13.600 Kwh, 7.700 Kwh, 900 Kwh 3. Pembayaran tagihan internet (unlimited) 4. Pembayaran sewa tanah repeater	12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 82.200.000,00	Rp. 26.200.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : 1. Usulan penambahan anggaran dikarenakan adanya kekurangan anggaran untuk pembayaran listrik di Gedung Satepol PP di TIC Lantai II (sejak pemasangan listrik baru-penambahan daya-tambah AC+TDL naik); 2. Untuk pembayaran kekurangan biaya sewa tanah repeater yg mana mestinya Rp. 2.000.000,- per tahun hanya dapat teranggarkan Rp. 1.400.000,- per tahun sehingga masih kurang Rp. 1.200.000,-
1.19.1.19.02.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 dan 4 yang tepat waktu 2. Bukti Pembayaran KIR Kendaraan	16 unit 4 unit	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 10.000.000,00	1. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 dan 4 yang tepat waktu 2. Bukti Pembayaran KIR Kendaraan	16 unit 4 unit	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian.	13 Orang/ Bulan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 22.430.000,00	Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian.	13 Orang/ Bulan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 25.500.000,00	Rp. 3.070.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Adanya kekurangan anggaran untuk honorarium pengelola keuangan dan barang sebanyak 13 orang selama 2 bulan akibat penyesuaian SHB).
1.19.1.19.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Kebersihan Kantor	17390 m2	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 30.000.000,00	Jasa Kebersihan Kantor	17390 m2	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	49 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 34.600.000,00	Alat Tulis Kantor	49 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 34.600.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang Cetak 2. Penggandaan	15 unit/ buku 129300 lembar	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 30.000.000,00	1. Barang Cetak 2. Penggandaan	15 unit/ buku 129300 lembar	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.19.1.19.02.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 5.000.000,00	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00
1.19.1.19.02.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Kabar/ Majalah 2. Referensi Kedisnasan 3. Buku Kepustakaan	5 jenis 2 jenis 3 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 5.250.000,00	1. Surat Kabar/ Majalah 2. Referensi Kedisnasan 3. Buku Kepustakaan	5 jenis 2 jenis 3 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 5.250.000,00	Rp. 0,00
1.19.1.19.02.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Makanan Minum Sdnang	4090 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 52.190.000,00	1. Makanan Minum Sdnang	4090 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 52.190.000,00	Rp. 0,00
1.19.1.19.02.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 200.000.000,00	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00
1.19.1.19.02.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (keamanan/empat kerja)	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa keamanan kantor	12 bulan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 237.060.000,00	Jasa keamanan kantor	12 bulan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 237.060.000,00	Rp. 0,00
1.19.1.19.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 700.060.000,00				Rp. 699.460.000,00	(-) Rp. 600.000,00
1.19.1.19.02.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 2. Sepeda	2 unit 2 unit	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 400.000.000,00	1. Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 2. Sepeda	2 unit 2 unit	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00
1.19.1.19.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor (almari buku, brankas, filing cabinet, AC Split)	4 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 35.500.000,00	Perlengkapan Gedung Kantor (almari buku, brankas, filing cabinet, AC Split)	4 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 35.500.000,00	Rp. 0,00
1.19.1.19.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor (Pengaruhur kertas, komputer PC, printer, Handy GPS)	4 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 30.000.000,00	Peralatan Gedung Kantor (Pengaruhur kertas, komputer PC, printer, Handy GPS)	4 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00
1.19.1.19.02.02.024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (7kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 2, 2 kendaraan roda 6 dan 3 sepeda)	4 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 189.385.000,00	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (7kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 2, 2 kendaraan roda 6 dan 3 sepeda)	4 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 188.785.000,00	(-) Rp. 600.000,00
1.19.1.19.02.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 13.125.000,00	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	6 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 13.125.000,00	Rp. 0,00

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.19.1.19.02.03	1.19.1.19.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor terpelihara	14 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 32.050.000,00	Peralatan Gedung Kantor terpelihara	14 jenis	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 32.050.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						Rp. 184.990.000,00				Rp. 179.790.000,00	(-) Rp. 5.200.000,00		
1.19.1.19.02.03.005	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Prosentase disiplin aparatur	100 %	1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL 1) beserta perlengkapannya 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapannya 3. Pakaian Dinas Upacara (PDU 1 dan PDU 2) beserta perlengkapannya	129 stel 129 stel 6 stel	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 184.990.000,00	1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL 1) beserta perlengkapannya 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapannya 3. Pakaian Dinas Upacara (PDU 1 dan PDU 2) beserta perlengkapannya	129 stel 129 stel 6 stel	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 179.790.000,00	(-) Rp. 5.200.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi pada rekening Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH). Penambahan : -
1.19.1.19.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 230.000.000,00				Rp. 230.000.000,00	Rp. 0,00		
1.19.1.19.02.05.041	Asuransi Jiwa	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	-	0 -	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 0,00	-	0 -	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.05.042	Pembinaan Fisik Bagi Pol PP	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	1. Upacara Peringatan HUT Pol PP 2. Peningkatan motivasi kerja dan disiplin Pol PP dan Ban Pol PP DIY 3. Kesamapaan, bela diri dan lintas medan	1 kali 3 angkatan 24 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 230.000.000,00	1. Upacara Peringatan HUT Pol PP 2. Peningkatan motivasi kerja dan disiplin Pol PP dan Ban Pol PP DIY 3. Kesamapaan, bela diri dan lintas medan	1 kali 3 angkatan 24 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 230.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KEBERHASILAN DAN KEUANGAN						Rp. 68.059.800,00				Rp. 68.059.800,00	Rp. 0,00		
1.19.1.19.02.06.016	Penyusunan Laporan SKPD	Terwujudnya penatuaasaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai Laku SKPD	75 -	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 2.797.900,00	Nilai Laku SKPD	75 -	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 2.797.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.19.1.19.02.06.019	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		Terwujudnya penatausahaan anggaran dan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesengajaan dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 6.497.000,00	Kesengajaan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 6.497.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.06.018	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya penatausahaan anggaran dan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen Pelaksanaan Program Kerja SKPD (RKPD, RENJA, RKT, RKA, PA, DPA, ROPK)	1 tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 54.066.700,00	Dokumen Pelaksanaan Program Kerja SKPD (RKPD, RENJA, RKT, RKA, PA, DPA, ROPK)	1 tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 54.066.700,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan anggaran dan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	10 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 4.698.200,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	10 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 4.698.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.15	PROGRAM PENGINGKATAN KEMAMPUAN KEWARGA MASYARAKAT LINGKUNGAN						Rp. 860.464.920,00				Rp. 860.464.920,00		
1.19.1.19.02.15.047	Pemetaan gangguan tbumtraumas	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. Peta Potensi Gangguan keamanan dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan perundang-undangan pemanfaatan aset Pemda DIY 2. Forum Koordinasi Pol PP se DIY 3. Deteksi Dini dan Pengumpulan Informasi Dalam menciptakan Kondisi Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat di DIY	3 peta 2 kali 12 bulan	DIY	Rp. 225.000.000,00	1. Peta Potensi Gangguan keamanan dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan perundang-undangan pemanfaatan aset Pemda DIY 2. Forum Koordinasi Pol PP se DIY 3. Deteksi Dini dan Pengumpulan Informasi Dalam menciptakan Kondisi Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat di DIY	3 peta 2 kali 12 bulan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 225.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.19.1.19.02.15.048	Optimalisasi Kinerja PNS	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. Sekrebrinat PNS 2. Bimbingan Teknis PPNS 3. Pembinaan dan Pengendalian oleh PNS 4. Rapat koordinasi PPNS	180 Orang 6 Hari 2 kali 2 kali	DIY	Rp. 126.712.120,00	1. Sekrebrinat PNS 2. Bimbingan Teknis PPNS 3. Pembinaan dan Pengendalian oleh PNS 4. Rapat koordinasi PPNS	180 Orang 6 Hari 2 kali 2 kali	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 126.712.120,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nana SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja														
Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Bertambah/ Berkurang	Keterangan		
Kode	Usuran /Program /kegiatan	Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				5. Kajian Implementasi Penegakan Perda	2 kali			5. Kajian Implementasi Penegakan Perda	2 kali					
1.19.1.19.02.15.049	Pengalangan Perda	Penurunan kasus pelanggaran peraturan perda	250 kasus	1. Rancangan Peraturan yang pakdian dan atribut PPNS	1 draft	DIY	Rp. 223.815.800,00	1. Rancangan Peraturan yang pakdian dan atribut PPNS	1 draft	Berimbang Bantuan Barulah Berbah Cangkiran Danurejan Depok Dingo Galiung Gedang sari Gedongtengen Grimalyo Girisubo Godolan Gondokusuman Gondomanan Gunungsari Jetis Kalasan	Rp. 100.000.000,00 Rp. 323.815.800,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi PPK : - Penambahan : -	
				2. Penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di DIY	15 Kali			2. Penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di DIY	15 kali	Kalibawang Karangmojo Kasihan Kolap Kolagede Kraton Kretek Lendah Mantrijeron Mergansan Minggir Mlati Royudan Sunggahan Tugastika Ngampilan Ngawen Ngemplak Ngipar Ngipar Pajangan Pekem Pekem Pakualaman Pakualaman Paliyan				
				3. Operasi non yustisi bagi masyarakat pelanggar perda	50 Kali			3. Operasi non yustisi bagi masyarakat pelanggar perda	70 kali	Pendak Pengang Pengang Pengang				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan							
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)							
										Prambanan Prambanan Pundong Pundong Purwosari Purwosari Rongkop Rongkop Samigaluh Samigaluh Sanden Sanden Septo sari Septo sari Sedayu Sedayu Semanu Semanu Semih Semih Sentolo Sentolo Sewon Sewon Sojayan Sojayan Sleman Sleman Slendakan Slendakan Tanjungsari Tanjungsari Tegalrejo Tegalrejo Temon Temon Tempel Tempel Tepus Tepus Turi Turi Umbluharjo Umbluharjo Wates Wates Wirobrajan Wirobrajan Wonosari Wonosari											
				4. Operasi yustisi bagi masyarakat pelanggar perda	14 Kali			4. Operasi yustisi bagi masyarakat pelanggar perda	14 Kali												
				5. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	78 Kali			5. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	100 Kali												
1.19.1.19.02.15.050	Pengendalian Gejolak Sosial Masyarakat	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Pengamanan Unjuk Rasa/Kerusuhan yang Terjadi di Lingkungan Pemerintahan Daerah DIY	87 Kali	DIY	Rp. 109.939.400,00	Pengamanan Unjuk Rasa/Kerusuhan yang Terjadi di Lingkungan Pemerintahan Daerah DIY	87 Kali	Bambanglipuro Banguntapan Bantul Berbah Cangkringan Cangkringan Depok Dlingo Galur Gamping Godang sari Godang sari Godongtengen Godongtengen Girisubo Girisubo Godean Godean	Rp. 109.939.400,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -								

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja																			
Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan						
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)						
										Pleret Pleret Porjeng Prambanan Prambanan Pundong Pundong Purwosari Rendek Rondop Samgaluh Sungailuh Sunden Sunden Supto sari Supto sari Seidayu Seidayu Semayu Semayu Semayu Sentolo Sentolo Sevon Sevon Seyegan Seyegan Sieman Sieman Srandakan Srandakan Tanjung Sari Tanjung Sari Tegalogo Tegalogo Temon Temon Tempel Tempel Tempus Tempus Turi Turi Umbulharjo Umbulharjo Wates Wates Wiradajan Wiradajan Wonorejo Wonorejo									
1.19.1.19.02.15.051	Patroli Ttburannmas dan Perbatasan	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. Operasi Penegakkan Perda di Wilayah Perbatasan DIY-Jawa Tengah 2. Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30 Kali 12 bulan	kab/kota dan perbatasan DIY-Jateng	Rp. 174.997.600,00	1. Operasi Penegakkan Perda di Wilayah Perbatasan DIY-Jawa Tengah 2. Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30 Kali 12 bin	kab/kota dan perbatasan DIY-Jateng	Rp. 174.997.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -						
1.19.1.19.02.16	PROGRAM KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL						Rp. 255.277.590,00				Rp. 255.277.590,00	Rp. 0,00							

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

[illegible]

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan				dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan						
				3. Pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan			3. Pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan					
total											Rp. 3.395.543.360,00	Rp. 3.519.013.360,00	Rp. 123.470.000,00	

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.20	Wajib													(15)
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Peningkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
1.20.1.20.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 1.330.376.000,00					Rp. 33.200.000,00	
1.20.1.20.15.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Perangkat, Materi dan Jasa Pengiriman Paket	5 jenis			Rp. 7.700.000,00	Tersedianya Perangkat, Materi dan Jasa Pengiriman Paket	5 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 7.700.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya biaya telepon, air, Terbayarnya biaya listrik, Terbayarnya biaya internet, Terbayarnya biaya TV berlangganan	5 jenis			Rp. 400.000.000,00	Tersedianya biaya telepon, air, Terbayarnya biaya listrik, Terbayarnya biaya internet, Terbayarnya biaya TV berlangganan	5 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 427.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Listrik kantor BPBD DIY selama 2 bulan
1.20.1.20.15.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas / operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya pajak, jasa KIR dan biaya mutasi kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 6, dan roda 2 dengan ridaan : 17 kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 6, 17 kendaraan roda 2	41 unit			Rp. 69.800.000,00	Tersedianya pajak, jasa KIR dan biaya mutasi kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 6, dan roda 2 dengan ridaan : 17 kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 6, 17 kendaraan roda 2	41 unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 69.770.000,00	(-) Rp. 30.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : dari Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perbaikan kendaraan dinas/Operasional,Barang Surat Tanda Nomor Kendaraan Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Kearsnahan, Keuangan, Barang dan Kepegawaian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya honor pengelola keuangan, barang dan Kepegawaian	13 Orang, 12 Bulan			Rp. 34.755.000,00	Tersedianya honor pengelola keuangan, barang dan Kepegawaian	13 Orang, 12 Bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 40.985.000,00	Rp. 6.230.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Honorarium Pengelola keuangan 13 orang 2 bulan
1.20.1.20.15.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	4 gedung, 12 bulan			Rp. 99.989.000,00	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	4 gedung, 12 bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 99.989.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya peralatan kerja	30 jenis			Rp. 55.000.000,00	Tersedianya peralatan kerja	30 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor, sekretariat dan PUSDALOPS-PB	73 jenis			Rp. 32.635.000,00	Tersedianya alat tulis kantor sekretariat dan sekretariat dan PUSDALOPS-PB	73 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 32.635.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya barang pengandaan	75600 lembar			Rp. 24.999.000,00	Tersedianya barang pengandaan	75600 lembar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 24.999.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.20.1.20.15.01.012	Penyediaan Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhi kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor	35 jenis		Rp. 20.000.000,00	Terpenuhi kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor	35 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.014	Penyediaan Perlalatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhi peralatan rumah tangga	20 jenis		Rp. 8.000.000,00	Tersedianya peralatan rumah tangga	20 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 8.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya surat kabar harian, buku pengetahuan pendukung tugas fungsi dan buku peraturan perundangan	2 jenis		Rp. 10.000.000,00	Tersedianya surat kabar harian, buku pengetahuan pendukung tugas fungsi dan buku peraturan perundangan	2 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya konsumsi rapat, pertemuan	6600 os		Rp. 66.000.000,00	Tersedianya konsumsi rapat, pertemuan	6600 os	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 66.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.018	Rak-rapit Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya dukungan penguasan pegawai untuk koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan		Rp. 275.000.000,00	Tersedianya dukungan penguasan pegawai untuk koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 275.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.022	Penyediaan Tenaga Keamanan Gedung/Kantor /Gudang	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya honor tenaga keamanan kantor, penjaga repeater, dan premi asuransi	12 bulan		Rp. 223.200.000,00	Terbayarnya honor tenaga keamanan kantor, penjaga repeater, dan premi asuransi	12 bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 223.200.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.01.026	Penyediaan Retribusi Kebersihan/Sampah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya retibusi kebersihan/sampah	12 bulan		Rp. 3.300.000,00	Terbayarnya retibusi kebersihan/sampah	12 bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 3.300.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.02	PROGRAM PENGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 2.159.990.000,00				Rp. 2.067.550.000,00	(-) Rp. 92.440.000,00		
1.20.1.20.15.02.005	Pengadaan Kendaraan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpenuhi kebutuhan Sarana Prasarana Kerpjserta mendukung kelancaran tugas Kantor	1 jenis		Rp. 0,00	Terpenuhi kebutuhan Sarana Prasarana Kerpjserta mendukung kelancaran tugas Kantor	1 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya sarana untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Kantor	8 jenis		Rp. 200.000.000,00	Tersedianya sarana untuk Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	8 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.02.009	Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpenuhi kebutuhan Sarana Prasarana Kerpjserta mendukung kelancaran tugas Kantor	5 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 400.000.000,00	Terpenuhi kebutuhan Sarana Prasarana Kerpjserta mendukung kelancaran tugas Kantor	5 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 307.560.000,00	(-) Rp. 92.440.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Pengadaan Gedung Kantor , Belanja Pengadaan Alat. Alat Studio Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Uraian/h Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang		
1.20.1.20.15.02.010	Pengadaan Mebelkur	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	Terselenggaranya Perawatan kendaraan Dinas empat roda enam dan roda dua	7 jenis		Rp. 849.990.000,00	Terselenggaranya Perawatan kendaraan Dinas empat roda enam dan roda dua	7 jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 849.990.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terselenggaranya Perawatan kendaraan dinas empat roda enam dan roda dua	41 unit		Rp. 400.000.000,00	Terselenggaranya Perawatan kendaraan dinas empat roda enam dan roda dua	41 unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan Gedung Kantor terawat	12 bulan		Rp. 35.000.000,00	Perengkapan Gedung Kantor terawat : 10 Jenis, 12 bulan.	12 bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor terawat ; Terselangnya bahan kebersihan kantor ; Terbayarnya sewa lahan untuk repeater ; Terpeliharanya genset, alat-alat IT dan jaringan komputer Pusedapjs, Terselangnya BBM genset	12 bulan		Rp. 225.000.000,00	Peralatan Gedung Kantor terawat ; Terselangnya bahan kebersihan kantor ; Terbayarnya sewa lahan untuk repeater ; Terpeliharanya genset, alat-alat IT dan jaringan komputer Pusedapjs, Terselangnya BBM genset	12 bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelkur Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan Gedung Kantor terawat	12 bulan		Rp. 50.000.000,00	Perengkapan Gedung Kantor terawat	12 bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.05	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						Rp. 138.499.900,00				Rp. 138.499.900,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.15.05.012	Publikasi Media Cetak dan Elektronik	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Liputan media, Publikasi Media cetak dan elektronik	5 kali		Rp. 82.500.000,00	Liputan media, Publikasi Media cetak dan elektronik	5 kali	Publikasi Media cetak dan elektronik	Rp. 82.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.05.024	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Ekspose sistem informasi kebencanaan, Pelatihan aplikasi sistem informasi kebencanaan,	40 or 1 kali 40 or 3 hr		Rp. 55.999.900,00	Ekspose sistem informasi kebencanaan, Pelatihan aplikasi sistem informasi kebencanaan,	40 or 1 kali 40 or 3 hr	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 55.999.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.06	PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan dan Keuangan						Rp. 118.144.700,00				Rp. 136.144.700,00	Rp. 18.000.000,00		

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
1.20.1.20.15.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapalan kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100 %	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LPPD, LKPI dan LAKIP	3 dokumen		Rp. 6.995.000,00	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LPPD, LKPI dan LAKIP	3 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 6.995.000,00	Rp. 0,00			
1.20.1.20.15.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan		100 %	Tersusumnya laporan keuangan dan prognosis realisasi anggaran	2 dokumen		Rp. 18.150.000,00	Tersusumnya laporan keuangan dan prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 18.150.000,00	Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.06.018	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan serta Pengembangan Data dan Infromasi		100 %	Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan	5 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 77.000.000,00	Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan	5 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 95.000.000,00	Rp. 18.000.000,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD		100 %	Diketauhinya permasalahan pelaksanaan program di BPBD DTY dan rekomendasi tindak lanjut	12 dokumen		Rp. 15.999.700,00	Diketauhinya permasalahan pelaksanaan program di BPBD DTY dan rekomendasi tindak lanjut	12 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 15.999.700,00	Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.45	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA						Rp. 3.623.059.135,00					(-) Rp. 14.537.900,00			
1.20.1.20.15.45.001	Koordinasi dan Fasilitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB) DTY	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	(6) GPS Tracker (8) UPS Gedung spek 3 pass (1) LED TV 42" (10) rak dokumen (11) Penghancur kertas (12) Langganan TV Berbayar (13) Pulsa SMS Gateway (14) Pulsa Telepon Satelit (15) Operasional Pusedalops-PB	10 unit 1 unit 2 buah 3 buah 1 buah 12 bulan (1 tahun) 12 bulan (1 tahun) 4 Paket 12 laporan (bulanan)		Rp. 687.155.260,00	(6) GPS Tracker (8) UPS Gedung spek 3 pass (1) LED TV 42" (10) rak dokumen (11) Penghancur kertas (12) Langganan TV Berbayar (13) Pulsa SMS Gateway (14) Pulsa Telepon Satelit (15) Operasional Pusedalops-PB	10 unit 1 unit 2 buah 3 buah 1 buah 12 bulan (1 tahun) 12 bulan (1 tahun) 4 Paket 12 laporan (bulanan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 687.155.260,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	Target	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
				Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)
				(16) Honor/Insentif Satgas Pusdalops-PB	16 or			(16) Honor/Insentif Satgas Pusdalops-PB	16 or						
				(17) Peningkatan Kapasitas SDM (simulation & drill)	105 or			(17) Peningkatan Kapasitas SDM (simulation & drill)	105 or						
				(18) Pakaian Kerja Lapangan	30 buah			(18) Pakaian Kerja Lapangan	30 buah						
				(2) Mixer, Headphone, Mic Radio Komunitas	1 set			(2) Mixer, Headphone, Mic Radio Komunitas	1 set						
				(3) Software set radio Motorola dan yuesu	2 set			(3) Software set radio Motorola dan yuesu	2 set						
				(4) Network Toolkit	1 set			(4) Network Toolkit	1 set						
				(5) PC Analyzer	1 buah			(5) PC Analyzer	1 buah						
				(7) Komputer PC	8 unit			(7) Komputer PC	8 unit						
				(9) meja peta	2 buah			(9) meja peta	2 buah						
1.201.20.15.45.005	Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Peningkatan Jumlah desa tangguh	40 Desa	(1) Terasangnya Lanside EWS (EWS untuk Tanah Longsor)	300 EWS/titik lokasi		Rp. 1.099.999.900,00	(1) Terasangnya Lanside EWS (EWS untuk Tanah Longsor)	300 EWS/titik lokasi	Galur Girmulyo Kalibawang Kokap	Rp. 1.099.999.900,00	Rp. 0,00		Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi ATK : - Penambahan : -
				(2) Laporan Bulanan Pemantauan Kinerja EWS	12 laporan (bulanan)			(2) Laporan Bulanan Pemantauan Kinerja EWS	12 laporan (bulanan)						
				(3) Review Peta Risiko Bencana Kelengkapan DIY	1 dokumen peta			(3) Review Peta Risiko Bencana Kelengkapan DIY	1 dokumen peta						
				(4) desa/kelurahan tangguh di wilayah rawan bencana	10 Desa/kelurahan			(4) desa/kelurahan tangguh di wilayah rawan bencana	10 Desa/kelurahan						
1.201.20.15.45.006	Pembentukan & Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	Peningkatan Jumlah desa tangguh	40 Desa	(1) Simulasi/Gladi SSB	3 Sekolah	Gamping Godaan Mlati	Rp. 674.975.600,00	(1) Simulasi/Gladi SSB	3 Sekolah	Gamping Godaan Mlati	Rp. 673.674.500,00	(-) Rp. 1.301.100,00		Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Kegiatan Sekolah Siaga Bencana, Belanja Bahan Pakai Habis ATK Penambahan : -
				(2) Peringatan SSB	5 Sekolah			(2) Peringatan SSB	5 Sekolah						
				(3) Modul Mitigasi Bencana di Sekolah	5 Sekolah			(3) Modul Mitigasi Bencana di Sekolah	5 Sekolah						
				(4) Peta dan Jalur Evakuasi	3 Sekolah			(4) Peta dan Jalur Evakuasi	3 Sekolah						
				(5) Penyusunan Renkon sekolah	3 Sekolah			(5) Penyusunan Renkon sekolah	3 Sekolah						
				(6) Pelatihan Kesiapsiagaan	3 Sekolah			(6) Pelatihan Kesiapsiagaan	3 Sekolah						
				(7). Binteak Kurikulum PRB	3 Sekolah			(7). Binteak Kurikulum PRB	3 Sekolah						
				(8). Sosialisasi PRB	3 Sekolah			(8). Sosialisasi PRB	3 Sekolah						
1.201.20.15.45.040	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Jumlah desa tangguh	40 Desa	(1) Aparat Pemerintah yang Terlatih dlm Manajemen PB	35 orang x 5 Angkatan	Dlingo Gedung sari Girmulyo Imogiri Jettis Kalasan Kalibawang	Rp. 349.933.050,00	(1) Aparat Pemerintah yang Terlatih dlm Manajemen PB	35 orang x 5 Angkatan	Dlingo Gedung sari Girmulyo Imogiri Jettis Kalasan Kalibawang	Rp. 348.483.550,00	(-) Rp. 1.469.500,00		Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Kegiatan Penanggulangan Bencana - Belanja Bahan Pakai Habis ATK Penambahan : -
				(2) Penggerak Komunitas (CO)	50 orang x 5 Angkatan			(2) Penggerak Komunitas (CO)	50 orang x 5 Angkatan						

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	Target	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	(9)	(10)	(11)	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
				Indikator Kinerja	Target	(6)	(7)	Anggaran	(8)											
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
1.20.1.20.15.45.041	Peningkatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat Menghadapi Bencana	Peningkatan Jumlah desa tangguh	40 Desa	(1) Media Kampanye Publik Sadar Bencana (2) Terlaksananya Kampanye Publik Sadar Bencana (3) Aparat yang bersertifikasi di bidang penanggulangan bahaya kebakaran	3 media/jenis 3 kali 35 Orang	Kokap Pajangan Pyungan Prambanan Bambang Iipuro Bantul Berbah Dlingo Gedung sari Gondokusuman Kalibawang Lendah Moyudan Ngipilar Panjatan Pengasih Pieret Samgaluh	Rp. 464.127.475,00	(1) Media Kampanye Publik Sadar Bencana (2) Terlaksananya Kampanye Publik Sadar Bencana (3) Aparat yang bersertifikasi di bidang penanggulangan bahaya kebakaran	Rp. 464.127.475,00	3 media/jenis 3 kali 35 Orang	Kokap Pajangan Pyungan Prambanan Bambang Iipuro Bantul Berbah Dlingo Gedung sari Gondokusuman Kalibawang Lendah Moyudan Ngipilar Panjatan Pengasih Pieret Samgaluh	Reguler APBD	(-) Rp. 4.500.000,00		Reguler APBD					
1.20.1.20.15.45.042	Peningkatan Kapasitas Unsur Penanggulangan Bencana (PB)	Peningkatan Jumlah desa tangguh	40 Desa	(1) Laporan Kegiatan Relevan PB (2) Laporan Penanggulangan Zoonosis (3) Laporan dan Rekomendasi Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) DIY	12 laporan (bulanan) 1 laporan 6 laporan (bulanan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 346.847.850,00	(1) Laporan Kegiatan Relevan PB (2) Laporan Penanggulangan Zoonosis (3) Laporan dan Rekomendasi Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) DIY (4) Draft Regulasi Yang Mengatur PB	Rp. 346.847.850,00	12 laporan (bulanan) 1 laporan 6 laporan (bulanan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Reguler APBD	(-) Rp. 7.267.300,00		Reguler APBD					
1.20.1.20.15.46	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA							Rp. 6.189.548.185,00									Rp. 6.117.250.985,00	(-) Rp. 72.297.200,00		
1.20.1.20.15.46.041	Koordinasi dan Fasilitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tim SAR APBD DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(1) Peringkapan Assessment TRC (2) Seragam dan Peringkapan Lapangan TRC (3) Laporan Peringkapan Honor/insentif Piket TRC (4) Laporan Piket Harian TRC (5) Pakaian Kerja Lapangan Tim SAR (6) Anggota Tim SAR yang terlatih	50 Paket 50 Paket 10 orang, 3 shift, 365 hari 1 laporan 35 buah 35 orang, 3 angkatan	Kretak Samgaluh Sanden Temon	Rp. 899.311.850,00	(1) Peringkapan Assessment TRC (2) Seragam dan Peringkapan Lapangan TRC (3) Laporan Peringkapan Honor/insentif Piket TRC (4) Laporan Piket Harian TRC (5) Pakaian Kerja Lapangan Tim SAR (6) Anggota Tim SAR yang terlatih	Rp. 899.311.850,00	50 Paket 50 Paket 10 orang, 3 shift, 365 hari 1 laporan 35 buah 35 orang, 3 angkatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Reguler APBD	Rp. 0,00		Reguler APBD					Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.46.042	Latihan dan Gladi Penanggulangan Bencana	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(1) Tersesangnya Rambu dan Jalur Evakuasi (10) Table Top Exercise (TTX) (11) Rencana Garis Besar Gladi	1 Piket, 4 Lokasi 60 orang, 1 kali 1 dokumen	Kretak Samgaluh Sanden Temon	Rp. 929.588.100,00	(1) Tersesangnya Rambu dan Jalur Evakuasi (10) Table Top Exercise (TTX) (11) Rencana Garis Besar Gladi	Rp. 929.588.100,00	1 Piket, 4 Lokasi 60 orang, 1 kali 1 dokumen	Kretak Samgaluh Sanden Temon	Reguler APBD	(-) Rp. 69.290.000,00		Reguler APBD					Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penanggulangan Bencana, Belanja Pakialan Kerja Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20.1.20.15.46.043	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kedaruratan Bencana	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(1) Dokumen Kajian Kebutuhan Rambutan dan Jalur Evakuasi (2) Publikasi Pelaksanaan Gladi (3) Penyusunan Rencana Kontinjensi (4) Alat Peraga Gladi (5) Gladi Lapang 1000 Orang, 1 hari (6) Gladi Posko 107 orang, 3 kali (7) Gladi Kotor 326 Orang, 1 hari	1. Dokumen & Laporan 2. jenis, 2 media 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 Paket 1000 Orang, 1 hari 107 orang, 3 kali 326 Orang, 1 hari	(7)	Rp. 448.640.760,00	(2) Dokumen Kajian Kebutuhan Rambutan dan Jalur Evakuasi (3) Publikasi Pelaksanaan Gladi (4) Laporan Pelaksanaan Gladi (5) Penyusunan Rencana Kontinjensi (6) Alat Peraga Gladi (7) Gladi Lapang (8) Gladi Posko (9) Gladi Kotor	1. Dokumen & Laporan 2. jenis, 2 media 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 Paket 1000 Orang, 1 hari 107 orang, 3 kali 326 Orang, 1 hari	(11)	Rp. 448.640.760,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.46.044	Koordinasi Peninjauan Gudang Peralatan dan Logistik	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(1) Relawan yang memiliki kompetensi sebagai Relawan Dapur Umum (2) Stok Logistik Tanggap Darurat (3) Stok Peralatan Tanggap Darurat (4) Laporan pengumpulan Gudang Peralatan dan Logistik (5) Relawan PB yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan Gudang Peralatan dan Logistik	35 Orang 1500 Paket 15 jenis 12 laporan (bulanan) 35 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 1.271.537.775,00	(1) Relawan yang memiliki kompetensi sebagai Relawan Dapur Umum (2) Stok Logistik Tanggap Darurat (3) Stok Peralatan Tanggap Darurat (4) Laporan pengumpulan Gudang Peralatan dan Logistik (5) Relawan PB yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan Gudang Peralatan dan Logistik	35 Orang 1500 Paket 15 jenis 12 laporan (bulanan) 35 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 1.268.530.575,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Habis ATK Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.15.46.045	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Pasca Bencana	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(1) Dok. Penelitian & Pengembangan Sosial Pasca Bencana di KRB (2) Database Kelompok Rentan di KRB (kawasan Rawan Bencana) (3) Peralihan Kesenian untuk Komunitas Korban Bencana	1 Dokumen & Laporan (8 lokasi) 8 kelompok, 8 lokasi 2 set gamelan, 2 kelompok		Rp. 303.450.000,00	(1) Dok. Penelitian & Pengembangan Sosial Pasca Bencana di KRB (2) Database Kelompok Rentan di KRB (kawasan Rawan Bencana) (3) Peralihan Kesenian untuk Komunitas Korban Bencana	1 Dokumen & Laporan (8 lokasi) 8 kelompok, 8 lokasi 2 set gamelan, 2 kelompok	Cangkiring Gedung siri Girimulyo Kokap Ngipar Pakem Pakul Payen	Rp. 303.450.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.46.046	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Pasca Bencana	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(1) Dokumen Laporan Pemulihan Lingkungan Pasca Bencana (2) Penggerak komunitas untuk RR Lingkungan (3) Bantuan Bahan Paket untuk Korban Bencana	1 dok lap, 10 lokasi 50 orang, 10 kel. (@ 5 orang) 10 paket, 10 kelompok		Rp. 499.999.700,00	(1) Dokumen Laporan Pemulihan Lingkungan Pasca Bencana (2) Penggerak komunitas untuk RR Lingkungan (3) Bantuan Bahan Paket untuk Korban Bencana	1 dok lap, 10 lokasi 50 orang, 10 kel. (@ 5 orang) 10 paket, 10 kelompok	Lendah Ngipar Pakem Pakul Tunj	Rp. 499.999.700,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.46.047	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi Pasca Bencana	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(1) Dokumen Kajian Pemulihan Ekonomi (Lifelyhood) di KRB (2) Peralihan Pembuat Batako untuk Kelompok	1 laporan 1 unit, 1 kelompok		Rp. 198.650.000,00	(1) Dokumen Kajian Pemulihan Ekonomi (Lifelyhood) di KRB (2) Peralihan Pembuat Batako untuk kelompok	1 laporan 5 unit, 5 kelompok	Kalibawang	Rp. 198.650.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.46.048	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(2) Talud (3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Sektor Infrastruktur (4) Relawan yang terlatih Sistem Pendataan Penilaian Kerusakan Kengian dan Kebutuhan Pascabencana	1 Paket 1 laporan 30 Orang		Rp. 669.220.000,00	(2) Talud (3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Sektor Infrastruktur (4) Relawan yang terlatih Sistem Pendataan Penilaian Kerusakan Kengian dan Kebutuhan Pascabencana	1 Paket 1 laporan 30 Orang	Semtin	Rp. 669.220.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.15.46.049	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	(1) Menrev Rehab-Rakon Perumahan sistem komunal (2) Masyarakat yang terlatih manajemen Rehab-Rakon Perumahan sistem komunal (3) Stimulan bahan material untuk perbaikan rumah	1 laporan 10 orang, 10 lokasi 25 paket, 25 KK		Rp. 899.860.000,00	(1) Menrev Rehab-Rakon Perumahan sistem komunal (2) Masyarakat yang terlatih manajemen Rehab-Rakon Perumahan sistem komunal (3) Stimulan bahan material untuk perbaikan rumah	1 laporan 10 orang, 10 lokasi 25 paket, 25 KK	Berbah Depok Gedung siri Ngawen Pajangan Ngipar Samanu Wosoran Wonosan	Rp. 899.860.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total												(-) Rp. 128.075.100,00		
												Rp. 13.431.544.820,00		

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan														
Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/ Berkurang
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.09	Pertanahan													
1.09.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.09.1.20.01.16	PROGRAM PERSAIKAN PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH*							Rp. 241.745.000,00				Rp. 241.745.000,00	Rp. 0,00	
1.09.1.20.01.16.005	Penyelenggaraan Izin Pengalangan Tanah Kas Desa	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %	Terbit/kekuanya izin pengelolaan dan Pemanfaatan tanah kas desa	70 ljin	DIY	DIY	Rp. 74.590.000,00	Terbit/kekuanya izin pengelolaan dan Pemanfaatan tanah kas desa	40 ljin	Bantul Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Sleman	Rp. 74.590.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.09.1.20.01.16.006	Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gubernur D I Y Di Bidang Pertanahan	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kebijakan Gubernur DIY di bidang pertanahan	50 kebijakan	DIY	DIY	Rp. 100.000.000,00	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap SK Gubernur tentang perijinan tanah kas desa	30 SK	DIY	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.09.1.20.01.16.015	Penetapan Lokasi Pengalangan Tanah bagi Pembangunan	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %	Penetapan Lokasi bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	12 lokasi	DIY	DIY	Rp. 66.755.000,00	Penetapan Lokasi bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	12 lokasi	DIY	Rp. 66.755.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.09.1.20.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH							Rp. 193.240.000,00				Rp. 193.240.000,00	Rp. 0,00	
1.09.1.20.01.18.008	Koordinasi Penataan Pemanfaatan Tanah	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Rekomendasi Penamanfaatan Tanah dan Kejelasan Status Tanah	10 rekomendasi	DIY	DIY	Rp. 47.450.000,00	Rekomendasi Pemanfaatan Tanah dan Kejelasan Status Tanah	10 rekomendasi	DIY	Rp. 47.450.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.09.1.20.01.18.308	Penanganan Pemmasalahan Pertanahan	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Rekomendasi penanganan dan pemmasalahan pertanahan	25 rekomendasi	DIY	DIY	Rp. 145.790.000,00	Rekomendasi penanganan dan pemmasalahan pertanahan	20 rekomendasi	DIY	Rp. 145.790.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil													
1.10.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.10.1.20.01.15	PROGRAM PENATAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							Rp. 1.134.639.500,00				Rp. 1.133.919.500,00	(-) Rp. 720.000,00	
1.10.1.20.01.15.001	Pembangunan Dan Pemeliharaan S I A K Secara Terpadu	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NUK)	89 %	Konsolidasi database kependudukan dengan Kabupaten/ Kota se-DIY serta Diijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian	1 sistem	DIY	DIY	Rp. 209.370.000,00	Konsolidasi database kependudukan dengan Kabupaten/ Kota se-DIY serta Diijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian	1 sistem	DIY	Rp. 209.370.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nana SKPD : Biro Tata Pemerintahan													
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.10.1.20.01.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Kemendagri, Updating Dan Pemeliharaan)	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Terselenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SP2D bagi Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan se DIY	374 Orang	DIY	Rp. 153.975.250,00	Terselenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SP2D bagi Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan se DIY	338 Orang	DIY	Rp. 153.975.250,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Aplikasi akses data penduduk berbasis web service	1 sistem	DIY	Rp. 155.599.000,00	Pembangunan sistem koneksi ke sistem online provinsi ke desa-kelurahan se-DIY	1 sistem	Bantul Gunungkidul Kulon Progo Kota Yogyakarta	Rp. 155.599.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengembangan jaringan dan sistem konsolidasi database provinsi kabupaten dan provinsi pusat	1 sistem			Pengembangan jaringan dan sistem konsolidasi database provinsi kabupaten dan provinsi pusat	1 sistem	Cangkringan Depok Gamping Kalasan Hinggir Mlati			
				Tersusunnya rekomendasi kebijakan pemantauan akses data Kependudukan	1 sistem rekomendasi			Rekomendasi kebijakan pemantauan akses data Kependudukan	1 rekomendasi				
1.10.1.20.01.15.035	Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Rekomendasi data penduduk berbasis web service provinsi pusat	1 rekomendasi	DIY	Rp. 88.524.000,00	Rekomendasi penanganannya permasalahan pelaksanaan pencatatan sipil	2 rekomendasi	DIY	Rp. 88.524.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.10.1.20.01.15.048	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Data orang asing yang masuk ke Indonesia ITAS/JTAP di DIY	1 laporan	Bantul Gunungkidul Kulon Progo Kota Yogyakarta	Rp. 206.336.250,00	Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menggunakan PKK dan aparat terpadu terhadap peraturan kebijakan bidang administrasi kependudukan	210 Orang	Biro Tata Pemerintahan	Rp. 206.336.250,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				Data penduduk rentan administrasi kependudukan di DIY	1 laporan	Jemiroj Jetis Jatis Kalisan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Kotagede Kraton Kretek Landah Mantijen Margasan Merapi Kidul Mojudan Nengulan Ngaglik Ngemplan Ngaven Ngemplak Ngijar Pajangan Palan Pandanaran Pondokrejo Poljan Pandak Ponggang Penjatan Patuk Pengasih Piyeungan Playen Perlet Porjono Prambanan Pundong Puwosari Rampal Samgaluh Sanden Saptò sari Sodayu Semaru Semin Sentolo Sewon Seyegan Sieman Srandakan Tanjungsari Tegayung Tembung Tropas Turi Umbluharjo Wates Winobranja Wonosari		Rekomendasi tertib administrasi kependudukan bagi orang asing Indonesia dan ITAS/ITAP dan penduduk rentan	2 rekomendasi					
				Meningkatnya pemahaman kaader PKK di bidang administrasi kependudukan	70 Orang									
				Tersusunnya fasilitas amandemen UU No. 24 Tahun 2013	1 laporan									
1.10.1.20.01.15.049	Kajian Kebijakan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Tersusunnya kajian pembinaan administrasi kependudukan bagi TKI dan kajian rumusan pembinaan administrasi kependudukan bagi Kab/Kota	2 dokumen kajian	DIY	Rp. 100.000.000,00	Tersusunnya kajian pembinaan administrasi kependudukan bagi TKI dan kajian rumusan pembinaan administrasi kependudukan bagi Kab/Kota	2 dokumen kajian	DIY	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.10.1.20.01.15.050	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Meningkatnya pemahaman pencatatan kelahiran dan kematian	310 Orang	Bambang Banguntapan Bantul Berbah Cangkringan	Rp. 220.875.000,00	Meningkatnya pemahaman pencatatan kelahiran dan kematian	160 Orang	Biro Tata Pemerintahan		(-) Rp. 720.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : rekening efisiensi honorarium penyelenggara kegiatan Rp. 700.000,-, rekening efisiensi belanja sertifikasi Rp. 20.000,-

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan													
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
						Karangprojo Kasihan Kokap Kotagede Kraton Kretek Lendah Mantirjeron Mergansari Minggir Mlati Noyudan Ningsihan Ngaglik Ngampilan Ngawen Ngemplak Ngijpar Pajangan Pakem Pekualaman P							

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan													
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Took Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor	47 jenis	DIY	Rp. 27.000.000,00	Tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	DIY	Rp. 27.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang cetakan 2. penggandaan 3. perijildan laporan	13 jenis 7300 lembar 100 Jilid	DIY	Rp. 20.500.000,00	Tersedianya barang cetakan Tersedianya penggandaan lembar Tersedianya pengijilan buku	13 jenis 7300 lembar 100 Jilid	DIY	Rp. 20.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	DIY	Rp. 11.500.000,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23 jenis	DIY	Rp. 11.500.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung	DIY	Rp. 2.332.000,00	Terdapatnya pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung	DIY	Rp. 2.332.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 jenis	DIY	Rp. 3.702.000,00	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 jenis	DIY	Rp. 3.702.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Kabar 2. Buku kepastakaan	2 jenis 15 buku	DIY	Rp. 16.850.000,00	Tersedianya buku/kepastakaan	15 buku 2 jenis	DIY	Rp. 16.850.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman rapat	1 paket os	DIY	Rp. 50.000.000,00	Makanan dan minuman rapat	5000 os	DIY	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Konsultasi & koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi & koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	DIY	Rp. 350.000.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	DIY	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 380.850.000,00				Rp. 380.850.000,00	Rp. 0,00	
1.20.1.20.01.02.007	Pengadaan Pengalangan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan AC Split	4 buah	DIY	Rp. 30.000.000,00	Pengadaan Air Conditioner (AC) Split	4 unit	DIY	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. PC Branded 2. Laptop 3. Printer	10 unit 4 unit 10 unit	DIY	Rp. 135.000.000,00	Pengadaan laptop	4 unit 10 unit 10 unit	DIY	Rp. 135.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung kantor terpelihara (godyn)	120 m	DIY	Rp. 18.000.000,00	Terpevihiinya groyden jendela kantor	120 m	DIY	Rp. 18.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	2 jenis	DIY	Rp. 170.200.000,00	Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor dan tersedianya bahan bakar	2 jenis	DIY	Rp. 170.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan														
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi				Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor terpelihara.	9 jenis	DIY	Rp. 27.650.000,00	Tersedianya pemeliharaan alat-alat Gedung Kantor.	7 Jenis	DIY	Rp. 27.650.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 101.460.000,00				Rp. 101.460.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.05.043	Penyusunan Website atau Sistem Informasi SKPD	Tervujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Tervujudnya website Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 sistem	DIY	Rp. 42.000.000,00	Tervujudnya website Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 sistem	DIY	Rp. 42.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.05.063	Bimtek Organisasi dan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Tervujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Jumlah Personil yang meningkat kemampuannya	56 Orang	DIY	Rp. 59.460.000,00	Peningkatan pemahaman terhadap organisasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan	56 Orang	DIY	Rp. 59.460.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 46.517.500,00				Rp. 46.517.500,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tervujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai Lapir SKPD	70 Skor	DIY	Rp. 4.025.000,00	Tersusunnya laporan kinerja SKPD (LAKIP)	1 dokumen	DIY	Rp. 4.025.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tervujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	keseimbangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	20 %	DIY	Rp. 7.237.500,00	Tersusunnya dokumen analisis standard belanja	1 dokumen	DIY	Rp. 7.237.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tervujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya dokumen analisis standard belanja	1 dokumen	DIY	Rp. 29.675.000,00	Tersusunnya dokumen analisis standard belanja	1 dokumen	DIY	Rp. 29.675.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tervujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen	100 %	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi SKPD	1 dokumen	DIY	Rp. 5.580.000,00	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi SKPD	1 dokumen	DIY	Rp. 5.580.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan													
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		percapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD											
1.20.1.20.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH						Rp. 520.267.925,00				Rp. 520.267.925,00	Rp. 0,00	
1.20.1.20.01.25.041	Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Database pilar batas untuk Kabupaten Perbatasan DIY-Jateng (perbatasan Kabupaten Kulonprogo-Purworejo)	1 Paket	DIY	Rp. 248.721.000,00	Database pilar batas untuk Kabupaten Perbatasan DIY-Jateng (perbatasan Kabupaten Kulonprogo-Purworejo)	1 Paket	DIY	Rp. 248.721.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penambahan Pilar Batas DIY-Jateng	15 pilar			Meningkatnya pemahaman aparat terhadap Permendagri No.83 Tahun 2013, dan Permendagri No. 19 Tahun 2006	80 Orang				
				Peningkatan pemahaman aparat terhadap Permendagri No.83 Tahun 2013, dan Permendagri No. 19 Tahun 2006	160 Orang			Penambahan Pilar Batas DIY-Jateng	15 pilar				
				Rekomendasi penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	2 rekomendasi			Penggabungan peta desa yang berbatasan skala 1: 5.000 (desa perbatasan antara Kab Kulon Progo - Purworejo)	6 peta				
								Rekomendasi penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	2 rekomendasi				
1.20.1.20.01.25.042	Pejabat Wilayah Administrasi dan Topotimi	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Laporan kode dan administrasi kab/kota se provinsi DIY	100 buku	DIY	Rp. 84.264.000,00	Laporan kode dan data wilayah administrasi kab/kota se provinsi DIY	100 buku	DIY	Rp. 84.264.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pedoman penamaan rupa bumi unsur buatan	1 draft			Pedoman penamaan rupa bumi unsur buatan	1 draft				
1.20.1.20.01.25.043	Koordinasi dan Sinkronisasi Asosiasi Pemerintahan Daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Kesepakatan anggota MPU (Mitra Praja Utama)	2 kesepakatan	DIY	Rp. 187.282.925,00	Kesepakatan anggota MPU (Mitra Praja Utama)	2 kesepakatan	DIY	Rp. 187.282.925,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Rekomendasi APSI (Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia) kepada pemerintah pusat dalam	1 rekomendasi			Rekomendasi APSI (Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia)	1 rekomendasi				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan														
Kode	Usunan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.01.27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU			penyelenggaraan pemerintahan desa			Rp. 423.459.000,00				Rp. 867.959.000,00	Rp. 444.500.000,00		
1.20.1.20.01.27.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	Persentase kesepatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Peringatan hari otonomi Daerah	1 kegiatan	DIY	Rp. 1.600.000.000,00	Inventarisasi Data PSD 5 bidang urusan yang diatkan dari Kabupaten/Kota Provinsi dan 2 urusan yang diatkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota	1 daftar	DIY	Rp. 604.500.000,00	Rp. 444.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Tambahan output kegiatan Inventarisasi PSD 6 urusan yang diatkan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan 2 urusan yang diatkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota
				Rapat kerja implementasi UU 23 Tahun 2014	1 rekomendasi			Penguatan pelaksanaan otonomi daerah (pengaturan hari otonomi daerah)	1 kegiatan					
				Rapat kerja persiapan pengalihan PSD	1 rekomendasi			Rekomendasi pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007	4 rekomendasi					
								Rekomendasi penanganan permasalahan personal, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen	1 rekomendasi					
1.20.1.20.01.27.012	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi dan Kab/Kota	Persentase kesepatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 laporan	DIY	Rp. 85.000.000,00	Termonitoring dan terevelasi penyelenggaraan otonomi daerah di DIY dan Kab/Kota	2 laporan dan rekomendasi	DIY	Rp. 85.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.27.017	Penyusunan Pedoman Money	Persentase kesepatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Instrumen Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Otonomi daerah (Urusan Pemerintahan)	1 dokumen	DIY	Rp. 67.934.000,00	Instrumen Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Otonomi daerah	1 dokumen	DIY	Rp. 67.934.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.27.018	Facilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Usunan Pemerintahan	Persentase kesepatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Identifikasi perubahan urusan pemerintahan dari PP No. 38/2007 ke No.23/2014	16 rekomendasi	DIY	Rp. 110.525.000,00	Rekomendasi penerapan urusan pemerintahan pilihan di DIY	8 rekomendasi	DIY	Rp. 110.525.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.28	PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN						Rp. 542.077.875,00				Rp. 542.077.875,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.28.002	Penyediaan Waktu Perencanaan dan Pengendalian Anggota DPRD Antar Waktu	Persentase kesepatan pelaksanaan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	100 %	Keputusan perwakilan dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota	3 SK	DIY	Rp. 55.000.000,00	Tertafidasi perwakilan dan pengangkatan anggota DPRD antarwaktu	2 SK	DIY	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan										
Kode	Unsur/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Program	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Runstuan kebijakan pemberhentian dan Pengantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kadi Kadi	1 rekomendasi			Tersusunnya Pedoman Mekanisme pemberhentian dan pengantian antarwaktu anggota DPRD	1 draf	
1.20.1.20.01.28.013	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Gubernur/Wagub	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	100 %	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2014	1 laporan	DIY	Rp. 216.404.875,00	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2014	1 laporan	DIY
1.20.1.20.01.28.020	Kajian Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	100 %	Kajian Hari Jadi DIY	1 Kajian	DIY	Rp. 130.055.000,00	Kajian Hari Jadi DIY	1 Kajian	DIY
1.20.1.20.01.28.044	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	100 %	1.Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah	3 Kali	Bantul Gunungkidul Sleman	Rp. 140.618.000,00	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah Sleman, Bantul dan Gunungkidul	3 kabupaten	Bantul Gunungkidul Sleman
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			2. Rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan	1 rekomendasi			Rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 rekomendasi	
1.22.02	Biro Tata Pemerintahan									
1.22.1.20.02.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA						Rp. 332.862.625,00			
1.22.1.20.02.18.006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	100 %	1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Desa	250 Orang	DIY	Rp. 92.756.000,00	Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Desa	240 Orang	DIY
1.22.1.20.02.18.015	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /kelurahan	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	100 %	2. Rekomendasi terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 laporan			Rekomendasi terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 rekomendasi	
1.22.1.20.02.18.019	Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan	100 %	Rekomendasi terhadap kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa	1 laporan		Rp. 34.962.000,00	Termonitoring dan terevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa	1 laporan	DIY
				Tertingkatnya pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuan	156 Orang	DIY	Rp. 118.042.000,00	Meningkatnya kapasitas manajemen pemerintahan desa bagi Kepala	175 Orang	DIY

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Badan Perustaka an dan Arsip Daerah Biro Adminstras Adminstras i Kesejahtraa n Rakyat dan Kemasyara katan Biro Adminstras i Pembangun an Biro Adminstras i Perekonomi an dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintah an Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaa n Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Energi Sumbdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan , Komunkasi dan Informatika Dinas Perindustrian , Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Rakyat dan Kemasyaraka tan Biro Adminstrasi Pembanguna n Biro Adminstrasi Perekonomia n dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintaha n Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumbdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan , Komunkasi dan Informatika Dinas Perindustrian , Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan an, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustria n, Perdagangan n Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	STNK yang telah diteliti	7 unit kendaraan	Badan Kepegawai an Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perindunga n Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan	Rp. 4.324.500,00	STNK yang telah diteliti	7 unit kendaraan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaa	Rp. 4.324.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Hidup Badan Pemberday aan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Badan Perustaka an dan Arsip Daerah Biro Adminstras i Kesegjahtraa n Rakyat dan Kemasyara katan Biro Adminstras i Pembangun an Biro Adminstras i Perekonomi an dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintah an Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan n Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas				n Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Adminstrasi Kesegjahtraan Rakyat dan Kemasyarakata n Biro Adminstrasi Pembanguna n Biro Adminstrasi Perekonomia n dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintaha n Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grihasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grihasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti Pembayaran Petugas Pengelola Keuangan dan Kepengawasan Menerima Honorarium	12 orang/bulan	Biro Hukum	Rp. 20.504.000,00	Bukti Pembayaran Petugas Pengelola Keuangan dan Kepengawasan Menerima Honorarium	12 orang/bulan	Biro Hukum	Rp. 20.504.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan kantor terawat	0	Biro Hukum	Rp. 23.800.000,00	Peralatan kantor terawat	0	Biro Hukum	Rp. 23.800.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	38 jenis	Biro Hukum	Rp. 27.396.000,00	Alat Tulis Kantor	38 jenis	Biro Hukum	Rp. 27.396.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Cetak dan Penggandaan/ Foto Copy	14 jenis	Biro Hukum	Rp. 36.137.500,00	Barang Cetak dan Penggandaan/ Foto Copy	14 jenis	Biro Hukum	Rp. 35.962.500,00	(-) Rp. 175.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Penggandaan Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Ketahanan Pangan dan Ketahanan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Badan Penanggulangan dan Bencana	Rp. 2.595.000,00	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Ketahanan Pangan dan Ketahanan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Badan Penanggulangan dan Bencana	Rp. 2.295.000,00	(-) Rp. 300.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Belanja Alat Listrik dan Elektronik Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Badan Perustaka an dan Arsip Daerah Biro Adminstras Administ Kesejahtraa n Rakyat dan Kemasyara katan Biro Adminstras Administ Pembangun an Biro Administ Perekonomi an dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintah n Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaa n Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pekerjaan Perhubungan Umum, Komunikasi				Perencanaan Pembanguna n Daerah Badan Perpustakaan daan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyaraka tan Biro Administrasi Pembanguna n Biro Administrasi Perekonomila n dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintah n Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga Dinas Pekerjaan Perhubungan Umum, Komunikasi				

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan an, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan n Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD			dan Informatika Dinas Perindustrian , Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD					
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku Peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	Biro Hukum	Rp. 15.100.000,00	Buku Peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	Biro Hukum	Rp. 15.100.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Majalah	1 jenis			Majalah	1 jenis					
				Surat Kabar	2 jenis			Surat Kabar	2 jenis					
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan	Prosentase Pelayanan	100 %	Extraafoodi ng	4 Orang	Biro Hukum	Rp. 15.960.000,00	Extraafooding	4 Orang	Biro Hukum	Rp. 15.960.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerj Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Lokasi	Target Kinerj Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Minuman	Administrasi Perkantoran		Makan dan Minum Sidang	20 Orang			Makan dan Minum Sidang	20 Orang				Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 tahun	Biro Hukum	Rp. 218.461.375,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 tahun	Biro Hukum	Rp. 218.461.375,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1 tahun			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun				
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan n sarana prasarana aparatur	100 %	Notebook PC Branded Scanner	1 unit 2 unit 1 unit	Biro Hukum	Rp. 24.550.200,00	Notebook PC Branded Scanner	1 unit 2 unit 1 unit	Biro Hukum	Rp. 24.550.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.011	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan n sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Dinas Operasional	1 unit	Biro Hukum	Rp. 185.000.000,00	Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	Biro Hukum	Rp. 185.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan n sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung Kantor Terpelihara berupa Kamar Mandi	3 ruangan	Biro Hukum	Rp. 3.250.000,00	Gedung Kantor Terpelihara berupa Kamar Mandi	3 ruangan	Biro Hukum	Rp. 3.250.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan n sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung Kantor Terpelihara yaitu Ruang Kantor	3 lantai	Biro Hukum	Rp. 114.633.425,00	Gedung Kantor Terpelihara yaitu Ruang Kantor	3 lantai	Biro Hukum	Rp. 114.633.425,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Jasa Service Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.036	Pemeliharaan	Prosentase	100 %	Arsip	720 m3	Biro Hukum	Rp. 39.600.000,00	Arsip Dokumen	720 m3	Biro Hukum	Rp. 39.600.000,00	Reguler	Efisiensi Kegiatan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rutin/Berkala Pustaka	penyediaan dan pemeliharaan n sarana prasarana aparatur		Dokumen menjadi terawat (2 kali x 360m3)				menjadi terawat (2 kali x 360m3)					APBD	Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 37.911.000,00				Rp. 37.911.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudny a penatausah aan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai Laki SKPD	1 B	Biro Hukum	Rp. 1.800.000,00	Nilai Laki SKPD	1 B	Biro Hukum	Rp. 1.800.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudny a penatausah aan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesenjangan n Anggaran Kas Dengan Realisasi Anggaran SKPD	5 %	Biro Hukum	Rp. 3.750.000,00	Kesenjangan Anggaran Kas Dengan Realisasi Anggaran SKPD	5 %	Biro Hukum	Rp. 3.750.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudny a penatausah aan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang	100 %	Dokumen Perencanaan n SKPD : RKT, PK, DPA , ROPK, Draft Renstra Instansi	1 tahun	Biro Hukum	Rp. 30.061.000,00	Dokumen Perencanaan SKPD : RKT, PK, DPA, ROPK, Draft Renstra Instansi	1 tahun	Biro Hukum	Rp. 30.061.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD												
1.201.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya a penatausah aan keuangan dan managemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja Dengan Program Kegiatan	100 %	Badan Kepegawaian an Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberday aan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah Badan Perustaka an dan Arsip Daerah Biro Adminstras i Kesejahtraa n Rakyat dan Kemasyara katan Biro Adminstras i	Rp. 2.300.000,00	Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja Dengan Program Kegiatan	100 %	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulan Badan Penganggulan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Badan Perustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyaraka tan Biro Administrasi Pembanguna n Biro Administrasi Perekonomia n dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata	Rp. 2.300.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan /Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Organisasi Pemerintah Biro Tata Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan dan Kehutanan Dinas Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit GHSIA Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD			Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan dan Kehutanan Dinas Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit GHSIA Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Penanggu rgan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Pencanaa n Pembangun an Daerah Badan Perustaka an dan Arsip Daerah Biro Adminstras i Keseljahtraa n Rakyat dan Kemasyara katan Biro Adminstras i Pembangun an Biro Adminstras i Perekonomi an dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Pemerintah an Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaa n Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas				Pendidikan dan Latihan Badan Pencanaan Pembanguna n Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Adminstrasi Keseljahtraan Rakyat dan Kemasyaraka tan Biro Adminstrasi Pembanguna n Biro Adminstrasi Perekonomia n dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintah n Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)
						Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi, Sumberdaya Mineral Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD			
1.20.1.20.01.26.036	Perumusan Kebijakan di bidang Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum	8 rekomendasi	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 205.192.500,00	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum	8 rekomendasi	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan /Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian , Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian , Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.26.037	Pengelolaan dan Pengembangan JDH	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Legal Expo Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali 5 Kali 260 peraturan (upload produk hukum DIY) 5600 buku (Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2800 buku, Peraturan Informasi Perundang-undangan 2800 buku	Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesehatan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian	Rp. 377.637.250,00	Legal Expo Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali 5 Kali 260 peraturan (upload produk hukum DIY) 5600 buku (Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2800 buku, Peraturan Informasi Perundang-undangan 2800 buku	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesehatan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian	Rp. 362.407.250,00	(-) Rp. 15.230.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Cetak dan Pengandaan Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan /Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						n Rakyat dan Kenyasara- katan Biro Administrasi Pembangun- an Biro Administrasi Perekonomi an dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintah an Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan n Dinas Kerutuhan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit				n dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Pemerintah an Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit				

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				
1.20.1.20.01.34	PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM						Rp. 2.097.772.275,00				Rp. 2.097.772.275,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.34.007	Penyelesaian Permasalahan Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengaduan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Draft Raperda tentang Bantuan Hukum	1 draft	Biro Hukum	Rp. 261.465.000,00	Penyelesaian Sengketa Hukum	2 kasus	Biro Hukum	Rp. 261.465.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Adanya tambahan kasus gugatan PTUN berkaitan dengan pencadapan lokasi pembangunan bandara baru. Raperda ttg Bankum
1.20.1.20.01.34.025	Layanan Hukum Masyarakat	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengaduan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Kebijakan Pengagakan Perlindungan Hukum	1 rekomendasi tentang HAKI, PengagakanHAM, dan DILKEHJAPOL	Badan Kepegawal an Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan	Rp. 1.836.307.275,00	Kebijakan Pengagakan Perlindungan Hukum	1 rekomendasi tentang HAKI, PengagakanHAM, dan DILKEHJAPOL	Badan Kepegawalan Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan	Rp. 1.836.307.275,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				DIY dan Perbaikan pelayanan publik di DIY		Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan		Publik di DIY		Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan				
				Surat Keputusan Gubernur tentang Ijin Gubernur sebagai Pelindung	30 buah	Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan		Surat Keputusan Gubernur tentang Ijin Gubernur sebagai Pelindung	30 buah	Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan				
				Surat Keputusan Gubernur tentang Ijin Tanah Kas Desa	60 buah	Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Surat Keputusan Gubernur tentang Ijin Tanah Kas Desa	60 buah	Penanggulan gan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan				
				Surat Keputusan Gubernur tentang Pendirian Koperasi	10 buah	Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Surat Keputusan Gubernur tentang Pendirian Koperasi	10 buah	Perustakaan Daerah Daerah Biro Administrasi Keseljahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)
						dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Keturunan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD			

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)
						Grihasia Situan Polisi Panong Praja Sekretariat DPRD							
1.20.1.20.01.35	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM						Rp. 433.918.400,00				Rp. 433.918.400,00		
1.20.1.20.01.35.013	Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Persentase produk hukum yang dibatalakan	0 %	Hasil Evaluasi rancangan produk hukum kab/kota	1 Surat Keputusan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perindunga n	Rp. 433.918.400,00	Hasil Evaluasi rancangan produk hukum kab/kota	1 Surat Keputusan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat Badan	Rp. 433.918.400,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Penambahan jumlah produk hukum yang dimoahonkan konsultasi dan klarifikasi oleh Kab/kota bertambah sebanyak 14 produk
				Hasil Klarifikasi Produk Hukum Kab/kota	40 Surat Keputusan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Masyarakat Badan Penangulan gan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakata n Biro Administrasi Pembanguna n Biro Administrasi		Hasil Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota	40 Surat Keputusan				
				Hasil Konsultasi rancangan produk hukum kab/kota	30 Surat Keputusan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Masyarakat Badan Penangulan gan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakata n Biro Administrasi Pembanguna n Biro Administrasi		Hasil Konsultasi rancangan produk hukum kab/kota	30 Surat Keputusan				

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan /Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Kesajaht raan Raky at dan Kemasya raatan B iro Adm inistras i Pemb angun an B iro Adm inistras i P erekonom i an dan Sumber Daya Al am B iro Huk um B iro O rganisasi Pemerintah an B iro U nnum, Hubungan Masyarakat dan P rotokol Dinas K ebudaya a n Dinas Kehutanan dan P erkebunan Dinas Kelautan dan P erikanan Dinas Kesehatan Dinas P erawatan Dinas P ekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas P endapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas P erhubungan dan Kom unikasi dan In formatika Dinas P erindustrian , P endagaan Koperasi dan Usaha K ecil M engah Dinas P ertanian Dinas Sosial Dinas T enaga K erja dan Transmigrasi Inspektorat									

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						an, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustria n, Perdagangan n Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Inspektorat Rumah Sakit Grihasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				Rumah Sakit Grihasia Satuan Polisi Praja Sekretariat DPRD				
Total							Rp. 4.752.275.925,00					(-) Rp. 25.505.000,00		

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD :Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan														
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 322.526.100,00				Rp. 321.822.600,00	(-) Rp. 703.500,00	
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat Keluar	5450 surat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 4.326.000,00	Materai 3000	2050 surat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 4.326.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Bukti Pembayaran Pajak/STNKKendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang Tepat Waktu 2. Bukti Pembayaran Pajak/STNKKendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Tepat Waktu	4 unit	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 3.703.800,00	1. Bukti Pembayaran Pajak/STNKKendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang Tepat Waktu 2. Bukti Pembayaran Pajak/STNKKendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Tepat Waktu	4 unit	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 3.703.800,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang 2. Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian	11 Orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 25.989.900,00	1. Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang 2. Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian	11 Orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 25.989.900,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	54 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 23.092.100,00	Alat Tulis Kantor	54 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 23.092.100,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Cetakan	9 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 21.835.000,00	Barang Cetakan	9 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 21.751.000,00	(-) Rp. 84.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 6.993.300,00	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 6.373.800,00	(-) Rp. 619.500,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : hasil evaluasi Kemendagri Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Kabar	2 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 4.716.000,00	1. Surat Kabar	2 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 4.716.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : penyesuaian harga Penambahan : -	
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan Minuman Selingan	3720 Orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 43.350.000,00	Makanan dan Minuman Selingan	3720 Orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 43.350.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan	Prosentase Pelayanan	100 %	1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam	12 bulan	Biro Administrasi	Rp. 188.520.000,00	1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam	12 bulan	Biro Administrasi	Rp. 188.520.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan												
Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Administrasi Perkantoran		Daerah 2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan	Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		Penambahan : -
1.20.1.20.01.02	PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Rp. 278.596.000,00				Rp. 206.096.000,00	(-) Rp. 72.500.000,00
1.20.1.20.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Sekat Ruang	1 Paket	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 125.078.000,00	Sekat Ruang	1 Paket	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 52.578.000,00	(-) Rp. 72.500.000,00
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	LCD dan Instalasi Komputer PC Printer UPS Stabilizer	1 Paket 2 unit 3 unit 20 unit	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 47.500.000,00	LCD dan Instalasi Komputer PC Printer UPS Stabilizer	1 Paket 2 unit 3 unit 20 unit	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 47.500.000,00	Rp. 0,00
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Kenderaan dinas/operasional roda 4 terpelihara 2. Kenderaan dinas/operasional roda 2 terpelihara	4 unit 2 unit	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 87.598.000,00	1. Kenderaan dinas/operasional roda 4 terpelihara 2. Kenderaan dinas/operasional roda 2 terpelihara	4 unit 2 unit	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 87.598.000,00	Rp. 0,00
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pelatan Gedung Kantor Terpelihara	6 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 13.420.000,00	Pelatan Gedung Kantor Terpelihara	6 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 13.420.000,00	Rp. 0,00
1.20.1.20.01.02.029	Pemeliharaan Mebelur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mebelur terpelihara	5 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 5.000.000,00	Mebelur terpelihara	5 jenis	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00
1.20.1.20.01.06	PROGRAM Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Rp. 64.752.000,00				Rp. 64.752.000,00	Rp. 0,00
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya pelaksanaan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai LAKIP SKPD	1 Skor A	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 5.873.000,00	Nilai LAKIP SKPD	1 Skor A	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 5.873.000,00	Rp. 0,00
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya pelaksanaan dan manajemen pencapaian kinerja	100 %	Kesempangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 7.700.000,00	Kesempangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 7.700.000,00	Rp. 0,00

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan												
Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
		program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD										
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	100 %		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2016	1 tahun	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 43.479.000,00	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2016	1 tahun	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
		program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		Rencana Kerja (Renja) 2016	1 tahun			Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2016	1 tahun			
		program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2015	1 tahun			Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2015	1 tahun			
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %		Keseluaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 7.700.000,00	Keseluaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30	PROGRAM ANALISIS KEBIDJAKAN PEMBANGUNAN						Rp. 1.391.116.250,00				Rp. 1.391.116.250,00	
1.20.1.20.01.30.145	Penyipan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Penyiapan Tenaga Kerja Terlatih	1 dokumen	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 313.113.750,00	Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Penyiapan Tenaga Kerja Terlatih	1 dokumen	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.146	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Sosial, Tenaga Kerja, Transigrasi, dan Kesehatan	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 122.092.500,00	Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Sosial, Tenaga Kerja, Transigrasi, dan Kesehatan	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.152	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Sosial, Tenaga Kerja, Transigrasi, dan Kesehatan	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 130.032.500,00	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Sosial, Tenaga Kerja, Transigrasi, dan Kesehatan	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.160	Penyipan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 246.713.750,00	Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.161	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 86.377.500,00	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan														
Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	Masyarakat	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.01.301.162	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan bidang Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan kebijakan	36,45 %	Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 78.437.500,00	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 78.437.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : penyesuaian dengan sub Penambahan : -	
1.20.1.20.01.301.164	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan kebijakan bidang Mental dan Spiritual	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan kebijakan	36,45 %	Hasil Koordinasi dan Sinchronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, Rekayasa Sosial, dan Fasilitas Kehidupan Beragama	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 92.850.000,00	Hasil Koordinasi dan Sinchronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, Rekayasa Sosial, dan Fasilitas Kehidupan Beragama	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 92.850.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : penyesuaian dengan sub Penambahan : -	
1.20.1.20.01.301.165	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan bidang Mental dan Spiritual	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan kebijakan	36,45 %	Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, Pengembangan Sosial, dan Fasilitas Kehidupan Beragama	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 83.510.000,00	Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, Pengembangan Sosial, dan Fasilitas Kehidupan Beragama	1 laporan	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 83.510.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : penyesuaian dengan sub Penambahan : -	
1.20.1.20.01.301.166	Penyusunan Kebijakan Bidang Mental dan Spiritual	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan kebijakan	36,45 %	Kebijakan Jogja City of Tolerance	1 dokumen	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 237.988.750,00	Kebijakan Jogja City of Tolerance	1 dokumen	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 237.988.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : penyesuaian dengan sub Penambahan : -	
1.20.1.20.01.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA						Rp. 4.046.137.000,00				Rp. 4.111.137.000,00			
1.20.1.20.01.37.016	Fasilitas Pembinaan Mental Rohani Agama	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100 %	Bantuan Hibah Keagamaan	303 objek	DIY	Rp. 1.715.352.000,00	Bantuan Hibah Keagamaan	303 objek	DIY	Rp. 1.780.352.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : dana hibah bansos berada di DPPKA Penambahan : Anggaran Kegiatan Perayaan Natal Bersama PMS, TNI, Polri, dan Karyawan BUMN dan BUMD DIY	
				Pembinaan Mental Rohani PMS/TNI /POLRI 5 Agama,	26 kali			Pembinaan Mental Rohani PMS/TNI /POLRI 5 Agama,	26 kali					
				Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi DIY,	19 Orang			Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi DIY,	19 Orang					
				Penyelenggaraan Peningkatan dan Besar Keagamaan di DIY	18 kegiatan			Penyelenggaraan Peningkatan dan Besar Keagamaan di DIY	18 kegiatan					
1.20.1.20.01.37.034	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100 %	Pengiriman Kaflah STQ Ke Tingkat Nasional	34 Orang	DIY, Papua, Ambon	Rp. 2.330.785.000,00	Pengiriman Kaflah STQ Ke Tingkat Nasional	34 Orang	DIY, DKI Jakarta, Ambon	Rp. 2.330.785.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Pengiriman Kontingen Pesparawi DIY ke Tk Nasional	120 Orang			Pengiriman Kontingen Pesparawi DIY ke Tk Nasional	120 Orang					
				Penyelenggaraan Pesparawi Tingkat DIY	300 Orang			Penyelenggaraan Pesparawi Tingkat DIY	300 Orang					
				Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi DIY	250 Orang			Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi DIY	250 Orang					

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan														
Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
Total							Rp. 6.103.127.350,00				Rp. 6.094.923.850,00	(- Rp. 8.203.500,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Perkonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Berambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan				
		Tolak Ukur	Target	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	(8)				Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran
1	Wajib																	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia																	
1.20.01	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumberdaya Alam																	
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman dokumen	150 surat 650 surat 2200 surat	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 4.250.000,00	Pengiriman dokumen Surat Keluar Surat Masuk	150 surat 650 surat 2200 surat	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 4.250.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -				
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu	2 unit 3 unit	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.600.000,00	Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu	2 unit 3 unit	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.600.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -				
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran honorarium penatausahaan administrasi keuangan biro	11 Orang, 12 Bulan 2 Orang, 12 Bulan	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 24.586.000,00	Bukti pembayaran honorarium penatausahaan administrasi keuangan biro	11 Orang, 12 Bulan 2 Orang, 12 Bulan	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 24.586.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -				
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor	17 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 18.833.400,00	Alat tulis kantor	17 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 18.833.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -				
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang cetakan	3 unit 8000 lembar	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 15.000.000,00	Barang cetakan	3 unit 8000 lembar	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 14.650.000,00	(-) Rp. 350.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Penambahan : -				
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 5.000.000,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 4.838.250,00	(-) Rp. 161.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijor, Battery Kering) Penambahan : -				
1.20.1.20.01.01.013	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perlengkapan kebersihan kantor	17 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber	Rp. 6.000.000,00	Perlengkapan kebersihan kantor	17 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber	Rp. 6.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -				

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015													
Nama SKPD : Biro Administrasi Perkonomian dan Sumberdaya Alam													
Kode	Usuan/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Beras Dan Peruntukan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat kabar	3 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 6.600.000,00	Surat kabar	3 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 6.600.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minum siang	2454 Orang	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 26.394.000,00	Makanan dan minum siang	2454 Orang	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 26.394.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Administrasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Konsultasi & koordinasi dalam daerah	12 bulan	4 kabupaten di DIY dan Luar DIY	Rp. 270.000.000,00	Konsultasi & koordinasi dalam daerah	12 bulan	4 kabupaten di DIY dan Luar DIY	(-) Rp. 200.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : 5.2.21.5.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penambahan : -
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN SARANADAN PRASARANA APARATUR						Rp. 327.200.600,00				Rp. 327.000.600,00		
1.20.1.20.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional prasarana aparatur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda empat	1 unit	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 194.758.600,00	Kendaraan dinas/operasional roda empat	1 unit	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 194.758.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Laptop LCD Viewer Mesin faxmille Pinter multifungsi	2 unit 1 unit 1 unit 2 unit	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 30.482.000,00	Laptop LCD Viewer Mesin faxmille Pinter multifungsi	2 unit 1 unit 1 unit 2 unit	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 30.382.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengkajian Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda dua terpelihara Kendaraan dinas/operasional roda empat terpelihara	2 unit 4 unit	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 83.060.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda dua terpelihara Kendaraan dinas/operasional roda empat terpelihara	2 unit 4 unit	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 82.960.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Belanja Jasa Service Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengkajian Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor terpelihara	10 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 18.900.000,00	Perengkapan gedung kantor terpelihara	10 jenis	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 18.900.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 65.639.000,00				Rp. 65.639.000,00		
1.20.1.20.01.01.063	Berkas Organisasi dan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Tenuludnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Juntaid personil yang meningkat kemampuannya	50 Orang	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 65.639.000,00	Juntaid personil yang meningkat kemampuannya	50 Orang	Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 65.639.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 32.100.000,00				Rp. 32.100.000,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.01.06.016	SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terdwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai Lakip SKPD	75 s.d 85 = Nilai A	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.707.800,00	Nilai Lakip SKPD	75 s.d 85 = Nilai A	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.707.800,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terdwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Keseluruhan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Rp. 4.388.200,00	Keseluruhan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Rp. 4.388.200,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terdwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA, DPA	1 tahun	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Rp. 22.690.000,00	ROPK, Renja, RKA, DPA	1 tahun	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Rp. 22.690.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terdwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.314.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.314.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30	PROGRAM ANALISIS KEBIDAKAN PEMBANGUNAN						Rp. 2.325.885.000,00				Rp. 2.304.060.000,00	(-) Rp. 21.825.000,00		
1.20.1.20.01.30.212	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36-45 %	Dokumen Kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta di DIY	1 dokumen, 3 sektor	SKPD, 5 Kabupaten/kota dan Luar DIY	Rp. 325.000.000,00	Dokumen Kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta di DIY	1 dokumen, 3 sektor	SKPD, 5 Kabupaten/kota dan Luar DIY	Rp. 325.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.213	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan	36-45 %	Hasil Koordinasi dan Fasilitas Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)	1 dokumen, 5 sektor	SKPD, 5 Kabupaten/kota dan Luar DIY	Rp. 250.000.000,00	Hasil Koordinasi dan Fasilitas Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)	1 dokumen, 5 sektor	SKPD, 5 Kabupaten/kota dan Luar DIY	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		bahan kebijakan		Hasil Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Bidang Bina Kapasitas sektor BUD dan Penanaman Modal	1 dokumen, 2 sektor			Hasil Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Bidang Bina Kapasitas sektor BUD dan Penanaman Modal	1 dokumen, 2 sektor				
1.20.1.20.01.30.214	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36-45 %	Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Bina Kapasitas sektor BUD, Penanaman Modal	1 dokumen, 2 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya	Rp. 124.975.000,00	Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Bina Kapasitas sektor BUD, Penanaman Modal	1 dokumen, 2 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya	Rp. 124.975.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.215	Penyajian Bahan Perencanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36-45 %	Dokumen Kebijakan Bank Perumahan	1 dokumen, 2 sektor	SKPD, 5 Kab/Kota dan Luar DIY	Rp. 375.000.000,00	Dokumen Kebijakan Bank Perumahan	1 dokumen, 2 sektor	SKPD, 5 Kab/Kota dan Luar DIY	Rp. 375.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.216	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36-45 %	Hasil Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, Perikanan dan Kelahanan Pangan, Lingkungan	1 dokumen, 3 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya dan Luar DIY	Rp. 500.910.000,00	Hasil Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, Perikanan dan Kelahanan Pangan, Lingkungan	1 dokumen, 3 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya dan Luar DIY	Rp. 500.910.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.217	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36-45 %	Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Alam sektor Kehutanan, Perikanan, Kelahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup	1 dokumen, 3 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya	Rp. 150.000.000,00	Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Alam sektor Kehutanan, Perikanan, Kelahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup	1 dokumen, 3 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya	Rp. 150.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.218	Penyajian Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Produktivitas	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36-45 %	Dokumen Kebijakan Kawasan Industri DIY	1 dokumen, 4 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya dan Luar DIY	Rp. 248.930.200,00	Dokumen Kebijakan Kawasan Industri DIY	1 dokumen, 4 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya dan Luar DIY	Rp. 248.930.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.219	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36-45 %	Hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang produktivitas sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	1 dokumen 4 sektor	SKPD, 5 Kabupaten/Kota dan Luar DIY	Rp. 265.513.100,00	Hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang produktivitas sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	1 dokumen 4 sektor	SKPD, 5 Kabupaten/Kota dan Luar DIY	Rp. 265.513.100,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30.220	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan	Persentase dokumen hasil analisis	36-45 %	Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan	1 laporan, 4 sektor	SKPD dan 5 Kabupaten/Kota	Rp. 85.556.700,00	Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan	1 laporan, 4 sektor	SKPD, DIY dan 5 Kab/Kota lainnya	Rp. 63.731.700,00 (-) Rp. 21.825.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Honorarium Tm Pelaksana Kegiatan Rp. 20.175.000,- ditambah Efisiensi

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	Kebijakan Bidang Produktivitas	Kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan		Kebijakan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM				Kebijakan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM						Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp. 1.650.000,- Penambahan : -
Total											Rp. 3.107.951.250,00	(-) Rp. 22.736.750,00		

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Unsur / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Kepagawalan, dan Persandia													
1.20.01	Biro Administrasi Pembangunan													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 361.865.000,00				Rp. 361.865.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman Dokumen	50 dokumen		Rp. 10.000.000,00	Materai Rp.3.000,-	390 lembar	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Surat Keluar	2522 surat			Materai Rp.6000,-	215 lembar					
				Surat Masuk	15225 surat			Pengiriman perangko	32 Paket					
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perpanjangan ijin operasional kendaraan dinas operasional rod 2	2 kendaraan roda dua		Rp. 5.000.000,00	1. Perpanjangan ijin operasional kendaraan dinas operasional rod 2	2 kendaraan	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	14 or	14 or		Rp. 22.589.600,00	Penatausahaan keuangan, barang dan kepegawalan	14 or	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 22.589.600,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	84 jenis	84 jenis		Rp. 40.221.400,00	Alat tulis kantor	83 jenis	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 40.221.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang cetakan dan pengisian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	19 unit	19 unit		Rp. 30.550.000,00	Barang Cetakan	19 jenis	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 30.550.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10 jenis	10 jenis		Rp. 5.000.000,00	Komponen instalasi listrik/penerangan	10 jenis	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan rumah tangga keperluan kantor	22 jenis		Rp. 5.000.000,00	Peralatan rumah tangga keperluan kantor	22 jenis	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan bahan baku/persediaan perantara undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1 Paket	1 Paket		Rp. 4.560.000,00	Buku Baku/persediaan perundangan	1 Paket	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 4.560.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Belanja makanan dan minuman rapat	5235 os		Rp. 52.350.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	5235 os	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 52.350.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Usuan /Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perkantoran	100 %	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun		Rp. 150.500.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	DIY dari luar DIY	Rp. 150.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.019	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinamis Inaktif Tidak Teratur	Perkantoran	100 %	Kelastarian Arsip Inaktif	1 tahun		Rp. 36.094.000,00	Kelastarian Arsip Inaktif	1 tahun	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 36.094.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 401.405.000,00					Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Prosentase penyediaan kendaraan dinas operasional	100 %	Kendaraan roda 4	1 unit	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 200.000.000,00	Kendaraan roda 4	1 unit	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Kendaraan Roda 4
1.20.1.20.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan perlengkapan gedung kantor	100 %	Perlengkapan gedung Kantor	3 unit	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 29.409.500,00	Perlengkapan gedung kantor	3 unit	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 29.409.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan peralatan gedung kantor	100 %	Laptop, LCD, printer, Flasdisk, presenter	7 jenis	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 49.895.500,00	Laptop, PC, Printer inkjet, Printer Laserjet, scanner, faximille, LCD, Flasdisk, presenter	7 jenis	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 49.895.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Prosentase penyediaan kendaraan dinas operasional	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	2 unit	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 85.000.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	2 unit	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 85.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.026	Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Prosentase penyediaan perlengkapan gedung kantor	100 %	Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor	4 unit		Rp. 14.600.000,00	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 14.600.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan rutin peralatan Gedung kantor	Prosentase penyediaan peralatan gedung kantor	100 %	Pemeliharaan peralatan gedung Kantor	5 jenis		Rp. 15.000.000,00	Pemeliharaan peralatan gedung Kantor	5 jenis	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.029	Pemeliharaan rutin/Berkala meubelur	Prosentase penyediaan meubelur terpelihara	100 %	meubelur terpelihara	5 jenis		Rp. 7.500.000,00	Pemeliharaan meubelur gedung Kantor	5 jenis	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 7.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENGINGKATAN PENGENGBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 29.969.900,00				Rp. 47.969.900,00	Rp. 18.000.000,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP,RKT,PK)	Terwujudnya penatubshaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelincaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Lakip, RKT, PK	2 dokumen		Rp. 4.467.000,00	Lakip, RKT, PK	2 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 4.467.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Terwujudnya penatubshaan keuangan dan manajemen pencapalan kinerja program yang mendukung kelincaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Keserjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	5 persen		Rp. 5.543.400,00	Dokumen laporan keuangan	3 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 5.543.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan rencana program/kegiatan SKPD serta pengorganisasian data dan informasi	Terwujudnya penatubshaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelincaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Renja Biro Renstra Biro, DPA, ROPK	3 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 9.999.900,00	Renja Biro Renstra Biro, DPA, ROPK	3 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 27.999.900,00	Rp. 18.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Pembayaran tenaga ahli 6 bhn
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dn evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD	Terwujudnya penatubshaan keuangan dan manajemen pencapalan kinerja program yang mendukung kelincaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Capaian kinerja, Calk, trivulan, pelaksanaan kegiatan	4 dokumen		Rp. 10.000.000,00	Laporan Capaian kinerja, Calk, trivulan, pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI						Rp. 64.139.550,00				Rp. 64.089.550,00	(-) Rp. 50.000,00		
1.20.1.20.01.23.006	Pengelolaan SIM Layanan Jin Penelitian Online	Persentase unit menerapkan sistem administrasi manajemen tugas terpadu	50 %	Pengelolaan SIM Jin Penelitian Online dan Tersedianya database Hasil Penelitian	1 tahun		Rp. 64.139.550,00	Pengelolaan SIM Jin Penelitian Online dan Tersedianya database Hasil Penelitian	1 tahun	DIY dan 5 Kab/kota	Rp. 64.089.550,00	(-) Rp. 50.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.30	PROGRAM ANALISIS KEBIDJAKAN						Rp. 941.536.000,00				Rp. 941.536.000,00	Rp. 0,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Uraian/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	PEMBANGUNAN													
1.20.1.20.01.30.001	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Dokumen Road Map Pengembangan Sanitasi DIY	1 dokumen		Rp. 375.205.000,00	Dokumen Road Map Pengembangan Sanitasi DIY	1 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 375.205.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Dokumen Road Map Pengelolaan Moda Transportasi DIY	1 dokumen			Dokumen Road Map Pengelolaan Moda Transportasi DIY	1 dokumen					
1.20.1.20.01.30.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan	1 dokumen		Rp. 192.497.000,00	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan	1 dokumen	DIY dan 5 Kabupaten/Kota	Rp. 192.497.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Dokumen laporan pelaksanaan program PRSP	1 dokumen			Dokumen laporan pelaksanaan program PRSP	1 dokumen					
				Dokumen Pelaksanaan Program Penghematan Sumber Daya Energi dan Air	1 dokumen			Dokumen Pelaksanaan Program Penghematan Sumber Daya Energi dan Air	1 dokumen					
1.20.1.20.01.30.003	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan	1 dokumen		Rp. 134.369.000,00	Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan	1 dokumen	SKPD, DIY dan Kab/Kota se DIY	Rp. 134.369.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.30.010	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Dekonsentrasi	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Dokumen Kajian Program Dekonsentrasi Bidang Ketengakerjaan	1 dokumen		Rp. 62.715.000,00	Dokumen Kajian Program Dekonsentrasi Bidang Ketengakerjaan	1 dokumen	DIY dan 5 Kab/Kota	Rp. 62.715.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.30.011	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	Bahan Rumusan hasil Koordinasi dan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	1 Kajian		Rp. 96.750.000,00	Bahan Rumusan hasil Koordinasi dan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	1 Kajian	Gabungan Kota/Kabupaten dan Provinsi	Rp. 96.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Penyempurnaan aplikasi mapping dana dekon,TP,KD,KP dan UB	1 Aplikasi			Penyempurnaan aplikasi mapping dana dekon,TP,KD,KP dan UB	1 Aplikasi					
				Penyerahan DIPA APBN	60 lembaga/Instansi			Penyerahan DIPA APBN	60 lembaga/Instansi					
1.20.1.20.01.30.012	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36,45 %	1. Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan subsektor 1. Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan 2.	1 dokumen		Rp. 80.000.000,00	1. Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan subsektor 1. Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan 2.	1 dokumen	Gabungan Kota/Kabupaten dan Provinsi	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Pertambahan dan penggalan. 3. Industri Pengolahan. 4. Konstruksi. 5. Listrik, gas dan air Bers									
1.20.1.20.01.31	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						Rp. 1.513.186.400,00				Rp. 1.513.186.400,00		
1.20.1.20.01.31.006	Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Data/Informasi Sumberdaya kelitbangan	1 dokumen		Rp. 1.022.400.000,00	Data/Informasi Sumberdaya kelitbangan	1 dokumen	DIY dan 5 Kab/kota	Rp. 1.022.400.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Dokumen Hasil Penelitian Riset Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan IPTeKS di DIY	1 dokumen			Dokumen Hasil Penelitian Riset Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan IPTeKS di DIY	1 dokumen				
				Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen			Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen				
				Dokumen Hasil penelitian tahun 2013	1 dokumen			Dokumen Hasil penelitian tahun 2013	1 dokumen				
				Dokumen Inventarisasi hasil/hasil terapan/kepat guna	1 dokumen			Dokumen Inventarisasi hasil/hasil terapan/kepat guna	1 dokumen				
				Hasil Penelitian Tematik Bidang Strategi Daerah	1 Kajian			Hasil Penelitian Tematik Bidang Strategi Daerah	1 Kajian				
				Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah DIY	2 terbitan			Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah DIY	2 terbitan				
				Penelitian dan pendataan surat/jin rekomendasi penelitian	12 bulan			Penelitian dan pendataan surat/jin rekomendasi penelitian	12 bulan				
				Sosialisasi penyebaran data/informasi kebijakan bidang litbang	2 kali			Sosialisasi penyebaran data/informasi kebijakan bidang litbang	2 kali				
1.20.1.20.01.31.019	Peringatan Hari Teknologi Nasional	Persentase penelitian dan pengembangan	100 %	1. Jumlah peserta Workshop seminar Iptek	85 Orang		Rp. 340.888.000,00	1. Workshop seminar Iptek	1 kegiatan	DIY dan Kab/kota	Rp. 340.888.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Jumlah Penerima Anugerah Iptek	18 penerima			2. Pemberian Anugerah Iptek	1 kegiatan				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				3. Pameran Hakteknas	1 kali			3. Pameran Hakteknas	1 Paket					
				4. Jumlah Peserta Pameran Hakteknas	350 Orang			4. Upacara Penerimaan Hakteknas	1 kegiatan					
1.20.1.20.01.31.020	Penguatan SIDA	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Penyusunan Roadmap SIDA	1 dokumen		Rp. 149.898.400,00	Penyusunan Roadmap SIDA	1 dokumen	DIY dan 5 Kab/kota	Rp. 149.898.400,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR						Rp. 56.446.300,00				Rp. 56.446.300,00			
1.20.1.20.01.33.001	Penyuluhan Motivasi Kerja bagi Aparat	Persentase informasi kepegawalan yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawalan	83 %	Jumlah aparatur yang termotifasi	44 Orang		Rp. 56.446.300,00	Jumlah aparatur yang termotifasi	44 Orang	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 56.446.300,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.25	Komunikasi dan Informatika													
1.25.02	Biro Administrasi Pembangunan													
1.25.1.20.02.21	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						Rp. 4.431.399.300,00				Rp. 4.431.399.300,00			
1.25.1.20.02.21.001	Pengadaan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT	100 %	Buku evaluasi pelaksanaan barang/ja	1 dokumen	Badan Kepegawalan Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Bencana Daerah	Rp. 4.431.399.300,00	Buku evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	1 buku	Badan Kepegawalan Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Bencana Daerah	Rp. 4.431.399.300,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Buku Inventarisasi pengadaan 2015	1 dokumen			Buku Inventarisasi pengadaan 2015	1 buku					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Uraian /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan jawaaban sangdah banding	1 tm	Pembangunan Daerah Perustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Manusia Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kehidupan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan, Perdagangan, Koperasi dan Aspek Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grihasia Satuan Polisi Pamong Praja Inspektorat DPRD			Pembangunan Daerah Perustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Manusia Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kehidupan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan, Perdagangan, Koperasi dan Aspek Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grihasia Satuan Polisi Pamong Praja Inspektorat DPRD					
				Terlaksanainya seminar pembinaan POCA	1 Paket									
				Tersedianya tm teknis pendamping UUP	1 tm									
Total														
												Rp. 7.799.947.450,00	Rp. 7.817.897.450,00	Rp. 17.950.000,00

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Biro Organisasi														
Kode	Unsur/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20	Wajib													
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepengawasan, dan Persenda													
1.20.01	Biro Organisasi													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 397.480.000,00					Rp. 393.196.150,00	
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Pengiriman Dokumen	1 Paket	Biro Organisasi	Rp. 1.270.000,00	Pengiriman Dokumen	1 Paket	Biro Organisasi	Rp. 1.270.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					Surat Keluar	2700 surat			Surat Keluar	2700 surat				
					Surat Masuk	2500 surat			Surat Masuk	2500 surat				
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Bukti pembayaran pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 yang tepat waktu	2 unit kendaraan roda empat	Biro Organisasi	Rp. 1.750.000,00	Bukti pembayaran pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 yang tepat waktu	2 unit kendaraan roda empat	Biro Organisasi	Rp. 1.750.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pengelola Kepegawaian	13 Orang, 12 Bulan	Biro Organisasi	Rp. 23.649.000,00	Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pengelola Kepegawaian	13 Orang, 12 Bulan	Biro Organisasi	Rp. 23.649.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Alat-alit kebersihan Kantor	19 jenis	Biro Organisasi	Rp. 7.100.000,00	Alat-alit kebersihan Kantor	19 jenis	Biro Organisasi	Rp. 7.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Alat Tulis Kantor	56 jenis	Biro Organisasi	Rp. 18.811.000,00	Alat Tulis Kantor	56 jenis	Biro Organisasi	Rp. 18.811.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetaklan Dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Barang cetakan	13 unit	Biro Organisasi	Rp. 15.000.000,00	Barang cetakan	13 unit	Biro Organisasi	Rp. 14.604.150,00	(-) Rp. 395.850,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	Biro Organisasi	Rp. 5.800.000,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	Biro Organisasi	Rp. 5.412.000,00	(-) Rp. 388.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Administrasi Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Buku Perpustakaan	1 Paket	Biro Organisasi	Rp. 8.200.000,00	Buku Perpustakaan	1 Paket	Biro Organisasi	Rp. 8.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					Jawa Pos	1 expl.12 Bh			Jawa Pos	1 expl.12 Bh				
					Kedaulatan Rakyat	1 expl. 12 Bh			Kedaulatan Rakyat	1 expl. 12 Bh				
					Kompas	1 expl. 12 Bh			Kompas	1 expl. 12 Bh				
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		Makanan dan minuman untuk rapat/koordinasi	4192 os	Biro Organisasi	Rp. 45.900.000,00	Makanan dan minuman untuk rapat/koordinasi	4192 os	Biro Organisasi	Rp. 45.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Organisasi

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	Biro Organisasi	Rp. 270.000.000,00	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	Biro Organisasi	Rp. 266.500.000,00	(-) Rp. 3.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENGHATIAN PANGKALAN PRASARANA APARATUR						Rp. 577.558.800,00				Rp. 576.808.800,00	(-) Rp. 750.000,00		
1.20.1.20.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	2 unit 2 unit	Biro Organisasi	Rp. 431.560.000,00	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	2 unit 2 unit	Biro Organisasi	Rp. 431.560.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Komputer PC	2 unit	Biro Organisasi	Rp. 17.600.000,00	Komputer PC	2 unit	Biro Organisasi	Rp. 17.100.000,00	(-) Rp. 500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pemeliharaan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	2 unit 4 unit	Biro Organisasi	Rp. 95.398.800,00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	2 unit 4 unit	Biro Organisasi	Rp. 95.148.800,00	(-) Rp. 250.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pemeliharaan Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara	7 jenis	Biro Organisasi	Rp. 33.000.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara	7 jenis	Biro Organisasi	Rp. 33.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENGHATIAN PANGKALAN PRASARANA APARATUR						Rp. 59.625.000,00				Rp. 59.625.000,00			
1.20.1.20.01.06.006	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penatusahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai LAKIP SKPD tahun 2014 Penetapan Kinerja (PK) Biro Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Tahun 2016	1 nilai B 1 dokumen 1 dokumen	Biro Organisasi	Rp. 3.950.000,00	Nilai LAKIP SKPD tahun 2014 Penetapan Kinerja (PK) Biro Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Tahun 2016	1 nilai B 1 dokumen 1 dokumen	Biro Organisasi	Rp. 3.950.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatusahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja	100 %	1. Laporan Petanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 laporan	Biro Organisasi	Rp. 15.000.000,00	1. Laporan Petanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 laporan	Biro Organisasi	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015														
Nama SKPD : Biro Organisasi														
Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		2. Surat Pengesahan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 laporan			2. Surat Pengesahan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 laporan					
				3. Laporan Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 laporan			3. Laporan Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 laporan					
				4. Laporan Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	2 laporan			4. Laporan Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	2 laporan					
				5. Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan			5. Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan					
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya perencanaan keuangan dan manajemen	100 %	1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015 dan 2016	10 buku	Biro Organisasi	Rp. 36.000.000,00	4. Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2015	15 buku	Biro Organisasi	Rp. 36.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
	Pengembangan Data dan Informasi	program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015 dan 2016	50 buku			1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016	10 buku					
				3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015	15 buku			2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015 dan 2016	50 buku					
				4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015	15 buku			3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015	15 buku					
				5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) tahun 2015	10 buku			5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)	10 buku					
1.20.1.20.01.06.028	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya pelaksanaan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (bulanan)	12 laporan	Biro Organisasi	Rp. 4.675.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD (Triwulan)	12 laporan	Biro Organisasi	Rp. 4.675.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.01.29	PROGRAM PENGUKUTAN KAPASITAS DAERAH*						Rp. 4.046.630.925,00				Rp. 4.055.822.925,00			
1.20.1.20.01.29.114	Rumusan Kebijakan Kelembagaan yang efektif dan efisien	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	1. Pengut tentang Rician Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26 Raperub	Biro Organisasi	Rp. 374.258.000,00	1. Pengut tentang Rician Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26 Raperub	Biro Organisasi	Rp. 374.258.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Biro Organisasi

Kode	Urusan/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan		
				Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif			Lokasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)		
				4. Formasi Jenis dan Kebutuhan Jabatan fungsional Tertentu di Lingkungan Pemda DIY	1 Pergub			4. Formasi Jenis dan Kebutuhan Jabatan fungsional Tertentu di Lingkungan Pemda DIY	1 Pergub						
				5. Sistem Informasi Analisis Jabatan di Lingkungan Pemda DIY	1 Aplikasi			5. Sistem Informasi Analisis Jabatan di Lingkungan Pemda DIY	1 Aplikasi						
Total							Rp. 5.081.294.725,00				Rp. 5.085.452.875,00	Rp. 4.158.150,00			

LAPORAN PERUBAHAN

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Sumber Dana	Bertambah/ Berkurang	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
1.20.1.20.01.01.001	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Desentralisasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan, dan Persandia												
1.20.01	Biro Umum, Humas dan Protokol												
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN PERKANTORAN						Rp. 9.452.865.500,00				Rp. 9.850.522.600,00	Rp. 397.657.100,00	
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Surat keluar - Surat masuk	235 surat 1500 surat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 5.000.000,00	- Surat keluar - Surat masuk	235 surat 1500 surat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Pembayaran pajak jin frekuensi - Pembayaran tagihan air langganan - Pembayaran tagihan rekening listrik 24 bulanan (1.350.353 kwh) - Pembayaran tagihan rekening telepon 82 sambungan	1 Kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 2.700.000.000,00	- Biaya pasang listrik baru - Pembayaran pajak jin frekuensi - Pembayaran tagihan rekening air langganan - Pembayaran tagihan rekening listrik 24 bulanan (1.350.353 kwh) - Pembayaran tagihan rekening telepon 82 sambungan	1 keg 1 Kali 12 bulan 12 bulan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 2.700.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Sewa AC standing 5 PK - Sewa flooring - Sewa kursi - Sewa kursi hotel dan cover - Sewa panggung - Sewa sound system - Sewa tenda - Sewa tenda elektrik kombinasi tang tinggi	4 unit 210 m2 2000 buah 1000 unit 125 m2 1 unit 18 unit 13 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 50.000.000,00	- Sewa AC standing 5 PK - Sewa flooring - Sewa kursi - Sewa kursi hotel dan cover - Sewa panggung - Sewa sound system - Sewa tenda - Sewa tenda eksklusif kombinasi tang tinggi	8 unit 210 m2 4000 buah 2000 unit 250 m2 2 unit 50 unit 25 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 75.325.000,00	Rp. 25.325.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Roda 2 - Roda 3 - Roda 4 - Roda 6	29 unit 1 unit 43 unit 2 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 49.465.000,00	- Roda 2 - Roda 3 - Roda 4 - Roda 6	29 unit 1 unit 43 unit 2 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 49.465.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2, 3, 4 dan 6 yang tepat waktu:	0 -			Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2, 3, 4 dan 6 yang tepat waktu:	0 -					
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan													
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Penggala barang - Penggala kepegawailan - Penggala keuangan - Penyelenggara kegiatan - Pramu Kantor PNS	3 Orang 3 Orang 17 Orang 8 Orang 3 Orang	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 198.125.000,00	- Penggala barang - Penggala kepegawailan dan - Penggala keuangan - Penyelenggara kegiatan - Pramu Kantor Non PNS	3 Orang 3 Orang 17 Orang 8 Orang 3 Orang	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 181.192.500,00	Reguler APBD	(-) Rp. 16.932.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor													
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Aquarium Air Laut Aquarium air tawar Dinding/langit-langit Halaman Kaca Karpet KM/WC umum KM/WC VIP Lantai abu-abu Lantai keramik Taman Kompleks Kepatihan	12 kali 12 kali 128568 m2 182640 m2 208820 m2 34068 m2 13896 m2 1008 m2 27360 m2 247560 m2 53208 m2	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 943.082.000,00	Aquarium Air Laut Aquarium air tawar Dinding/langit-langit Halaman Kaca Karpet KM/WC umum KM/WC VIP Lantai abu-abu Lantai keramik Taman Kompleks Kepatihan	12 kali 12 kali 128568 m2 182640 m2 208820 m2 34068 m2 13896 m2 1008 m2 27360 m2 247560 m2 53208 m2	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 943.082.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja													
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan Kerja	19 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 420.646.000,00	Peralatan Kerja	19 Jnis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 419.346.000,00	Reguler APBD	(-) Rp. 1.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor													
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	166 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 345.000.000,00	Tersedianya alat tulis kantor	166 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 345.000.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	cetak kalender cetakan umum Penggandaan	4 jenis 37 jenis 124000 lembar	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 356.287.500,00	cetak kalender cetakan umum Penggandaan	4 jenis 37 jenis 124000 lembar	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 351.287.500,00	Reguler APBD	(-) Rp. 5.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode	Usuran/Program/ Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Sumber Data	Bertambah/Berkurang	Anggaran (12)	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
1.20.1.20.01.01.01	Penyediaan Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)	
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 75.000.000,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 65.000.000,00	Reguler APBD	(-) Rp. 10.000.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
1.20.1.20.01.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dos Souvenir	120 buah	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 945.260.000,00	Dos Souvenir	120 buah	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 970.260.000,00	Reguler APBD	Rp. 25.000.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Pembelian bunga has
				Kerangan Bunga	100 buah			Kerangan Bunga	100 buah						
				Kerajinan Batik	40 buah			Kerajinan Batik	40 buah						
				Kerajinan lainnya	30 buah			Kerajinan lainnya	31 buah						
				Kerajinan perak	50 buah			Kerajinan perak	50 buah						
				Plagam	20 buah			Plagam	20 buah						
				Pleket Lambang	500 buah			Pleket Lambang	500 buah						
				Penda DIY	120 buah			Penda DIY	120 buah						
				Tas Souvenir	120 buah			Tas Souvenir	120 buah						
				Trophy	220 buah			Trophy	220 buah						
1.20.1.20.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Isi tabung gas	96 Kali	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 100.000.000,00	Isi tabung gas	96 Kali	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 100.000.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Isi tabung	27 Kali			Isi tabung	27 Kali						
				perendam	30 jenis			perendam	30 jenis						
				kebakaran				kebakaran							
				Peralatan rumah	30 jenis			Peralatan rumah	30 jenis						
				tangga				tangga							
1.20.1.20.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perunding- undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Langganan surat kabar	8 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 70.000.000,00	Langganan surat kabar	8 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 60.406.000,00	Reguler APBD	(-) Rp. 9.594.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
				Langganan surat	2592 oj			Langganan surat	2592 oj						
				kegiatan				kegiatan							
1.20.1.20.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman rapat	3000 os	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.500.000.000,00	Makanan dan minuman rapat	3000 os	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.501.120.000,00	Reguler APBD	Rp. 401.120.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : Penambahan makan minum tamu
				Makanan dan	27605 oj			Makanan dan	27605 oj						
				minuman tamu	1 tahun			minuman tamu	1 tahun						
				Makmin Gubernur dan Wakil Gubernur				Makmin Gubernur dan Wakil Gubernur							
1.20.1.20.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.500.000.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.450.000.000,00	Reguler APBD	(-) Rp. 50.000.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
				Konsultasi dan	12 bulan			Konsultasi dan	12 bulan						
				koordinasi ke luar				koordinasi ke luar							
				daerah				daerah							
1.20.1.20.01.01.01.027	Penyediaan jasa Pelayanan kantor/ Gedung/tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Budi pembayaran jasa pelayanan kantor	4 kultansi	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 195.000.000,00	Bukti pembayaran jasa pelayanan kantor	4 kultansi	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 234.038.600,00	Reguler APBD	Rp. 39.038.600,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Mengalokasikan kekurangan jasa petugas pelayanan selama 2 bulan x 12 orang
1.20.1.20.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN						Rp. 10.493.034.526,22				Rp. 8.698.508.776,22		(-) Rp. 1.794.525.750,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode	Usuran/Program/ Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SARANA DAN PRASARANA APARATUR											(15)
1.20.1.20.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2	4 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 2.089.385.000,00	Kendaraan dinas operasional roda 2	4 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 2.089.385.000,00	Reguler APBD
				Kendaraan dinas operasional roda 4	6 unit			Kendaraan dinas operasional roda 4	6 unit			
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor: Mesin fotocopy, penghancur kertas, komputer, monitor, UPS, radio repeater, pesawat HT, telepon analog	47 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 400.000.000,00	Peralatan gedung kantor: Mesin fotocopy, penghancur kertas, komputer, monitor, UPS, radio repeater, pesawat HT, telepon analog, kartu PABX, dan layer proyektor	107 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 447.650.000,00	Reguler APBD
1.20.1.20.01.02.010	Pengadaan Mebelier	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Almari Pakaian	3 buah	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 350.000.000,00	Almari pakaian	3 buah	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 350.000.000,00	Reguler APBD
				Kursi susun	168 buah			Kursi susun	168 buah			
				Meja knap	15 buah			Meja knap	15 buah			
				Meja makan buffet	5 buah			Meja makan buffet	5 buah			
				Meja Resepsiotis	2 unit			Meja resepsionis	2 unit			
				Meja tenis standard	2 buah			Meja tenis standart	2 buah			
				Minbar	2 buah			Minbar	2 buah			
1.20.1.20.01.02.011	DED Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	DED pembangunan gedung	1 laporan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 172.383.850,00	DED pembangunan gedung	1 laporan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 172.383.850,00	Reguler APBD
1.20.1.20.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung kantor terpelihara	11 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 300.000.000,00	Gedung kantor terpelihara	11 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 376.180.000,00	Reguler APBD
1.20.1.20.01.02.023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas jabatan terpelihara (kendaraan roda 4)	1 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 244.387.000,00	Kendaraan dinas jabatan terpelihara (kendaraan roda 4)	4 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 244.387.000,00	Reguler APBD
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas jabatan terpelihara (kendaraan roda 2, 3, 4, dan kendaraan roda 6)	4 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.447.460.000,00	Kendaraan dinas jabatan terpelihara (kendaraan roda 2, 3, 4, dan kendaraan roda 6)	4 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.439.460.000,00	Reguler APBD
1.20.1.20.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor terpelihara	4 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 75.000.000,00	Perengkapan gedung kantor terpelihara	4 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 75.000.000,00	Reguler APBD

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara	9 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 200.000.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.029	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mebeleur terpelihara	13 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 125.000.000,00	Mebeleur terpelihara	13 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.042	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehabilitasi gedung kantor	1 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.488.584.475,00	Rehabilitasi gedung kantor	1 unit	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.488.584.475,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.067	Penataan Kawasan Kompleks Kepathihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Inventarisasi dan Identifikasi Jasa konsultasi appraisal tanah Pertemuan tim dengan warga	2 kegiatan 1 laporan 1 kegiatan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.997.600.000,00	Inventarisasi dan Identifikasi Jasa konsultasi appraisal tanah Pertemuan tim dengan warga	2 kegiatan 1 laporan 1 kegiatan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 149.270.000,00	(-) Rp. 1.848.330.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.02.097	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (pajak rokok)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan lift/elektor beserta konstruksinya	1 Paket	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.693.234.201,22	Pengadaan lift/elektor beserta konstruksinya	1 Paket	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.693.234.201,22	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.03	PROGRAM PENGHIMPUNAN DISIPLIN APARATUR						Rp. 195.000.000,00				Rp. 195.000.000,00	Rp. 0,00	
1.20.1.20.01.03.002	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	Prosentase disiplin aparatur	100 %	Batik KDH dan WKDH Pakelan dinas beserta perlengkapannya: Pakalan kerja lapangan, pakaian sipil lengkap, pakaian batik tradisional, sepatu kerja, parfume, pin	8 stel 6 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 195.000.000,00	Batik KDH dan WKDH Pakelan dinas beserta perlengkapannya: Pakalan kerja lapangan, pakaian sipil lengkap, pakaian batik tradisional, sepatu kerja, parfume, pin	8 stel 6 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 195.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.05	PROGRAM PENGHIMPUNAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 1.725.908.650,00				Rp. 1.725.908.650,00	Rp. 43.740.000,00	
1.20.1.20.01.05.013	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Dan Upacara lainnya	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Upacara peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya terlaksana	62 Kali	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.395.908.650,00	Upacara peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya terlaksana	62 Kali	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.439.648.650,00	Rp. 43.740.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					Sumber Data	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang			
1.20.1.20.01.05.076	Peningkatan Kinerja Aparatur	100 %	100 %	Peningkatan motivasi aparatur, orientasi kerja, sosialisasi, dan umtek terakasa	9 kali	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 330.000.000,00	Peningkatan motivasi aparatur, orientasi kerja, sosialisasi, dan umtek terakasa	9 kali	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 330.000.000,00	Rp. 0,00	(13)	(13)	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPUKARAN KEMERAN KEMERJA DAN KEUANGAN						Rp. 88.492.700,00				Rp. 74.375.700,00	(-) Rp. 14.117.000,00			
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Tervujudnya penatuaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai LAKIP SKPD: B = >65 - 75	1 tahun	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 5.000.000,00	Nilai LAKIP SKPD: B = >65 - 75	1 tahun	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	(13)	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Tervujudnya penatuaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	6 persen	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 18.065.900,00	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	6 persen	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 13.017.900,00	(-) Rp. 5.048.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi	Tervujudnya penatuaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	ROPK, renja, RKA, sistem informasi	1 tahun	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 47.426.800,00	ROPK, renja, RKA, DPA, sistem informasi	1 tahun	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 40.916.800,00	(-) Rp. 6.510.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tervujudnya penatuaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian dengan program kegiatan	99 persen	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 18.000.000,00	Kesesuaian antara target capaian dengan program kegiatan	99 persen	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 15.441.000,00	(-) Rp. 2.559.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.16	PROGRAM PENGINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL DAERAH DAERAH						Rp. 2.350.000.000,00				Rp. 2.229.700.000,00	(-) Rp. 120.300.000,00			
1.20.1.20.01.16.002	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen /Lembaga	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen /Lembaga	11 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.150.000.000,00	Facilitas layanan penerimaan kunjungan kerja	11 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.129.700.000,00	(-) Rp. 20.300.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri			Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri terakhsana		Protokol				Protokol				
1.20.1.20.01.15.006	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %	Teraksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 tahun	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.200.000.000,00	Teraksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 tahun	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 1.100.000.000,00	(-) Rp. 100.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.20.1.20.01.15.007	Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %	Teraksananya pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	2 Orang	Protokol	Rp. 0,00	Teraksananya pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	2 Orang	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI						Rp. 363.700.000,00				Rp. 363.700.000,00			
1.20.1.20.01.23.011	Optimalisasi Sistem Pengelolan Naskah Dinas Berbasis TI	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Optimalisasi sistem pengelolaan naskah dinas berbasis TI terakhsana	4 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 363.700.000,00	Sistem pengelolaan naskah dinas berbasis TI terakhsana	4 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 363.700.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.24	Kearifan													
1.24.02	Biro Umum, Humas dan Protokol													
1.24.1.20.02.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN						Rp. 86.500.000,00				Rp. 84.250.000,00	(-) Rp. 2.250.000,00		
1.24.1.20.02.15.024	Pemeliharaan Arsip Dinas Inaktif Tidak Terakhsana	Optimalisasi aktivitas Penda angs SOPD DY angs SOPD DY angs SOPD DY	20 %	Pemeliharaan Arsip Dinas Inaktif Tidak Terakhsana	1 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 86.500.000,00	Pemeliharaan Arsip Dinas Inaktif Tidak Terakhsana	1 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 84.250.000,00	(-) Rp. 2.250.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
1.25	Komunikasi dan Informatika													
1.25.02	Biro Umum, Humas dan Protokol													
1.25.1.20.02.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA						Rp. 2.538.321.000,00				Rp. 2.518.851.000,00	(-) Rp. 19.470.000,00		
1.25.1.20.02.18.006	Pengembangan Kemiraan Kermiraan	Persentase aktivitas Penda angs SOPD DY angs SOPD DY angs SOPD DY	100 %	Kemiraan Kermiraan terakhsana	7 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 533.887.000,00	Kemiraan Kermiraan terakhsana	7 jenis	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 494.887.000,00	(-) Rp. 39.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.25.1.20.02.18.016	Penybarluasan Informasi dan	Persentase aktivitas Penda angs SOPD DY angs SOPD DY angs SOPD DY	100 %	Cetak Dokumentasi	4 jenis	Biro Umum, dan Protokol	Rp. 2.004.434.000,00	Cetak Dokumentasi	4 jenis	Biro Umum, dan Protokol	Rp. 2.023.964.000,00	Rp. 19.530.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaian	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	yang terdistribusikan melalui media massa		Pawai Peningkatan Publikasi Upgrade website	1 kali 20 jenis 1 keg	Hubungan Masyarakat dan Protokol		Informasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah terlaksana	0 1 Kali 20 jenis	Hubungan Masyarakat dan Protokol			Penambahan : -
Total							Rp. 27.293.822.376,22				Rp. 25.784.556.726,22	(-) Rp. 1.509.265.650,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Sekretariat DPRD														
Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/Berkurang
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawangan, dan Persandian													
1.20.08	Sekretariat DPRD													
1.20.1.20.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 2.774.580.200,00				Rp. 2.796.015.200,00	Rp. 21.435.000,00	
1.20.1.20.08.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Keluar 2. Surat Masuk 3. Pengiriman Dokumen	2000 surat 800 surat 12 Surat/dokumen	Sekretariat DPRD	Rp. 6.599.000,00	Paket Pengiriman Surat keluar Surat Masuk	1 tahun 2000 surat 800 surat	Sekretariat DPRD	Rp. 6.599.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Rekening Telepon 2. Rekening Listrik 3. Rekening Air 4. Langganan SMS gateway	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Sekretariat DPRD	Rp. 818.951.000,00	1. Rekening Telepon 2. Rekening Air 3. Rekening Listrik 4. Langganan SMS gateway	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Sekretariat DPRD	Rp. 833.951.000,00	Rp. 15.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Tambahan untuk pembayaran langganan PDAM
1.20.1.20.08.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjalanan kendaraan dinas/operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	KIR Penelitian Ulang Surat-Surat Kendaran Dinas Jabatan dan Operasional meliputi : STNK	4 Kali 40 STNK	Sekretariat DPRD	Rp. 32.753.750,00	Penelitian Ulang KIR Kendaran Operasional: Penelitian Ulang STNK Kendaran Dinas Jabatan dan Operasional:	4 Kali 40 STNK	Sekretariat DPRD	Rp. 32.753.750,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.01.007	penyediaan jasa administrasi keuangan.	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honor Penggaba Barang Honor Penggaba Keuangan	2 org x 12 bulan 9 org x12 bulan	Sekretariat DPRD	Rp. 49.990.000,00	Honor Penggela Barang Honor Penggela Keuangan	2 org x 12 bulan 9 org x12 bulan	Sekretariat DPRD	Rp. 56.425.000,00	Rp. 6.435.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Tambahan ATK : 1 toner pinter dan 100 other
1.20.1.20.08.01.008	Penyediaan Jas Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan Gedung Kantor	162.036 M2 x 12 bulan	Sekretariat DPRD	Rp. 332.114.400,00	Perawatan Kebersihan dan kerapian kantor oleh Penyedia Jasa Cleaning Service	146.496 M2 x 12 bulan	Sekretariat DPRD	Rp. 332.114.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.01.010	Penyediaan alat tulis kantor.	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	23 macam	Sekretariat DPRD	Rp. 49.762.700,00	Alat Tulis Kantor	23 jenis	Sekretariat DPRD	Rp. 49.762.700,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Tambahan 4 buah toner Foto Copy
1.20.1.20.08.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Cetakan	6 Macam cetakan 192 lembar	Sekretariat DPRD	Rp. 51.707.500,00	Penggandaan	221000 lembar penggandaan, 5 Macam cetakan	Sekretariat DPRD	Rp. 51.707.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penjilidan komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	355 Jilid 15 macam	Sekretariat DPRD	Rp. 60.456.200,00	komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	11 macam	Sekretariat DPRD	Rp. 60.456.200,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan TUK

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Usuran/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.08.01.015	Persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku Perpustakaan Majalah Surat Kabar Harian	6 paket jenis buku 5 terbitan 9 SKH x 11 eksemplar	Sekretariat DPRD	Rp. 158.020.000,00	Buku Perpustakaan Majalah Surat Kabar Harian	6 paket jenis buku 5 terbitan 9 SKH x 11 eksemplar	Sekretariat DPRD	Rp. 158.020.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.01.017	Persediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	3. Petugas Pengamanan Unjuk Rasa Dewan	1200 os	Sekretariat DPRD	Rp. 106.860.000,00	3. Petugas Pengamanan Unjuk Rasa Dewan	960 os	Sekretariat DPRD	Rp. 106.860.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan TUK
1.20.1.20.08.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2. Dalam Jawa 3. Luar Jawa Referensi / bahan kebijakan sesuai bidang tugas hasil koordinasi dan konsultasi : 1. Dalam Daerah	34 OK 25 OK 80 oh	Kab/Kota dalam DIY dan Ibu Kota Provinsi lainnya	Rp. 405.837.000,00	2. Dalam Jawa 3. Luar Jawa Referensi / bahan kebijakan sesuai bidang tugas hasil koordinasi dan konsultasi : 1. Dalam Daerah	34 OK 25 OK 80 oh	Kab/Kota dalam DIY dan Ibu Kota Provinsi lainnya	Rp. 405.837.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.01.021	Persediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honor Pengelola Kepegawaian	2 org x12 bin	Sekretariat DPRD	Rp. 65.647.650,00	Honor Pengelola Kepegawaian	2 org x12 bin	Sekretariat DPRD	Rp. 65.647.650,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan TUK
1.20.1.20.08.01.022	Persediaan jasa keamanan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan jasa pengamanan (Outsourcing)	1 pkt (12 bin)	Sekretariat DPRD	Rp. 634.441.000,00	Penyediaan jasa pengamanan (Outsourcing)	1 pkt (12 bin)	Sekretariat DPRD	Rp. 634.441.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.01.026	Persediaan retribusi sampah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Retribusi sampah	12 bin	Sekretariat DPRD	Rp. 1.440.000,00	Retribusi sampah	12 bin	Sekretariat DPRD	Rp. 1.440.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.02	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 5.659.773.800,00				Rp. 5.601.960.800,00	(-) Rp. 57.813.000,00		
1.20.1.20.08.02.004	Pengadaan Mobil Jabatan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mobil Jabatan Pimpinan DPRD	4 unit	Sekretariat DPRD	Rp. 2.130.000.000,00	Mobil Jabatan Pimpinan DPRD	4 unit	Sekretariat DPRD	Rp. 2.075.000.000,00	(-) Rp. 55.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : saving hasil pembahasan tindaklanjut evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD DIY 2015 Penambahan : -
1.20.1.20.08.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mobil Jabatan Sekretaris DPRD	1 unit	Sekretariat DPRD	Rp. 1.716.663.000,00	Mobil Jabatan Sekretaris DPRD	1 unit	Sekretarat DPRD	Rp. 1.713.850.000,00	(-) Rp. 2.813.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : saving hasil pembahasan tindaklanjut evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD DIY 2015 Penambahan : -
1.20.1.20.08.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Alami Dokumen Cetak Dan Elektronik 2. Alami Cenderamala 3. AC Splitte Casette 5 PK	2 unit 2 unit 1 set	Sekretariat DPRD	Rp. 408.272.000,00	1. Alami Dokumen Cetak Dan Elektronik 2. Alami Cenderamata 3. AC Splitte Casette 5 PK	2 unit 2 unit 1 set	Sekretariat DPRD	Rp. 408.272.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				4. AC Splitte 2,5 PK	5 set			4. AC Splitte 2,5 PK	5 set					
				5. AC Central (Splitte DUCT 10 PK)	2 set			5. AC Central (Splitte DUCT 10 PK)	2 set					
				6. Gordyn/ Vitrage / Rel Aluminium	274,1 m2			6. Gordyn/ Vitrage / Rel Aluminium	274,1 m2					
				7. Pengadaan Water Meter	3 unit			7. Pengadaan Water Meter	3 unit					
1.20.1.20.08.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Laptop	1 unit	Sekretariat DPRD	Rp. 71.933.000,00	Camera Video	1 unit	Sekretariat DPRD	Rp. 71.933.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Pritler	1 unit			Digital recorder	1 unit					
				3. Digital Recorder	1 unit			Handycame	1 unit					
				4. Kamera	1 unit			Kamera	1 unit					
				5. Camera Video	1 unit			Laptop	1 unit					
				6. Handycame	1 unit			LCD Proyektor	1 unit					
				7. LCD Proyektor	1 unit			Printer	1 unit					
				8. Screen Brite Motorize 70"	1 unit			Screeb Brite Motorize 70"	1 unit					
				9. Soundsystem Portable	1 unit			Sound system portable	1 unit					
1.20.1.20.08.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tata Uling Ruang Ketua Dewan dan Pemeliharaan Ruang Asip Lt. 3	2 Jenis	Sekretariat DPRD	Rp. 192.894.850,00	Tata Uling Ruang Ketua Dewan dan Pemeliharaan Ruang Asip Lt. 3	2 Jenis	Sekretariat DPRD	Rp. 192.894.850,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaran Dinas / Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara (Kendanaa Roda 4, Roda 6, Roda 2)	40 unit	Sekretariat DPRD	Rp. 884.537.950,00	Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara (Kendanaa Roda 4, Roda 6, Roda 2)	40 unit	Sekretariat DPRD	Rp. 884.537.950,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1 tahun	Sekretariat DPRD	Rp. 188.473.000,00	Pemeliharaan Alat-alat Bercama	1 macam	Sekretariat DPRD	Rp. 188.473.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan TUK
				Belanja Pemeliharaan Alat-alat perlengkapan	3 macam			Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	1 tahun					
				Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1 tahun			Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1 tahun					
				Pengisian Tabung Pemadam Kadarakan	22 tabung			Pengisian Tabung Pemadam Kadarakan	22 tabung					
1.20.1.20.08.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Alat-Alat Studio	5 macam	Sekretariat DPRD	Rp. 67.000.000,00	Pemeliharaan Alat-Alat Studio	4 macam	Sekretariat DPRD	Rp. 67.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan TUK
				Pemeliharaan sarana prasarana aparatur	7 macam;			Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	6 macam;					
1.20.1.20.08.03	PROGRAM PENGINKATAN DISIPLIN APARATUR						Rp. 392.348.000,00				Rp. 392.348.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.08.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas dan	Prosentase disiplin	100 %	1. Pakaian Sipil Harian untuk DPRD	110 stel	Sekretariat DPRD	Rp. 374.609.900,00	1. Pakaian Sipil Harian untuk DPRD	110 stel	Sekretariat DPRD	Rp. 374.609.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	perlengkapannya	aparat		2. Pakaian Sipil Resmi Untuk DPRD	55 stel			2. Pakaian Sipil Resmi Untuk DPRD	55 stel				Penambahan : -
				3. Pakaian Sipil Lengkap untuk Selvan	30 stel			3. Pakaian Sipil Lengkap untuk selwan	30 Sel				
				4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang untuk DPRD	55 stel			4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang untuk DPRD	55 stel				
1.20.1.20.08.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Prosentase disiplin aparat	100 %	1. Jaket Untuk Caraka	4 potong	Sekretariat DPRD	Rp. 17.738.100,00	Jaket untuk Caraka	4 potong	Sekretariat DPRD	Rp. 17.738.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.08.05	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APAKATUR			2. Pakaian Pramudadi	10 stel			Pakaian Pramudadi	85 unit				
				3. Jas Hujan	85 buah			Pakaian Batik Tradisional	10 potong				
				4. Pakaian Batik Tradisional	10 potong			Pakaian Pramudadi	10 stel				
1.20.1.20.08.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan	Tenwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparat	100 %	1. Pengiriman Peserta Pelatihan Kesekretariatan	20 OK;	Luar daerah	Rp. 258.750.000,00	1. Pengiriman Peserta Pelatihan Kesekretariatan	20 OK;	Sekretariat DPRD	Rp. 243.750.000,00	(-) Rp. 15.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : saving hasil pembatasan undaklanjut evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD DIY 2015 pada rekening 5.2.2.17.01. Belanja Kursus singkat / pelatihan Penambahan : -
1.20.1.20.08.06	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA PELAJARAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			2. Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM	50 OK			2. Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM	50 OK				
1.20.1.20.08.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tenwujudnya penatuisahaan kinerja dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai Laku SKPD	0 B	Sekretariat DPRD	Rp. 8.305.100,00	Nilai Laku SKPD	80 % (B)	Sekretariat DPRD	Rp. 8.305.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan TUK
1.20.1.20.08.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tenwujudnya penatuisahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesemangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	0 %	Sekretariat DPRD	Rp. 59.819.900,00	Kesemangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	20 %	Sekretariat DPRD	Rp. 59.819.900,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan TUK
1.20.1.20.08.06.018	Penyusunan Rencana Program Kerja dan Prioritas serta Pengembangan	Tenwujudnya penatuisahaan kinerja dan manajemen pencapaian	100 %	1. Bahan Forum Muarabang	1 dokumen	Sekretariat DPRD	Rp. 100.817.500,00	1. Bahan Forum Muarabang	1 dokumen	Sekretariat DPRD	Rp. 100.817.500,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Honor Tenaga Ahli Pendamping SKPD

LAPORAN PERUBAHAN

Nama SKPD : Sekretariat DPRD														
Kode	Usanan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	(3)	(4)	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				3) RKT DPRD				3) RKT DPRD	2 Keputusan					
				4) Risaiah Rapat & atau Rekomendasi	50 buah			4) Risaiah Rapat & atau Rekomendasi	50 buah					
1.20.1.20.08.15.040	Penyelenggaraan Tugas Komisi- DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1) Laporan Hasil Delegasi DPRD	6 Delegasi	Sekretariat DPRD	Rp. 6.771.881.400,00	1) Laporan Hasil Delegasi DPRD	6 Delegasi	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 6.771.881.400,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Kegiatan Fit and Propestest Calon Anggota KIP DIY oleh Komisi A
				2) Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Tugas ke Luar Daerah	2 kali 4 komisi			2) Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Tugas ke Luar Daerah	1 kali 4 Komisi					
				3) Laporan hasil Pendamping Mitra Kerja	2 kali 4 komisi			3) Laporan hasil Pendamping Mitra Kerja	2 kali 4 Komisi					
				4) Laporan Hasil Kunjungan Kerja	4 kali 4 komisi			4) Laporan Hasil Kunjungan Kerja	3 kali 4 Komisi					
				5) Risaiah Rapat	444 risaiah			5) Risaiah Rapat	444 risaiah					
				6) Laporan Pembahasan : RAPBD 2016 : RAPBD P 2015 ; KUA-PPAS P 2016 ; KUA-PPAS P 2015 & Raperda	6 laporan			6) Laporan Pembahasan : RAPBD 2016 : RAPBD P 2015 ; KUA-PPAS P 2016 ; KUA-PPAS P 2015 & Raperda	5 laporan					
				7) Evaluasi dan Prognosis APBD 2015	1 Rekomendasi x 4 Komisi			7) Evaluasi dan Prognosis APBD 2015	1 Rekomendasi x 4 Komisi					
				8) Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan APBD/Kebijakan Daerah	36 kali 4 Komisi			8) Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan APBD/Kebijakan Daerah	36 kali 4 Komisi					
				9) Laporan Hasil Kerja Komisi Kepada Pimpinan DPRD	3 masa sidang x 4 Komisi			9) Laporan Hasil Kerja Komisi Kepada Pimpinan DPRD	3 masa sidang x 4 Komisi					
1.20.1.20.08.15.041	Penyelenggaraan Tugas Badan Keformadan Perda & atau Perdas	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Kajian/Harmonisasi Terhadap Raperda	8 Raperda	Sekretariat DPRD	Rp. 467.521.200,00	Kajian/Harmonisasi terhadap Raperda	15 Raperda	Sekretariat DPRD	Rp. 156.521.200,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perubahan TUK
				Laporan Hasil Evaluasi	2 laporan			Laporan Hasil Koordinasi/Kunjungan kerja	2 laporan					
				Polegda DIY Tahun 2016	1 dokumen			Polegda DIY Tahun 2016	1 dokumen					
				Risaiah Rapat & Atau Rekomendasi	55 buah			Risaiah Rapat atau Rekomendasi Bapemperda	55 dokumen					
1.20.1.20.08.15.042	Penyelenggaraan Tugas Badan Keformadan	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Laporan Hasil Kerja	1 laporan x 3 masa sidang	Sekretariat DPRD	Rp. 156.730.000,00	1) Risaiah Rapat & atau Rekomendasi	12 buah	Sekretariat DPRD	Rp. 156.730.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Laporan Hasil Kunjungan Kerja	6 laporan			2) Laporan hasil konsultasi/kunjungan kerja	2 laporan					
				Risaiah Rapat	12 risaiah			Laporan Hasil Kerja	1 laporan x 3 masa sidang					
1.20.1.20.08.15.043	Penyelenggaraan	Persentase	95 %		57 Kewas	Sekretariat	Rp. 6.182.735.400,00	-	2 Perwan	Sekretariat	Rp. 6.164.735.400,00	(-) Rp. 18.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	Pembahasan parus / Tinjauan Kelengkapan Dewan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		prolegda yang terselesaikan		-	2 Perwari	DPRD		-	4 Nota Kesepakatan	DPRD			Efisiensi DPA : saving hasil pembahasan tindak lanjut evaluasi kemandagri tnd RAPBD DIY 2015 pada rekening 5.2.2.11.02. Penambahan : Tambahan anggaran untuk 3 Parus DPRD
				-	8 Perda			-	57 Kepwan				
				-	93 Kepim			-	93 Kepim DPRD				
				Jumlah Produk Hukum Yang Dibahas	4 Nota Kesepakatan			Jumlah Produk Hukum Yang Dibahas	12 Perda				
1.20.1.20.08.15.044	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Produk Hukum	Penentase prolegda yang terselesaikan	95 %	hasil Forum Diskusi Ahli	12 buah	Sekretariat DPRD	Rp. 623.920.200,00	hasil Forum Diskusi ahli kelompok pakar	12 buah	Sekretariat DPRD	Rp. 623.920.200,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				hasil Kerja Tenaga Ahli	120 OK			hasil Kerja tenaga ahli kelompok pakar	120 OK				
				hasil penelitian/ kajian	100 buku			hasil penelitian/ kajian	100 buku				
				Info Kajian	2 terbitan			Info Kajian	2 terbitan				
				makalah seminar	12 buah			makalah seminar	12 buah				
				Research Brief	20 judul			Research Brief	20 judul				
1.20.1.20.08.15.045	Penyenggaraan Tugas Badan Anggaran	Penentase prolegda yang terselesaikan	95 %	KUA-PPAS 2016	2 buah	Sekretariat DPRD	Rp. 1.062.509.600,00	Nota Kesepakatan KUA Bersama dan Nota Kesepakatan Bersama PPAS APBD DIY TA 2016	2 dokumen	Sekretariat DPRD	Rp. 1.062.509.600,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				KUA-PPAS P 2015	2 buah			Nota Kesepakatan KUA Bersama dan Nota Kesepakatan Bersama PPAS Perubahan APBD DIY TA 2015	2 dokumen				
				RAPBD 2016	1 buah			Persetujuan Bersama Raperda APBD DIY TA 2016	1 dokumen				
				RAPBD P 2015	1 buah			Persetujuan Bersama Raperda dan angung Raperda Perubahan APBD DIY 2014	1 dokumen				
				Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2014	1 buah			Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD DIY TA 2015	1 dokumen				
				Risalah Rapat & Atau Rekomendasi	150 buah			Risalah Rapat & atau Rekomendasi	60 risalah				
1.20.1.20.08.15.046	Pengembangan dokumentasi Kinerja DPRD	Penentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Aplikasi Kesekretariatan	1 Paket	Sekretariat DPRD	Rp. 319.050.000,00	Aplikasi Kesekretariatan	1 Paket	Sekretariat DPRD	Rp. 319.050.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Kesekretariatan	1 Paket			Audio Visual Kegiatan DPRD	1 Paket				
				Audio Visual DPRD	1 Paket			Dokumen Bahan Acara	21 buah				
				Dokumentasi Bahan Acara	21 buah			Laporan hasil kerja DPRD	1 laporan				
1.20.1.20.08.15.047	Penybarlusan kinerja dan produk kerja DPRD	Penentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1. Layanan internet	1 tahun	Sekretariat DPRD	Rp. 1.567.251.900,00	layanan internet	1 thn	Sekretariat DPRD	Rp. 1.517.053.100,00	(-) Rp. 50.198.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Saving tindak lanjut evaluasi kinerja DPRD DIY 2015 pada rekening 5.2.2.03.06. Penambahan : -
				2. Siaran televisi	17 kali			Media Cetak/ advertorial,	10 kali				
				3. Siaran radio	13 kali			siaran radio	13 kali				
				4. Media cetak / advertorial	10 kali			siaran tv	17 kali				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Usunan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				5. Suplemen media cetak	5 kali			Suplemen Media Cetak	5 Kali				
				6. Booklets DPRD	750 buku								
				7. Majalah mimbar legislasi	4 edisi x 800 eks								
				8. Penyalharaan Harian e dan software perling/lapan IT	4 macam								
				9. Operator aplikasi	3 Paket								
1.20.1.20.08.15.048	Pengembangan kemitraan kehumasan	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1. Pementasan seni budaya	1 Paket	Sekretariat DPRD	Rp. 1.406.612.700,00	Forkom Setwan se DIY Indonesia	1 Kali	Sekretariat DPRD	Rp. 1.340.612.700,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Saving hasil pembahasan tindak lanjut evaluasi kemandagri terhadap RAPBD DIY 2015 pada rekening 5.2.2.11.03 (Belanja Makanan dan Minuman Tamu) Penambahan : -
				2. Konferensi pers	3 Paket			Forum diskusi Wartawan	1 Kali				
				3. Press Tour	1 Kali			Forum diskusi Wartawan	5 Kali				
				4. Forum diskusi Wartawan	5 Kali			Forum diskusi Wartawan	5 Kali				
				5. Hasil forum diskusi paralelen perempuan	4 Kali			Konferensi Pers	3 Kali				
				6. Hasil seminar parlemen perempuan	2 Kali			Pementasan Seni Budaya	1 Kali				
				7. Penerimaan tamu DPRD	99 Kali			Penyelenggaraan Olah Raga Persahabatan	1 Even				
				8. Penyelenggaraan Forkom Setwan se DIY	1 Kali			Press Tour	1 Kali				
				9. Penyelenggaraan forkom Setwan se Indonesia	1 Kali			Seminar Parlemen Perempuan	2 Kali				
1.20.1.20.08.15.049	Faciliasi dan dukungan Kegiatan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1. Laporan Hasil penyampaian aspirasi masyarakat	495 laporan hasil reses	DIY	Rp. 2.325.948.000,00	Laporan hasil penyampaian aspirasi masyarakat	495 laporan hasil reses	Sekretariat DPRD	Rp. 2.304.673.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Saving pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi kemandagri terhadap RAPBD DIY 2015 pada rekening 5.2.2.10.07. (Belanja sewa perlengkapan Lain) sebesar 12.375.000 dan rekening 5.2.2.11.04 (Makanan dan Minuman Haran Umum Sebesar 8.800.000 Penambahan : Tambahan Hidangan Aduansi/dengar pendapat/ hearing
				2. Laporan penerimaan dengan pendapat, hearing, audietesi, dan/anjurnasa, rasa	22 laporan aspirasi			Laporan penerimaan dengan pendapat, hearing, audietesi, dan/anjurnasa, rasa	22 laporan				
				3. Sarasehan / Coffe Morning	1 kali			Penyelenggaraan Sarasehan/Coffe Morning	1 Kali				
1.20.1.20.08.15.050	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	PAW	3 kali	Sekretariat DPRD	Rp. 980.886.900,00	Keputusan/Rakomendasi Fraksi	48 Dokumen x 7 Fraksi	Sekretariat DPRD	Rp. 980.886.900,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pemandangan Umum/Pendapat Akhir Fraksi	17 x 7 Fraksi			PAW	3 Kali				
				Risalah Rapat	48 Risalah x 7 Fraksi			Pemandangan Umum Fraksi	17 dokumen x 7 Fraksi				
				Starf Alat Kelengkapan dewan	10 Orang			Pendapat Akhir Fraksi	17 dokumen x 7 Fraksi				
				Starf Fraksi	15 Orang								
				Tenaga Ahli	7 Orang x 12 bulan								

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Total							Rp. 34.936.753.500,00				Rp. 34.719.282.100,00	(-) Rp. 217.471.400,00	(15)

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				
1	Wajib	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Keangkat Daerah, Kependidikan, dan Persandia													
1.20.09	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset													
1.20.1.20.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 5.880.336.225,00				Rp. 5.962.836.225,00	Rp. 82.500.000,00		
1.20.1.20.09.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat masuk 2. Surat keluar 3. Pengiriman dokumen	6500 surat 10200 surat 100 dokumen	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 24.920.000,00	1. Surat masuk 2. Surat keluar 3. Pengiriman dokumen	6500 surat 10200 surat 100 dokumen	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 24.920.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran bagian internet 384 MBps Pembayaran bagian rekening air 30 m3 Pembayaran bagian rekening listrik 134 KWh Pembayaran bagian rekening listrik 23 sambungan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.701.507.000,00	Pembayaran tagihan internet 384 MBps Pembayaran tagihan rekening air 30 m3 Pembayaran tagihan rekening listrik 134 KWh Pembayaran tagihan rekening listrik gedung baru KPPD Kulonprogo	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.787.867.000,00	Rp. 86.360.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Tambahan Isirik untuk Gedung Baru KPPD Kulonprogo
1.20.1.20.09.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 tepat waktu 2. Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 tepat waktu 3. Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6 tepat waktu	22 unit 23 unit 1 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 27.025.600,00	1. Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 tepat waktu 2. Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 tepat waktu 3. Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6 tepat waktu	22 unit 23 unit 1 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 27.025.600,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran honorarium pengelola barang Pembayaran honorarium pengelola keuangan	14 Orang,12 bulan 58 orang, 12 bh	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 237.475.000,00	Pembayaran honorarium pengelola barang Pembayaran honorarium pengelola keuangan	14 Orang, 12 Bulan 58 orang, 12 bh	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 237.475.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.01.008	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan gedung Kantor	12 bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 888.662.800,00	Kebersihan gedung Kantor	15480 m2	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 888.662.800,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Uraian/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target/Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target/Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.201.20.09.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 269.179.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	57 jenis (12 bulan)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 269.179.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang cetakan	12 bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 330.628.675,00	Pengadaan	79/621 lembar (12 bulan)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 330.628.675,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21 jenis	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 84.494.000,00	Penjilidan	945 buku (12 bulan)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 79.374.000,00	(-) Rp. 5.120.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	Isi tabung pemadam kebakaran ukuran 2,3 kg dan 3,2 Kg	73 buah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 40.893.750,00	Isi tabung pemadam kebakaran ukuran 2,3 kg dan 3,2 Kg	75 buah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 40.893.750,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.01.015	Penyediaan bahan becaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	buku kepustakaan majalah Surat kabar	12 bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 62.670.000,00	buku kepustakaan majalah Surat kabar	10 jenis (12 bulan) 3 jenis (12 bulan) 7 jenis (12 bulan)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 62.670.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	Jamuan makan tamu Makan dan minum sedang Minum dan makanan kecil tamu	12 bulan	Bantul Danurejan Jetis Siemam Wonosari	Rp. 138.139.000,00	Jamuan makan tamu Makan dan minum sedang Minum dan makanan kecil tamu	12 bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 138.139.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan	Bantul Danurejan Jetis Siemam Wonosari	Rp. 1.157.614.000,00	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.157.614.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.01.021	Peyediaan jasa administrasi kepegawaian	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	Horarium pengelola kepegawaian di 5 KPPD se DIY	8 Orang, 12 Bulan	Bantul Danurejan Jetis Siemam Wonosari	Rp. 11.838.000,00	Horarium pengelola kepegawaian di 5 KPPD se DIY	8 Orang, 12 Bulan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.298.000,00	Rp. 960.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pembayaran honorarium pengelola kepegawaian di DPPKA Induk	3 Orang, 12 Bulan	Wates Wonosari		Pembayaran honorarium pengelola kepegawaian di DPPKA Induk	3 Orang, 12 Bulan					Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung /tempat kerja	Prosentase Pelayan Administrasi Perkantoran	100 %	Penjaga keamanan di KPPD Gunungkidul Penjaga keamanan di KPPD Kota Yogyakarta Penjaga keamanan di KPPD Kulonprogo Penjaga keamanan di KPPD Sleman Penjaga keamanan kantor DPPKA Induk	2 Orang,12 bulan 2 Orang, 12 Bulan 2 Orang, 12 Bulan 10 orang, 12 bh 12 bulan, 4 orang	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 894.549.400,00	Penjaga keamanan di KPPD Gunungkidul Penjaga keamanan di KPPD Kota Yogyakarta Penjaga keamanan di KPPD Kulonprogo Penjaga keamanan di KPPD Sleman Penjaga keamanan kantor DPPKA Induk	2 Orang,12 bulan 2 Orang, 12 Bulan 2 Orang, 12 Bulan 10 orang, 12 bh 12 bulan, 4 orang	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 894.549.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Uluir	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.09.01.026	Persediaan Retribusi Sampah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjaga keamanan di KPPO Bantul	2 Orang, 12 Bulan	Bantul Depok Jetis Sewon Sleman Wates Wonosari	Rp. 10.740.000,00	Perjaga keamanan di KPPO Bantul	2 Orang, 12 Bulan	Bantul Depok Jetis Sewon Sleman Wates Wonosari	Rp. 11.040.000,00	Rp. 300.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : - Kekurangan KPPO Bantul Rp. 600.000,- , efisiensi KPPO Gunungkidul 300.000,- sehingga ada kekurangan keuangan Rp300.000,-
1.20.1.20.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 46.068.362.950,00				Rp. 46.068.062.950,00	(-) Rp. 300.000,00		
1.20.1.20.09.02.003	Pembangunan Retribusi gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Bangunan gedung kantor KPPO Bantul	1 unit	Bantul Sleman	Rp. 36.884.248.000,00	Bangunan gedung kantor KPPO Sleman	1 unit	Bantul Sleman Wonosari	Rp. 36.884.248.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.02.007	Pengadaan peralatan pengoperasian gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Bangunan gedung kantor KPPO Sleman	1 unit	Bantul Depok Jetis Sleman Wates Wonosari	Rp. 1.594.017.000,00	Bangunan bandon air di KPPO Gunungkidul Redesain DED Gedung kantor KPPO Bantul	1 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.594.017.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung Kantor	13 jenis	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.465.167.950,00	Peralatan gedung kantor	13 jenis	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.464.867.950,00	(-) Rp. 300.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : - Efisiensi Saving belanja modal pengadaan komputer PC
1.20.1.20.09.02.010	Pengadaan Mebelur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mebelur	7 jenis	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.473.126.000,00	Mebelur	7 jenis	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.473.126.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.02.022	Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung kantor Gudang	11 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.126.233.100,00	Gedung kantor Gudang	11 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 1.126.233.100,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.02.024	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 2	22 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 698.231.000,00	Kendaraan roda 2	22 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 698.231.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.02.026	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 4	23 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 951.800.000,00	Kendaraan roda 4	23 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 951.800.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.201.20.09.02.028	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor sarana prasarana aparatur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Komputer	87 unit	Bantul Danurejan Depok Jetis Sewon Wotan Wonoari	Rp. 209.504.000,00	Komputer	87 unit	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 209.504.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.02.031	Pemeliharaan Arsip Keuangan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemilihan arsip keuangan in aktif	5000 Berkas	Danurejan Tegaflejo	Rp. 256.665.900,00	Pemilihan arsip keuangan in aktif	5000 Berkas	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 256.665.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.02.032	Pemeliharaan Jaringan / Sistem Informasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Update data dan informasi terkini bulanan	12 kali	Danurejan	Rp. 79.664.200,00	Update data dan informasi terkini bulanan	12 kali	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 79.664.200,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.02.061	Pemeliharaan arsip pak kendaraan bermotor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Aplikasi arsip digital	5 Aplikasi	Bantul Depok Jetis Sewon Wotan Wonoari	Rp. 1.329.705.800,00	Aplikasi arsip digital	5 Aplikasi	Bantul Depok Jetis Sewon Wotan Wonoari	Rp. 1.329.705.800,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.05	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 607.301.000,00				Rp. 607.301.000,00	Rp. 0,00		
1.201.20.09.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat													
1.201.20.09.05.033	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Instrumen SKP PNS DPPKA TA.2015	257 Orang	Danurejan	Rp. 90.000.000,00	Instrumen SKP PNS DPPKA TA.2015	257 Orang	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.05.042	Pembinaan dan Pelaksanaan Bimtek bagi Pengelola Keuangan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Sasaran Mutu ISO	4 sasaran	Bantul Jetis Sleman Wates Wonoari	Rp. 499.715.000,00	Sasaran Mutu ISO	4 sasaran	Bantul Sleman Wates Wonoari	Rp. 499.715.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.05.042	Pembinaan dan Pelaksanaan Bimtek bagi Pengelola Keuangan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Akurasi SP2D	85 %	Danurejan	Rp. 17.586.000,00	Akurasi SP2D	85 %	Danurejan	Rp. 17.586.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.201.20.09.06	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 152.290.500,00				Rp. 152.290.500,00	Rp. 0,00		
1.201.20.09.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penguasaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran	100 %	Nilai LAKIP SKPD	1 a	Danurejan	Rp. 6.500.000,00	Nilai LAKIP SKPD	85 s.d 85 = Nilai A	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 6.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Program	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.09.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	95 %	Danurejan	Rp. 18.673.500,00	Kesesuaian anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	95 %	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 18.673.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD erta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Sinkronisasi program kegiatan PA dan KPA	1 DPA SKPD TA.2016 dan 1 DPPA SKPD TA.2015	Danurejan	Rp. 105.647.000,00	Sinkronisasi program kegiatan PA dan KPA	1 DPA SKPD TA.2016 dan 1 DPPA SKPD TA.2015	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 105.647.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.06.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	95 %	Danurejan	Rp. 21.470.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	95 %	Danurejan	Rp. 21.470.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH						Rp. 5.924.503.540,00				Rp. 5.924.503.540,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.09.17.006	Penyusunan APBD	Persentase Ketepatan, dan Keakuratan dalam penjabaran Keuangan Daerah	100 %	Perda APBD T.A 2016 Pergub APBD T.A 2016 Rancangan Perda APBD T.A 2016 (1 buku kuning dan 1 buku putih) Rancangan Pergub APBD T.A 2016 (1 buku kuning dan 1 buku putih)	400 buku 1200 buku 500 buku 1500 buku	Danurejan	Rp. 1.284.960.750,00	Perda APBD T.A 2016 Pergub APBD T.A 2016 Rancangan Perda APBD T.A 2016 (1 buku kuning dan 1 buku putih) Rancangan Pergub APBD T.A 2016 (1 buku kuning dan 1 buku putih)	400 buku 1200 buku 500 buku 1500 buku	Danurejan	Rp. 1.284.960.750,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.17.008	Penyusunan Perubahan APBD	Persentase Ketepatan, dan Keakuratan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Perda APBD P T.A 2015 Pergub Penjabaran APBD Perubahan Pergub Perubahan APBD Danalis TA.2015 Rancangan Perda APBD Perubahan T.A 2015 (buku kuning	250 buku 750 buku 750 buku 500 buku	Danurejan	Rp. 1.820.041.500,00	Perda APBD P T.A 2015 Pergub Penjabaran APBD Perubahan Pergub Perubahan APBD Danalis TA.2015 Rancangan Perda APBD Perubahan T.A 2015 (buku kuning	250 buku 750 buku 750 buku 500 buku	Danurejan	Rp. 1.820.041.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
						dan Asip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Koramil Sakit Garda Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD		Kecocokan data IWP dengan pihak ketiga (BPJS,PT Taspen,Taperum)	12 bulan, 85 PA/KPA	dan Asip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Koramil Sakit Garda Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				
1.20.1.20.09.17.026	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam	100 %	Naskah akademik Raporda	1 naskah	Danurejan	Rp. 284.665.000,00	Naskah akademik Raporda	1 naskah	Danurejan	Rp. 284.665.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Regulasi pengelolaan keuangan BLUD	1 Per Gub			Regulasi pengelolaan keuangan BLUD	1 Per Gub					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.09.17.049	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Sisduk pengelolaan Keuangan daerah	1 Per Gub	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 156.585.000,00	Sisduk pengelolaan Keuangan daerah	1 Per Gub	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 156.585.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				SK Gub	4 SK Gub			SK Gub bendaharawan dan SK Gub PA/KPA	4 SK Gub					
1.20.1.20.09.17.087	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah	Persentase Ketepatan, dan Keakuratan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	1 Laporan Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan betul dan akurat	100 %	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 953.262.300,00	1 Laporan Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan betul dan akurat	100 %	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 953.262.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				25 SK Gubernur benar	100 %			25 SK Gubernur benar	100 %					
1.20.1.20.09.18	PROGRAM PEMERINTAH DAN POKOK KEGIATAN PENGELAAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar	100 %	DPA Dana Keistimewaan SKPD TA.2015 yang telah disyahkan	4 dokumen	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 510.393.800,00	DPA Dana Keistimewaan SKPD TA.2015 yang telah disyahkan	4 dokumen	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 510.393.800,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				DPA SKPD T.A 2015 yang telah disyahkan	65 dokumen,390 buku			DPA SKPD T.A 2015 yang telah disyahkan	65 dokumen,390 buku					
1.20.1.20.09.18.007	Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota	Peningkatan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar	100 %	Hasil Evaluasi Raperda Keistimewaan Kabupaten/Kota APBD Kab./Kota T.A 2014	5 Kep Gub	Kab/Kota se DIY	Rp. 510.393.800,00	Hasil Evaluasi Raperda Keistimewaan Kabupaten/Kota APBD Kab./Kota T.A 2014	5 Kep Gub	Kab/Kota se DIY	Rp. 510.393.800,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
				Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab./Kota T.A 2016	5 Kep Gub			Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab./Kota T.A 2016	5 Kep Gub					
1.20.1.20.09.20	PROGRAM PENGANTAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIDJAKAN KDH	Peningkatan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar	100 %	Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab./Kota T.A 2015	5 Kep Gub	Kab/Kota se DIY	Rp. 163.100.550,00	Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab./Kota T.A 2015	5 Kep Gub	Kab/Kota se DIY	Rp. 163.100.550,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	
1.20.1.20.09.20.006	Tindakan Lanjut hasil Temuan Pengawasan	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	75 %	Danurejan	Rp. 80.824.550,00	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	75 %	Danurejan	Rp. 80.824.550,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.20.013	Tindakan Lanjut hasil Temuan Ganti Rugi	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Setoran TGR (pengembalian atas pinjaman keuangan daerah)	161124786 Rupiah	Kab/Kota se DIY	Rp. 82.276.000,00	Setoran TGR (pengembalian atas pinjaman keuangan daerah)	161124786 Rupiah	Kab/Kota se DIY	Rp. 82.276.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi APBD : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.23	PROGRAM OPTIMALISASI						Rp. 162.290.000,00				Rp. 162.290.000,00	Rp. 0,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Titik Ullur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.201.20.09.23.005	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pengelabian Data dan Pengembangan Teknologi Informasi	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	produksi animasi pelayanan pajak	1 film	Danurejan	Rp. 162.290.000,00	produksi animasi pelayanan pajak	1 film	Danurejan	Rp. 162.290.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengembangan Sistem Aplikasi Dana Bergulir	4 menu			Pengembangan Sistem Aplikasi Dana Bergulir	2 menu				
1.201.20.09.36	PROGRAM PENINGKATAN KAPASTAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH						Rp. 1.191.372.225,00				Rp. 1.191.372.225,00		
1.201.20.09.36.011	Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	100 %	Pendampingan penyusunan lap-keuangan SKPD berbasis actual	1 laporan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pertahanan dan Keamanan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pertahanan dan Keamanan Lathian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perustakaan dan Asip Badan Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum,	Rp. 1.172.517.225,00	Pendampingan penyusunan lap-keuangan SKPD berbasis actual	1 laporan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pertahanan dan Keamanan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pertahanan dan Keamanan Lathian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perustakaan dan Asip Badan Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum,	Rp. 1.172.517.225,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Petugas perasional SIPKD berbasis actual	343 orang, 3 akt			Petugas perasional SIPKD berbasis actual	343 orang, 3 akt				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
						Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD		Regulasi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	2 Pergub	Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				
1.20.1.20.09.36.047	Pelatihan program/aplikasi gaji/GDO	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	100 %	penyiap gaji terampil	80 Orang	Danurejan	Rp. 18.855.000,00	penyiap gaji terampil	80 Orang	Danurejan	Rp. 18.855.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.39	PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH						Rp. 396.528.700,00				Rp. 396.528.700,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.39.001	Peningkatan Status Hak Atas Tanah	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	11.71 %	legalitas aset tanah	7 Sertifikat	Gondomanan Kraton Nglipar Sewon Sleman Wonosari	Rp. 96.505.700,00	legalitas aset tanah	7 Sertifikat	Gondomanan Kraton Nglipar Sewon Sleman Wonosari	Rp. 96.505.700,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.39.002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dapat	11.71 %	Data BMD idle Perijalan Pinjam pakai BMD	1 dokumen 30 dokumen	Banguntapan Danurejan Depok	Rp. 300.023.000,00	Data BMD idle Perijalan Pinjam pakai BMD	1 dokumen 30 dokumen	Banguntapan Danurejan Depok	Rp. 300.023.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan /Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.09.40	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO						Rp. 632.841.000,00				Rp. 632.841.000,00	Rp. 0,00			
1.20.1.20.09.40.001	Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan BUKP	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyerahan modal BUMD	22,95 %	Keputusan Gubernur ttg laporan Keuangan Tahunan BUKP Tahun 2014, Pembagian Laba, Penghasilan NKAAT 2016	3 keglub	DIY	Rp. 632.841.000,00	Keputusan Gubernur ttg laporan Keuangan Tahunan BUKP Tahun 2014, Pembagian Laba, Penghasilan NKAAT 2016	3 keglub	Bantul Kabupaten Kulon Progo Kota Yogyakarta Sleman Gunung Sari Grisubo Karangmojo Ngawen Nglipar Paliyan Panggang Patuk Playen Ponjong Pongkoran Rogkop Supto sari Semanu Tanjung Sari Tepus Wonosari Wonosari	Rp. 632.841.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.09.47	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH						Rp. 7.034.275.500,00				Rp. 7.035.578.000,00	Rp. 1.302.500,00			
1.20.1.20.09.47.001	Penyusunan Tata Kelola Pemungutan PAD	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	Tabel NIKB	1 Per Gub 2 Aplikasi 3 naskah Raperda	Kab/Kota se DIY	Rp. 308.271.000,00	Aplikasi pendapatan daerah dan kesamsatan Pedoman pemungutan retribusi dan lain2 PAD yg sah	1 Per Gub 2 Aplikasi 3 naskah Raperda	Kab/Kota se DIY	Rp. 308.271.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.09.47.002	Pelayanan Kesamsatan KPPD Kota	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	BBNKG semula : 102.101.792.000 PKB semula : 114.594.653.000	915000000000 Rupiah 1170000000000 Rupiah	Kota Yogyakarta	Rp. 975.805.500,00	BBNKG semula : 102.101.792.000 PKB semula : Rp114.594.653.000	915000000000 Rupiah 1170000000000 Rupiah	Kota Yogyakarta	Rp. 977.108.000,00	Rp. 1.302.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : - kekurangan honor PTT di kegiatan pelayanan kesamsatan KPPD Kota	
1.20.1.20.09.47.003	Pelayanan Kesamsatan KPPD Bantul	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	BBNKG semula : 94.284.080.000,- Lain-lain Pendapatan yang syah semula : 19.530.000,- PKB semula : 102.188.819.000,-	980000000000 Rupiah 26730000 Rupiah 105500000000 WP	Bantul	Rp. 426.602.000,00	BBNKG semula : 94.284.080.000,- Lain-lain Pendapatan yang syah semula : 19.530.000,- PKB semula :102.188.819.000,-	980000000000 Rupiah 26730000 Rupiah 1055000000000 Rupiah	Bantul	Rp. 426.602.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.09.47.004	Pelayanan Kesamsatan KPPD Kulon Progo	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	BBNKG semula : Rp26.846.275.000 PKB semula : Rp28.232.776.000,-	284241570000 Rupiah 324676924000 Rupiah	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 439.513.000,00	BBNKG semula : Rp26.864.275.000 PKB semula : 28.232.776.000,-	284241570000 Rupiah 324676924000 Rupiah	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 439.513.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Usuan/ Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi					
1.20.1.20.09.47.005	Pelayanan Kesmasatan KPPD Gunung Kidul	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)
		Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	Bukti pembayaran PKB dan BBNKB	204337 WP 67595280000 Rupiah	Gunungkidul	Rp. 323.978.950,00	Bukti pembayaran PKB dan BBNKB	204337 WP 67595280000 Rupiah	Gunungkidul	Rp. 323.978.950,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.47.006	Pelayanan Kesmasatan KPPD Sleman	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	BBNKB semula :199.954.678.000,- Lain-lain Pendapatan yang syah semula : 29.500.000,- PKB semula : 215.803.307.000,-	199066779000 Rupiah 49580000 Rupiah 2180000000000 Rupiah	Sleman	Rp. 959.839.000,00	BBNKB semula :199.954.678.000,- Lain-lain Pendapatan yang syah semula : 29.500.000,- PKB semula : 215.803.307.000,-	199066779000 Rupiah 49580000 Rupiah 2180000000000 Rupiah	Sleman	Rp. 959.839.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.47.007	Pengkajian Potensi obyek pendapatan daerah	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	Pemetaan dan pengkajian obyek pendapatan asli daerah	1 dokumen	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perpusakaan dan Asip Daerah Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rumah Sakit Ghasia	Rp. 841.540.700,00	Naskah Revisi Perda TTG Retribusi Jasa Usaha dan Pengub TTG tarif retribusi jasa usaha	2 naskah	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perustakaan dan Asip Daerah Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rumah Sakit Ghasia	(-) Rp. 600.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Sawing dari Honorarium Non PNS Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.09.47.009	Pendataan potensi dan penagihan PKB KPPD Bantul	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	Data status Kepemilikan (Jatuh tempo belum bayar)	15000 WP	Bantul	Rp. 217.700.000,00	Data status Kepemilikan (Jatuh tempo belum bayar)	15000 WP	Bantul	Rp. 218.750.000,00	Rp. 1.050.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : untuk tambahan honor petugas pembebasan pendataan KPPD Bantul
				Penagihan terhadap WP yang mempunyai KBM berstatus masih dimiliki	6000000000 Rupiah			Penagihan terhadap WP yang mempunyai KBM berstatus masih dimiliki	6000000000 Rupiah						
1.20.1.20.09.47.010	Pendataan potensi dan penagihan PKB KPPD Gunungkidul	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	Pendataan dan penagihan PKB dan BBNBG	204337 WP	Gunungkidul	Rp. 125.756.550,00	Pendataan dan penagihan PKB dan BBNBG	204337 WP	Gunungkidul	Rp. 125.756.550,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.09.47.011	Pendataan potensi dan penagihan PKB KPPD Yogyakarta	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	Data status Kepemilikan (Jatuh tempo belum bayar)	13997 KBM	Kota Yogyakarta	Rp. 234.455.000,00	Data status Kepemilikan (Jatuh tempo belum bayar)	13997 KBM	Kota Yogyakarta	Rp. 234.455.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penagihan terhadap WP yang mempunyai KBM status masih dimiliki	6000000000 Rupiah			Penagihan terhadap WP yang mempunyai KBM status masih dimiliki	6000000000 Rupiah						
1.20.1.20.09.47.012	Pendataan potensi dan penagihan PKB KPPD Kulon Progo	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	Data status Kepemilikan	9000 Wajib Pajak	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 260.487.000,00	Data status Kepemilikan	9000 Wajib Pajak	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 260.487.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor masih dimiliki	2001 wajib pajak/Rp.500.000.000,-			Penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor masih dimiliki	2001 wajib pajak/Rp.500.000.000,-						
1.20.1.20.09.47.013	Pendataan potensi dan penagihan PKB KPPD Sleman	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	Data status Kepemilikan	25000 Wajib Pajak	Sleman	Rp. 341.495.000,00	Data status Kepemilikan	25000 Wajib Pajak	Sleman	Rp. 341.495.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penagihan terhadap wajib pajak dengan status dimiliki	8000000000 Rupiah			Penagihan terhadap wajib pajak dengan status dimiliki	8000000000 Rupiah						
1.20.1.20.09.47.014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengeloaan Pendapatan Daerah	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,48 %	*) Dana Perimbangan : 1.046.227.488.649,- Lain - lain PD yang sah : 766.066.529.953,- PAD semula : 1.280.917.109.504,- Rekonsiliasi pendapatan dengan SKPD berpendapatan 12 bulan	1046869045263 Rupiah	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.578.831.800,00	*) Dana Perimbangan : 1.046.227.488.649,- Lain - lain PD yang sah : 809050041.075 Rupiah PAD semula : 1.288575683186 Rupiah Rekonsiliasi pendapatan dengan SKPD berpendapatan 12 bulan	1011741004456 Rupiah	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.578.381.800,00	(-) Rp. 450.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Savings honor tenaga ahli sebesar Rp. 450.000,- Penambahan : -
				Perencanaan SKPD 55 orang x 2 kl	5 %			Perencanaan SKPD 55 orang x 2 kl	5 %						
1.20.1.20.09.48	PROGRAM PENGELOAAN BARANG MILIK DAERAH			rasio penurunan wajib PKB yg tidak mendaftarkan ulang			Rp. 1.686.142.400,00	rasio penurunan wajib PKB yg tidak mendaftarkan ulang	5 %				Rp. 340.000.000,00		
1.20.1.20.09.48.001	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian DKBMD dan	70 %	Asuransi BMD	4 polis	Banguntapan Depok Gondokusuman	Rp. 1.248.480.000,00	Asuransi BMD	4 polis	Banguntapan Depok Gondokusuman	Rp. 1.548.480.000,00	Rp. 300.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Tambah
				Bukti setor PBB	15 STTS			Bukti setor PBB	15 STTS						

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(15)
		DKPBM		Rehab rumah dinas	2 unit	Gondomanan Kotagede Mlati Sewon Umbulharjo		Rehab gedung kantor	1 Paket	Kotagede Umbulharjo Wirobrajan					Rp. 300.000.000,- digunakan untuk gedung kantor SOTK baru terdiri dari rehab gedung Rp175.000.000,- dan pembelian 1 unit mobil Rp50.000.000,- dan transportasi (sewa) Rp. 75.000.000,-
				Warkah	125 bendel			Warkah							
1.20.1.20.09.46.002	Penghapusan dan penindihan barang milik daerah	Persentase Capaian Penghapusan dan DKPBM	70 %	Gedung	5 unit	Jelis Payen Umbulharjo	Rp. 141.239.000,00	Gedung	5 unit	Jelis Payen Umbulharjo	Rp. 141.239.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Kendaraan dinas roda 2	75 unit			Kendaraan dinas roda 2	75 unit						
				kendaraan dinas roda 4	50 unit			kendaraan dinas roda 4	50 unit						
				perlengkapan kantor	1 Paket			Perlengkapan kantor	1 Paket						
1.20.1.20.09.46.003	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Penghapusan dan DKPBM	70 %	Keputusan Gubernur tentang DKPBM dan DKPBM tahun 2015	1 Keputusan	Danurejan	Rp. 236.025.400,00	Keputusan Gubernur tentang DKPBM dan DKPBM tahun 2015	1 Keputusan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 276.025.400,00	Rp. 40.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Keputusan Gubernur tentang RKBM dan RKPBM tahun 2016	1 Keputusan			Keputusan Gubernur tentang RKBM dan RKPBM tahun 2016	1 Keputusan						Keputusan mengenai SPKMD Mutu Aset (Jasa konsultasi)
				Laporan BMD TA.2015	1 laporan			Laporan BMD TA.2015	1 laporan						
				Operasional pendampingan sistem informasi BMD	228 pengelola barang			Menu Aplikasi	1 Aplikasi						
								Operasional pendampingan sistem informasi BMD	228 pengelola barang						
1.20.1.20.09.46.004	Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Penghapusan dan DKPBM	70 %	Laporan realisasi Penghapusan dan jasa SKPD TA.2014	1 dokumen	Danurejan	Rp. 60.398.000,00	Laporan realisasi Penghapusan dan jasa SKPD TA.2014	1 dokumen	Danurejan	Rp. 60.398.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total												Rp. 70.833.240.890,00	Rp. 423.502.500,00		

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Usuran /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20	Wajib													
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Pemeliharaan, Kebersihan, dan Persandia													
1.20.10	Badan Pendidikan dan Pelatihan													
1.20.10.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 1.517.033.500,00				Rp. 1.525.003.500,00		
1.20.1.20.10.01.001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Materai	Pengiriman paket	1400 lembar 1 tahun	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 8.500.000,00	Materai	Pengiriman paket	1400 lembar 1 tahun	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 8.500.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Langganan Telepon, Listrik, Internet, TV dan Air	12 bulan	Badan Pendidikan dan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 649.998.000,00	Langganan Telepon, Listrik, Internet, TV dan Air	12 bulan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 649.998.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.10.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Operasional Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	7 unit	Badan Pendidikan dan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 5.550.000,00	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	7 unit	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 5.550.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
					Kir Kendaraan roda 4	1 unit				1 unit				
1.20.1.20.10.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium penyelenggara administrasi keuangan dan kepegawaian	15 Orang,10 bulan	Badan Pendidikan dan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 40.310.000,00	Honorarium penyelenggara administrasi keuangan dan kepegawaian	15 Orang,12 bulan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 48.280.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Penambahan Anggaran pengelola keuangan dan pengelola kepegawaian selama 2 bulan	
1.20.1.20.10.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perawatan Kaca	28164 m2 5352 m2	Badan Pendidikan dan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 199.989.500,00	Perawatan Kaca	28164 m2 5352 m2	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 199.989.500,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
					Perawatan Lantai	108864 m2								
1.20.1.20.10.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	45 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 26.790.000,00	Alat Tulis Kantor	45 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 26.790.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.10.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Pengandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Belang Cetak	12 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 20.500.000,00	Belanja Cetak	12 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 20.500.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
					Fotocopy	70000 lembar								
1.20.1.20.10.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat-alat listrik dan elektronik	23 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 30.000.000,00	Alat-alat listrik dan elektronik	23 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 30.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.10.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat-alat perlengkapan	12 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 13.000.000,00	Alat-alat perlengkapan	12 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 13.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20.1.20.10.01.014	Penyediaan Pelayanan Perawatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengisian tabung pemadam kebakaran Peralatan rumah tangga	5 buah 14 jenis	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 8.250.000,00	Pengisian tabung pemadam kebakaran Peralatan rumah tangga	5 buah 14 jenis	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat Kabar	4 Jenis	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 4.980.000,00	Surat Kabar	4 jenis	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makan dan minum rapat	3181 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 34.991.000,00	Makan dan minum rapat	3181 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Konsultasi & koordinasi dalam daerah Konsultasi & koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 221.130.000,00	Konsultasi & koordinasi dalam daerah Konsultasi & koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran pegawai tidak tetap Jasa keamanan kantor/tempat kerja	2 Orang,12 bulan 12 bulan	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 240.000.000,00	Bukti pembayaran pegawai tidak tetap Jasa keamanan kantor/tempat kerja	2 Orang,12 bulan 12 bulan	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.01.029	Pengelolaan Arsip Dinamis	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Sarana pengelolaan arsip aktif dan inaktif	7 jenis	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 13.045.000,00	Sarana pengelolaan arsip aktif dan inaktif	7 jenis	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.02	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 2.618.184.000,00				Rp. 0,00		
1.20.1.20.10.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 438.600.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda dua	3 unit	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.02.006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	AC Cover kursi	46 unit 120 buah	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 394.890.000,00	AC Cover kursi	46 unit 120 buah	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gordin Kursi Meja Sofa TV Whiteboard	76 m2 113 buah 40 buah 2 set 5 unit 3 buah	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 615.450.000,00	Gordyn Kursi Meja Sofa TV Whiteboard	76 m2 113 buah 40 buah 2 set 5 unit 3 buah	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Komputer PC Komputer server Laptop	42 unit 1 unit 3 unit	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 372.890.000,00	Komputer PC Komputer Server Laptop	42 unit 1 unit 3 unit	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tidak Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.10.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	sarana prasarana aparatur	100 %	Mesin penghancur kertas	1 buah	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 252.891.000,00	Mesin penghancur kertas	1 buah	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 252.891.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Mesin pompa air	1 Paket			Mesin pompa air	1 Paket					
				Printer	5 unit			Printer	5 unit					
				Laundry sprei gorden, taplak meja	20500 kg			Laundry sprei gorden, taplak meja	20500 kg					
				Pemeliharaan sumur dalam	1 buah			Pemeliharaan sumur dalam	1 buah					
1.20.1.20.10.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	sarana prasarana aparatur	100 %	Pengobatan asrama	3000 m2	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 84.150.000,00	Pengobatan asrama	3000 m2	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 84.150.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Perawatan taman lingkungan asrama	29524 m2			Perawatan taman lingkungan asrama	29524 m2					
				Perbaikan atap dan lantai	60 m2			Perbaikan atap dan lantai	60 m2					
				Perbaikan pintu, kamar mandi, saluran pipa ledeng	20 buah			Perbaikan pintu, kamar mandi, saluran pipa ledeng	20 buah					
				Perawatan kebun lingkungan	16340 m2			Perawatan kebun lingkungan	16340 m2					
1.20.1.20.10.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	sarana prasarana aparatur	100 %	Perbaikan atap	30 m2	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 81.733.000,00	Perbaikan atap	30 m2	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 81.733.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Perbaikan lantai	100 m2			Perbaikan lantai	100 m2					
				Perbaikan pintu, kamar mandi/wc, saluran pipa air ledeng	36 buah			Perbaikan pintu, kamar mandi/wc, saluran pipa air ledeng	36 buah					
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	3 unit			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	6 unit					
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	4 unit			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	6 unit					
1.20.1.20.10.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Gedung Kantor	sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 39.400.000,00	Perengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 39.400.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Perengkapan gedung kantor terpelihara	10 jenis			Perengkapan gedung kantor terpelihara	10 jenis					
				Perengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis			Perengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis					
				Perengkapan gedung kantor terpelihara	4 unit			Perengkapan gedung kantor terpelihara	4 unit					
				Perengkapan gedung kantor terpelihara	4 unit			Perengkapan gedung kantor terpelihara	4 unit					
1.20.1.20.10.02.042	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	sarana prasarana aparatur	100 %	Rehabilitasi gedung kantor	4 unit	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 254.000.000,00	Rehabilitasi gedung kantor	4 unit	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 254.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Rehabilitasi gedung kantor	4 unit			Rehabilitasi gedung kantor	4 unit					
				Rehabilitasi gedung kantor	4 unit			Rehabilitasi gedung kantor	4 unit					
				Rehabilitasi gedung kantor	4 unit			Rehabilitasi gedung kantor	4 unit					
				Rehabilitasi gedung kantor	4 unit			Rehabilitasi gedung kantor	4 unit					

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											
Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.10.05.095	Review DED Pembangunan Gedung Kantor pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %		Review DED Pembangunan Gedung Auditorium dan Multimedia	1 unit	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 49.980.000,00	Review DED Pembangunan Gedung Auditorium dan Multimedia	1 unit	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 49.980.000,00
1.20.1.20.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 214.947.000,00				Rp. 212.922.500,00
1.20.1.20.10.05.007	Pembinaan, Peningkatan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	100 %		Laporan Penilaian Angka Kredit Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 laporan 13 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 154.947.000,00	Laporan Penilaian Angka Kredit Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 laporan 13 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 152.922.500,00
1.20.1.20.10.05.010	Peningkatan Mutu Kerja Bagi Aparat	100 %		Outward board pegawai Bandiklat sumberdaya aparatur	80 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 60.000.000,00	Outward board pegawai Bandiklat	80 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 60.000.000,00
1.20.1.20.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PERUBAHAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 120.488.300,00				Rp. 120.488.300,00
1.20.1.20.10.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100 %		Nilai Laki SKPD	1 Skor A	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 5.450.000,00	Nilai Laki SKPD	1 Skor A	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 5.450.000,00
1.20.1.20.10.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100 %		Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	5 %	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 14.998.300,00	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	5 %	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 14.998.300,00
1.20.1.20.10.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Pengembangan Data dan Informasi	100 %		Nilai Laki SKPD	1 Skor A	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 80.000.000,00	RKA/DPA, Renja, ROK	1 tahun	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 80.000.000,00

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1.20.1.20.10.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Terwujudnya penatubuhan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	92 %	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 20.040.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	92 %	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 20.040.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMATIKA							Rp. 35.000.000,00				Rp. 35.000.000,00		
1.20.1.20.10.23.007	Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi masing dinas terpadu	50 %	Pengelolaan sistem informasi kegiatan	1 website, 1 SIM Diklat, 1 E-Learning	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 35.000.000,00	Pengelolaan sistem informasi kegiatan	1 website, 1 SIM Diklat, 1 E-Learning	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 35.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
1.20.1.20.10.31	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							Rp. 803.234.750,00				Rp. 803.234.750,00		
1.20.1.20.10.31.006	Pelaksanaan Penelitian	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Penelitian dengan tema kegiatan	2 laporan penelitian	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 45.000.000,00	Penelitian dengan tema kegiatan	2 laporan penelitian	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 45.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
1.20.1.20.10.31.010	Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Diklat	Persentase pencapaian kurikulum dan pengembangan	100 %	Kurikulum Diklat	1 kurikulum	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 40.000.000,00	Kurikulum Diklat	1 kurikulum	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 40.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
1.20.1.20.10.31.024	Pengembangan Penerbitan Buletin Diklat	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Server Aplikasi Layanan Digital	1 unit	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 390.000.000,00	Penerbitan buletin diklat	4 edisi / tahun	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 390.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
1.20.1.20.10.31.025	Manajemen Mutu Penyelenggaraan Diklat	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Penerbitan buletin	4 edisi / tahun	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 328.234.750,00	Penerbitan buletin	4 edisi / tahun	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 328.234.750,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tidak Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				ISO 9001:2008	17 jenis diklat			Laporan hasil evaluasi pasca diklat	17 jenis diklat				
				Sertifikat akreditasi diklat	1 Sertifikat			Sertifikat akreditasi diklat	1 Sertifikat				
				Sertifikat SMK ISO 9001:2008	1 Sertifikat			Sertifikat SMK ISO 9001:2008	1 Sertifikat				
1.20.1.20.10.32	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN						Rp. 11.974.783.650,00				Rp. 11.974.583.650,00		
1.20.1.20.10.32.007	TOF Diklat Prajabatan Pola Baru	Presentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi menjadi tenaga akademis Diklat Prajabatan	40 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 179.999.850,00	Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi menjadi tenaga akademis Diklat Prajabatan	40 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.32.010	Workshop Peningkatan Berprestasi Aparatur Berbudaya	Presentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi budaya dalam implementasi ketugasan brokrasi	40 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 55.996.900,00	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi budaya dalam implementasi ketugasan brokrasi	40 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.10.32.055	Peningkatan dan Penguasaan Bidang Kegiatan Fungsional	Presentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah Pegawai yang kompeten dalam manajemen persustakaan	30 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 329.999.750,00	Jumlah Pegawai yang kompeten dalam manajemen persustakaan	30 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Jumlah Pegawai yang kompeten dalam mengoperasionalkan komputer	50 Orang			Jumlah Pegawai yang kompeten dalam mengoperasionalkan komputer	50 Orang				
				Jumlah Pegawai yang terampil menggunakan bahasa Jawa	60 Orang			Jumlah Pegawai yang terampil menggunakan bahasa Jawa	60 Orang				
1.20.1.20.10.32.056	Peningkatan dan Penguasaan Bidang Kegiatan Teknis	Presentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah Aparatur yang mampu melaksanakan pemikiran entrepreneur sesuai dengan bidang tugasnya	90 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 2.480.065.200,00	Jumlah Aparatur yang mampu melaksanakan pemikiran entrepreneur sesuai dengan bidang tugasnya	90 Orang	Badan Pendidikan dan Lathian	Rp. 2.479.865.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Jumlah Pegawai yang kompeten dalam manajemen keuangan	60 Orang			Jumlah Pegawai yang kompeten dalam manajemen keuangan	60 Orang				
				Jumlah Pegawai yang kompeten dalam manajemen pemerintahan	90 Orang			Jumlah Pegawai yang kompeten dalam manajemen pemerintahan	90 Orang				
				Jumlah Pegawai yang kompeten dalam pengelolaan aset	60 Orang			Jumlah Pegawai yang kompeten dalam pengelolaan aset	60 Orang				
				Jumlah Pegawai yang kompeten dalam penyusunan SAKIP	60 Orang			Jumlah Pegawai yang kompeten dalam penyusunan SAKIP	60 Orang				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tidak Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Jumlah Pegawai yang kompeten dalam teknik-teknik perencanaan	60 Orang			Jumlah Pegawai yang kompeten dalam teknik-teknik perencanaan	60 Orang				
				Jumlah Pegawai PNS yang menguasai prinsip-prinsip entrepreneur dalam bidang kerjanya	110 Orang			Jumlah Pegawai yang menguasai prinsip-prinsip entrepreneur dalam bidang kerjanya	110 Orang				
1.20.1.20.10.32.057	Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Diklat	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah Aparatur yang kompeten dalam penyelenggaraan diklat	25 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 271.487.450,00	Jumlah Aparatur yang kompeten dalam penyelenggaraan diklat	25 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 271.487.450,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Jumlah Pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan diklat	25 Orang			Jumlah Pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan diklat	25 Orang				
1.20.1.20.10.32.059	Diklat Kepemimpinan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah Pegawai yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon III	200 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 7.122.522.000,00	Jumlah Pegawai yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon III	200 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 7.122.522.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pegawai yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon IV	320 Orang			Pegawai yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon IV	320 Orang				
1.20.1.20.10.32.060	Diklat Prajabatan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol I dan II	520 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.534.712.500,00	Jumlah Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol I dan II	520 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 1.534.712.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Penambahan peserta Diklat Prajabatan Golongan III sebanyak 6 angkatan dan Diklat Prajabatan Golongan II sebanyak 1 angkatan
				Jumlah Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol III	120 Orang			Jumlah Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol III	120 Orang				
1.20.1.20.10.41	PROGRAM KEBERKUTATAN KEDJASAMA ANTAR DAERAH						Rp. 318.000.000,00				Rp. 318.000.000,00		
1.20.1.20.10.41.002	Promosi dan Rekrutment Kemitraan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kemitraan peserta diklat dari luar daerah.	100 %	Koordinasi dan promosi diklat kemitraan	15 lokasi	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 183.398.000,00	Koordinasi dan promosi diklat kemitraan	15 lokasi	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 183.398.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengiriman surat penawaran diklat kemitraan	440 kab / kota			Pengiriman surat penawaran diklat kemitraan	440 kab / kota				
1.20.1.20.10.41.011	Koordinasi kekilatan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kemitraan peserta diklat dari luar daerah.	100 %	Jumlah peserta sosialisasi diklat penjenjangan pola baru	520 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 134.602.000,00	Jumlah peserta sosialisasi diklat penjenjangan pola baru	520 Orang	Badan Pendidikan dan Latihan	Rp. 134.602.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Jumlah peserta sosialisasi pargub diklat satu pintu	50 Orang			Jumlah peserta sosialisasi pargub diklat satu pintu	50 Orang				
				Rekomendasi penyelenggaraan diklat	1 rekomendasi penyelenggaraan diklat			Rekomendasi penyelenggaraan diklat	1 rekomendasi penyelenggaraan diklat				
Total							Rp. 17.601.671.200,00				Rp. 17.607.416.700,00		
											Rp. 5.745.500,00		

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Inspektorat															
Kode	Usuran/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/ Berkurang			
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
1.20	Wajib														
1.20	Obtononi Daerah, Pemerintahan Pemeintahban Umum, Adm Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kpegawalan, dan Persandia														
1.20.11	Inspektorat														
1.20.1.20.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 1.280.415.000,00				Rp. 1.205.366.250,00	(-) Rp. 75.048.750,00		
1.20.1.20.11.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terkirimnya paket	12 bulan	Inspektorat	Rp. 4.200.000,00	Terkirimnya surat	300 surat	Inspektorat	Rp. 4.200.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.11.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terkirimnya surat	300 meteral	Inspektorat	Rp. 160.080.000,00	Tersedianya meteral	300 meteral	Inspektorat	Rp. 160.080.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.11.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 2	6 STNK	Inspektorat	Rp. 13.615.000,00	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 2	6 STNK	Inspektorat	Rp. 13.615.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.11.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4	16 STNK	Inspektorat	Rp. 26.727.500,00	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4	16 STNK	Inspektorat	Rp. 30.687.500,00	Rp. 3.960.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Usulan tambahan anggaran Rp 3.960.000 karena anggaran murni cukup s.d 10 bulan	
1.20.1.20.11.01.008	Penyediaan Jasa Kebutuhan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa kebutuhan kantor	12 bulan	Inspektorat	Rp. 83.097.000,00	Terbayarnya jasa kebutuhan kantor	12 bulan	Inspektorat	Rp. 83.097.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.11.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	28 jenis	Inspektorat	Rp. 27.000.000,00	Tersedianya alat tulis kantor	28 jenis	Inspektorat	Rp. 27.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.11.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penggandaan lembar	97500 lembar	Inspektorat	Rp. 20.500.000,00	Penggandaan lembar	97500 lembar	Inspektorat	Rp. 20.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.11.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan	12 jenis	Inspektorat	Rp. 4.911.000,00	Tersedianya barang cetakan	12 jenis	Inspektorat	Rp. 4.911.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Uraian/Program / kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.20.1.20.11.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(3)	(4)	Tersedianya peralatan rumah dan pengisian tabung kebakaran	7 jenis	Inspektorat	Rp. 3.242.000,00	Tersedianya peralatan rumah dan pengisian tabung kebakaran	7 jenis	Inspektorat	Rp. 3.242.000,00	(13)	(15)
1.20.1.20.11.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya buku pengetahuan dan peraturan perundang Tersedianya surat kabar harian	5 Paket 4 jenis	Inspektorat	Rp. 22.640.000,00	Tersedianya buku pengetahuan dan peraturan perundang Tersedianya surat kabar harian	5 Paket 4 jenis	Inspektorat	Rp. 22.640.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman sedang	2880 os	Inspektorat	Rp. 28.800.000,00	Tersedianya makanan dan minuman sedang	2880 os	Inspektorat	Rp. 28.800.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya dukungan untuk pengisian pegawai dalam rangka koordinasi pelaksanaan dan konsultasi	49 dok	Inspektorat	Rp. 777.602.500,00	Tersedianya dukungan untuk pengisian pegawai dalam rangka koordinasi pelaksanaan dan konsultasi	49 dok	Inspektorat	Rp. 685.093.750,00 (-) Rp. 92.508.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.02.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/gedung /tempat kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa keamanan kantor	6 or	Inspektorat	Rp. 108.000.000,00	Terbayarnya jasa keamanan kantor	9 or	Inspektorat	Rp. 121.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Usulan penambahan tenaga pengamanan 3 orang mulai berugas bulan Oktober 2015
1.20.1.20.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 580.932.000,00				Rp. 580.932.000,00		
1.20.1.20.11.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Terbayarnya AC dan Tersedianya kelengkapan komputer	2 unit 6 jenis	Inspektorat	Rp. 15.287.000,00	Terbayarnya AC dan Tersedianya kelengkapan komputer	2 unit 6 jenis	Inspektorat	Rp. 15.287.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Pengantian sekat Pengcatan dinding kantor Pengantian keramik	50 m2 600 m2 150 m2	Inspektorat	Rp. 57.730.000,00	Pengantian sekat Pengcatan dinding kantor Pengantian keramik	50 m2 600 m2 150 m2	Inspektorat	Rp. 57.730.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Kendaraan dinas roda 2 sep operasional Kendaraan dinas roda 4 sep operasional	6 unit 16 unit	Inspektorat	Rp. 385.065.000,00	Kendaraan dinas roda 2 sep operasional Kendaraan dinas roda 4 sep operasional	6 unit 16 unit	Inspektorat	Rp. 385.065.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasana aparatur	100 %	Peralengkapan kantor berfungsi dengan baik	4 jenis	Inspektorat	Rp. 5.000.000,00	Peralengkapan kantor berfungsi dengan baik	4 jenis	Inspektorat	Rp. 5.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Inspektorat														
Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/Berkurang
1.20.1.20.11.02.028	Pemeliharaan Rutin/pendala dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	(3)	(4)	Peralatan berfungsi dengan baik	4 jenis	Inspektorat	Rp. 21.750.000,00	Perabotan berfungsi dengan baik	4 jenis	Inspektorat	Rp. 21.750.000,00	Rp. 0,00	(13)	(15)
1.20.1.20.11.02.042	Rehabilitasi Sarang/berat Gedung Kantor		100 %	Tibangnya rehabilitasi gudang	1 unit	Inspektorat	Rp. 96.100.000,00	Tibangnya rehabilitasi gudang	1 unit	Inspektorat	Rp. 96.100.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN SARAN PRASARANA SUKBERDAYA APARATUR						Rp. 94.360.000,00				Rp. 82.360.000,00	(-) Rp. 12.000.000,00		
1.20.1.20.11.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal		100 %	Peningkatan pemahaman Auditor/PNS tentang teknis pengawasan	8 or	Inspektorat	Rp. 94.360.000,00	Peningkatan pemahaman Auditor/PNS tentang teknis pengawasan	8 or	Inspektorat	Rp. 82.360.000,00	(-) Rp. 12.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KAPALAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 67.671.500,00				Rp. 46.051.500,00	(-) Rp. 21.620.000,00		
1.20.1.20.11.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)		100 %	Tersusunnya dokumen laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)	3 laporan	Inspektorat	Rp. 6.459.500,00	Tersusunnya dokumen laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)	3 laporan	Inspektorat	Rp. 6.459.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (LAKIP, RKT, PK)		100 %	Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD	2 laporan	Inspektorat	Rp. 13.699.000,00	Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD	2 laporan	Inspektorat	Rp. 6.319.000,00	(-) Rp. 7.380.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan Penganggaran dan Informasi (Renstra, ROPK, Renja, RKA/DPA)		100 %	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	4 laporan	Inspektorat	Rp. 38.248.000,00	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	4 laporan	Inspektorat	Rp. 29.048.000,00	(-) Rp. 9.200.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan		100 %	Tersusunnya dokumen money	12 laporan	Inspektorat	Rp. 9.265.000,00	Tersusunnya dokumen money	12 laporan	Inspektorat	Rp. 4.225.000,00	(-) Rp. 5.040.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Program Kegiatan SKPD (trivulanan dan akhir tahun)	keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang dilaksanakan tugas dan fungsi SKPD		pelaksanaan progra dan kegiatan SKPD									Penambahan : -	
1.20.1.20.11.20	PROGRAM PENGENDALIAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIDJAKAN KDH						Rp. 3.656.594.050,00				Rp. 3.483.721.550,00	(-) Rp. 172.872.500,00		
1.20.1.20.11.20.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Cash Opname dan Stok Opname	34 laporan	Badan Kepegawaian Daerah Kerjasama dan Penanaman Modal Kesatuan Bangsa dan Politik Pemeriksaan Masyarakat Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Pemberdayaan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Lathian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pertanahan dan Asip Badan Administrasi Kependudukan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan	Rp. 2.596.477.500,00	Cash Opname dan Stok Opname	34 laporan	Badan Kepegawaian Daerah Kerjasama dan Penanaman Modal Kesatuan Bangsa dan Politik Pemeriksaan Masyarakat Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Pemberdayaan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Lathian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pertanahan dan Asip Badan Administrasi Kependudukan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan	Rp. 2.513.632.500,00	(-) Rp. 82.845.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Uraan/Program /egiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan			
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)			
1.201.20.11.20.003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Pemeriksaan Reguler	132 LHP	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit GRIHSA Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD		Pemeriksaan Reguler	132 LHP	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit GRIHSA Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -				
1.201.20.11.20.007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %		4 laporan monitoring dan evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta.	Rp. 89.910.100,00	Program Kerja Pengawasan Tahunan 2015	1 SK Sub	Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta.	Rp. 89.910.100,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -			

LAPORAN PERUBAHAN

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.11.20.009	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (BKPPD)	5 laporan	Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta.	Rp. 121.437.750,00	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	5 laporan	Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta.	Rp. 121.437.750,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.20.010	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Informasi dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	4 kali	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Pengembangan Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pertakaaan dan Pdaip Biro Administrasi Keselgatraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Kelola Pemerintahan Biro Juruwayah, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan	Rp. 119.445.900,00	Informasi dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	4 kali	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Pengembangan Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perindngan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pertakaaan dan Pdaip Biro Administrasi Keselgatraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Kelola Pemerintahan Biro Juruwayah, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan	Rp. 119.445.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Uraian/Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
						dan Perlakuan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD				dan Perlakuan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Ghasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD			
1.20.1.20.11.20.011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Informasi dan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Laporan Pakaj Auditor/PMS Gol. III dan IV	550 temuan	Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta.	Rp. 219.811.800,00	Informasi dan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Laporan Pakaj Auditor/PMS Gol. III dan IV	550 temuan	Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta.	Rp. 147.214.300,00	(-) Rp. 72.597.500,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.20.014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	40 LHP	Inspektorat	Rp. 376.715.000,00	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	40 LHP	Inspektorat	Rp. 359.285.000,00	(-) Rp. 17.430.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.11.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN						Rp. 178.956.850,00				Rp. 178.956.850,00		
1.20.1.20.11.21.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	100 %	Pelatihan Kantor Sendiri Peningkatan Pemahaman Auditor/PMS Terhadap Peraturan Perundang-undangan	60 2 Angk 60 or (3 angkatan)	Inspektorat	Rp. 136.420.350,00	Pelatihan Kantor Sendiri Peningkatan Pemahaman Auditor/PMS Terhadap Peraturan Perundang-undangan	60 2 Angk 60 or (3 angkatan)	Inspektorat	Rp. 136.420.350,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Inspektorat

Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/ Berkurang			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)	
				Peningkatan Pemahaman Auditor/PNS Tentang Teknis Pengawasan	60 or (4 angkatan)			Peningkatan Pemahaman Auditor/PNS Tentang Teknis Pengawasan	60 or (4 angkatan)						
1.20.1.20.11.21.003	Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Jabatan Fungsional Auditor	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	100 %	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis	50 or	Inspektorat	Rp. 42.536.500,00		50 or	Inspektorat	Rp. 42.536.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.11.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI						Rp. 137.455.000,00				Rp. 131.405.000,00	(-) Rp. 6.050.000,00			
1.20.1.20.11.23.001	Penyusunan sistem kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Pedoman pemeriksaan	200 buku	Inspektorat	Rp. 37.475.000,00	Pedoman pemeriksaan	200 buku	Inspektorat	Rp. 31.425.000,00	(-) Rp. 6.050.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.20.1.20.11.23.002	Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Sistem informasi hasil pengawasan	1 unit	Inspektorat	Rp. 99.980.000,00	Sistem informasi hasil pengawasan	1 unit	Inspektorat	Rp. 99.980.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
Total												Rp. 5.708.793.150,00	(-) Rp. 287.591.250,00		

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Kepegawalan Daerah

Kode	Unsur / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	Wajib												
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Kepegawalan, dan Persandia												
1.20.12	Badan Kepegawalan Daerah												
1.20.1.20.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 3.589.022.000,00				Rp. 1.630.092.600,00 (-) Rp. 1.958.929.400,00		
1.20.1.20.12.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman dokumen surat keluar	40 Paket 9000 surat	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 5.988.000,00	Pengiriman dokumen Surat keluar	40 Paket 9000 surat	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 5.988.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tagihan Telepon, Listrik Air dan Internet	10 rekening tagihan	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 454.800.000,00	Tagihan Telepon, Listrik Air dan Internet Terbayar	10 rekening tagihan	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 454.800.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perawatan dan perengleapan kantor	25 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 104.745.000,00	Perawatan dan perengleapan kantor	25 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 104.745.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.006	Penyediaan Jasa Pengangkutan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	6 buah	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 8.510.000,00	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	6 buah	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 8.510.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium PPK, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pegawai, Pengiriman dan Penyimpanan, Pengelola Adm. Kepegawalan dan Penyiap Fasilitas Pengembangan Pegawai	15 orang/12 bulan	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 2.026.363.000,00	Honorarium PPK, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pegawai, Pengiriman dan Penyimpanan, Pengelola Adm. Kepegawalan dan Penyiap Fasilitas Pengembangan Pegawai	15 orang/12 bulan	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 52.100.000,00 (-) Rp. 1.974.263.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Honorarium praktik kerja sarana untuk praktek kerja lapangan karena kegiatan seleksi praktik kerja sarjana tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan dari pimpinan. Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.008	Penyediaan Jasa Administrasi Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan dinding dan plafon	40.38 m2	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 250.000.000,00	Kebersihan dinding dan plafon	40.38 m2	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 250.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Kebersihan gedung kantor	5 unit			Kebersihan gedung kantor	5 unit				
				Kebersihan kaca	42.204 m2			Kebersihan kaca	42.204 m2				
				Kebersihan lantai abu-abu	44.833 m2			Kebersihan lantai abu-abu	44.833 m2				
				Kebersihan lantai keramik	52.272 m2			Kebersihan lantai keramik	52.272 m2				
				Pemeliharaan halaman	63.852 m2			Pemeliharaan halaman	63.852 m2				
				Pemeliharaan tanaman dan taman	10.128 m2			Pemeliharaan tanaman dan taman	10.128 m2				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kepegawalan Daerah

Kode	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.12.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor	93 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 37.287.000,00	Alat tulis kantor	93 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 37.287.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Cetakan	20 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 79.068.000,00	Cetakan	20 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 79.068.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.012	Penyediaan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia setiap saat	24 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 9.715.000,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia setiap saat	24 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 9.715.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.014	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat, bahan kebersihan dan alat rumah tangga	19 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 8.230.000,00	Alat, bahan kebersihan dan alat rumah tangga	19 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 8.230.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku perpustakaan	6 jenis buku	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 10.810.000,00	Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan, langganan surat kabar	2 surat kabar	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 10.810.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Majalah	1 majalah			Buku perpustakaan	6 jenis buku					
				Penyampulan buku keputakaan	300 buku			Majalah	1 majalah					
				Surat kabar	2 surat kabar			Penyampulan buku	300 buku					
1.20.1.20.12.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman rapat	4321 Orang	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 51.900.000,00	Makanan dan minuman rapat	4321 Orang	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 51.900.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	konsultasi dan koordinasi dalam daerah	96 kali	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 364.010.000,00	konsultasi dan koordinasi dalam daerah	96 kali	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 364.010.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				konsultasi dan koordinasi luar daerah	89 Kali			konsultasi dan koordinasi luar daerah	89 Kali					
1.20.1.20.12.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penjagaan keamanan kantor	9 Orang	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 177.596.000,00	Penjagaan keamanan kantor	9 Orang	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 192.929.600,00	Rp. 15.333.600,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.02	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 3.995.530.000,00				Rp. 3.979.030.000,00	(-) Rp. 16.500.000,00		
1.20.1.20.12.02.005	Pegadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 589.834.000,00	Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 589.834.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.02.007	Pegadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Bendera	4 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 2.040.129.000,00	Bendera	4 jenis	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 2.040.129.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				cermin tikungan	2 unit			cermin tikungan	2 unit					
				pemadam kebakaran	1 Paket			pemadam kebakaran FH-200	1 Paket					
1.20.1.20.12.02.009	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Kamera digital komputer	1 unit	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 149.000.000,00	Kamera digital komputer	1 unit	Badan Kepegawalan Daerah	Rp. 149.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				LCD proyektor	1 unit			LCD Proyektor	1 unit					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kepegawainan Daerah

Kode	Usanan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Program	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.20.1.20.12.02.010	Pengadaan Mebel	sarana prasarana aparatur			Mesin ketik	4 unit	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 212.300.000,00	Mesin ketik	4 unit	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 195.800.000,00	(-) Rp. 16.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi Penambahan : -
					Notebook	4 unit			Notebook	4 unit				
					printer	4 buah			Printer	4 buah				
					tempat penyimpanan kamera	1 buah			tempat penyimpanan kamera	1 buah				
1.20.1.20.12.02.011	DED Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %		almari besi	5 buah	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 388.649.000,00	Almari besi	5 buah	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 388.649.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					kursi rapat	100 buah			kursi rapat	100 buah				
					kursi tunggu	2 buah			kursi tunggu	2 buah				
					Meja rapat	50 buah			Meja rapat	50 buah				
					panel interior	1 Paket			panel interior	1 Paket				
1.20.1.20.12.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %		DED bangunan gedung	1 dokumen	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 341.200.000,00	DED gedung kantor	1 dokumen	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 341.200.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					pemeliharaan gedung & ruang BKD	4 Paket			pemeliharaan gedung & ruang BKD	4 Paket				
					pemeliharaan genteng/atap/talang listrik	1 tahun			pemeliharaan genteng/atap/talang listrik	1 tahun				
					pemeliharaan jaringan listrik	1 tahun			pemeliharaan jaringan listrik	1 tahun				
					pengesatan	600 m2			pengesatan	600 m2				
1.20.1.20.12.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %		Perbaikan gedung balai pkp	4 Paket	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 199.900.000,00	Perbaikan gedung balai pkp	4 Paket	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 199.900.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					Kendaraan dinas operasional roda 2	5 unit			Kendaraan dinas operasional roda 2	5 unit				
					Kendaraan dinas operasional terpelihara roda 4	8 unit			Kendaraan dinas operasional terpelihara roda 4	8 unit				
					Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	15 unit			Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	15 unit				
1.20.1.20.12.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %		Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 5.620.000,00	Pemeliharaan Censet Kantor	1 unit	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 5.620.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
									Peralatan Gedung Kantor	5 jenis				
1.20.1.20.12.02.033	Fumigasi Arsip	Prosentase penyediaan dan	100 %		Fumigasi dan termit control ruang arsip kepegawainan	2 ruang	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 58.042.000,00	Fumigasi dan termit control ruang arsip kepegawainan	2 ruang	Badan Kepegawainan Daerah	Rp. 58.042.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Kepegawalan Daerah

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		pemeliharaan sarana prasarana aparatur													
1.20.1.20.12.05	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 1.879.220.000,00				Rp. 1.854.220.000,00	(-) Rp. 25.000.000,00			
1.20.1.20.12.05.999	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	Terdwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Bimtek bagi CPNS Kursus kewirausahaan Kursus SDM pengelola balai Magang calon assessor Pelatihan competency profiler Pemahaman peraturan perundangan Pembinaan mahasiswa tugas belajar Pengiriman aparatur dalam diklat teknis/fungsional Pengiriman diklatgim tk. II Seleksi diklatgim tk. III	105 CPS 30 Orang 6 Orang 2 Orang 5 Orang 37 Instansi 55 Orang 55 Orang 4 Orang 100 Orang	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.879.220.000,00	Bimtek bagi CPNS Kursus kewirausahaan Kursus SDM pengelola balai Magang calon assessor Pelatihan competency profiler Pemahaman peraturan perundangan Pembinaan mahasiswa tugas belajar Pengiriman aparatur dalam diklat teknis/fungsional Pengiriman diklatgim tk. II Seleksi diklatgim tk. III	105 CPNS 30 Orang 6 Orang 2 Orang 5 Orang 37 Instansi 57 Orang 55 Orang 3 Orang 100 Orang	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.854.220.000,00	(-) Rp. 25.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kepegawain Daerah

Kode	Usulan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Rencana Kerja SKPD	1 dokumen			Publikasi website	1 tahun			(15)
				RVA	1 dokumen			Rencana Kerja SKPD	1 dokumen			
				RPPK	1 dokumen			RVA	1 dokumen			
1.20.1.20.12.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD		100 % Terwujudnya penertuaan keuangan dan manajemen program kegiatan	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	12 laporan	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 18.600.000,00	Laporan Program dan Kegiatan Bulanan	12 laporan	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 18.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33	PROGRAM PEMBIKINAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR						Rp. 13.021.060.400,00				Rp. 15.268.815.400,00	
1.20.1.20.12.33.065	Pengelolaan MTQ bagi Aparatur	83 % Persentase Informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawain		Lomba MTQ ASN Penda DIY dan MTQ ASN Tingkat DIY	3 cabang lomba	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 300.000.000,00		3 cabang lomba	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 300.000.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33.112	Pengembangan Aparatur	83 % Persentase Informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawain		Laporan hasil analisis kebutuhan diklat	1 laporan	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 221.980.000,00	Laporan hasil analisis kebutuhan diklat	1 laporan	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 221.980.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33.113	Perguruan Kompetensi Pegawai	83 % Persentase Informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawain		Laporan hasil audit mutu eksternal	1 dokumen			Laporan hasil audit mutu eksternal	1 dokumen			
				Pendampingan pengembangan sistem manajemen mutu	1 dokumen			Pendampingan pengembangan sistem manajemen mutu	1 dokumen			
				Rancangan pola karir aparatur	1 Rapergub			Rancangan pola karir aparatur	1 Rapergub			
				Alat ukur assesment center	1 set	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 1.137.000.000,00	Alat ukur assesment center	1 set	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 2.072.395.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33.114	Pembinaan Kompetensi Pegawai	83 % Persentase Informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawain		Konseling psikologi individu	20 sesi			Konseling psikologi individu	20 sesi			
				Konseling psikologi kelompok	150 Orang			Konseling psikologi kelompok	170 Orang			
				Profil kompetensi	144 Orang			Profil kompetensi	276 Orang			
				Profil potensi	350 Orang			Profil potensi	564 Orang			
1.20.1.20.12.33.114	Pengembangan Kemitraan Kompetensi Pegawai	83 % Persentase Informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawain		Evaluasi implementasi hasil pengukuran kompetensi pegawai	1 dokumen	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 151.016.400,00	Evaluasi implementasi hasil pengukuran kompetensi pegawai	1 dokumen	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 151.016.400,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33.114	Pembinaan Kompetensi Pegawai	83 % Persentase Informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawain		Pengembangan kemitraan pengukuran kompetensi pegawai	1 kesepakatan			Pengembangan kemitraan pengukuran kompetensi pegawai	1 kesepakatan			
				Promosi penyelenggaraan kerjasama pengukuran kompetensi pegawai	1 lokasi			Promosi penyelenggaraan kerjasama pengukuran kompetensi pegawai	1 lokasi			

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kepegawain Daerah

Kode	Unsur/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
1.20.1.20.12.33.115	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	CPNS dan calon sarjana magang & pengisian aparatur & pengisian aparatur	257 Orang 4 Dokumen/keputusan	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 2.010.000.000,00	CPNS dan calon sarjana magang & pengisian aparatur & pengisian aparatur Sistem aplikasi e-formasi	257 Orang 4 Dokumen/keputusan 1 Aplikasi	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 2.010.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33.116	Pengelabian Kepegawain	83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	Penyerahan SK kenalan pangkat, petikan dan SK pensiun	1400 SK 2 Periode	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 279.350.000,00	Penyerahan SK kenalan pangkat, petikan dan SK pensiun	1400 SK	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 279.350.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
		83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	Rapat koordinasi (rakor) terpadu kenalan pangkat dan penyerahan SK pensiun	2 Periode	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 6.098.872.000,00	Rapat koordinasi (rakor) terpadu kenalan pangkat dan penyerahan SK pensiun	2 Periode	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 6.098.872.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33.117	Pengisian disiplin aparatur	83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	Buku himpunan ID card PNS	1 buku himpunan 450 buah	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 175.000.000,00	Buku himpunan ID card PNS	1 buku himpunan 450 buah	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 175.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
		83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	Keputusan pengangkatan disiplin dan surat jln/surat keterangan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	90 105 orang/LHKPN	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 175.000.000,00	Keputusan pengangkatan disiplin dan surat jln/surat keterangan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	90 105 orang/LHKPN	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 175.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33.118	Pembinaan dan Pengelabian Sitem Informasi Aparatur	83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	Surat jln ke luar negeri	25 jln LN	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 128.920.000,00	Surat jln ke luar negeri	25 jln LN	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 128.920.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
		83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	Surat jln ke luar negeri	25 jln LN	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 128.920.000,00	Surat jln ke luar negeri	25 jln LN	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 128.920.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.20.1.20.12.33.200	Pengelabian dan kepegawain aparatur	83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan surat tanda lulus ujian CPNS	2 seleksi/ujian	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 768.887.000,00	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan surat tanda lulus ujian CPNS	2 seleksi/ujian	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 768.887.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
		83 % Perentase informasi kepegawain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kepegawain	83 % 83 %	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan surat tanda lulus ujian CPNS	2 seleksi/ujian	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 768.887.000,00	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan surat tanda lulus ujian CPNS	2 seleksi/ujian	Badan Kepegawain Daerah	Rp. 768.887.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Kependidikan Daerah

Kode	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.20.1.20.12.23.777	Pengisian Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Nesiah kepegawaian ttg pengangkatan, penindahan dan pemberhentian dari/ke jabatan struktural, fungsional dan fungsional umum	800 PNS	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 630.105.000,00	Nesiah kepegawaian ttg pengangkatan, penindahan dan pemberhentian dari/ke jabatan struktural, fungsional dan fungsional umum	800 PNS	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.826.590.000,00	Rp. 1.196.485.000,00	Efisiensi Kepegawaian : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Pengisian 8 JPT dan Penataan kelembagaan baru
				Peraturan/pedoman teknis pengisian jabatan secara terbuka	1 Rapergub			Penataan kelembagaan baru	3 SK				
								Pengisian jabatan pimpinan tinggi	8 Jabatan				
								Peraturan/pedoman teknis pengisian jabatan secara terbuka	1 Rapergub				
								Tes psikologi Eselon II dan Eselon III	250 Orang				
Total										Rp. 22.890.483.000,00		Rp. 265.325.600,00	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tokol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1	Wajib													
1.21	Ketahanan Pangan													
1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan													
1.21.1.21.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 563.813.900,00				Rp. 563.813.900,00	Rp. 0,00		
1.21.1.21.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	pengiriman dokumen	500 surat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 250.000,00	pengiriman dokumen	500 surat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 250.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat Keluar	500 surat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		Surat masuk	750 surat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
1.21.1.21.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran belanja hosting website 1	12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 193.200.000,00	1) Pembayaran belanja telepon 4 sambungan	12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 193.200.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran belanja internet 5 MBps	12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		2) Pembayaran belanja listrik 336 kwh	12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
1.21.1.21.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran belanja listrik 336 kwh	12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		3) Pembayaran belanja internet 5 MBps	12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
1.21.1.21.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran belanja telepon 4 sambungan	12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		4) Pembayaran belanja hosting website 1	12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
1.21.1.21.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	14 unit	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 6.140.000,00	1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	14 unit	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 6.140.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
1.21.1.21.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	0	0	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 22.746.600,00	1) bukti bayar honorarium pengelola keuangan	5 Orang (12 bulan)	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 22.746.600,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	bukti bayar honorarium pengelola keuangan	5 Orang, 12 Bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		2) bukti bayar honorarium pengelola barang	2 Orang (12 bulan)	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
1.21.1.21.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	bukti bayar honorarium pengelola keuangan	2 Orang, 12 Bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		3) bukti bayar honorarium pengelola kepegawaian	2 Orang (12 bulan)	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
1.21.1.21.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	bukti bayar honorarium pengguna barang	2 Orang, 12 Bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				
1.21.1.21.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan Gedung Kantor	18.334 m2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 74.950.000,00	Kebersihan Gedung Kantor	18.334 m2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 74.950.000,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.211.21.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	52 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 32.748.300,00	Alat Tulis Kantor	52 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang Cetak 2. Barang Penggandaan	11 macam blanko cetak 49880 lembar	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 24.999.000,00	1) Barang cetakan 2) Barang penggandaan	11 unit/buku 49880 lembar	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 15.000.000,00	Isi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.01.015	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	0 2. jenis majalah 4 jenis surat kabar	0 2 jenis majalah 4 jenis surat kabar	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 9.780.000,00	1) surat kabar 2) majalah	4 jenis 2 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman sdang	2500 Orang	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 25.000.000,00	Makanan dan minuman sdang	2500 Orang	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 150.000.000,00	1) Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 2) Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan 12 bulan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah	12 kuitansi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 9.000.000,00	Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah	12 kuitansi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.02	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 3.667.600.970,00				Rp. 0,00		
1.211.21.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terbelinya kendaraan dinas (dikawat) operasional Terbelinya kendaraan dinas roda 4 (empat) operasional	6 unit 2 unit	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 495.000.000,00	1) Terbelinya kendaraan dinas (dikawat) operasional 2) Terbelinya kendaraan dinas roda 2 (dua) operasional	2 unit 6 unit	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor	11 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 420.000.000,00	Perengkapan gedung kantor	12 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor	8 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 200.000.000,00	Peralatan gedung kantor	9 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.02.010	Pengadaan Mebelur	Prosentase penyediaan dan	100 %	Mebelur	3 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 100.000.000,00	Mebelur	3 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											
Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
			Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											(13)
											(15)
1.21.1.21.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	16 unit	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 175.000.000,00	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2)	16 unit	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 175.000.000,00
1.21.1.21.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan gedung kantor terpelihara	2 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 4.500.000,00	Perengkapan gedung kantor terpelihara	2 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 4.500.000,00
1.21.1.21.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 18.000.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 18.000.000,00
1.21.1.21.01.02.096	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendukung OKP-D (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terbangunnya Gedung UPTD/B OKP-D	1 Paket	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 2.254.100.970,00	Terbangunnya Gedung UPTD/B OKP-D	1 Paket	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 2.254.100.970,00
1.21.1.21.01.05	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 36.600.000,00				Rp. 36.600.000,00
1.21.1.21.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK	30 Orang	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 12.600.000,00	Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK	30 Orang	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 12.600.000,00
1.21.1.21.01.05.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Penilaian 6 orang pejabat fungsional tertentu	6 Dupak	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 24.000.000,00	Penilaian 6 orang pejabat fungsional tertentu	6 Dupak	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 24.000.000,00
1.21.1.21.01.06	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 202.000.000,00				Rp. 202.000.000,00
1.21.1.21.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya peningkatan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai Laki SKPD	1 B	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 6.000.000,00	Nilai Laki SKPD	1 B	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 6.000.000,00

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.211.21.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapain kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Keserjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 8.000.000,00	Keserjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 8.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.06.018	Penyusunan Rencana Kerja SKPD, Penyusunan Data Sdrta Pengembangan Data Dan Informasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	ROPK, Renja, RKA, DPA, Sistem Informasi, database ketahanan pangan	1 tahun	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 165.000.000,00	ROPK, Renja, RKA, DPA, Sistem Informasi, database ketahanan pangan	1 tahun	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 165.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.211.21.01.06.019	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %		Rp. 23.000.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	100 %	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 23.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.15	PROGRAM PEMERINTAHAN PENYULUH PERTANIAN						Rp. 1.132.000.000,00				Rp. 1.132.000.000,00		
1.21.1.21.01.15.006	Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian Tenaga Penyuluh	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %	Pelatihan penyuluh	60 Orang	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 600.000.000,00	Pelatihan penyuluh	60 Orang	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 600.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penilaian BP3K (Balai Penyuluh Kecamatan) berprestasi	3 Org			Penilaian BP3K berprestasi	3 Org				
				Penilaian gapoktan berprestasi	3 Org			Penilaian gapoktan berprestasi	3 Org				
				Penilaian Klas BP3K	1 dokumen			Penilaian kelas BP3K	1 dokumen				
				Penilaian Lembaga Ekonomi Petani berprestasi	3 Org			Penilaian Lembaga Ekonomi Petani berprestasi	3 Org				
				Penilaian penyuluh pertanian teledan	3 Org			Penilaian penyuluh pertanian teledan	3 Org				
				Penilaian Penyuluh Swadaya berprestasi	3 Org			Penilaian Penyuluh Swadaya berprestasi	3 Org				
				Penilaian penyuluh teledan	3 Org			Penilaian penyuluh teledan	3 Org				
				Penilaian petani berprestasi	3 Org			Penilaian petani berprestasi	3 Org				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Penilaian THL TBPP berprestasi	3 Org			Penilaian THL TBPP berprestasi	3 Org				
				Peningkatan kapasitas penyuluh PNS (magang)	90 Orang			Peningkatan kapasitas penyuluh PNS (magang)	90 Org				
				Penyusunan Profil BP3K	1 dokumen			Penyusunan profil BP3K	1 dokumen				
				Temu tugas penyuluh	540 Orang			Temu tugas penyuluh	540 Orang				
1.21.1.21.01.15.010	Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %	1. Updeting data penyuluh swadaya	1 dokumen	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 70.000.000,00	1. Updeting data penyuluh swadaya/swasta	1 dokumen	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 70.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Bimbingan teknis (Bimtek) dan pembinaan penyuluh swadaya/swasta	120 Org			2. Bimbingan teknis (Bimtek) dan pembinaan penyuluh swadaya/swasta	120 Org				
				3. Temu teknis penyuluh swadaya	30 Orang			3. Temu teknis penyuluh swadaya/swasta	30 Org				
1.21.1.21.01.15.011	Penyusunan Program Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %	1.Workshop Penyusunan Program dan Penyuluhan	40 Orang, 1 dokumen		Rp. 37.000.000,00	1.Workshop Penyusunan Program dan Penyuluhan	40 org, 1 dokumen	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 37.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Sosialisasi Program Penyuluhan	50 Orang, 1 dokumen			2. Sosialisasi Program Penyuluhan	50 org, 1 dokumen				
				3. Evaluasi Program Penyuluhan	60 Orang			3. Evaluasi Program Penyuluhan	60 Orang				
1.21.1.21.01.15.014	Pengembangan Dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %	Apresiasi Kelembagaan Penyuluhan	60 Orang		Rp. 425.000.000,00	Apresiasi Kelembagaan Penyuluhan	60 Orang	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 425.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bimtek dan pembinaan kelembagaan pelaku utama	160 Orang			Bimtek dan pembinaan kelembagaan pelaku utama	160 Orang				
				Facilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi	60 orang, 2 kali			Facilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi	60 orang, 2 kali				
				Kajian peran penyuluh dalam Ketahanan Pangan	1 Paket			Kajian Peran Penyuluh dalam Ketahanan Pangan	1 Paket				
				Lomba GEMBITA	3 kelompok			Lomba kelompok kelaudan dan perkenan nasional	3 kelompok				
				Lomba Lanjip Trengginas	3 kelompok			Lomba Lanjip Trengginas	3 kelompok				
				Monitoring dan evaluasi kelembagaan penyuluhan	56 BP3K			Monitoring dan evaluasi kelembagaan penyuluhan	56 BP3K				
				Penilaian klas kelompok	60 kelompok			Penilaian Klas Kelompok	60 kelompok				
				Temu teknis Kelembagaan penyuluhan	60 Orang			Temu teknis Kelembagaan penyuluhan	60 Orang				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				workshop problem solving kembangan penyuluhan	40 Orang			Workshop Problem Solving Kembangan Penyuluhan	40 Orang				
1.21.1.21.01.17	PROGRAM Peningkatan DAERAH RAWAN PANGAN						Rp. 1.338.189.050,00				Rp. 1.338.189.050,00	Rp. 0,00	
1.21.1.21.01.17.001	Dukungan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Jumlah desa pangan	53 Desa	Laporan kegiatan fasilitas 8 desa percontohan	1 laporan		Rp. 287.470.000,00	Laporan kegiatan fasilitas 8 desa percontohan	1 laporan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 287.470.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Laporan tahunan DKP Daerah DIY	1 laporan			Laporan tahunan DKP Daerah DIY	1 laporan				
				Pelatihan motivasi pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan di desa percontohan	8 desa (@ 30 orang, 1 hari)			Pelatihan motivasi pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan di desa percontohan	8 desa (@ 30 orang, 1 hari)				
				Pelatihan pengolahan pangan lokal bergizi tinggi implementasi hasil penelitian	2 desa (@ 30 orang, 2 hari)			Pelatihan pengolahan pangan lokal bergizi tinggi implementasi hasil penelitian	2 desa (@ 30 orang, 2 hari)				
				Pembinaan pementang Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	10 sub kategori			Pembinaan pementang Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	10 sub kategori				
				Pendampingan program/kegiatan di 8 desa percontohan	8 desa (@ 1 orang, 5 bulan)			Pendampingan program/kegiatan di 8 desa percontohan	8 desa (@ 1 orang, 5 bulan)				
				Penjaringan aspirasi masyarakat untuk pembangunan ketahanan pangan	60 Orang, 1 hari			Penjaringan aspirasi masyarakat untuk pembangunan ketahanan pangan	60 Orang, 1 hari				
				Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY	80 Orang, 1 hari			Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY	80 Orang, 1 hari				
				Survei by design ketahanan pangan	1 Dokumen hasil survey dilengkapi rekomendasi			Survei by design ketahanan pangan	1 Dokumen hasil survey dilengkapi rekomendasi				
				Workshop evaluasi 8 desa percontohan	60 Orang, 1 hari			Workshop evaluasi 8 desa percontohan	60 Orang, 1 hari				
				Workshop evaluasi kinerja DKP Daerah DIY	80 Orang, 1 hari			Workshop evaluasi kinerja DKP Daerah DIY	80 Orang, 1 hari				
1.21.1.21.01.17.002	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa pangan	53 Desa	Pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Mandiri Pangan	4 desa baru, 34 desa lama, 8 desa percontohan		Rp. 900.719.050,00	Pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Rawan Pangan	4 desa baru, 34 desa lama, 8 desa percontohan	Banguntapan Kaskhan Kokap Prambanan Samigaluh Semanu Syngan	Rp. 900.719.050,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Terkordinasi dan tersinkronisasya pemanfaatan lahan	2 klmpk masyarakat kehutanan			Terkordinasi dan tersinkronisasya pemanfaatan lahan	2 klmpk masyarakat kehutanan				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	Target	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
				Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				lahan di bawah tegalan				di bawah tegalan					
				Termonitorinya kegiatan AGFUND	1 tahun			Termonitorinya kegiatan AGFUND	1 tahun				
1.21.1.21.01.17.003	Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA	Jumlah desa pangan	53 Desa	Bimtek penyusunan buku peta FSVA	200 petugas memahami peta FSVA		Rp. 80.000.000,00	1. Bimtek penyusunan buku peta FSVA	200 petugas memahami peta FSVA	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 80.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : menyesuaikan dengan SHB) Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengumpulan & analisis data FSVA	1 Data 9 indikator kerawanan pangan kronis di 4 Kab.			2. Workshop hasil penyusunan FSVA	1 Data peta FSVA				
				Penyusunan peta FSVA	45 Buku peta FSVA			3. Pengumpulan & analisis data FSVA	1 Data 9 indikator kerawanan pangan kronis di 4 Kab				
				Workshop hasil penyusunan FSVA	1 Data peta FSVA			4. Penyusunan peta FSVA	45 Buku peta FSVA				
1.21.1.21.01.17.004	Penyusunan SKPG	Jumlah desa pangan	53 Desa	1. Teraksananya sosialisasi Pedum/Juklak SKPG	30 petugas memahami pedum SKPG		Rp. 70.000.000,00	Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan data SKPG triwulan 1	1 Data SKPG Triwulan I	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 70.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan data SKPG triwulan 1	1 Data SKPG Triwulan I			Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan data SKPG triwulan 2	1 Data SKPG Triwulan II				
				Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 2	1 Data SKPG Triwulan II			Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 4	1 Data SKPG Triwulan IV				
				Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 3	1 Data SKPG Triwulan III			Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 3	1 Data SKPG Triwulan III				
				Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 4	1 Data SKPG Triwulan IV			Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 3	1 Data Analisis Desa Rawan Pangan				
				Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 4	1 Data Analisis Desa Rawan Pangan			Teraksananya Dieminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 4	30 petugas memahami pedum SKPG				
1.21.1.21.01.18	PROGRAM Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan						Rp. 764.874.000,00				Rp. 764.874.000,00		
1.21.1.21.01.18.001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	1. Buku NBM 2014 sementara	75 buku		Rp. 70.000.000,00	1. Buku NBM 2014 sementara	75 buku	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 70.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.18.002	Pengisian Cadangan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	2. Buku NBM 2014 tetap	75 buku		Rp. 544.874.000,00	2. Buku NBM 2014 tetap	75 buku	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 544.874.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	Target	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
				Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.21.1.21.01.18.003	Analisis Ketersediaan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	Bimtek peningkatan cadangan pangan	50 Orang			Bimbingan teknis/pelatihan peningkatan cadangan pangan	50 Orang	Penyuluhan			
				Bimtek peningkatan cadangan pangan	50 Orang			Evaluasi penguatan cadangan pangan	100 Orang				
				Evaluasi peningkatan cadangan pangan	100 Orang			Sosialisasi penguatan cadangan pangan	50 Orang				
				Sosialisasi peningkatan cadangan pangan	50 Orang								
				Buku analisis ketersediaan pangan berdasarkan angka ramalan	9 buku		Rp. 100.000.000,00	Buku analisis pangan berdasarkan angka ramalan	9 buku	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 100.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.18.004	Penyusunan Ketersediaan Dan Kebutuhan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	Buku data ketersediaan pangan HBKN	9 buku			Buku data ketersediaan pangan hari besar nasional/keagamaan	9 buku				
				Buku kajian konversi jagung dan ubi kayu	1 lap			Buku kajian konversi jagung dan ubi kayu	1 lap				
				Buku Neraca Bahan Makanan Kab/Kota	5 buku		Rp. 50.000.000,00	Buku Neraca Bahan Makanan Kab/Kota	5 buku	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 50.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.19	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN*						Rp. 1.240.596.500,00				Rp. 1.240.596.500,00		
1.21.1.21.01.19.001	Gronkan Pola Pangan Bergizi Berimbang Dan Aman	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Publikasi B2SA	3 media		Rp. 109.250.000,00	Publikasi B2SA	3 media	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 109.250.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Sosialisasi B2SA	170 Orang			Sosialisasi B2SA	170 Orang				
1.21.1.21.01.19.002	Penyeburan Informasi Produk pangan Lokal	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Optimalisasi Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal	1 tahun		Rp. 200.000.000,00	1) Penyelenggaraan pameran HPS	1 kali	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 200.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penyelenggaraan pameran HPS	1 kali			2) Optimalisasi Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal	1 tahun				
1.21.1.21.01.19.003	Peningkatan Diversifikasi Produk Antara Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Bimtek produk antara	25 Orang, 2 hari	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul	Rp. 119.000.000,00	Bimtek produk antara	25 Orang, 2 hari	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul	Rp. 119.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengembangan MP3L	3 kelompok usaha			Pengembangan MP3L	3 kelompok usaha				
1.21.1.21.01.19.004	Peningkatan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Pergub Perda PSAT No. 2 Ttn 2014	1. dokumen Pergub PSAT		Rp. 250.000.000,00	Penyusunan Draft Pergub PSAT (Perda PSAT No. 2 Ttn 2014)	1 dokumen draft Pergub PSAT	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 250.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Sosialisasi desa sehat	200 org masyarakat			Sosialisasi desa sehat	200 org masyarakat				
				Sosialisasi kantin sehat	200 org Komite Sekolah			Sosialisasi kantin sehat	200 org Komite Sekolah				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				Sosialisasi pasar sehat	200 org pelaku usaha			Sosialisasi pasar sehat	200 org pelaku usaha					
				Workshop hasil analisis pemantauan keamanan pangan	1 Data hasil Pengawasan Pangan Segar dan Olahan			Workshop hasil analisis pemantauan keamanan pangan	1 Data hasil Pengawasan Pangan Segar dan Olahan					
				Workshop hasil penyusunan draft Pergub Perda PSAT No. 2 Ttm 2014	1 Pergub PSAT			Workshop hasil penyusunan draft Pergub PSAT (Perda PSAT No. 2 Ttm 2014)	40 Orang, 1 hari					
				Workshop SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu)	1 Data hasil pengawasan Tim JKPD			Workshop SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu)	1 Data hasil pengawasan Tim JKPD					
1.21.1.21.01.19.005	Pengembangan Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Workshop evaluasi sasaran mutu OKKPD DIY	1 Dokumen Evaluasi Mutu OKKPD DIY		Rp. 60.000.000,00	Workshop evaluasi sasaran mutu OKKPD DIY	1 Dokumen Evaluasi Mutu OKKPD DIY	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Workshop audit internal lembaga OKKPD DIY	1 Dokumen Hasil Audit Internal			Workshop audit internal lembaga OKKPD DIY	1 Dokumen Hasil Audit Internal					
				Workshop kaji ulang manajemen lembaga OKKPD DIY	1 Dokumen Hasil Kaji Ulang			Workshop kaji ulang manajemen lembaga OKKPD DIY	1 Dokumen Hasil Kaji Ulang					
				Workshop penyempurnaan dan harmonisasi doksisu OKKPD DIY	1 Dokumen Penyempurnaan Doksisu			Workshop penyempurnaan dan harmonisasi doksisu OKKPD DIY	1 Dokumen Penyempurnaan Doksisu					
1.21.1.21.01.19.006	Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Evaluasi dan pembinaan kegiatan pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan	40 kelompok	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 39.950.000,00	Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan	40 kelompok	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 39.950.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Sosialisasi pemanfaatan pekarangan	30 orang, 4 lokasi			Sosialisasi pemanfaatan pekarangan	30 orang, 4 lokasi					
1.21.1.21.01.19.007	Pengembangan Penyuluhan Melalui Sertifikasi Pangan Segar	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Bimbingan teknis penyuluhan, registrasi PD, penyusunan doksisu, dan proposal sertifikasi	40 pelaku usaha		Rp. 375.000.000,00	Bimbingan teknis penyuluhan, registrasi PD, penyusunan doksisu, dan proposal sertifikasi	40 pelaku usaha	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 375.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Diseminasi sertifikasi, PD dan survet	50 org pelaku usaha PSAT			Diseminasi sertifikasi, PD dan survet	50 org pelaku usaha PSAT					
				Promosi produk bersertifikat melalui media elektronik	1 paket promosi produk PSAT bersertifikasi jaminan mutu			Promosi produk bersertifikat melalui media elektronik	1 paket promosi produk PSAT bersertifikasi jaminan mutu					
				Sarasehan/temu usaha pelaku produk bersertifikat	50 pelaku usaha			Sarasehan/temu usaha pelaku produk bersertifikat	50 pelaku usaha					
				Seminar keputusan sertifikasi dan PD	20 keputusan Sertifikasi Prima dan PD			Seminar keputusan sertifikasi dan PD	20 keputusan Sertifikasi Prima dan PD					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.21.1.21.01.19.008	Dukungan Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Seminar keputusan surveilen	10 kelompok penerima hibah memahami proses GNP		Rp. 55.000.000,00	Seminar keputusan surveilen	10 kelompok penerima hibah memahami proses GNP	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.19.009	Penyusunan PPH	Persentase pengawisan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Seminar Penyusunan Skor PPH	10 kelompok penerima hibah memahami proses GNP		Rp. 32.396.500,00	Seminar Penyusunan Skor PPH	10 kelompok penerima hibah memahami proses GNP	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 32.396.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.20	PROGRAM Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan						Rp. 610.000.000,00				Rp. 610.000.000,00	Rp. 0,00		
1.21.1.21.01.20.001	Dukungan Kelembagaan Akses Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	1. Sosialisasi kelembagaan akses pangan 2. Workshop akses pangan (penumbuhan, pengembangan, kemandirian) 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan akses pangan 4. Bantuan hibah fasilitasi kelembagaan akses pangan	50 Orang 190 Orang 50 Orang 10 Gkt @ 50 jt		Rp. 250.000.000,00	1. Sosialisasi kelembagaan akses pangan 2. Workshop akses pangan (penumbuhan, pengembangan, kemandirian) 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan akses pangan 4. Bantuan Hibah Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan	50 Orang 190 Orang 50 Orang 10 Gkt @ 50 jt	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.20.002	Analisis Distribusi Dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	FGD Analisa Data Distribusi dan Harga Pangan Informasi harga pangan melalui media Sosialisasi harga pangan	40 Orang, 1 hari, 1 lap 2 jenis media 30 Orang, 1 hari, 1 lap		Rp. 80.000.000,00	FGD Analisa Data Distribusi dan Harga Pangan Informasi harga pangan melalui media Sosialisasi harga pangan	40 Orang, 1 hari, 1 lap 2 jenis media 30 Orang, 1 hari, 1 lap	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : menyesuaikan sesuai SHBJ Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.20.003	Pemberdayaan Dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	FGD kewirusahaan Gapokan pra penumbuhan kapasitas LDPM Peningkatan kapasitas LDPM Sosialisasi LDPM	40 Org 100 Org 40 Org		Rp. 165.000.000,00	FGD kewirusahaan Gapokan pra penumbuhan kapasitas LDPM Peningkatan Kapasitas LDPM Sosialisasi LDPM	40 Org 100 Org 40 Org	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 165.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Temu kemitraan gapoktan kemandirian	55 Org			Temu Kemitraan gapoktan Kemandirian	55 Org				
1.21.1.21.01.20.004	Analisis Pasokan Dan Akses Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	1. Sosialisasi pasokan dan akses pangan 2. Apresiasi pasokan dan akses pangan 3. Data hasil pemantauan pasokan dan akses pangan	25 Orang 25 Orang 2 macam		Rp. 100.000.000,00	1. Sosialisasi pasokan dan akses pangan 2. Apresiasi pasokan dan akses pangan 3. Data hasil pemantauan pasokan dan akses pangan	25 Orang 25 Orang 2 macam	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.21.1.21.01.20.005	Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	FGD Supply Chain Ketahanan Pangan	35 Orang		Rp. 15.000.000,00	FGD Supply Chain Ketahanan Pangan	35 Orang	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
Total							Rp. 9.555.674.420,00				Rp. 9.555.674.420,00	Rp. 0,00	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Badan Perputakaan dan Arsip Daerah															
Kode	Urutan /Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
1	Wajib	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
1.24	Kearsipan														
1.24.01	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah														
1.24.1.26.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN							Rp. 708.265.800,00				Rp. 708.265.800,00	Rp. 0,00		
1.24.1.26.01.15.02	Pengembangan Arsip Dinamis	Optimalisasi pengembangan arsip SKPD DIY	20 SOPD	Pengelolaan arsip vital	5 SKPD	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 415.966.500,00	Pengelolaan arsip vital	5 SKPD	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 415.966.500,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
					5500 Berkas			Pengolahan arsip dinamis in-aktif	5500 Berkas						
					10000 Berkas			Penilaian dan Penyusunan arsip	10000 Berkas						
					1 pedoman			Penyusunan Pedoman Arsip Dinamis	1 pedoman						
1.24.1.26.01.15.06	Pengembangan dan Pemeliharaan Kearsipan	Optimalisasi pengembangan arsip SKPD DIY	20 SOPD	Lomba Bidang Kearsipan	3 kategori	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 292.299.300,00	Lomba Bidang Kearsipan	3 kategori	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 292.299.300,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
					5 LKD Kab./Kota			Monerv dan Pendampingan LKD Kab./Kota	5 LKD Kab./Kota						
					80 SKPD/UPTD			Pembinaan dan Monerv SKPD Pemda DIY	80 SKPD/UPTD						
					5 SKPD			Pendampingan Keselapan Penyusutan SKPD Pemda DIY	5 SKPD						
					50 Orang			Pengembangan Mitra Kerja Bidang Kearsipan	50 Orang						
1.24.1.26.01.16	PROGRAM PENYELAYAN DAN PEMELIHARAAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH*						Rp. 0,00					Rp. 141.000.000,00	Rp. 141.000.000,00		
1.24.1.26.01.16.024	Pemindahan Arsip Insansi yang Digabung/Diapus /Dibuat satunya	Bertambahnya karsian arsip sebagai sumber budaya	11 %	Terdatanya Arsip Insansi yang Digabung/Diapus /Dibuat satunya	0 -	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 0,00	Terdatanya Arsip Insansi yang Digabung/Diapus /Dibuat satunya	23 Instansi	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 141.000.000,00	Rp. 141.000.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Perda Kelenbagaan Baru	
1.24.1.26.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI						Rp. 625.307.300,00					Rp. 620.837.300,00	(-) Rp. 4.470.000,00		
1.24.1.26.01.18.013	Promosi dan Sosialisasi Kearsipan	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Media Cetak	1 Paket	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 298.022.500,00	Media Cetak	1 Paket	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 298.022.500,00	Rp. 0,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
1.24.1.26.01.18.028	Alih Media dan Digitalisasi arsip	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Alih media dan digitalisasi arsip	1 Paket	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 238.022.500,00	Alih media dan digitalisasi arsip	1 Paket	Badan Perustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 235.582.500,00	Rp. 4.440.000,00	(-) Rp. 4.440.000,00		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/ Berkurang
(1)	Statis		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				arsip sebagai sumber informasi	hasil akuisisi	500 lembar	dan Arsip Daerah		Alih media/digitalisasi arsip foto	500 lembar	dan Arsip Daerah			Penambahan : -
					Alih media/digitalisasi arsip foto	20000 lembar			Alih media/digitalisasi arsip tekstual	20000 lembar				
					buku daftar alih media arsip	1 buah			buku daftar alih media arsip	1 buah				
1.24.1.26.01.18.030	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SINKS)	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Entry data	4000 entry	25 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 89.262.300,00	Entry data	4000 entry	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 89.232.300,00	(-) Rp. 30.000,00	Reguler APBD
					FGD	5 LKD			FGD	25 Orang				
					Pengembangan dan replikasi SINKS di BPAD DIY				Pengembangan dan replikasi SINKS di BPAD DIY					
1.26	Perpustakaan													
1.26.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.26.1.26.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 3.633.460.000,00				Rp. 3.532.179.550,00 (-) Rp. 101.280.450,00		
1.26.1.26.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	pengiriman paket	1 tahun	6500 surat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 7.500.000,00	pengiriman paket	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 7.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD
				Surat keluar	Surat masuk	1850 surat			surat keluar	6500 surat				
				Surat masuk					surat masuk	1850 surat				
1.26.1.26.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran tagihan langganan internet dedicate 1 sambungan	12 bulan	12 bulan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 1.450.000.000,00	Pembayaran tagihan langganan internet dedicate 1 sambungan	12 bulan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 1.450.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD
				Pembayaran tagihan rekening air 2 sambungan	12 bulan				Pembayaran tagihan rekening air 2 sambungan	12 bulan				
				Pembayaran tagihan rekening listrik 8 sambungan	12 bulan				Pembayaran tagihan rekening listrik 8 sambungan	12 bulan				
				Pembayaran tagihan rekening telepon 13 sambungan	12 bulan				Pembayaran tagihan rekening telepon 13 sambungan	12 bulan				
1.26.1.26.01.01.004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemeriksaan kesehatan PNS	90 Orang	90 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 32.000.000,00	Pemeriksaan kesehatan PNS	90 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 32.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD
1.26.1.26.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran pajak kendaraan dan jin kelakan jalan	23 unit	23 unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 15.000.000,00	Pembayaran pajak kendaraan dan jin kelakan jalan	23 unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD
1.26.1.26.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honor Pengelola Keuangan	10 Orang	10 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 41.854.400,00	Honor Pengelola Keuangan	10 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 69.154.400,00	Rp. 24.300.000,00	Reguler APBD
				Honorarium Pengelola Barang/Aset	4 Orang	4 Orang			Honorarium Pengelola Barang/Aset	4 Orang				Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : - Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -<

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang		Sumber Dana	Keterangan
Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	(13)	(13)	(15)
				(5)	(6)			(9)	(10)					
1.26.1.26.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium Pengelola Kepegawalan	3 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 686.000.000,00	Kebersihan kantor	6 lokasi	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 691.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan : Belanja jasa kantor (retribusi/pajak)
1.26.1.26.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	53 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 43.545.600,00		53 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 43.545.600,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	barang cetakan dan pengandaan - 2.198 amplop - 15 buku - 100 bendel B-26 - 124 lembar	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 30.500.000,00		1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 30.500.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat listrik dan elektronik	16 macam	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 55.000.000,00		16 macam	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 55.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 5.250.000,00		12 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 5.250.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	koran majalah peraturan per undang-undangan	12 bulan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 6.750.000,00		12 bulan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 6.750.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Ekstra fooding bagi prns	80 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 225.000.000,00		80 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 225.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Facilitasi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 378.000.000,00		1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 251.317.550,00	Reguler APBD	(-) Rp. 126.682.450,00	Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Efisiensi belanja cetak pengandaan, rapat, makan minum, narsumber Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Petugas Keamanan Kantor di 6 Unit (lokasi)	21 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 504.560.000,00		12 bulan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 500.662.000,00	Reguler APBD	(-) Rp. 3.898.000,00	Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Efisiensi belanja jasa dan tiket Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.028	Analisis Kebutuhan SKM LUPTD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dokumentasi analisis SKM	1 dokumen	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 49.500.000,00		1 dokumen	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 49.500.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan :-
1.26.1.26.01.01.029	Pengadaan Arsip Dinamis SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Arsip Dinamis teratai	1 Daftar Arsip Inaktif BPAD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 100.000.000,00		1 Daftar Arsip Inaktif BPAD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 100.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Penambahan :-
1.26.1.26.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						Rp. 8.259.930.000,00				Rp. 8.213.965.100,00	(-) Rp. 45.964.900,00		
1.26.1.26.01.02.007	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	AC HDD Komputer PC	2300 unit 6 unit 10 unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 246.200.000,00		2300 unit 6 unit 10 unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 200.235.100,00	Reguler APBD	(-) Rp. 45.964.900,00	Efisiensi Kegiatan :- Efisiensi DPA :- Efisiensi belanja modal (server) Penambahan :-

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		sarana prasarana aparatur		LCD Proyektor	1 unit			LCD Proyektor	1 unit					
				Notebook	2 unit			Notebook	2 unit					
				notebook hybrid	2 unit			notebook hybrid	2 unit					
				UPS	5 unit			UPS	5 unit					
				Wireless micropone	1 unit			Wireless micropone	1 unit					
1.26.1.26.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan gedung kantor	6 lokasi	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 408.000.000,00	Pemeliharaan gedung kantor	6 lokasi	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 408.000.000,00	Rp. 0.00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -
1.26.1.26.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara	8 unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 500.000.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara	8 unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0.00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara	15 unit			Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara	15 unit					
1.26.1.26.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perencanaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (5 lokasi)	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 75450.000,00	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (5 lokasi)	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 75450.000,00	Rp. 0.00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -
1.26.1.26.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	10 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 50.000.000,00	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	10 unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0.00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -
1.26.1.26.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Alat-alat rumah tangga terpelihara	5 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 15.000.000,00	Alat-alat rumah tangga terpelihara	5 jenis	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0.00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -
1.26.1.26.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	2 lokasi	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 100.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	2 lokasi	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0.00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -
1.26.1.26.01.02.080	Pengembangan Teknologi Informasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengelolaan WEB BPAD DIY	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 100.000.000,00	Pengelolaan WEB BPAD DIY	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0.00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -
1.26.1.26.01.02.089	Pemasangan Jaringan Listrik	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terselenggaranya jaringan listrik yang baik dan memadai	1 lokasi	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 90.000.000,00	Terselenggaranya jaringan listrik yang baik dan memadai	1 lokasi	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0.00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Perubahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/ Berkurang
1.26.1.26.01.02.090	Pembangunan Depo/Gedung Arsip	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembangunan Gedung Depo Arsip	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 4.975.585.000,00	Pembangunan Gedung Depo Arsip	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 4.975.585.000,00	Rp. 0,00	(13)	(15)
1.26.1.26.01.02.091	Pemeliharaan Jaringan Telpon dan Air	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya jaringan telepon, air dan listrik	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 10.000.000,00	Terpeliharanya jaringan telepon, air dan listrik	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.02.092	Perserbian Layanan Perpustakaan di Gedung Baru	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	lomba-lomba pameran buku pentas budaya dan kreasi masyarakat seminar	5 jenis 5 Hari 6 Hari 2 Kali	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 1.489.695.000,00	lomba-lomba pameran buku pentas budaya dan kreasi masyarakat seminar	5 jenis 5 Hari 6 Hari 2 Kali	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 1.489.695.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.02.093	Relokasi Layanan Perpustakaan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Layanan perpustakaan di Unit JEC	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 200.000.000,00	Layanan perpustakaan di Unit JEC	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 1.017.141.450,00				Rp. 1.008.891.450,00	(-) Rp. 8.250.000,00		
1.26.1.26.01.05.004	Tertwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	100 %	Terkelolanya aset di BPAD DIY	1 dokumen	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 30.000.000,00	Terkelolanya aset di BPAD DIY	1 dokumen	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Pustakawan dan Arsiparis	100 %	100 %	FGD Arsiparis dan Pustakawan (140 orang)	2 Kali	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 102.899.200,00	FGD Arsiparis dan Pustakawan (140 orang)	2 Kali	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 94.649.200,00	(-) Rp. 8.250.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : Honor um Penambahan : -
1.26.1.26.01.05.032	Pengembangan Kualitas SDM	100 %	100 %	Bimtek Layanan Prima	25 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 133.434.250,00	Bimtek Layanan Prima	25 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 133.434.250,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.05.033	Pengembangan ISO	100 %	100 %	Bimtek Penatausahaan Keuangan	25 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 99.022.500,00	Bimtek Penatausahaan Keuangan	25 Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 99.022.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.05.079	Pengembangan Program Perpustakaan dan	100 %	100 %	Konsolidasi Program Pengembangan	4 Kali	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 151.785.500,00	Konsolidasi Program Pengembangan	4 Kali	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 151.785.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Kearsipan	sumberdaya apatur		Perpustakaan dan Kearsipan		Daerah		Perpustakaan dan Kearsipan		Daerah			
				Rakor Kearsipan	1 kali			Rakor Kearsipan	1 kali				
				Rakor Perpustakaan	1 kali			Rakor Perpustakaan	1 kali				
1.26.1.26.01.05.082	Promosi dan Publikasi Perpustakaan dan Kearsipan (Pajak Rokok)	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Baliho	4 titik	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 500.000.000,00	Baliho	4 titik	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 500.000.000,00	Pajak Rokok	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Brosur/filet	5000 lembar			Brosur/filet	5000 lembar				
				Media Cetak	10 Kali			Media Cetak	10 kali				
				Pameran	2 Kali			Pameran	2 kali				
				Publikasi Media Radio	20 Kali			Publikasi Media Radio	20 kali				
				Publikasi Media TV	10 Kali			Publikasi Media TV	10 kali				
				Spanduk	100 buah			Spanduk	100 buah				
				Video Tron	2 titik			Video Tron	2 titik				
1.26.1.26.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPUSTAKAAN, CAPTIAN KEUANGAN						Rp. 201.141.900,00				Rp. 194.076.900,00 (-)		
1.26.1.26.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penatuausahaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	LAKIP Skor A	1 dokumen	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 11.000.000,00	LAKIP Skor A	1 dokumen	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 11.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Laporan Tahunan Skor A	1 dokumen			Laporan Tahunan Skor A	1 dokumen				
1.26.1.26.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatuausahaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Fungsional	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 10.000.000,00	Laporan Fungsional	1 tahun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 10.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Laporan Semester/Prognosi	1 tahun			Laporan Semester/Prognosi	1 tahun				
				Laporan Tahunan	1 tahun			Laporan Tahunan	1 tahun				
1.26.1.26.01.06.018	Rencana Program Kegiatan SKPD Pengembangan Data Teknologi Informasi	Terwujudnya penatuausahaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan kegiatan SKPD (RKA, RKAJ, Renja dan RK4)	4 dokumen	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 150.000.000,00	Dokumen perencanaan kegiatan SKPD (RKA, RKAJ, Renja dan RK4)	4 dokumen	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 142.935.000,00 (-)	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengembangan data dan informasi GIS Perpustakaan	1200 data perustakaan			Pengembangan data dan informasi GIS Perpustakaan	1200 data perustakaan				
1.26.1.26.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Terwujudnya penatuausahaan keuangan dan	100 %	Expose Hasil Monitoring	2 Kali	Badan Perpustakaan dan Arsip	Rp. 30.141.900,00	Expose Hasil Monitoring	2 kali	Badan Perpustakaan dan Arsip	Rp. 30.141.900,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah														
Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
	Program Kegiatan SKPD	manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan kegiatan BPAD dan fungsi SKPD		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPAD dan DIT	12 Kali	Daerah			12 kali	Daerah				
1.26.1.26.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI PERADABAN BUDAYA TIMUR						Rp. 23.109.750.000,00				Rp. 23.109.750.000,00		Rp. 0,00	
1.26.1.26.01.15.001	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Peningkatan fasilitas perpustakaan	85 %	Pembangunan Gedung Perpustakaan	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 23.109.750.000,00	Pembangunan Gedung Perpustakaan	1 Paket	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 23.109.750.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.16	PENGEMBANGAN DAN PEMBIKINAN PERPUSTAKAAN *						Rp. 5.446.936.750,00				Rp. 5.446.176.750,00		(-) Rp. 760.000,00	
1.26.1.26.01.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Hunting koleksi Pengadaan Bahan Pustaka	4 provinsi 1000 Judul 14000 Judul 100000 eksemplar	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 1.557.605.000,00	Hunting koleksi Pengadaan Bahan Pustaka	4 provinsi 1000 Judul 14000 Judul 100000 eksemplar	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 1.557.605.000,00	Reguler APBD	(-) Rp. 760.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.16.011	Kerjasama Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Academic List BPAD DIT	1 terbitan @ 15 eksemplar, 10 CD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 459.156.750,00	Academic List BPAD DIT	1 terbitan @ 15 eksemplar, 10 CD	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 459.156.750,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bibliografi Daerah DIY	4 terbitan @ 15 eksemplar, 10 CD			Bibliografi Daerah DIY	4 terbitan @ 15 eksemplar, 10 CD					
				Bimtek perpustakaan	180 Orang			Bimtek perpustakaan	180 Orang					
				FGD Kerjasama Perpustakaan	50 peserta			FGD Kerjasama Perpustakaan	50 peserta					
				Katalog Induk Daerah	1 terbitan @ 15 eksemplar, 10 CD			Katalog Induk Daerah	1 terbitan @ 15 eksemplar, 10 CD					
				Modul dengan perpustakaan di DIY	15 lembaga			Modul dengan perpustakaan di DIY	15 lembaga					
				Pengembangan Mitra Kerja Perpustakaan	1 dokumen			Pengembangan Mitra Kerja Perpustakaan	1 dokumen					
1.26.1.26.01.16.015	Pengembangan Koleksi Peradaban Budaya Timur	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Duplikasi khasanah arsip dan bahan pustaka tentang peradaban budaya timur	14 tema	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 308.290.000,00	Duplikasi khasanah arsip dan bahan pustaka tentang peradaban budaya timur	14 tema	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 308.290.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penelusuran tentang peradaban budaya timur	14 lokasi			Penelusuran tentang peradaban budaya timur	14 provinsi					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
1.26.1.26.01.16.016	Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Bmtek pengelola perpustakaan sasaran	86 orang pengelola perpustakaan desa	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 3.121.125.000,00	Bmtek pengelola perpustakaan sasaran	86 orang pengelola perpustakaan desa	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 3.121.125.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.26.1.26.01.17	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA			Paket hibah buku, rak buku, buku inventaris, dan supplise	86 perpustakaan desa		Rp. 3.120.399.350,00				Rp. 3.046.949.350,00	(-) Rp. 73.450.000,00	
1.26.1.26.01.17.011	Layanan perpustakaan	Peningkatan pemustaka	20 %	Alih huruf dan alih bahasa	1500 lembar	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 2.857.207.500,00	Alih huruf dan alih bahasa	1500 lembar	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 2.788.232.500,00	(-) Rp. 68.975.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Belanja bahan material, jasa kantor, cetak, modal
				Alih media buku langka	95000 lembar			Alih media buku langka	95000 lembar				
				Fumigasi	1500 m3			Fumigasi	1500 m3				
				Kotak pelindung	1000 buah			Kotak pelindung	1000 buah				
				Layanan berbasis TI	5 anggota baru JLA			Layanan berbasis TI	5 anggota baru JLA				
				Layanan kelling dan paket	12 lokasi			Layanan kelling dan paket	12 lokasi				
				Layanan Menetap	3 unit			Layanan Menetap	3 unit				
				Layanan Rumah Belajar Modern	1 unit			Layanan Rumah Belajar Modern	1 unit				
				Pengembangan Center of Excellence	1 unit			Pengembangan Center of Excellence	1 unit				
				Penyempulan eksemplar	33300			Penyempulan eksemplar	33300				
				Perawatan buku eksemplar	250000			Perawatan buku eksemplar	250000				
				Pojok Baca	5 lokasi ruang publik			Pojok Baca	5 lokasi ruang publik				
				RFID Tag	54000 buku			RFID Tag	54000 buku				
1.26.1.26.01.17.012	Pengembangan Minat Baca	Peningkatan pemustaka	20 %	Bedah Buku Lomba Perpustakaan	2 Kali 3 macam lomba	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 263.191.850,00	Bedah Buku Lomba Perpustakaan	2 Kali 3 macam lomba	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp. 258.716.850,00	(-) Rp. 4.475.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi honor peserta bedah buku Penambahan : -
Total							Rp. 46.122.332.550,00				Rp. 46.022.092.200,00	(-) Rp. 100.240.350,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pertanian															
Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Berambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tokol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)	
2	Pilihan Pertanian														
2.01	Pertanian														
2.01.01	Dinas Pertanian														
2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						Rp. 1.973.305.816,00				Rp. 1.989.843.316,00				
2.01.2.01.01.01.001	Penyediaan Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman Dokumen Surat keluar Surat Masuk	7500 buah 8.899 buah 6.315 buah	Dinas Pertanian	Rp. 1.800.000,00	Pengiriman Dokumen Surat keluar Surat Masuk	7500 buah 8.899 buah 6.315 buah	Dinas Pertanian	Rp. 1.800.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemasangan listrik baru Pembayaran tagihan internet Pembayaran tagihan rekening air Pembayaran tagihan rekening listrik Pembayaran tagihan rekening telepon 23 sambungan	1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dinas Pertanian	Rp. 699.324.000,00	Pemasangan listrik baru Pembayaran tagihan internet Pembayaran tagihan rekening air Pembayaran tagihan rekening listrik Pembayaran tagihan rekening telepon 23 sambungan	1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dinas Pertanian	Rp. 715.861.500,00	Rp. 16.537.500,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Kenaikan tarif dasar listrik sehingga biaya bulanan naik	
2.01.2.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 3 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 4 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 6 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 1 unit	101 unit 1 unit 25 unit 1 unit 1 unit	Dinas Pertanian	Rp. 26.100.000,00	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 3 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 4 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 6	101 unit 1 unit 25 unit 1 unit	Dinas Pertanian	Rp. 26.100.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium pengelola barang Honorarium pengelola kepegawaian Honorarium pengelola keuangan Kebersihan gedung kantor pada 12 unit	11 Orang 8 Orang 34 Orang 1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 113.429.000,00	Honorarium pengelola barang Honorarium pengelola kepegawaian Honorarium pengelola keuangan Kebersihan gedung kantor pada 12 unit	11 Orang 8 Orang 34 Orang 1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 113.429.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan gedung kantor pada 12 unit	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 331.796.000,00	Kebersihan gedung kantor pada 12 unit	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 331.796.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan ATK	125 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 111.158.200,00	Penyediaan ATK	125 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 111.158.200,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.01.011	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	barang cetakan penggandaan perjilidan	66 jenis 195.368 lembar 80 Jilid	Dinas Pertanian	Rp. 91.993.150,00	barang cetakan penggandaan perjilidan	66 jenis 195.368 lembar 80 Jilid	Dinas Pertanian	Rp. 91.993.150,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.01.2.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	40 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 34.000.000,00	komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	40 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 34.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengisian tabung gas	12 Kali	Dinas Pertanian	Rp. 25.176.200,00	Pengisian tabung gas	12 Kali	Dinas Pertanian	Rp. 25.176.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Baku dan Keperluan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengisian tabung gas	7 buah	Dinas Pertanian	Rp. 25.800.000,00	Pengisian tabung gas	7 buah	Dinas Pertanian	Rp. 25.800.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran	40 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 59.950.000,00	Penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran	40 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 59.950.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	Dinas Pertanian	Rp. 349.790.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	Dinas Pertanian	Rp. 349.790.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/empat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	Dinas Pertanian	Rp. 98.489.266,00	Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	Dinas Pertanian	Rp. 98.489.266,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan jasa keamanan kantor	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 4.500.000,00	Penyediaan jasa keamanan kantor	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 4.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APAKATUR						Rp. 12.511.549.988,00				Rp. 12.494.465.988,00		
2.01.2.01.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase Pelayanan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Belanja modal / pengadaan konstruksi/pembelian pagar tanaman hias daun di unit ngiklsari	1 Paket	Dinas Pertanian	Rp. 6.662.444.710,00	Belanja modal / pengadaan konstruksi/pembelian pagar tanaman hias daun di unit ngiklsari	1 Paket	Dinas Pertanian	Rp. 6.645.360.710,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Belanja modal / pengadaan konstruksi/pembelian pagar tanaman hias daun di unit ngiklsari	1 Paket			Belanja modal / pengadaan konstruksi/pembelian pagar tanaman hias daun di unit ngiklsari	1 Paket				
				Gedung kantor UPTD BBPRTDK	2 unit			DED gedung basement dan gedung pendidikan UPTD BPSDMP	1 dokumen				
				Pembangunan gedung kantor induk tahap II Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, Gudang Induk, pagar UPTD BPTP gesikan dan parkir kendaraan roda 2 dan 4, Rumah sampah dan food court Dinas Pertanian	5 Paket			Gedung kantor UPTD BBPRTDK	2 unit				
				Pembangunan konstruksi/pembelian pagar kantor unit gading	1 Paket			Pembangunan gedung kantor induk tahap II Dinas Pertanian DIY, UPTD BPSDMP, Gudang Induk, pagar UPTD BPTP	5 Paket				

Nama SKPD : Dinas Pertanian

696

LAPORAN PERUBAHAN

Nama SKPD : Dinas Pertanian															
Kode	Usuran /Program/ Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan		
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)		
2.01.2.01.01.02.024	dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur			Pemeliharaan instalasi air bersih UPTD BPSOMP	1 Paket			Pemeliharaan instalasi air bersih UPTD BPSOMP	1 Paket				Penambahan : -		
				Pemeliharaan kandang	57 m2			Pemeliharaan kandang	57 m2						
				Pemeliharaan Tanaman	240 oh			Pemeliharaan Tanaman	240 oh						
				Pemeliharaan/rehab pagar (pengecatan) unit gading	1 Paket			Pemeliharaan/rehab pagar (pengecatan) unit gading	1 Paket						
				Pemeliharaan/rehab pagar unit tambak	1 Paket			Pemeliharaan/rehab pagar unit tambak	1 Paket						
				Pemeliharaan/rehab rumah tanaman has daun song of india unit ngipksari	1 Paket			Pemeliharaan/rehab rumah tanaman has daun song of india unit ngipksari	1 Paket						
				Rental Tanaman Indoor	12 bulan			Rental Tanaman Indoor	12 bulan						
				Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 2	101 unit	Dinas Pertanian	Rp. 761.000.000,00	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 2	101 unit	Dinas Pertanian	Rp. 761.000.000,00	Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 3	1 unit			Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 3	1 unit						
Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 4	26 unit			Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 4	26 unit										
2.01.2.01.01.02.026	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor			Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 6	1 unit			Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 6	1 unit						
				Pengecatan kendaraan dinas roda 4	1 unit			Pengadaan kendaraan dinas roda 4	2 unit						
								Pengecatan kendaraan dinas roda 4	1 unit						
				Biaya Pindah UPTD BPTP	1 Paket	Dinas Pertanian	Rp. 50.000.000,00	Biaya Pindah UPTD BPTP	1 Paket	Dinas Pertanian	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
Pemeliharaan AC	75 unit			Pemeliharaan AC	75 unit										
Pemeliharaan lemari Es	5 unit			Pemeliharaan lemari Es	5 unit										
2.01.2.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor terpelihara	9 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 45.000.000,00	Peralatan gedung kantor terpelihara	9 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.02.042	Rehabilitasi Gedung Berat Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehab gedung kantor	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 250.000.000,00	Rehab gedung kantor	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.02.046	Pengelolaan Naskah Dinas	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Belanja ATK	6 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 55.631.000,00	Belanja ATK	6 jenis	Dinas Pertanian	Rp. 55.631.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Belanja cetak	10 jenis			Belanja cetak	10 jenis						
				Belanja modal ahnari kaca	2 unit			Belanja modal ahnari kaca	2 unit						
				Belanja modal rak asrip	7 unit			Belanja modal rak asrip	7 unit						
				honorarium tim pelaksana kegiatan	112 OB			honorarium tim pelaksana kegiatan	112 OB						
				Makan dan minum rapat	750 os			Jilid	5 buku						

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program Tolok Ukur	Target	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
				Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				Pengjilidan	3000			Makan dan minum rapat	750 os					
				Penjilidan	5 buku			Penggandaan	3000 lembar					
2.01.2.01.01.02.047	Pembangunan / rehabilitasi renovasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perbaikan sarana pendukungnya (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 2 untuk petugas teknis benih	10 unit	Dinas Pertanian	Rp. 2.773.453.278,00	Kendaraan roda 2 untuk petugas teknis benih	10 unit	Dinas Pertanian	Rp. 2.773.453.278,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Kontribusi jalan usaha tani di unit Ngipikarsi	1 Paket			Kendaraan roda 3 untuk petugas teknis benih	4 unit					
				Pembelian Kendaraan roda 3 untuk Petugas tekne benih	4 unit			Konblok jalan usaha tani di unit Ngipikarsi	1 Paket					
				Rehab gedung kantor BPPTPH	1 Paket			Rehab gedung kantor BPPTPH	1 Paket					
				Rehab gudang unit Gading	1 Paket			Rehab gudang unit Gading	1 Paket					
				Rehab gudang unit Wijilan	1 Paket			Rehab gudang unit Wijilan	1 Paket					
				Saluran air/ irigi di unit Berbah	1 Paket			Saluran air/ irigi di unit Berbah	1 Paket					
				Saluran air/ rigasi di unit Gading	1 Paket			Saluran air/ rigasi di unit Gading	1 Paket					
				Taut jalan usaha tani di Ngipikarsi	1 Paket			Taut jalan usaha tani di Ngipikarsi	1 Paket					
2.01.2.01.01.02.048	Pembangunan/rehabilitasi UPTD Proteksi Tanaman dan Sarana pendukungnya (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Sepeda Motor	20 unit	Dinas Pertanian	Rp. 460.000.000,00	Pengadaan Sepeda Motor	20 unit	Dinas Pertanian	Rp. 460.000.000,00	Rp. 0,00	DAK	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.02.049	Pembangunan/rehabilitasi /renovasi UPTD perbibitan dan laboratorium hewan dan sarana pendukungnya (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan laboratorium kesehatan hewan	1 Paket	Dinas Pertanian	Rp. 782.000.000,00	Peralatan laboratorium kesehatan hewan	1 Paket	Dinas Pertanian	Rp. 782.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Rehabilitasi bangunan laboratorium kesehatan hewan	1 Paket			Rehabilitasi bangunan laboratorium kesehatan hewan	1 Paket					
2.01.2.01.01.05	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 19.559.400,00				Rp. 19.559.400,00	Rp. 0,00		
2.01.2.01.01.05.007	Pembinaan dan Penilaian Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Terwujudnya penatausahaan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	5 Kali	Dinas Pertanian	Rp. 19.559.400,00	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	5 Kali	Dinas Pertanian	Rp. 19.559.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.06	PROGRAM Peningkatan PERENCANAAN SISTEM PELAKSANAAN KEMENTERIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 261.671.350,00				Rp. 261.671.350,00	Rp. 0,00		
2.01.2.01.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen sumberdaya aparatur program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Lakip 2014 dengan nilai A (75-85)	1 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 4.095.000,00	Lakip 2014 dengan nilai A (75-85)	1 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 4.095.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
2.01.2.01.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen keuangan berdasarkan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesejanaan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Dinas Pertanian	Rp. 8.875.600,00	Kesejanaan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Dinas Pertanian	Rp. 8.875.600,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Road Map Pengembangan Pertanian Organik	1 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 209.222.250,00	Dokumen Perencanaan Anggaran 2015 dan Dokumen Statistik	2 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 209.222.250,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan :	
2.01.2.01.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 39.478.500,00	ROPK, RENJA, RKA, DPA, Sistem Informasi	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 39.478.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN						Rp. 1.921.494.650,00				Rp. 1.921.494.650,00			
2.01.2.01.01.17.007	Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah	3 Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3	Mengikuti pameran di dalam dan luar provinsi DIY untuk promosi produk unggulan DIY	6 pameran		Rp. 575.000.000,00	Mengikuti pameran di dalam dan luar provinsi DIY untuk promosi produk unggulan DIY	6 pameran	Dinas Pertanian	Rp. 575.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.01.2.01.01.17.021	Penyebarluasan Informasi Perbenihan	3 Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3	Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui barang cetak (leaflet)	250 lembar	Dinas Pertanian	Rp. 43.895.800,00	Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui barang cetak (leaflet)	250 lembar	Dinas Pertanian	Rp. 43.895.800,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui buku perbenihan	35 buah			Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui buku perbenihan	35 buah					
				Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui media cetak	4 kali			Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui media cetak	4 kali					
				Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui siaran di Televisi	1 kali			Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui siaran di Televisi	1 kali					
				Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui siaran radio	4 kali			Informasi pengawasan dan sertifikasi benih melalui siaran radio	4 kali					
2.01.2.01.01.17.023	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	3 Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3	Bantuan hibah peralatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	6 kelompok	Kalbawang Kokap Nanggulan	Rp. 227.269.100,00	Bantuan hibah peralatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	6 kelompok	Kalbawang Kokap Nanggulan	Rp. 227.269.100,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Terlaksananya bintek pasca panen dan	180 Orang			Terlaksananya bintek pasca panen dan	180 Orang					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.01.2.01.01.17.024	Peranginan Pascapanen dan Pengalihan Hasil Peternakan	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3. Komoditas	pengalihan hasil peternakan Bantuan hibah peralatan pasca panen dan pengalihan hasil peternakan	3 kelompok peternakan	Dinas Pertanian	Rp. 78.753.100,00	Bantuan hibah peralatan pasca panen dan pengalihan hasil peternakan	3 kelompok peternakan	Dinas Pertanian	Rp. 78.753.100,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.17.025	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3. Komoditas	Bintek dan sosialisasi pasca panen dan pengalihan hasil (4 angkatan)	120 Orang			Bintek dan sosialisasi pasca panen dan pengalihan hasil (4 angkatan)	120 Orang				
2.01.2.01.01.17.025	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3. Komoditas	Pengambilan sampel campylobacter jejuni pada daging ayam	125 Sampel	Dinas Pertanian	Rp. 456.150.000,00	Pengambilan sampel campylobacter jejuni pada daging ayam	125 Sampel	Dinas Pertanian	Rp. 456.150.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengambilan sampel cemaran mikroba dan residu antibiotika pada daging ayam	365 Sampel			Pengambilan sampel cemaran mikroba dan residu antibiotika pada daging ayam	365 Sampel				
				Pengambilan sampel cemaran mikroba dan residu antibiotika pada daging sapi	220 Sampel			Pengambilan sampel cemaran mikroba dan residu antibiotika pada daging sapi	220 Sampel				
				Pengambilan sampel cemaran mikroba dan residu antibiotika pada susu sapi	110 Sampel			Pengambilan sampel cemaran mikroba dan residu antibiotika pada susu sapi	110 Sampel				
				Pengambilan sampel cemaran mikroba dan residu antibiotika pada telur	100 Sampel			Pengambilan sampel cemaran mikroba dan residu antibiotika pada telur	100 Sampel				
				Pengambilan sampel daging ayam tren	120 Sampel			Pengambilan sampel daging ayam tren	120 Sampel				
				Pengambilan sampel formalin pada daging ayam dan olahan	112 Sampel			Pengambilan sampel formalin pada daging ayam dan olahan	112 Sampel				
				Pengambilan sampel pemalsuan daging sapi/olahan dengan daging babi	160 Sampel			Pengambilan sampel pemalsuan daging sapi/olahan dengan daging babi	160 Sampel				
2.01.2.01.01.17.026	Peningkatan Mutu dan keamanan pangan	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3. Komoditas	Bintek pemotongan ternak hewan kurban	50 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 117.740.000,00	pembekalan pengawasan pemotongan ternak hewan kurban	200 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 117.740.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				pembekalan pengawasan pemotongan ternak hewan kurban	200 Orang			Bintek pemotongan ternak hewan kurban	50 Orang				
				Penyusunan SOP RPH (Mitra Praja Utama)	30 Orang			Penyusunan SOP RPH (Mitra Praja Utama)	30 Orang				
2.01.2.01.01.17.028	Peningkatan Mutu Hasil Peternakan (Kasual Peternakan)	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3. Komoditas	dokumen sistem mutu olahan hasil peternakan	3 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 247.686.650,00	dokumen sistem mutu olahan hasil peternakan	3 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 247.686.650,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				sertifikasi produk pangan organik	2 Sertifikat			sertifikasi produk pangan organik	2 sertifikat				
2.01.2.01.01.17.029	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Olahan Hasil Peternakan	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3. Komoditas	sosialisasi/Bintek penerapan jaminan mutu menuju SNI	30 peserta	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00	sosialisasi/Bintek penerapan jaminan mutu menuju SNI	30 peserta	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Terlaksananya klarifikasi dan sertifikasi PIRT	20 pelaku usaha			Terlaksananya klarifikasi dan sertifikasi PIRT	20 pelaku usaha				
				Terlaksananya media informasi tentang GMP	1 Paket			Terlaksananya media informasi tentang GMP	1 Paket				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
2.01.2.01.01.17.030	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	(3) Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	(4) 3 Komoditas	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13) Reguler APBD	(15) Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Informasi harga pasar harian, mingguan dan bulanan	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 75.000.000,00	Informasi harga pasar harian, mingguan dan bulanan	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 75.000.000,00			
				Informasi hasil analisa usaha tani komoditas pertanian	10 Komoditas		Informasi hasil analisa usaha tani komoditas pertanian	10 Komoditas						
2.01.2.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN*						Rp. 6.868.371.900,00				Rp. 6.864.571.900,00	(-) Rp. 3.800.000,00		
2.01.2.01.01.22.012	Pengembangan Ternak Kambing/Domba	Populasi peternakan	700516 AU	Bantuan pengembangan ternak kambing Bligon	5 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 214.889.300,00	Bantuan pengembangan ternak kambing Bligon	5 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 214.889.300,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bantuan pengembangan ternak kambing Perah	3 kelompok			Bantuan pengembangan ternak kambing Perah	3 kelompok					
				Bantuan pengembangan ternak kambing Perah	2 kelompok			Bantuan pengembangan ternak kambing Perah	2 kelompok					
				Bantuan pengembangan ternak kambing Bligon	60 Orang			Bantuan pengembangan ternak kambing Bligon	60 Orang					
				Bantuan pengembangan ternak kambing Bligon	30 Orang			Bantuan pengembangan ternak kambing Bligon	30 Orang					
				Bantuan pengembangan ternak kambing Perah	30 Orang			Bantuan pengembangan ternak kambing Perah	30 Orang					
2.01.2.01.01.22.013	Pengembangan Ternak Sapi Perah	Populasi peternakan	700516 AU	Bantuan pengembangan ternak sapi perah	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 83.962.600,00	Bantuan pengembangan ternak sapi perah	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 83.962.600,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	60 Orang			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	60 Orang					
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	10 kelompok			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	10 kelompok					
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	3 kelompok			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	3 kelompok					
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	30 Orang			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	30 Orang					
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	60 Orang			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	60 Orang					
2.01.2.01.01.22.014	Pengembangan Ternak Sapi Potong	Populasi peternakan	700516 AU	Bantuan pengembangan ternak sapi potong	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 794.740.000,00	Bantuan pengembangan ternak sapi potong	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 794.740.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	60 Orang			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	60 Orang					
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	10 kelompok			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	10 kelompok					
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	3 kelompok			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	3 kelompok					
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	30 Orang			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	30 Orang					
				Bantuan pengembangan ternak sapi potong	60 Orang			Bantuan pengembangan ternak sapi potong	60 Orang					
2.01.2.01.01.22.019	Pengembangan Semen Beku	Populasi peternakan	700516 AU	Penyediaan semen beku sapi	40000 dosis	Dinas Pertanian	Rp. 1.495.320.000,00	Penyediaan semen beku sapi	40000 dosis	Dinas Pertanian	Rp. 1.495.320.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.22.023	Pengembangan Pembibitan Ternak	Populasi peternakan	700516 AU	Terpeliharanya Bull	20 ekor			Terpeliharanya Bull	20 ekor	Dinas Pertanian	Rp. 2.691.600.000,00	(-) Rp. 3.800.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pemeliharaan ternak untuk menghasilkan bibit kambing/domba	85 ekor	4 kabupaten	Rp. 2.695.400.000,00	Pemeliharaan ternak untuk menghasilkan bibit kambing/domba	85 ekor	Dinas Pertanian				
				Pemeliharaan ternak untuk menghasilkan bibit sapi perah	62 ekor			Pemeliharaan ternak untuk menghasilkan bibit sapi perah	62 ekor					
				Pemeliharaan ternak untuk menghasilkan bibit sapi potong	24 ekor			Pemeliharaan ternak untuk menghasilkan bibit sapi potong	24 ekor					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
2.01.2.01.01.22.025	Pengembangan HPT di lahan marginal	Populasi peternakan	700516 AU	Bimtek pemeliharaan HMT Pembinaan kelompok pengembangan HMT	30 Orang 5 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 150.000.000,00	Bimtek pemeliharaan HMT	30 Orang 5 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.22.026	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	Populasi peternakan	700516 AU	Media sosialisasi Pembekalan Petugas URC Pengadaan obat hewan Vaksin ND	3000 lembar 30 Orang 680 bcto 500000 dosis	Dinas Pertanian	Rp. 306.060.000,00	Media sosialisasi Pembekalan Petugas URC Pengadaan obat hewan Vaksin ND	3000 lembar 30 Orang 680 bcto 500000 dosis	Dinas Pertanian	Rp. 306.060.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.22.027	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Strategis (Pengujian Laborators)	Populasi peternakan	700516 AU	Hasil Pengujian antrax pada sapi Hasil Pengujian antrax pada tanah Hasil Pengujian brucellosis pada sapi perah Hasil Pengujian helmintiasis Hasil Pengujian ND pada unggas Hasil Pengujian pulorum pada ayam Hasil Pengujian toxoplasmosis	278 ekor 25 Sampel 500 ekor 720 ekor 4 ekor 6 ekor 100 ekor	SKPD Dinas Pertanian	Rp. 554.490.000,00	Hasil Pengujian antrax pada sapi Hasil Pengujian antrax pada tanah Hasil Pengujian brucellosis pada sapi perah Hasil Pengujian helmintiasis Hasil Pengujian ND pada unggas Hasil Pengujian pulorum pada ayam Hasil Pengujian toxoplasmosis	278 ekor 25 Sampel 500 ekor 720 ekor 4 ekor 6 ekor 100 ekor	SKPD Dinas Pertanian	Rp. 554.490.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.22.029	Pengawasan Lalu Lintas Ternak	Populasi peternakan	700516 AU	Pengawasan pos lalu lintas ternak di 5 lokasi PLIT (Ngemplak, tempel, kalibawang, Temon JLS, Temon JLS)	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 236.170.000,00	Pengawasan pos lalu lintas ternak di 5 lokasi PLIT (Ngemplak, tempel, kalibawang, Temon JLS, Temon JLS)	1 tahun	Dinas Pertanian	Rp. 236.170.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.22.030	Pengembangan Bimtek HMT di UPTD BBPTDK	Populasi peternakan	700516 AU	Penyediaan bibit leguminosa Penyediaan stek rumput	10 polybag 100 stek	Dinas Pertanian	Rp. 187.340.000,00	Penyediaan bibit leguminosa Penyediaan stek rumput	10 polybag 100 stek	Dinas Pertanian	Rp. 187.340.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.22.033	Pengembangan Ternak Unggas	Populasi peternakan	700516 AU	Baruan hibah Bimtek budidaya tik	10 kelompok 60 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 150.000.000,00	Baruan hibah Bimtek budidaya tik	10 kelompok 60 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25	PROGRAM Peningkatan Kualitas S D M DAN KELEMBAGAN PETANI						Rp. 1.340.876.650,00				Rp. 1.340.876.650,00			
2.01.2.01.01.25.007	Diklat Agribisnis Peternakan	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (peternakan pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Peatihan agribisnis ayam buras bagi petani Peatihan agribisnis ayam buras bagi petugas	30 Orang 30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 65.000.000,00	Peatihan agribisnis ayam buras bagi petani Peatihan agribisnis ayam buras bagi petugas	30 Orang 30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.015	Pengujian Diklat	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (peternakan pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Terselenggara kegiatan pengujian kesediaan dan penyusunan modul oleh Widyaiswara	4 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 27.997.000,00	Terselenggara kegiatan pengujian kesediaan dan penyusunan modul oleh Widyaiswara	4 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 27.997.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.01.2.01.01.25.016	Temu Teknis Teknologi Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Terlaksana gelar karya pertanian oleh KWT/Gapoktan/Produken Alstian	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 40.000.000,00	Terlaksana gelar karya pertanian oleh KWT/Gapoktan/Produken Alstian	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 40.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.018	Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Terlathnya petani dalam bidang pengolahan hasil peternakan	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 73.000.000,00	Terlathnya petani dalam bidang pengolahan hasil peternakan	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 73.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.020	Diklat Organik Farming	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Diklat bagi petugas pendamping pengembangan organik farming	60 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Diklat bagi petugas pendamping pengembangan organik farming	60 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.024	Evaluasi Pasca Latihan dan Bimbingan Lanjut	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Terlaksana bimbingan lanjutan	8 judul diklat	Dinas Pertanian	Rp. 40.000.000,00	Terlaksana bimbingan lanjutan	8 judul diklat	Dinas Pertanian	Rp. 40.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.029	Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan bagi Petani/Penangkar	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan bagi Petani/Penangkar	90 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 104.955.050,00	Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan bagi Petani/Penangkar	90 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 104.955.050,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.031	Dukungan Praktek Lapangan dan Pengolahan Laboratorium	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Terpelihara laboratorium kultur jaringan dan laboratorium pengolahan hasil	2 Paket	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00	Terpelihara laboratorium kultur jaringan dan laboratorium pengolahan hasil	2 Paket	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.033	Diklat Integrated Farming	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Terlathnya petani dan petugas pendamping integrated farming	60 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Terlathnya petani dan petugas pendamping integrated farming	60 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.034	Diklat Pemadfadatan Limbah Peternakan sebagai Energi Alternatif	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Terlathnya petani dan petugas dalam pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber energi alternatif	60 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 69.550.000,00	Terlathnya petani dan petugas dalam pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber energi alternatif	60 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 69.550.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.01.2.01.01.25.035	Diklat Kewirausahaan bagi Generasi Muda	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1,7 %	Terlathnya generasi muda dalam bidang kewirausahaan pertanian	180 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 209.099.950,00	Terlathnya generasi muda dalam bidang kewirausahaan pertanian	180 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 209.099.950,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.036	Apresiasi perencanaan diklat pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1,7 %	Dokumen Apresiasi perencanaan diklat tahun 2015 dan usulan diklat tahun 2016	1 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 10.000.000,00	Dokumen Apresiasi perencanaan diklat tahun 2015 dan usulan diklat tahun 2016	1 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 10.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.037	Diklat Budidaya dan Pengendalian HMT	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1,7 %	Terlathnya petani dan petugas dalam budidaya dan pengendalian HMT	60 orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Terlathnya petani dan petugas dalam budidaya dan pengendalian HMT	60 orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.039	Diklat Mitigasi dan Perubahan Iklim	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1,7 %	Pelatihan di bidang mitigasi dan perubahan iklim bagi petani	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Pelatihan di bidang mitigasi dan perubahan iklim bagi petani	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.041	Pengkatan kelembagaan tingkat usaha	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1,7 %	Dokumen tentang data dan profil kelembagaan	3 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 139.550.050,00	Dokumen tentang data dan profil kelembagaan	3 dokumen	Dinas Pertanian	Rp. 139.550.050,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.043	Diklat Zoonosis	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1,7 %	Terlathnya petani dan petugas dalam pengendalian penyakit zoonosis dan PHMS	90 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 105.000.000,00	Terlathnya petani dan petugas dalam pengendalian penyakit zoonosis dan PHMS	90 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 105.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.25.044	Peningkatan Profesionalisme SDM Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1,7 %	Terselenggaranya magang bagi widyaiswara dan staf ke sumber teknologi	10 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 76.724.600,00	Terselenggaranya magang bagi widyaiswara dan staf ke sumber teknologi	10 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 76.724.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN						Rp. 4.176.936.825,00				Rp. 4.170.936.825,00	(-) Rp. 6.000.000,00	
2.01.2.01.01.29.001	Produksi pertanian pangan	2356600 ton		Data jaringan Irigasi tersier	4 unit	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00	Data jaringan Irigasi tersier	4 unit	Dinas Pertanian	Rp. 100.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
2.01.2.01.01.29.002	(1) (2) Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Sawah	(3) (4) Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	(5) Sekolah lapang reklamasi dan rehabilitasi lahan sawah dengan pupuk organik	(6) 2 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 179.607.900,00	(9) Sekolah lapang reklamasi dan rehabilitasi lahan sawah dengan pupuk organik	(10) 2 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 179.607.900,00	(13) Rp. 0,00	(15) Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Tereklamasi dan terhabilitasinya lahan sawah	60 Ha			Tereklamasi dan terhabilitasinya lahan sawah	60 Ha				
2.01.2.01.01.29.003	Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jalan Tesis	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Evaluasi P3A dan GP3A petani/pengendalian irigasi	8 kelompok 4 unit	4 kabupaten	Rp. 240.000.000,00	Evaluasi P3A dan GP3A petani/pengendalian irigasi	8 kelompok 4 unit	Dinas Pertanian	Rp. 240.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Sosialisasi tingkat DIY	50 Orang			Sosialisasi tingkat DIY	50 Orang				
				Sosialisasi tingkat bksasi	90 Orang			Sosialisasi tingkat bksasi	90 Orang				
2.01.2.01.01.29.004	Penanganan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	sertifikasi lahan sawah petani/pengendalian konservasi lahan pertanian produktif	500 bidang tanah	4 kabupaten	Rp. 268.999.900,00	kajian untuk menindaklanjuti penanganan lahan pertanian berkelanjutan	1 dokumen	4 kab	Rp. 262.999.900,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Saving dari Belanja Sertifikasi Penambahan : -
				Sosialisasi tingkat bksasi	300 Orang			Sosialisasi tingkat bksasi	300 Orang				
2.01.2.01.01.29.007	Pengembangan Padi Terasu	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	bantuan hibah	3 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 228.276.900,00	bantuan hibah	3 kelompok	Moyudan Nangulan Sedayu	Rp. 228.276.900,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Sosialisasi aplikasi teknologi padi terasud / bintek	75 Orang			Sosialisasi aplikasi teknologi padi terasud / bintek	75 Orang				
2.01.2.01.01.29.008	Pengembangan Alas Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Bintek pengembangan UPJA	50 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 445.750.000,00	Bintek pengembangan UPJA	50 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 445.750.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengadaan alsintan pompa air	9 unit			Pengadaan alsintan pompa air	9 unit				
				Pengadaan alsintan traktor roda 2	13 unit			Pengadaan alsintan traktor roda 2	13 unit				
2.01.2.01.01.29.010	Identifikasi Padi Hitam	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Deskript pada hitam (Identifikasi Padi Hitam)	1 varietas	Dinas Pertanian	Rp. 13.855.300,00	Deskript pada hitam (Identifikasi Padi Hitam)	1 varietas	Pundong	Rp. 13.855.300,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.011	Pelayaan Sertifikasi Padi dan Palawija	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	pemeriksaan dokumen persyaratan sertifikasi benih	25 produsen	Dinas Pertanian	Rp. 66.300.000,00	pemeriksaan dokumen persyaratan sertifikasi benih	25 produsen	Dinas Pertanian	Rp. 66.300.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				pemeriksaan sertifikasi benih	100 unit			pemeriksaan sertifikasi benih	100 unit				
				Pengambilan contoh benih	100 Sampel			Pengambilan contoh benih	100 Sampel				
				pengawasan label benih	100 Sampel			pengawasan label benih	100 Sampel				
2.01.2.01.01.29.013	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Terlaksana perbanyakan benih sumber jagung	2 Ha	Dinas Pertanian	Rp. 901.069.800,00	Terlaksana perbanyakan benih sumber jagung	2 Ha	Dinas Pertanian	Rp. 901.069.800,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Terlaksana perbanyakan benih sumber kacang hijau	1 Ha			Terlaksana perbanyakan benih sumber kacang hijau	1 Ha				
				Terlaksana perbanyakan benih sumber kacang tanah	1 Ha			Terlaksana perbanyakan benih sumber kacang tanah	1 Ha				
				Terlaksana perbanyakan benih sumber kedelai	8 Ha			Terlaksana perbanyakan benih sumber kedelai	8 Ha				

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Terlaksana perbanyakan benih sumber padi	34 Ha			Terlaksana perbanyakan benih sumber padi	34 Ha				
				Terlaksana perbanyakan benih sumber tanaman pangan produksi UPTD BPPTPH	2 Komoditas			Terlaksana perbanyakan benih sumber tanaman pangan produksi UPTD BPPTPH	2 Komoditas				
				Terlaksana setoran PAD	1 tahun			Terlaksana setoran PAD	1 tahun				
2.01.2.01.01.29.014	Perbanyakan Benih Sumber di Tingkat Felani	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Terlaksana penangkaran benih padi di tingkat petani	10 Ha	Dinas Pertanian	Rp. 143.102.850,00	Terlaksana penangkaran benih padi di tingkat petani	10 Ha	Dinas Pertanian	Rp. 143.102.850,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.015	Penyediaan Benih dan Pengemasan Jali Kedelai	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Bimtek lapangan	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 186.216.800,00	Penangkaran kedelai	20 Ha	Dinas Pertanian	Rp. 186.216.800,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.016	Dukung Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Penangkaran kedelai	20 Ha	Dinas Pertanian	Rp. 106.465.400,00	Terlaksana penangkaran benih padi di tingkat petani	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 106.465.400,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				bantuan hibah pada masyarakat	2 kelompok			bantuan hibah pada masyarakat	2 kelompok				
				Sosialisasi teknologi budidaya ubi kayu	50 Orang			SL Garut di bawah tegakan	50 Orang				
								Sosialisasi teknologi budidaya ubi kayu	50 Orang				
2.01.2.01.01.29.022	Bimbingan dan Fasilitas Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Paikasaan Gerakan Pengendalian OPT	4 kab	Dinas Pertanian	Rp. 449.697.200,00	Paikasaan Gerakan Pengendalian OPT	4 Kab	DIT	Rp. 449.697.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.023	Pemberdayaan Petani Pemandu SLPH	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Sekolah lapang oleh petani pemandu SL	75 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 129.552.500,00	Sekolah lapang oleh petani pemandu SL	75 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 129.552.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.024	SLPH Berkelanjutan	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	SLPH selama 3 Musim Tanam	1 unit	Dinas Pertanian	Rp. 175.000.000,00	SLPH selama 3 Musim Tanam	1 unit	Dinas Pertanian	Rp. 175.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.027	Analisa standar dan Pengawasan Mutu Benih	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Pengawasan mutu dengan pemeriksaan sampel benih	100 Sampel	Dinas Pertanian	Rp. 82.190.000,00	Pengawasan mutu dengan pemeriksaan sampel benih	100 Sampel	Dinas Pertanian	Rp. 82.190.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				pengujian benih, kadar air dan daya tumbuh	300 analisa			pengujian benih, kadar air dan daya tumbuh	300 analisa				
2.01.2.01.01.29.030	Peningkatan Pengabdian Masyarakat dan Sarana Sungsai dan Pengabdian Inpres Partisipatif (HIBAH LOAN WISAP)	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan pelatihan teknis operasional lahan dan teknik pengembangan agribisnis	50 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 129.815.075,00	Melaksanakan pelatihan teknis operasional lahan dan teknik pengembangan agribisnis	50 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 129.815.075,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pelatihan P3A/GP3A dalam kegiatan pre-panen	50 Orang			Pelatihan P3A/GP3A dalam kegiatan pre-panen	50 Orang				
				Pelatihan P3A/GP3A dalam penanganan berbagai kegiatan pascapanen dan pemasaran produk pertanian	50 Orang			Pelatihan P3A/GP3A dalam penanganan berbagai kegiatan pascapanen dan pemasaran produk pertanian	50 Orang				
2.01.2.01.01.29.031	Observasi dan Identifikasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan Identifikasi galur yang akan dilepas dan deskripsi sementara	2 Komoditas	Dinas Pertanian	Rp. 36.037.200,00	Melaksanakan Identifikasi galur yang akan dilepas dan deskripsi sementara	2 Komoditas	Dinas Pertanian	Rp. 36.037.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.032	Pengembangan Tanaman Pangan Terpadu	Produksi pertanian	2356600 ton	Bimtek pengembangan pertanian terintegrasi	30 Orang		Rp. 70.000.000,00	Bimtek pengembangan pertanian terintegrasi	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 70.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015														
Nama SKPD : Dinas Pertanian				SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN							
Kode	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Program	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		tanaman pangan												Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.033	Pengamatan dan Analisa Keilangan Hasil Karena OPT Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Pengamatan OPT dan pemantauan Keilangan Hasil Karena OPT	4 kabupaten	Dinas Pertanian	Rp. 25.000.000,00	Pengamatan OPT dan pemantauan Keilangan Hasil Karena OPT	4 kabupaten	Dinas Pertanian	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.29.034	Penyusunan Rencana Ketahanan Sarana Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Pendampingan gerakan penyusunan rencana kebutuhan saprodi tahun 2016	5 kab/kota	5 kab/kota	Rp. 200.000.000,00	Pendampingan gerakan penyusunan ROKK untuk tahun 2016	5 kab/kota	5 kab/kota	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pendampingan gerakan penyusunan rencana kebutuhan saprodi tahun 2016	5 kab/kota			Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	5 kab/kota					
				Pengawasan hasil Pengawasan pupuk dan pestisida	5 kab/kota			Penyusunan hasil Pengawasan pupuk dan pestisida	5 kab/kota					
2.01.2.01.01.30	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA*						Rp. 1.803.726.600,00				Rp. 1.803.726.600,00	Rp. 0,00		
2.01.2.01.01.30.001	Pengembangan GAP Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	biotek budidaya hortikultura berdasarkan GAP/SSOP	300 petani	Dinas Pertanian	Rp. 128.401.200,00	biotek budidaya hortikultura berdasarkan GAP/SSOP	300 petani	Kaliwangkokap Nanggulan	Rp. 128.401.200,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.30.002	Pengembangan Hortikultura Terpadu	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	biotek budidaya hortikultura berdasarkan GAP/SSOP	8 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 69.765.300,00	biotek budidaya hortikultura berdasarkan GAP/SSOP	8 kelompok	Dlingo Imogiri Prambanan	Rp. 69.765.300,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.30.004	Peningkatan Budidaya Hortikultura di Lahan Pekarangan	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	temu teknologi Sekolah lapang	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 108.802.100,00	temu teknologi Sekolah lapang	30 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 108.802.100,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.30.006	Dukungan Pengelolaan Lahan dan Air untuk Pengembangan Buah Sayur dan Tan Obat	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Bantuan hibah Sekolah Lapang tata guna air	5 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 196.675.000,00	Bantuan hibah Sekolah Lapang tata guna air	5 kelompok	Dinas Pertanian	Rp. 196.675.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				sosialisasi pengelolaan lahan	30 Orang			sosialisasi pengelolaan lahan	30 Orang					
2.01.2.01.01.30.007	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Benih hasil pemurnian benih hortikultura	1000 m2	Dinas Pertanian	Rp. 370.509.250,00	Benih hasil pemurnian benih hortikultura	1000 m2	Dinas Pertanian	Rp. 370.509.250,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Benih hasil perbenihan benih hortikultura	1 Ha			Benih hasil perbenihan benih hortikultura	1 Ha					
2.01.2.01.01.30.008	Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Perbanyakan benih cabe kacang panjang	5000 m2	Dinas Pertanian	Rp. 60.976.600,00	Perbanyakan benih cabe kacang panjang	5000 m2	Dinas Pertanian	Rp. 60.976.600,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Perbanyakan benih tomat kalurang	5000 m2			Perbanyakan benih tomat kalurang	5000 m2					
2.01.2.01.01.30.009	Sosialisasi Pengelolaan Lahan Pekarangan	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Sosialisasi pengelolaan lahan pekarangan anggota PKK melalui sekolah lapang	150 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 50.000.000,00	Sosialisasi pengelolaan lahan pekarangan anggota PKK melalui sekolah lapang	150 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.30.010	Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	magang petani/petugas Pembinaan kelompok	2 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 432.621.600,00	magang petani/petugas Pembinaan kelompok	2 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 432.621.600,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengembangan Jaringan Irigasi di kawasan sentra buah	5 kelompok			Pengembangan Jaringan Irigasi di kawasan sentra buah	5 kelompok					
					1 Desa				1 Desa					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode		Ususan/Program/kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
					Pengembangan kawasan durian	1500 batang			Pengembangan kawasan durian	1500 batang				
2.01.2.01.01.30.013	Dukungan Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi Tanaman Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	387000 ton	Gerdikan pengendalian OPT hortikultura	4 kabupaten	Dinas Pertanian	Rp. 99.216.500,00	Gerdikan pengendalian OPT hortikultura	4 kabupaten	Dinas Pertanian	Rp. 99.216.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.30.014	Pengembangan Tanaman Has	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	387000 ton	Pengembangan budidaya dan pasca panen krisn	25 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 139.617.300,00	Pengembangan budidaya dan pasca panen krisn	25 Orang	Dinas Pertanian	Rp. 139.617.300,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.01.2.01.01.30.015	Dukungan Sarana dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	387000 ton	Peleksinaan temu lapang	25 Orang	kulonprogo	Rp. 147.141.750,00	Peleksinaan temu lapang	25 Orang	kulonprogo	Rp. 147.141.750,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
					Penanaman biofarmaka di bawah tegakan	4 kelompok			Penanaman biofarmaka di bawah tegakan	4 kelompok				
Total								Rp. 30.877.493.179,00				Rp. 30.867.146.679,00	(-) Rp. 10.346.500,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usuran /Program / kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tokol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.02	Pilihan													
2.02.01	Kehutanan													
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan													
2.02.2.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							Rp. 1.842.974.550,00				Rp. 1.870.014.550,00		
2.02.2.02.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman Dokumen	550 surat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 15.666.000,00	Pengiriman dokumen	600 dokumen	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 15.666.000,00	Reguler APBD	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Surat keluar	5240 surat			Surat keluar	6150 surat					
				Surat Masuk	9317 surat			Surat Masuk	10800 surat					
2.02.2.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran Biaya Hosting dan Update web	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 391.120.000,00	Pembayaran Biaya Hosting dan Update web	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 398.920.000,00	Reguler APBD	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pembayaran Biaya Internet 3 unit	12 bulan			Pembayaran Biaya Internet 3 unit	12 bulan					
				Pembayaran Tagihan Rekening Air 14 unit	12 bulan			Pembayaran Tagihan Rekening Air 16 unit	12 bulan					
				Pembayaran Tagihan Rekening listrik 45 unit	12 bulan			Pembayaran Tagihan Rekening listrik 47 unit	12 bulan					
				Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 20 unit	12 bulan			Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 22 unit	12 bulan					
2.02.2.02.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti pembayaran KIR/Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6 yang tepat waktu	137 unit	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 31.531.500,00	Bukti pembayaran KIR/Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6 yang tepat waktu	140 unit	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 42.031.500,00	Reguler APBD	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Penyaji Fasilitas	40 Orang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 106.245.200,00	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Penyaji Fasilitas	40 Orang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 106.245.200,00	Reguler APBD	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pengembangan Kinerja Pegawai dan Pengelola kepegawaian	12 bulan			Pengembangan Kinerja Pegawai dan Pengelola kepegawaian	12 bulan					
2.02.2.02.01.01.008	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 337.454.600,00	Pembayaran Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 345.954.600,00	Reguler APBD	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	208 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 124.074.700,00	Alat Tulis Kantor	208 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 124.074.700,00	Reguler APBD	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Barang Cetak	50 jenis			Barang Cetak	50 jenis					
2.02.2.02.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengadaan Dokumen Kedinasan	402670 lembar	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 116.511.300,00	Pengadaan Dokumen Kedinasan	366071 lembar	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 116.511.300,00	Reguler APBD	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Penambahan biaya cetak dan penggandaan untuk Balai Tahura
				Penjilidan Dokumen	130 buku			Penjilidan Dokumen	150 buku					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
2.02.2.02.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 33.687.000,00	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 33.687.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan rumah tangga	38 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 34.561.450,00	Peralatan rumah tangga	46 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 34.561.450,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perlakuan Perunding-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku Pengesahan Umum	8 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 31.680.000,00	Buku Pengesahan Umum	8 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 31.680.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan Minuman	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 64.140.000,00	Makanan dan Minuman	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 64.140.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dengan Instansi Terkait di Dalam dan Di Luar Daerah	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 392.700.000,00	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dengan Instansi Terkait di Dalam dan Di Luar Daerah	1 tahun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 392.700.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium PTT Swakelola dan Keamanan Kantor	9 Orang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 162.402.800,00	Honorarium PTT Swakelola dan Keamanan Kantor	9 Orang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 162.402.800,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Retribusi Sampah	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 1.200.000,00	Retribusi Sampah	12 bulan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 240.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : Retribusi Sampah	
2.02.2.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 4.612.352.152,00				Rp. 4.597.752.152,00	(-) Rp. 14.600.000,00		
2.02.2.02.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembuatan pos jaga dan tempat parkir tamu	1 Paket	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 81.045.544,00	Pengadaan Jaringan Listrik	1 Paket	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 81.045.544,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perengkapan Gedung Kantor	10 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 299.655.600,00	Perengkapan Gedung Kantor	14 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 299.655.600,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor	8 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 163.820.000,00	Peralatan Gedung Kantor	10 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 163.820.000,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	
2.02.2.02.01.02.016	Pemeliharaan Asrip Dinas	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Ekspose Data Asrip	40 Orang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 134.996.700,00	Ekspose Data Asrip	40 Orang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 134.996.700,00	Reguler APBD	Effisiensi Kegiatan : - Effisiensi DPA : - Penambahan : -	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usuan/ Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELAH PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
2.02.2.02.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Gedung Kantor	21 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 308.665.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor	22 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 308.665.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2	105 unit	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 875.000.000,00	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2	105 unit	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 860.400.000,00	(-) Rp. 14.600.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Savings Belanja bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas untuk kendaraan di KPH Yogyakarta Penambahan : -
				Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 3	2 unit			Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 3	2 unit					
				Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4	17 unit			Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4	17 unit					
				Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 6	3 unit			Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 6	3 unit					
				Service Kendaraan Dinas Roda 2	105 unit			Service Kendaraan Dinas Roda 2	105 unit					
				Service Kendaraan Dinas Roda 3	2 unit			Service Kendaraan Dinas Roda 3	2 unit					
				Service Kendaraan Dinas Roda 4	17 unit			Service Kendaraan Dinas Roda 4	17 unit					
				Service Kendaraan Dinas Roda 6	3 unit			Service Kendaraan Dinas Roda 6	3 unit					
2.02.2.02.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 45.000.000,00	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Heralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	16 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 99.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	16 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 99.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hekelaur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Hekelaur	7 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 16.300.000,00	Pemeliharaan Hekelaur	7 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 16.300.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.034	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Penggalian Minyak Kayu Putih	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Penggalian Minyak Kayu Putih	4 pabrik	gunung Kidul	Rp. 292.091.450,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Penggalian Minyak Kayu Putih	4 pabrik	gunung Kidul	Rp. 292.091.450,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.042	Rehabilitasi Gedung	Prosentase penyediaan	100 %	Rehabilitasi Gedung Kantor	5 unit	Dinas Kehutanan	Rp. 652.738.353,00	Rehabilitasi Gedung Kantor	5 unit	Dinas Kehutanan	Rp. 652.738.353,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usuan/ Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	Kantor	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur				dan Perkebunan				dan Perkebunan			Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.050	Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Jalan Kayu Putih	1000 meter	gunungkidul	Rp. 238.781.250,00	Pemeliharaan Jalan Produksi Daun Kayu Putih	1000 meter	kawasan hutan produksi	Rp. 238.781.250,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.069	Pengadaan Prasarana dan Sarana Laboratorium Perbenihan Perkebunan (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Sarana dan Prasarana Kantor dan Laboratorium Perbenihan Perkebunan (Prasarana Laboratorium Ngipikseri, Ngipikseri, pengadaan meja kerja, pengadaan kursi kerja, pembangunan pagar laboratorium Ngipikseri)	4 jenis	Pakem	Rp. 29.036.000,00	Sarana dan Prasarana Kantor dan Laboratorium Perbenihan Perkebunan (Prasarana Laboratorium Ngipikseri, Ngipikseri, pengadaan meja kerja, pengadaan kursi kerja, pembangunan pagar laboratorium Ngipikseri)	4 jenis	Pakem	Rp. 0,00	DAK	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.070	Pengadaan Prasarana dan Sarana Laboratorium/Proteksi Tanaman Perkebunan (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Sarana prasarana laboratorium proteksi tanaman perkebunan	12 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 249.375.000,00	Sarana prasarana laboratorium proteksi tanaman perkebunan	12 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 0,00	DAK	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.02.081	Pengadaan Prasarana dan Sarana Kebun Persemaian (BP3KP Perkebunan/BP3KP DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Sarana dan prasarana kebun dinas dan persemaian Bunder	5 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 1.126.847.255,00	Sarana dan prasarana kebun dinas dan persemaian Bunder	5 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 0,00	DAK	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						Rp. 15.000.000,00				Rp. 15.000.000,00		
2.02.2.02.01.05.007	Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai dan Pejabat Fungsional Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	FGD Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian	50 Orang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 15.000.000,00	FGD Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian	50 Orang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan Perkebunan	44 Orang			Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan Perkebunan	44 Orang				
2.02.2.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 280.550.000,00				Rp. 280.550.000,00		
2.02.2.02.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya pendataan dan manajemen pencapaian	100 %	Nilai LAKIP SKPD	0 a	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 7.850.000,00	Nilai LAKIP SKPD	0 a	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD												
2.02.2.02.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100 %		Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 21.700.000,00	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	0 %	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 21.700.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	100 %		Dokumen Renja 2015, RKA - DPPA 2014, ROPK, SIPP	1 tahun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 215.000.000,00	Dokumen Renja 2015, RKA - DPPA 2014, ROPK, SIPP	1 tahun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 215.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %		Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	1 tahun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 36.000.000,00	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	1 tahun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 36.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN						Rp. 4.817.240.525,00				Rp. 4.799.615.525,00 (-)			
2.02.2.02.01.15.006	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Peningkatan produksi hasil hutan	5,59 %	Pegembangan kapasitas kelembagaan petani sekitar hutan lindung	4 KTH	gunungkidul, bantul	Rp. 51.875.000,00	Pegembangan kapasitas kelembagaan petani sekitar hutan lindung	4 KTH	gunung kidul & bantul	Rp. 51.875.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pelatihan pemanfaatan HHBK	2 Angkatan @ 30 orang			Pelatihan pemanfaatan HHBK	2 angkalan					
				Pendampingan SVLK untuk HTR	3 KTH			Pendampingan SVLK untuk HTR	3 KTH					
2.02.2.02.01.15.007	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan produksi hasil hutan	5,59 %	Pameran Indogreen Forestry expo dan Indocraft expo	2 Even	Jakarta, Yogyakarta	Rp. 179.490.000,00	Pameran Indogreen Forestry expo dan Indocraft expo	2 Even	Jakarta, Yogyakarta	Rp. 179.490.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.15.012	Optimalisasi Tegakan Kayu Puth	Peningkatan produksi hasil hutan	5,59 %	Intensifikasi Tanaman Kayu Puth	300 Ha (480000 bgt)	hutan produksi gunungkidul	Rp. 1.915.580.500,00	Intensifikasi Tanaman Kayu Puth	300 Ha	BDH Playen, BDH Palyan , BDH Karangmijo, BDH Panggang, BDH Kulon, Pesisir, Pesisir Bantul	Rp. 1.907.580.500,00 (-)	Rp. 8.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Savings anggaran pengangkutan bibit Penambahan : -
				Pemeliharaan I	300 Ha			Pemeliharaan I	300 Ha					
				Pemeliharaan II	300 Ha			Pemeliharaan II	300 Ha					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usuan/ Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.02.2.02.01.15.016	Pengabdian Sumber Benih Tanaman Kehutanan	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Pemeliharaan sumber benih tanaman Jati	324 batang	Playen	Rp. 135.128.250,00	Pemeliharaan sumber benih tanaman Jati	324 batang	Playen	Rp. 135.128.250,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pemeliharaan sumber benih tanaman Kayuputih	10 Ha			Pemeliharaan sumber benih tanaman Kayuputih	10 Ha				
				Pemeliharaan bok kaji terap tanaman kehutanan	5000 batang			Pemeliharaan bok kaji terap tanaman kehutanan	5000 batang				
				Pemeliharaan kebun pangkas jati dan pule	1550 batang			Pemeliharaan kebun pangkas jati dan pule	1550 batang				
2.02.2.02.01.15.019	Pengabdian/Penyulungan Minyak Kayu Putih	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Pengabdian / Penyulungan Daun Kayu Putih	4780 ton daun	gunungkidul	Rp. 2.775.270.075,00	Pengabdian / Penyulungan Daun Kayu Putih	4780 ton daun	gunungkidul	Rp. 2.365.645.075,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.15.022	Pengabdian Hutan Terpadu	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Tebang Pilih Tegakan Ringkal pada Pohon Jati	100 pohon	BDH Karangnopo, BDH Panggan, BDH Playen, BDH Paliyan, Kulonprogo-Bantul	Rp. 47.500.000,00	Tebang Pilih Tegakan Ringkal pada Pohon Jati	100 pohon	BDH Karangnopo, BDH Panggan, BDH Playen, BDH Paliyan, Kulonprogo-Bantul	Rp. 47.500.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.15.028	Inventarisasi Tanaman Kehutanan	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Inventarisasi Potensi Tegakan Kayu Putih, Jati dan Rimba	600 hektar	Karangnopo Ngijajar	Rp. 112.396.700,00	Inventarisasi Potensi Tegakan Kayu Putih, Jati dan Rimba	600 hektar	Karangnopo Ngijajar	Rp. 112.396.700,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN						Rp. 4.317.402.300,00				Rp. 4.758.106.450,00		
2.02.2.02.01.16.005	Pembiayaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis	26000 Ha	Fasilitasi Penyusunan Draft Raperda Pengabdian DAS DIY	1 dokumen	BDH Paliyan BDH Playen BDH Karangnopo	Rp. 72.065.250,00	Fasilitasi Penyusunan Draft Raperda Pengabdian DAS DIY	1 dokumen	BDH Paliyan BDH Playen BDH Karangnopo	Rp. 72.065.250,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pelatihan Petani Dalam Pengembangan Tanaman Bawah Tegakan	7 angkatan			Pelatihan Petani Dalam Pengembangan Tanaman Bawah Tegakan	7 angkatan				
				Pembiayaan Kelompok Tani RHL di Dalam Kawasan Hutan	10 KTH			Pembiayaan Kelompok Tani RHL di Dalam Kawasan Hutan	10 KTH				
				Supervisi Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	12 RPH			Supervisi Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	12 RPH				
2.02.2.02.01.16.010	Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)	Luas lahan kritis	26000 Ha	Rehabilitasi tanaman Hutan Konservasi	60 Ha	Tahura Bunder	Rp. 1.303.030.500,00	Rehabilitasi tanaman Hutan Konservasi	80 Ha	Tahura Bunder	Rp. 1.743.724.650,00	DAK	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Sarana dan Prasarana Pengelolaan TAHURA Bunder, Sarana dan Prasarana KPH, Sarana dan	15 jenis			Sarana dan Prasarana Pengelolaan TAHURA Bunder, Sarana dan Prasarana KPH, Sarana dan	21 jenis				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/ Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Prasarana Pengamanan Hutan dan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan				Prasarana Pengamanan Hutan dan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan				(15)
2.02.2.02.01.16.011	Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan	Luas lahan kritis	26000 Ha	Fasilitas Sarpras Tanaman Tumpangsari 10 kelompok @ Rp 10.000.000,-	100000000 Rupiah	5 BDH	Rp. 62.228.800,00	Fasilitas Sarpras Tanaman Tumpangsari 10 kelompok @ Rp 10.000.000,-	10 kelompok	5 BDH	Rp. 62.228.800,00	Rp. 0,00
				Pelatihan Petani Dalam Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pesanggem	5 Angkatan @ 30 orang			Pelatihan Petani Dalam Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pesanggem	5 Angkatan @ 30 orang			
				Tindak lanjut perjanjian kerjasama pesanggem (evaluasi kinerja KTH Tumpangsari BDH Payen)	5 angkatan			Tindak lanjut perjanjian kerjasama pesanggem (evaluasi kinerja KTH Tumpangsari BDH Payen)	5 kelompok			
2.02.2.02.01.16.020	Optimalisasi Pembangunan dan Pengelolaan Tahura	Luas lahan kritis	26000 Ha	administrasi operasional	1 Paket	tahura	Rp. 2.781.240.000,00	administrasi operasional	1 Paket	Playen	Rp. 2.781.240.000,00	Rp. 0,00
				atraksi kesenian	10 bulan			atraksi kesenian	10 bulan			
				dropping air	1 tahun			dropping air	1 tahun			
				jalan makadam	1 km			jalan makadam	1 km			
				jalan tracking	500 m			jalan tracking	500 km			
				Jaringan air	1 Paket			Jaringan air	1 Paket			
				Jaringan listrik	1 Paket			Jaringan listrik	1 Paket			
				Jaringan sanitasi	1 unit			Jaringan sanitasi	1 unit			
				MCK				MCK				
				operasional	1 Paket			operasional	1 Paket			
				atraksi (makan minum)				atraksi atraksi (makan minum)				
				panggung atraksi	1 Paket			panggung atraksi	1 Paket			
				sempermainan				sempermainan				
				Papan Nama	15 uni			Papan Nama	15 unit			
				papan petunjuk lokasi	4 lokasi			papan petunjuk lokasi	4 lokasi			
				Pendirian batas dalam kawasan	25 km			Pendirian batas dalam kawasan	25 km			
				peralatan & perlengkapan operasional	1 Paket			peralatan & perlengkapan operasional	1 Paket			
				promosi	4 Paket			promosi	4 Paket			
				sarana komunikasi, audio & soundsystem	1 Paket			sarana komunikasi, audio & soundsystem	1 Paket			
				sarpras kebersihan	1 Paket			sarpras kebersihan	1 Paket			
				studi paleoekosistem tahura	1 Paket			studi paleoekosistem tahura	1 Paket			

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usuan/ Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				tenaga kerja 7 orang	1 tahun			tenaga kerja 7 orang	1 tahun					
2.02.2.02.01.15.098	Rehabilitasi Lahan Pantai	Luas lahan kritis	36.000 Ha	Pelebaran penanaman cemara udang	5 Ha (2000 bti)	Pengatan Sanden	Rp. 98.837.750,00	Pelebaran penanaman cemara udang	5 Ha (2000 bti)	Pengatan Sanden	Rp. 98.837.750,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pemeliharaan I tanaman cemara udang	5 Ha			Pemeliharaan I tanaman cemara udang	5 Ha					
				Pemeliharaan II tanaman cemara udang	5 Ha			Pemeliharaan II tanaman cemara udang	5 Ha					
2.02.2.02.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN*						Rp. 1.908.845.975,00				Rp. 1.908.845.975,00	Rp. 0,00		
2.02.2.02.01.17.001	Pencogahan dan Pengendalian Eksploitasi Hutan dan Lahan	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Pembuatan Iliran Api	40000 meter2		Rp. 37.000.000,00	Pembuatan Iliran Api	40000 meter2	BDH Playen, BDH Paliyan, Karangmoyo, BDH Panggang, BDH Kulonprogo Bantul	Rp. 37.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pemeliharaan Iliran Api	120000 meter2			Pemeliharaan Iliran Api	120000 meter2					
2.02.2.02.01.17.007	Perlindungan Hutan	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Fasilitasi Perlempangan Operasional Pihut	31 Orang		Rp. 1.028.006.900,00	Fasilitasi Perlempangan Operasional Pihut	31 Orang	BDH Playen, BDH Paliyan, BDH Karangmoyo, BDH Panggang, BDH Kulonprogo Bantul	Rp. 1.028.006.900,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Fasilitasi Petugas Perlindungan Hutan	167 Orang			Fasilitasi Petugas Perlindungan Hutan	167 Orang					
				Fasilitasi Sarpras Swakarsa 10 Kelompok @ Rp 10.000.000,-	10 kelompok			Fasilitasi Sarpras Swakarsa 10 Kelompok @ Rp 10.000.000,-	10 kelompok					
				Pelatihan Pengamanan Hutan Swakarsa	5 Angkatan @ 30 orang			Pelatihan Pengamanan Hutan Swakarsa	5 Angkatan @ 30 orang					
2.02.2.02.01.17.008	Pengamanan Hutan	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Koordinasi, Fasilitas dan Pengawasan Pengamanan Hutan	12 bulan		Rp. 370.000.000,00	Koordinasi, Fasilitas dan Pengawasan Pengamanan Hutan	12 bulan	Karangmoyo, Kokap, Paliyan, Panggang, Playen	Rp. 370.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Operasi Pengamanan Hutan	12 bulan			Operasi Pengamanan Hutan	12 bulan					
				Pembinaan Petani Pengamanan Hutan	25 RPH			Pembinaan Petani Pengamanan Hutan	25 RPH					
				Sosialisasi Dampak Perusakan Hutan Bagi Masyarakat sekitar Hutan	6 angkatan			Sosialisasi Dampak Perusakan Hutan Bagi Masyarakat sekitar Hutan	6 angkatan					
				Melalui Pertemuan Dengan Aparat dan Masyarakat				Melalui Pertemuan Dengan Aparat dan Masyarakat						
				Sosialisasi Peraturan Keamanan Hutan	15 Angkatan @ 30 orang			Sosialisasi Peraturan Keamanan Hutan	15 Angkatan @ 30 orang					
2.02.2.02.01.17.009	Peningkatan SDM Pengamanan Hutan	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Peningkatan Pengedahuan Ketrampilan dan Sikap Petugas	30 Orang		Rp. 73.839.075,00	Peningkatan Pengedahuan Ketrampilan dan Sikap Petugas	30 Orang	Dishutbn DIY	Rp. 73.839.075,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usuan/ Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.02.2.02.01.17.010	Konservasi Sumber Mata Air	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Pengamanan hutan	13500 batang		Rp. 150.000.000,00	Pengamanan hutan	12500 batang	Semenu	Rp. 150.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.17.011	Pengembangan Konservasi Alam Wana Lestari	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Fasilitas Kontingen Penyuluh Kehutanan	1 kontingen	DIY	Rp. 250.000.000,00	Gerakan Cinta Hutan dan Gerakan Tanam Cinta Hutan	3 kegiatan	DIY	Rp. 250.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.19.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dilakukan pembinaan	80 %	Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	2 provinsi	DI Yogyakarta	Rp. 119.955.500,00	Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	2 provinsi	DI Yogyakarta	Rp. 119.955.500,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.19.007	Audit Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dilakukan pembinaan	80 %	Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	2 provinsi	DI Yogyakarta	Rp. 50.275.000,00	Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	2 provinsi	DI Yogyakarta	Rp. 50.275.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usuan/ Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.02.2.02.01.21	PROGRAM PENYATAAN KAWASAN HUTAN						Rp. 1.703.257.625,00				Rp. 1.703.257.625,00	Rp. 0,00	
2.02.2.02.01.21.001	Perencanaan dan Pengembangan Pengalolaan Hutan	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Dokumen Detail Forest Plan (BDH Panggang dan BDH Kulon Progo - Bantul)	2 dokumen		Rp. 399.455.100,00	Dokumen Detail Forest Plan (BDH Panggang dan BDH Kulon Progo - Bantul)	2 dokumen	Balai KPH	Rp. 399.455.100,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Relatibon Inventarisasi Hutan	1 Angklatan @ 30 orang								
				Pembuatan Booklet / Leaflet Balai KPH Yogyakarta	3 edisi								
				Penyusunan Grand Design Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	1 dokumen								
				Workshop Detail Forest Plan KPH Yogyakarta	1 Angklatan @ 40 Orang								
2.02.2.02.01.21.002	Pengembangan Hutan Tanaman	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Pemeliharaan Tanaman Pinus I	20 Ha		Rp. 490.000.000,00	Pemeliharaan Tanaman Pinus I	20 Ha	Dlingo	Rp. 490.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pemeliharaan Tanaman Pinus II	20 Ha			Pemeliharaan Tanaman Pinus II	20 Ha				
				Penanaman Tanaman Pinus	20 Ha			Penanaman Tanaman Pinus	20 Ha				
				Pendampingan Petani Penyadap Getah Pinus	4 angklatan			Pendampingan Petani Penyadap Getah Pinus	4 angklatan				
				Penjualan Getah Pinus	55000 kg			Penjualan Getah Pinus	55000 kg				
				Penyadapan Getah Pinus	55000 kg			Penyadapan Getah Pinus	55000 kg				
2.02.2.02.01.21.003	Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Inventarisasi Pal Batas Kawasan Hutan	95.6 km		Rp. 101.220.900,00	Inventarisasi Pal Batas Kawasan Hutan	95.6 km	Karangmojo	Rp. 101.220.900,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Menyelesaikan Tata Batas Phak ke-3	45 km			Menyelesaikan Tata Batas Phak ke-3	45 km				
								Penyelesaian Tata Batas Phak ke-3	45 km				
2.02.2.02.01.21.004	Penyusunan Rencana Teknik Tahunan	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Dokumen RTT Pungutan Daun Kayu Putih	1 dokumen		Rp. 125.000.000,00	Dokumen RTT Pungutan Daun Kayu Putih	1 dokumen	BDH Panggang, BDOG	Rp. 125.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Dokumen RTT Jalan Produksi	1 dokumen			Dokumen RTT Jalan Produksi	1 dokumen	Karangmojo, BDH Kulon Progo - Bantul			
				Dokumen RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih	1 dokumen			Dokumen RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih	1 dokumen				
				Dokumen RTT Penebangan	1 dokumen			Dokumen RTT Penebangan	1 dokumen				
				Dokumen RTT Penyadapan Getah Pinus	1 dokumen			Dokumen RTT Penyadapan Getah Pinus	1 dokumen				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				Dokumen Takasi pemeliharaan jalan produksi	1 dokumen			Dokumen Takasi pemeliharaan jalan produksi	1 dokumen					
				Dokumen Takasi penanaman dan pemeliharaan kayu putih	1 dokumen			Dokumen Takasi penanaman dan pemeliharaan kayu putih	1 dokumen					
				Dokumen Takasi Penyediaan Getah Pinus	1 dokumen			Dokumen Takasi Penyediaan Getah Pinus	1 dokumen					
				Dokumen Takasi Produksi Daun Kayu Putih	14 RPH			Dokumen Takasi Produksi Daun Kayu Putih	14 RPH					
				Dokumen Takasi tebangan 100 pohon	1 dokumen			Dokumen Takasi tebangan 100 pohon	1 dokumen					
2.02.2.02.01.21.005	Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Inventarisasi tegakan tinggal di kawasan hutan AB	109.15 Ha		Rp. 58.677.700,00	Inventarisasi tegakan tinggal di kawasan hutan AB	109.15 Ha	Supto sari Tepus	Rp. 58.677.700,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.21.006	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Bimtek Pemeliharaan Tanaman pada Hutan Tanaman Rakyat untuk 6 desa	5 angkatan		Rp. 108.903.925,00	Bimtek Pemeliharaan Tanaman pada Hutan Tanaman Rakyat untuk 6 desa	5 angkatan	BDH Panggang, BDG Karangmoyo, BDH Kulon Progo - Bantul	Rp. 108.903.925,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pelatihan Teknis Pembuatan Hutan Cadangan Pangan (HCP)	6 angkatan			Pelatihan Teknis Pembuatan Hutan Cadangan Pangan (HCP)	6 angkatan					
				Pembinaan Pemegang IUPHKm	14 kelompok			Pembinaan Pemegang IUPHKm	14 kelompok					
2.02.2.02.01.21.007	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Bibit tanaman kehutanan	547500 batang		Rp. 420.000.000,00	Bibit tanaman kehutanan	547500 batang	Playen	Rp. 420.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.26	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN						Rp. 507.067.425,00				Rp. 507.067.425,00	Rp. 0,00		
2.02.2.02.01.26.002	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan	NTP sektor perkebunan	128 %	Pelatihan Manajemen Usaha Tani Kelapa dan Kakao	3 angkatan		Rp. 67.795.400,00	Pelatihan Manajemen Usaha Tani Kelapa, dan Kakao	3 angkatan	Imogiri Kalibawang Panjatan	Rp. 67.795.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pendampingan Kelompok Tani/KUB (2 Jambumate, 4 KUB dan 4 Kelapa)	10 kelompok			Pendampingan Kelompok Tani/KUB /Asosiasi Komoditas Perkebunan	10 KUB					
				Pertemuan Kemitraan Usaha Perkebunan Komoditas Kakao dan Kelapa	3 angkatan			Pertemuan Kemitraan Usaha Perkebunan Komoditas Kakao dan Kelapa	3 angkatan					
2.02.2.02.01.26.012	Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (cukai)	NTP sektor perkebunan	128 %	Hibah Bantuan Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan sebesar Rp. 170.250.000,- untuk 6 kelompok	6 kelompok		Rp. 109.750.000,00	Bantuan Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Komoditas Tembaku untuk sebesar Rp.170.250.000,- untuk 6 kelompok	6 kelompok	Gedung sari Ngawen Ngemplak	Rp. 109.750.000,00	Rp. 0,00	Cukai	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.02.2.02.01.26.017	Promosi Atas Hasil Perkebunan	NTP sektor perkebunan	128 %	Pelatihan pengelolahan dan pemasaran tembakau dengan sistem sekolah lapang	3 angkatan		Rp. 146.788.725,00	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani Dalam Pengelolahan dan Pemasaran Tembakau	3 angkatan		Rp. 146.788.725,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.26.027	Pengembangan Kelembagaan Petani Tembakau (cukai)	NTP sektor perkebunan	128 %	Promosi dan Informasi Produk Hubun pada Pameran Hari Perkebunan, HPP, HPS Tingkat Nasional & Lokal	4 event		Rp. 50.500.000,00	Promosi dan Informasi Produk Hubun pada Pameran Hari Perkebunan, HPP, HPS Tingkat Nasional & Lokal	4 event		Rp. 50.500.000,00	Cukai	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.26.029	Pengembangan Komoditas Perkebunan Berbasis Kawasan	NTP sektor perkebunan	128 %	Hibah Fasilitas Pengelolahan Kelembagaan Petani Tembakau	2 KUB		Rp. 27.685.300,00	Pelatihan Pengelolahan Penguatan Modal Gapoktan/KUB Komoditas Tembakau	3 angkatan		Rp. 27.685.300,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pelatihan Pengelolahan Penguatan KUB/Kelompok Tani Komoditas Tembakau	3 angkatan			Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	3 angkatan				
				Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	3 angkatan			Bantuan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	2 KUB				
				Hibah Fasilitas Saprodi dalam rangka pengelayaan tanaman cengkeh5 kelompok @ Rp.15.000.000,-	5 kelompok		Rp. 27.685.300,00	Hibah Fasilitas Saprodi dalam rangka pengelayaan tanaman cengkeh5 kelompok @ Rp.15.000.000,-	5 kelompok	Imogiri Kalibawang Patuk Samigaluh	Rp. 27.685.300,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Hibah Fasilitas Saprodi dalam rangka pengelayaan tanaman kelapa 5 kelompok @ Rp.17.500.000,-	5 kelompok			Hibah Fasilitas Saprodi dalam rangka pengelayaan tanaman kelapa 5 kelompok @ Rp.17.500.000,-	5 kelompok				
				Pengelayaan tanaman perkebunan komoditas cengkeh	100 Ha			Pengelayaan tanaman perkebunan komoditas cengkeh	100 Ha				
				Pengelayaan tanaman perkebunan komoditas kelapa	100 Ha			Pengelayaan tanaman perkebunan komoditas kelapa	100 Ha				
2.02.2.02.01.26.030	Pembinaan Pasca Panen Pengelolahan Produk Perkebunan	NTP sektor perkebunan	128 %	Pelatihan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Komoditas Kelapa dengan sistem Sekolah Lapang untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan berbasis kawasan	2 angkatan		Rp. 104.548.000,00	Pelatihan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Komoditas Kakao dengan sistem Sekolah Lapang untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan berbasis kawasan	2 angkatan	Kalibawang Patuk	Rp. 104.548.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.31	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI						Rp. 1.348.662.450,00				Rp. 1.348.662.450,00	Rp. 0,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Usunan/Program/ kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	PERKEBUNAN													
2.02.2.02.01.31.001	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (culai)	Produksi perkebunan	88000 ton	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Tembakau	3 angkatan		Rp. 172.627.650,00	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Tembakau	3 angkatan	Paliyan Pyungan Prambanan	Rp. 172.627.650,00	Rp. 0,00	Cukai	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.31.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Komoditas Perkebunan	Produksi perkebunan	88000 ton	Bantuan Hibah fasilitasi sarpras pengelabian lahan 4 kelompok tan @ Rp. 17.500.000,-	4 kelompok		Rp. 96.951.500,00	Bantuan Hibah fasilitasi sarpras pengelabian lahan 4 kelompok tan @ Rp. 17.500.000,-	4 kelompok	Karangmoyo Kokap Samguluh	Rp. 96.951.500,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bimtek Fasilitas Penyediaan sarpras dan optimasi lahan	4 angkatan			Bimtek Fasilitas Penyediaan sarpras dan optimasi lahan	4 angkatan					
				Fasilitas Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan	4 kabupaten			Fasilitas Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan	4 kabupaten					
				Pembinaan kelompok tani pengelabian lahan	10 kelompok			Pembinaan kelompok tani pengelabian lahan	10 kelompok					
				Pengawalan dan Pendampingan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan	4 kabupaten			Pengawalan dan Pendampingan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan	4 kabupaten					
				Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	12 lokasi			Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	12 lokasi					
2.02.2.02.01.31.003	Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	Produksi perkebunan	88000 ton	Hibah Fasilitas Saprodil Pengelabian Tanaman Kakao 8 Kelompok @ Rp. 12.500.000,-	8 kelompok		Rp. 82.728.000,00	Hibah Fasilitas Saprodil Pengelabian Tanaman Kakao 8 Kelompok @ Rp. 12.500.000,-	8 kelompok	Kaliwang Samguluh	Rp. 82.728.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Rehabilitasi tanaman kakao dalam rangka Pengembangan Model Desa Kakao.	48 Ha			Rehabilitasi tanaman kakao dalam rangka Pengembangan Model Desa Kakao.	48 Ha					
2.02.2.02.01.31.004	Pengembangan Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal	Produksi perkebunan	88000 ton	Pengembangan Tebu	1 Ha		Rp. 18.935.000,00	Pengembangan Tebu	1 Ha	Karangmoyo Playen	Rp. 18.935.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.31.005	Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan	Produksi perkebunan	88000 ton	Peramalan, Pengamatan Kehilangan Hasil dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tanaman kelapa, kakao, cengkeh,tebu, tembakau, jambu mete, kopi, teh, lada, panili	2000 Ha		Rp. 49.400.000,00	Peramalan, Pengamatan Kehilangan Hasil dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tanaman kelapa, kakao, cengkeh,tebu, tembakau, jambu mete, kopi, teh, lada, panili	2000 Ha	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 49.400.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.31.006	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	Produksi perkebunan	88000 ton	Bibit Kakao	10000 batang		Rp. 150.000.000,00	Bibit Kakao	10000 batang	Wates	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Bibit Kelapa Dalam	5000 batang			Bibit Kelapa Dalam	5000 batang					

LAPORAN PERUBAHAN TAHUN 2015												
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan												
Kode	Usuan/ Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
2.02.2.02.01.31.007	Sertifikasi Bibit/Benh Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	Produksi perkebunan	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
				88000 ton	Pendampingan dalam rangka ISO 9001-2008	1 Paket	Rp. 173.091.000,00	Pendampingan dalam rangka ISO 9001-2008	1 Paket	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 173.091.000,00	Reguler APBD
					Pengawasan Peredaran Bibit/Benh Tanaman Kehutanan dan Perkebunan pada Penangkar/Pengada /Pegedar dan Kaitan Sumber Benih	500000 bgt		Pengawasan Peredaran Bibit/Benh Tanaman Kehutanan dan Perkebunan pada Penangkar/Pengada /Pegedar dan Kaitan Sumber Benih	500000 bgt			
					Sertifikasi Bibit/Benh Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	400000 bgt		Sertifikasi Bibit/Benh Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	400000 bgt			
					Surveillance Auditor ISO 9001 - 2008	1 Paket		Surveillance Auditor ISO 9001 - 2008	1 Paket			
2.02.2.02.01.31.010	Dukung Sarana dan Prasarana dalam Lahan dan Air (cukai)	Produksi perkebunan		88000 ton	Bantuan Hibah Pembangunan Pengembang Sumber Air Pada Komoditas Tembaku 4 Kelompok Tani @ Rp. 32.000.000,-	4 kelompok	Rp. 70.733.000,00	Bantuan Hibah Pembangunan Pengembang Sumber Air Pada Komoditas Tembaku 4 Kelompok Tani @ Rp. 32.000.000,-	4 kelompok	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 70.733.000,00	Reguler APBD
					Bimtek Pengembangan Sumber Air Pada Komoditas Tembaku	4 kelompok		Bimtek Pengembangan Sumber Air Pada Komoditas Tembaku	4 kelompok	Dlingo, Ombilin, Ngawen, Semin, Tembel, Selegan, Tembel, Tembel		Reguler APBD
2.02.2.02.01.31.011	Perfudugap Perkebunan Unggul Lokal (cukai)	Produksi perkebunan		88000 ton	Pelatihan Petani Dalam Rangka Sumber Benih Tembaku Unggul Lokal	6 angkatan	Rp. 125.136.300,00	Pelatihan Petani Dalam Rangka Sumber Benih Tembaku Unggul Lokal	6 angkatan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul	Rp. 125.136.300,00	Reguler APBD
					Pelatihan Teknis Budidaya Tembaku sesuai GAP	2 kelompok		Pelatihan Teknis Budidaya Tembaku sesuai GAP	2 kelompok	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul		Reguler APBD
2.02.2.02.01.31.013	Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan sesuai GAP (cukai)	Produksi perkebunan		88000 ton	Fasilitas Saprodil Budidaya Tembaku	2 kelompok	Rp. 130.791.500,00	Fasilitas Saprodil Budidaya Tembaku	2 kelompok	Gedung sari Semin	Rp. 130.791.500,00	Reguler APBD
					Pelatihan Teknis Budidaya Tembaku sesuai GAP	2 kelompok		Pelatihan teknis budidaya tembaku sesuai GAP	2 kelompok			Reguler APBD
2.02.2.02.01.31.014	Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan	Produksi perkebunan		88000 ton	Pengembangan Pestisida Nabati di Tingkat Kelompok Tani	16 lokasi	Rp. 152.420.000,00	Pengembangan Pestisida Nabati di Tingkat Kelompok Tani	16 lokasi	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 152.420.000,00	Reguler APBD
					Pengendalian Oryctes sp. pada tanaman Kelapa	50 Ha		Pengendalian Oryctes sp. pada tanaman Kelapa	50 Ha			Reguler APBD
					Pengendalian Penyakit Busuk Buah/ Phytophthora palmivora pada Tanaman Kakao	100 Ha		Pengendalian Penyakit Busuk Buah/ Phytophthora palmivora pada Tanaman Kakao	100 Ha			Reguler APBD

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				Penyediaan dan Penyebaran Agensi Hayati	7 jenis			Penyediaan dan Penyebaran Agensi Hayati	7 jenis					
2.02.2.02.01.31.015	Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu	Produksi perkebunan	88000 ton	Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Kakao dan Teh Dengan Sistem Sekam Lapang	2 angkatan		Rp. 106.322.100,00		2 angkatan	Kaliwang Ponjong	Rp. 106.322.100,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.02.2.02.01.31.016	Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal	Produksi perkebunan	88000 ton	Hibah Fasilitas Saprodi Pengembangan Tanaman Teh Rp. 95.000.000,- untuk 1 KUB	1 KUB		Rp. 19.526.400,00	Fasilitas Saprodi Pengembangan Tanaman Teh Rp. 95.000.000,- untuk 1 KUB	1 KUB	Grimulyo Samigaluh	Rp. 19.526.400,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Pendampingan teknis intensifikasi tanaman teh	100 Ha			Pendampingan teknis intensifikasi tanaman teh	100 Ha					
Total							Rp. 21.523.583.502,00				Rp. 21.959.102.652,00	Rp. 435.519.150,00		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi			Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.04.2.04.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	62 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 32.337.000,00	Alat Tulis Kantor	62 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 32.337.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang cetakan dan penggandaan	9 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 25.000.000,00	Barang cetakan dan penggandaan	9 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 25.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26 jenis komponen instalasi listrik	Dinas Pariwisata	Rp. 17.000.000,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26 jenis komponen instalasi listrik	Dinas Pariwisata	Rp. 17.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan rumah tangga perlengkapan kantor	26 jenis peralatan kebersihan perlengkapan pembersih	Dinas Pariwisata	Rp. 8.000.000,00	Peralatan rumah tangga perlengkapan kantor	26 jenis peralatan kebersihan perlengkapan pembersih	Dinas Pariwisata	Rp. 8.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat kabar 2. Majalah	4 jenis surat kabar 1 jenis Majalah	Dinas Pariwisata	Rp. 4.920.000,00	1. Surat kabar 2. Majalah	4 jenis surat kabar 1 jenis Majalah	Dinas Pariwisata	Rp. 4.920.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makan dan minum sidang	4.545 Orang, 12 Bulan	Dinas Pariwisata	Rp. 49.995.000,00	Makan dan minum sidang	4.545 Orang, 12 Bulan	Dinas Pariwisata	Rp. 49.995.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	187 OP 4 Kabupaten	Dinas Pariwisata	Rp. 365.821.000,00	Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	187 OP 4 Kabupaten	Dinas Pariwisata	Rp. 365.821.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.01.021	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa keamanan kantor/tempat kerja	4 orang @ 1 tahun	Dinas Pariwisata	Rp. 308.713.000,00	Jasa keamanan kantor/tempat kerja	4 orang @ 1 tahun	Dinas Pariwisata	Rp. 308.713.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.02	PROGRAM Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						Rp. 1.746.249.600,00				Rp. 1.746.249.600,00		
2.04.2.04.01.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan prasarana aparatur	100 %	1. Bendera 2. Filling Cabinet 3. AC 4. Pompa Air 5. Genset 6. Tv 7. Tabung Pemadam Kebakaran 8. Rak	8 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 359.893.000,00	1. Bendera 2. Filling Cabinet 3. AC 4. Pompa Air 5. Genset 6. Tv 7. Tabung Pemadam Kebakaran 8. Rak	8 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 359.893.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan prasarana aparatur	100 %	1. Komputer PC 2. Notebook/Laptop 3. Printer 4. LCD Proyektor 5. Screen Mate White Standard 6. Whiteboard 7. Kamera SLR 8. Pocket 8. Kamera SLR 9. Handycam 10. Mixer 11. Handycam 12. Column Speaker 13. Kabel Speaker 14. DVD Player	14 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 381.901.000,00	1. Komputer PC 2. Notebook/Laptop 3. Printer 4. LCD Proyektor 5. Screen Mate White Standard 6. Whiteboard 7. Kamera SLR 8. Kamera SLR 9. Handycam 10. Mixer 11. Handycam 12. Column Speaker 13. Kabel Speaker 14. DVD Player	14 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 381.901.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.02.010	Pengadaan Mebelkur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Mebelkur	3 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 90.049.200,00	Mebelkur	3 jenis	Dinas Pariwisata	Rp. 90.049.200,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
		kapasitas sumberdaya aparatur		meningkat kemampuannya				meningkat kemampuannya					Penambahan : -
2.042.04.01.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Jumlah aparatur termotivasi untuk peningkatan kinerja (pelatihan dan outbound)	75 Orang	Dinas Pariwisata	Rp. 60.000.000,00	Jumlah aparatur termotivasi untuk peningkatan kinerja (pelatihan dan outbound)	75 Orang	Dinas Pariwisata	Rp. 60.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.06	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						Rp. 144.086.000,00				Rp. 144.086.000,00		
2.042.04.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Nilai LAKIP SKPD	75 s.d 85 =Nilai A	Dinas Pariwisata	Rp. 7.195.400,00	Nilai LAKIP SKPD	75 s.d 85 =Nilai A	Dinas Pariwisata	Rp. 7.195.400,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.042.04.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Keserjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	7 %	Dinas Pariwisata	Rp. 15.290.000,00	Keserjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD	7 %	Dinas Pariwisata	Rp. 15.290.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.042.04.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen Program/Kegiatan (RKA, DPA, ROPK) 2. Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan TA 2016 (RKA, ASB) 3. Data dan Informasi Perencanaan	3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	Dinas Pariwisata	Rp. 38.944.000,00	1. Dokumen Program/Kegiatan (RKA, DPA, ROPK) 2. Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan TA 2016 (RKA, ASB) 3. Data dan Informasi Perencanaan	3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	Dinas Pariwisata	Rp. 38.944.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.042.04.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi DIY dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata. 2. FGD Evaluasi Program Dan Kegiatan 2015	2 dokumen 1 kali FGD	Dinas Pariwisata	Rp. 82.656.600,00	1. Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi DIY dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata. 2. FGD Evaluasi Program Dan Kegiatan 2015	2 dokumen 1 kali FGD	Dinas Pariwisata	Rp. 82.656.600,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA*						Rp. 5.446.145.000,00				Rp. 5.441.145.000,00	(-) Rp. 5.000.000,00	
2.042.04.01.15.012	Penyusunan Data	Jumlah	16785128	1. Travel Dialog	2 propinsi	DIY	Rp. 1.520.350.000,00	1. Travel Dialog	2 propinsi	DIY	Rp. 1.520.350.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : -

LAPORAN PERUBAHAN

Nama SKPD : Dinas Pariwisata													
Kode	Usuan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Sumber Dana	Bertambah/ Berkurang	Keterangan	
		Totok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Kepariwisataan	kurjungan wisatawan di DTW	Orang	2. Penyusunan data Spasial Potensi Pariwisata per kecamatan se-DIY 3. Nesparda 4. Dokumen Statistik Kepariwisataan DIY th 2014 5. Analisis Daya Saing Produk Wisata (Ecotourism dan Edutourism- wisata nostalgia)	78 kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 2 buah Dokumen			2. Penyusunan data Spasial Potensi Pariwisata per kecamatan se-DIY 3. Nesparda 4. Dokumen Statistik Kepariwisataan DIY th 2014 5. Analisis Daya Saing Produk Wisata (Ecotourism dan Edutourism- wisata nostalgia)	78 kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 2 buah Dokumen				Efisiensi DPA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.04.2.04.01.15.013	Pemasaran Dan Jejaring Kemitraan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1. Pengembangan website .widinglojja.com 10. Penyusunan Tabloid Pariwisata 11. optimalisasi TIC dan TIS 2. Pengelolaan Kios Informasi 3. promosi melalui Media Massa 4. pembuatan aplikasi promosi untuk telepon seluler 5. pengembangan Sistem Informasi manajemen event 6. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 7. Penyelenggaraan Familiarization Tour 8. Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri 9. Pembuatan bahan promosi cetak dan elektronik (leaflet, booklet, peta, CD)	1 dokumen 4 edisi 12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 150 peserta 1 kegiatan 1 kegiatan	DIY	Rp. 3.925.795.000,00	1. Pengembangan website .widinglojja.com 10. Penyusunan Tabloid Pariwisata 11. optimalisasi TIC dan TIS 2. Pengelolaan Kios Informasi 3. promosi melalui Media Massa 4. pembuatan aplikasi promosi untuk telepon seluler 5. pengembangan Sistem Informasi manajemen event 6. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 7. Penyelenggaraan Familiarization Tour 8. Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri 9. Pembuatan bahan promosi cetak dan elektronik (leaflet, booklet, peta, CD)	1 dokumen 4 edisi 12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 150 peserta 1 kegiatan 1 kegiatan	DIY	Rp. 3.920.795.000,00	(-) Rp. 5.000.000,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi belanja cetak Penambahan : -
2.04.2.04.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA* Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata						Rp. 3.782.402.000,00				Rp. 3.782.402.000,00	Rp. 0,00	
2.04.2.04.01.16.008	Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	89 DTW	1. Pengembangan pagar dan Drainase Objek Wisata Kesenodo (Tlalenda) 10. Pembinaan dan pengawasan standarisasi hotel Melati 2. Realisasi jalan lingkungan dan Taulud	0 1 kegiatan 60 hotel 1 kegiatan	DIY	Rp. 3.782.402.000,00	1. Pengembangan pagar dan Drainase Objek Wisata Kesenodo (Tlalenda) 10. Pembinaan dan pengawasan standarisasi hotel Melati 2. Realisasi jalan lingkungan dan Taulud	0 1 kegiatan 60 hotel 1 kegiatan	DIY	Rp. 3.782.402.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Objek Wisata Suroloyo (Trilateral)				Objek Wisata Suroloyo (Trilateral)					
				3. Pembangunan Parkir Kawasan Wisata Sundak Gunung Kidul	1 kegiatan			3. Pembangunan Parkir Kawasan Wisata Sundak Gunung Kidul	1 kegiatan				
				4. Pembangunan Wisata di Tancep, Ngawen Gunung Kidul	1 kegiatan			4. Pembangunan Wisata di Tancep, Ngawen Gunung Kidul	1 kegiatan				
				5. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Homestay di DIY	1 dokumen			5. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Homestay di DIY	1 dokumen				
				6. Penyusunan DED kawasan Banjirayoyo	1 dokumen			6. Penyusunan DED kawasan Banjirayoyo	1 dokumen				
				7. Masterplan dan DED Tahap I Kawasan Wisata Simas Pandansimo (Trilateral)	1 dokumen			7. Masterplan dan DED Tahap I Kawasan Wisata Simas Pandansimo (Trilateral)	1 dokumen				
				8. Masterplan dan DED Tahap I Desa Wisata Kawasan Lereng Merapi	1 dokumen			8. Masterplan dan DED Tahap I Desa Wisata Kawasan Lereng Merapi	1 dokumen				
				9. Masterplan dan DED Tahap I Kawasan Wisata Gunung Gentong, Gedangsari, Gunung Kidul	1 dokumen			9. Masterplan dan DED Tahap I Kawasan Wisata Gunung Gentong, Gedangsari, Gunung Kidul	1 dokumen				
2.04.2.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN*						Rp. 4.209.555.000,00				Rp. 4.197.255.000,00	(-) Rp. 12.300.000,00	
2.04.2.04.01.17.022	Optimalisasi Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	1. Pemberdayaan SDM Dinas DiJeng di DIY.	1 kegiatan	DIY	Rp. 897.000.000,00	1. Pemberdayaan SDM Dinas DiJeng di DIY.	0	DIY	Rp. 897.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : Perubahan Rincian Objek belanja pada rekening 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah yang semula ke NTB diubah dg tujuan ke Padang
				2. Kampanye sadar wisata dan Sapta Pesona.	1 kegiatan			2. Kampanye sadar wisata dan Sapta Pesona.	1 kegiatan				
				3. Pencetakan Guide Baru, Uji Kompetensi SDM pelaku Wisata DIY dan Pencetakan Asesor hotel dan Restoran.	200 Orang			3. Pencetakan Guide Baru, Uji Kompetensi SDM pelaku Wisata DIY dan Pencetakan Asesor hotel dan Restoran.	200 Orang				
				4. Kemitraan IKM Kerajinan Dengan Pelaku Pariwisata.	50 Orang			4. Kemitraan IKM Kerajinan Dengan Pelaku Pariwisata.	50 Orang				
2.04.2.04.01.17.023	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	10. Lomba Pacuan Kuda Pala Raja HB Cup	1 kegiatan	DIY	Rp. 3.312.555.000,00	10. Lomba Pacuan Kuda Pala Raja HB Cup	1 kegiatan	DIY	Rp. 3.300.255.000,00	(-) Rp. 12.300.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : Efisiensi belanja perlengkapan penghargaan/hadiah lomba dan belanja makanan dan minuman umum Penambahan : -
				1.Custom Fest	50 Orang			15. Festival Panjat Tebing	1 kegiatan				
				11. Lomba Pacuan Kuda Pala Adipati PA Cup	1 kegiatan			5. Jogja Fashion Week	1 kegiatan				
				12. Pekan Budaya Tonghwa	1 kegiatan			1.Custom Fest	1 kegiatan				

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Uraian/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
				13. Festival Percak Silat	1 kegiatan			11. Lomba Pacuan Kuda Piala Raja HB Cup	1 kegiatan			
				14. Jogja Air Show	1 kegiatan			12. Pacuan Budjaya Tonggiba	1 kegiatan			
				15. Festival Panjat Tebing	1 kegiatan			13. Festival Percak Slat	1 kegiatan			
				16. Festival layang layang	1 kegiatan			14. Jogja Air Show	1 kegiatan			
				17. Pawai Pembangunan	1 kegiatan			16. Festival layang layang	1 kegiatan			
				18. Festival Nasylid	1 kegiatan			17. Pawai Pembangunan	1 kegiatan			
				19. Lomba Foto Pariwisata	1 kegiatan			18. Festival Nasylid	1 kegiatan			
				2. Double Gardan Gathering	1 kegiatan			19. Lomba Foto Pariwisata	1 kegiatan			
				3. Jogja Bike Rendezvous	1 kegiatan			2. Double Gardan Gathering	1 kegiatan			
				4. Jambore Otomotif	1 kegiatan			3. Jogja Bike Rendezvous	1 kegiatan			
				5. Jogja Fashion Week	1 kegiatan			4. Jambore Otomotif	1 kegiatan			
				6. Lomba Seni Suara Burung Berkicau Piala Raja HB dan Pakualaman Cup	1 kegiatan			6. Lomba Seni Suara Burung Berkicau Piala Raja HB dan Pakualaman Cup	1 kegiatan			
				7. Lomba Seni Burung Derikuku Nasional Piala Raja HB dan Adipati PA Cup	1 kegiatan			7. Lomba Seni Burung Derikuku Nasional Piala Raja HB dan Adipati PA Cup	1 kegiatan			
				8. Lomba Seni Burung Derikuku Nasional Piala Raja HB dan Adipati PA Cup	1 kegiatan			8. Lomba Seni Burung Derikuku Nasional Piala Raja HB dan Adipati PA Cup	1 kegiatan			
				9. Sumpah Pemuda Bikers Gathering	1 kegiatan			9. Sumpah Pemuda Bikers Gathering	1 kegiatan			
2.04.2.04.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA*						Rp. 2.137.500.000,00				Rp. 2.137.500.000,00	
2.04.2.04.01.18.004	Peningkatan Daya Tarik Desa Wisata	Jumlah desa wisata	80 Desa wisata	1. Fasilitas dan Penyelenggaraan atraksi di Desa Wisata	5 kab/kota	DIY	Rp. 2.137.500.000,00	1. Fasilitas dan Penyelenggaraan atraksi di Desa Wisata	5 kab/kota	DIY	Rp. 2.137.500.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Lomba Pkdarwis Tingkat DIY	1 kegiatan			2. Lomba Pkdarwis Tingkat DIY	1 kegiatan			
				3. Fasilitas Pengembangan Sarana Prasarana Desa Wisata	5 kab/kota			3. Fasilitas Pengembangan Sarana Prasarana Desa Wisata	5 kab/kota			
				4. Penguatan SDM pengelola desa wisata dan Kembangan Desa Wisata	2 kegiatan (Shab/kota)			4. Penguatan SDM pengelola desa wisata dan Kembangan Desa Wisata	2 kegiatan (Shab/kota)			
				5. Forum temu desa wisata anggota MPU	1 kegiatan			5. Forum temu desa wisata anggota MPU	1 kegiatan			
				6. Lomba desa wisata tingkat DIY	1 kegiatan			6. Lomba desa wisata tingkat DIY	1 kegiatan			

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Kode	Usuran/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
				7. Forum komunikasi Kelompok Sadar Wisata (PODKARWIS) DIY	1 kegiatan			7. Forum komunikasi Kelompok Sadar Wisata (PODKARWIS) DIY	1 kegiatan					
				8. Temu Bisnis Antara Desa Wisata Dan Pelaku Wisata	1 kegiatan			8. Temu Bisnis Antara Desa Wisata Dan Pelaku Wisata	1 kegiatan					
Total							Rp. 18.804.932.600,00					Rp. 17.300.000,00	(-) Rp. 17.300.000,00	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
2.05	Pilihan														
2.05	Kelautan dan Perikanan														
2.05.01	Dinas Kelautan dan perikanan.														
2.05.2.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN							Rp. 2.567.857.000,00				Rp. 2.592.548.600,00			
2.05.2.05.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %		1. Perangko Klat 2. Perangko buas 3. Material 3000 4. Material 6000 5.Biaya Pengiriman	580 buah 50 buah 1700 buah 1830 buah 12 bulan	Dilautan	Rp. 17.525.000,00	Pengiriman dokumen Surat Keluar Surat Masuk	34 buah 6527 buah 3988 buah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 17.525.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi,SD Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %		1. Rekening Telepon 2. Rekening Listrik 3. Jasa Internet 4. Rekening PDAM	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.166.400.000,00	1. Rekening Telepon 2. Rekening Listrik 3. Jasa Internet 4. Rekening PDAM	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.166.400.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.01.006	Penyediaan Jasa Pengelahan dan Periznan Kendaraan Operasional	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %		a. KIR b. STNK Roda 4 c. STNK Roda 2 d. STNK Roda 3	4 unit 16 unit 16 unit 6 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 24.014.000,00	Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3 yang tepat waktu Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu Proses Balik Nama Kendaraan Dinas	0 16 unit 6 unit 16 unit 3 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 37.365.600,00	Reguler APBD	Rp. 13.351.600,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : Baya balik nama kendaraan Dinas roda 4 (empat) 3 unit 1. B 9493 PQU 2. B 9496 PQU 3. B 1449 PQR
2.05.2.05.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perantoran	100 %		a. Honor Pengelola Keuangan Daerah b. Honor Pengelola Baring Daerah	12 bulan 12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 111.406.500,00	Bukti Pembayaran honor pengelola keuangan dan	0 13 org/bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 111.406.500,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : honor pembuat dokumen, Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
					12 bulan									
				c. Honor Pengabla Kepegawaian					14 org/bulan					
2.052.05.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Lantai Keramik	12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 124.880.000,00	Kebersihan Gedung Kantor (BTRP)	600 m2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 124.880.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				b. Kaca	12 bulan			Kebersihan gedung kantor (Dinas)	47250 m2					
				c. Kamar Mandi dan WC	12 bulan			Kebersihan Gedung Kantor (PPP)	10896 m2					
				d. Halaman	12 bulan									
				e. Dinding	12 bulan									
2.052.05.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis perkantoran	48 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 81.959.000,00	Alat tulis perkantoran	48 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 81.959.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Barang Cetakan	13 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 66.946.000,00	a. Barang Cetakan	13 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 66.946.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				b. Fotocopy	126572 lembar			b. Fotocopy	126572 lembar					
				c. Jilid	289 eksp			c. Jilid	289 eksp					
2.052.05.01.01.012	Penyediaan Konsumsi Instalansi Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Lampu Konsumsi alat listrik	18 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 50.000.000,00	Lampu Konsumsi alat listrik	18 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 50.000.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan dan Bahan kebutuhan Rumah Tangga	16 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 172.50.000,00	Peralatan dan Bahan kebutuhan Rumah Tangga	16 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 172.50.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Administrasi perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Surat Kabar	12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 18.170.000,00	a. Surat Kabar	12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 18.170.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				b. Majalah	12 bulan			b. Majalah	12 bulan					
				c. Buku IPTEK	1 Paket			c. Buku IPTEK	1 Paket					
				d. Buku Per-UU	1 Paket			d. Buku Per-UU	1 Paket					
2.052.05.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Hidangan rapat koordinasi unit pembinaan kepegawaian	6430 os	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 70.730.000,00	Hidangan rapat koordinasi unit pembinaan kepegawaian	7665 os	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 70.730.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 290.170.000,00	a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 290.170.000,00	Reguler APBD	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				b. Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan			b. Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan					
2.052.05.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honor Penjaga Keamanan kantor/Gedung	12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 526.846.500,00	Honor Penjaga Keamanan kantor/Gedung	12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 538.186.500,00	Reguler APBD	Rp. 11.340.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : penambahan honor

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
2.052.05.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan Lingkungan kantor	12 bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.560.000,00	Kebersihan Lingkungan kantor	12 kuitansi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.560.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						Rp. 4.690.250.300,00				Rp. 4.689.880.998,00	(-) Rp. 369.302,00		
2.052.05.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung Kantor UPTD BPTKP	800 m2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.082.642.000,00	Gedung kantor UPTD BPTKP	1 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.082.642.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Fungsional Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1 unit	UPTD PPP	Rp. 200.000.000,00	Kendaraan Fungsional Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1 unit	UPTD PPP	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.02.007	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	a. Almari Ansp b. Rak Besi c. Filling Cabinet d. AC e. Vertical Blinds f. Kursi Besi g. Teralis h. Selat Ruang i. Kasur j. Almari Laboratorium k. Gordyn	6 buah 0 unit 5 unit 10 unit 7 unit 0 buah 0 m2 0 unit 1 unit 1 unit 100 m	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 257.560.000,00	Pengadaan gedung kantor (BPTKP) Pengadaan gedung kantor (PPP) Perengkapan gedung kantor (Dinas)	5 jenis 4 jenis 3 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 257.560.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Note Book 10. Proyektor 11. Layar/Proyektor 12. CCTV 13. TV LCD LED	4 unit 1 unit 1 unit 0 Paket 8 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 208.700.000,00	Peralatan Gedung kantor (BPTKP) Peralatan Gedung Kantor (Dinas) Peralatan Gedung Kantor (PPP)	6 jenis 12 jenis 4 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 208.700.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				14. Printer Dotmatrix	0 unit									
				15. Mesin Tik	2 unit									
				16. Megaphone	1 unit									
				2. Komputer PC	3 unit									
				3. Printer	10 unit									
				4. Handycam	1 unit									
				5. Kamera Digital	7 unit									
				6. Amplifier	5 unit									
				7. Microphone	10 bush									
				8. Box Speaker	5 unit									
				9. Wireless Sound	3 unit									
2.052.05.01.02.010	Pengadaan Mebleur		100 %	1. Meja Kursi Tamu	8 paket	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 231.137.000,00	Mebleur Kantor (BTRP)	3 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 231.137.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Meja Komputer	5 unit			Mebleur Kantor (Dinas)	3 jenis					
				3. Kursi Komputer	5 unit			Mebleur Kantor (PPP)	11 jenis					
				4. Meja Rapat	40 unit									
				5. Kursi rapat	80 unit									
				6. Meja kerja	18 unit									
				7. Kursi kerja	18 unit									
				8. Lemari pakaian	4 unit									
				9. Tempat tidur	4 unit									
2.052.05.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		100 %	-Pemasangan lantai keramik	1 Paket	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 192.425.000,00	Gedung Kantor Terpelihara (BTRP)	11 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 192.425.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				-Pemeliharaan jendela	25 unit			Gedung Kantor Terpelihara (Dinas)	10 jenis					
				-Pemeliharaan kolam dan aqarium	5 unit			Gedung Kantor Terpelihara (PPP)	1 Paket					
				-Pemeliharaan pintu gerbang dan pagar besi	31 unit									
				-Pemeliharaan taman	4800 m2									
				-Pemeliharaan Jajangan internet	1 Paket									
				-Pengecatan Dinding	1750 m2									
				-Pengecatan dinding pagar	500 m2									

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)	
2.052.05.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan prasarana aparatur	100 %	dan pembatas taman		Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 511.875.000,00			Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 511.875.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				-Perbaikan dan saluran air	1 Paket										
				a. Jasa Service, Suku Cadang, BBM Operasional Roda 4	12 bulan				a. Jasa Service, Suku Cadang, BBM Operasional Roda 4						12 bulan
				b. Jasa Service, Suku Cadang, BBM Operasional Roda 3	12 bulan				b. Jasa Service, Suku Cadang, BBM Operasional Roda 3						12 bulan
2.052.05.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan AC	47 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 30.200.000,00	Perengkapan Gedung Kantor (BPTKP)	1 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 30.200.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
								Perengkapan Gedung Kantor (PPP)	1 jenis						
								Perengkapan kantor terpelihara (Dinas)	2 jenis						
								Peralatan Gedung Kantor Terpelihara (BPTKP)	3 jenis						
2.052.05.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pemeliharaan Mesin Ketik	10 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 28.970.000,00	Peralatan Gedung Kantor Terpelihara (BPTKP)	4 jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 28.970.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. Pemeliharaan Facsimil	2 unit			Peralatan Gedung Kantor Terpelihara (PPP)	7 jenis						
				3. Pemeliharaan Sound System	2 unit										
				4. Pemeliharaan Telepon	15 unit										
				5. Pemeliharaan Komputer	28 unit										
				6. Pemeliharaan Laptop	30 unit										
				7. Pengisian Tabung pemadam kebakaran	4 Kali										
				8. Pemeliharaan printer	13 unit										
				9. Pemeliharaan proyektor	1 unit										
2.052.05.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	a. Pemeliharaan meja	25 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 6.000.000,00	a. Pemeliharaan meja	25 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 6.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				b. Pemeliharaan kursi	25 unit			b. Pemeliharaan kursi	25 unit						

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
2.05.2.05.01.02.042	Rehabilitasi Gedung Berat Gedung Kantor	sarana prasarana aparatur	100 %	c. Pemeliharaan almari	5 unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 940.741.300,00	Rehab Aspal Jalan Masuk BAP Samas	300 m2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 940.371.998,00	(-) Rp. 369.302,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : saving Penambahan : -
				d. Pemeliharaan Filling Cabinet	10 unit			Rehab Asrama BAP Samas	30 m2					
								Rehab bak Fitoplankton BAL Sundak	50 m2					
								Rehab Bak Penderoran BAT Serdangari	130 m2					
								Rehab Garasi Dinas	1 unit					
2.05.2.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Rehab Gudang Dinas	1 unit		Rp. 303.000.000,00	Rehab Gudang Dinas	1 unit		Rp. 303.000.000,00	Rp. 0,00		
				Rehab Konblok Dempnon BAP Samas	300 m2			Rehab Konblok Dempnon BAP Samas	300 m2					
				Rehab Musola Dinas	1 unit			Rehab Musola Dinas	1 unit					
				Rehab Pagat Keilling BAT Beljarjo	322 m2			Rehab Pagat Keilling BAT Beljarjo	322 m2					
				Rehab Ruang Rapat Sidat	1 unit			Rehab Ruang Rapat Sidat	1 unit					
2.05.2.05.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD	100 %	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung keuangan tugas dan fungsi SKPD	1. Dokumen Lakip	1 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 3.500.000,00	1. Dokumen Lakip	1 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 3.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Dokumen PK	1 dokumen			2. Dokumen PK	1 dokumen					
				3. Dokumen RKT	1 dokumen			3. Dokumen RKT	1 dokumen					
2.05.2.05.01.06.017	Penyusunan Laporan keuangan SKPD		100 %	Laporan akhir tahun	1 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 29.500.000,00	Laporan akhir tahun	1 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 29.500.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELAH PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelautan dan tugas dan fungsi SKPD		Laporan prognosis dan semesteran APBD 2015	1 dokumen			Laporan prognosis dan semesteran APBD 2015	1 dokumen					
2.052.05.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD dan Penyusunan Data dan Informasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Penyusunan perencanaan kegiatan dengan kelengkapan dokumen perikanan 2. Dokumen Renja 3. Dokumen RKA 4. Dokumen DPA 5. Dokumen DPPA 6. Buku data pokok perikanan dan kelautan 7. Buku analisis data produksi perikanan dan kelautan	1 tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 120 buku	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 230.000.000,00	1. Penyusunan perencanaan kegiatan dengan kelengkapan dokumen perikanan 2. Dokumen Renja 3. Dokumen RKA 4. Dokumen DPA 5. Dokumen DPPA 6. Buku data pokok perikanan dan kelautan 7. Buku analisis data produksi perikanan dan kelautan	1 tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 120 buku	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 230.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.06.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	FGD monv Laporan monv bulanan Laporan monv semesteran Laporan monv triwulan Laporan tahunan	30 orang x 4 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 40.000.000,00	FGD monv Laporan monv bulanan Laporan monv semesteran Laporan monv triwulan Laporan tahunan	30 orang x 4 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.17	PROGRAM PENGKATAN KEMAMPUAN DAN PENGKAK HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT						Rp. 439.248.900,00				Rp. 439.248.900,00	Rp. 0,00		
2.052.05.01.17.002	Facilitasi Perijinan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300 dokumen	1. Sosialisasi Perijinan tangkap dan budidaya. 2. Fasilitas perijinan tangkap dan budidaya	40 Orang x 4 lok x 2 A 40 Orang x 4 lok x 2 A	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Rp. 89.249.200,00	1. Sosialisasi Perijinan tangkap dan budidaya. 2. Fasilitas perijinan tangkap dan budidaya	40 Orang x 4 lok x 2 A 40 Orang x 4 lok x 2 A	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Rp. 89.249.200,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.17.008	Peningkatan wssdli Sdi di Pu dan laut	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan	300 dokumen	Operasi terpadu pengawasan Operasional speedboat	10 Kali 1 tahun	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul	Rp. 200.000.000,00	Operasi terpadu pengawasan Operasional speedboat	10 kali 1 tahun	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan		
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif		Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif					Lokasi	Anggaran
					(5)	(6)				(7)	(8)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)		
		budidaya		pengembangan perikanan budidaya dan swadaya	300 Orang	dan Kota Yogya			300 Orang							
2.05.2.05.01.17.016	Pengelolaan SDI (Sumber Daya Ikan)	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300 dokumen	Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan	30 orang x 5 lokasi		Rp. 149.999.700,00	Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan	30 orang x 5 lokasi	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Rp. 149.999.700,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
2.05.2.05.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKTIKAN IKLIM						Rp. 50.000.000,00				Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00				
2.05.2.05.01.18.004	Peningkatan Mitigasi Bencana Alam dan Praktekan Iklim Laut	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan praktekkan iklim laut	1530 Orang	Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan Praktekan Iklim	30 orang x 3 kab x 2 lok	gunungkidul, bantul, kulon progo	Rp. 50.000.000,00	Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan Praktekan Iklim	30 orang x 3 kab x 2 lok	Ketek Purwosari Tanjungarsi Temon Tepus Wates	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
2.05.2.05.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN						Rp. 8.970.522.500,00				Rp. 8.970.520.400,00	(-) Rp. 2.100,00				
2.05.2.05.01.20.003	Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Bimtek / magang perikanan budidaya	360 Orang	Kulonprogo, bantul, gunung kidul, sleman, kota yogya	Rp. 1.919.300.000,00	Bantuan budidaya ikan gurami	40 Paket	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Rp. 1.919.300.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
				Facilitasi pengembangan budidaya perikanan	5 Kab / Kota			Bantuan budidaya ikan lele	366 Paket							
								Bantuan budidaya ikan nila	40 Paket							
								Bantuan pompa	36 unit							
								Bimtek / magang perikanan budidaya	30 org x 8 ang x 1 ar							
								Laporan Kegiatan	10 els							
2.05.2.05.01.20.004	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	1. Sampel HPT (Hama Penyakit Ikan)	90 Sampel		Rp. 150.000.000,00	1. Sampel HPT (Hama Penyakit Ikan)	90 Sampel	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
				2. Bimtek CBIB	200 Orang			2. Bimtek CBIB	120 Orang							
				3. Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	10 Sertifikat			3. Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	10 Sertifikat							
2.05.2.05.01.20.015	Pembinaan Mutu Benih dan Induk Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Bimtek CPIB dan Perbenihan	90 Orang		Rp. 200.000.000,00	Bimtek CPIB dan Perbenihan	90 Orang	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		
2.05.2.05.01.20.018	Pelayanan dan Pengendalian Hama Penyakit	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Pengujian Hama dan Penyakit Ikan	250 Sampel		Rp. 110.000.000,00	Pengujian Hama dan Penyakit Ikan	250 Sampel, 3 laporan	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -		

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran					
2.05.2.05.01.20.019	Peningkatan Induk, bibit Unggul BAT	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)		(15)
		Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	1.Benh Ikan (Nila merah, Lela, Mas, Gurami)	16000000 ekor		Rp. 587.396.000,00	1.Benh Ikan (Nila merah, Lela, Mas, Gurami)	16000000 ekor	4 Unit kerja BAT	Rp. 587.396.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD			Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2.Calon Induk (Nila merah, Lela, Mas, Gurami)	7000 kg			2.Calon Induk (Nila merah, Lela, Mas, Gurami)	6500 kg							
2.05.2.05.01.20.021	Kaji Teknologi Pengolahan Pakan Ikan	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	1. Rekomendasi pengembangan bioflok untuk budidaya lele	1 laporan		Rp. 100.000.000,00	1. Rekomendasi pengembangan bioflok untuk budidaya lele	1 jenis	4 Unit kerja BAT	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD			Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Rekomendasi pengembangan bioflok untuk budidaya alternatif pakan alternatif budidaya nila;	1 laporan			2. Rekomendasi pengembangan bioflok untuk budidaya nila;	1 jenis							
2.05.2.05.01.20.024	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau dan Air Laut	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Produksi benih ikan bandeng	1600000 ekor	DIY	Rp. 797.240.000,00	Produksi benih ikan bandeng	1600000 ekor	Sandakan Temon Tepus	Rp. 797.237.900,00	(-) Rp. 2.100,00	Reguler APBD			Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Produksi Larva dan benur udang galah	12000000 ekor			Produksi Larva dan benur udang galah	12000000 ekor							
				Produksi udang	5000 kg			Produksi udang	5000 kg							
2.05.2.05.01.20.025	Pengembangan Sarana Prasarana Perbenihan (DAK)	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	a. Peramanisasi kolam induk BAT Cangkringan	1379 m1		Rp. 5.106.586.500,00	a. Peramanisasi kolam induk BAT Cangkringan	1379 m1	Cangkringan	Rp. 5.106.586.500,00	Rp. 0,00	DAK			Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				b. Peramanisasi kolam calon induk BAT Cangkringan	462 m1			b. Peramanisasi kolam calon induk BAT Cangkringan	462 m1							
				c. Peramanisasi kolam pendederan BAT Cangkringan	270 m1			c. Peramanisasi kolam pendederan BAT Cangkringan	270 m1							
				d. Hatchery benih lele BAT Wonorejo	1 unit			d. Hatchery benih lele BAT Wonorejo	1 unit							
				e. Hatchery pematangan gonad induk lele BAT Wonorejo	1 unit			e. Hatchery pematangan gonad induk lele BAT Wonorejo	1 unit							
				f. Sumur dan instalasi untuk hatchery BAT Wonorejo	1 Paket			f. Sumur dan instalasi untuk hatchery BAT Wonorejo	1 Palet							
				g. Tandon Air untuk Hatchery BAT Wonorejo	1 unit			g. Tandon Air untuk Hatchery BAT Wonorejo	1 unit							
				h. Rumah Pompa BAP Samas	12 m2			h. Rumah Pompa BAP Samas	12 m2							
				i. Peramanisasi kolam BAP Congot	3000 m2			i. Peramanisasi kolam BAP Congot	3000 m2							

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				j. Tandon air laut BAL Sundak	20 m3			J. Tandon air laut BAL Sundak	20 m3				
				k. Kendaran roda 4 pengangkut benih ikan	1 unit			k. Kendaran roda 4 pengangkut benih ikan	1 unit				
				l. kendaran roda 2 untuk k. Kendaran roda 4 dan benih ikan	6 unit			l. kendaran roda 2 untuk k. Kendaran roda 4 dan benih ikan	6 unit				
				m. Generator/ Genset	2 unit			m. Generator/ Genset	2 unit				
				n. Kincir Air BAP Congot	4 unit			n. Kincir Air BAP Congot	4 unit				
				o. Fiber glass BAP Congot	2 unit			o. Fiber glass BAP Congot	2 unit				
				p. Inverter BAL Sundak	1 unit			p. Inverter BAL Sundak	1 unit				
				q. Timbangan lantai digital BAP Congot	1 unit			q. Timbangan lantai digital BAP Congot	1 unit				
2.05.2.05.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP*						Rp. 3.2.138.215.200,00				Rp. 32.018.155.200,00		
2.05.2.05.01.21.009	Pengembangan Perabotan Perikanan	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	Drainase samping jalan masuk	600 m	Kulonprogo	Rp. 30.130.820.000,00	Drainase samping jalan masuk	1 Paket	Kulonprogo	Rp. 30.022.640.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Efisiensi DPA Penambahan : -
				Pembangunan Pagur samping jalan masuk	400 m			Pembangunan Pagur samping jalan masuk	1 Paket				
				Pembangunan Rumah Jaga	108 m2			Pembangunan Rumah Jaga	1 Paket				
				Pembuatan Gapura	1 unit			Pembuatan Gapura	1 unit				
				Pembuatan Jalan masuk	1120 m			Pembuatan Jalan masuk	1 Paket				
				Penerangan Jalan masuk	1 Paket			Pengadaan dan Pemasangan fender	1 Paket				
				Pengadaan dan Pemasangan fender	1 Paket			Pengadaan sayras perkantoran dan peralatan TPI	1 Paket				
				Pengadaan sayras perkantoran dan peralatan TPI	1 Paket			Pengadaan alur pelayanan	1 Paket				
				Pengerukan alur pelayaran	1 Paket								
				SOP pelayanan	1 dokumen								
2.05.2.05.01.21.014	Uji coba teknologi alat pengkapan ikan	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	Uji coba teknologi pengkapan ikan (Pembuatan	1 lokasi	Gunungkidul	Rp. 65.000.000,00	Laporan	1 laporan	Gunungkidul	Rp. 65.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : saving Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				umpan palsu)					1 dokumen					
									100 persen					
									Uji coba peralatan penangkapan teknologi pengklapan ikan (Pembuatan umpan palsu)					
2.052.05.01.21.017	Pembinaan dan Peningkatan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	1. Bimtek ATKAPIN III (Ahl Teknik Kapal Penangkap Ikan)	30 Orang	Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo	Rp. 1.227.620.500,00	1. Bimtek ATKAPIN III (Ahl Teknik Kapal Penangkap Ikan)	30 Orang	Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo	Rp. 1.221.620.500,00	(-) Rp. 6.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Efisiensi Dana : - Sawing sewa sarana mobilitas air Penambahan : -
				2. Bimtek BST (Basic Safety Training)	30 Orang			2. Bimtek BST (Basic Safety Training)	30 Orang					
				3. Pelatihan Awak Kapal 30 GT	75 Orang			3. Pelatihan Awak Kapal 30 GT	75 Orang					
				4. Bimtek Navigasi Kapal Perikanan bagi Perwira Kapal Perikanan	30 Orang			4. Bimtek Navigasi Kapal Perikanan bagi Perwira Kapal Perikanan	30 Orang					
				5. Magang Perikanan Kapal > 30 GT	13 Orang			5. Magang Perikanan Kapal dan Docking	10 Orang					
				6. Magang Penggalaan Pengkondisian dan Docking	10 Orang			6. Bimtek Perawatan dan Perbaikan Mesin Kapal	30 Orang					
				7. Bimtek Perawatan dan Perbaikan Mesin Kapal	30 Orang									
2.052.05.01.21.018	Pengembangan Usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	Asuransi Nelayan	900 Orang	Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo	Rp. 658.524.700,00	Asuransi Nelayan	900 Orang	DIY	Rp. 652.644.700,00	(-) Rp. 5.880.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Sawing dari honorarium harian non PNS Rp 3.000.000 dan belanja alat-alat/perengkapan Rp 2.880.000 Penambahan : -
				Bimtek Diversifikasi Penangkapan Ikan dg alat-alat musin dan jenis ikan	30 Orang			Bimtek Diversifikasi Penangkapan Ikan dg alat-alat musin dan jenis ikan	30 Orang					
				Bimtek Penanganan Ikan diatas kapal	30 Orang			Bimtek Penanganan Ikan diatas kapal	30 Orang					
				Bimtek Penangkapan Ikan dg Gill Net	30 Orang			Bimtek Penangkapan Ikan dg Gill Net	30 Orang					
				Facilitasi Penggalaan Kelompok	20 Orang			Pelatihan Kader Nelayan	30 Orang					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				Nelayan				Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap	1 dok				
				Pelatihan Kader Nelayan	30 Orang			Penyusunan Profil Perikanan Tangkap	1 dok				
				Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap	1 dok								
				Penyusunan Profil Perikanan Tangkap	1 dok								
2.052.05.01.21.022	Peningkatan Pelayanan Pelabuhan	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	Koodiasi sinkronisasi keteliban / keamanan pelabuhan	30 Orang		Rp. 56.250.000,00	Koodiasi dan sinkronisasi keteliban / keamanan pelabuhan	30 Orang	Graubo	Rp. 56.250.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN			Koodiasi dan sinkronisasi keteliban / keamanan pelabuhan	30 Orang		Rp. 1.339.636.950,00						
2.052.05.01.23.003	Geralan Memsyarakatkan Mekan Ikan (gemarikan)	Angka ketersediaan dan konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	1. Kampanye makan Ikan	250 Paket	DIY	Rp. 350.000.000,00	Hari Ikan Nasional	1 ksg/lewn	DIY	Rp. 350.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Sosialisasi Alih Teknologi Informasi (ATI)	1000 Orang			1. Kampanye makan Ikan	250 Paket				
								2. Sosialisasi Alih Teknologi Informasi (ATI)	625 Orang				
2.052.05.01.23.005	Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Angka ketersediaan dan konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	Bimtek Pengolahan produk perikanan bagi masyarakat	30 Orang x 3 hari x 3 angkatan	DIY	Rp. 156.663.775,00	Bimtek Pengolahan produk perikanan angkatan bagi masyarakat	30 Orang x 3 hari x 3 angkatan	DIY	Rp. 156.663.775,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.052.05.01.23.007	Pengawasan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Angka ketersediaan dan konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	1). Pengulan sampel produk hasil perikanan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 250.000.000,00	1). Pengulan sampel produk hasil perikanan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 250.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2). Ekspose hasil pengujian mutu	120 Orang			2). Ekspose hasil pengujian mutu	120 Orang				
				3). Sosialisasi Larangan Penggunaan BTB	150 Orang			3). Sosialisasi Larangan Penggunaan BTB	150 Orang				
								Pemeliharaan alat laboratorium	3 unit				
2.052.05.01.23.008	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Peaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Angka ketersediaan dan konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	Kemitraan antara pembudidaya dengan Pokdahsar	0		Rp. 101.828.000,00	Kemitraan antara pembudidaya dengan Pokdahsar	30 orang x 2 angkatan	DIY	Rp. 101.828.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
2.05.2.05.01.23.010	Promosi Perikanan Dan Kelautan/ Pameran	Angka ketersediaan dan konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	Kemitraan antara Poklahsar dengan Toko oleh oleh/ supermarket	50 Orang			Kemitraan antara Poklahsar dengan Toko oleh oleh/ supermarket	50 Orang					
				Kemitraan antara UKM pengolah dengan Nelayan	30 orang x 2 angkatan			Kemitraan antara UKM pengolah dengan Nelayan	30 orang x 2 angkatan					
				Kemitraan antara UKM pengolah dengan pedagang ikan	30 orang x 2 angkatan			Kemitraan antara UKM pengolah dengan pedagang ikan	30 orang x 2 angkatan					
				Kemitraan antara UKM pengolah dengan pembudidaya ikan	30 orang x 2 angkatan			Kemitraan antara UKM pengolah dengan pembudidaya ikan	30 orang x 2 angkatan					
				Kemitraan antara Poklahsar	30 orang x 2 angkatan			Kemitraan antara Poklahsar	30 orang x 2 angkatan					
2.05.2.05.01.23.016	Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan	Angka ketersediaan dan konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	Kemitraan antara UKM pengolah dengan UKM pengolah lainnya	30 orang x 2 angkatan			Kemitraan antara UKM pengolah dengan UKM pengolah lainnya	30 orang x 2 angkatan					
				1. Pameran	5 kali		Rp. 250.000.000,00	1. Pameran	5 kali	DIY dan luar DIY	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				2. Majalah Swantiramina	4 penerbitan			2. Majalah Swantiramina	4 penerbitan					
				3.Branding produk perikanan unggul	1 produk									
				Sosialisasi akses permodalan bagi nelayan	30 orang x 2 angkatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 106.145.175,00	Peningkatan Kapasitas Poklahsar Pengolah Bandeng	20 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 106.145.175,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -	
				Sosialisasi akses permodalan bagi pemasar hasil perikanan	30 orang x 2 angkatan			Sosialisasi akses permodalan bagi pemasar hasil perikanan	30 orang x 2 angkatan					
				Sosialisasi akses permodalan bagi pembudidaya ikan	30 orang x 2 angkatan			Sosialisasi akses permodalan bagi pembudidaya ikan	30 orang x 2 angkatan					
				Sosialisasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, dan pengolah)	30 orang x 2 angkatan			Sosialisasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, dan pengolah)	30 orang x 2 angkatan					
				Workshop/ Temu	100 Orang			Sosialisasi asuransi bagi	30 orang x 2 angkatan					

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
				koordinasi investasi dan permodalan perikanan				pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, dan pengolah)					
				Workshop/ Temu koordinasi KKM dengan UMM dan perikanan	50 Orang			Workshop/ Temu koordinasi investasi dan permodalan perikanan	100 Orang				
								Workshop/ Temu koordinasi KKM dengan UMM dan perikanan	50 Orang				
2.05.2.05.01.23.017	Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka ketersediaan dan Konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	Pengembangan jaringan pemasaran	2 jenis		Rp. 125.000.000,00	Pengembangan jaringan pemasaran	2 jenis	DIY	Rp. 125.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.24	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR						Rp. 374.000.000,00				Rp. 374.000.000,00		
2.05.2.05.01.24.004	Pengembangan Rekayasa Teknologi Perikanan Budidaya Air Laut dan Air Tawar	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	14 Ha	Rekomendasi : Djroba Rekayasa Perikanan Lobster	1 lokasi		Rp. 74.000.000,00	Rekomendasi : Djroba Rekayasa Perikanan Lobster	1 laporan	Tepus	Rp. 74.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.24.005	Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	14 Ha	Hibridisasi ikan lele untuk pengembangan varietas	1 laporan		Rp. 300.000.000,00	Hibridisasi ikan lele untuk pengembangan varietas	1 laporan	4 unit kerja BAT	Rp. 300.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Hibridasi ikan gurami untuk pengembangan varietas	1 laporan			Domestikasi Ikan Gabus	1 laporan				
				Seleksi individu untuk produksi dan galur harapan varietas ikan nila	1 laporan			Domestikasi Ikan Tawes	1 laporan				
				Seleksi individu untuk produksi dan tabaan KHV ikan mas cangkungan	1 laporan			Hibridasi ikan gurami untuk pengembangan varietas	1 laporan				
								Seleksi individu untuk produksi dan tabaan harapan varietas ikan nila	1 laporan				
2.05.2.05.01.25	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN SUMBERDAYA ALAM						Rp. 130.335.775,00				Rp. 130.335.775,00		
2.05.2.05.01.25.007	Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total terhadap total	0.11 .	1.Sosialisasi/ pembekalan perikanan ikan dan laut	30 Orang		Rp. 52.000.000,00	1.Sosialisasi/ pembekalan perikanan ikan dan laut	30 Orang	DIY	Rp. 52.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
		luas perairan total												
2.05.2.05.01.25.009	Pengembangan Konservasi Ekosistem terhadap total luas perairan Laut dan Pesisir	Rasio lawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan	0,11 .	1. Sosialisasi dalam pengelolaan konservasi mangrove	35 Orang		Rp. 78.335.775,00	1. Sosialisasi dalam pengelolaan konservasi mangrove	35 Orang	Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo	Rp. 78.335.775,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Sarasehan Kemitraan Konservasi Perairan Wediombo	30 Orang				30 Orang					
				Bimtek Identifikasi dan Pemetaan Sdot di DIY	30 Orang				30 Orang					
				Bimtek Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir	30 Orang x 2 angkaban				30 Orang x 2 angkaban					
				Sosialisasi Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir	30 Orang				30 Orang					
2.05.2.05.01.26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						Rp. 343.620.400,00					Rp. 0,00		
2.05.2.05.01.26.001	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh Swadaya	NTP sektor perikanan	116.89 %	Kordinasi penyuluh swadaya	50 Orang		Rp. 49.999.925,00	Kordinasi penyuluh swadaya	50 Orang	DIY	Rp. 49.999.925,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.26.003	Pelatihan Kemitraan Bagi Penyuluh	NTP sektor perikanan	116.89 %	Pelatihan Kemitraan Bagi Penyuluh	30 orang x 3 hari	DIY	Rp. 51.956.250,00	Pelatihan Kemitraan Bagi Penyuluh	30 orang x 3 hari	DIY	Rp. 51.956.250,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.26.006	Pengembangan Jiwa Kabahearian Pada Generasi Muda	NTP sektor perikanan	116.89 %	Gerdas Cernat Kemah Bahari	40 Orang 40 orang x 2 hari		Rp. 65.647.925,00	Kemah Bahari	40 org x 2A	DIP DIY dan Pantai Dini / Ngandong	Rp. 65.647.925,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				Workshop	40 Orang									
2.05.2.05.01.26.007	Penyenggaraan Hari Nusantara	NTP sektor perikanan	116.89 %	Bersih Pantai dan Monev Monevkan Jiwa Cinta Bahari	600 Orang	DIP DIY, Bantul	Rp. 91.016.300,00	Bersih Pantai dan Monev Monevkan Jiwa Cinta Bahari	600 Orang	dinas kelautan dan perikanan DIY, Bantul	Rp. 91.016.300,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.26.008	Penguatan Kelembagaan Pembenh lan	NTP sektor perikanan	116.89 %	Penguatan sistem Kelembagaan Pembenh lan	30 Orang x 2 hari x 2 angkaban	DIY	Rp. 35.000.000,00	Penguatan sistem Kelembagaan Pembenh lan	30 Orang x 2 hari x 2 angkaban	diy	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2.05.2.05.01.26.009	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	NTP sektor perikanan	116.89 %	1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	30 Orang x 3 kab	kab gunungkidul, kab bantul, kab kulon progo	Rp. 50.000.000,00	1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	30 Orang x 3 kab	Gunung Kidul , kes.Grisubo , Bantul kes.Sanden, Kulon Progo kes.Bagong, Gunung Kidul	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.

Kode	Urusan/Program /kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
				2. Fasilitas Jepang Usaha	30 Orang x 3 kab			2. Fasilitas Jepang Usaha	30 Orang x 3 kab	Kec. Tepus, Bantul Kec.Sanden , Kulon Progo				
				3. Sosialisasi Pesisir Berseri	30 Orang x 3 kab			3. Sosialisasi Pesisir Berseri	30 Orang x 3 kab	Kec. Gajahmungkur Kec.Tanjungantri, Kec.Tepus				
Total							Rp. 51.346.687.025,00				Rp. 51.250.947.223,00	(-) Rp. 95.739.802,00		

3.3.2 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan

Program/kegiatan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2015 dialokasikan dan menjadi kesepakatan untuk diterjemahkan dalam bentuk program/kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 521.569.119.025,00. Dana tersebut merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan atas beberapa urusan yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, meliputi :

1. Urusan Tata Cara Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Urusan Kebudayaan;
3. Urusan Pertanahan;
4. Urusan Kelembagaan;
5. Urusan Tata Ruang.

Pelaksanaan kegiatan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan “Nilai dasar” atau “semangat keistimewaan”, meliputi :

1. Hamemayu Hayuning Bawana;
2. Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti;
3. Tahta Untuk Rakyat;
4. Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh;
5. Catur Gatra Tunggal dengan sumbu imajiner dan filosofis;
6. Pathok Negara.

Usulan perubahan kegiatan keistimewaan disusun berdasarkan atas kebutuhan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta pertimbangan dari hasil implementasi kegiatan lapangan terkait dengan progress capaian target pembangunan urusan keistimewaan yang masih memerlukan akslerasi dan optimalisasi kinerja. Secara lebih jelasnya usulan perubahan program/kegiatan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini.

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD														
Kode	Uraian/Program /Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tidak Urur	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran			
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01	Pendidikan													
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga													
1.01.1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*							Rp. 525.038.000,00				Rp. 525.038.000,00	Rp. 0,00	
1.01.1.01.01.15.098	Penggiatan Kapasitas Pendidikan PAUD dalam Pengembangan dan Penguatan Budaya Daerah	Aspek Partisipasi Masyarakat Khas (APK) PAUD	84 %	a. Pengembangan APE tradisional b. Workshop Model Pembelajaran PAUD berbasis Jawa Bagi Pendidik PAUD, c. pengembangan kemampuan berbahasa Jawa dan budi pekerti bagi pendidik paud.	3 kegiatan	DIY	Rp. 525.038.000,00		a. Pengembangan APE tradisional b. Workshop Model Pembelajaran PAUD berbasis Jawa Bagi Pendidik PAUD, c. pengembangan kemampuan berbahasa Jawa dan budi pekerti bagi pendidik paud.	3 kegiatan	DIY	Rp. 525.038.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.15.099	Pengembangan model pengabaian Anak Tradisi Jawa	Aspek Partisipasi Masyarakat Khas (APK) PAUD	84 %	a. buku model pengabaian tradisi Jawa b. sosialisasi	200 buku, 6 orang	DIY	Rp. 0,00		a. buku model pengabaian tradisi Jawa b. sosialisasi	200 buku, 6 orang	DIY	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN							Rp. 2.463.100.000,00				Rp. 2.463.100.000,00	Rp. 0,00	
1.01.1.01.01.16.135	Penggiatan Kapasitas Pendidikan Dasar dalam Pengembangan dan Penguatan Budaya Daerah	Penertatean dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dasar	84,92 %	a. Kegiatan Pembelajaran Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta bagi Guru SMA dan SMK b. Penilaian Sejarah, SIB, SD dan SMP d. Ajang kreasi Seni dan Budaya Jengjing Pendidikan dasar	4 kegiatan	DIY	Rp. 2.463.100.000,00		a. Kegiatan Pembelajaran Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta bagi Guru SMA dan SMK b. Penilaian Sejarah, SIB, SD dan SMP d. Ajang kreasi Seni dan Budaya Jengjing Pendidikan dasar	4 kegiatan	DIY	Rp. 2.463.100.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.17	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HENGGAH*							Rp. 3.565.905.000,00				Rp. 3.565.905.000,00	Rp. 0,00	
1.01.1.01.01.17.166	Pengabdian Masyarakat dalam Pengembangan dan Penguatan Budaya Daerah	Penertatean dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik non formal dan informal	79,71 %	a. Kegiatan Pembelajaran Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta bagi Guru SMA dan SMK b. Penilaian Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta c. Pengklatihan Kapasitas dan Kualitas Guru dan Siswa SMK dalam pengembangan dan pesteranian budaya Daerah d. Pelatihan K	6 kegiatan	DIY	Rp. 3.565.905.000,00		a. Kegiatan Pembelajaran Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta bagi Guru SMA dan SMK b. Penilaian Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta c. Pengklatihan Kapasitas dan Kualitas Guru dan Siswa SMK dalam pengembangan dan pesteranian budaya Daerah d. Pelatihan K	6 kegiatan	DIY	Rp. 3.565.905.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.18	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NON FORMAL DAN INFORMAL*							Rp. 533.080.000,00				Rp. 533.080.000,00	Rp. 0,00	
1.01.1.01.01.18.064	Pengabdian Masyarakat dalam Pengembangan dan Penguatan Budaya Daerah	Pengklatihan dan peningkatan mutu pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. Workshop Penyusunan Acuan Pendidikan Keakslaan Usaha Kecil dan Menengah 2. Pelatihan Pemabah Tradensi bagi Pendidik PNE (PKBLMP)	3 Jenis Kegiatan	DIY	Rp. 533.080.000,00		1. Workshop Penyusunan Acuan Pendidikan Keakslaan Usaha Kecil dan Menengah 2. Berlok pendidikan keakslaan usaha Menengah 3. Pelatihan Pemabah Tradensi bagi Pendidik PNE (PKBLMP)	3 Jenis Kegiatan	DIY	Rp. 533.080.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.27	PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS BUDAYA*							Rp. 5.369.680.000,00				Rp. 5.130.080.000,00	(-) Rp. 239.600.000,00	
1.01.1.01.01.27.007	Pengembangan model pengabaian Anak Tradisi Jawa	Penertatean dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik non formal dan informal	10 %	sekolah model pendidikan berbasis budaya	100 Sekolah	DIY	Rp. 2.880.000.000,00		sekolah model pendidikan berbasis budaya	100 Sekolah	DIY	Rp. 2.880.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.01.1.01.01.27.014	Pengembangan model pengabaian Anak Tradisi Jawa	Penertatean dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik non formal dan informal	10 %	a. Bahan Ajar Pendidikan Karakter b. Digitalisasi media pembelajaran c. Aplikasi media pembelajaran d. Produk video pembelajaran pendidikan karakter	4 kegiatan	DIY	Rp. 2.489.680.000,00		a. Bahan Ajar Pendidikan Karakter b. Digitalisasi media pembelajaran c. Aplikasi media pembelajaran d. Produk video pembelajaran pendidikan karakter	4 kegiatan	DIY	Rp. 2.250.080.000,00	(-) Rp. 239.600.000,00	Efisiensi Kegiatan : tidak termasuk dalam Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Titik Uktur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.02	Kesehatan												
1.02.01	Dinas Kesehatan												
1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
1.02.1.02.01.02.030	Pengaturan dan Prasarana Lemaga Kesehatan Urutan Keseluruhan												
1.02.1.02.01.02.030	Pengaturan dan Prasarana Lemaga Kesehatan Urutan Keseluruhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %		0	Dinas Kesehatan	Rp. 0,00				Rp. 67.056.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.02.1.02.01.19	PROGRAM PROMOSI PENINGKATAN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT*												
1.02.1.02.01.19.033	Pengembangan Obat Tradisional dan Kesehatan Tradisional	Prosentase rumah tangga ber PHBS	48 %		2 kab	Yogyakarta	Rp. 257.861.500,00				Rp. 256.061.500,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.03	Pekerjaan Umum												
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM												
1.03.1.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
1.03.1.03.01.02.035	Pengaturan dan Prasarana Lemaga Kesehatan Urutan Keseluruhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %		0 -	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 0,00				Rp. 818.235.970,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.05	Penataan Ruang												
1.05.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM												
1.05.1.03.01.18	PROGRAM PENATAAN RUANG KESTIMAWAN DIY												
1.05.1.03.01.18.006	Pengawasan dan Pengendalian Ruang Kestimawanan	Prosentase pengendalian kawasan yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %		1 laporan	Kawasan Kestimawanan	Rp. 256.549.000,00				Rp. 246.594.250,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.011	Penyediaan Informasi Penataan Ruang Kestimawanan dan Kadipaten	Prosentase pengendalian kawasan yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %		5 angkatan	Kawasan Kestimawanan	Rp. 200.000.000,00				Rp. 200.000.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.012	Penelitian Pengendalian dan Pengendalian Penataan Ruang di	Prosentase pengendalian dan pengendalian kawasan yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %		5 angkatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi	Rp. 238.221.000,00				Rp. 238.221.000,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Totol Uktur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Satuan-Satuan Ruang Kedimnayan	kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya				Sumberdaya Mineral				Sumberdaya Mineral			Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.014	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Budaya Candi Kolosan	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya	60 %	ROTR Kawasan Budaya Candi Kolosan	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 798.170.000,00	ROTR Kawasan Budaya Candi Kolosan	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 470.579.000,00	(-) Rp. 327.591.000,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.015	Penyusunan MA Raperda PZ Kraton Yogyakarta	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya	60 %	Tesusumnya MA, Raperda PZ Kraton Yk	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 197.844.000,00	Tesusumnya MA, Raperda PZ Kraton Yk	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 197.844.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.016	Penyusunan MA, Raperda PZ Pekualaman	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya	60 %	Tesusumnya MA, Raperda PZ Pekualaman	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 197.844.000,00	Tesusumnya MA, Raperda PZ Pekualaman	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 197.844.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.017	Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotabaru	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya	60 %	Tesusumnya PZ Kawasan budaya kotabaru	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 400.000.000,00	Tesusumnya PZ Kawasan budaya kotabaru	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 374.216.340,00	(-) Rp. 25.783.660,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.018	Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotagode	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya	60 %	Tesusumnya laporan dan tindak lanjut Pengawasan pemerintahan Kawasan budaya Kotagode	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 500.000.000,00	Tesusumnya laporan dan tindak lanjut Pengawasan pemerintahan Kawasan budaya Kotagode	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 471.646.660,00	(-) Rp. 28.353.340,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.019	Penyusunan MA, Raperda Kawasan Imogiri	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya	60 %	Tesusumnya MA, Raperda kawasan Imogiri	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 200.000.000,00	Tesusumnya MA, Raperda kawasan Imogiri	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.021	Penyusunan ROTR Kawasan Budaya Solulman	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya	60 %	Tesusumnya Master Plan Kawasan budaya Solulman dan GDS PNUK	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 300.000.000,00	Tesusumnya Master Plan Kawasan budaya Solulman dan GDS PNUK	1 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.022	Penyusunan Raperda RTW DIT	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan dengan nilai dan fungsi budaya	60 %	1. Terakannya Fasilitas Raperda RTW DIT 2. Penyusunan Roadmap Pemerintahan Tata Kuang	2 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 200.000.000,00	1. Terakannya Fasilitas Raperda RTW DIT 2. Penyusunan Roadmap Pemerintahan Tata Kuang	2 laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.024	Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Penertata pengaturan dan pengembangan kawasan	60 %	Trenedanya Citra Satelit Resolusi Tinggi	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya	Rp. 767.542.000,00	Trenedanya Citra Satelit Resolusi Tinggi	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya	Rp. 767.542.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD Efisiensi : - Efisiensi DFA : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usasan/Program / Kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Sumber Dana	Keterangan
		Titik Uktur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya				Mineral							
1.05.1.03.01.18.029	Penyusunan Rancangan Penyediaan Data Spasial Dasar DIY	Penyediaan pengantar dan strategi yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Dokumen Perencanaan Penyediaan Data Spasial Dasar DIY	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 57.000.000,00	Dokumen Perencanaan Penyediaan Data Spasial Dasar DIY	1 dokumen	DIY	Rp. 57.000.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.030	Penyusunan Rancangan Penyediaan Data Spasial Dasar DIY	Penyediaan pengantar dan strategi yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Rapergab Insektif Dan Disinsektif Dari Pemerintah Daerah DIY Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 160.418.000,00	Rapergab Insektif Dan Disinsektif Dari Pemerintah Daerah DIY Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Rapergab	DIY	Rp. 160.418.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.031	Penyusunan Rancangan Penyediaan Data Spasial Dasar DIY	Penyediaan pengantar dan strategi yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Rapergab NSPK Pemanfaatan Ruang Kawasan Kasultanan/Kadipaten	1 Rapergab	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 179.920.000,00	Rapergab NSPK Pemanfaatan Ruang Kawasan Kasultanan/Kadipaten	1 Rapergab	DIY	Rp. 179.920.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.18.032	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan DIY Unsur Tata Ruang	Penyediaan pengantar dan strategi yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan DIY Unsur Tata Ruang	1 dokumen	kawasan keistimewaan DIY	Rp. 185.120.000,00	Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan DIY Unsur Tata Ruang	1 dokumen	DIY	Rp. 185.120.000,00	Rp. 0,00	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19	PROGRAM PENATAAN KAWASAN KAWASAN PROTEKSI KEISTIMEWAAN *						Rp. 96.182.155.500,00				Rp. 96.937.905.750,00	Rp. 755.750.250,00	
1.05.1.03.01.19.001	Penyusunan DED Penataan Kawasan pada Jalur / Akses Masuk Wilayah DIY	Penyediaan penataan budaya	55,1 %	1. Tersedianya dokumen DED Penataan kawasan pada Jalur Kawasan Jalur Masuk DIY	2 dokumen	akses masuk kordor DIY	Rp. 1.000.000.000,00	1. Tersedianya dokumen DED Penataan kawasan pada Jalur Kawasan Jalur Masuk DIY	2 dokumen	Jalan akses masuk DIY	Rp. 893.130.000,00	(-) Rp. 106.870.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.002	Penyusunan DED Kordor Kawasan Kraton- Krapyak	Penyediaan penataan budaya	55,1 %	Tersedianya dokumen DED Kordor Kawasan Kraton- Krapyak	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 300.000.000,00	Tersedianya dokumen DED Kordor Kawasan Kraton- Krapyak	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rp. 253.478.000,00	(-) Rp. 46.522.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.003	Penataan kawasan cagar budaya (sumber daya wisata) Yogyakarta	Penyediaan penataan budaya	55,1 %	Terkelakarnya Penataan/realisasi kawasan cagar budaya Kraton Yogyakarta (DED + sarpras ketenagalistikan, penataan dan lain-lain)	1 Paket	Kraton	Rp. 5.000.000.000,00	Terkelakarnya Penataan/realisasi kawasan cagar budaya Kraton Yogyakarta (DED + sarpras ketenagalistikan, penataan dan lain-lain)	1 Paket	Kraton	Rp. 4.800.772.000,00	(-) Rp. 199.228.000,00	Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.004	Penataan kawasan perikanan (sumber daya wisata)	Penyediaan penataan budaya	55,1 %	- Tersedianya truk penayu jalan	2 unit	Danurejan	Rp. 34.600.000.000,00	- Tersedianya truk penayu jalan	2 unit	Danurejan	Rp. 33.320.457.655,00	(-) Rp. 2.279.542.345,00	Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.005	Penyediaan lahan di jalur pantai selatan Jawa dan Kawasan Kraton- Krapyak	Penyediaan penataan budaya	55,1 %	- Tersedianya kawasan sumber fosfor	1 Paket	Jalur pantai selatan Jawa dan Kawasan Code	Rp. 42.123.000.000,00	- Tersedianya kawasan sumber fosfor	1 Paket	Jalur pantai selatan Jawa dan Kawasan Code	Rp. 46.549.503.796,00	Rp. 4.426.503.796,00	Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Sema SKPD

Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
Kode	Usasan/Program / Kegiatan	Totol Ukur	Indikator Program	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.05.1.03.01.19.006	Penataan/revitalisasi kawasan cagar budaya Puro Pakualaman	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 Paket			Rp. 2.000.000.000,00	1 Paket	Pakualaman					Rp. 0,00	Reguler APBD		JILS dari 86.000 m2 115.629 m2
1.05.1.03.01.19.007	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Budaya Kotabaru	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 dokumen			Rp. 100.000.000,00	1 dokumen	Gondokusuman					Rp. 89.327.975,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa perplanan Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.008	Penataan/revitalisasi kawasan Kotagede	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 Paket			Rp. 1.600.000.000,00	1 Paket	Kotagede					Rp. 0,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.009	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Puro Pakualaman	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 kegiatan			Rp. 100.000.000,00	1 kegiatan	Pakualaman					Rp. 89.327.975,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa perplanan dinas tidak Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.010	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Budaya Kotagede	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 dokumen			Rp. 300.000.000,00	1 dokumen	Kotagede					Rp. 272.294.572,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.011	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Kotabaru	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 dokumen			Rp. 400.000.000,00	1 dokumen	Gondokusuman					Rp. 349.878.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.012	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Kotabaru	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 dokumen			Rp. 400.000.000,00	1 dokumen	Imogiri					Rp. 367.763.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.013	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Kotabaru	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 kegiatan			Rp. 100.000.000,00	1 kegiatan	Kraton					Rp. 89.327.975,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.014	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Kotabaru	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 dokumen			Rp. 779.620.000,00	1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral					Rp. 686.390.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.015	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Kotabaru	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 dok			Rp. 492.350.000,00	1 dok	DID Peningkatan jalan di kawasan Maliboro					Rp. 492.350.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.018	Penataan/revitalisasi kawasan RTBL kawasan Kotabaru	Penertaaan penataan kawasan budaya		55.1 %	1 dokumen			Rp. 492.350.000,00	1 dokumen	Kabupaten Kulon Progo					Rp. 479.907.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Sisa Lelang Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SKPD : Semua SKPD													
Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Berubah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif				Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Sindangsono	kawasan budaya											Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.019	RTBL Tonogoro	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya RTBL Tonogoro	1 dokumen	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 200.000.000,00	tersusunnnya RTBL Tonogoro	1 dokumen	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 198.207.000,00	(-) Rp. 1.793.000,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.020	Kajian Pengembangan Kawasan Industri Kawasan Sindangsono	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya Kajian Pengembangan Transportasi Kawasan Sindangsono	1 dokumen	kabupaten kulon progo	Rp. 200.000.000,00	tersusunnnya Kajian Pengembangan Transportasi Kawasan Sindangsono	1 dokumen	kabupaten kulon progo	Rp. 193.516.000,00	(-) Rp. 6.484.000,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.021	Masterplan Kawasan Goa Kikendo - Sermo - Wates	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya Masterplan Kawasan Goa Kikendo - Sermo - Wates	1 dokumen	Grimulyo Kabupat Kulon Progo	Rp. 498.814.000,00	tersusunnnya Masterplan Kawasan Goa Kikendo - Sermo - Wates	1 dokumen	Grimulyo Kabupat Kulon Progo	Rp. 488.471.000,00	(-) Rp. 10.343.000,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.022	RTBL Sermo	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya RTBL Sermo	1 dokumen	Pengasih	Rp. 192.260.000,00	tersusunnnya RTBL Sermo	1 dokumen	Pengasih	Rp. 189.639.000,00	(-) Rp. 2.561.000,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.023	RTBL Pesanggrahan Bulu, Pengasih	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya RTBL Pesanggrahan Bulu, Pengasih	1 dokumen	Pengasih	Rp. 150.000.000,00	tersusunnnya RTBL Pesanggrahan Bulu, Pengasih	1 dokumen	Pengasih	Rp. 148.449.000,00	(-) Rp. 1.551.000,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.024	RTBL Lingkungan Makam Gligondo	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya RTBL Lingkungan Makam Gligondo	1 dokumen	kabupaten kulon progo	Rp. 150.000.000,00	tersusunnnya RTBL Lingkungan Makam Gligondo	1 dokumen	kabupaten kulon progo	Rp. 146.748.000,00	(-) Rp. 3.252.000,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.025	Penyusunan Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Patuk	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Patuk	1 dokumen	Patuk	Rp. 370.680.000,00	tersusunnnya Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Patuk	1 dokumen	Patuk	Rp. 203.612.500,00	(-) Rp. 167.067.500,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.026	Penyusunan Masterplan Kawasan Nglanggeran	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya Masterplan Kawasan Nglanggeran	1 dokumen	kabupaten gunungkidul	Rp. 295.080.000,00	tersusunnnya Masterplan Kawasan Nglanggeran	1 dokumen	kabupaten gunungkidul	Rp. 203.481.500,00	(-) Rp. 91.598.500,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.027	Penyusunan Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Karangmojo	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Karangmojo	1 dokumen	Karangmojo	Rp. 370.680.000,00	tersusunnnya Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Karangmojo	1 dokumen	Karangmojo	Rp. 203.612.500,00	(-) Rp. 167.067.500,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.028	Penyusunan Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Girisubo	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Girisubo	1 dokumen	Girisubo	Rp. 370.680.000,00	tersusunnnya Materi Telenis ROTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Girisubo	1 dokumen	Girisubo	Rp. 313.460.000,00	(-) Rp. 57.220.000,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -
1.05.1.03.01.19.029	Penyusunan RTBL Kaw imogiri	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunnnya RTBL Kaw imogiri	1 dokumen	Imogiri	Rp. 300.000.000,00	tersusunnnya RTBL Kaw imogiri	1 dokumen	Imogiri	Rp. 299.575.000,00	(-) Rp. 425.000,00	Efisien Kegiatan : Sisi Leling Efisien DPA : Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

[illegible]

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Titik Uktur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.06.1.06.01.02	Dwajah						Rp. 0,00				Rp. 88.198.460,00					Rp. 88.198.460,00			
1.06.1.06.01.02.025	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH APARATUR	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100 %			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 0,00	1. Realisasi Kantor	3 jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 88.198.460,00					Rp. 88.198.460,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DFA : Penambahan sarana dan prasarana baru
1.06.1.06.01.29	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH KESISTHAWAN*						Rp. 3.997.208.250,00				Rp. 4.147.208.250,00					Rp. 150.000.000,00			
1.06.1.06.01.29.001	Kontribusi dan Pengembangan Program dan Kegiatan Kesisthawan	Peningkatan pencapaian sasaran Rencana Jangka Menengah dengan tujuan urusan kesisthawan	12 %			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 988.097.250,00	1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Kesisthawan	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 988.097.250,00					Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DFA : Penambahan : .
1.06.1.06.01.29.002	Monitoring Dan Pelaksanaan Dana Kesisthawan	Peningkatan pencapaian sasaran Rencana Jangka Menengah dengan tujuan urusan kesisthawan	12 %			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.109.111.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kesisthawan TW I, II, III dan IV	4 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.109.111.000,00					Rp. 0,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DFA : Penambahan : .
1.06.1.06.01.29.003	Penyusunan Rancangan dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan pencapaian sasaran Rencana Jangka Menengah dengan tujuan urusan kesisthawan	12 %			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 900.000.000,00	1. Keputusan Gubernur tentang Brand Baru DY	1 Keputusan Gubernur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.050.000.000,00					Rp. 150.000.000,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DFA : Penambahan : .
1.07	Perhubungan																		
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						Rp. 13.379.216.500,00				Rp. 13.015.149.000,00					(-) Rp. 364.067.500,00			
1.07.1.07.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KESISTHAWAN*																		
1.07.1.07.01.24.001	Penyusunan Rancangan dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan pencapaian sasaran Rencana Jangka Menengah dengan tujuan urusan kesisthawan	27 %			Perkotaan Yogyakarta	Rp. 397.000.000,00	Master Plan Jalur/Zone Angkutan Tradisional	10 dokumen	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 381.100.000,00					(-) Rp. 15.900.000,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DFA : Penambahan : .
1.07.1.07.01.24.002	Penyusunan Rancangan dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan pencapaian sasaran Rencana Jangka Menengah dengan tujuan urusan kesisthawan	27 %			Perkotaan Yogyakarta	Rp. 297.586.500,00	RAPEDA Moda Transportasi Tradisional	1 rancangan pada	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 292.444.000,00					(-) Rp. 5.142.500,00		Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : Sisa Uraian Efisiensi DFA : Penambahan : .

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usasan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totol Uktur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif										
1.07.1.07.01.24.003	Penyusunan Kajian Asai Tujuan dan Sasaran bagi Kawasan Budaya Yogyakarta	Pembelajaran dukungan Transporstasi Transnasional pada kawasan budaya	27 %	Kajian Asal Tujuan Perjalanan di Perediaan Yogyakarta	30 dokumen		Rp. 1.993.630.000,00	Kajian Asal Tujuan Perjalanan di Perediaan Yogyakarta	30 dokumen				Dinas Pembangunan, Perencanaan dan Informatika	Rp. 1.993.630.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.24.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Kawasan Budaya Tolak Basmotor di Kawasan Budaya Yogyakarta	Pembelajaran dukungan Transporstasi Transnasional pada kawasan budaya	27 %	- rambu lafalintas - jalur sepeda - sandaran sepeda	3 Paket	Danurejan Gondokusuman Kecamatan Klaton	Rp. 1.500.000.000,00	- rambu lafalintas - jalur sepeda - sandaran sepeda	3 Paket								(-) Rp. 300.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.24.005	Penataan Transporstasi Perediaan Yogyakarta (Heritage City)	Pembelajaran dukungan Transporstasi Transnasional kawasan budaya	27 %	Penataan Transportasi Perediaan Yogyakarta	1 Paket		Rp. 8.991.000.000,00	Penataan Transportasi Perediaan Yogyakarta	1 Paket				Kota Yogyakarta	Rp. 8.991.000.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.07.1.07.01.24.007	Pengembangan Perediaan Park and Ride di DTY	Pembelajaran dukungan Transporstasi Transnasional kawasan budaya	27 %	terasaunya pengembangan penyediaan park and ride di DTY	1 dokumen	Perediaan Yogyakarta	Rp. 200.000.000,00	terasaunya pengembangan penyediaan park and ride di DTY	1 dokumen					Rp. 156.975.000,00			(-) Rp. 43.025.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.08	Lingkungan Hidup																		
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup																		
1.08.1.08.01.25	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA*						Rp. 2.026.624.600,00							Rp. 2.026.624.600,00			Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.25.001	Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup berkeadilan yang pembangunan berkelanjutan	Pembelajaran dukungan Transporstasi Transnasional kawasan budaya	6,5 %	1. Gerakan Mert Kall	3 Surgai		Rp. 2.026.624.600,00	1. Gerakan Mert Kall	3 Surgai				Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Rp. 2.026.624.600,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
				2. Fasilitas Sarpras Masyarakat Sekitar Sungai	3 Surgai			2. Fasilitas Sarpras Masyarakat Sekitar Sungai	3 Surgai										
1.09	Pertanian																		
1.09.01	Biro Tata Pemerintahan																		
1.09.1.20.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PENDAFTARAN TANAH						Rp. 10.600.000.000,00							Rp. 10.600.000.000,00			Rp. 0,00		
1.09.1.20.01.18.009	Monitoring Evaluasi dan Supervisi Kegiatan yang memiliki Perencanaan di Kabupaten Kota	Bidang S2, PAC dan THD yang memiliki Perencanaan hukum	9653 bidang	Terlaksananya monitoring dan supervisi dalam rangka pengendalian kegiatan lestimewaan bidang pertanian di Kab/Kota	5 laporan	Pemkab/Kota di DIY	Rp. 325.000.000,00	Terlaksananya monitoring dan supervisi dalam rangka pengendalian kegiatan lestimewaan bidang pertanian di Kab/Kota	5 laporan					Rp. 323.800.000,00			(-) Rp. 1.200.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.09.1.20.01.18.010	Penyusunan Sarafat Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Bidang S2, PAC dan THD yang memiliki Perencanaan hukum	9653 bidang	Pendaftaran Sarafat Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN	970 bidang	Kabupaten Bantul	Rp. 711.000.000,00	Pendaftaran Sarafat Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN	967 bidang					Rp. 626.000.000,00			(-) Rp. 85.000.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.09.1.20.01.18.301	Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Bidang S2, PAC dan THD yang memiliki Perencanaan hukum	9653 bidang	Terlaksananya Fasilitas Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah DIY	17 kecamatan	DIY	Rp. 2.603.920.000,00	Terlaksananya Fasilitas Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah DIY	438 desa/ kelurahan				DIY	Rp. 2.603.920.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DFA : - Penambahan : -
1.09.1.20.01.18.302	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan	Bidang S2, PAC dan THD	9653 bidang	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN	200 bidang	DIY	Rp. 3.244.565.000,00	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN	1.202 bidang				DIY	Rp. 3.372.051.000,00			Rp. 127.486.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Tidak Utkr	Target	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kuantitatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)
1.17.1.17.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA						Rp. 53.435.312.525,00				Rp. 45.845.961.325,00 (-) Rp. 7.489.351.200,00			
1.17.1.17.01.15.005	Pengembangan Desa dan Kampung Budaya	Penertase organisasi budaya berkategori maju	1,24 %	1. Sarana Prasarana	395 Desa/Kelurahan	DIY	Rp. 15.469.275.100,00	1. Sarana Prasarana	395 Desa/Kelurahan	DIY	Rp. 14.176.115.800,00 (-) Rp. 1.293.159.300,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. pelatihan	395 Desa/Kelurahan			2. pelatihan	395 Desa/Kelurahan					
				3. penguatan kelembagaan	395 Desa/Kelurahan			3. penguatan kelembagaan	395 Desa/Kelurahan					
				4. Gelar Potensi	395 Desa/Kelurahan			4. Gelar Potensi	395 Desa/Kelurahan					
				5. Promosi & publikasi *	395 Desa/Kelurahan			5. Promosi & publikasi *	395 Desa/Kelurahan					
1.17.1.17.01.15.046	Pendampingan Masyarakat Pemuka Seni dan Budaya	Penertase organisasi budaya berkategori maju	1,24 %	1. Rukunmin Tenaga Pendamping	200 Orang	DIY	Rp. 4.690.000.000,00	1. Rukunmin Tenaga Pendamping	200 Orang	DIY	Rp. 4.690.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Pendampingan Tenaga Seni Budaya	100 Desa/Kelurahan @ 2 Orang			2. Pendampingan Tenaga Seni Budaya	100 Desa/Kelurahan @ 2 Orang					
1.17.1.17.01.15.049	Pengembangan bahasa dan sastra	Penertase organisasi budaya berkategori maju	1,24 %	6.Pertemuan pra Kongres Bahasa Jawa	1 kali	DIY	Rp. 1.500.000.000,00	6.Pertemuan pra Kongres Bahasa Jawa	1 kali	DIY	Rp. 1.500.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				*1. Temu Karya sastra	1 Even			*1. Temu Karya sastra	1 Even					
				2. Majalah Sempulur	3600 lembar			2. Majalah Sempulur	3600 lembar					
				3. Kompetisi Bahasa dan Sastra	5 kali/ta			3. Kompetisi Bahasa dan Sastra	5 kali/ta					
				4. Workshop Rutin	10 kali			4. Workshop Rutin	10 kali					
				5. Pertemuan Saketram Nusantara	1 kali			5. Pertemuan Saketram Nusantara	1 kali					
1.17.1.17.01.15.050	Pelestarian, Pengembangan dan Pelestarian Budaya Luhur di Masyarakat	Penertase organisasi budaya berkategori maju	1,24 %	1. Pentas Wayang Pepadi	9 karya seni	DIY	Rp. 4.692.250.500,00	1. Pentas Wayang Pepadi	9 karya seni	DIY	Rp. 4.692.250.500,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Pentas wayang popodang	3 kali			2. Pentas wayang popodang	3 kali					
				3. Pentas Wayang Wong	6 kali			3. Pentas Wayang Wong	6 kali					
1.17.1.17.01.15.051	Pelestarian Kesenyaan dan Tradisi	Penertase organisasi budaya berkategori maju	1,24 %	1.pembinaan SDM upacara adat	1 kali	DIY	Rp. 5.047.269.500,00	1.pembinaan SDM upacara adat	1 kali	DIY	Rp. 4.962.460.900,00 (-) Rp. 84.808.600,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. adat saran	1 kali			2. adat saran	1 kali					
				3. sarasahan pembinaan penghayat	3 kali			3. sarasahan pembinaan penghayat	3 kali					
				4. festival upacara adat	1 Even			4. festival upacara adat	1 Even					
				5. pawal budaya nusantara	1 kali			5. pawal budaya nusantara	1 kali					
				6. jaman pusaka	1 M			6. jaman pusaka	1 M					
				7. gelar wayang kulit	1 kali			7. gelar wayang kulit	1 M					
				8. inventarisasi dan rehabilitasi pelisaaan	5 kali			8. inventarisasi dan rehabilitasi pelisaaan	5 kali					
1.17.1.17.01.15.053	Pengabdian dan Pengembangan Budaya	Penertase organisasi budaya berkategori maju	1,24 %	*1. Infrastruktur	43 Desa	DIY	Rp. 16.627.216.925,00	*1. Infrastruktur	43 Desa	DIY	Rp. 13.626.676.425,00 (-) Rp. 3.000.540.500,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Sarana Prasarana	43 Desa			2. Sarana Prasarana	43 Desa					
				3. pelatihan	43 Desa			3. pelatihan	43 Desa					
				4. penguatan kelembagaan	43 Desa			4. penguatan kelembagaan	43 Desa					
				5. Gelar Potensi *	43 Desa			5. Gelar Potensi *	43 Desa					
				6. Promosi & publikasi	43 Desa			6. Promosi & publikasi	43 Desa					
1.17.1.17.01.15.054	Pemberian Penghargaan Bagi Pelestar, Penggiat dan Maestro Budaya	Penertase organisasi budaya berkategori maju	1,24 %	*1. Pelestar Wawasan Budaya *	5 Orang/Lemaba	DIY	Rp. 1.367.600.500,00	*1. Pelestar Wawasan Budaya *	5 Orang/Lemaba	DIY	Rp. 1.299.657.700,00 (-) Rp. 68.142.800,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Pelestar Adat dan Tradisi	5 Orang/Lemaba			2. Pelestar Adat dan Tradisi	5 Orang/Lemaba					
				3. Seminar dan Budiyawan	5 Orang/Lemaba			3. Seminar dan Budiyawan	5 Orang/Lemaba					
1.17.1.17.01.15.055	Gelar Wawan budaya tak benda	Penertase organisasi budaya berkategori maju	1,24 %	1. Pentas Wayang Kulit	1 kali	DIY	Rp. 999.000.000,00	1. Pentas Wayang Kulit	1 kali	DIY	Rp. 999.000.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
				2. Penganj Balik	1 kali			2. Penganj Balik	1 kali					
				3. Pameran Keris	1 kali			3. Pameran Keris	1 kali					
1.17.1.17.01.15.057	Pelar Maban Penyelan Sakaten	Penertase organisasi	1,24 %	Pengadnan Tenda untuk sakaten	1 Palet	Dwa Kebudayaan	Rp. 3.042.700.000,00	Pengadnan Tenda untuk sakaten	1 Palet	Dwa Kebudayaan	Rp. 0,00 (-) Rp. 3.042.700.000,00	Reguler APBD		Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Lokasi	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Titik Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif												
1.17.1.17.01.16.113	(PMS)	budaya berkategori maju	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
1.17.1.17.01.16.112	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYA*	Pembinaan dan Pengembangan keajaiban	Penerbitan peningkatan jumlah warisan budaya dan keajaiban yang diistarkan	50,29 %	1. Daftar keajaiban 2. Penyusunan Dokumen Penulisan Sejarah Lokal 3. Pembuatan Film Animasi Keajaiban 4. Pembuatan Prasasti 5. Lawatan Sejarah	4 kali 1 Paket 1 Paket 10 Prasasti 5 kali	Dinas Kebudayaan	Rp. 2.123.070.754,00	1. Daftar keajaiban 2. Penyusunan Dokumen Penulisan Sejarah Lokal 3. Pembuatan Film Animasi Keajaiban 4. Pembuatan Prasasti 5. Lawatan Sejarah 6. Sosialisasi Keistimewaan	1 Paket 1 Paket 1 Paket 10 Prasasti 5 kali	Dinas Kebudayaan	Rp. 2.007.345.754,00	(-) Rp. 115.725.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA :<						

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usuran/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi						
1.17.1.17.01.16.129	Restorasi Warisan Budaya Cagar Budaya	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				18. Gelayar Museum Sejarah Purbakala Pleret	1 kali			2. Waktu Kunjungi Museum	210 kali							
				19. Kontrolasi Museum Batik	1 unit			3. Pelatihan Permusiuman	140 Orang							
				2. Waktu Kunjungi Museum	210 kali			4.Festival Museum	1 kali							
				3. Pelatihan Permusiuman	140 Orang			5. Pertemuan Nasional Museum	1 kali							
				4. Festival Museum	1 kali			6. Festival Barafmus	1 Paket							
				5. Pertemuan Nasional Museum	1 kali			7. Fasilitas Museum	32 museum							
				6. Festival Barafmus	1 Paket			8. Video Profil Museum	1 Paket							
				7. Fasilitas Museum	32 museum			9.Travel Dialog	1 kali							
				9.Travel Dialog	1 kali											
1.17.1.17.01.16.124	Warisan Budaya Nasional dan Cagar Budaya			1. Rehab Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	DIY	Rp. 113.881.256.746,00	1.Rehab Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	DIY	Rp. 1.093.040.000,00	Regular APBD	Rp. 23.684.024.500,00			
				2. Pengadaan Heritage Laser Scanner	1 Paket			2. Pengadaan Heritage Laser Scanner	1 Paket							
				3. Sosialisasi Sader Budaya	1 kali			3. Sosialisasi Sader Budaya	1 kali							
				4. Pelatihan Cagar Budaya	1 kali			4. Pelatihan Cagar Budaya	1 kali							
				5. Pengadaan Display Pameran Cagar Budaya	1 Paket			5. Pengadaan Display Pameran Cagar Budaya	1 Paket							
				6.Promosi Warisan dan Cagar Budaya	1 Paket			6. Promosi Warisan dan Cagar Budaya	1 Paket							
				7. Pembinaan Lahan	3 lokasi			7. Pembinaan Lahan	3 lokasi							
				8. Travel Heritage	3 kali			8. Travel Heritage	3 kali							
				9.Scanner Workstation System	1 Paket			9. Scanner Workstation System	1 Paket							
				1. Workshop Pengkajian Asat Warisan Budaya Dunia	1 kali	Diars Klaten	Rp. 1.128.000.000,00	1. Workshop Pengkajian Asat Warisan Budaya Dunia	1 kali	Diars Klaten	Rp. 1.093.040.000,00	Regular APBD	(-) Rp. 34.960.000,00			
1.17.1.17.01.16.126	Infrastruktur Kawasan Cagar Budaya			2. Buku profil Yogyakarta City of Philosophy	1 Paket			2. Buku profil Yogyakarta City of Philosophy	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket	Mergangsan	Rp. 577.000.000,00	peringgihan trotoar	1 Paket	Mergangsan	Rp. 0,00	Regular APBD	(-) Rp. 577.000.000,00			
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				Bangunan Cagar Budaya/warisan budaya	1 Paket	Kotagede	Rp. 9.650.000.000,00	Bangunan Cagar Budaya/warisan budaya	1 Paket	Kotagede	Rp. 3.750.000.000,00	Regular APBD	(-) Rp. 5.900.000.000,00			
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
1.17.1.17.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KEBAGANAN BUDAYA*						Rp. 59.793.536.900,00				Rp. 59.393.017.900,00		(-) Rp. 400.519.000,00			
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
				peringgihan trotoar	1 Paket			peringgihan trotoar	1 Paket							
1.17.1.17.01.17.046	Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah						Rp. 4.320.914.500,00			DIY	Rp. 4.320.914.500,00	Regular APBD	Rp. 0,00			
				1. Festival dieling anak	1 Even			1. Festival dieling anak	1 Even							
				10. Festival dieling anak	1 Even			10. Festival dieling anak	1 Even							
				11. Partispas dalam HUT RI	1 Even			11. Partispas dalam HUT RI	1 Even							
				12. Keciprak Linas Generasi	1 Even			12. Keciprak Linas Generasi	1 Even							
				13.Gelar Seni Rupa	1 Even			13.Gelar Seni Rupa	1 Even							
				2. Parade lagu	1 Even			2. Parade lagu	1 Even							
				3. wayang coneg	1 Even			3. wayang coneg	1 Even							
				4. Festival Gamelan	1 Even			4. Festival Gamelan	1 Even							
				5. Gelar teater Kokoal	1 Even			5. Gelar teater Kokoal	1 Even							

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Sema SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				7. Gelar Keroncong	1 Even				1 Even									
				8. Peltahan Seni	1 Even				1 Even									
				9. Kompetisi Budaya bagi anak-anak	1 Even				1 Even									
1.17.1.17.01.17.054	Peningkatan dan Pengembangan Program Kebudayaan yang dipaparkan, direalisasikan, dan dikaitkan	15 %		1. Pawai Nelayan Nelayan Budaya	50 Orang		Rp. 157.276.000,00											
1.17.1.17.01.17.055	Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer	15 %		1. FKY	2 Minggu	DIY	Rp. 11.533.605.500,00											
				2. Fasilitas seni tradisional dan kontemporer	5 kali/kota													
1.17.1.17.01.17.056	Promosi dan publikasi seni budaya	15 %		1. Publikasi media elektronik	1 Paket	DIY	Rp. 12.823.792.750,00											
				2. Publikasi media cetak	10 episode													
				3. Talkshow budaya	6 kali													
				4. Enklapod Audio Visual	1 Paket													
				5. Festival Keroncong Kab/kota	5 kali / kota													
				6. Jajaja Sema	12 kali													
				7. Keroncong sayembara TVRI dan RRI	2 Paket													
1.17.1.17.01.17.058	Pembinaan dan Pengembangan Perumahan	15 %		1. Pembuatan dan pengandaian film	1 Paket	DIY	Rp. 9.775.630.000,00											
				2. Penyelenggaraan Bulan Film	1 event													
				3. Remiduran Film	79 kali													
				4. FGD Perintasan Badan Sensor Film Daerah	2 kali													
				5. Kajian pemetaan perikanan DIY	1 dokumen													
				6. Penyusunan regulasi pra rapidasi perikanan	1 dokumen													
1.17.1.17.01.17.059	Gelar Budaya Jogja	15 %		7. Pengadaan buku dan copyright film lokal dan nasional	1 Paket	DIY	Rp. 1.000.000.000,00											
				8. event seni budaya yang dilaksanakan oleh lembaga budaya	5 Even	DIY	Rp. 6.144.725.700,00											
1.17.1.17.01.17.060	Pengembangan even lembaga Pengelut Seni dan Budaya	15 %		1. Duta Seni Budaya	1 Even	DIY	Rp. 11.261.278.500,00											
				10. Buku profil seni	2 profil													
				11. Dokumentasi dan publikasi Seni	1 Even													
				12. Majalah Seni Mata Jendela	1 Even													
				13. Fasilitas Pentas Di TBY	1 Even													
				14. Pameran Seni Rupa	1 Even													
				15. Rekonstruksi Seni	1 Even													
				16. Experimentasi Seni	1 Even													
				17. Konek Musik Orchestra	1 Even													
				18. Pengalaman Karawitan	1 Even													
				19. pengalasan seni tradisi	1 Even													
				2. Festival Keroncong	1 Even													
				20. Penerbitan Buku Gedung-Gedung Karawitan Gaya Yogyakarta	1 dok													
				21. Biennale	1 implan event													

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Anggaran	Lokasi	Target Kinerja Kuantitatif	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				3. Festival Sendoritari	1 Even			3. Festival Sendoritari	1 Even										
				4. Festival Pantomin	1 Even			4. Festival Pantomin	1 Even										
				5. Festival tatar	1 Even			5. Festival tatar	1 Even										
				6. musikalisa sastra	1 Even			6. musikalisa sastra	1 Even										
				7. Gelar Karya Maestro	1 Even			7. Gelar Karya Maestro	1 Even										
				8. Bimbingan Seni	150 peserta			8. Bimbingan Seni	150 peserta										
1.17.1.17.01.17.003	Pengulan Lembaga Penggit Seni dan Budaya	Penertase n lla budaya adat dan tradisi kesopkalan, drevitalisasi, dikultualisasi	15 %		2 kabi/kota	Kota dan Kulon Progo	Rp. 2.756.313.950,00	9. Pentas Seni Sepanjang Tahun terfasiliasinya lembaga penggit seni dan budaya	2 kab / kota	Kota dan Kulon Progo	Rp. 2.731.444.800,00	(-) Rp. 24.869.150,00		Regular APBD					
1.17.1.17.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAJUAN KEMERDEKAAN KEBUDAYA						Rp. 21.785.367.925,00					Rp. 19.105.466.295,00	(-) Rp. 2.679.901.630,00						
1.17.1.17.01.18.011	Misi kebudayaan dalam dan luar negeri dalam rangka ujumalai budaya	Penertase implementasi hasil kesopkalan	15 %		7 kali	Dalam dan Luar Negeri	Rp. 1.115.293.925,00	Pengiriman Misi Kebudayaan ke dalam dan keluar negeri 1. Luar Negeri (Belanda, Inggris, Jepang, Shanghai, Italia, Afrika Selatan, Korea)	7 kali	Dalam Negeri Luar Negeri	Rp. 9.829.105.525,00	(-) Rp. 1.286.188.400,00	Regular APBD						
1.17.1.17.01.18.013	Gelar Pelang Budaya	Penertase implementasi hasil kesopkalan	15 %		3 kali		Rp. 2.000.000.000,00	Pengiriman Misi Kebudayaan ke dalam dan keluar negeri 2. Dalam Negeri (Jakarta, Bandung, Bali)	3 kali	DIY	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD						
				1. Partispasi event tingkat nasional	5 event			1. Partispasi event tingkat nasional	5 event										
1.17.1.17.01.18.015	Membangun Kemitraan dengan Indansi	Penertase implementasi hasil kesopkalan	15 %		1 kali	DIY & Luar Daerah	Rp. 3.602.074.000,00	1. Festival Dalam Anak	1 kali	DIY & Luar Daerah	Rp. 3.602.074.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD						
				2. Parade Cida Lapi Daerah	1 kali			2. Parade Cida Lapi Daerah	1 kali										
				3. Pawai Seni	1 kali			3. Pawai Seni	1 kali										
				4. HUT Ganjar	1 kali			4. HUT Ganjar	1 kali										
				5. Hadesing Negeri	1 kali			5. Hadesing Negeri	1 kali										
				6. Gelar Seni Pertunjukan (GSP)	1 kali			6. Gelar Seni Pertunjukan (GSP)	1 kali										
				7. LASQI	1 kali			7. LASQI	1 kali										
1.17.1.17.01.18.016	Membangun Kemitraan bilateral	Penertase implementasi hasil kesopkalan	15 %		1 kali	Luar Negeri	Rp. 1.946.300.000,00	1. Shanghai (RRC)	1 kali	Luar Negeri	Rp. 505.000.000,00	(-) Rp. 1.441.300.000,00	Regular APBD						
				Kesepakatan dengan; 1. Shanghai (RRC)	1 kali			Kesepakatan dengan; 1. Shanghai (RRC)	1 kali										
				Kesepakatan dengan; 2. Frankfurt (Jerman)	1 kali			Kesepakatan dengan; 2. Frankfurt (Jerman)	1 kali										
1.17.1.17.01.18.017	Membangun Kemitraan dengan lembaga penelitian Budaya	Penertase implementasi hasil kesopkalan	15 %		1 kali	DIY	Rp. 3.121.700.000,00	1. Komunitas Jepangang (Jogja Japan Week)	1 kali	DIY	Rp. 3.169.386.770,00	Rp. 47.586.770,00	Regular APBD						
				1. Komunitas Jepangang (Jogja Japan Week)	1 kali			1. Komunitas Jepangang (Jogja Japan Week)	1 kali										
				2. Sanggar Tari (kegiatan)	5 kali			2. Sanggar Tari (kegiatan)	5 kali										

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

Nama SPMD : Semua SPMD														
Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Berubah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan	
		Tolak Ukur	Target		Indikator Kinerja	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi				Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Kepigawahan, dan Persaudia													
1.20.01	Biro Administrasi Pembangunan													
1.20.1.20.01.02	PROGRAM Peningkatan Kualitas Layanan Prasarana Aparatur						Rp. 2.250.000.000,00					Rp. 5.854.430.000,00		
1.20.1.20.01.02.020	Pengaturan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelaksana Ususan Keselamatan Prasarana Aparatur	Presentase penyediaan dan pemeliharaan prasarana aparatur	100 %	-	Biro Administrasi Pembangunan		Rp. 0,00	1. Kendaraan Roda Empat 2. Almarit Asap 3. Rak Dokumen 4. Komputer 5. Notebook 6. Printer 7. Meubelar 8. Alat Studio	1 unit 6 unit 10 unit 5 unit 5 unit 5 unit 3 jenis 4 unit	Biro Administrasi Pembangunan	Rp. 431.338.000,00	Reguler APBD	Efisien Kejelasan : - Efisiensi DPA : Penambahan : Pengurangan : Penambahan 8 Jenis Barang	
1.20.1.20.01.30	PROGRAM ANALISIS KEMAMPUAN PEMBAHANGUNAN						Rp. 300.000.000,00					Rp. 265.940.000,00 (-) Rp. 39.060.000,00		
1.20.1.20.01.30.067	Konsultasi dan Penasihatannya bagi Kawasan Goberntage	Presentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dihasilkan dalam keijaksanaan	36,45 %	Dokumen usulan pendataan cagar budaya	Batangk Gedung sari Girmulyo Kertajama Kresna Kretek Patuk Prabamban Tepus		Rp. 300.000.000,00	Dokumen usulan pendataan cagar budaya	1 dokumen	Batangk Gedung sari Girmulyo Kertajama Kresna Kretek Patuk Prabamban Tepus	Rp. 265.940.000,00 (-) Rp. 39.060.000,00	Reguler APBD	Efisien Kejelasan : - Efisiensi DPA : Penambahan : Pengurangan :	
1.20.1.20.01.26	PROGRAM PENYERAPAN PERUNDANGAN						Rp. 750.000.000,00					Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.26.029	Penyediaan rancangan produk hukum keselamatan	Presentase rancangan produk hukum terpelaksnaan	100 %	Cetakan Peraturan Daerah Istimewa Dalam Bentuk Buku	Badan Kepegawaian Daerah Kertajama dan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klatihan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Bercasa Daerah Badin Karang dan Larban Badin Perencanaan Pembangunan Daerah Badin Perpusakaan dan Perpustakaan Biro Administrasi Rakyat dan Kemasyarakatan		Rp. 400.000.000,00	Cetakan Peraturan Daerah Istimewa Dalam Bentuk Buku	5100 buku	Badan Kepegawaian Daerah Kertajama dan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klatihan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Bercasa Daerah Badin Karang dan Larban Badin Perencanaan Pembangunan Daerah Badin Perpusakaan dan Perpustakaan Biro Administrasi Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 400.000.000,00	Reguler APBD	Efisien Kejelasan : - Efisiensi DPA : Penambahan : Pengurangan :	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Totolc Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.201.20.01.26.100	Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Istimewa	Penyusunan produk hukum yang dilaksanakan	100 %	Pembahasan Raperda Istimewa di DPRD	5 Raperda	Biro Administrasi Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Pengawasan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Kesejahteraan Masyarakat dan Protokol Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial dan Rumah Sakit Grihasa Badan Kependidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sekretariat	Rp. 350.000.000,00	Pembahasan Raperda Istimewa di DPRD	5 Raperda	Badan Kependidikan dan Kebudayaan Kerjasama dan Penanaman Modal Kerjasama dengan Bangsa dan Perindugan Masyarakat Pengian dan Penyalutan Kebijakan Lngkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan dan Pemmpuan dan Badan Perencanaan Bencana Daerah Badan Perencanaan dan Luffan Badan Perencanaan Pembangunan	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Reguler APBD	Effisien Kegiatan : - Efisien DFA : Perubahan : -			

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Uraian / Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan		
		Totol Ukur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
						Daerah Badan Pengelolaan dan Asip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Daerah Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Perwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Kuanggaan dan Aset Dinas Pertanian, Perikanan dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Kultur, Bahasa, Komunikasi dan Informatika Dinas Ketenagakerjaan, Perlindungan Koperal dan Masyarakat Kecil Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Koperasi dan Koperasi Transmigrasi Inspektoriat Dinas Statistik Graha Satuan Polisi Pemang Paaja Sektor DPRD					Penyusunan Rapergab Uraian Kestimawaan	5 Rapergab			Daerah Badan Pengelolaan dan Asip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Daerah Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Perwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Kuanggaan dan Aset Dinas Pertanian, Perikanan dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Kultur, Bahasa, Komunikasi dan Informatika Dinas Ketenagakerjaan, Perlindungan Koperal dan Masyarakat Kecil Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Koperasi dan Koperasi Transmigrasi Inspektoriat Dinas Statistik Graha Satuan Polisi Pemang Paaja Sektor DPRD						
1.20.1.20.01.29	PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK DAERAH						Rp. 1.650.000.000,00				Rp. 1.650.000.000,00				Rp. 0,00						
1.20.1.20.01.29.120	Penggiatan Budaya Pemerintahan	85 %				Biro Organisasi	Rp. 550.000.000,00	1. Internalisasi budaya pemerintahan di Kab/Kota	800 PMS, 5 Kab/Kota					Rp. 539.960.000,00	(-) Rp. 10.940.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Efisiensi DPA : Penambahan : .				
		Penertaaan kemampuan yang efektif dan efisien						2. Pelatihan fasilitator budaya pemerintahan di Kab/Kota	25 Orang												
								3. Fasilitas agen perubahan Budaya pemerintahan SKPD	132 PNS												
								4. Pni Saktiya	3000 buah												
1.20.1.20.01.29.121	Review Urutan Tugas Jabatan Perangkat Daerah	85 %				Biro Organisasi	Rp. 400.000.000,00	Urutan Tugas Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Penda DIY	34 SKPD					Rp. 389.960.000,00	(-) Rp. 10.940.000,00	Reguler APBD	Efisiensi Efisiensi DPA : Penambahan : .				
		Penertaaan kemampuan yang efektif dan efisien																			

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Semua SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	Indikator Program		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Lokasi	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Titik Uktur	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif									
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.22.01	Badan Koordinasi dan Pemenuhan dan Masyarakat																	
1.22.1.11.01.15	PROGRAM PENGINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT						Rp. 135.000.000,00							Rp. 135.000.000,00				
1.22.1.11.01.15.012	Rehabilitasi Gedung Arsyung	Rehabilitasi Gedung Arsyung	25,18 %	Sosialisai brand Jogja Betawa dan Implementasinya di Kabupaten Kulawi dengan karakter kearifannya.	8 lokasi	2 lokasi aseng- aseng: 1. Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunung Kidul	Rp. 135.000.000,00		8 lokasi	2 lokasi aseng- aseng: 1. Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunung Kidul	Rp. 135.000.000,00	Rp. 0,00	Regular APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -				
1.24	Kearifan																	
1.24.01	Badan Perputakaan dan Arsip Daerah																	
1.24.1.24.01.18	PROGRAM KEMERDEAYAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI						Rp. 1.210.000.000,00							Rp. 1.210.000.000,00				
1.24.1.26.01.18.002	Pengolahan Arsip	Bertambahnya penerbitan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Fungsional	388 m3	Badan Perputakaan dan Arsip Daerah	Rp. 615.000.000,00							Rp. 615.000.000,00				
				Kamperisasi	8 kg													
				Laminasi	1270 Berkes													
				Menghialngkan asan	1270 Berkes													
				Restorasi	1500 Berkes													
				Rewashing Film/Micro Film	15 reel													
1.24.1.26.01.18.003	Penyelamatan dan Pelelisan Bahan Perputakaan dan Arsip	Bertambahnya penerbitan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Altin media (CD) ansp Kraton Yogyakarta	20500 lembar	Badan Perputakaan dan Arsip Daerah	Rp. 400.000.000,00							Rp. 400.000.000,00				
				Altin media (CD) ansp Puro Pakualaman	20000 lembar													
				Entry data ansp tektual Kraton Yogyakarta	20500 lembar													
				Entry data ansp tektual Puro Pakualaman	20000 lembar													
1.24.1.26.01.18.004	Pendauran dan Akuisisi Bahan Perputakaan dan Arsip	Bertambahnya penerbitan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Akuisisi Arsip sebelum Tahun 1945	30 lembar foto	Badan Perputakaan dan Arsip Daerah	Rp. 195.000.000,00							Rp. 195.000.000,00				
				Akuisisi buku kuno	137 deklempr													
				Laporan penelitian kolekt buku dan ansp kuno/lingka	1470 dokumen													
				Naskah Alth Alakira	447 lembar													
				Penelitian ansp ensp merapi 1945	5 instansi													
1.25	Komunikasi dan Informaika																	
1.25.01	Dinas Kehutangan, Komunikasi dan Informaika																	
1.25.1.07.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNITASI MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA						Rp. 14.307.428.500,00							Rp. 14.307.428.500,00				
1.25.1.07.01.15.019	Pengembangan arsip digital DIY berbasis Digital	Penggiatan arsip sebagai sumber informasi	12 uran/berdang	1. Media Informasi Digital 2. Materi Tayangan Informasi Digital 3. Perangkat Perodung Sistem Informasi 4. CCTV	4 Paket	Dinas Kehutangan, Komunikasi dan Informaika	Rp. 14.307.428.500,00											
1.25.02	Biro Urusan, Humas dan Protokol																	

LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015

Nama SKPD : Sema SKPD

Kode	Usulan/Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Lokasi	Anggaran	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Titik Ukur	Indikator Program	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Lokasi										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.25.1.2.02.02.18	PROGRAM KEDASARAN KEMERDEKAAN DENGAN HAS MEDIA						Rp. 350.000.000,00					Rp. 350.000.000,00			Rp. 0,00		
1.25.1.2.02.02.18.001	Penerbitan informasi branding Remenintah Daerah yang di dalam Rangka media massa	100 %					Rp. 350.000.000,00					Rp. 350.000.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2	Pilihan																
2.04	Perwakilan																
2.04.01	Dinas Perwakilan																
2.04.2.04.01.17	PROGRAM KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN						Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00		
2.04.2.04.01.17.021	Atorasi Seni Tradisi Budaya untuk Kepemimpinan	Jumlah pdaawis					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
1. Karnaval Anchoing, beak wisata dan sepeda Wisata	1. Karnaval Anchoing, beak wisata dan sepeda Wisata	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
10. Pentas Seni 1. Maharam	10. Pentas Seni 1. Maharam	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
11. Pentas Seni Lupa tahun	11. Pentas Seni Lupa tahun	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
12. Pelan Wisata Budaya Kota Gede	12. Pelan Wisata Budaya Kota Gede	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
13. Festival Kuliner Kelurang	13. Festival Kuliner Kelurang	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
14. Upacara Tradisional Bakaek	14. Upacara Tradisional Bakaek	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
15. Festival Gendag Sap Wisata	15. Festival Gendag Sap Wisata	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
16. Festival Nyon Berling	16. Festival Nyon Berling	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
17. Festival Budaya Nginggaran	17. Festival Budaya Nginggaran	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
18. Festival Perkuat	18. Festival Perkuat	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
19. Festival Budaya Manoth	19. Festival Budaya Manoth	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
2. Pagelaran seni di Candi Ratu Boko	2. Pagelaran seni di Candi Ratu Boko	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
20. Fasilitas Labuhan 15 Suro di Pantai Parangtritis	20. Fasilitas Labuhan 15 Suro di Pantai Parangtritis	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
21. Fasilitas Upacara Tradisional Rabu Pungkean	21. Fasilitas Upacara Tradisional Rabu Pungkean	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
22. Fasilitas Event Sepeda Jelajah Wisata Tahun	22. Fasilitas Event Sepeda Jelajah Wisata Tahun	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
23. Penyelenggaraan Festival Alun-alun selatan Kraton Yogyakarta	23. Penyelenggaraan Festival Alun-alun selatan Kraton Yogyakarta	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
24. Penyelenggaraan Festival Jajanan pasar dan minuman tradisional untuk Hotel di DIY	24. Penyelenggaraan Festival Jajanan pasar dan minuman tradisional untuk Hotel di DIY	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
25. Fasilitas Festival Taman Seni Kraton Yogyakarta	25. Fasilitas Festival Taman Seni Kraton Yogyakarta	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
26. Atraksi kesenian di puro pakualeman	26. Atraksi kesenian di puro pakualeman	0 Atraksi kesenian (Paket : 20 kali)					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
27. Pentas Atraksi Kesenian di Bandara dan TTC	27. Pentas Atraksi Kesenian di Bandara dan TTC	0 Atraksi kesenian (Paket : 100 kali , Cokelan : 46 kali)					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
28. Atraksi Kesenian di Kawasan Maliboro	28. Atraksi Kesenian di Kawasan Maliboro	0 Atraksi kesenian (Paket : 20 kali)					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
29. Atraksi kesenian di Kawasan kota gede	29. Atraksi kesenian di Kawasan kota gede	0 Atraksi kesenian (Paket : 4 kali)					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
3. Penyelenggaraan Jagja Bile Heritage	3. Penyelenggaraan Jagja Bile Heritage	1 kegiatan					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
30. Atraksi Kesenian di Kawasan Semo, Suroboyo, Bangorow, Gajah (Kali, Kulon Progo)	30. Atraksi Kesenian di Kawasan Semo, Suroboyo, Bangorow, Gajah (Kali, Kulon Progo)	0 Atraksi kesenian (Paket : 12 kali)					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -
31. Atraksi Kesenian di Kawasan Pantai Selatan dan Imogiri (Kedapuri Barat)	31. Atraksi Kesenian di Kawasan Pantai Selatan dan Imogiri (Kedapuri Barat)	0 Atraksi kesenian (Paket : 12 kali)					Rp. 14.524.050.000,00					Rp. 14.524.050.000,00			Rp. 0,00	Reguler APBD	Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : - Penambahan : -

**LAPORAN PERUBAHAN
TAHUN 2015**

[illegible]

BAB 4 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 tersebut disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015.

.

Yogyakarta, Juli 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X